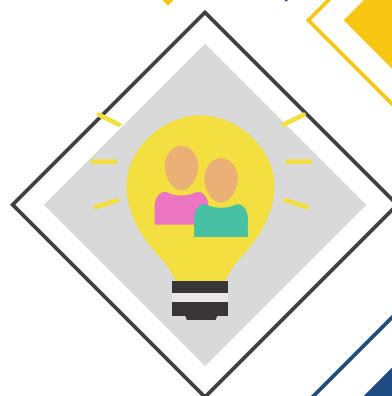




PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**



*Kurija Bagah
Rakyat Ceudah
Lhokseumawe Meugah*

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
2. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
3. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagu Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);

23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
24. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Bab I Pendahuluan
 2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota Lhokseumawe
 3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota Lhokseumawe
 4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe
 5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota Lhokseumawe
 6. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 7. Bab VII Penutup
- (3) Uraian secara rinci RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan RKPK penjabaran tahun ke-4 (empat) dari RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRK, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan kota.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
- (3) RKPD Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah Tahun 2026;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBK Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2026:

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRK.
2. Perangkat Daerah menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan DPRK.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPK;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRK berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRK maka RKPK Tahun 2026 dapat dilakukan penyesuaian;
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPK merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRK;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRK;
- f. penyesuaian RKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Wali Kota;
- g. RKPK Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2026 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RKPK DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penambahan program baru dalam RKPK dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPK.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPK.
- (3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPK ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan/pertimbangan dalam penyusunan RKPK periode tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
05 Rabiul Awal 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Agustus 2025 M
05 Rabiul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 27

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penyusunan	I-8
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE .	 II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ...	II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah	
Administrasi	II-1
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.1.4. Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi	II-4
2.1.1.1.6. Kondisi Klimatologi	II-5
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-8
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung	
Lingkungan Hidup	II-18
2.1.1.4.1. Daya Dukung Pangan	II-19
2.1.1.4.2. Daya Dukung Air	II-21
2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan	
Kemandirian Pangan.....	II-23
2.1.1.5.1. Indeks Ketahanan Pangan	II-23
2.1.1.5.2. Prevalensi Ketidacukupan	
Konsumsi Pangan	II-24
2.1.1.5.3. Akses Rumah Tangga Terhadap	
Konsumsi Air Minum	II-25
2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-26
2.1.1.6.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup...	II-26
2.1.1.6.2. Timbulan Sampah Terolah di	
Fasilitas Pengolahan Sampah	II-27
2.1.1.6.3. Proporsi Rumah Tangga dengan	
Layanan Penuh Pengumpulan	
Sampah	II-28
2.1.1.6.4. Rumah Tangga Dengan Akses	
Sanitasi Aman	II-29
2.1.1.7. Resilensi Terhadap Bencana dan	
Perubahan Iklim	II-29
2.1.1.7.1. Indeks Risiko Bencana.....	II-29
2.1.1.7.2. Indeks Ketahanan Daerah	II-31
2.1.1.8. Demografi	II-32

2.1.1.8.1.	Jumlah Penduduk	II-32
2.1.1.8.2.	Kepadatan dan Persebaran Penduduk	II-32
2.1.1.8.3.	Pertumbuhan Penduduk.....	II-33
2.1.1.8.4.	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-34
2.1.1.8.5.	Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-35
2.1.1.8.6.	Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun Kedepan	II-36
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II-37
2.1.2.1.1.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-37
2.1.2.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-40
2.1.2.1.3.	Distribusi Persentase PDRB	II-41
2.1.2.1.4.	PDRB Per Kapita	II-42
2.1.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-42
2.1.2.1.6.	Indeks Gini	II-44
2.1.2.1.7.	Tingkat Kemiskinan	II-45
2.1.2.1.8.	Indeks Pembangunan Manusia	II-46
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II-48
2.1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup	II-48
2.1.2.2.2.	Indeks Keluarga Sehat	II-48
2.1.2.2.3.	Prevalensi Stunting	II-49
2.1.2.2.4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-50
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-51
2.1.2.3.1.	Rata-rata Lama sekolah	II-51
2.1.2.3.2.	Harapan Lama Sekolah.....	II-51
2.1.2.3.3.	Angka Literasi/Numerasi.....	II-52
2.1.2.3.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-53
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-54
2.1.2.4.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	II-54
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-54
2.1.2.5.1.	Fokus Seni Budaya	II-54
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	II-56
2.1.2.6.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	II-56
2.1.2.6.2.	Indeks Perlindungan Anak.....	II-56
2.1.2.6.3.	Indeks Ketimpangan Gender	II-57
2.1.2.6.4.	Indeks Pembangunan Gender	II-58
2.1.2.6.5.	Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-58
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-59
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia ...	II-59
2.1.3.1.1	Angka Ketergantungan	II-59
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-60
2.1.3.2.1.	Rasio PDRB Perdagangan	II-60

2.1.3.2.2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-61
2.1.3.2.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	II-61
2.1.3.2.4	Rasio Kewirausahaan.....	II-61
2.1.3.2.5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	II-62
2.1.3.2.6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian.....	II-63
2.1.3.2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ...	II-63
2.1.3.2.8	Indeks Inovasi Daerah	II-64
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..	II-66
2.1.3.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	II-66
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-67
2.1.3.4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-67
2.1.3.5.	Integritas Ekonomi Domestik dan Global	II-68
2.1.3.5.1	Pembentukan Modal tetap Bruto	II-68
2.1.3.5.2	Ekspor Barang dan Jasa.....	II-68
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Petumbuhan Ekonomi	II-69
2.1.3.6.1	Indeks Infrastruktur	II-69
2.1.3.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-69
2.1.3.6.3	Presentase Desa Mandiri.....	II-70
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-73
2.1.3.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB..	II-73
2.1.3.7.2	Tingkat Inflasi.....	II-74
2.1.3.7.3	Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB	II-75
2.1.3.7.4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	II-76
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-76
2.2.3.11	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II-76
2.1.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-76
2.1.4.1.2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-77
2.1.4.1.3	Indeks Reformasi Hukum	II-79
2.1.4.1.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-79
2.1.4.1.5	Indeks Pelayanan Publik.....	II-79
2.1.4.1.6	Indeks Integritas Nasional.....	II-80
2.1.4.2	Berkeadilan, Keamanan Hukum Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substantial	II-81
2.1.4.2.1	Persentase Penegakan Perda.....	II-81
2.1.4.2.2	Presentase Capaian Aksi HAM	II-81
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-82

2.1.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah.....	II-82
2.1.4.3.2.	Indeks Pembangunan Syariah	II-83
2.1.4.4	Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ..	II-84
2.1.4.4.1	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..	II-84
2.1.4.4.1.1	Pendidikan.....	II-84
2.1.4.4.1.2	Kesehatan.....	II-89
2.1.4.4.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-114
2.1.4.4.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-121
2.1.4.4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-123
2.1.4.4.5	Sosial.....	II-128
2.1.4.4.6	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-132
2.1.4.4.6.1	Tenaga Kerja.....	II-132
2.1.4.4.6.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-134
2.1.4.4.6.3	Pangan.....	II-137
2.1.4.4.6.4	Pertanahan	II-138
2.1.4.4.6.5	Lingkungan Hidup	II-140
2.1.4.4.6.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-143
2.1.4.4.6.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-146
2.1.4.4.6.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-149
2.1.4.4.6.9	Perhubungan	II-151
2.1.4.4.6.10	Komunikasi dan Informatika.....	II-157
2.1.4.4.6.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-158
2.1.4.4.6.12	Penanaman Modal	II-160
2.1.4.4.6.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-162
2.1.4.4.6.14	Statistik.....	II-163
2.1.4.4.6.15	Persandian.....	II-164
2.1.4.4.6.16	Kebudayaan.....	II-165
2.1.4.4.6.17	Perpustakaan.....	II-166
2.1.4.4.6.18	Kearsipan	II-169
2.1.4.4.7	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-169
2.1.4.4.7.1.	Pariwisata	II-169
2.1.4.4.7.2.	Pertanian	II-171
2.1.4.4.7.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-172
2.1.4.4.7.4.	Perdagangan	II-173
2.1.4.4.7.5.	Perindustrian.....	II-174
2.1.4.4.7.6.	Kelautan dan Perikanan	II-175
2.1.4.4.8	Aspek Penunjang Urusan.....	II-175
2.1.4.4.8.1.	Perencanaan Pembangunan.....	II-175
2.1.4.4.8.2.	Keuangan	II-178
2.1.4.4.8.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-181

2.1.4.4.8.4.	Penelitian dan Pengembangan	II-185
2.1.4.4.8.5.	Pengawasan	II-186
2.1.4.4.8.6.	Sekretariat DPRK.....	II-188
2.1.4.4.8.7.	Sekretariat Daerah.....	II-189
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai Tahun 2024...	II-189
2.2.1	Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe	II-189
2.2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-189
2.2.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-190
2.2.1.3.	Indeks Pembangunan Manusia	II-190
2.2.1.4.	Tingkat Kemiskinan	II-190
2.2.1.5.	Rasio Gini	II-191
2.2.2	Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keungan.....	II-191
2.2.2.1.	Realisasi Pendapatan.....	II-192
2.2.2.2.	Realisasi Belanja.....	II-193
2.2.2.3.	Realisasi Pembiayaan.....	II-195
2.2.3	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi RPK Lhokseumawe	II-196
2.2.3.1.	Metode Evaluasi.....	II-196
2.2.3.2.	Hasil Evaluasi Capain Kinerja dan Anggaran	II-197
2.2.3.3.	Tantangan dan hambatan Pencapaian Kinerja	II-201
2.2.3.4.	Konsisten Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024	II-202
2.2.3.5.	Capain Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe	II-356
2.2.3.6.	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kota Lhokseumawe	II-363
2.2.3.7.	Capaian Indikator Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024	II-376
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	II-401
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe	II-401
2.3.2.1.	Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	II-401
2.3.2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih Berada di Bawah Rata-Rata Aceh dan Nasional.....	II-401
2.3.2.3.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal.....	II-404

2.3.2.4.	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	II-410
2.3.2.5.	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan	II-412
2.3.2.6.	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum Optimal	II-413
2.3.2	Isu Strategis	II-415
2.3.2.1.	Isu Strategis Kota Lhokseumawe	II-415
2.3.2.1.1.	Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita...	II-416
2.3.2.1.2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	II-416
2.3.2.1.3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	II-416
2.3.2.1.4.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana.....	II-417
2.3.2.1.5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas	II-418
2.3.2.1.6.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal.....	II-418
2.3.2.1.7.	Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan.....	II-419

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi.....	III-2
3.1.1	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-2
3.1.2	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh.....	III-8
3.1.3	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe	III-10
3.1.3.1.	PDRB Per Kapita	III-15
3.1.3.2.	Pertumbuhan Ekonomi	III-17
3.1.3.3.	Laju Inflasi.....	III-20
3.1.3.4.	Gini Ratio.....	III-23
3.1.3.5.	Kemiskinan.....	III-24
3.1.3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-25
3.1.3.7.	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2026	III-26

3.1.3.8.	Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2026	III-27
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Kota	III-28
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe	III-31
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe	III-38
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe	III-42
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-10
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026	IV-10
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 ...	IV-11
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026	IV-11
4.3	Arah Kebijakan dan Highlight Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe	IV-69
4.4	Penerapan Proyek Strategis Nasional.....	IV-69
4.5	Pengembangan Inovasi Daerah.....	IV-73
4.6	Pokok-Pokok Pikiran DPRK	IV-74
4.6.1.	Maksud dan Tujuan.....	IV-75
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Makro Tahun 2026	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026.....	VI-1
6.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-4
BAB VII	PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe	II-1
Tabel	2.2	Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-5
Tabel	2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-6
Tabel	2.4	Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-7
Tabel	2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe.....	II-7
Tabel	2.6	Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kota Lhokseumawe	II-20
Tabel	2.7	Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan Kota Lhokseumawe	II-23
Tabel	2.8	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-25
Tabel	2.9	Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum Kota Lhokseumawe	II-26
Tabel	2.10	Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-28
Tabel	2.11	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-29
Tabel	2.12	Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-30
Tabel	2.13	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-30
Tabel	2.14	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-32
Tabel	2.15	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2020-2024	II-33
Tabel	2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel	2.17	Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel	2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-35
Tabel	2.19	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	II-36
Tabel	2.20	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah).....	II-38
Tabel	2.21	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah).....	II-39

Tabel	2.22	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel	2.23	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-41
Tabel	2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-43
Tabel	2.25	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-45
Tabel	2.26	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2020-2024.....	II-46
Tabel	2.27	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-46
Tabel	2.28	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-50
Tabel	2.29	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.....	II-52
Tabel	2.30	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	II-54
Tabel	2.31	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe.....	II-55
Tabel	2.32	Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel	2.33	Rasio PDRB Perdagangan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel	2.34	Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel	2.35	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024)	II-61
Tabel	2.36	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-62
Tabel	2.37	Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.39	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.....	II-65
Tabel	2.40	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-67
Tabel	2.41	Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II-68

Tabel	2.42	Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II-68
Tabel	2.43	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-69
Tabel	2.44	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-70
Tabel	2.45	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-71
Tabel	2.46	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-71
Tabel	2.47	Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-72
Tabel	2.48	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-73
Tabel	2.49	Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel	2.50	Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta)	II-76
Tabel	2.51	Capaian Komponen nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	II-78
Tabel	2.52	Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel	2.53	Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023.....	II-80
Tabel	2.54	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-81
Tabel	2.55	Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel	2.56	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024	II-84
Tabel	2.57	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-87
Tabel	2.58	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-89
Tabel	2.59	Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel	2.60	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel	2.61	Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-91
Tabel	2.62	Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-91
Tabel	2.63	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel	2.64	Rasio Posyandu Per Satuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel	2.65	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024...	II-93

Tabel	2.66	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-94
Tabel	2.67	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel	2.68	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel	2.69	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-96
Tabel	2.70	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi KebidaKota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel	2.71	Cakupan Desa/Kelurahan Universal <i>Child Immunization</i> (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel	2.72	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-98
Tabel	2.73	Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-99
Tabel	2.74	Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel	2.75	Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel	2.76	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-101
Tabel	2.77	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024..	II-102
Tabel	2.78	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel	2.79	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024.....	II-103
Tabel	2.80	Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024.....	II-104
Tabel	2.81	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel	2.82	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel	2.83	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel	2.84	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-107

Tabel	2.85	Cakupan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-107
Tabel	2.86	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel	2.87	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel	2.88	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel	2.89	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ...	II-110
Tabel	2.90	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel	2.91	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel	2.92	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel	2.93	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-113
Tabel	2.94	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-114
Tabel	2.95	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Km)	II-115
Tabel	2.96	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel	2.97	Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-117
Tabel	2.98	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel	2.99	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel	2.100	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel	2.101	Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel	2.102	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-121
Tabel	2.103	Luas Permukiman Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel	2.104	Areal Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel	2.105	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II-123

Tabel	2.106 Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-124
Tabel	2.107 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-125
Tabel	2.108 Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel	2.109 Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel	2.110 Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel	2.111 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	II-128
Tabel	2.112 Penanganan PPKS Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel	2.113 PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 Tahun	II-129
Tabel	2.114 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-130
Tabel	2.115 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024	II-131
Tabel	2.116 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d 2024 Kota Lhokseumawe	II-132
Tabel	2.117 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel	2.118 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel	2.119 Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-133
Tabel	2.120 Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-134
Tabel	2.121 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-135
Tabel	2.122 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel	2.123 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel	2.124 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Tahun 2020-2024	II-136
Tabel	2.125 Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-136
Tabel	2.126 Pola Pangan Harapan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-137

Tabel	2.127 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel	2.128 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel	2.129 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-139
Tabel	2.130 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel	2.131 Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	II-140
Tabel	2.132 Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-141
Tabel	2.133 Sarana Prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-141
Tabel	2.134 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel	2.135 Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.....	II-142
Tabel	2.136 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-143
Tabel	2.137 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel	2.138 Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-145
Tabel	2.139 Rasio Anak yang Memiliki KIA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel	2.140 Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel	2.141 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel	2.142 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel	2.143 Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel	2.144 Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel	2.145 Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel	2.146 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel	2.147 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-151

Tabel	2.148 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel	2.149 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel	2.150 Jumlah Terminal Bus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel	2.151 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel	2.152 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel	2.153 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-155
Tabel	2.154 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota Lhokseumawe Tahun 2020.....	II-156
Tabel	2.155 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel	2.156 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-158
Tabel	2.157 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-159
Tabel	2.158 Nilai Omset UKM yang dibina Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel	2.159 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-160
Tabel	2.160 Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	II-160
Tabel	2.161 Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-162
Tabel	2.162 Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-162
Tabel	2.163 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-163
Tabel	2.164 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel	2.165 Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam KomunikaPD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-164
Tabel	2.166 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024	II-165
Tabel	2.167 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe.....	II-166
Tabel	2.168 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-166

Tabel	2.169 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-167
Tabel	2.170 Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-168
Tabel	2.171 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-168
Tabel	2.172 Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-169
Tabel	2.173 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-170
Tabel	2.174 Objek Wisata Kota Lhokseumawe	II-170
Tabel	2.175 PAD Sektor Pariwisata Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-171
Tabel	2.176 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-172
Tabel	2.177 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel	2.178 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-173
Tabel	2.179 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II-173
Tabel	2.180 Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	II-174
Tabel	2.181 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-175
Tabel	2.182 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-175
Tabel	2.183 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.....	II-176
Tabel	2.184 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	II-176
Tabel	2.185 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	II-177
Tabel	2.186 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Lhokseumawe.....	II-177
Tabel	2.187 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-178
Tabel	2.188 Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel	2.189 Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-179
Tabel	2.190 Persentase Belanja Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-179
Tabel	2.191 Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.....	II-180
Tabel	2.192 Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-180

Tabel	2.193	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023	II-181
Tabel	2.194	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-181
Tabel	2.195	Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel	2.196	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel	2.197	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.....	II-183
Tabel	2.198	Indeks Profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023.....	II-184
Tabel	2.199	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.....	II-185
Tabel	2.200	Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-187
Tabel	2.201	Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-187
Tabel	2.202	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-188
Tabel	2.203	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	II-189
Tabel	2.204	Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-190
Tabel	2.205	Capaian Pendapatan Tahun 2024 Semester 2 terhadap Target P-RKPK Tahun 2024	II-191
Tabel	2.206	Capaian Belanja Tahun 2024 Semester 2 terhadap Target P RKPK Tahun 2024	II-194
Tabel	2.207	Capaian Pembiayaan Tahun 2024 terhadap Target P RKPK Tahun 2024.....	II-195
Tabel	2.208	Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Target RKPK Tahun 2024 dan Realisasi Anggaran terhadap RPK Tahun 2023-2026.....	II-198
Tabel	2.209	Konsistensi/Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024	II-203
Tabel	2.210	Sub Kegiatan tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran.....	II-205
Tabel	2.211	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2024 Semseter 2 Kota Lhokseumawe.....	II-210
Tabel	2.212	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Semester 2	II-357

Tabel	2.213	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU – PD) Tahun 2024	II-364
Tabel	2.214	Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024.....	II-377
Tabel	3.1	Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024.....	III-26
Tabel	3.2	Target Makro Ekonomi Tahun 2026	III-26
Tabel	3.3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	III-29
Tabel	3.4	Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	III-30
Tabel	3.5	Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	III-31
Tabel	3.6	Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2027.....	III-33
Tabel	3.7	Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027.....	III-40
Tabel	3.8	Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027.....	III-42
Tabel	3.9	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027	III-43
Tabel	4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-5
Tabel	4.2	Tema Pembangunan Tahun 2026	IV-10
Tabel	4.3	Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026	IV-12
Tabel	4.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-13
Tabel	4.5	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-17
Tabel	4.6	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-21
Tabel	4.7	Sinkronisasi Priritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029	IV-27
Tabel	4.8	Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-40
Tabel	4.9	Intervensi Kota Lhokseumawe terhadap Proyek Strategis Nasional.....	IV-70
Tabel	4.10	Pengembangan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025.....	IV-73
Tabel	5.1	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026	V-1
Tabel	5.2	Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	V-4

Tabel	6.1	Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..	VI-1
Tabel	6.2	Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	VI-2
Tabel	6.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2026	VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	I-2
Gambar 1.2	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-3
Gambar 1.3	Target Indikator Makro Tahun 2026 Hasil Penyelarasan	I-4
Gambar 1.4	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe	II-2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-5
Gambar 2.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe	II-20
Gambar 2.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe	II-22
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-31
Gambar 2.11	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-31
Gambar 2.12	Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2024	II-33
Gambar 2.13	Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2024	II-35
Gambar 2.14	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-42
Gambar 2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.16	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.18	Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-47

Gambar 2.19	Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.20	Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.21	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.22	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.23	Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024	II-53
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-56
Gambar 2.26	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Lhokseumawe 2020-2022	II-57
Gambar 2.27	Indeks Ketimpangan Gender Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2020-2024	II-57
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.29	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2.30	Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-62
Gambar 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-64
Gambar 2.32	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-66
Gambar 2.33	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-67
Gambar 2.34	Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.35	Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	II-75
Gambar 2.36	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2.37	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-78
Gambar 2.38	Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024	II-80
Gambar 2.39	Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024	II-82
Gambar 2.40	Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-84

Gambar 2.41	Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.42	Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.43	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.44	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-116
Gambar 3.1	PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (triliun rupiah)	III-11
Gambar 3.2	PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (triliun rupiah)	III-12
Gambar 3.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2024 (persen)	III-13
Gambar 3.4	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2024 (persen)	III-13
Gambar 3.5	PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas Tahun 2020-2024 (triliun rupiah)....	III-14
Gambar 3.6	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2020 dan Tahun 2024.....	III-15
Gambar 3.7	PDRB Per Kapita Lhokseumawe AHB Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III-16
Gambar 3.8	PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III-16
Gambar 3.9	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III-17
Gambar 3.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (persen)	III-18
Gambar 3.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen)	III-18
Gambar 3.12	Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (persen)...	III-19
Gambar 3.13	Inflasi Nasional Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 (persen).....	III-21
Gambar 3.14	Tingkat Inflasi <i>Year on Year</i> Lhokseumawe Bulan Desember 2022-2024 (persen).....	III-22
Gambar 3.15	Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Lhokseumawe, Desember 2024	III-32
Gambar 3.16	Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Milyar Rp.).....	III-30
Gambar 4.1	Komponen Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-1
Gambar 4.2	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.....	IV-3
Gambar 4.3	Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.....	IV-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

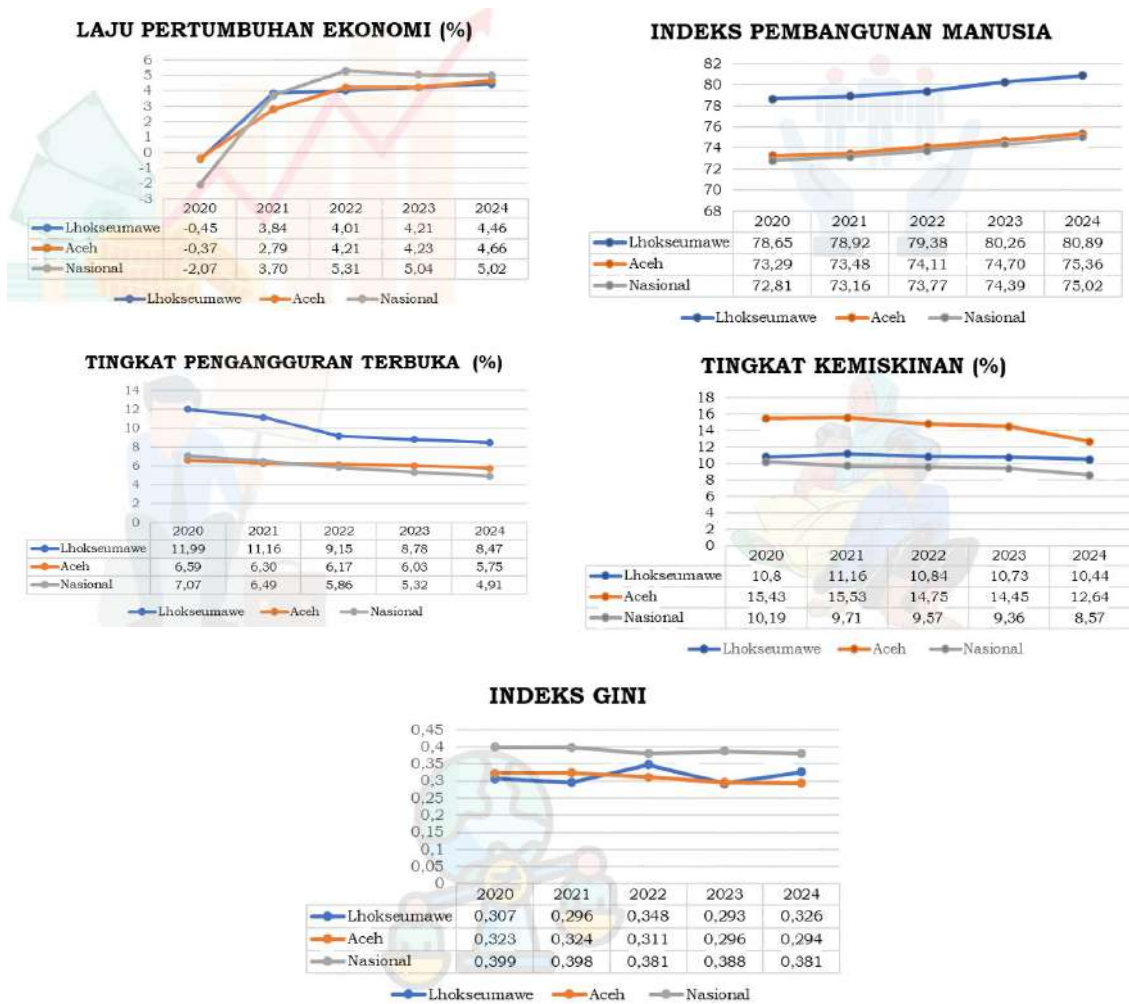
Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun pertama dari visi, misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang penyusunannya dilakukan secara simultan dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026.

Secara umum RKPK Lhokseumawe Tahun 2026, memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPK Lhokseumawe Tahun 2024, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, terutama 8 Asta Cita dengan 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat nasional dan 9 Prioritas Aceh untuk Tahun 2025-2029 dengan tema **“Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Belanjutan”**.

Capaian Indikator Makro Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, merupakan dasar yang dipertimbangkan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2026. Laju Pertumbuhan Ekonomi cukup baik setelah hal negatif akibat dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Tahun 2020 sebesar -1,45% terus naik menjadi 4,46% di Tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2020 pada angka 78,65 menjadi 80,89 di Tahun 2024, lebih besar dari Aceh dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe terus menurun dari Tahun 2020 sebesar 11,99% menjadi 8,47% di Tahun 2024, akan tetapi masih terlalu besar dari Aceh 5,75% dan Nasional 4,91%, untuk Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan yang signifikan, Tahun 2020 sebesar 10,80% dan 10,44% di Tahun 2024, termasuk Indeks Gini yang mengalami turun dan naik yang cukup signifikan, Tahun 2020 sebesar 0,307 dan Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu pada angka 0,326 dan mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi dimasyarakat.

Gambar 1.1
Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

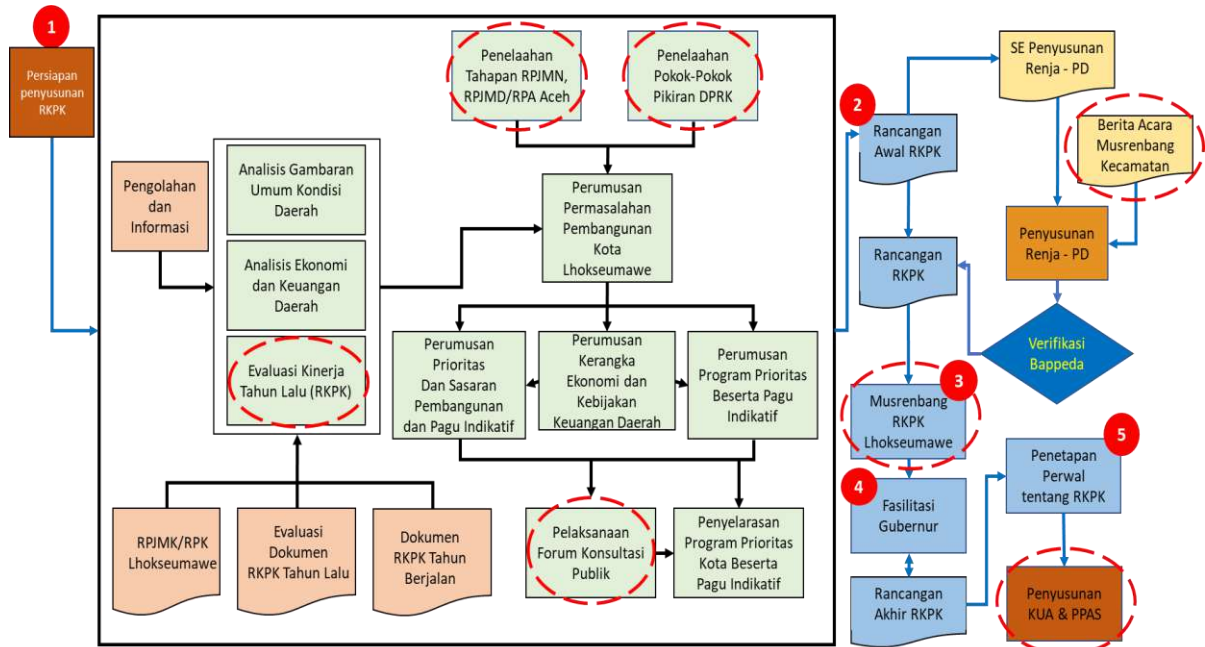


Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota, sebagai berikut:

- a. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
- b. Secara normatif menjadi acuan bagi Wali Kota dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026;
- c. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan

- Adapun tahapan dan tata cara penyusunan RPKK disajikan pada Gambar 1.1

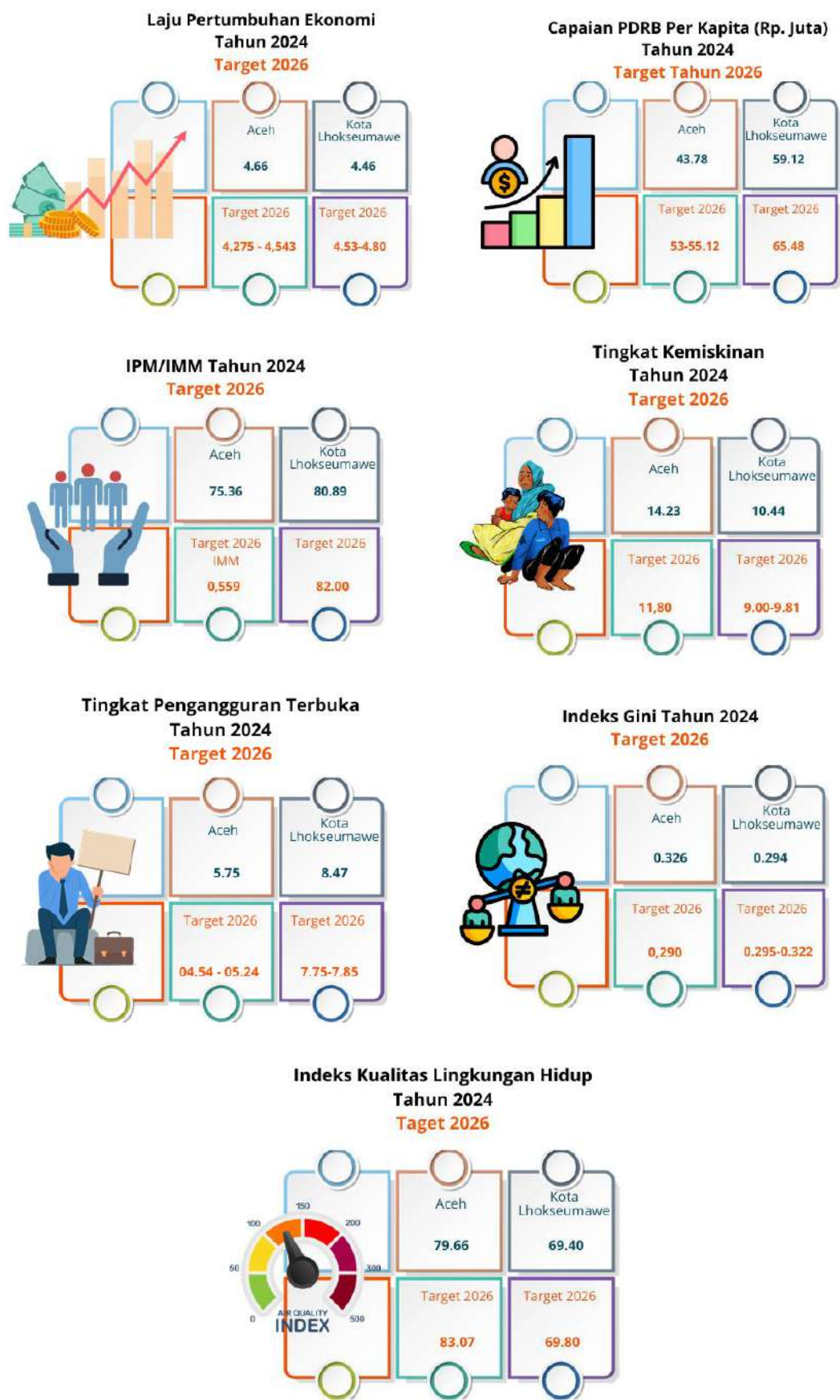
Gambar 1.2



Tahapan dan tata cara penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 meliputi:

Proses penyusunan dokumen RKPK Tahun 2026 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat Wali Kota Lhokseumawe Nomor 050/4426 tanggal 28 November 2024 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2026 serta Permintaan Pokok Pikiran DPRK dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPK Tahun 2026 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/4392 tanggal 29 November 2024 dan pembahasan Kamus Usulan RKPK Tahun 2026 pada tanggal 18 Desember 2024; 2) Konsultasi publik RKPK Tahun 2026 dan Musrenbang Kecamatan serta penyampaian Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 050/1/SE/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 3) Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 dan diikuti dengan Forum Perangkat Daerah; 4) Melakukan penyempurnaan Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2026; 5) Reviu Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 oleh APiP; 6) Fasilitasi RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 oleh Bappeda Aceh; 7) Perbaikan dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 hasil fasilitasi Bappeda Aceh; dan 8) Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026. RKPK Lhokseumawe tahun 2026 juga telah melakukan penyelarasan terhadap Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana tergambar dibawah ini:

Gambar 1.3
Target Indikator Makro Tahun 2026 Hasil Penyelarasan



Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPK Tahun 2026 tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi

proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawahatas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;

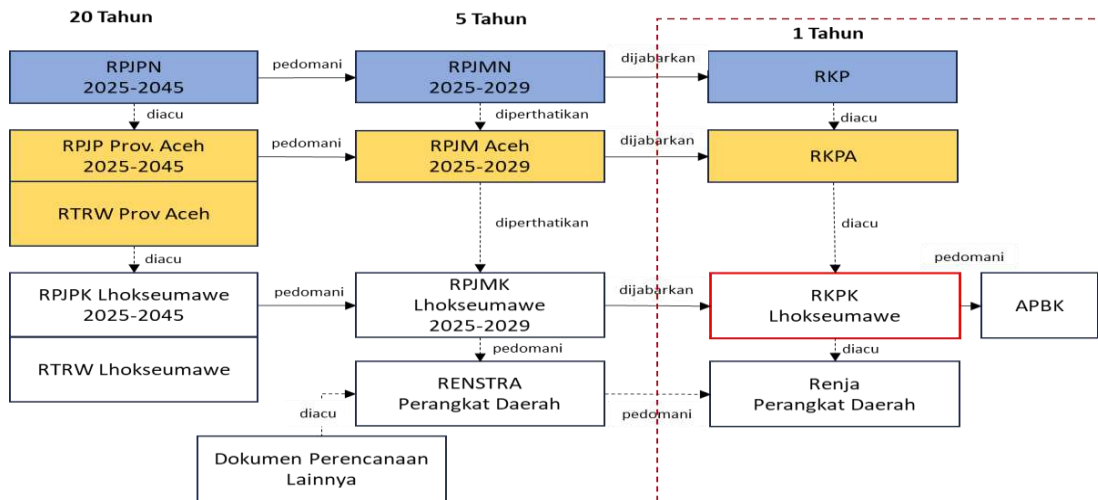
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Aceh, maka Rancangan Akhir RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rancangan Akhir RKPA Tahun 2026.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPK dan RPJPK 2025-2045
RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPK Lhokseumawe periode 2025-2029. RKPK Lhokseumawe berisikan program prioritas dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPK Lhokseumawe Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan periode 2025-2029 RPJP Aceh yaitu Penguatan Fondasi Transformasi dan tahapan pertama RPJPN yaitu Penguatan Transformasi.
2. RKPK dan RPJMK 2025-2029
RKPK Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun terkait dengan tujuan, sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran, target tujuan, target sasaran dan prioritas pembangunan.
RKPK berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan.
3. RKPK dan Renja PD
RKPK Tahun 2026 sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
4. RKPK dan APBK
RKPK digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBK telah disusun berdasarkan RKPK.

Gambar 1.4
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe



1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang secara simultan disusun dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPK tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

2.1. Kondisi Umum Kondisi Kota Lhokseumawe

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2024

2.3 Permasalahan dan isu-isu Strategis Kota Lhokseumawe

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.3 Arah Kebijakan dan Highlight Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe

4.4 Pengembangan Inovasi Daerah

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRK

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB VI. KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH KOTA

LHOKSEUMAWE

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di Aceh yang terletak persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga Kota Lhokseumawe merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe tidak bersinggungan langsung dengan Ibu Kota Propinsi yaitu Kota Banda Aceh dan harus menempuh jarak kurang lebih 207 km untuk mencapainya. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha. Kota Lhokseumawe berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Kecamatan, 9 kemukiman dan 68 Gampong. Secara rinci Kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

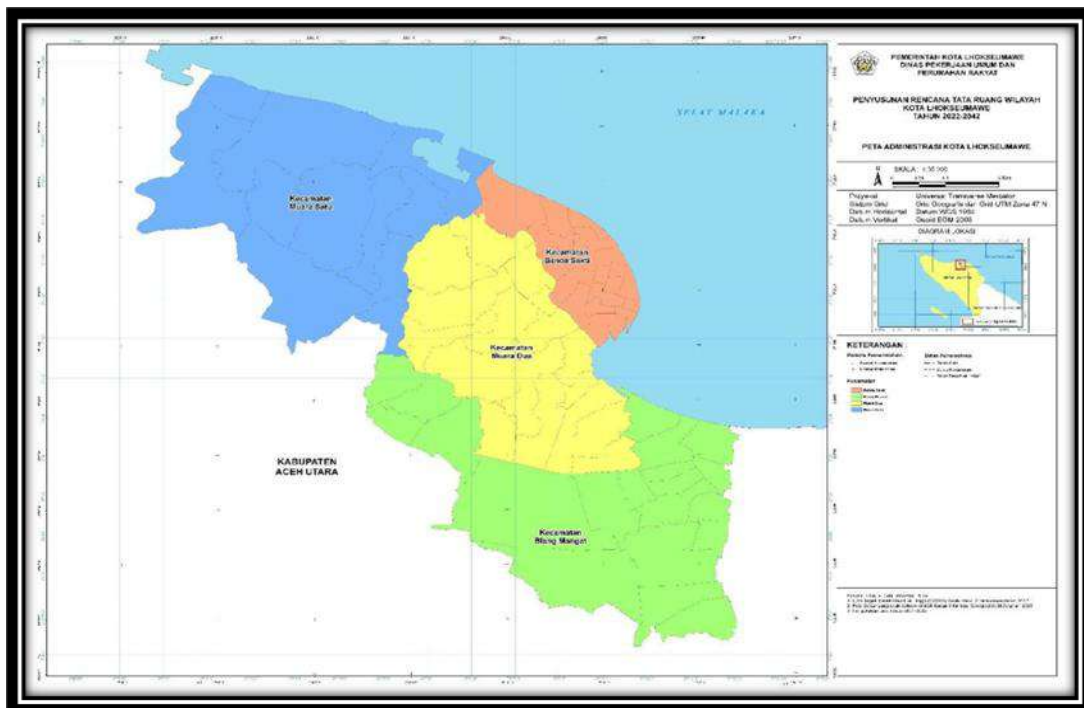
Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Banda Sakti	11.24	6.21
2	Muara Dua	57.80	31.92
3	Blang Mangat	56.12	31.00
4	Muara Satu	55.90	30.87
Kota Lhokseumawe		181.06	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2025

Kecamatan Muara Dua merupakan Kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah sebesar 57.80 km² atau 31.92% dari luasan Kota Lhokseumawe dan Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Banda Sakti yaitu seluas 11.24 km² atau sebesar 6.21% dari luasan Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

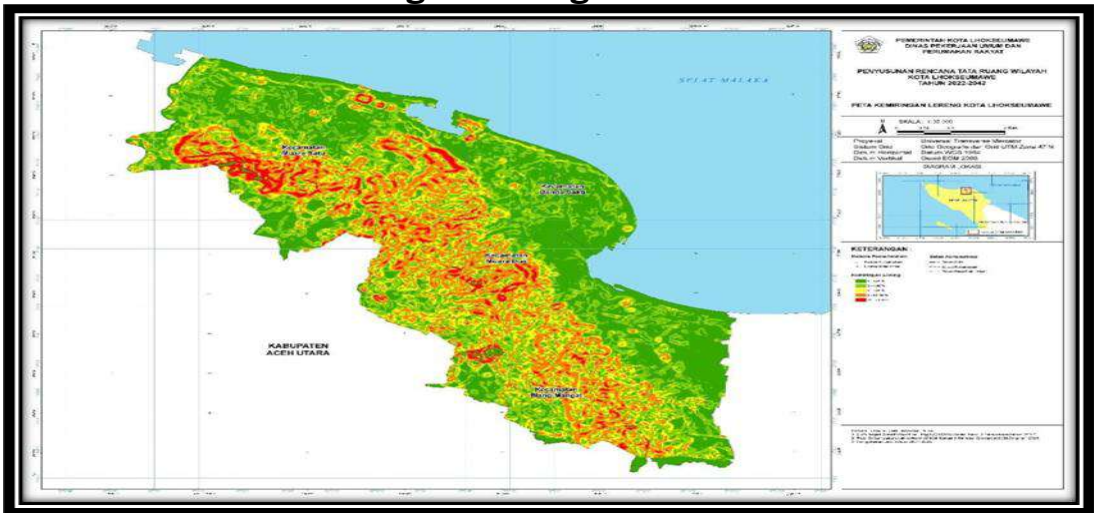
Secara geografis Kota Lhokseumawe terletak diantara $04^{\circ}54'$ Lintang Utara $05^{\circ}18'$ Lintang Selatan serta $96^{\circ}20'$ – $97^{\circ}21'$ Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe

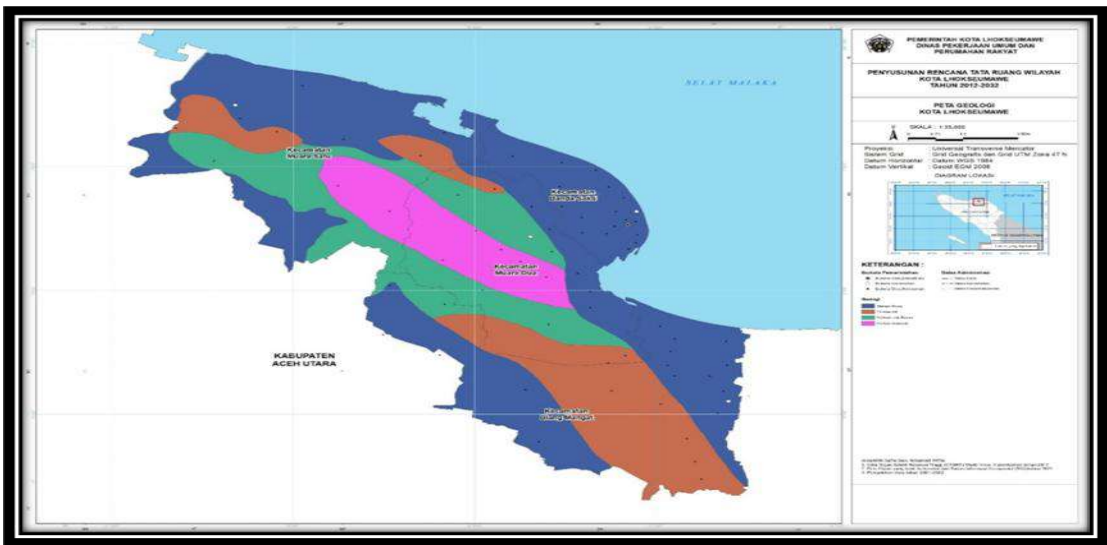


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeue berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

A. Air Tanah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara

B. Sungai

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

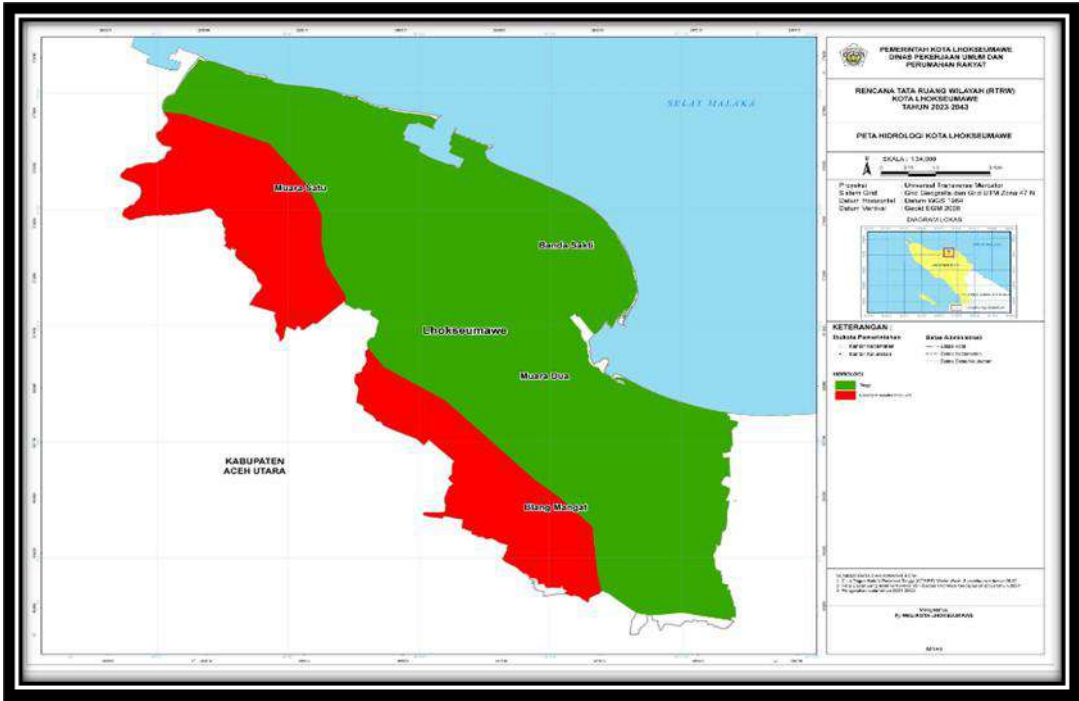
C. Waduk

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

D. Cekungan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireun seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.6 Klimatologi

Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu dan angin atau penguapan. Kota Lhokseumawe memiliki iklim muson tropis (*Am*) dengan dua musim yang jelas, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kota Lhokseumawe ini cenderung konstan antara 21°–34°C dengan rata-rata suhu udara antara 25°–27°.

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No		Bulan	Suhu Udara (°C)									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
1		Januari	21.2-32.4	26.5	21.2-32.4	26.5	22.8-30.8	26.2	19.70-32.40	26.30	21.6-33.2	26.8
2		Februari	21.0-32.5	26.5	21.0-32.5	26.5	22.8-30.4	25.9	20.80-31.80	26.50	22.2-34	27.7
3		Maret	21.0-33.8	27.4	21.0-33.8	27.4	23.2-31.0	25.9	20.00-33.20	27.10	21-34	28.2
4		April	22.5-33.6	27.3	22.5-33.6	27.3	23.3-31.3	26.6	21.20-33.80	27.90	23.5-34.6	29
5		Mei	23.2-33.1	27.2	23.2-33.1	27.2	23.7-32.1	27.1	22.40-34.20	28.20	24-35.3	28.7
6		Juni	23.1-32.9	27.1	23.1-32.9	27.1	23.2-31.4	26.5	22.60-33.80	27.90	22.5-35	28.3

No	Bulan	Suhu Udara (°C)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
7	Juli	21.4-32.8	26.7	21.4-32.8	26.7	23.8-32.0	27.2	22.80-33.60	28.00	22.6-35.2	28.3
8	Agustus	23.2-33.5	27.4	23.2-33.5	27.4	23.2-31.9	26.8	22.60-34.40	27.70	22.8-33.9	26.6
9	September	23.0-34.6	26.8	23.0-34.6	26.8	23.1-31.5	26.7	22.60-34.40	27.30	23-34.1	27.7
10	Oktober	22.6-33.7	27.0	22.6-33.7	27.0	23.3-30.4	26.1	22.60-32.50	26.80	22.6-33	27.2
11	November	22.9-32.0	26.2	22.9-32.0	26.2	23.2-29.7	25.8	22.60-33.00	26.50	23-32.6	26.7
12	Desember	21.9-31.7	25.7	21.9-31.7	25.7	22.6-29.2	25.3	23.40-32.40	26.70	22-32.2	26.8

Sumber: BPS Lhokseumawe 2025

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi. Tingkat hujan yang diukur dalam satuan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. Pada tahun 2020 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan Mei dan Desember dengan hari hujan terbanyak 17 hari dan pada tahun 2024 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan November dengan hari hujan terbanyak mencapai 15 hari pada tahun 2024.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	20.5	3	20.5	3	129	9	171.40	16	33.8	7
2	Februari	48.5	3	48.5	3	296	14	52.90	11	7	3
3	Maret	34.5	3	34.5	3	61	11	35.00	9	23.9	4
4	April	44.5	6	44.5	6	112	9	26.60	4	88.5	4
5	Mei	287.5	17	287.5	17	62	7	165.70	13	154	7
6	Juni	150.5	9	150.5	9	182	11	161.90	15	135.3	8
7	Juli	160	7	160	7	31	4	41.90	9	69.5	3
8	Agustus	6.5	2	6.5	2	132	12	131.60	9	140.5	12
9	September	83.5	5	83.5	5	56	10	135.40	16	133.2	8
10	Oktober	41.5	6	41.5	6	359	17	173.30	24	72.6	13
11	November	151	11	150.5	11	271	15	241.70	23	297.8	15
12	Desember	455	17	455	17	379	22	342.70	22	132.3	13

Sumber: BPS Lhokseumawe 2025

Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Kandungan air pada suatu wilayah bisa memengaruhi kelembaban di udara. Semakin tinggi ketersediaan air

di suatu tempat semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut. Kelembaban udara Lhokseumawe minimum pada tahun 2024 berkisar 49% sampai dengan 64%. Dan kelembaban udara maksimum berkisar sampai dengan 100% dengan tekanan udara berkisar 1008 sampai 1011.

Tabel 2.4
Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
1	Januari	73.3-86.8	1010.7	73.3-86.8	1010.7	61-98	1007.3	54-100	1011.40	58-100	1011.5
2	Februari	74.5-93.8	1011.5	74.5-93.8	1011.5	60-100	1005.9	58-100	1012.20	47-100	1011.9
3	Maret	76.0-87.3	1009.9	76.0-87.3	1009.9	65-99	1005.5	53-100	1013.90	51-100	1010.7
4	April	81.0-89.0	1010.0	81.0-89.0	1010.0	64-98	1005.8	44-100	1011.60	51-99	1008.4
5	Mei	78.8-95.0	1008.9	78.8-95.0	1008.9	50-98	1004.8	47-100	1011.90	52-100	1008.2
6	Juni	80.3-91.0	1008.9	80.3-91.0	1008.9	51-98	1005.5	52-100	1009.50	49-99	1009.5
7	Juli	70.8-90.8	1008.5	70.8-90.8	1008.5	51-98	1004.3	53-100	1009.90	51-100	1008.5
8	Agustus	77.5-90.3	1008.5	77.5-90.3	1008.5	50-99	1005.2	57-100	1011.40	53-100	1009.8
9	September	76.3-92.8	1009.2	76.3-92.8	1009.2	53-100	1005.3	53-100	1010.70	53-100	1008.9
10	Oktober	69.5-89.5	1008.6	69.5-89.5	1008.6	65-100	1006.7	61-100	1011.90	56-100	1010
11	November	81.3-95.8	1009.6	81.3-95.8	1009.6	67-100	1006.7	62-100	1011.00	64-100	1009.2
12	Desember	82.5-97.5	1010.0	82.5-97.5	1010.0	64-100	1006.4	56-100	1012.00	51-100	1009.5

Sumber: BPS Lhokseumawe 2025

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² atau 18106 Ha dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	2861,79	15,81
2.	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3.	Industri Besar	923,76	5,1
4.	Sawah	987,13	5,45
5.	Tambak	1595,3	8,81

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
6.	PPI	2,77	0,02
7.	Mangrove	12,86	0,07
8.	Sungai	80,48	0,44
9.	Pendidikan	0,6	0,003
10.	Perkantoran	14,35	0,08
11.	Kebun	11452,1	63,25
12.	Waduk	57,75	0,32
13.	Danau	16,6	0,09
14.	Lapangan Golf	51,14	0,28
Total		18106	100

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kota Lhokseumawe memiliki potensi perekonomian sekitar meliputi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

A. Perikanan

Kota Lhokseumawe sebagai daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Berdasarkan data aplikasi desktop validasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan total produksi perikanan tangkap Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 8.102.538 kg untuk non pelabuhan dan 4.866.229 kg untuk pelabuhan dengan total produksi perikanan tangkap sebesar 12.968.767 kg. Komoditas unggulan meliputi budidaya ikan lele, budidaya udang vaname, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan mujair, budidaya ikan kerapu dan ikan kakap. Lokasi budidaya tersebar di seluruh pesisir pantai Kota Lhokseumawe, meliputi keramba jaring apung, tambak dan kolam yang ada di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe yang meliputi Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.

Luas lahan tambak di Kota Lhokseumawe sebesar 8.558.000 m² dan tahun 2024 produksi perjenis pembesaran mencapai 2006,657 ton dengan jumlah produksi terbesar pada budidaya udang vaname sebesar 808,864 kg disusul dengan ikan lele sebesar 539,410 kg, kemudian ikan bandeng sebesar 271,272 kg, selanjutnya ikan nila sebesar 150,196 kg dan ikan mujair 129.025 kg, untuk ikan kerapu, ikan kakap dan udang windu dengan total 107,887 kg.

Untuk hasil perikanan Kota Lhokseumawe telah memiliki 31 (tiga puluh satu) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merupakan usaha mikro dan kecil yang bergerak dibidang pengolahan ikan dan tersebar 4 kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. UPI ini berperan penting dalam perekonomian Kota Lhokseumawe terutama dalam sektor perikanan baik dari segi ekonomi maupun ketahanan pangan.

Produk Olahan hasil kelautan dan perikanan Kota Lhokseumawe berupa teri kering dan ikan asin, kerupuk tuna, pempek ikan, keumamah, bileh crispy, nugget ikan, peyek udang, dendeng ikan, ikan gabus crispy, bandeng isi dan hasreng.

B. Pertanian

Sebagai sebuah Kota, Lhokseumawe juga memiliki potensi kawasan pertanian di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Luas tanam pada tahun 2024 sebesar 1.586 ha dengan luas panen sebesar 1.326,31 Ha dan produksi padi sebesar 7.294,71 ton dengan produktivitas sebesar 5.5 ha.

C. Perkebunan

Potensi Perkebunan Kota Lhokseumawe tersebar di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan luas areal tanaman perkebunan sebesar 474 ha pada tahun 2023 dengan nilai produksi sebesar 7,912 ton. Produksi terbesar adalah kelapa sawit, diikuti tebu, kakao, dan kelapa.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
 - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan

- d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian.
- 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
 - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Buket Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;

- 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;
 - 11) Jl. Cut Meutia;
 - 12) Jl. Diponegoro;
 - 13) Jl. Goa Jepang;
 - 14) Jl. Gudang;
 - 15) Jl. Gudang Baru;
 - 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
 - 17) Jl. Haji Tana;
 - 18) Jl. Imam;
 - 19) Jl. Iskandar Muda;
 - 20) Jl. Jamaika Timur;
 - 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 22) Jl. Kenari;
 - 23) Jl. Keuchik Daud;
 - 24) Jl. Koperasi;
 - 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;

- 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
- 27) Jl. Lr. Hasan;
- 28) Jl. Lr. Kenanga;
- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglateh;
- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;
- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;
- 61) Jl. PWI I;
- 62) Jl. Rahmat;
- 63) Jl. Rumah Alue;
- 64) Jl. Samudera;
- 65) Jl. Samudera Baru;
- 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
- 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
- 68) Jl. Stasiun;

- 69) Jl. Suka Ramai;
- 70) Jl. T. Chik di Tiro;
- 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
- 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
- 73) Jl. T.U. Agam;
- 74) Jl. Teratai Putih;
- 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
- 76) Jl. Teuku Syarief;
- 77) Jl. Teuku Umar;
- 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
- 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
- 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
- 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
- 82) Jl. Ujong Pacu
- i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
- j) Rencana umum (masterplan) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
- k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
- l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
- m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
- n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
- o) Pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
- p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
- q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
- r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
- s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
- t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
- u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;

- v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
- w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
- x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
- y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
- 2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) pengembangan terminal khusus Migas V di Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe;
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
 - 2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan

- 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
- c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
- d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
 3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;
 - c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe;
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan

- b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
- 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
 - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
 - f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - a) Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
 - c) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - d) Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;

- e) Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;
 - f) Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - g) Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - h) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
 - i) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - d) Perwujudan Jaringan Drainase, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase Tersier di Kota Lhokseumawe.
7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam dokumen KLHS RPJM Kota Lhokseumawe telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Lhokseumawe tahun 2023 dijelaskan bahwa tutupan lahan menjadi bagian penting dari jasa ekosistem, dikarenakan perbedaan jenis tutupan lahan akan memberi pengaruh terhadap besarnya nilai jasa yang dihasilkan oleh suatu ekosistem, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, gunung atau hutan bahkan lahan budidaya manusia.

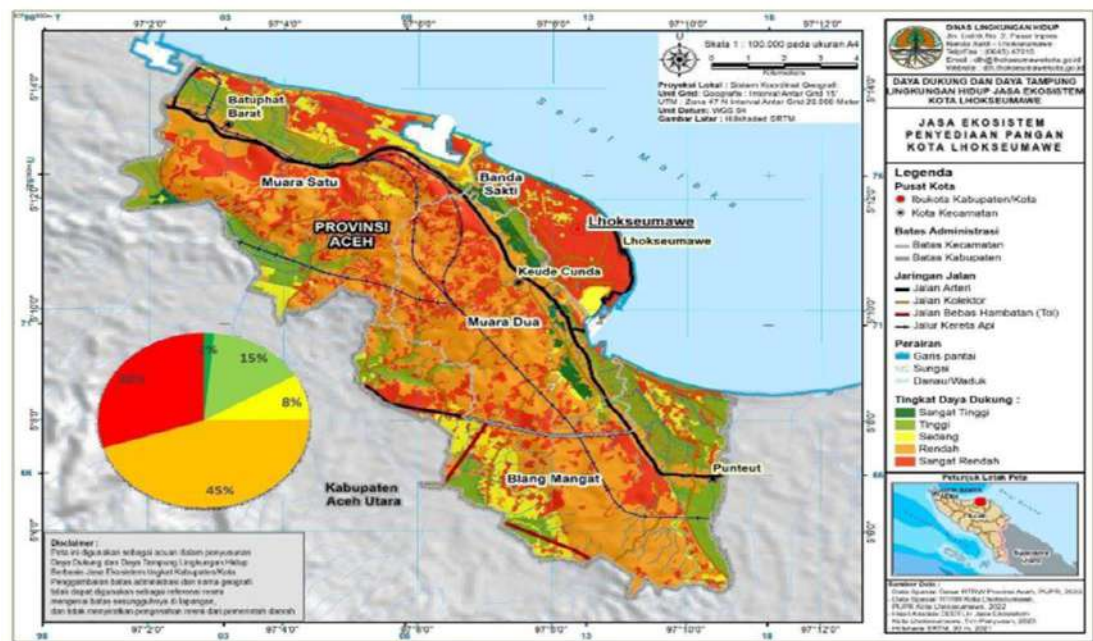
Hasil analisis Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Lhokseumawe berbasis jasa ekosistem bersifat indikatif, yakni digunakan dalam menggambarkan suatu wilayah atau lokasi sebagai informasi awal dari proses kebijakan terkait alokasi atau penyediaan lokasi untuk tujuan tertentu yang bersifat sementara dalam menuju situasi pasti (definitif). DDDT LH jasa ekosistem digunakan untuk mendapatkan gambaran potensi jasa ekosistem di suatu wilayah tertentu dengan pendekatan keruangan yang melibatkan unsur-unsur fisik dan lahan di wilayah tersebut.

2.1.1.4.1 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem penyedia pangan berkaitan dengan segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati berupa tumbuhan dan hewan, termasuk didalamnya ikan. Jasa ekosistem penyedia pangan menjadi penting karena memiliki manfaat sebagai penyedia makanan dan minuman bagi konsumsi manusia.

Jasa ekosistem penyedia pangan dapat berasal dari banyak sumber, diantaranya adalah hasil pangan pertanian, hasil perkebunan, hasil laut dan perikanan darat, hasil peternakan, serta hasil hutan. Hasil pangan dari sumber-sumber tersebut dapat berupa beras, jagung, ketela, ikan, telur, daging, buah-buahan, sayur-mayur, dan segala jenis bahan makanan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari tanaman dan hewan. Budidaya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun dari hasil hutan menjadi aktivitas utama untuk penyediaan pangan.

Gambar 2.5
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe



Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025

Suatu ekoregion memiliki karakteristik fisik tertentu yang menyebabkan variasi potensi pangan. Dataran aluvial sesuai untuk pertanian lahan basah seperti persawahan, daerah berbukit dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering (hortikultura dan perkebunan) dan sebagainya. Tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering sangat tergantung kepada karakteristik iklim dan karakteristik tanah. Alih fungsi lahan pertanian lahan sawah seperti sawah menjadi permukiman dan kawasan perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap penurunan jasa penyediaan pangan. Peta jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Lhokseumawe disajikan pada gambar di atas.

Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, potensi jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Lhokseumawe memiliki indeks yang Rendah, yakni 2,36. Luas jasa ekosistem penyediaan pangan di masing-masing kecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan					Luas
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	34,50	29,13	132,31	86,55	840,20	1.102,69
Blang Mangat		953,04	545,10	2.050,57	919,65	4.468,35
Muara Dua	137,59	262,84	56,16	1.762	807,82	3.026,41
Muara Satu	37,82	730,55	383,79	2.114,51	1.436,24	4.702,91
Lhokseumawe	209,91	1.975,56	1.117,36	5.993,62	4.003,90	13.300,36

Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan yang tergolong Sangat Tinggi seluas 209,91 Ha (1,58%), Tinggi seluas 1.975,56 Ha (14,85 %), dan Sedang seluas 1.117,36 Ha (8,40%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan pangan Rendah seluas 5.993,62 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 4.003,90 Ha (30,10%). Beberapa kecamatan berdasarkan luas yang memilikipotensi penyedia pangan Sangat Tinggi adalah Kecamatan Muara Dua dengan luas mencapai 137,59 Ha (4,55%). Selanjutnya, kecamatan yang memiliki potensi jasa lingkungan Tinggi adalah Kecamatan Blang Mangat dengan luasan 953,04 Ha (21,33%). Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan pangan Rendah dan Sangat Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Muara Dua, yakni 1.762,00 Ha (58,22%) dan Banda Sakti 840,20 Ha (76,20%) dari luas wilayah kecamatannya.

Berdasarkan arahan rencana pola ruang Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan di Kota Lhokseumawe dengan luas $\pm 927,09$ Ha terletak di kecamatan: (1) Blang Mangat $\pm 610,56$ Ha, (2) Muara Satu dengan luas $\pm 256,11$ Ha dan (3) Muara Dua dengan luas $\pm 60,42$ Ha. Begitupula halnya dengan rencana pola ruang kawasan perkebunan rakyat seluas ± 1.645 Ha yang diarahkan pada ketiga kecamatan tersebut dengan rincian di Kecamatan Blang Mangat berada pada 18 gampong, di Kecamatan Muara Satu berada pada 7 gampong dan di Kecamatan Muara Dua berada pada 12 gampong .

Berdasarkan hasil analisis DDDT LH jasa ekosistem penyediaan pangan, pengembangan kawasan pertanian disarankan untuk diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat karena potensi jasa ekosistem penyediaan pangan di wilayah tersebut kategori Sangat Tinggi dan Tinggi. Untuk wilayah dengan potensi jasa ekosistem penyediaan pangan kategori Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Banda Sakti perlu melakukan langkah-langkah intensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi pangan.

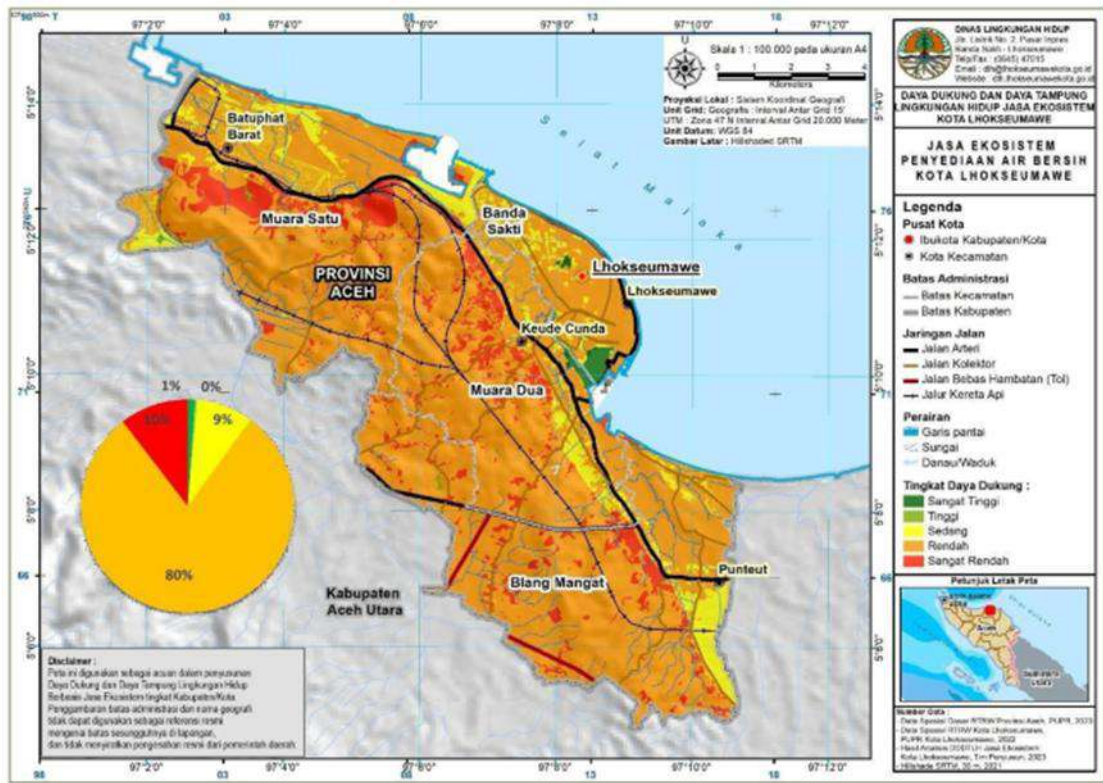
2.1.1.4.2 Daya Dukung Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan maupun air tanah bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentanglahan. Ketersediaan air bersih di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan meng-alirkan air. Jenis batuan tiap ekoregion Kota Lhokseumawe akan menggambarkan potensi akuifer atau impermeable layer. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah.

Ekoregion Kota Lhokseumawe yang berupa lembah antar perbukitan (8%), dataran aluvial (17%), dataran fluviomarin (19%) merupakan ekosistem yang potensial sebagai jasa penyedia air bersih.

Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan menyediakan air bersih melalui sungai-sungai yang berasal dari lembah lipatan. Sementara dataran aluvial memiliki sistem akuifer yang baik, di mana air hujan atau air sungai menembus lapisan sedimen dan tersimpan sebagai cadangan air tanah sehingga dataran aluvial menjadi sumber air yang penting bagi kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan konsumsi manusia. Hujan yang tercurah di Kota Lhokseumawe ditampung dalam Cekungan Air Tanah, yang menjadi potensi sumber air paling utama yang airnya mengalir sepanjang tahun dan memenuhi sumur bor penduduk. Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe digambarkan pada peta di bawah ini.

Gambar 2.6
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe



Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe terdistribusi dari kategori Sangat Rendah sampai Sangat Tinggi. Jasa penyediaan air bersih yang Sangat Tinggi (hijau tua) berada pada wilayah pesisir dengan penggunaan lahan berupa waduk, kolam, sungai, saluran air, kuala/laguna dan empang dengan vegetasi alami berupa hutan pantai, hutan terna air tawar dan hutan terna tepian sungai payau. Sedangkan jasa ekosistem penyediaan air bersih Sangat Rendah (merah) berada pada kawasan peralihan fluvioarin dengan penggunaan lahan dominan berupa permukiman, lahan terbangun non-permukiman, lahan terbuka dan semak belukar dengan vegetasi hutan dipterokarpa pamah. Pada peta juga dapat dilihat bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang dominan adalah kategori Rendah (jingga) yang berada pada bentang lahan perbukitan lipatan dan dataran fluvio-marin, penggunaan lahan

berupa semak belukar dan vegetasi hutan dipterokarpa pamah dan non- pamah. Kategori Rendah ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe. Luas jasa penyediaan air bersih perkecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan					Luas
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	94,06	1,02	163,69	807,72	36,21	1.102,69
Blang Mangat	2,87	6,32	315,83	3.786,03	357,31	4.468,35
Muara Dua	27,04	11,67	185,45	2.445,93	356,31	3.026,41
Muara Satu	22,55	23,16	477,69	3.543,33	636,18	4.702,91
Lhokseumawe	146,51	42,17	1.142,66	10.583,01	1.386,01	13.300,36

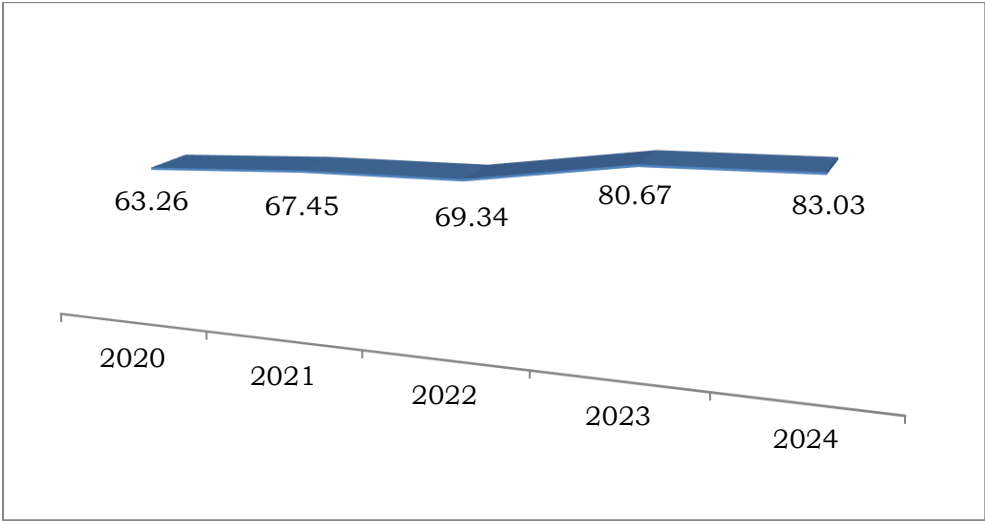
Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tergolong Sangat Tinggi seluas 146,51 Ha (1,10%), Tinggi seluas 42,13 Ha (0,32 %), dan Sedang seluas 1.142,66 Ha (8,59%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan air bersih Rendah seluas 10.583,01 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 1.384,19 Ha (30,10%). Jasa penyediaan air kategori Sangat Tinggi seluas 94,06 Ha (8,53%) terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti dengan penggunaan lahan waduk dan saluran air. Sementara jasa penyediaan air kategori Tinggi seluas 23,16 Ha (0,49%) terbesar berada di Kecamatan Muara Satu, namun potensi jasa ekosistem penyedia air kategori Sangat Rendah dengan luasan mencapai 636,18 Ha (13,53%) juga berada di kecamatan Muara Satu, terutama pada lahan dengan penggunaan berupa permukiman kepadatan tinggi dan lahan terbuka. Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Blang Mangat mencapai 3.786,03 Ha (84,73%) dari luas wilayahnya.

2.1.1.5 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
2.1.1.5.1 Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar 2.7
Indeks Ketahanan Pangan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



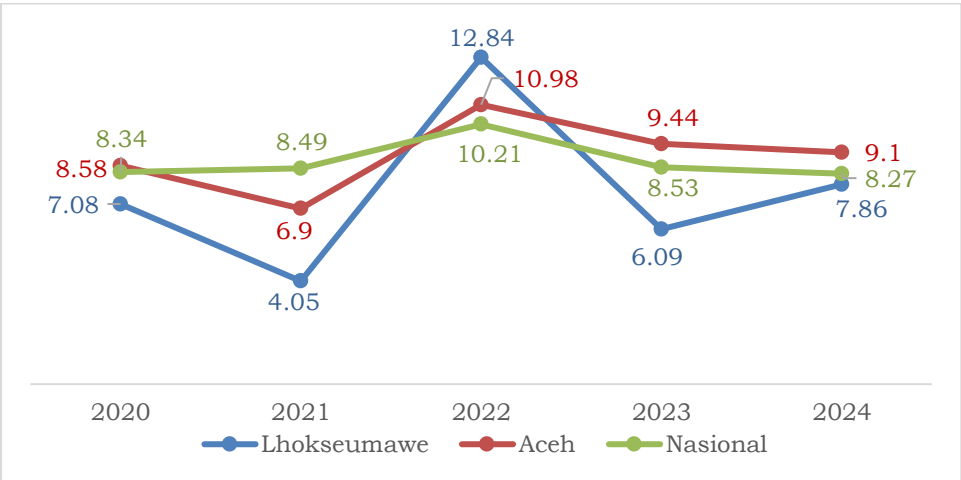
Sumber: DKPPP Lhokseumawe, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 83.03, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020-2023, dan menjadi Indeks Ketahanan Pangan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Meningkatnya Angka Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe dikarenakan aspek ketersediaan yaitu meningkatnya produksi komoditas khususnya padi.

2.1.1.5.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada gambar berikut dapat dilihat prevelinsi ketidakcukupan konsumsi pangan kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional tahun 2020-2024.

Gambar 2.8
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 7.08 persen berada dibawah Aceh sebesar 8.58 dan Nasional sebesar 8.34 dan pada tahun 2024 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 7.86 persen dan masih di bawah Aceh yang sebesar 9.10 persen dan Nasional sebesar 8.27 persen.

2.1.1.5.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe bersumber dari PDAM Ie Beusare Rata Lhokseumawe, PDAM Tirta Mon Pase milik Aceh Utara, air sumur dalam terlindungi maupun sumur gali dan sumur bor.

Tabel 2.8
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.896	1.954	2.419	2.350	2.349
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase	4.778	4.942	4.848	4.936	5.023
3	Sumur dalam terlindungi	-	148	148	148	538
4	Jumlah Rumah Tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
Persentase		16.01	16.63	16.88	16.34	17.07

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

Persentase jumlah rumah tangga terhadap konsumsi air minum Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 masih stagna di 16 persen, hal ini di karenakan Kota Lhokseumawe yang tidak memiliki sumber air baku. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Lhokseumawe juga melakukan penyediaan Air Minum melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/sumur dalam terlindungi/sumur pompa yang diakses melalui perpipaan sambungan rumah yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan penyediaan SPAM secara optimal dalam hal ini PDAM Ie Besare Rata bekerjasama dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe membangun proyek jaringan SPAM yang menggunakan teknologi pengolahan air minum yang aman dikonsumsi langsung baik bagi kesehatan keluarga dan ramah lingkungan. Proyek SPAM Lhokseumawe diharapkan menjadi pionir dalam pengembangan dan penyediaan solusi infrastruktur air minum berkualitas tinggi yang unggul dan berkelanjutan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Jaringan SPAM Lhokseumawe direncanakan akan beroperasi pada bulan Agustus 2025 dengan target pelanggan sebanyak 22.137 pelanggan domestik dan non domestik pada tahun pertama dengan target sebanyak 7.884 pelanggan, tahun kedua dengan target 7.051 pelanggan dan tahun ketiga sebanyak 7.202 pelanggan dengan area pelayanan di 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.9
Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum
Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Total Property Area Layanan	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3	
		Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik
Banda Sakti	10.113	5.783	2.101	1.158	1.071		
Blang Mangat	1.666					1.467	199
Muara Dua	5.177			3.934	888	231	124
Muara Satu	5.181					3.454	1.727
Total	22.137	5.783	2.101	5.092	1.959	5.152	2.050
			7.884		7.051		7.202

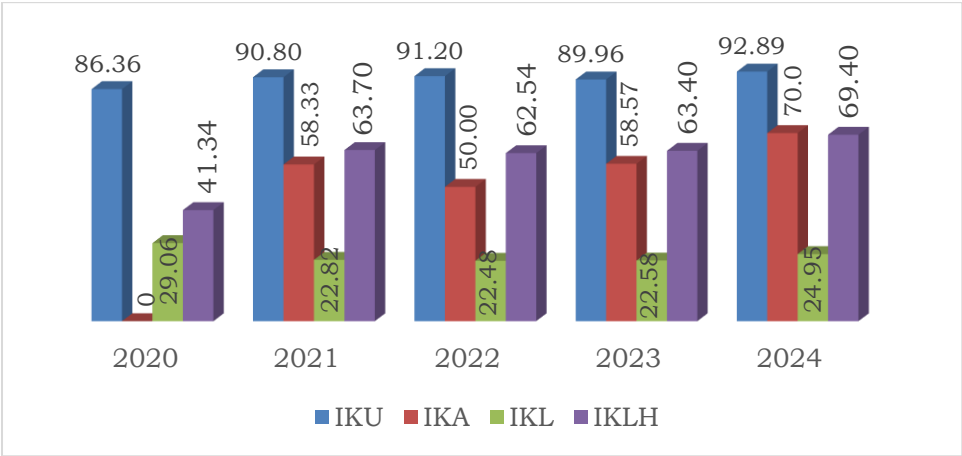
Sumber : PT. Aceh Water, 2025

2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas
2.1.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Gambar 2.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)
Tahun 2020-2024



Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya dalam komponen IKLH secara keseluruhan. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 63.4 dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 69,40. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 89.96 tahun 2023, pada Tahun 2024 meningkat menjadi 92.89. Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2023 sebesar 58.57 dan tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 70.00. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 22.58 pada tahun 2023. Dan sedikit meningkat menjadi 24.95 di Tahun 2024.

Perkembangan negatif dari Indeks kualitas lahan Kota Lhokseumawe terjadi karena luasan tutupan lahan Kota Lhokseumawe yang mengalami pengurangan dalam dokumen RTRW Lhokseumawe 2024-2044. Faktor yang menyebabkan Kota Lhokseumawe mengalami degradasi kualitas lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan atau pertanian menjadi area terbangun, penggundulan hutan atau perkebunan/pertanian untuk keperluan pertambangan, abrasi tanah, pencemaran tanah dan perubahan iklim.

2.1.1.6.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan persentase sampah yang berhasil diolah dan dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah yang tidak terolah menunjukkan sampah yang tidak dapat diolah dan memerlukan pembuangan akhir. Sampah terolah dapat berupa hasil daur ulang, kompos, atau energi dari sampah.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian khusus dikarenakan TPA Alue Lim yang terletak di gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Lhokseumawe masih dengan sistem *open dumping*, telah mendapat peringatan untuk ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Lhokseumawe dan mencegah ditutupnya TPA Alue Lim, pada tahun 2025 melalui pendanaan yang bersumber dari Otonomi Khusus Aceh

Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengadaan 1 paket Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah menjadi Energy Terbarukan yang diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah di fasilitas pengolahan sampah dan dapat menciptakan nilai tambah dari barang yang tidak berguna menjadi energy terbarukan.

Menangani sampah memerlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota perlu memperkuat infrastruktur (armada, TPS, TPA yang dikelola baik), menegakkan regulasi (Qanun No. 9 Tahun 2015), dan terus menggalakkan edukasi. Namun, peran aktif masyarakat adalah kunci: memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah seperti Bank Sampah. Dengan fokus pada transformasi tata kelola, peningkatan kesadaran lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan hukum, Kota Lhokseumawe berupaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.1.6.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Layanan ini juga mencakup upaya untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti kompos atau energi. Kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe masih dengan paradigma klasik yaitu kumpul, angkut dan buang dan bahkan ada sebagian yang dibakar di lingkungan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk diharapkan pengelolaan persampahan secara terpadu akan lebih optimal. Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Kota Lhokseumawe berada pada Gampong Alue Lim masih dioperasikan secara *open dumping*, perlu dukungan semua unsur dan kalangan untuk ditingkatkan menjadi *sanitary landfill* atau melalui pengelolaan sampah menjadi energy yang terbarukan. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Tabel 2.10
Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani	400	410	415	425
2	Jumlah Rumah Tangga	42.354	43.930	45.504	46.315
3	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	0.94	0.93	0.91	0.92

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2025

2.1.1.6.4 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Cakupan layanan sanitasi ini terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.

Tabel 2.11
Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Aman	%	6.90	7.34	7.06	8.36	9.43
	RT	2.876	3.110	3.102	3.802	4.367
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	81.17	85.76	83.21	82.01	84.28
	RT	33.827	36.321	36.554	37.316	39.033
Akses Belum Layak	%	7.56	3.80	6.64	6.38	3.40
	RT	3.149	1.611	2.918	2.904	1.573
Tidak Ada Akses	%	4.37	3.10	3.09	3.26	2.90
	RT	1.823	1.312	1.356	1.482	1.342
Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi	%	100	100	100	100	100
	RT	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2020, namun terlihat menurun sampai dengan tahun 2024. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolahan tinja (IPLT).

2.1.1.7 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1 Indeks Risiko Bencana

Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	Bahaya	
	Total Luas	Kelas
Banjir	6,784.38	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,914.45	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	136.44	Tinggi
Gempa Bumi	13,937.04	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	855.18	Tinggi
Kekeringan	13,937.04	Rendah
Longsor	231.84	Sedang
Tsunami	207.80	Sedang

Sumber : BPBD Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat bahaya tinggi, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah kekeringan, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah gempa bumi, longsor, dan tsunami. Sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2020-2023 menunjukkan kecenderungan menurun dari 143,20 (tinggi) di tahun 2020 menjadi 124.22 (sedang) di tahun 2023. Pada tahun 2024 IRB Kota Lhokseumawe sedikit meningkat menjadi 136,99 hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Daerah. Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

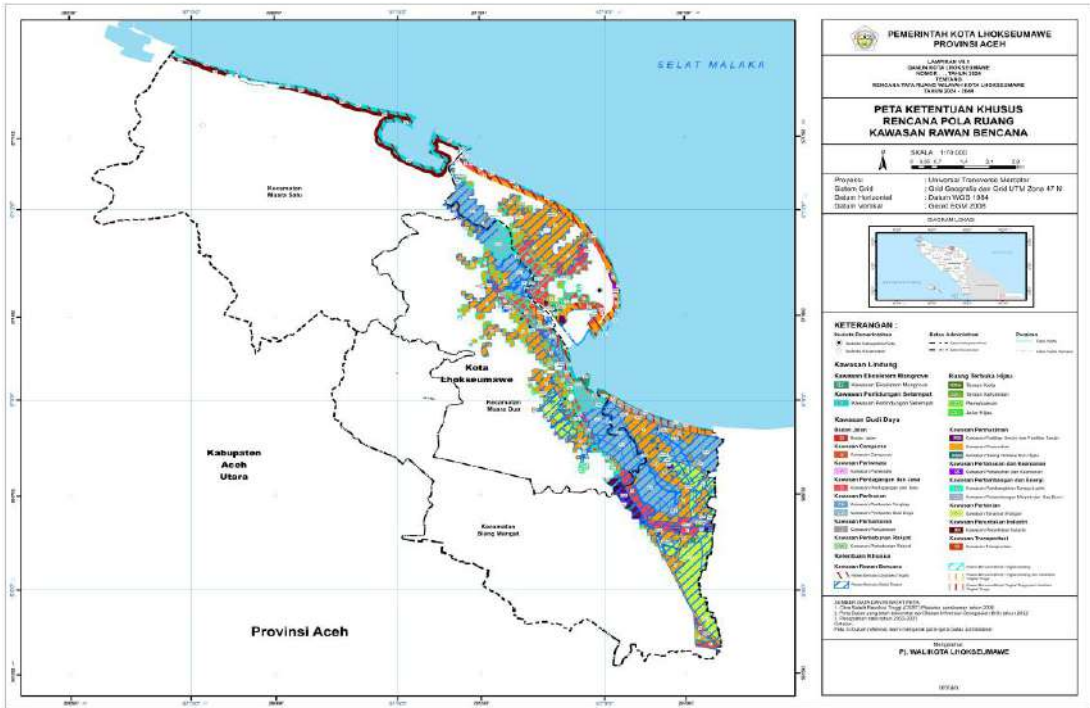
Tabel 2.13
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lhokseumawe	130.11	130.11	132.70	134.83	136.99	Sedang

Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>

Potensi bencana di Kota Lhokseumawe teridentifikasi pada 4 Kecamatan, baik bencana banjir, gelombang ekstrim dan Abrasi, serta tsunami. Sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu serta tanah longsor teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe

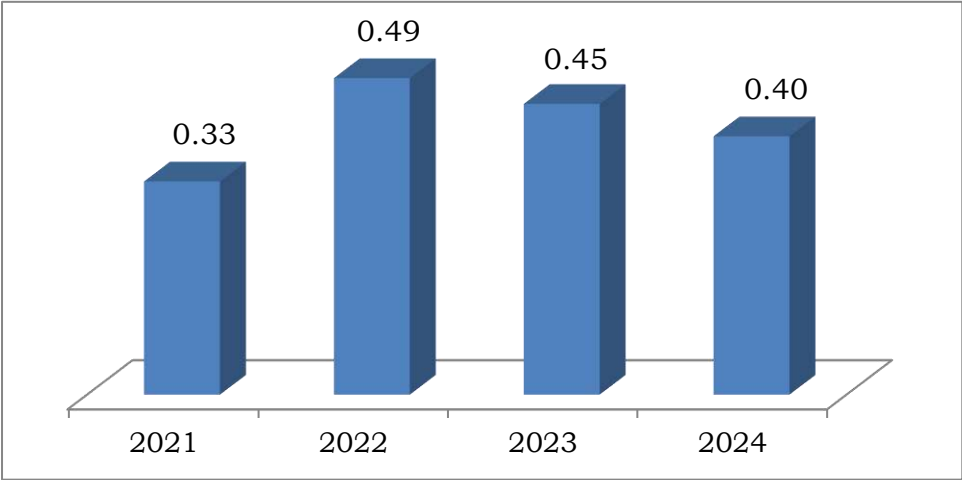


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.7.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik Kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Kota Lhokseumawe menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,33 pada tahun 2021 menjadi 0,40 pada tahun 2024.

Gambar 2.11
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2024



Sumber: BNPB, 2025

2.1.1.8 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

2.1.1.8.1 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banda Sakti	77.802	77.985	78.256	79.850	80.672
2	Muara Dua	50.929	51.472	52.079	53.068	53.764
3	Blang Mangat	26.162	26.559	26.992	28.146	28.775
4	Muara Satu	33.820	33.925	34.069	35.003	35.494
		188.713	189.941	191.396	196.067	198.705

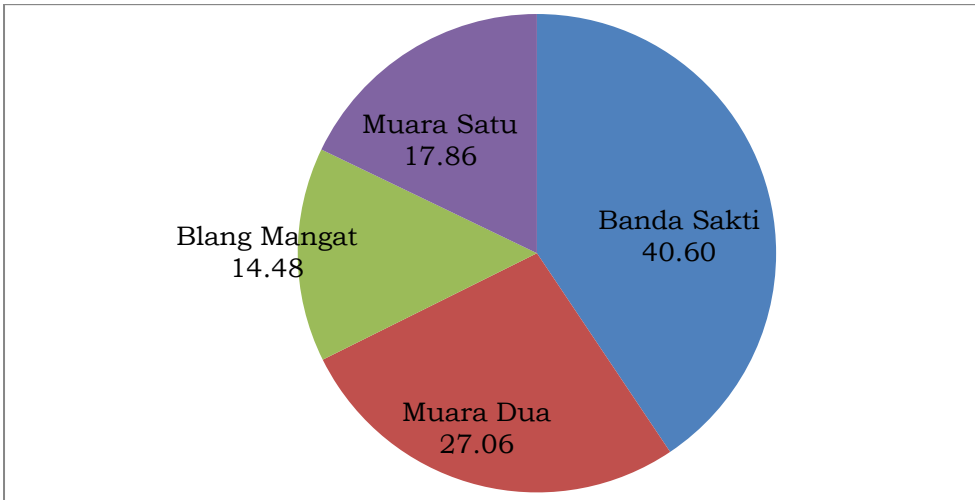
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memilik kecenderungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 196.067 jiwa menjadi 198.705 jiwa di tahun 2024. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2024 disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah dating penduduk.

2.1.1.8.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti dari tahun ke tahun merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 80.672 Jiwa pada tahun 2024. Kebalikan dengan Kecamatan Blang Mangat selain menjadi wilayah terbesar ke dua di Kota Lhokseumawe juga merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 28.775 jiwa pada tahun 2024.

Gambar 2.12
Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2025

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2024, Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 7.177 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terlenggang adalah Kecamatan Blang Mangat dengan angka kepadatan sebesar 513 Jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe di Tahun 2024 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 1.097 jiwa/km², hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk.

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banda Sakti	6.922	6.938	6.962	7.104	7.177
2	Muara Dua	881	891	901	918	930
3	Blang Mangat	406	473	481	502	513
4	Muara Satu	605	607	609	626	632
Lhokseumawe		1.042	1.161	1.057	1.083	1.097

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2025

2.1.1.8.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.45	1.42	0.77	1.66	1.3

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka dengan kecenderungan menurun. Pada 2020 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 1.45% kemudian terus menurun hingga tahun 2024 dengan laju pertumbuhan menjadi 1.3%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun karena pada tahun tersebut dilaksanakan sensus penduduk oleh BPS Kota Lhokseumawe, selain itu adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Lhokseumawe karena kematian penduduk akibat covid-19. Kemudian, pada tahun 2022 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,77%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2022. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori $r>0$ menunjukan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2.17
Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelahiran	jiwa	2.982	4321	4.083	3.533	3.576
2	Kematian	jiwa	994*	979*	867**	1.154*	1.162
3	Kedatangan	jiwa	4.148	4.518	3.552	5.563	4.949
4	Perpindahan	jiwa	6.717	7.857	4.525	6.395	5.659

Sumber: BPS dan Disducapil Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 jumlah kelahiran sebanyak 3.576 jiwa. Selanjutnya jumlah kematian sebanyak 1.162 jiwa. Kemudian jumlah pendatang sebanyak 4.949 Jiwa serta jumlah yang pindah sebanyak 5.659 Jiwa.

2.1.1.8.4 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2020	93.676	95.037	188.713	99
2	2021	94.303	95.638	189.941	99
3	2022	95.042	96.354	191.396	99
4	2023	97.339	98.728	196.067	98.59
5	2024	98.717	99.988	198.705	98.72

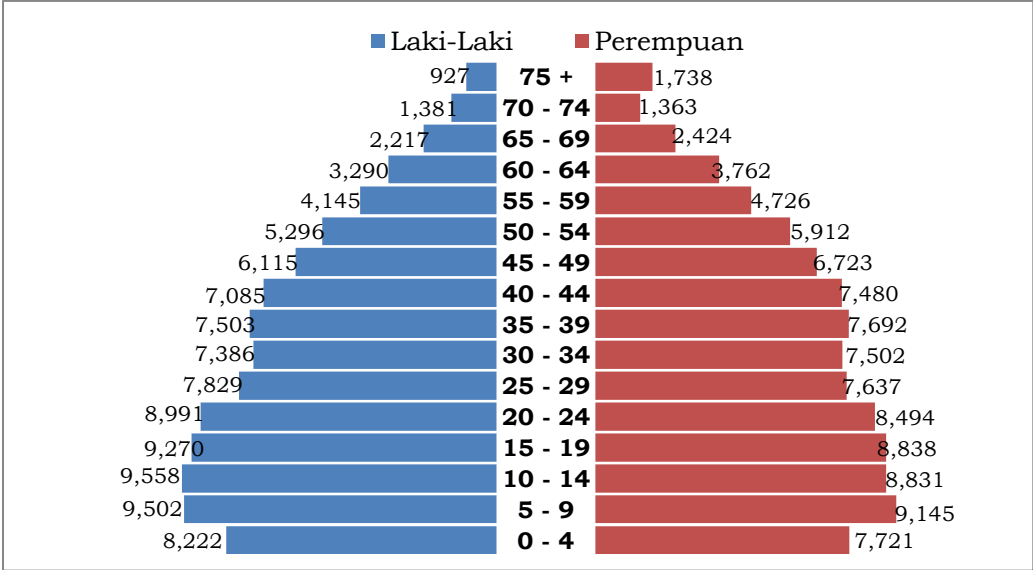
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, besaran nilai sex ratio di Kota Lhokseumawe menunjukkan angka tetap 99. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang kenaikannya, sehingga mempengaruhi sex rasionya. Pada tahun 2024, angka sex ratio menunjukkan angka 98.72, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

2.1.1.8.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Lhokseumawe memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah total sebesar 18.647 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 5-9 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 9.502 jiwa dan perempuan sebanyak 9.145 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 75+ tahun yaitu sebesar 2.665 jiwa.

Gambar 2.13
Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2024



Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Kota Lhokseumawe 2025

2.1.1.8.6 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun kedepan

Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu.

Kegunaan Proyeksi Penduduk dalam perencanaan diantaranya, proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai Kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan dan papan. Pemerintah memerlukan proyeksi penduduk untuk melihat jumlah penduduk di masa depan. Hal ini berguna supaya pemerintah dapat memperkirakan jumlah pangan, air dan perumahan yang dibutuhkan oleh penduduknya.

Tabel 2.19
Proyeksi Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Penduduk 2025	Proyeksi Penduduk 2030
1	<i>Penduduk</i>	197,35	203,41	217,83
2	- Laki-laki	98,03	101,08	108,27
3	- Perempuan	99,32	102,33	109,56
4	<i>Sex Rasio Penduduk</i>	98,7	98,8	98,8
5	<i>Angka ketergantungan</i>	45,7	45,8	47,3
	- Usia 0-14	52,37	52,84	54,48
	- Usia 15-64	135,49	139,53	147,92
	- Usia 65+	9,51	11,06	15,45

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Dari data di atas proyeksi penduduk di atas terlihat bahwa penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,06 ribu jiwa. Penambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas atau mobilitas. Untuk jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada jumlah penduduk perempuan. Untuk angka *sex ratio* tahun 2023 sebesar 98,7 dan naik di tahun 2025 dan 2030 menjadi sebesar 98,8. Bila dilihat dari rasio ketergantungan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023 masih tinggi sebesar 45,7 persen ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 orang penduduk non produktif. Pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tahun 2030 meningkat menjadi sebesar 47,3 persen.

Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030, begitu juga untuk Kota Lhokseumawe puncak bonus demografi akan terjadi antara 2025 sampai dengan 2030. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (sekitar 15-64 tahun) dalam suatu negara lebih besar

dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), bonus demografi bisa menjadi momentum untuk menjadikan Kota Lhokseumawe maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat, seperti dampak positif dari bonus demografi dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri, membuka peluang tenaga kerja yang berkompeten, membantu perkembangan ekonomi, ini artinya semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan.

Dampak negatif dari bonus demografi bila tidak di persiapkan secara matang maka akan membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024, nilai PDRB yang

terbesar 2.753.463,5 juta rupiah atau sebesar 23,24% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 1.978.225,7 juta rupiah atau 16,70% di tahun 2024. Selanjutnya, pada posisi ketiga adalah sektor kontruksi menghasilkan PDRB sebesar 12,96% atau 1.535.276,1 juta rupiah dari total PDRB. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.20
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020r	2021*	2022**	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	895,154.5	922,451.3	965,874.2	1,025,598.0	1,102,178.5
B	Pertambangan dan Penggalian	34,647.6	36,957.5	40,065.6	41,754.4	43,035.9
C	Industri Pengolahan	1,672,124.6	1,793.400.5	2,002,471.4	2.023,961.6	1,978,225.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,557.6	15,753.9	16,169.9	17,544.0	18,766.6
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,438.3	1,481.4	1,627.8	1,745.5	1,996.6
F	Konstruksi	1,375,488.6	1,364,872.5	1,454,765.8	1,487.217.80	1,535,276.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,889,921.5	2,013,276.4	2,184,656.3	2.561,330.4	2,753,463.5
H	Transportasi dan Pergudangan	726,190.8	902,547.1	1,022,517.0	1.267,330.9	1,470,903.4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,578.1	168,466.8	225,635.0	256,396.8	272,390.8
J	Informasi dan Komunikasi	313,008.4	333,007.8	366,897.7	402,754.4	408,712.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	269,367.5	272,137.9	280,387.5	254,387.7	317,291.5
L	Real Estat	431,928.7	452,445.2	475,763.5	508.542.1	519,468.6
M,N	Jasa Perusahaan	90,592.4	94,894.3	112,782.7	116,063.5	122,623.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	404,463.6	441,252.7	434,765.4	476,478.0	534,641.4
P	Jasa Pendidikan	147,476.1	148,982.3	154,734.5	164.979.5	178,510.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	309,552.8	338,571.7	389,765.8	400,412.4	421,815.8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	122,775.4	127,786.6	144,745.3	163,135.1	168,936.1
PDRB MIGAS		8,867,266.5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11,848,236.9
PDRB NONMIGAS		7,386,928.9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10,222,464.0

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 mencapai 6.984.713,3 juta rupiah dan pada Tahun 2024 mencapai sebesar 8.211.431,4 juta rupiah. Nilai PDRB 2024 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1.226.718,10 juta rupiah atau sebesar 17.56%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020r	2021*	2022**	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	622,995.8	612,746.7	602,948.8	608,700	645,707.9
B	Pertambangan dan Penggalian	28,186.2	30,187.3	30,287.3	31.400	32,160.6
C	Industri Pengolahan	1,330,546.4	1,331,428.6	1,368,986.0	1.387.500	1,395,382.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,559.0	14,515.0	14,836.1	15,800	16,704.4
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah dan daur ulang	894.5	915.2	1,002.2	1.100	1,099.5
F	Konstruksi	1,046,313.7	1,027,310.5	1,034,763.4	1.034.400	1,065,356.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,523,878.7	1,587,445.5	1,681,277.9	1.840.000	1,894.942.1
H	Transportasi dan Pergudangan	685,600.3	847,757.7	888,178.7	951.100	1,083,401.0
I	Penyediaan Makan Minum	106,394.1	105,493.3	136,910.3	150.400	152,782,7
J	Informasi dan Komunikasi	300,298.9	321,273.7	353,546.4	381.600	387,696.5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,058.9	170,306.0	163,188.5	145.882.8	175,682.6
L	Real Estate	342,345.30	355,052.50	372,743.50	355,052.5	381,036.4
M,N	Jasa Perusahaan	72,728.70	80,328.50	80,134.50	80,328.5	84,720.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	307,619.20	306,976.70	320,743.50	306,976.7	338,923.1
P	Jasa Pendidikan	101,178.70	104,154.50	109,056.60	104,154.5	113,782.7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,925.50	310,034.70	310,956.30	310,034.7	318,085.2
R,S,TU	Jasa lainnya	98,727.80	111,265.50	119,524.40	111,265.5	123,966.6
PDRB MIGAS		7,252,904.80	7,543,739.10	7,861,007.80	7,543,739.1	8,211,431.4
PDRB NONMIGAS		6,069,121.60	6,330,756.60	6,635,158.40	6,330,756.6	6,987,695.5

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2024, nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai 1.894.942,1 juta rupiah atau sebesar 23.24% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 16,70% atau 1.395.382,7 juta

rupiah di tahun 2024 Selanjutnya, sektor kontruksi menghasilkan PDRB sebesar 1.065.356,5 juta rupiah atau 12,96% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) kontribusi Kota Lhokseumawe terhadap PDRB ADHK Propinsi Aceh mencapai pada angka 6.07%.

2.1.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2020-2024), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 diperlihatkan oleh gambar berikut:

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.85	-1.65	-1.60	0.96	6.07
B	Pertambangan dan Penggalian	2.53	7.1	0.33	3.79	2.31
C	Industri Pengolahan	1.15	0.07	2.82	1.35	0.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.84	-0.30	2.21	6.45	5.77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.1	2.32	9.51	6.33	3.18
F	Konstruksi	4.08	-1.82	0.73	-0.04	3.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3.85	4.17	5.91	9.44	2.99
H	Transportasi dan Pergudangan	-22.31	23.65	4.77	7.09	13.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-6.91	-0.85	29.78	9.82	1.61
J	Informasi dan Komunikasi	12.35	6.98	10.05	7.93	1.60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	-3.81	-4.18	-10.60	20.43
L	Real Estat	2.80	3.57	3.71	4.98	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0.28	0.83	10.45	-0.24	5.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0.17	5.16	-0.21	4.48	5.67
P	Jasa Pendidikan	3.53	1.41	2.94	4.71	4.33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	3.63	9.52	10.36	0.30	2.29
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	2.12	2.28	12.70	7.42	3.72
PDRB Migas		-1.80	3.84	4.01	4.21	4.46
PDRB Tanpa MigasMigas		-2.40	4.75	4.31	4.81	5.31

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tahun 2020 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12.35% sedangkan paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar -22.31%. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan yaitu sebesar 29.78% sedangkan yang paling kecil adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar -4.18%.

Kemudian pada tahun 2024 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 20.43%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan 0.57%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2024 hampir semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.2.1.3 Distribusi Persentase PDRB

Pada kurun waktu 2020-2024, dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB tetap pada urutan pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada posisi kedua penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe adalah Industri pengolahan dan disusul oleh sektor kontruksi di posisi ketiga.

Dilihat dari PDRB ADHB, terjadi kecenderungan penurunan di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor walaupun berada pada urutan pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.31% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 23.24%. Namun untuk sektor Industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 18.86% dan mengalami penurunan menjadi 16.70 pada tahun 2024. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,	10.10	9.80	9.40	9.18	9.30
B	Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.39	0.39	0.37	0.36
C	Industri Pengolahan	18.86	19.02	19.48	18.12	16.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	15.51	14.47	14.15	13.31	12.96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.31	21.35	21.26	22.93	23.24
H	Transportasi dan Pergudangan	8.19	9.57	9.95	11.35	12.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.89	1.79	2.20	2.30	2.30

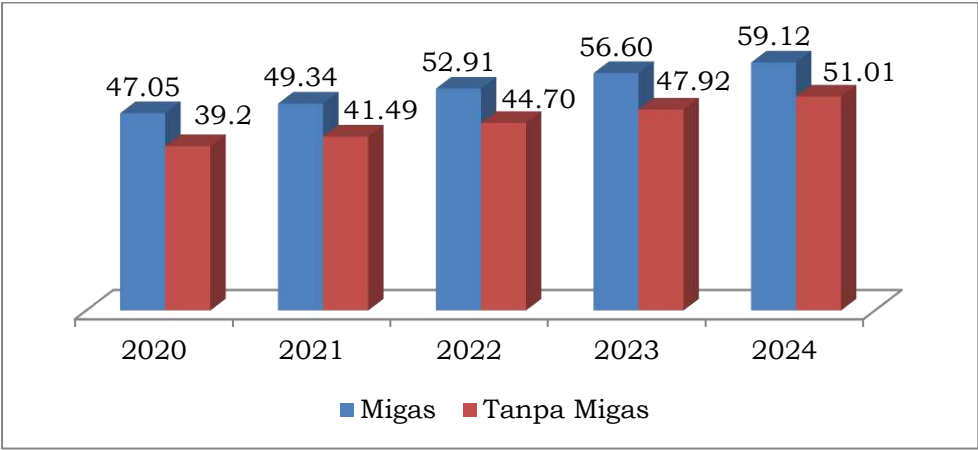
No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	3.53	3.53	3.57	3.61	3.45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.04	2.89	2.73	2.28	2.68
L	Real Estat	4.87	4.80	4.63	4.55	4.38
M,N	Jasa Perusahaan	1.02	1.01	1.10	1.04	1.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.56	4.69	4.27	4.27	4.51
P	Jasa Pendidikan	1.66	1.58	1.51	1.48	1.51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.49	3.59	3.79	3.58	3.56
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1.38	1.36	1.41	1.46	1.43
PDRB Migas		100	100	100	100	100
PDRB tanpa Migas		83.31	83.64	83.34	84.67	86.28

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 2.14
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

PDRB per kapita Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita sebesar 47.05 juta rupiah dan pada tahun 2024 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 59.12 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Lhokseumawe tahun 2024 meningkat sebesar 2.52 juta rupiah dari tahun 2023.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja

yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

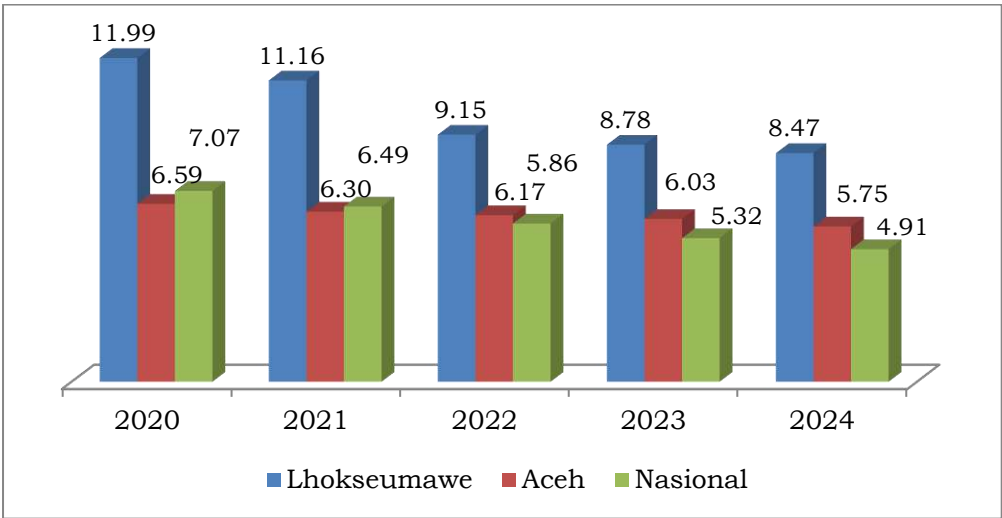
Tabel 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	11,262	10,804	9,059	8.221	8.111
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	93,958	96,835	98,953	93.594	95.783
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.99	11.16	9.15	8.78	8.47

Sumber : BPS, 2025

Tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.99% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.47% pada tahun 2024. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Gambar 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Pada periode Tahun 2020-2024, TPT Kota Lhokseumawe selalu di atas rata-rata TPT Aceh dan TPT nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kota Lhokseumawe jauh diatas TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional. Pada tahun 2020 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 11.99 mengalami penurunan, menjadi 11.15 persen di tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2024, TPT Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 8.47 persen, penurunan TPT ini tetapi masih menempakan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Aceh.

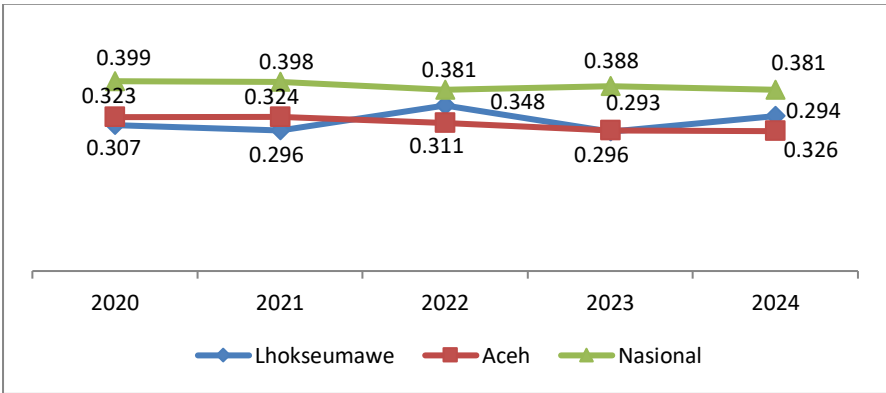
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Lhokseumawe adalah keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, kurangnya investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri turut menghambat penciptaan lapangan kerja, penurunan aktivitas industri besar seperti sektor migas juga berdampak pada pengurangan lapangan kerja.

Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu berupaya menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor UMKM dan industri kreatif, program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, sektor usaha mikro, kecil dan menengah perlu didukung penuh melalui pemberian modal, pelatihan dan akses pasar. Pada tahun 2025 untuk mendukung kebutuhan industri bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan migas melalui dana TDBH Migas.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Gambar 2.16
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Rasio Gini Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat termasuk dalam kondisi ketimpangan sedang/moderat (koefisien gini berkisar antara 0.31-0.40). Besaran Rasio Gini Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Nasional namun lebih tinggi dari Aceh. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di Kota Lhokseumawe yang lebih merata dibandingkan Nasional. Gini Rasio Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 0.307 turun menjadi 0.296 pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0.348 dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0.296 dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0.326.

2.1.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sebagai berikut.

Tabel 2.25
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Lhokseumawe						
Garis Kemiskinan	Rupiah	401.158	427.045	460.583	498.431	522.671
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	22,69	23,38	23,03	23,10	22,77
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	10,80	11,16	10,84	10,73	10.44
Aceh						
Garis Kemiskinan	Rupiah	522.126	541.109	579.227	627.534	661.227
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	814,91	834,24	806,62	806,75	804,53
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	14.99	15.33	14.64	14.45	14.23

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 22,69 ribu jiwa dan meningkat di tahun 2021 menjadi 23,38 ribu jiwa atau setara 11,16% dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2021. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dan adanya pandemic Covid-19. Kemudian menurun menjadi 23.03 ribu jiwa di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 23,10 ribu jiwa atau setara 10.73% dan tahun 2024 menurun menjadi 22,77 ribu jiwa atau 10.44%.

Dibandingkan dengan Aceh, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe relatif lebih kecil. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Aceh 14,99% kemudian naik menjadi 15,33% pada tahun 2021 sebagai dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 14,64% dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 14.45% dan tahun 2024 turun menjadi 14,23%.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks kedalaman kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami peningkatan cukup drastik pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,98. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020-2024 fluktuatif namun pada tahun 2021 dan 2023 mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2020-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	1.56	0.29
2021	1.87	0.54
2022	1.33	0.26
2023	2.23	0.70
2024	1.98	0,67

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.27
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

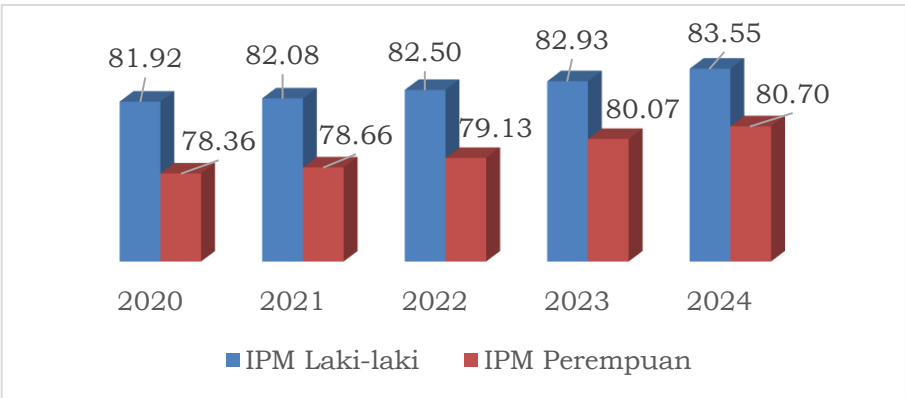
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Metode Baru)	Tahun	74,34	74,38	74,59	74,76	74.93
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,20	15,21	15,27	15,54	15,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,91	11,11	11,12	11,27	11,31
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp.	11.367	11.390	11.701	12.125	12.694
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)		78,65	78,92	79,38	80,26	80.89

Sumber: BPS, 2025

Dari 4 (empat) komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan standar hidup masih perlu perbaikan pada setiap komponen agar capaiannya IPM Kota Lhokseumawe bisa lebih meningkat posisinya dari tahun 2024 di posisi ke tiga setelah Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pada tahun 2024 IPM laki-laki Kota Lhokseumawe sebesar 83.55 sedangkan IPM perempuan Kota Lhokseumawe jauh lebih rendah yaitu sebesar 80.70. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

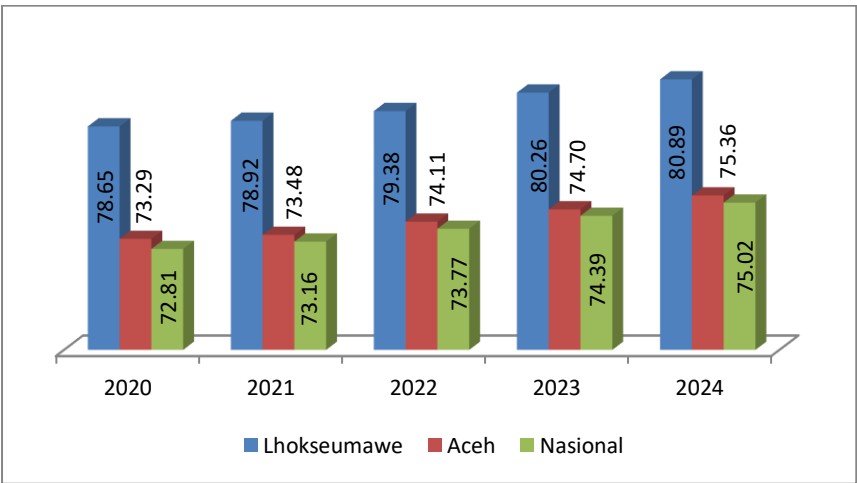
Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe sebesar 78,65, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 80,89 pada tahun 2024. Perbandingan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional dapat di lihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.18
Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

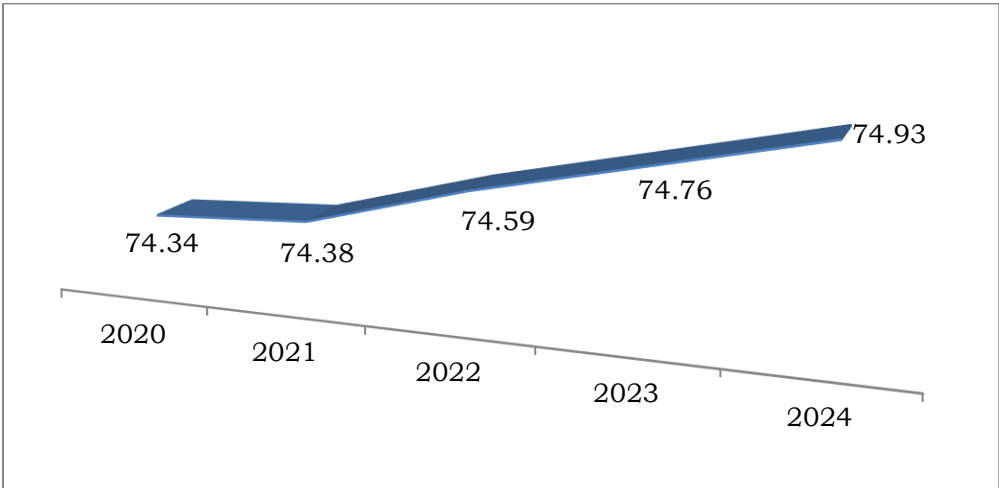
Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, nilai IPM Kota Lhokseumawe jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Aceh dan nilai IPM Nasional. IPM Kota Lhokseumawe menduduki peringkat ke tiga di Aceh. Nilai IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 80,89. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Lhokseumawe ini termasuk kategori sangat tinggi (nilai $IPM > 80$). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.19
Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

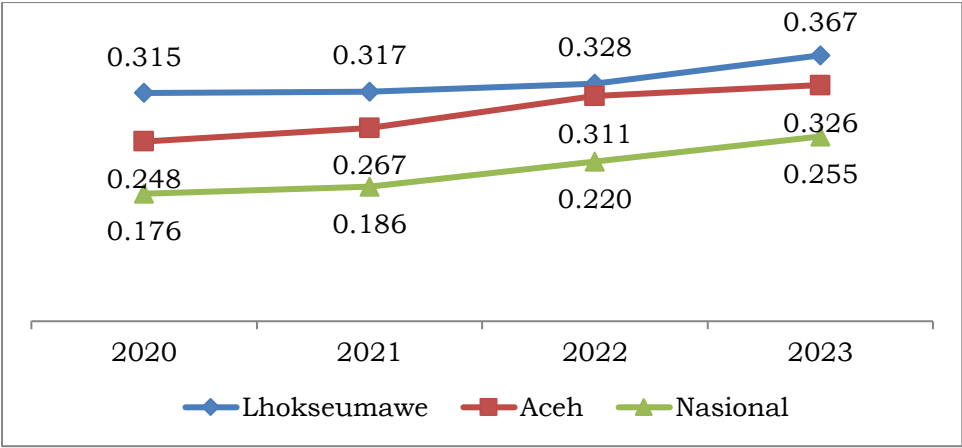
Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 74,34 tahun dan terus meningkat menjadi 74,93 tahun pada 2024. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Lhokseumawe cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan keluarga. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Indikator yang dinilai adalah Keluarga mengikuti KB, Ibu melakukan persalinan di fasyankes, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat ASI eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota JKN, Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berikut Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Gambar 2.20
Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2020-2024



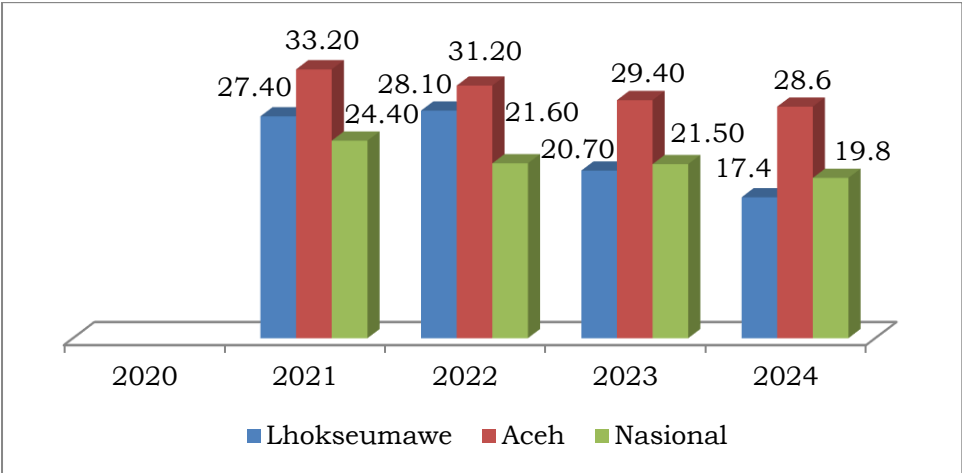
Sumber : Dinkes Aceh Tahun 2025

Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 masih dalam kategori **keluarga tidak sehat** karena lebih kecil dari 0,500. Untuk pencapaian 12 (dua belas) indikator keluarga sehat harus diupayakan dengan kerja keras dan pembangunan kesehatan yang memadai serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga sangat diperlukan.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.21
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2025

2.1.2.2.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Program JKN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Program JKN memastikan semua masyarakat Kota Lhokseumawe memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan promosi kesehatan.

Tabel 2.28
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta JKN	%
1	2020	188,713	182.427	96,67
2	2021	189,941	179.152	94,32
3	2022	191,396	188.248	98.35
4	2023	196,067	183.996	93.84
5	2024	198.705	185.363	93.28

Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe, 2025

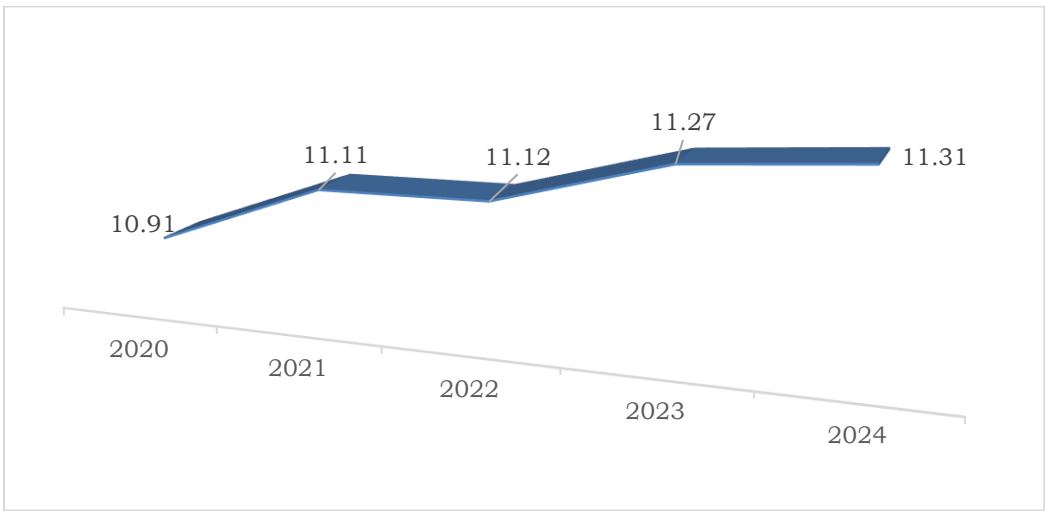
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 96.67% atau 182.427 peserta dari jumlah penduduk 188.713 jiwa. Dan pada tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menurun menjadi 93.28% atau 185.364 peserta dari 198.705 jiwa penduduk.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.

Gambar 2.22
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



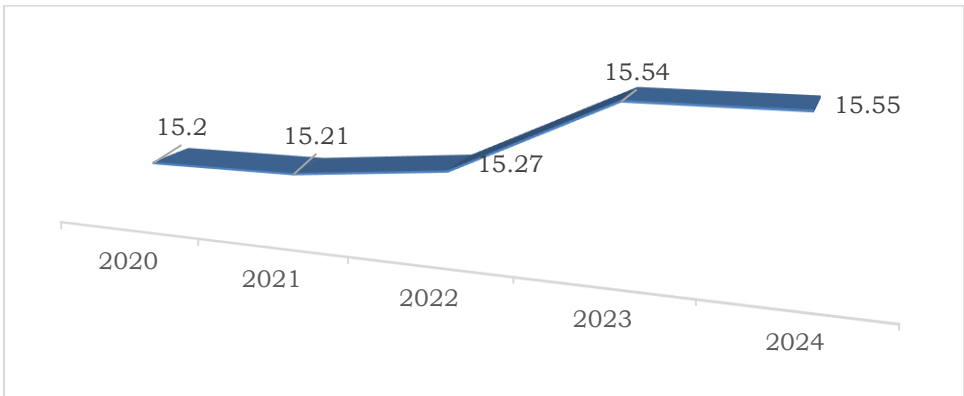
Sumber: BPS, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah sebesar 10.90 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,31 tahun pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Lhokseumawe semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.23
Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah sebesar 15.20 tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15.51 tahun.

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka Kompetensi Minimum (AKM) adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Perkembangan kompetensi literasi dan numerasi pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024

AKM	Lhokseumawe			Nasional		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rerata Kompetensi literasi SD berdasarkan AN	63.32	64.84	56.72	61.53	61.53	70.62
Rerata Kompetensi Numerasi SD berdasarkan AN	39.51	55.43	49.44	46.67	46.67	62.62
Rerata Kompetensi literasi SMP berdasarkan AN	51.85	58.36	68.34	59.00	59.00	68.27
Rerata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan AN	35.36	39.5	59.94	40.63	40.63	65.00

Sumber: Rapor Pendidikan dan Surat Mendikdasmen No.1422/MDN.A/PR.07.05/2025

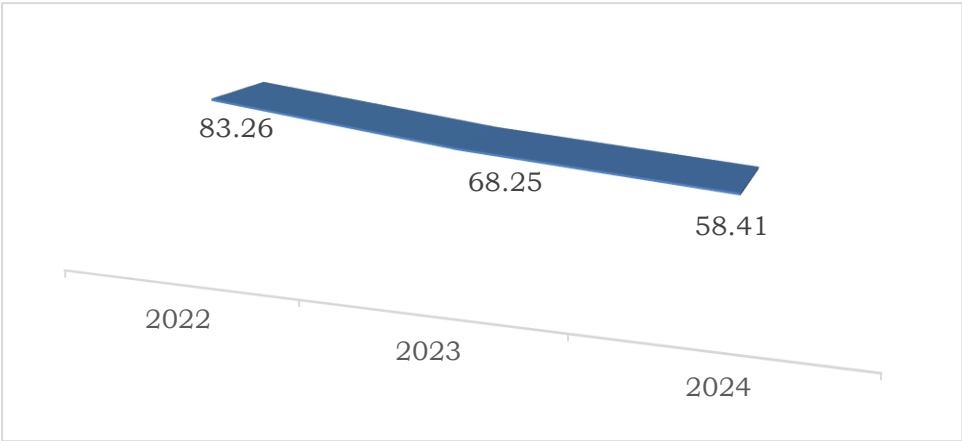
Kompetensi Literasi SD Kota Lhokseumawe sebesar 75.62 pada tahun 2024 berada di atas Kompetensi Literasi SD Nasional. Untuk Kompetensi Numerasi SD Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 70.34 berada di atas kompetensi numerasi SD nasional yaitu 62.62. Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional.

2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan aspek masyarakat, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah yang akan berimplikasi pada kepadatan penduduk.

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe
Tahun 2022-2024



Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 memperlihatkan IPLM Kota Lhokseumawe menduduki posisi 3 di Aceh yaitu sebesar 83.26 dengan kategori Tinggi. Namun pada Tahun 2023 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi kategori sedang. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Lhokseumawe sebesar 68.25 dalam karegori sedang. Kota Lhokseumawe berada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96. Pada tahun 2024 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penuriunan menjadi sebesar 58,41 dalam kategori sedang. Selama 3 (tiga) tahun terakhir IPLM Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Tenaga Kerja Persektor usaha	2020	2020		2021		2023		2024	
			Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja
1.	Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Perburuan Perikanan	N/A	643	4.591	730	4.591	1.010	16.145	460	16.618
2.	Pertambangan dan Penggalian	N/A	293	202	295	202	346	700	352	722
3.	Industri Pengolahan	N/A	1.701	4.307	1770	4.307	2.008	9.589	2.024	9.898
4.	Listrik, Gas dan Air	N/A	1.159	283	1.183	283	1.082	451	792	466
5.	Konstruksi	N/A	6.402	7.273	10.246	7.273	3.157	7.436	4.010	7,551
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	N/A	2.901	20.104	3.351	20.104	4.262	18.237	4.232	18.822
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	N/A	438	5.463	463	5.463	638	3.773	667	3.896
8.	Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	N/A	839	1.200	866	1.200	1.129	2.256	1.056	2.331
9.	Jasa Kemasyarakatan	N/A	9.251	14.780	13.327	14.780	10.515	7.971	13.513	8.228
10	Jumlah peserta JAMSOSTEK / Jumlah tenaga kerja	N/A	23.627	58.203	32.231	58.203	24.047	66.558	27.106	68.532
Persentase		N/A	40.59		55.38		36.13		39,55	

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Dari tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2021, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah 40.59%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 55.38%, tetapi di tahun 2023 menurun hingga sebesar 36.13% dan tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 39,55%.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari

masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Warisan budaya benda seperti situs Kurok-kurok, Gua Jepang, makam kuno, naskah/benda kuno dan cagar budaya lainnya yang seluruhnya berjumlah 22 cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Kota Lhokseumawe telah memiliki warisan budaya tak benda yaitu Canang Ceurekeh serta kesenian tradisional khas Lhokseumawe yaitu Rapai Uroh Duek. Selain itu kesenian Aceh seperti rapai, seurene kale, seudati, saman, ranup lampuan, syair, dalil khairat menjadi kekayaan budaya tak benda yang terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian.

Peninggalan budaya dapat dibuktikan dengan ditemukannya cagar budaya di Kota Lhokseumawe. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Muallem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa situs atau cagar budaya Kota Lhokseumawe terbanyak berada di kecamatan Banda Sakti yaitu 9 situs terdiri dari 6 makam, 1 Tugu, dan 1 kurok-kurok

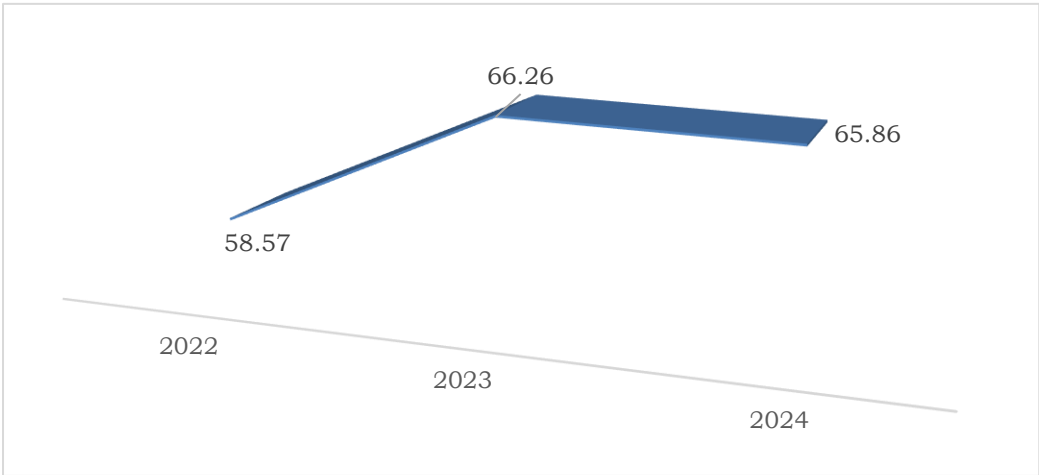
(benteng), Sedangkan situs atau cagar budaya paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Dua yaitu 1 Tugu dan 1 Rumah Adat Ulee Balang. Dari 22 situs atau cagar budaya di Kota Lhokseumawe, belum ada satupun yang terlegalisasi.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

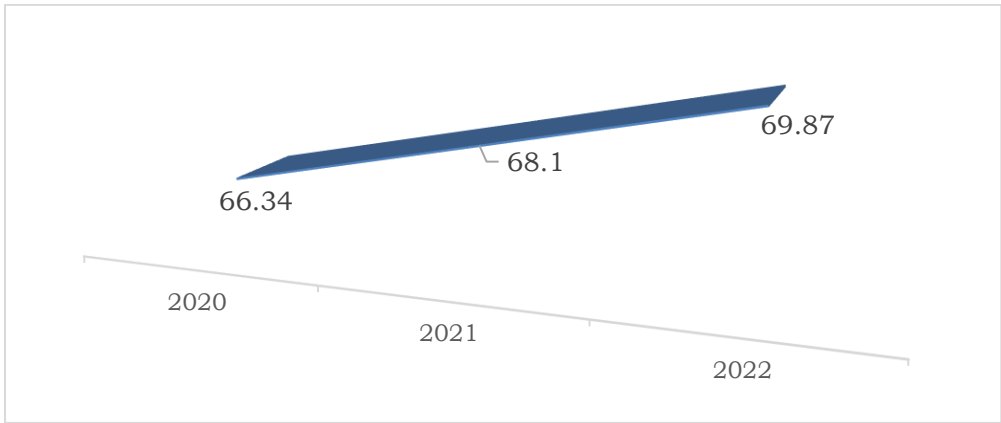


Sumber: BKKBN Aceh, 2025

2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan menjadi ukuran untuk mematikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan anak khususnya terkait perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor. Indeks Perlindungan Anak di lihat dari 5 (lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.26
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Lhokseumawe 2020-2022



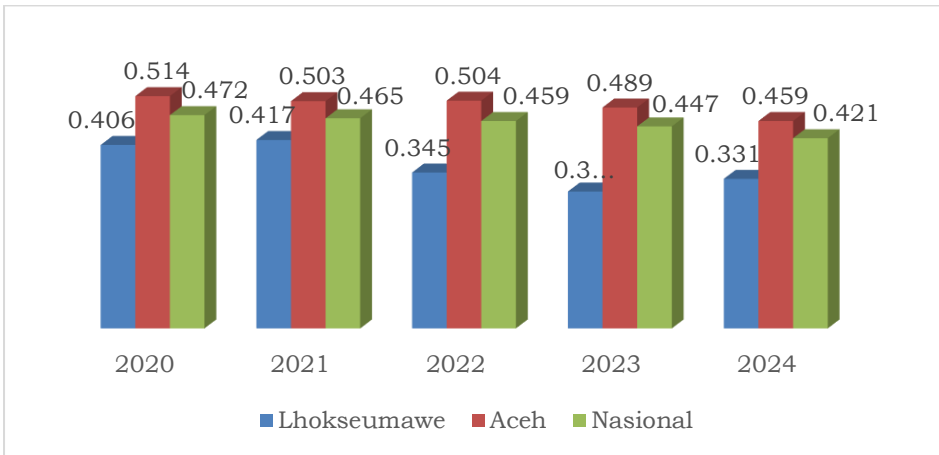
Sumber : DP3AP2KB, 2025

Pada gambar di atas terlihat Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 66,34 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,87.

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Berikut Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.27
Indeks Ketimpangan Gender
Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2020-2024



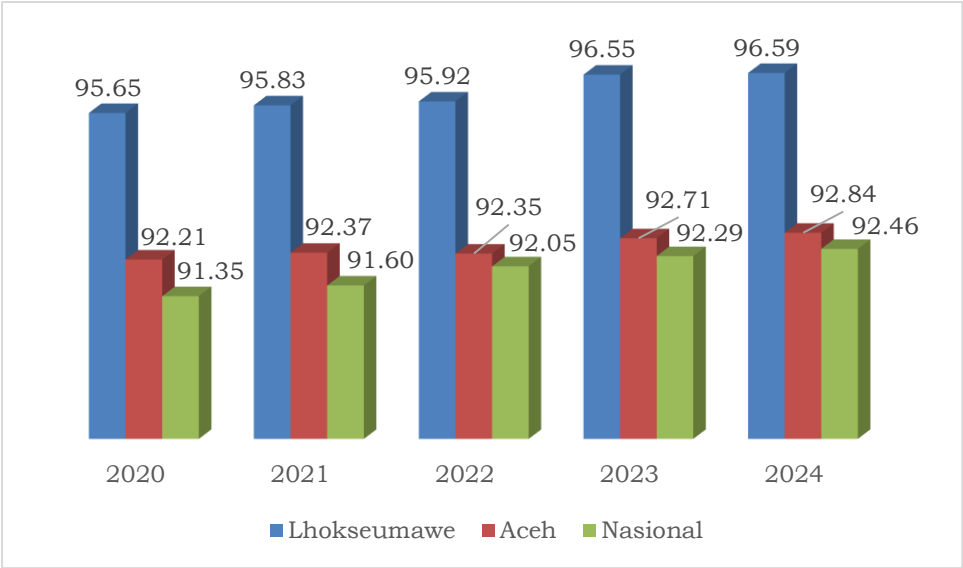
Sumber: BPS, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2020 IKG Kota Lhokseumawe sebesar 0.406 lebih rendah dibandingkan dengan Aceh sebesar 0,514 dan Nasional sebesar 0,472. Sedangkan pada tahun 2024 IKG Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.331 masih lebih rendah dibandingkan Aceh sebesar 0.459 dan Nasional sebesar 0.421.

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.28
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

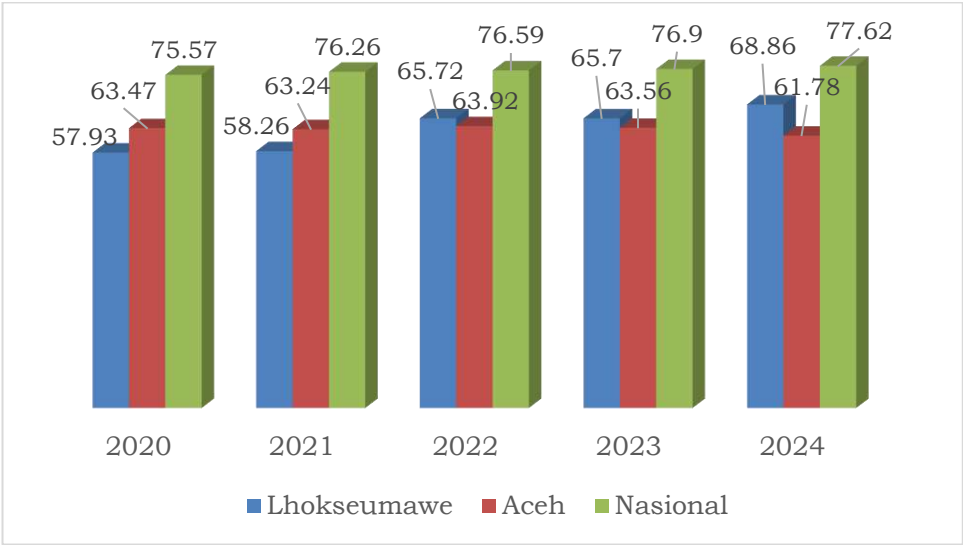
IPG Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

2.1.2.6.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi

ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.29
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kota Lhokseumawe yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2019-2023 memperlihatkan perkembangan yang positif. Apabila dilihat dari data pilah gender di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023, terdapat 7 orang perempuan atau 28 persen yang menjadi anggota DPRK.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia
2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah 46.45%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.32
Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia <15 th +usia>64th	60.029	59.536	59.668	62.875	63.029
2	Penduduk usia 15-64	128.684	130.405	131.728	133.192	135.676
Rasio Ketergantungan		46.65	45.65	45.30	47.21	46.45

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tahun 2020-2024, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan mencapai 46.65%, dan mengalami pnurunan pada tahun 2021, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Lhokseumawe semakin berkurang setiap tahunnya.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian. Pada kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2020 sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 21.31%, lalu menurun menjadi 21.26% di tahun 2022. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan meningkat kembali menjadi 23,24% di tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 2.99%. Sektor perdagangan berdasar pada posisi pertama dalam penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.33
Rasio PDRB Perdagangan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Perdagangan	1.889.921,5	2.013.276,4	2.184.656,3	2.561.330,4	2.753.463,5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150,1	8.567.858,1	9.457.579,4	10.222.464,0
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		21.31	21.35	21.26	22.93	23.24
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		25.58	25.52	25.49	27.08	26.94
Laju Pertumbuhan sektor perdagangan		-3.85	4.17	5.91	9.44	2.99

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 18.78%, lalu meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 19.48% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 18.12%. dengan laju pertumbuhan 0.57%.

Tabel 2.34
Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Industri	1,672,124.6	1.793.400.5	2.002.471.4	2.023.961.6	1.978.225,7
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		18.86	19.02	19.48	18.12	16.70
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		22.64	22.73	23.37	21.40	19.36
Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan		1.15	0.07	2.82	1.35	0.57

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan negatif, Pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi penyediaan makan dan minum terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 1.89%, lalu menurun di tahun-tahun berikutnya hingga meningkat menjadi 2.30% di tahun 2024.

Tabel 2.35
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makmin	167.578,10	168.466,80	225.635,00	256.396,8	272.390,8
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		1.89	1.79	2.20	2.30	2.30
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		2.27	2.14	2.63	2.71	2.67
Laju Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum		-6.91	-0.85	29.78	9.82	1.61

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2025

2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

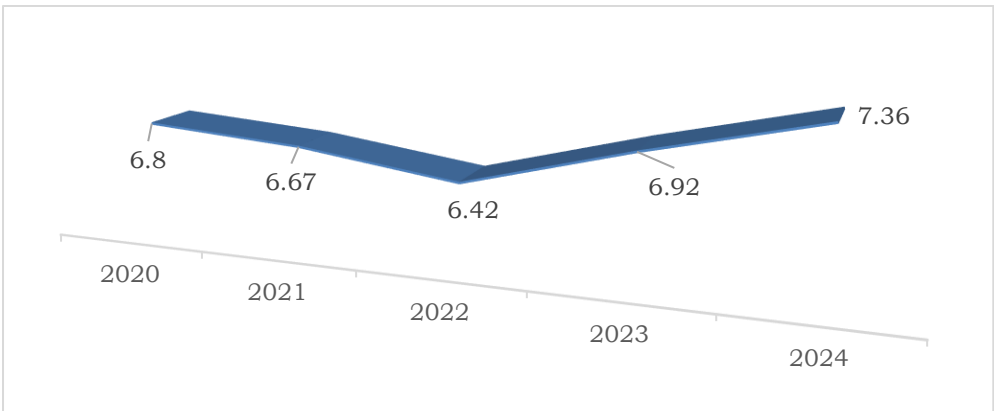
Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". "Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha

mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara penghitungan rasio kewirausahaan dengan rumus berikut:

- Rasio Wirausaha Pemula = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$
- Rasio Wirausaha Mapan = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

Perkembangan rasio kewirausahaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.30
Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, Kementerian Koperasi 2025

2.1.3.2.5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat dalam satuan rupiah. Perkembangan volume usaha koperasi dan PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB	Rasio
2020	30,185,344,000	8,867,266,500,000	0.34
2021	14,796,727,000	9,422,285,900,000	0.16
2022	15,573,222,000	10,263,425,400,000	0.15
2023	88.386.445.000	11.169.632.100.000	0.79
2024	24.349.881.000	11.848.236.900.000	0.21

Sumber: Disperindagkop, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 volume usaha koperasi sebesar 0.34 persen terus menurun hingga sebesar 0.15 persen 2022, namun tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 0.79 persen dan tahun 2024 kembali turun menjadi 0.21 persen.

2.1.3.2.6 **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian**

Sektor UMKM memegang peran penting dalam peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang memulai dengan modal terbatas dan memanfaatkan dapur rumah sebagai tempat produksi, mencerminkan semangat kewirausahaan dari skala kecil. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Berikut proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.37
Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Mikro	5.123	5.239	5852	6.346	6396
2	Jumlah Usaha Kecil	348	348	348	348	348
3	Jumlah Usaha Menengah	60	60	60	60	60
4	Jumlah UMKM	5.623	5.739	6353	6.848	6.897
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)		7.26	7.11	6.42	5.96	5.92

Sumber: Disperindagkop, 2025

Selama lima tahun terakhir, proporsi UKM non pertanian menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024 proporsi UKM non pertanian sebesar 5.93 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah UMKM yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah UKM non pertanian.

2.1.3.2.7 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2020–2024 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

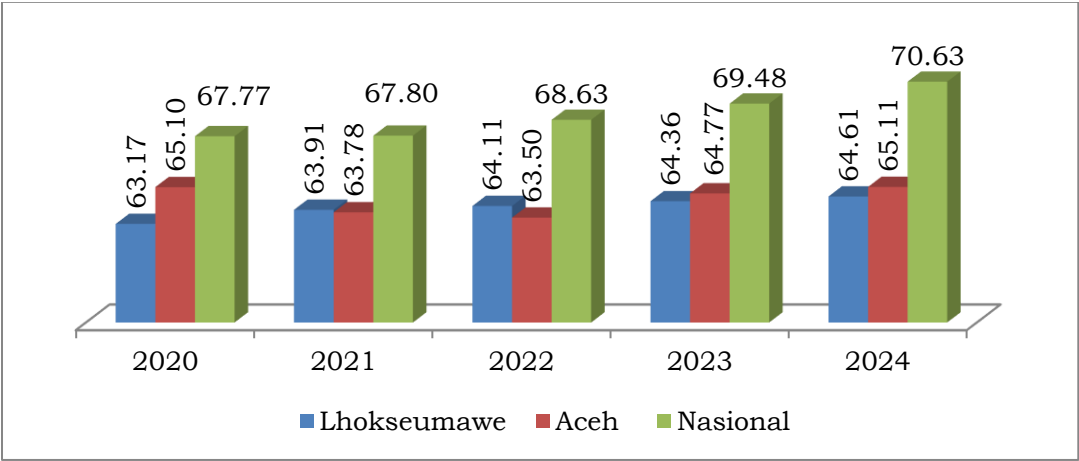
Tabel 2.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2020	79.61	47.10	63.17
2021	80.02	48.15	63.91
2022	80.26	48.33	64.11
2023	77.64	51.50	64.36
2024	79.44	50.25	64.61

Sumber : BPS, 2025

Selama periode Agustus 2020-2024 menurut BPS Kota Lhokseumawe, TPAK mengalami peningkatan. Pada Agustus 2020 TPAK Kota Lhokseumawe sebesar 63.17%. Tahun 2024 TPAK mengalami kenaikan sebesar 1.44 poin menjadi 64.61%. Nilai TPAK sebesar 64.61% mengandung arti ada sekitar 64 penduduk kategori angkatan kerja diantara 100 penduduk usia kerja. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini bisa dijelaskan karena pada umumnya laki-laki sebagai penanggung nafkah utama yang aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa.

Gambar 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data di atas menurut BPS Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 bila dicermati TPAK Kota Lhokseumawe lebih rendah dibandingkan TPAK Aceh dan nasional. Pada tahun 2021-2022 TPAK Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh namun, tetap lebih rendah dari nasional. Namun pada tahun 2023-2024 TPAK Lhokseumawe kembali lebih rendah dari Aceh dan Nasional. Rendahnya TPAK Kota Lhokseumawe disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.

2.1.3.2.8 Indeks Inovasi Daerah

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja

penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.39
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2023			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Kejayaan)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00

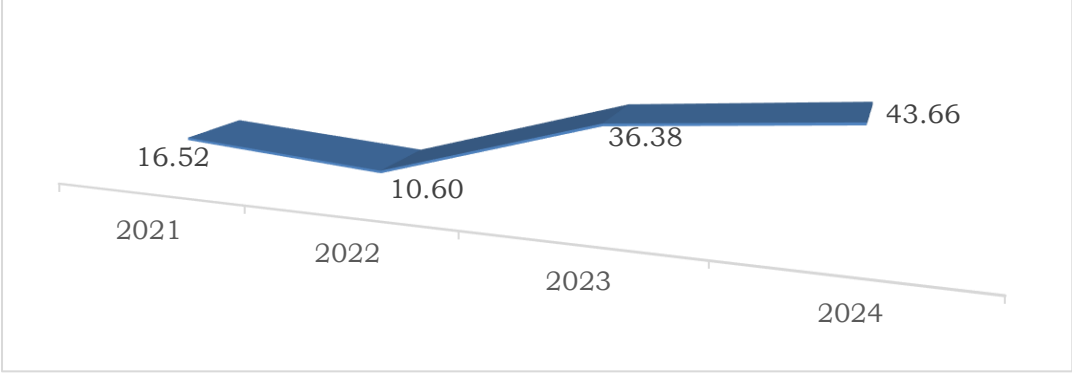
No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasi tertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 36,38 berada pada peringkat ke 83 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong dalam kelompok pemerintah kota yang inovatif. IID tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang pada saat itu IID Kota Lhokseumawe sebesar 10.60 dan berada pada peringkat ke 91 di Indonesia. Tahun 2024 IID Kota Lhokseumawe meningkat Kembali menjadi sebesar 43.66 dan berada pada peringkat ke 77 di Indonesia. Selanjutnya berikut ini merupakan posisi peringkat IID Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 s.d 2024.

Gambar 2.32
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024



Sumber : SK Kemendagri tentang IID 2021-2024 (diolah)

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Penerapan ekonomi hijau dan biru adalah kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB.

2.1.3.3.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu 2020-2024, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,10% per tahun dan menurun hingga 9,18% pada tahun 2023. Kemudian angka tersebut sedikit

meningkat menjadi 9.30% pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 6.07%. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Lhokseumawe kepada sektor-sektor tersier.

Tabel 2.40
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	895.154.5	922.451.3	965.874.2	1.025.598.0	1.102.178,5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		10.10	9.80	9.40	9.18	9.30
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		12.12	11.70	11.27	10.84	10,79
Laju pertumbuhan		3.85	-1.65	1.60	0.96	6.07

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital
2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 s.d 2024 seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.33
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/home>, 2025

Capaian IMDI Kota Lhokseumawe tahun 2024 kurun waktu 2022-2024 terus meningkat, tahun 2022 IMDI Kota Lhokseumawe sebesar 40.28 meningkat menjadi sebesar 45.76 tahun 2024. Dari 4 (empat) pilar dari 2022 s.d 2024 pilar 2 s.d pilar 4 mengalami peningkatan hanya pilar 1 yang mengalami penurunan.

2.1.3.5 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah komponen pengeluaran terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam suatu perekonomian diinvestasikan dari pada dikonsumsi. Komponen ini mengukur nilai perolehan aset tetap baru atau yang sudah ada oleh sektor bisnis, pemerintah, dan rumah tangga murni (tidak termasuk perusahaan yang tidak berbadan hukum) dikurangi penjualan aset tetap.

Tabel 2.41
Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.048,44	3.049,79	3.045,85	3.047,56	3.255,85
2	PDRB Pengeluaran	6.984.71	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43
Persentase		43.65	42.05	40.38	38.77	39.65

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Pada kurun waktu 2020-2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 PMTB sebesar 3.048,44 juta atau 43,65% dari PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran dan terus menurun sampai tahun 2023 menjadi sebesar 3.047,56 juta atau 38,77% namun pada tahun 2024 PMTB sedikit mengalami peningkatan menjadi 3.255,85 atau sebesar 39,65% dari PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai net ekspor antar daerah saat ini menggunakan metode Cross Houlling.

Tabel 2.42
Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Neto	-546.92	-391,39	-43,67	105,85	34,51
2	PDRB Pengeluaran	6.984.71	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43
Persentase		-7.83	-5.4	-0.58	1.35	0.42

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Nilai Ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe periode 2020-2023 mengalami tren positif walaupun peningkatan tidak signifikan. Pada tahun 2020 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe sebesar (546,92) juta rupiah atau sebesar (-7,83)% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,85 juta rupiah atau 1,35% namun pada tahun 2024 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 34,51 juta rupiah atau 0,42%.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon.

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.43
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	35.856	37.074	28.305	37.885
2	Jumlah seluruh rumah	42.354	43.930	45.504	46.315
Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni		84.65	84.39	62,20	81.79

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat, sedikit menurun tahun 2021 dan 2023. Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Lhokseumawe. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Dari halaman resmi Kementerian PUPR, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Tabel 2.44
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tidak layak huni	15.969	18.587	17.199	8.430

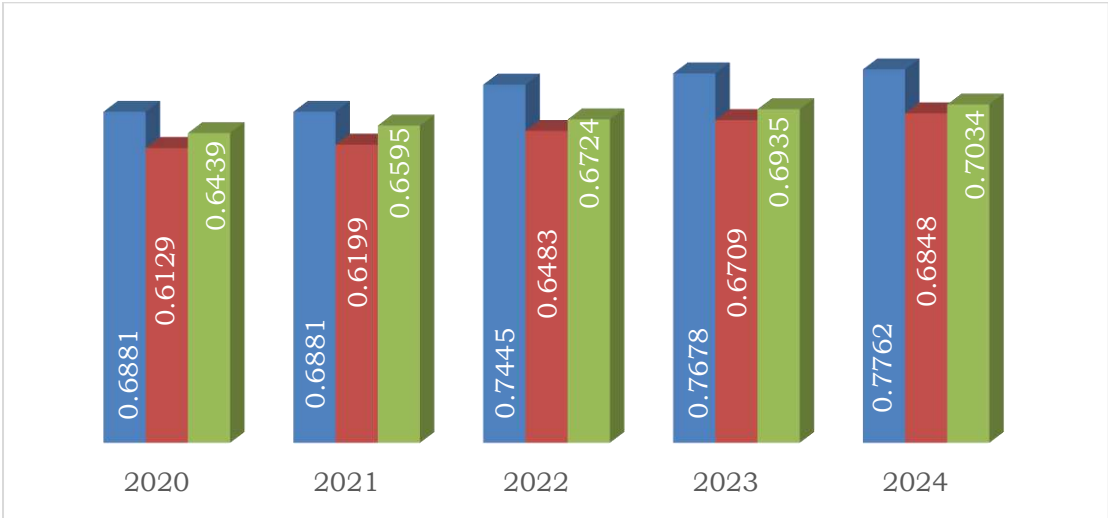
Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH belum efektif dilaksanakan.

2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.34
Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe
Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Dari gambar dapat di lihat secara lengkap status perkembangan desa di Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan nasional mulai tahun 2020-2024. Status IDM Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,6881 menjadi 0.7762 termasuk dalam kategori Maju dengan nilai 0.7762 lebih baik dari Provinsi Aceh Tahun 2024 masuk dalam Kategori Berkembang dengan nilai 0,6848, meningkat dibandingkan dengan status IDM Kota Lhokseumawe tahun 2021 dengan nilai 0,6881. Meskipun demikian, perolehan nilai status IDM Kota Lhokseumawe Tahun 2022 berada di atas nilai rata-

rata Aceh dan nasional yaitu 0,6724. Dan pada Tahun 2023 nilai IDM Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 0.7678 di atas Aceh dengan nilai 0,6709 dan nasional sebesar 0.6935 Adapun dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk IDM masing-masing Gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.45

Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No.	Nama Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2004
A	Muara Dua					
	- Mandiri	0	0	1	2	3
	- Maju	5	5	12	14	13
	- Berkembang	12	12	4	1	1
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
B	Banda Sakti					
	- Mandiri	1	1	5	12	16
	- Maju	3	3	12	6	2
	- Berkembang	14	14	1	0	0
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
C	Blang Mangat					
	- Mandiri	0	0	2	2	4
	- Maju	2	2	1	7	8
	- Berkembang	20	20	19	13	10
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
D	Muara Satu					
	- Mandiri	1	1	2	2	2
	- Maju	3	3	6	6	6
	- Berkembang	7	7	3	3	3
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
TOTAL		68	68	68	68	68

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2025

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2.46

Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	2	2	10	18	25
2	Desa Maju	13	13	31	33	29
3	Desa Berkembang	53	53	27	7	14
4	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
6	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
Persentase Desa Mandiri		2,94	2,94	14,71	26,47	36,76

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada. Sedangkan status desa berkembang tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 53 desa pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang dan tahun 2024 menjadi 14 desa atau

20,59%. Status desa maju terdapat pada 13 desa pada tahun 2020, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlah desa yang berstatus maju menjadi sebanyak 13 desa dan tahun 2024 menjadi 29 desa maju atau 42,65%. Status desa mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 25 desa yang berstatus desa mandiri atau 36,76%

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47
Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2024

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	0,7219	Maju
	HAGU BARAT LAUT	0,8208	Mandiri
	HAGU SELATAN	0,8324	Mandiri
	HAGU TEUNGOH	0,8230	Mandiri
	JAWA BAROE	0,8375	Mandiri
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	0,8959	Mandiri
	KEUDE ACEH	0,8302	Mandiri
	KOTA LHOKSEUMAWE	0,8930	Mandiri
	KUTA BLANG	0,8990	Mandiri
	LANCANG GARAM	0,9048	Mandiri
	MON GEUDONG	0,8635	Mandiri
	PUSONG BARU	0,8229	Mandiri
	PUSONG LHOKSEUMAWE	0,8168	Mandiri
	SIMPANG EMPAT	0,8710	Mandiri
	TUMPOK TEUNGOH	0,8511	Mandiri
	UJONG BLANG	0,8263	Mandiri
	ULEE JALAN	0,8025	Maju
	UTEUN BAYI	0,8362	Mandiri
BLANG MANGAT	ALUE LIM	0,6910	Berkembang
	ASAN KAREUNG	0,6873	Berkembang
	BALOI	0,7329	Maju
	BLANG BULOH	0,7073	Maju
	BLANG CUT	0,8241	Mandiri
	BLANG PUNTEUET	0,7202	Maju
	BLANG TEUE	0,6817	Berkembang
	BLANG WEU BAROH	0,7002	Berkembang
	BLANG WEU PANJOE	0,6908	Berkembang
	JAMBO MESJID	0,7410	Maju
	JAMBO TIMU	0,7456	Maju
	JEULIKAT	0,7224	Maju
	KEUDE PUNTEUET	0,8319	Mandiri
	KUALA	0,7108	Maju
	KUMBANG PUNTEUET	0,6797	Berkembang
	MANE KAREUNG	0,6821	Berkembang
	MESJID PUNTEUET	0,8567	Mandiri
	RAYEUK KAREUNG	0,7390	Maju
	SEUNEUBOK	0,7000	Berkembang
	TEUNGOH	0,7035	Berkembang
	TUNONG	0,7032	Berkembang
	ULEE BLANG MANE	0,8181	Mandiri

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
MUARA DUA	ALUE AWE	0,8468	Mandiri
	BLANG CRUM	0,7419	Maju
	BLANG POROH	0,7394	Maju
	COT GIREK KANDANG	0,7710	Maju
	CUT MAMPLAM	0,7314	Maju
	KEUDE CUNDA	0,8002	Maju
	LHOK MON PUTEH	0,7575	Maju
	MEUNASAH ALUE	0,7210	Maju
	MEUNASAH BLANG	0,7289	Maju
	MEUNASAH MANYANG	0,7554	Maju
	MEUNASAH MEE	0,8117	Maju
	MEUNASAH MESJID	0,8529	Mandiri
	MNS. PANGGOI	0,7783	Maju
	PALOH BATEE	0,7197	Maju
	PAYA BILI	0,6810	Berkembang
	PAYA PUNTEUET	0,7898	Maju
	UTEUNKOT	0,8270	Mandiri
MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	0,8140	Maju
	BATUPHAT TIMUR	0,8511	Mandiri
	BLANG NALEUNG MAMEH	0,8065	Maju
	BLANG PANYANG	0,7229	Maju
	BLANG PULO	0,8844	Mandiri
	COT TRIENG	0,7010	Berkembang
	MEUNASAH DAYAH	0,7063	Berkembang
	MEURIA PALOH	0,7984	Maju
	PADANG SAKTI	0,7881	Maju
	PALOH PUNTI	0,7494	Maju
	UJONG PACU	0,6940	Berkembang

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu daerah. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu daerah. Ia berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai tax ratio suatu daerah, maka pemerintah daerah lebih dapat mengandalkan APBD untuk melakukan pembangunan. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak.

Tabel 2.48
Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Pajak	PDRB	Tax Ratio
1	2020	105.069.641.024,00	8.867.266.500.000	1,18
2	2021	82.129.767.768,97	9.422.285.900.000	0,87
3	2022	88.725.171.946,20	10.263.425.400.000	0,86
4	2023	79.085.772.870,00	11.169.632.100.000	0,71
5	2024	86.431.498.758,00	11.848.236.900.000	0,73

Sumber : BPS Lhokseumawe dan BPKD Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB

sebesar 1,18 persen. Persentase ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023, rasio pajak menurun menjadi 0,71 persen. Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju Inflasi Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Secara umum inflasi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Inflasi tertinggi Kota Lhokseumawe adalah tahun 2022 yaitu sebesar 5.37% dan inflasi pada tahun 2023 adalah terendah yaitu sebesar 1.56%. Mulai Tahun 2020, perhitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Lhokseumawe menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49
Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2020-2024

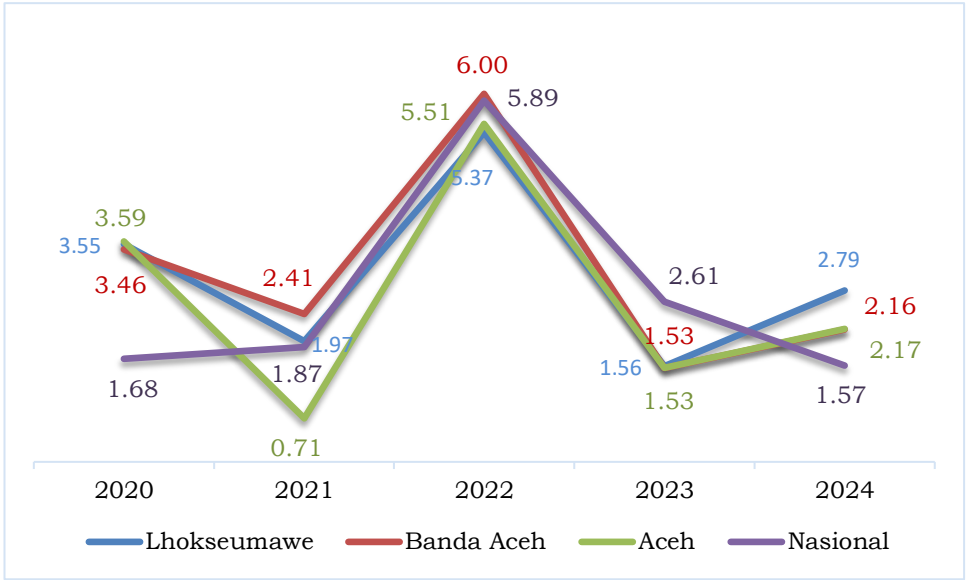
No	Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	8.01	3.36	5.13	1.34	5.28
2	Pakaian Dan Alas Kaki	2.72	2.94	5.12	4.20	1.36
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	0.73	1.48	2.84	0.47	1.55
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.24	1.35	5.52	-0.71	2.85
5	Kesehatan	0.66	1.22	0.33	1.81	0.04
6	Transportasi	0.05	0.38	20.65	1.86	0.17
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-1.21	0.25	-0.59	0.28	2.32
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	2.02	0.25	7.49	8.93	0.89
9	Pendidikan	5.82	1.44	1.13	0.52	3.86
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	-0.04	0.05	3.76	1.59	2.06
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	4.67	1.63	3.47	2.45	3.43
Inflasi Kota Lhokseumawe		3.55	1.97	5.37	1.56	2.79

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 3.55% lebih rendah dibandingkan inlasi Aceh yaitu sebesar 3.59% dan lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional sebesar 1.68%. Kemudian pada tahun 2021 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 1.97% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 0.71% dan inflasi nasional yaitu sebesar 1.87%. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 3.36% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu kesehatan yaitu sebesar 0.05%.

Gambar 2.35
Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya pada tahun 2024 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 2.79% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 2.17% inflasi nasional yaitu sebesar 1.57%. Penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 5.28% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yaitu sebesar - 0.71%.

2.1.3.7.3 Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dalam proses intermediasi di sektor keuangan terdapat hubungan antara Ultimate Lender (UL), yaitu pemilik dana di masyarakat, dengan Ultimate Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bank memiliki tempat yang teramat penting dalam perekonomian. Karena peran bank sebagai lembaga yang dapat Borrower (UB), yaitu pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Ultimate Lender adalah kelompok “penabung”. Jumlah mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perannya di dalam proses penciptaan kredit serta berbagai jasa keuangan lain yang diberikan. Seluruh tabungan kelompok ini membentuk penawaran loanable funds. Sementara ultimate borrower adalah kelompok masyarakat yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Jenis kelompok yang terakhir ini didominasi oleh golongan pengusaha, perusahaan, atau industri. Lembaga keuangan, termasuk dengan bank, berada di antara ultimate lender dan ultimate borrower untuk menjembatani hubungan khas antara keduanya, memberikan jasa intermediasi berupa proses

keperantaraan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi. Perkembangan intermediasi sektor keuangan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.50
Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024 (juta)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kredit	5.683.259	3.870.255	4.332.324	4.352.104	5.528.759
2	Total Dana Pihak Ketiga	5.730.123	4.451.995	4.640.859	4.376.562	4.846.497
3	PDRB ADHB	8,867,266.5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11,848,236.9
Kredit/PDRB		64,09	41,04	42,15	38,96	46,66
Dana Pihak Ketiga/PDRB		64,62	47,20	45,15	39,18	40,90

Sumber : Bank Indonesia, 2025 dan LDA 2025

2.1.3.7.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

- 1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
- 2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
- 3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Hasil Pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar 3,88 berada pada posisi ketiga setelah Kota Sabang sebesar 5,44 dan Kota Banda Aceh sebesar 5,26.

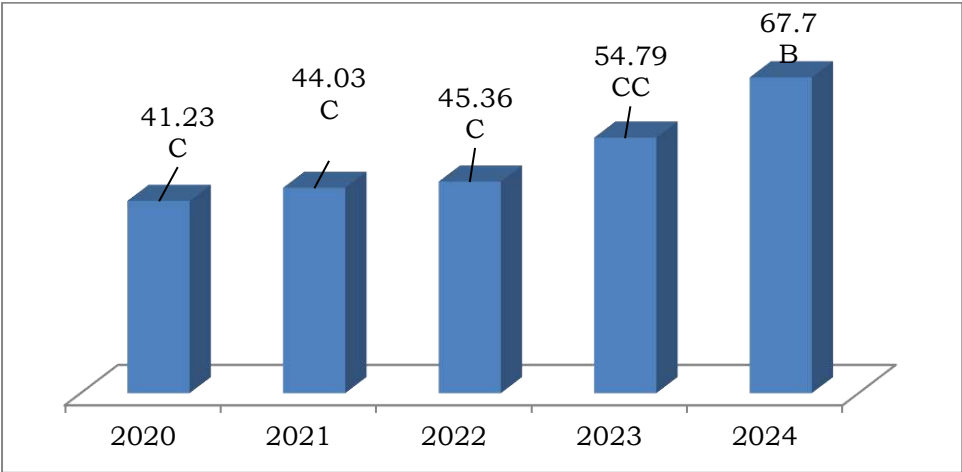
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir. Kualitas

birokrasi dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan roadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.36
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Kinerja reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi prediket CC dengan poin 54.79 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67.70 atau predikat B. Capaian yang meningkat ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

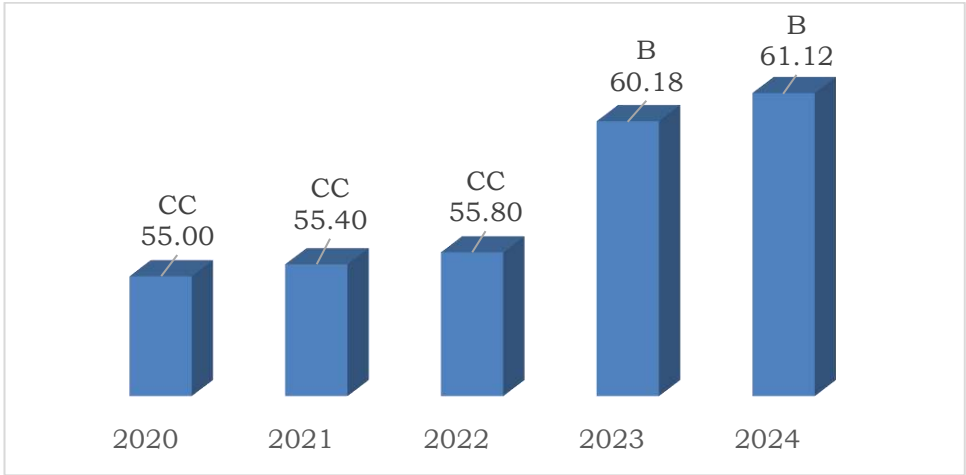
2.1.4.1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 nilai SAKIP Kota Lhokseumawe sebesar 55.00 (kategori CC) sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 61.12 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.37
Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya nilai komponen nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Lhokseumawe tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Komponen nilai SAKIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No	Komponen Nilai SAKIP	Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20.10	20.22	30	20.29	22.15	22.37
2	Pengukuran Kinerja	25	9.19	9.22	30	13.05	14.09	14.32
3	Pelaporan Kinerja	15	8.73	8.75	15	8.76	9.19	9.37
4	Evaluasi internal	10	5.80	5.83	25	13.70	14.75	15.06
5	Capaian Kinerja	20	11.18	11.38	-	-	-	-
Nilai Hasil SAKIP		100	55.00	55.40	100	55.80	60.18	61.12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC		CC	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

2.1.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Salah satu komponen strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 55,13 dan pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 77,72.

2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan domain layanan SPBE akan dievaluasi dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.52
Nilai Indeks SPBE
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks SPBE	1.60	1.54	1.54	2.35	2.80
		Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Baik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

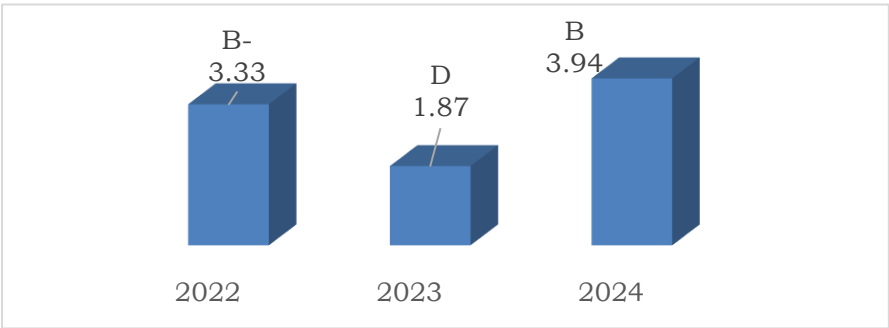
Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2019-2022 masuk dalam kategori kurang dan tahun 2021-2022 Nilai Indeks SPBE kota Lhokseumawe menurun menjadi 1.54. Tahun 2023, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe menunjukkan kategori cukup dengan nilai Indeks SPBE 2.35 dan tahun 2024 meningkat menjadi 2,80 dengan kategori baik.

2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 (enam) Aspek Kebijakan Pelayanan yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebesar 3.33

dengan kategori (B-) dengan Lokus penilaian pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2023 Nilai IPP Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 1.87 dengan kategori (D) dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial dan Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.94 dengan kategori B dengan Lokus Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 2.38
Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe
Tahun 2022-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

2.1.4.1.6 Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

Tabel 2.53
Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SPI KPK	N/A	66,33	70,94	69,44	64,37

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69.44 selanjutnya tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 64,37. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci

di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini tidak efektif.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.54
Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penegakan Perda/Qanun	5	8	19	24	67
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun	10	15	20	27	70
Persentase		50,00	53,00	95,00	88,00	95,00

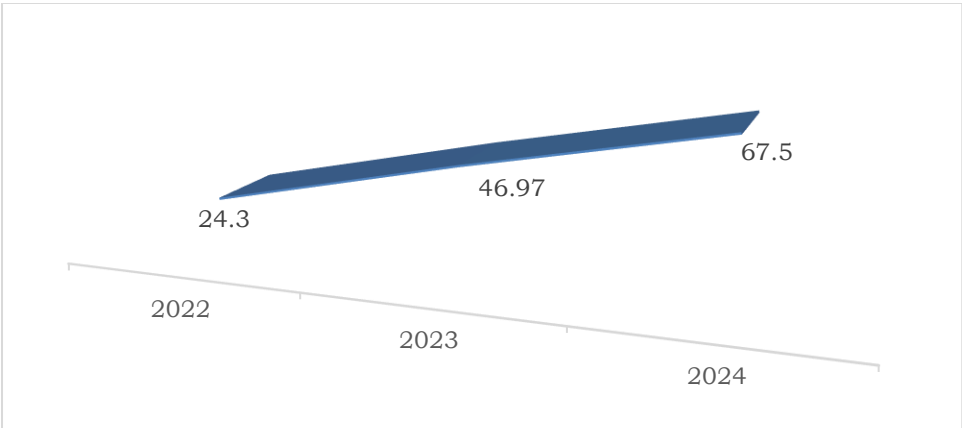
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2025

Dari tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2020-2024 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang terjadi di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun sebesar 50% dan peningkatan menjadi 53% di tahun 2021 selanjutnya di tahun 2022 meningkat tajam menjadi 95% dan menurun menjadi 88% di tahun 2023 an meningkat kembali menjadi 95%. Peningkatan persentase penegakan perda/qanun merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

RANHAM merupakan rencana aksi nasional yang memuat berbagai kegiatan dan target yang harus dicapai dalam rangka memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM diIndonesia. Pemerintah melalui RANHAM berusaha untuk memastikan Hak Asasi Manuasia dihormati dan dilindungi serta dipenuhi dan ditegakkan dengan baik. RANHAM memiliki berbagai sasaran strategis sepertipeningkatan kapasitas aparatur negara dalampenanganan HAM peningkatan akses Masyarakat terhadap informasi HAM serta partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.39
Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe
Tahun 2022-2024



Sumber : Kemenkumham, 2025

Capaian Aksi HAM kota Lhokseumawe dari tahun 2022 s.d 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 24.3 persen menjadi 67.5 persen pada tahun 2024.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Kota Lhokseumawe memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan kabupaten/kota lain. Namun saat ini Kota Lhokseumawe masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, Kota Lhokseumawe mencapai kategori tinggi yaitu 2,89. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

2020								
Aspek	Pilar	Indeks	Aspek	Pilar	2021	2022	2023	2024
Faktor Penguat	Kelembagaan	3.25	Lingkungan Pendukung	Institusi	3.25	3.88	3.99	4.25
	Infrastruktur	1.75		Infrastruktur	1.75	1.74	2.48	2.98
	Perekonomian Daerah	2.02		Adopsi TIK	2.25	3.55	4.47	4.75
SDM	Kesehatan	4.25	SDM	Stabilitas ekonomi makro	2.02	2.15	2.88	4.11
	Pendidikan dan	2.45		Kesehatan	4.25	4.00	3.99	3.93

2020					Indeks			
Aspek	Pilar	Indeks	Aspek	Pilar	2021	2022	2023	2024
	Keterampilan							
PASAR	Efisiensi Pasar Produk	1.58		Ketrampilan	2.46	4.02	4.21	3.82
	Ketenaga kerjaan	2.00	PASAR	Pasar produk	1.58	3.79	3.84	4.39
	Akses Keuangan	1.00		Pasar tenaga kerja	2.00	3.10	3.34	4.51
	Ukuran Pasar	4.67		Sistem keuangan	1.00	1.10	1.47	2.61
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	0.42		Ukuran pasar	4.67	0.48	3.98	4.00
	Kapasitas Inovasi	1.42	Ekosistem Inovasi	Dinamisme bisnis	0.42	5.00	2.70	2.73
	Kesiapan Teknologi	2.25		Kapabilitas inovasi	0.42	1.94	3.51	2.87
SKOR IDSD		2.25	SKOR IDSD		2.26	2.89	3.40	3.75

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Dari Tabel di atas Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 2,89 meningkat dari IDSD 2021 yaitu 2.26 namun masih berada di bawah Indeks Daya Saing Daerah Propinsi Aceh sebesar 3,15 dan di bawah Indeks Daya Saing Daerah Nasional yaitu sebesar 3.26. Dari 4 Komponen dan 12 Pilar IDSD, komponen pasar pada pilar 10: ukuran pasar skor nya masih rendah yaitu 0.48. Dan pada tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 3.40 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.75 berada di atas IDSD Aceh sebesar 3.49 dan Nasional 3,43.

2.1.4.3.2 Indeks Pembangunan Syariah

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 83,91 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Dimensi Indeks Pembangunan Syariah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024

No	Dimensi IPS	2021	2024
1	Akidah	95.83	85,74
2	Lembaga Keuangan Syariah	79.15	85.97
3	Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal	77.12	85.81
4	Melek Al Quran	87.59	84.56
5	Manajemen Mesjid	79.15	82.90
6	Hukum Jinayat	73.03	79.60
7	Akhlak	88.01	82.76
Indeks Pembangunan Syariah		80.65	83,91

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

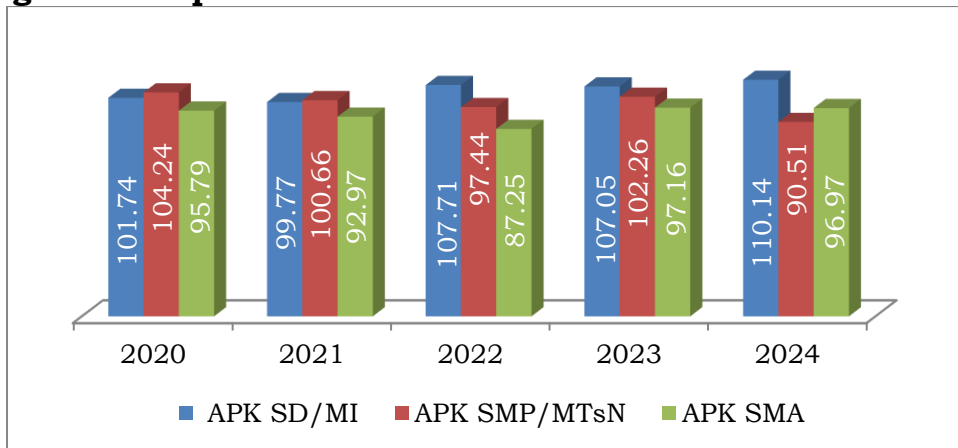
2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Gambar 2.40
Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2025

Apabila melihat gambar di atas, nilai perentase APK dari jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTsN memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Lhokseumawe yang bersekolah di Kota Lhokseumawe. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2021-2022

mengalami penurunan dan tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan, namun tahun 2024 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2022-2024 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota Lhokseumawe dan mutu sekolah yang baik di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi pilihan masyarakat dari daerah lain.

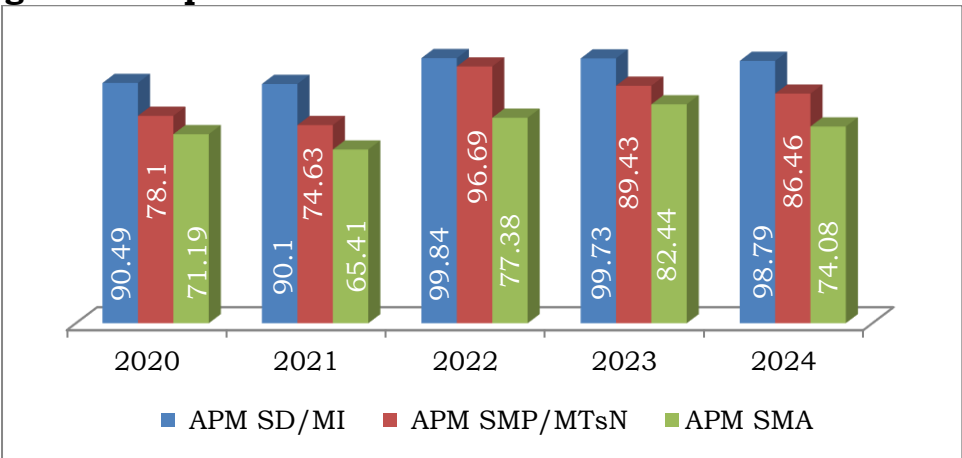
Pada kurun waktu 2020-2024 angka APK pada jenjang SMP/MTsN fluktuatif cenderung menurun. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA pada kurun waktu 2020-2022 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 95.79 persen di tahun 2020 menjadi 87.25 persen di tahun 2022. Selanjutnya di Tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan menjadi 97.16 persen. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA di Kota Lhokseumawe, namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 96.97 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Gambar 2.41
Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

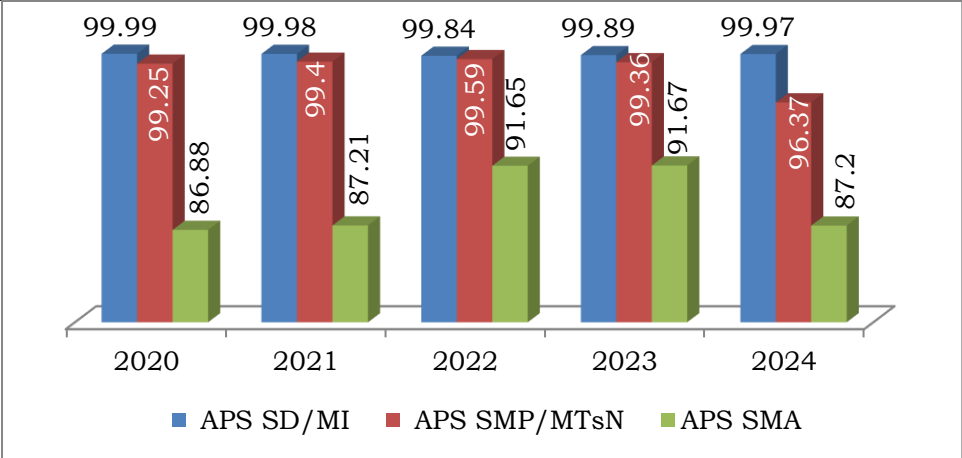
Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 APM SD/MI sebesar 90.49 persen dan tahun 2021 menjadi sebesar 90.1

persen. Angka tersebut berfluktuasi menjadi 98.79 persen tahun 2024. Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTsN dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APM SMP/MTsN sebesar 78.10 menurun hingga 74.63 pada tahun 2021. Namun tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 96.69 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 89.43 persen dan kembali turun menjadi 86.46 pada tahun 2024. Pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022-2023 terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan sekolah di Lhokseumawe menjadi rujukan masyarakat, namun tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 74.08.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.42
Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan gambar diatas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020 APS SD/MI sebesar 99.99% kemudian pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan APS menjadi 99.84% di tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 99.97% di tahun 2024. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 APS SMP/MTS 99.25% dan mengalami peingkatan menjadi sebesar 99.40% tahun 2020, pada tahun 2021-2022 sedikit meningkat sehingga menjadi 99.59% kemudian mengalami sedikt penurunan di tahun 2023 menjadi 99.36% dan sedikit meningkat menjadi 99.37 di tahun 2024.

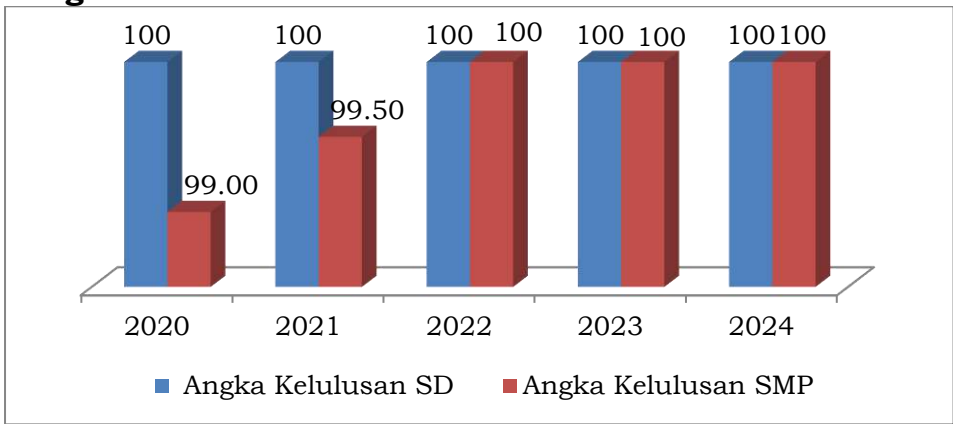
Adapun APS pada jenjang SMA dalm kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APS SMA sebesar 86.88% dan menjadi 91.67% pada tahun 2023. APS SMA mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs

usia 16-18 tahun jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah. Pada Tahun 2024 APS SMA mengalami penurunan menjadi 87.20%.

D. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

Gambar 2.43
Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan jenjang SD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMP tahun 2020-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 Angka kelulusan SMP sebesar 99.00% dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 99.50% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022-2024 angka kelulusan jenjang SMP mencapai 100%.

E. Fasilitas Pendidikan

Pelaksanaan Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

Tabel 2.57
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total		
2020	SD	564	0	94	18	0	676	83.43
	SMP	252	0	55	15	0	322	78.26

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total		
2021	SD	406	415	0	0	0	821	49.45
	SMP	188	161	0	0	0	349	53.87
2022	SD	405	148	123	40	0	716	56.56
	SMP	212	64	64	24	0	364	58.24
2023	SD	405	150	148	42	0	745	54.36
	SMP	209	82	60	31	0	382	54.71
2024	SD	805	35	0	0	0	840	95.83
	SMP	427	17	0	0	0	444	96.17

Sumber: npd.kemendikbud.go.id, dapodik 2025

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 sebesar 83.43% mengalami peningkatan pada tahun 2024 persentase ruang kelas dalam kondisi baik menjadi sebesar 95.83%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan rehabilitasi ruang kelas.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SMP cenderung mengalami peningkatan dari 78.26% pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 96.17% pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya penambahan atau pembangunan gedung baru di beberapa sekolah SMP sehingga jumlah ruang kelas ber kondisi baik menjadi bertambah.

F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1878	1878	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	19702	19702	100	100
Pendidikan Kesetaraan;	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	335	335	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.1.4.4.1.2 Kesehatan
A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

Tabel 2.59
Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	18	16	23	54	30
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4340	4069	3853	3533	3576
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)			4.15	3.93	5.97	15.28	8.39

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 4.15 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 3.93 di tahun 2021. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2022, jumlah kematian bayi mencapai angka 23 kasus dari 3853 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 15.28. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8.39 per 1.000 kelahiran hidup.

Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginetal.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.60
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	4.15	3.69	4.93	15.28	8.39
Angka kelangsungan hidup bayi(AKHB) →(1000 AKB)		995.85	996.31	995.07	984.72	991.61

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 995.85 kemudian meningkat menjadi 996.31 di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 995.07, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 995 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2023, angka kelangsungan bayi menurun menjadi 984.72. Tahun 2024 angka kelangsungan bayi meningkat menjadi 991.61. Peningkatan ini selaras dengan menurunnya angka kematian bayi pada tahun tersebut.

C. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.61
Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	4	2	2	2	31
2	Jumlah kelahiran Hidup	balita	4340	4069	3853	3533	3576
Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)			0.92	0.49	0.51	0.56	8.6

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami penurunan. Angka kematian balita pada tahun 2020 sebesar 0.92 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya tahun 2021, angka kematian balita mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0.92 per 1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 0.49 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Pada tahun 2024 angka kematian balita meningkat tajam menjadi 8.6 per 1000 kelahiran hidup.

Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung lebih baik. Namun masih terdapatnya kematian balita perlu dijadikan kewaspadaan dini karena artinya prevelensi anemia ibu hamil masih tinggi, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asurapan mikronutrien pada ibu hamil dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Lhokseumawe adalah dengan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu dan berkualitas, peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

D. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 angka kematian neotanus sebesar 3.92 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 menurun menjadi 1.12 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.62
Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	bayi	17	16	20	37	4
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4340	4069	3853	3533	3576
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)			3.92	3.93	5.19	10.47	1.12

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

E. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.63
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	orang	7	14	3	8	1
2	Jumlah kelahiran Hidup	orang	4340	4069	3853	3533	3576
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			161.29	344.06	77.86	226.44	27.96

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Lhokseumawe dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 344.06. Selanjutnya, pada tahun 2024 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 27.96 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 226.44 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- a. kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- b. masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (Antenatal Care).

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Lhokseumawe dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.64 Rasio Posyandu Per Satuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024							
No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Posyandu	unit	101	101	101	100	100
2	Jumlah Balita	Anak	21.626	20.231	19.948	15.677	14.171
Rasio posyandu per satuan balita			4.67	4.99	5.06	6.38	7.05

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rasio posyandu per satuan balita sebesar 4.67, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 4 posyandu. Pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 4.99. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 5.06 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu pada tahun 2022. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang mengalami penurunan dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 6.38 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu menurun, dan jumlah balita juga mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat. Pada tahun 2024 rasio posyandu meningkat menjadi 7.05.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik danpuskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.65 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024						
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Puskesmas	7	7	7	7	7
	Poliklinik	10	10	10	10	10
	Puskesmas Pembantu	23	23	22	22	22
	Jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu	40	40	39	39	39
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio Puskesmas persatuan penduduk		0.21	0.21	0.20	0.20	0.20

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 0.21, artinya terdapat 0.21 puskesmas/klinik/pustu setiap 1.000 penduduk atau dalam 100.000 terdapat 21 puskesmas/klinik/pustu. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus menurun hingga menjadi 0.20 puskesmas/klinik/pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Menurunnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya jumlah puskesmas dan pustu. Namun tahun 2023-2024 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 0.20 atau 20 puskesmas/klinik/pustu setiap 1.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk namun jumlah puskesmas/klinik/pustu tetap.

H. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.66
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	9	9	9	9	9
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	10	10	10	10	10
7	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	Rasio	0.053	0.053	0.052	0.051	0.050

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2024, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 0.053 kemudian tahun 2024 sebesar 0,050 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

I. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Lhokseumawe. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.67
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Umum	58	67	32	55	51
2	Dokter Spesialis	0	0	0	4	5
3	Dokter Gigi	14	16	16	25	24
	Jumlah Dokter	72	83	48	84	80
	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	Rasio dokter per satuan penduduk	0.38	0.35	0.43	0.43	0.40

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio dokter sebesar 0.38 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 0.35 di tahun 2021. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 0.43. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.40 dikarenakan ada dokter yang sedang tugas belajar dan beralih ke jabatan struktural. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.40 dokter tidak sampai 1 orang dokter.

J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Tabel 2.68
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perawat	510	212	212	289	306
2	Perawat Gigi	0	0	12	20	18
3	Bidan	456	248	248	302	293
	Jumlah Total	966	460	478	611	617
	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	Rasio Perawat	2.7	1.12	1.11	1.47	1.54
	Rasio Perawat Gigi	0	0	0.06	0.10	0.09
	Rasio Bidan	2.41	1.31	1.29	1.54	1.47
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	5.12	2.42	2.49	3.12	3.10

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024, namun menurun di tahun 2020-2021, dan rasio meningkat sedikit sampai dengan 3.10 di tahun 2024. Rasio perawat juga memiliki kecenderungan meningkat. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2020 sebesar 0 menjadi 0.09 di tahun 2024. Sedangkan rasio bidan fluktuatif, karena terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 1.29 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2024 menjadi 1.47 per satuan penduduk.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

Tabel 2.69
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	649	499	481	563	806
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	964	833	879	879	879
Persentase		67.3	59.9	54.7	64.05	91.69

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Lhokseumawe mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 55.5% menjadi 91.69%. Cakupan tertinggi terjadi pada

tahun 2020. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 59.9% dan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 54.7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus komplikasi kebidanan belum semua dapat tertangani, tahun 2024 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 91.69%.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.70
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4340	3687	3841	3543	3571
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	4599	3798	4198	4198	4198
Persentase		94.37	97.08	91.50	84.40	85.06

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Pada tahun 2020, angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 94.37% dan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 85.06%, penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang tertinggi adalah pada tahun 2020, menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar.

Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.71
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	13	11	9	15	15
2	Jumlah Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68
Cakupan Desa UCI		19.11	16.20	13.24	22.06	22.06

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 19.11%, pada tahun 2020 menurun menjadi 13.24% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 meningkat kembali menjadi 22.06%

N. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.72
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	7	8	33	61	20
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	7	8	33	61	20
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Jumlah balita gizi buruk dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022-2023, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 balita gizi buruk sebanyak 7 anak dan menjadi 61 anak di tahun 2023 dan menurun menjadi 20 anak di tahun 2024. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 seluruhnya telah mendapatkan perawatan.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal

satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.73
Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	2627	2406	2413	2214	2449
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	11695	4299	4237	3874	3896
Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak		22.46	55.97	56.95	57.15	62.85

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 62.85% dan terendah adalah tahun 2020 dengan angka sebesar 22.46%. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak baru mencapai 62.85% hal ini disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio* AFP rate ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.74
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus SFP nonPolio yang dilaporkan	1	4	0	4	2
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	64.756	44.294	58.338	53.558	58.338
Cakupan Persentase Non PolioAFP rate per 100.000 penduduk		1.54	9.03	0	7.47	3.42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025.

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang penderita. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus menjadi 4 orang. Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2020-2023, *rate*-nya berada pada rentang 0–9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga *rate* non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 menurun menjadi 3.42 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi). Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.75
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	1	22	16	24	122
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	2222	902	2223	950	973
Cakupan Penemuan Pneumonia		0.04	2.43	0.72	2.53	12.5

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Pada kurun waktu 2020-2024, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 0.04% di tahun 2020 hingga 12.5% di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pnemonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 22 anak dari 1 anak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2024 kembali terjadi peningkatan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 122 anak. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	128	569	833	1087	1006
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	216	1115	1003	1071	692
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		59,2	51.03	83.05	101.49	145.4

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 51.03% dari tahun 2020 sebesar 95.2%, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 83.05%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2024 meningkat menjadi 83.05% dan 145.4%. Peningkatan angka cakupan karena skrining TB sudah dilakukan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri sehingga penemuan kasus TB dapat ditemukan sedini mungkin.

S. **Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

Tabel 2.77
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	297	569	833	1131	1006
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis		157.4	299.6	435.2	576.8	506.3

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 297 kasus di tahun 2020 dan kasus tertinggi sebanyak 1131 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2020 tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi 157.4 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan menjadi 299,6 per 100.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 833 penderita dengan tingkat prevelensi 435,2. Dan pada tahun 2023 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1131 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 576,8 dan tahun 2024 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1006 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 506,3.

T. **Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)**

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Paisen TB yang meninggal	1	6	2	2	18
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Tingkat Kematian Tuberkulosis		0.52	3.15	1.04	1.02	9.05

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena 102uberculosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena 102uberculosis

sebesar 0.52 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 1 orang. Tingkat kematian tertinggi karena 103uberculosis terjadi tahun 2024 sebesar 9.05 artinya terdapat 18 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid, atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemic Covid-19 pada tahun 2021 yang dapat memperburuk kondisi sehingga 103ubercu kematian penderita TB menjadi 3.15 per 100.000 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 tingkat kematian karena 103uberculosis sebesar 1.04 dan 1.02 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian penanganan yang tepat, namun tahun 2024 tingkat kematian penderita TB meningkat menjadi 9.05.

U. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.79
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	216	277	344	1087	923
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	216	312	344	1028	1006
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS		100	88,78	100	105.7	91.75

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 105,7%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 88,78%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Kasus penemuan tuberkulosis meningkat ini karena adanya kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 105.7%. Sedangkan tahun 2024 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menurun sebesar 91.75%.

V. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.80
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	79	243	870	655	957
2	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	128	686	883	1076	1077
Proporsi Kasus Tuberculosis Yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS		61.72	35.42	98.52	60.87	88.85

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 61.72% dan menurun menjadi 35.42% di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, proporsi TB yang diobati dan sembuh meningkat drastis menjadi 98.52%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2020, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 71,13%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 98.52%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2022. Namun Tahun 2023 proporsi TB yang diobati menurun menjadi 60.87% dan tahun 2024 meningkat menjadi 88.85%. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

W. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.81
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	79	58	47	86	68
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	79	58	47	86	68
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Dalam kurun waktu 2020-2024, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2023. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2020-2022 terus menurun dari 79 penderita menjadi 47 penderita di tahun 2022. Tahun 2023 jumlah penderita DBD meningkat menjadi 86 penderita, dan tahun 2024 menurun menjadi 68 penderita, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), belum maksimalnya pemeriksaan jentik berkala, masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan masih adanya saluran air yang tidak lancar sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

X. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

Tabel 2.82
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	1885	3071	2568	5014	1115
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	5700	5555	9014	16108	4134
Persentase		33.07	55.28	28.49	31.13	26.97

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Penderita diare yang ditangani di tahun 2020 sebesar 33.07% dan di tahun 2024 menurun menjadi 26.97%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun 2020. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang

datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2022 jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader menurun menjadi 28.49% dan di tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 31.13% dan tahun 2024 cakupan penderita diare yang ditangani menurun menjadi 26.97%.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	3	8	4	25	27
2	Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Prevalensi HIV/AIDS		0,001	0.004	0.002	0.013	0.013

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.001%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 0,013% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 27 orang.

Z. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.84
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2494	2268	2196	2338	2112
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	4340	4069	3853	3533	3576
Cakupan kunjungan Bayi		57.46	55.74	56.99	66.17	59.06

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 57.46%, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 56.99%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kembali. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 angka cakupan meningkat menjadi 59.06% di tahun 2024.

AA. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.85
Cakupan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas		175	175	175	175	175

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebanyak 7 unit puskesmas. Jumlah Kecamatan di Kota Lhokseumawe berjumlah 4 Kecamatan, sehingga cakupan puskesmas adalah 175%%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan minimal sudah memiliki satu unit puskesmas.

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu Kecamatan terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki 2 puskesmas.

BB. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

Tabel 2.86
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pustu	23	23	22	22	22
2	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
Cakupan Puskesmas		33.82	33.82	32.35	32.35	32.35

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2021 sebesar 33.82%, namun tahun 2022-2024, cakupan puskesmas pembantu menjadi 32.35 karena jumlah puskesmas pembantu berkurang 1 unit di tahun 2022 sehingga puskesmas pembantu tersedia 22 unit.

CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga 108embali108a janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.87
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4597	4191	4069	3643	4134
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4818	4366	4397	4396	4397
Persentase		95,4	96.0	92.5	82.87	94.02

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96.0% dan terendah pada tahun 2023 yaitu 82.87%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan menurunnya jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 92.5% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 82.87%, namun tahun 2024 kembali meningkat menjadi 94.02%.

DD. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Tabel 2.88
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4146	4064	3736	3458	3371
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4599	4167	4198	4198	4198
Cakupan Pelayanan Nifas		90,1	97.5	89.0	82.37	80.3

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2020-2024 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu dari 90.1% menjadi 97.5%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahun 2022-2024 cakupan pelayanan nifas mengalami penurunan menjadi 80.30 di tahun 2024. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan

terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.89
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	381	314	285	274	152
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	651	648	639	274	799
Persentase		58.5	48.6	44.6	100	19.02

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025.

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 58.5%. Pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2024 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 19.02%.

FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12–59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan

pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

Tabel 2.90
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15200	13600	12698	13194	11378
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	17425	15933	15677	15677	15677
Cakupan Pelayanan Anak Balita		87.23	85.3	81.0	84.16	72.57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 87.23%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2024 yaitu 72.57%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%, namun tahun 2024 menurun menjadi 72.57%.

GG. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.91
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	9	9	10	10	10
2	Jumlah Rumah Sakit	10	10	10	10	10
Persentase		90	90	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2021 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2022 s.d 2024 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%. Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Lhokseumawe merupakan Rumah Sakit Swasta karena Kota Lhokseumawe belum memiliki Rumah Sakit Umum Pemerintah.

HH.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

Tabel 2.92
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu	0	4	2	4	2
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	4	2	4	2
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam		0	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025

Berdasarkan data tabel di atas, selama periode tahun 2020-2024 terdapat sejumlah KLB di Kota Lhokseumawe. Tahun 2020 tidak ada KLB yang terjadi di Kota Lhokseumawe, sedangkan tahun 2021 jumlah kejadian KLB sebanyak 4 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2022

turun menjadi 2 kasus dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4 kasus dan 2024 menurun menjadi 2 kasus. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi <24 jam dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans desa yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

II. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.93
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	4.397	4.134	100	94.01
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	4.198	3.571	100	85.06
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.997	3.576	100	89.47
Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.948	15.776	100	79.08
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	36.242	35.442	100	97.79
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	144.144	144.144	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	16.747	16.447	100	98.21
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.631	13.196	100	96.81
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.563	4.458	100	97.70
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	448	448	100	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	3.365	3.365	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	8.805	8.668	100	98.44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

2.1.4.4.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe, maka terdapat ketidaksesuaian panjang jalan, peningkatan status jalan dan pembukaan jalan baru sehingga Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 206 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.94
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		2,186	2,171	2,155	2,104	2,076

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang

pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang fluktuatif. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

B. Pesentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Tabel 2.95						
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Km)						
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Baik	171,297	171,297	279,983	258,494	234,81
2	Panjang Jalan Sedang	106,994	106,994	37,493	28,254	30,81
3	Panjang Jalan Mantap	278,291	278,291	317,476	286,748	265,62
4	Panjang seluruh jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
Persentase jalan dalam kondisi mantap		67.47	67.47	76,97	69,52	64,40

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari tahun 2020 stagnan sampai dengan tahun 2021 tetap 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52% dan tahun 2024 menurun kembali menjadi 64.40%.

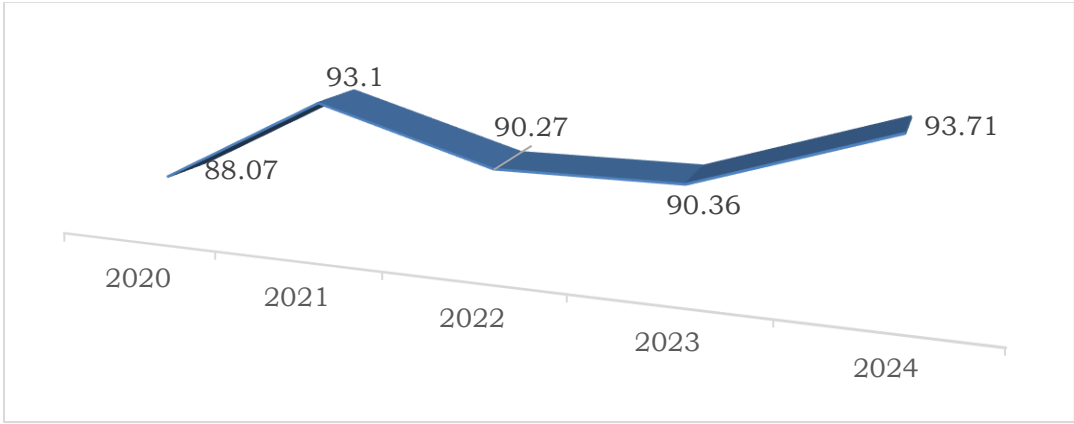
C. Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator

dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dengan jumlah rumah tangga. Berikut akses masyarakat atau rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.44
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

Secara umum, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Lhokseumawe 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 88.07% dan pada tahun 2024 menjadi 93.71%.

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.96
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km)	74,856	79,829	96,000	97,856	98,502
2	Panjang seluruh drainase (km)	116,408	116,408	116,408	117,408	131,462
Persentase		64,30	68,58	82,47	83.35	74,93

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Tren panjang drainase di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yakni sebesar 116,408 km pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 131,462 km pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Lhokseumawe sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%, walau terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,93% dikarenakan panjang drainase seluruhnya bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Lhokseumawe terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

D. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Lhokseumawe. Air Minum berkualitas (layak) di Kota Lhokseumawe bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan PDAM.

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 16.70%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku.

Tabel 2.97
Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.896	1.954	2.419	2.350	2.349
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase (Aceh Utara)	4.778	4.942	4.848	4.936	5.023
3	Sumur dalam terlindungi	-	148	148	148	538
4	Jumlah Rumah Tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
Persentase		16.01	16.63	16.88	16.34	17.07

Sumber: PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2025

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 7.372 rumah tangga atau sebesar 15,91% dan melalui sumur dalam terlindungi perpipaan sebesar 1.16%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Muara Satu.

E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tempat Ibadah					
	a. Mesjid	51	52	52	52	52
	b. Mushalla	93	93	93	93	93
	c. Meunasah	68	68	68	68	68
	d. Gereja	3	3	3	3	3
	e. Vihara	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Ibadah	216	217	217	217	217
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
3	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk					
	a. Mesjid	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26
	b. Mushalla	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47
	c. Meunasah	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34
	d. Gereja	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	e. Vihara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2025

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah Mushalla. Keberadaan masjid di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebanyak 51 unit, kemudian meningkat hingga menjadi 52 unit pada tahun 2021. Terdapat penambahan 1 masjid di tahun 2021 yaitu di daerah Blang Panyang yaitu Mesjid Teuku Muda Blang Panyang. Mushalla di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 berjumlah 93 unit. Meunasah pada tahun 2020-2024 berjumlah 68 unit sesuai jumlah Gampong di Kota Lhokseumawe.

Gereja dan Vihara di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 berjumlah tetap masing-masing 3 unit gereja dan 1 unit vihara. Secara umum kurun waktu 2020-2024 rasio jumlah tempat ibadah per 1000 penduduk di Kota Lhokseumawe memiliki rasio tetap, Penurunan dan peningkatan hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

F. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah

berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

Tabel 2.99
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24.36	24.36	24.36	24.36	24.36
2	Luas wilyah ber HPL (Ha)	101	101	101	101	101
3	Luas wilayah ber HGB (Ha)	63,387	20,399	73,624	162,439	164,359
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU		0.38	1.19	0.33	0.15	0,15

Sumber: DLH Kota Lhoksemauwe dan Badan Pertanahan Tahun 2025

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2020-2025 tetap. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya luas RTH dan tetapnya luas wilayah yang bertatus HPL, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL tetap dari 2020-2024. rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HGB meningkat dari tahun 2020-2021 dikarenakan luas wilyah HGB berkurang, namun tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

G. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara Satu.

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

Tabel 2.100
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemanfaatan Ruang sesuai zonasi	10.924,80	11.091,16	11.260,06	11.431,54	11.605,62
2	Luas Pola ruang sesuai RTRW	15.343,51	15.343,51	15.343,51	13.297,36	13.297,36
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		71,20	72,29	73,39	85,96	87,28

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

H. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disyaratkan adanya rekomendasi teknis dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTSP dan Naker (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota Lhokseumawe yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna.

Tabel 2.101
Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang
dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	133	224	234	280	126

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

I. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.102
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	542	542	100	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	565	565	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2024, Dinas PUPR Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2.1.4.4.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Luas Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.103
Luas Permukiman Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	4664,54	4664,54	4622,13	4700,33	4994,33

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Lhokseumawe dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan updating data rumah layak huni Kemudian pada tahun 2020 jumlah penanganan yang dilakukan dari Dinas PUPR sangat sedikit, hal ini terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 4 yang juga mengalami peningkatan luas permukiman layak huni menjadi 4994,33 Ha.

B. Areal Kawasan Kumuh

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series yaitu dari tahun 2020-2024. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, luasan kawasan kumuh yang

ada di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan data yang cukup fluktuatif.

Tabel 2.104
Areal Kawasan Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	78,46	78,46	78,46	42.67	42.67

Sumber: 1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019
2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020
3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2020-2022 tidak berubah tetap sebesar 78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBD, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Penanganan kumuh dilakukan intervensi sesuai dengan indikasi kegiatan yang ada dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) yang telah disusun oleh gampong didanai oleh APBN dari pinjaman Luar Negeri melalui Islamic developman Bank (IDB). Secara garis besar kegiatan NSUP-KOTAKU di Kota Lhokseumawe pada tahun intervensi 2020-2021 meliputi

- a. kegiatan skala lingkungan meliputi
 - 1. infrastruktur lingkungan yaitu kegiatan bantuan Pemerintah untuk masyarakat (BPM) tahun 2019-2020, infrastruktur livelihood tahun 2021, Kegiatan bantuan masa pandemic covid dengan cash for work (CFW) dan kegiatan skala kota tahun 2020-2021
 - 2. peningkatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang sudah punya usaha rumahan dan akan memulai usaha di program kotaku pendampingan dilakukan simpan pinjam kelompok usaha yang difasilitasi oleh unit pengelolaan keuangan (UPK)
 - 3. Kelembagaan dan kolaborasi, setiap gampong diharuskan membentuk suatu badan yang dinamai dengan LKM/BKM
- b. Kegiatan Skala Kawasan
 - Kegiatan penentasan kumuh skala kawasan di Kota Lhokseumawe diusulkan dari tahun 2017 hasil memorandum program terdapat 4 kawasan prioritas yaitu:
 - 1. Kawasan Mongeudong
 - 2. Kawasan Bathupat
 - 3. Kawasan Jagu
 - 4. Kawasan Pusong

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe.

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah yang aan ditangani pada tahun n	-	-	-	0%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah Tanggapenerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	300	-		0%

Sumber : Laporan SPM Tahun 2024, Dinas PUPR Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2023 seluruhnya sebesar 0%. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Daerah dan Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak tersedia.

2.1.4.4.4 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada

instansi terbawah yaitu Gampong. Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat atau Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berikut adalah rasio polisi pamong praja dan petugas linmas di Kota Lhokseumawe per 10.000 penduduk.

Tabel 2.106
Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja	233	243	250	278	325
2	Jumlah Linmas	1040	1040	1040	1173	526
3	Jumlah penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio Polisi Pamong Praja		12.34	12.79	13.06	14.17	16,35
Rasio Linmas		55.11	54.75	54.33	59.82	26,47

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari tabel rasio satuan polisi pamong praja dan petugas Linmas di atas, dapat dilihat rasio satuan polisi pamong praja dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasio satuan polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 12,34 dan pada tahun 2024 menjadi 16,35. Sedangkan jumlah petugas Linmas Kota Lhokseumawe tahun 2020-2022 tetap sebanyak 1040 orang dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1173 orang hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Lhokseumawe saat pemilu. Sedangkan rasio petugas linmas tahun 2020 sebesar 55,11 dan menjadi 59,82 dan tahun 2024 menurun menjadi 26,47.

B. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari’at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasal 15 tentang Khamar	13	-	-	1	30
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	-	2	-	1	-
3.	Pasal 18 tentang Maisir	22	-	-	-	16
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	1	4	7	-	-
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	-	-	-	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	49	31	124	60	242
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	90	45	-	2	20
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	-	-	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	1	10	8	-	-
10.	Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual	2	-	2	-	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak	-	-	-	-	-
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemerksosaan terhadap Anak	1	-	-	-	-
13.	Pasal 64 tentang Musahaqah	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		179	92	141	64	308

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak tahun 2020-2023 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2020 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 179 kasus dan menjadi 92 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021 sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 90 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022. Pada tahun 2024 kasus pelanggaran syariat islam mengalami peningkatan menjadi 308 kasus.

C. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya

masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 2.108
Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penertiban Pasar	249	249	250	5	5
2.	Penertiban IMB dan HO	2	-	-	10	-
3.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	249	249	250	6	12
4.	Penertiban Spanduk	5	-	2	-	6
5.	Penertiban Pelajar Bolos Sekolah	5	1	5	-	8
6.	Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam	-	-	-	-	60
7.	Penertiban Keramaian Umum	1	-	-	-	-
8.	Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	1	-	-	-	1
9.	Pengamanan Demo	-	-	-	3	6
10.	Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya	-	-	2	-	6
11.	Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah	-	-	-	-	-
12.	Penertiban Penindakan PNS	-	-	-	-	3
13.	Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis	40	2	250	-	98
14.	Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll)	3	-	-	-	-
Jumlah Kasus		555	501	759	25	205

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2025.

Penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2020 pada penertiban pasar sebanyak 249 penertiban dan tahun 2024 menurun menjadi 5 penertiban. Pada Tahun 2020 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 249 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban, dan tahun 2024 menurun menjadi 12 penertiban. Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2020 sebanyak 40 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban dan tahun 2024 menjadi 98 penertiban dilakukan.

D. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari

tahun 2020 hingga 2024. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Jenis Bencanas	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	6	5	3	8	1
Puting Beliung	5	1	6	2	5
Tanah Longsor	3	1	3	1	16
Gempa Bumi	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim/Abrasi	1	2	-	-	-
Jumlah	15	9	12	11	22

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025.

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2024 kejadian bencana banjir menurun menjadi 1 kali, bencana puting beliung sebanyak 5 kali, bencana tanah longsor 16 kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi juga tidak terjadi serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

E. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Lhokseumawe sangat diperlukan. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas. Persentase cakupan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.110
Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	41	32	38	103	109
2	Jumlah kejadian bencana non kebakaran yg ditanggulangi	15	9	12	23	22
3	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditanggulangi	56	41	50	126	131
4	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terjadi	56	41	50	126	131
Persentase Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	130	130	100	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50	50	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50	50	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100

Sumber: Laporan SPM Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2024 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.4.4.5 Sosial

A. Penanganan PPKS

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial

pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan dan pembinaan mental.

Tabel 2.112
Penanganan PPKS
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS yang ditangani	15.105	10.814	16.450	16.851	13.223
2.	Jumlah PPKS yang ada	76.816	101.500	101.209	94.178	93.996
3.	Persentase PPKS yang ditangani	19,66	10,65	16,25	17,89	14,07
4.	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
5.	Persentase PPKS terhadap jumlah penduduk	40,70	53,43	52,87	48,03	47,30

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PPKS di tahun 2024 meningkat dari 76.816 orang menjadi 93.996 orang, dengan persentase PPKS yang ditangani sebanyak 14,07 persen. Meski persentase penanganan tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020, namun persentase PPKS terhadap jumlah penduduk cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya usaha yang lebih untuk dapat menurunkan rasio jumlah PPKS terhadap jumlah penduduk, meskipun ada jenis PMKS yang secara status memang tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap. Mereka semua tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan dan pembinaan mental.

B. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.113
PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	158	157	160	178	340
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	216	185	197	207	340
Persentase		73.15	84.86	81.22	85.99	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 berada pada angka 73.15%, dan mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi 100%.

C. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

Tabel 2.114
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	65	60	4515	14053	384
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	65	60	4515	14053	384
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2020-2024 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

D. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

E. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.115
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	138	138	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90	90	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terkantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90	90	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara tuna sosial khususnya gendangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	48	48	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	384	384	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2024 SPM bidang sosial yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.4.4.6 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.4.6.1 Tenaga Kerja

A. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa banyak hasil pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja meliputi keterampilan tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan strategi manajerial. Metode perhitungannya adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Capaian produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.116
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d 2024
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB (ADHB)	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1	11.848.236,9
2.	Jumlah tenaga kerja (orang)		86.031	89.894	85.373	87.132
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (juta)			109,63	114,33	130,83	135,96

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025 (diolah)

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe mencapai 135,96 juta per tenaga kerja pertahun. Angka ini jauh lebih besar dari capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 109,63 juta per tenaga kerja pertahun.

B. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Tabel 2.117
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	50	54	29	43	27
2.	Jumlah perusahaan	34	52	164	93	105
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		147.05	103.85	17.68	46.24	25.71

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan

perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2020-2024, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 50 sengketa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 54 sengketa. Dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29 sengketa dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 43 sengketa Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Lhokseumawe kurang kondusif mengingat tingkat kasus sengketa meningkat, tetapi jumlah perusahaan juga menurun dan tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 27 sengketa.

C. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun tersebut. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 94% dan tahun 2021 semua kasus terselesaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 58.62%, dari 29 kasus terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya tahun 2023 tingkat penyelesaian kasus sebesar 90.47% dan tahun 2024 turun menjadi 33.33%.

Tabel 2.118
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Pejanjian Bersama (PB)	47	46	17	38	9
2.	Jumlah kasus yang tercatat	50	46	29	42	27
Tingkat Penyelesaian Kasus		94.00	100	58.62	90.47	33.33

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025

D. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Tabel 2.119
Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	331	189	44	30	23
2.	Pencari kerja yang mendaftar	695	482	549	402	258
Pencari Kerja yang ditempatkan		47.62	39.21	8.01	7.46	8.91

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025

Pada tahun 2020, jumlah pencari kerja sebanyak 695 orang, tetapi mengalami penurunan mulai tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami peningkatan menjadi 695 orang, hal ini dikarenakan ada banyaknya

peserta CPNS Kota Lhokseumawe yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunya jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

E. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2022, persentase tenaga kerja terbina kompetensi mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pencari kerja yang terdaftar semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2020-2024 persentase tenaga kerja terbina kompetensi menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan penurunan. Pelatihan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beragam menurut bakat dan minat tenaga kerja yang diarahkan untuk lebih menguasai bidangnya seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan tata rias dan pelatihan lainnya.

Tabel 2.120
Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	40	95	144	106	80
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar	695	482	549	402	258
Persentase		5.75	19.71	26.22	26.37	31.01

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2024

2.1.4.4.6.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.121
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.160	2121	2099	2036	2660
2.	Jumlah pekerja perempuan	31.346	32.529	34.992	33.681	33.742
Persentase		6,89	6,52	5,99	6,04	7,88

Sumber: DP3AP2KB, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 6,89% hingga pada tahun 2023 turun menjadi 6,04%. Pada tahun 2024 mengalami

peningkatan menjadi sebesar 7,88% hal tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, dan mutasi kerja di setiap tahunnya.

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRK. Jumlah kursi di keanggotaan DPRK Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki jumlah tetap, yakni 25 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 4 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRK dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK sebesar 16%. Selanjutnya tetap hingga tahun 2023 di mana jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan meningkat menjadi 6 orang yang terdiri dari Partai Aceh 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, Partai Demokrat 1 orang, PKB 1 orang, PKS 2 orang dan Partai Golkar 1 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 28% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2020-2024, besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRK Lhokseumawe belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

Tabel 2.122
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK
Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	4	4	4	6	7
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRK	25	25	25	25	25
Persentase		16	16	16	24	28

Sumber: Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2025

C. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.123
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47.10	48.15	48.33	51.50	50.25

Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2020-2024, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 47.10% hingga mencapai 50.25% pada tahun 2024. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Lhokseumawe yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

D. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

Tabel 2.124
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindak lanjuti oleh UPT	86	56	75	68	72
2.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang masuk ke UPT	86	56	75	68	72
Cakupan korban kekerasan		100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB, 2025

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2020 sebanyak 86 laporan, menurun pada tahun 2021 menjadi 56 laporan meningkat kembali tahun 2022 menjadi 75 laporan dan meningkat kembali menjadi 72 laporan pada tahun 2024. Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan.

E. Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak merupakan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tabel 2.125
Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2023
1	Gampong Layak Anak	6	11
2	Jumlah Gampong	68	68
3	Persentase Gampong Layak Anak	8.82	16.17
4	Nilai Kota Layak Anak	-	616,47
5	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Madya

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tahun 2021, Kota Lhokseumawe mendapatkan predikat pratama untuk Kota Layak Anak dan tahun 2023 meningkat menjadi predikat madya dengan nilai 616,47.

2.1.4.4.6.3 Pangan

A. Skor Pola Pangan Harapan

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

Tabel 2.126
Pola Pangan Harapan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76.71	76.79	76.33	77.54	77.54
2	Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	73.4	77.10	81.60	76.50	86.12

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2025

Dalam konteks ketahanan pangan, produksi pangan utama menjadi dasar untuk penentuan kecukupan rasio konsumsi normatif penduduk terhadap kebutuhan pangan. Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami defisit dalam pemenuhan karbohidarat utama karena daerah perkotaan.

Pada kurun tahun 2020-2024, skor pola pangan harapan Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan. Skor pola pangan harapan ketersediaan pada tahun 2020 sebesar 76.71 dan pada tahun 2024 Skor pola pangan harapan ketersediaan Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi sebesar 77.54. Pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang merupakan salah satu kunci dalam pencapaian skor PPH ideal. Pola pangan harapan konsumsi pada tahun 2020 sebesar 73,4 dan tahun 2024 meningkat menjadi 86.12. Capaian SPPH tingkat konsumsi pada tahun 2024 sebesar 86.12 poin. Dengan skor ini artinya pola konsumsi pangan di Kota Lhokseumawe masih perlu ditingkatkan kembali.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.127
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata Jumlah Ketersediaan	20.808.800	23.610.220	24.981.840	26.689.340	54.135.790

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pangan Utama per Tahun (Kg)					
2.	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	Ketersediaan Pangan	110,26	124,30	130,52	136,12	272.44

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2025

Ketersediaan pangan di Kota Lhokseumawe berasal dari daerah lain di sekitar Kota Lhokseumawe dan juga hasil produksi di wilayah Kota Lhokseumawe. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Lhokseumawe ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

C. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasikan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

Tabel 2.128
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
1.	Energi (Kkal)	NA	1960,97	2355	2460,64	2460,64
2.	Protein (Gram)	NA	66.53	98.11	84,65	84,65
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
3	Energi (Kkal)	1870	1943.3	2046.7	1711.5	1885.3
4	Protein (Gram)	58.7	60.0	62.6	54.1	61.4
Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Perkapita Perhari						
5	Energi (%)	87.0	90.4	97.5	81.5	89.8
6	Protein (%)	103.0	105.3	109.8	94.5	107.7

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2024

Ketersediaan energi dan protein di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2024, tersedia energy sebesar 2460.64 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 84.65 gram per kapita per hari. Peningkatan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

2.1.4.4.6.4 Pertanian

A. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat. Dari

luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 181.060.000 m², Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 4.958.100 m² sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 6.292.930 m², kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.129
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m2)	682.430	1.433.330	3.550.630	4.958.100	6.384.610
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
Persentase		0,38	0,79	1,96	2,74	3,53

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 682.430 m² atau 0.38% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2024 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 6.384.610 m² yaitu sebesar 3.53% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.130
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m2)	1.713,953	2.932,830	1.964.782	6.292.930	49.496.998
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
Persentase		0.95	1.62	1.08	3.5	27,33

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2025

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe, tahun 2020 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 1.713.953 m² atau 0.95% dan tahun 2024 luas lahan bersertifikat milik masyarakat meningkat signifikan menjadi seluas 49.496.998 m² yaitu sebesar 27.33% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe karena meningkatnya pengurusan prona setiap tahunnya dan meningkatnya pembangunan perumahan KPR.

B. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang, sampai dengan tahun 2024 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 16.435.900 m².

Tabel 2.131
Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Hak Guna bangunan (m2)	633.870	203.990	73.624	1.624.390	16.435.900
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	Persentase	0,35	0, 11	0,041	0.89	9.07

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2025

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020 sebesar 633.870 m2 atau 0,35% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2024 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 16.435.900 m2 atau 9.07% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena banyaknya Perusahaan yang membeli tanah Masyarakat sehingga menjadi penurunan hak menjadi SHGB.

2.1.4.4.6.5 Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Kota

Perintisan RPPLH dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah dan dimulai dengan penyusunan data melalui Inventarisasi RPPLH Kota Lhokseumawe. Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses pengusulan penetapan Qanun. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

B. Terselenggaranya KLHS untuk Kota

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RTRW 2024-2044. Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJMK 2025-2029.

C. Timbulan Sampah yang ditangani

Indikator timbulan sampah yang ditangani daidapatkan dari pembangian volume timbulan sampah yang ditangani dengan total timbulan sampah dikalikan dengan dengan bilangan 100. Timbulan sampah yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.132
Timbulan Sampah yang ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	27.396	29.672	28.470	27.823,95	28.105
2	Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton)	33.729	34.403	35.091	35.793	36.509
Persentase		81,22	86,25	81,13	77.73	76.98

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas Tahun 2020 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton yang ditangani sebanyak 27.396 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 81.22%. Meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang tertangani menurun menjadi 81.13%. Selanjutnya pada tahun 2024 terus menurun jumlah timbulan sampah sebanyak 36.509 ton dan yang tertangani sebanyak 28.105 ton sehingga sebesar 76.98%.

Penyebab kurangnya tertangani sampah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 antara lain adalah banyaknya keterbatasan armada pengangkutan sampah, sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan yang masih kurang serta kondisi armada pengangkut sampah yang sudah tua atau kurang baik. Sarana prasarana persampahan tahun 2020-2024 Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Tabel 2.133
Sarana Prasarana Persampahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Jenis Armada	Kondisi	Jumlah
1	Dump Truk (unit)	Baik	14
2	Arm Roll (unit)	Baik	4
3	Pick Up (unit)	Baik	5
Rusak Ringan			2
4	Truck Penyedot Lumpur dan Penyiraman (unit)	Baik	1
5	Truck Tangga (unit)	Baik	1
6	Truck Siram (unit)	Baik	1
7	Alat Berat (unit)	Baik	1
Rusak			2

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel di atas menggambarkan jumlah sarana dan prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dimana jumlah dump truck yang dimiliki sebanyak 14 unit dalam kondisi baik, Arm Roll sebanyak 4 unit dalam kondisi baik, Pick Up sebanyak 7 unit yang terdiri dari 5 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi rusak ringan serta alat berat sebanyak 3 unit dalam kondisi baik 1 unit dan 2 unit rusak. Selain itu untuk menunjang permasalahan lingkungan DLH juga didukung dengan 1 unit truck tangga, 1 unit truck siram dan 1 unit truck penyedot lumpur dan penyiraman.

D. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Indikator ini didapat dari luas area pelayanan pengelolaan sampah (km²/ha) dengan luas area kota(km²/ha) dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah. Persentase cakupan area pelayanan sampah di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.134
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	160	165	166	174	175
2.	Luas area kabupaten/kota (km2/ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181.06
Persentase		88,36	91,13	91.68	96.10	96.65

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68% dan Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 96.10% tahun 2024 hanya bertambah1 km2/ha sehingga tetap 96,10%.

E. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai *instrument* untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah. Entitas pengukuran IKPS dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.

Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sangat berpengaruh pada nilai anggaran, nilai kebijakan, nilai sumber Daya Manusia (SDM), nilai sarana dan prasarana, nilai sosialisasi, nilai implementasi, nilai capaian target, nilai efesiensi anggaran, nilai kota bersih dan nilai Indeks Kualitas Air. Berikut capaian IKPS Kota Lhokseumawe tahun 2023-2024.

Tabel 2.135
Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023	2024
1	Nilai Kebijakan	5.5	18
2	Nilai SDM	1	1
3	Nilai Sarpras	5	5
4	Nilai Anggaran	2	1
5	Nilai Sosialisasi	0	5
6	Nilai Implementasi	0	1

No	Indikator	2023	2024
7	Nilai Capaian Target	6	4
8	Nilai Efisiensi Anggaran	0	1
9	Nilai Kota Bersih	0	0
10	Nilai IKA	6	7
IKPS		25.5	43

Sumber: DLHK Aceh, 2025

Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 25,5 poin dan tahun 2024 nilainya meningkat menjadi 43 poin, namun masih tetap dalam kuartal Pemerintah Kota yang memiliki kinerja sangat kurang dalam hal pengelolaan sampah. Dari keseluruhan dimensi penilaian IKPS poinnya dibawah rata-rata/standar, kecuali Indeks Kualitas Air.

2.1.4.4.6.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesai (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.136
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	125.483	126.300	129.740	132.586	135.902
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	130.141	130.633	132.102	138.705	138.099
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk		0,96	0,97	0.98	0.96	0.98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2020-2024. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio penduduk ber-KTP dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dan jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah meningkat lebih besar dan tahun 2024 kembali meningkat.

B. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel 2.137
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	18.159	18.532	20.567	19.563	18.990
2	Jumlah Bayi	20.296	18.589	20.753	20.234	19.591
	Rasio	0,96	0,97	0.99	0.97	0.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2020 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,96. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 0.99. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Rumah Sakit ABBY, Rumah Sakit Arun, dan Rumah Sakit MNC.

C. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah

dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Lhokseumawe sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.138
Rasio Pasangan Berakta Nikah
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan berakta nikah	34.959	40.731	45.648	49.198	52.917
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	80.135	80.639	80.972	81.573	81.950
Rasio pasangan berakta nikah		0.44	0.51	0.56	0.60	0.65

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio pasangan berakta nikah dari tahun 2020 ke 2024 menjadi 0,65 di tahun 2024. Akta nikah dikeluarkan untuk warga masyarakat non muslim. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

D. Rasio Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan KTP-el, tetapi KIA tidak memiliki *chip* seperti KTP-el. Dilansir dari Permendagri 2 tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat diantara lain, (1) melindungi pemenuhan hak anak, (2) menjamin akses sarana umum, (3) menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah terjadinya perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Berikut adalah data anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Tabel 2.139
Rasio Anak yang Memiliki KIA
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak yang memiliki KIA	12.161	16.955	19.104	22.121	25.137
2	Jumlah penduduk wajib KIA <17 tahun	60.822	58.980	57.863	61.066	60.606
Rasio anak yang memiliki KIA		0.20	0.29	0.33	0.36	0.41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio anak yang memiliki KIA dari tahun 2020 ke 2024 menjadi 0,41 di tahun 2024. Namun, rasio anak yang memiliki KIA ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

E. Akta Kematian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian atau lahir mati, maka pihak keluarga wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan sipil. Berikut data Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.140
Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akta kematian	994	979	867	1.154	1.162

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan data di atas jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah akte kematian berjumlah 994 lembar dan menjadi 1.162 lembar pada tahun 2024. Jumlah pembuatan akte kematian meningkat karena kebutuhan akan kelengkapan administrasi ahli waris.

2.1.4.4.6.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik

Perkantoran pemerintahan gampong merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat gampong. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe. Kualitas perkantoran pemerintahan gampong yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.141
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Kondisi Kantor	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	54	59	59	60	57
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	9	4	4	3	6
3	Belum Memiliki Kantor	5	5	5	5	5
Jumlah		68	68	68	68	68
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik		79.41	86.76	86.76	88.24	83.82

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2020 adalah sebesar 79.41% meningkat mencapai 94.12% di tahun 2022. Pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 89.70%, Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi kantor gampong kondisi rusak menjadi bertambah menjadi 2 unit yaitu Gampong Kota Lhokseumawe dan Ulee Blang Mane. Sementara itu, terdapat 5 Gampong yang belum memiliki kantor pemerintah gampong yaitu Gampong Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Batuphat Timurn Cot Trieng. Berikut cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik per Kecamatan tahun 2020-2024.

Tabel 2.142
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana
1	Banda Sakti	18	16	88,88	16	88,88	16	88,88	16	88.88	16	88.88
2	Muara Satu	11	7	63,63	7	65.63	7	63.63	8	72.72	7	65.65
3	Blang Mangat	22	18	95,45	19	95,45	19	95,45	19	95.45	17	77.27
4	Muara Dua	17	13	94,11	17	100	17	100	17	100	17	100
Jumlah		68	54	79.41	59	86.76	59	86.76	60	88.23	57	83.82

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 79.41%, tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan menjadi sebesar 86.76%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pada tahun 2024 sedikit mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi 83.82%.

B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Gampong

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah

Gampong dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah gampong sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. Dana Gampong digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong. Selain dana gampong sumber pendapatan gampong yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada gampong menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.143
Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	40.846.685.523	44.587.713.353	43.990.585.700	45.048.128.300	47.022.296.500
2	Dana Desa (DD)	60.285.819.000	61.858.474.338	53.900.119.902	61.401.253.255	62.402.165.000
3	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	-	1.542.801.500	1.659.031.000	2.843.458.400	3.493.888.252
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	-	251.267.448	198.394.770	340.108.444	353.856.305
Jumlah		101.579.702.858	108.319.969.912	107.831.150.469	109.632.948.399	113.272.206.057

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada gampong berupa alokasi dana gampong mengalami peningkatan, pada tahun 2020 alokasi bantuan keuangan gampong sebesar Rp.101.579.702.858,- selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2020 dan Tahun 2022. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk Bagi hasil retribusi mengalami fluktuasi disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

C. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Lhokseumawe muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari Gampong, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.144
Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TP.PKK Kota Lhokseumawe	1	1	1	1	1
2	Jumlah TP.PKK Kecamatan se-Kota Lhokseumawe	4	4	4	4	4
3	Jumlah TP. PKK Gampong se Kota Lhokseumawe	68	68	68	68	68
4	Jumlah Kel PKK RW se-Kota Lhokseumawe	276	276	276	276	276
6	Jumlah Kel Dasawisma	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2020-2024, sudah semua nya aktif. Namun tetap perlu perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah.

D. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.145
Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah seluruh Posyandu	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif		100	100	100	100	100

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2020-2024 sudah mencapai 100%. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif.

2.1.4.4.6.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe. Berikut Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 146
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	n.a	42.9	49.9	50.72	57.8
Total Fertility Rate (TFR)	n.a	2.68	2.42	2.34	2.32
Unmet Need	n.a	n.a	16.4	13.44	10.4
Prevalensi Pemakaian MKJP	n.a	n.a	14.3	16.21	17.9
ASFR 15-19		14.7	16.4	14.9	13.9
DCR (Angka Putus Pakai KB)		26.8	22.3	17.81	20.3

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2025

Angka pemakaian kontrasepsi modern, atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), adalah persentase perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Metode kontrasepsi modern meliputi pil KB, kondom, suntik KB, implan, IUD, dan lain-lain. Pada tahun 2024 angka pemakaian kontrasepsi Modern CPR sebesar 57,8 persen.

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya 15-49 tahun) jika ia mengikuti pola kelahiran pada tahun tertentu. TFR adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesuburan rata-rata dalam suatu populasi. Capaian TFR Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 2.32 lebih rendah dari capaian tahun 2023

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 10.4. capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 16.4. Selanjutnya untuk Prevelensi Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sebesar 14.3% menjadi 17.9%.

ASFR adalah indikator demografi yang mengukur tingkat kelahiran pada kelompok umur tertentu, biasanya dihitung per 1000 wanita dalam kelompok usia tersebut. ASFR Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 14.7% dan mengalami penurunan menjadi 13.9%. Selanjutnya Angka putus pakai KB adalah angka yang menunjukkan berapa banyak akseptor KB yang berhenti menggunakan alat atau cara kontrasepsi tertentu setelah periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan, karena berbagai alasan. DCR Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sebesar 26.8% dan mengalami penurunan menjadi 20.3% pada tahun 2024.

2.1.4.4.6.9 Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Lhokseumawe adalah data penumpang bis yang masuk Terminal.

Tabel 2.147
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Keluar	Masuk
2020	13.207	27.068	26.575
2021	15.151	33.160	31.176
2022	15.330	41.980	36.650
2023	17.155	71.550	37.550
2024	14.135	10.789	12.362

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025.

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif kecenderungan meningkat. Tahun 2020 penurunan jumlah penumpang bis, akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum. Pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang dan pada tahun 2023 jumlah penumpang bis meningkat dari tahun 2022, namun tahun 2024 terjadi penurunan.

B. Rasio Ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek didapat dari jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.148
Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ijin Trayek	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio Ijin Trayek		0,008	0,009	0.008	0.008	0.008

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pada tabel di atas tahun 2020-2024 jumlah ijin trayek tetap sebanyak 1.636. Rasio ijin trayek pada tahun 2020 sebesar 0,008, dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 0.009 sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021. Dan tahun 2024 jumlah ijin trayek tetap. Rasio ijin trayek dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.149
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	2.006	3.078	3.154	3.252	2.107

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 cenderung meningkat yaitu sebanyak 2.006 unit pada tahun 2020 menjadi 3.252 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dikarenakan meningkatnya kesadaran untuk melakukan uji KIR dan beberapa kendaraan dari luar daerah Lhokseumawe melaksanakan numpang uji di Lhokseumawe karena gedung pengujian dan alat uji di kabupaten kota tetangga masih ada yang tidak beroperasi karena belum terakreditasi untuk gedung dan lulus kalibrasi alat uji oleh pusat sehingga Kota Lhokseumawe mendapat limpahan kendaraan yang melakukan uji kendaraan di gedung uji. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2.107 unit.

D. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.150
Jumlah Terminal Bus
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Terminal Bus	3	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Terdapat dua terminal bus di Kota Lhokseumawe, yakni Terminal Keude Aceh yang merupakan Terminal Tipe C di Kecamatan Banda Sakti yang hanya melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan/atau pedesaan dan Terminal Kandang yang merupakan Terminal tipe A yang terdapat di Kecamatan Muara Dua yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum angkutan antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dan angkutan pedesaan.

E. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Tabel 2.151
Persentase Layanan Angkutan Darat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan darat	3.845	3.195	3.612	3.682	2.324
2	Jumlah Penumpang angkutan darat	27.068	33.160	41.980	171.550	36.720
Persentase layanan angkutan darat		14.20	9.63	8.60	2.15	6.32

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 1.48% pada tahun 2019 menjadi 2.15% di tahun 202. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Lhokseumawe menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mempengaruhi persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024 persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan dari tahun 2023.

F. Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik

posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2024		2024
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	80	0	0	0	0	195	Buah	71.79
2	Cermin Tikungan	0	3	0	3	0	24	Unit	25.00
3	Marka Jalan	21.250	4.516	682	1.021	0	35.580	m ²	95.3
4	Traffic Light (APILL)	0	0	0	0	0	0	Unit	0
5	Warning Light	0	0	0	0	0	12	Unit	0,0
6	Guard Rall (Pagar Pengaman)	0	0	0	0	0	3.000	Meter	0,0
7	Halte	0	0	0	0	0	0	Unit	0,0
8	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	10	0	0	485	Titik	2.06

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan gampong belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan gampong juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan gampong bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kota, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada.

Jumlah Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Arah) yang ada di Kota Lhokseumawe masih belum bisa memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan. Dari 195 buah rambu dan RPPJ yang dibutuhkan baru terpenuhi sejumlah 80 atau sebesar 71.79% pada Tahun 2024. Jumlah rambu yang ada masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk kelancaran para pengguna jalan serta meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Cermin tikungan dibutuhkan pada persimpangan jalan yang tertutup untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah

untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraanya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. APILL sudah terpasang disetiap persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya sehingga telah cukup.

Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati. Warning light yang butuh Kota Lhokseumawe sebanyak 12 unit, namun satupun belum ada. Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kota Lhokseumawe yang sebagian berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardrail*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing/ jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena belum tersedia dari sekitar 3000 meter jumlah kebutuhan.

G. Rasio Panjang per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.153
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Kendaraan	59.064	55.461	50.546	50.646	50.646
Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan		0.0069	0.0074	0.0081	0.0081	0.0081

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi, yakni 59.064 unit kendaraan pada tahun 2020 menurun menjadi 55.461 unit kendaraan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Lhokseumawe. Jumlah kendaraan di kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah sebanyak 50.546 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 4.915 kendaraan dibanding tahun

2021. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19. Paa tahun 2023 dan 2024 jumlah kendaraan sedikit meningkat menjadi 50.646 unit.

H. Kinerja Jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau *Volume Capacity Ratio*, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2020 dari 3 ruas jalan Kota yang diukur VC Rationya 0.9. Tiga ruas jalan kota yang diukur terletak Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154
VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota
Lhokseumawe Tahun 2020

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
1	Jl. Darussalam	0.81	D
2	JL. Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan)	0.99	E
3	JL. Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh)	1.05	F

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat Jalan Darussalam memiliki tingkat pelayanan jalan dengan skor D yaitu arus mendekati tidak stabil, dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditelerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kecepatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temprer dapat menyebabkan penurunan kecepatan besar yang besar. Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan) memiliki tingkat pelayanan E yaitu kepadatan lalu lintas tinggi, pengemudi mulai merasakan kemacetan durasi pendek, sedangkan Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh) memiliki tingkat pelayanan F yaitu arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dan terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.

2.1.4.4.6.10 Komunikasi dan Informatika

A. Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan terselenggaranya SDI ini, dibutuhkan peran, kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 diatur pula mengenai penyelenggara SDI serta peran dan tugasnya. Pada tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai walidata, serta Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SDI ini, salah satunya untuk dapat menjalankan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data.

Dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Lhoskeumawe telah menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2024 juga telah ditetapkan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe. Untuk penyajian dan pengelolaan data, Pemerintah Kota Lhkseumawe melakukan penginputan data pada portal Satu Data Lhokseumawe yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku Walidata Kota Lhokseumawe, dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe selaku Produsen Data.

Tahun 2024 melalui Forum satu data Kota Lhokseumawe telah menyepakati penciri miskin ekstrem yang kemudian dibakukan dalam surat edaran Wali Kota Lhokseumawe. Kemudian Surat Edaran penciri miskin ekstrem dimaksud menjadi pedoman bagi Tim Satuan tugas Percepatan penghapusan miskin ekstrem Kota Lhokseumawe dalam melakukan verifikasi dan validasi langsung kemiskinan ekstrem di lapangan. Hasil yang dicapai, dari data kemiskinan ekstrem oleh Kemenko PMK Tahun 2024 sejumlah 78.392 individu/jiwa, terverifikasi menjadi 6.675 individu/jiwa yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Lhokseumawe sebagai proses lebih lanjut sampai ke Pemerintah Pusat.

Pada tahun ini 2025, Forum Satu Data Kota Lhokseumawe melaksanakan kegiatan pemenuhan keterisian data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul e-Walidata SIPD-RI, hingga saat ini kegiatan ini masih berjalan.

2.1.4.4.6.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Peresentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 2.155
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	106	107	107	181	130
2	Jumlah Koperasi	207	208	208	312	335
	Persentase Koperasi Aktif	51.21	51.44	51.44	58.01	38.80

Sumber: Disperindagkop, 2025.

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang meningkat. Dari 106 unit koperasi aktif di tahun 2020, turun menjadi 181 unit koperasi aktif pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 130 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

Tabel 2.156
Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Variabel	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Simpan Pinjam	158	163	163	161	161
2	Koperasi Simpan Pinjam	6	6	4	2	2
3	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	1	5	6	6
4	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	-	10	12	12
	Jumlah	164	170	172	181	181

Sumber: Disperindagkop, 2025.

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Namun untuk Koperasi Simpan Pinjam mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

C. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.157
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	5563	5679	6292	6787	6837
2	Jumlah seluruh UKM	5623	5739	6353	6848	6898
Persentase Usaha Mikro dan Kecil		98.93	98.95	99.04	99.11	99.12

Sumber: Disperindagkop, 2025.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 yaitu mencapai 6.837 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/ *craft*, dan jasa).

D. Nilai Omset UKM yang dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Lhokseumawe. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2020-2021 masih dibawah 100% namun tahun 2022-2024 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.158
Nilai Omset UKM yang dibina
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah UKM	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)		
		Tahun Dasar (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	5623	4.846.05	4.615,49	95.24
2021	5739		4.615,60	95.24
2022	6353		5.510,65	113.71
2023	6848		5.525,80	114.02
2024	6898		8.027,90	165.66

Sumber: Disperindagkop, 2025.

2.1.4.4.6.12 Pananaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Lhokseumawe banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan dengan morfologi perkotaan.

Tabel 2.159
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Investor PMA	2	1	1	1	3
2	Investor PMDN	434	432	459	412	475
Total		436	433	460	413	478

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2025.

Jumlah Investor PMA di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 2 investor di tahun 2020 menjadi 3 investor di tahun 2024 dan turun menjadi 1 uit di tahun 2021-2023. Sedangkan jumlah Investor PMDN tahun 2020 sebanyak 434 investor, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 432 investor. Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 459 investor. Dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 412 investor dan 2024 meningkat menjadi 475 investor. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2020 dan 2022 mengalami peningkatan yang hingga sebesar 436 unit pada tahun 2020 dan 460 unit pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan total investor menjadi 433 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 Investasi PMDN sebesar 168,453 (milyar), di tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2.489,517 (milyar) dan pada tahun 2022 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami penurunan menjadi sebesar 1.112,716 (milyar) dan pada tahun 2023 menurun secara drastis menjadi sebesar 249,540 milyar dan tahun 2024 menurun kembali sebesar 238 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.160
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PMA	2,402	508	19,250	0	13,683
2	PMDN	166,051	2.489,008	1.093,466	249,540	512,508
Total		168,453	2.489,517	1.112,716	249,540	526,191

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2025.

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.112.716.277.156 dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 249.539.799.410 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori: Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

C. Pelayanan Perizinan

Dengan adanya Peraturan tentang kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dampak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaku usaha diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam melakukan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri tanpa harus datang ke DPMPTSP dan dapat dilakukan kapan saja karena OSS dapat di akses dimana saja dan kapan saja.
2. Pelaku usaha dimungkinkan mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen izin yang lain.

Dalam hal perizinan, kondisi pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.161
Pelayanan Perizinan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	izin	1066	1174	2891	3349	3914
2	Jumlah pengajuan perizinan	izin	1749	1528	2901	3375	4249
	Capaian	%	60.95	76.83	99.65	99.22	92.11
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	21	5	9	22	18
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	21	5	9	22	18
	Capaian	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	93	61	68	73	33
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	96	96	96	69	55
	Capaian	%	96.87	63.54	70.83	105.79	60.0

Sumber: DPMPSTSP Kota Lhokseumawe, 2025.

2.1.4.4.6.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.162
Organisasi Pemuda yang aktif
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	50	50	16	16	16
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	60	60	20	20	16
	Persentase	83.3	83.3	80	80	100

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 34 organisasi dari yang semula 50 organisasi pemuda yang aktif menjadi 16 organisasi pemuda yang aktif.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.163
Cakupan Pembinaan Olahraga
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	36	36	35	35	35
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	44	44	45	45	45
Persentase cakupan pembinaan olahraga		81.82	81.82	77.77	77.77	77.77

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 44. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 45. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan cabang olahraga yang dibina, yaitu menjadi 35. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Lhokseumawe belum mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar belum terbina dengan baik.

C. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.164
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	53	53	60	60	49
2	Jumlah seluruh pelatih	146	146	87	87	84
Persentase cakupan pelatih bersertifikat		36,3	36,3	68,9	68,9	58.3

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Kota Lhokseumawe memiliki 49 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2024 adalah 84. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

2.1.4.4.6.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Kota Lhokseumawe serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

2.1.4.4.6.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Lhokseumawe secara bertahap.

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Tabel 2.165
Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	1	1	1	1	34
2	Jumlah total perangkat daerah	34	34	34	34	34
Persentase PD yang menggunakan sandi		2.94	2.94	2.94	2.94	100

Sumber : Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

2.1.4.4.6.16 Kebudayaan

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradenya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.166
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya
di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024

No	Kegiatan	Tahun
1	Teluk Samawi	2022
2	Pameran Budaya	2022
3	Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8	2023
4	Panteu Meuseuraya	2023
5	Pameran Budaya	2023
6	Workshop Seni dan Budaya di era digitalisasi	2024
7	Pelatihan Hikayat dan Seumapa	2024
8	Belajar Bersama Canag Ceureukeuh	2024
9	Kajian Rapai Uroeh	2024

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Dari Tabel di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 terdapat 4 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.167
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

2.1.4.4.6.17 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

Tabel 2.168
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2037	1990	1990	1958	2866
2	Jumlah populasi yang harus dilayani	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan		0.010	0.010	0.010	0.009	0.014

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2021 yang kemudian diikuti pula dengan penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2023. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.

B. Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.169
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	6348	7625	8539	8539	9516
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan (Eksemplar)	23.500	27.276	29.512	29.512	30.456
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		0.27	0.27	0.29	0.29	0.31

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

C. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.170
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Umum/ Perpustakaan Daerah	15	15	15	15	15
2	Perpustakaan Sekolah	163	163	163	158	158
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	13	13	13	14	14
4	Perpustakaan Khusus	14	14	14	12	13
5	Perpustakaan Pesantren/Dayah	8	8	14	8	6
6	Jumlah Perpustakaan	213	213	219	207	206
7	Jumlah penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
Rasio jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk		1,13	1,12	1,14	1,06	1.04

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020-2024, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 1,13 menjadi 1,04. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Tahun 2021 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 1,12, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1,14 karena penambahan jumlah penduduk. Tahun 2024 jumlah perpustakaan berkurang sehingga rasio jumlah perpustakaan menjadi 1,04.

D. Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2020 hingga tahun 2024 yaitu sebesar 2168.2 jiwa pengunjung.

Tabel 2.171
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung	2037	1990	1990	1958	2866
2	Rata-rata jumlah pengunjung	2168.2				

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Lhokseumawe. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan.

E. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Terkait pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Kota Lhokseumawe belum memilikinya.

2.1.4.4.6.18 Kearsipan

A. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel 2.172
Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	10	15	8	8	15
2	Jumlah OPD	34	34	34	34	34
Persentase		29.41	44.11	23.53	23.53	44.11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, pada tahun 2020 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku sebesar 29.41% atau 10 OPD dari Jumlah 34 OPD. Persentase pengelolaan arsip ini meningkat dikarenakan jumlah OPD yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 menjadi 15 OPD. Dan pada tahun 2022-2023 menurun menjadi 8 OPD dan tahun 2024 bertambah menjadi 15 OPD.

2.1.4.4.7 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.4.7.1 Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Tabel 2.173
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jumlah Pengunjung				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan wisata	293.680	150.297	245.374	321.499	309.092

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Lhokseumawe di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

B. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.174
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi
1	Wisata Alam	
	Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti
	Pulau semadu	Kecamatan Muara Satu
	Pantai pulo daruet	Kecamatan Muara Dua
2	Wisata Budaya/Spiritual	
	Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)
	Gua Jepang cot Panggoi	Gp. Blang Panyang (Muara Satu)
	Meriam Belanda	Gp. Kuta Blang (Banda Sakti)
	Tugu Pahlawan TKR	Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)
	Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat)
	Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)
	Mon tujuh	Gp. Mesjid (Blang Mangat)
	Makam Tgk. Dilhokseumawe	Gp. Banda Masen (Banda Sakti)
	Makam Tgk. Chik Ditunong	Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)
	Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)
	Makam Mualim Taufik Shaleh	Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)

No	Uraian	Lokasi
	Makam Putroe Neng	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)
	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)
	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
	Makam Tgk. Chik Buket Krueng	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)
	Museum P. Ramli	Gp. Paloh (Muara Dua)
3	Wisata Buatan	
	Reservoir (Waduk)	Gp. Pusong (Banda Sakti)
	Taman Riyadah	Kecamatan Banda Sakti
	Taman Mangat Cerita	Kecamatan Blang Mangat
	Waduk Jeulikat	Kecamatan Blang Mangat

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025.

C. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Lhokseumawe. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir 2020-2024 mengalami peningkatan, di tahun 2020 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 4.45%. Namun di tahun 2021-2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 11.90% di tahun 2024

Tabel 2.175
PAD Sektor Pariwisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	105.194.000	287.803.500	534.054.623	744.194.756	1.020.576.163
2	Pajak Restoran	2.775.990.026	3.587.507.600	5.563.411.570	6.139.818.064	5.789.281.826
3	Pajak Hiburan	48.524.600	170.092.200	218.205.800	348.147.200	331.402.219
4	Total Sektor Pariwisata	2.929.708.626	4.045.403.300	6.315.671.993	7.232.160.020	7.141.260.208
5	Total PAD	65.875.904.859	62.415.913.242	68.212.506.871	68.047.614.286	60.028.921.251
6	Persentase (%)	4.45	6.48	9.26	10.63	11.90

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025 Hasil Olahan 2025

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 merupakan dampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan jam operasional objek wisata ataupun penutupan tempat wisata untuk sementara.

2.1.4.4.7.2 Pertanian

A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Lhokseumawe sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.176
Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi (Ton)	9.688	5.957	6.859	7294.71	9801
2	Luas Panen Padi (Ha)	1828	1083	1247	1326.31	1782
Produktivitas Lahan (Ton/Ha)		5.3	5.3	5.5	5.5	5.5

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, DKPPP Kota Lhokseumawe, 2025.

Pada tahun 2020-2021 produksi padi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Tahun 2020 produksi padi mencapai 9.688 ton dan terus menurun menjadi 7.294.71 ton di tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi 9.801 ton. Tahun 2020 luas lahan baku sawah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu 1.102,34 Ha dari luasan sebelumnya 2.050 Ha, penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi padi.

Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Lhokseumawe. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Namun pada tahun 2022-2024 produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia.

2.1.4.4.7.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Lhokseumawe. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

Tabel 2.177
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga penggun listrik	47.945	49.976	51.460	53.549	56.584
2	Jumlah rumah tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
Persentase rumah tangga		115,04	117.99	117.14	117,68	122,17

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2025

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe sebesar 115.04% di tahun 2020 dan meningkat

menjadi 122.17% di tahun 2024. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor persentase rumah tangga pengguna listrik PLN melebihi 100% yakni ada rumah tangga yang memasang meteran lebih dari satu atau rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu atau penggunaan untuk rumah kontrakan/rumah kos.

B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.178
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Listrik terpasang	240	240	240	240	240
2	Jumlah kebutuhan	94,00	106.72	111.42	117.07	129.08
Rasio ketersediaan daya listrik		2.55	2.25	2.15	2.05	1.86

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2025

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

2.1.4.4.7.4 Perdagangan

A. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik adalah nilai ekspor netto.

Tabel 2.179
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor Neto	-546.92	-391,39	-43,67	105,85	34,51
2	Persentase nilai Ekspor Neto	-7.83	-5.4	-0.58	1.35	0.42

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tahun 2020-2024, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah

daripada nilai impor, namun tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan.

B. Pendapatan Sektor Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.180
Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Persampahan /Kebersihan	520.207.500	312.692.500	464.260.000	370.105.000	284.485.000
2	Retribusi Pelayanan Pasar	167.900.000	746.525.000	708.311.000	922.465.000	862.610.000
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.345.600	14.449.500	11.323.000	12.535.000	0
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	650.937.000	30.217.000	41.400.000	57.750.000	50.000.000
Jumlah		1.342.392.120	1.103.886.021	1.225.296.022	1.362.857.023	1.197.095.000

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12.16% dari tahun lalu dengan nilai penurunan sebesar Rp 165.762.023. Penurunan terbesar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan penurunan sebesar 23.13% dan retribusi pelayanan pasar sebesar 6.49%, dilanjutkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan penurunan mencapai 100%. Penurunan jumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 7.750.000 atau sebesar 13.41%. Pada tahun 2021 dampak Pandemi Covid-19 di sektor perdagangan antara lain penurunan aktivitas perdagangan di pasar.

2.1.4.4.7.5 Perindustrian

A. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.181
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	17	25	40	43	37
2	Total Kelompok Pengrajin	87	96	107	107	109
Persentase bina kelompok pengrajin		19,54	26,04	37,38	40,18	33.94

Sumber: Disperindagkop Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tahun 2020 terdapat 17 kelompok pengrajin dan angka tersebut meningkat menjadi 43 kelompok pada tahun 2023. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 mencapai 19.54%, dan angka tersebut meningkat menjadi 40.18% pada tahun 2023. Namun di tahun 2024 jumlah kelompok pengrajin kembali turun menjadi 37 kelompok atau 33.94%, hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2.1.4.4.7.6 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Lhokseumawe sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	9.725	14.615	12.852	13.119	12.968
2	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	3.350	3.400	8.065	1.995	2006.65
Total Produksi (Ton)		13.075	18.015	20.917	15.114	14.974,65

Sumber: DKPPP 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat total produksi perikanan tangkap dan budidaya Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 fluktuatif cenderung meningkat. Total produksi ikan tahun 2020 tercapai 13.075 Ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 14.974,65 ton.

2.1.4.4.8 Aspek Penunjang Urusan

2.1.4.4.8.1 Perencanaan Pembangunan

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu

agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2.183
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Lhokseumawe telah ada berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe tahun 2025-2045. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2.184
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Lhokseumawe. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2017-2022, RPJMD ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kemudian untuk tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah ditetapkan Dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Qanun. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 telah ditetapkan

Tabel 2.185
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Perwal	Perwal	Perwal	Perwal	Perwal
		No 21	No.51	No.24	No 17	No 22
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Qanun dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa Qanun yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

D. Tersedianya RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel 2.186
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan
dengan PERDA Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

Dokumen RTRW yang berlaku 2024 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2023-2044. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan

menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

E. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.187
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD
di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	306	182	152	183	171
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun	301	189	189	182	186
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		101,6	96.29	80.42	100	91.94

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2020-2024 Fuktuatif. Kecenderungan OPD memasukkan byk program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKPD. Oleh karena itu ,dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50–3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.1.4.4.8.2 Keuangan

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas

informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.188
Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

B. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase SILPA Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2021 dan SILPA terkecil di tahun 2024.

Tabel 2.189
Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
2020	42.045.667.332,97	898.210.311.849	4.68
2021	52.399.883.518,38	879.310.221.282	5.96
2022	10.541.034.674,37	874.851.664.000	1.28
2023	37.480.808.630	798.260.907.647	4.64
2024	1.264.786.679	847.032.964.141	0.15

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

C. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2024, yaitu senilai 26.26% dari total APBD Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.190
Persentase Belanja Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Belanja	Total APBD	Persentase
	Urusan Pendidikan		
2020	199.342.253.650,99	898.210.311.849	22.19
2021	194.345.855.680	879.310.221.282	22.10
2022	195.258.081.775	874.851.664.000	22.32
2023	177.628.068.026	798.260.907.647	22.25
2024	222.470.125.307	847.032.964.141	26.26

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

D. Perbandingan Belanja Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Lhokseumawe, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2020, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Lhokseumawe ini tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191	
Proporsi Belanja Daerah	
Kota Lhokseumawe Tahun 2020	
Variabel	2020
Jumlah Belanja Langsung	449.394.961.057
Total APBD	898.210.311.849,29
Persentase	50,03
Jumlah Belanja Tidak Langsung	448.815.350.792,29
Total APBD	898.210.311.849,29
Persentase	49,97

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 0503708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 2.192				
Proporsi Belanja Daerah				
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024				
Variabel	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	590.366.995.636	605.522.237.180	595.256.623.128	619.101.810.114
	67.14	69.21	74.57	73.09
Belanja Modal	168.374.880.958	156.583.508.120	82.331.873.436	103.766.958.008
	19.15	17.90	10.31	12.25
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	3.000.000.000	52.650.368	1.171.55.800
	0.51	0.34	0.01	0.14
Belanja Transfer	116.068.344.688	109.745.918.700	120.619.760.715	122.992.640.220
	13.20	12.54	15.11	14.52
Total APBD	879.310.221.282	874.851.664.000	798.260.907.647	847.032.964.142

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

E. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Tabel 2.193
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	61,5587	64,1924	71,262
			B	B	B

Sumber: <https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id>, 2025

IPKD didapat dengan menjumlahkan Indeks pada setiap dimensi. IPKD Kota Lhokseumawe tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 71,262. Rata-rata nilai IPKD di Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah rendah adalah 71.866. Nilai IPKD Kota Lhokseumawe ada di bawah rata-rata Nasional. Untuk tahun 2024 dilakukan pengukuran di tahun 2025.

2.1.4.4.8.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

A. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total Struktural.

Tabel 2.194
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	56	45	0	37	24
2	Jumlah total struktural	495	513	305	208	307
Persentase		11.31	8.77	0	17.78	7.82

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus menurun dari tahun 2020 sejumlah 11.31% sampai dengan tahun 2022 menjadi 0%. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,78% dan tahun 2024 menurun menjadi 7.82%. Jika dicermati pada tabel diatas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.

B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

Tabel 2.195
Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	32	32	32	32

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Lhokseumawe sebanyak 32 orang. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tabel 2.196
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.686	1770	1.939	1.749	912

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebesar 1.686 orang meningkat pada tahun 2021 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi sebesar 1.770 orang, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2021-2022 jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2023 jumlah ini

kembali turun menjadi 1.749 orang hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Tahun 2024 kembali turun menjadi 912 orang.

Jabatan Fungsional sebagian besar pada Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD). Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampingan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

D. Penilaian Sistem Merit

Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2023-2024 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai buruk pada capaian penerapan sistem merit.

Tabel 2.197
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2024

No	Aspek	Maksimal	2023	2024
1	Perencanaan Kebutuhan	40	5	12,5
2	Pengadaan	40	12	8
3	Pengembangan Karir	130	-	2,5
4	Promosi dan Mutasi	40	10	17,5
5	Manajemen Kinerja	80	5	27,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	2,5	17,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	0	8
8	Sistem Informasi	24	0	2
Nilai Capaian		410	34,5	95,5
		Kategori	Buruk	Buruk
		Indeks	0,08	0,23

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025.

Berdasarkan hasil penilain tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, penyelenggaraan diklat, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

E. Penilaian Indeks Profesioanal ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapaun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;

- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi diatas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah.

Tabel 2.198
Indeks Profesionalitas ASN
di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023

No	Indikator	2023	2024
1	Kualifikasi	21.4	21.44
2	Kompetensi	8,59	25.89
3	Kinerja	3,01	24.57
4	Disiplin	5	5
	Nilai Indeks Profesional ASN	37,98	76.89
	Kategori	kurang	sedang

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2022 indeks profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe sebesar 37,98 sehingga masuk pada

kategori kurang dan tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 76.89 masih dalam kategori sedang.

2.1.4.4.8.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.199
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2023			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMP TSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINO VAC)	DPMP TSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMP TSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Kejayaan)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasi tertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

2.1.4.4.8.5 Pengawasan

A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan

peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel, dimana di tahun 2020-2024 telah berada pada level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.200
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025

B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan. Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.201
Capaian Tingkat Maturitas SPIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas SPIP	Level 2	Level 2 2.314	Level 2 2.314	Level 3 3.031	Level 3 3.031

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025

C. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama yaitu 1. Perencanaan dengan penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Kapabilitas dengan penilaian atas komponen terhadap area-area kepemimpinan, kapabilitas, SDM, kemitraan dan proses pengelolaan risiko. 3. Hasil dengan penilaian atas komponen aktivitas penanganan risiko dan outcome. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2022 masih sama

yaitu level 2 dengan nilai 2,092. Dan pada tahun 2023 masih berada pada level 2 namun dengan nilai 2.832 meningkat sedikit dari tahun 2022.

D. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompok dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar kapabilitas pengelola risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan dan pilar penanganan kejadian korupsi. Untuk tahun 2021-2022 IEPK Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan nilai 2,276. Untuk tahun 2023 IEPK Kota Lhokseumawe masih berada pada level 2 dengan nilai 2.800 meningkat dari tahun 2022.

2.1.4.4.8.6 Sekretariat DPRK

A. Pesentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Tabel 2.202
Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	7	7	4	5	6
2	Jumlah Prolegda	21	17	10	8	11
	Persentase	33.33	41.18	40.00	65.50	54.55

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2025

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2019 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 47.06% dan di tahun 2020 semakin menurun menjadi 33.33%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%, walaupun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.00% dan tahun 2023 meningkat menjadi 65.50%.

2.1.4.4.8.7 Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks reformasi hukum. Hasil capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.203

Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C 41.23	C 44.03	C 45.36	CC 54.79	B 66.85
2	Nilai SAKIP	CC 55.00	CC 55.40	CC 55.80	B 60.18	B 61.12
3	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	B- 3.33	D 1.87	B 3.94
4	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	55.13	77.72

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2024

2.2.1. Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe

Penetapan indikator makro daerah bertujuan untuk memberi gambaran serta ukuran dalam pencapaian kinerja daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir (2017-2022) pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan yang fluktuatif dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi dalam RPK telah ditargetkan sebesar 3,6 persen dan di targetkan dalam RKPK Tahun 2024 sebesar 4,11 persen, kemudian dalam P-RKPK 2024 sebesar 4,35-4,40 dan telah tercapai sebesar 4,46 persen, ini artinya pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari target yang telah di tetapkan dalam P-RKPK Tahun 2024, namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional.

Peningkatan Pertumbuhan perekonomian Kota Lhokseumawe menurut BPS didorong oleh beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti gas alam cair (LNG), kondensat, dan LPG, yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kota ini. Selain itu, keberadaan pabrik pupuk, kertas, dan industri turunannya juga memberikan kontribusi signifikan. Kedua, meskipun ada tantangan, upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Secara general pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe sudah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 11,16 persen menjadi di 9,15 persen di tahun 2022, Untuk Tahun 2023 Pengangguran di Kota Lhokseumawe menurun kembali menjadi 8,68 persen.

Sedangkan di tahun 2024 telah di targetkan dalam RPK sebesar 11,08, kemudian dalam RKPK Tahun 2024 sebesar 9,05 persen, kemudian pada P-RKPK Tahun 2024 sebesar 8,48 persen dan mengalami penurunan sebesar 8,47 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RKPK. Meskipun Penurunan tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe dari target RKPK Tahun 2024 dan dari data tahun 2023, namun tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan aceh dan nasional masih tinggi, perlu upaya keras Pemerintah Kota Lhokseumawe dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah pengangguran.

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga merupakan penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Selain itu IPM juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM Kota Lhokseumawe dalam RPK ditargetkan sebesar 77,7 persen, dalam RKPK Tahun 2024 sebesar 78,9 persen, kemudian pada P-RKPK 2024 ditargetkan sebesar 80,85-81,65 dan telah tercapai di tahun 2024 sebesar 80,89 persen, ini artinya IPM Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan aceh dan nasional IPM Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi.

Peningkatan IPM Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan beberapa indikator kunci seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan infrastruktur, dan program-program pembangunan yang efektif juga dapat berkontribusi pada peningkatan IPM.

2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada RPK Lhokseumawe ditargetkan sebesar 11,07 persen dan pada RKPK Tahun 2024 ditargetkan kembali sebesar 10,74 persen, kemudian pada P-RKPK ditargetkan 10,53 persen dan capaiannya di Tahun 2024 sebesar 10,44 persen artinya tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe sudah mengalami penurunan dari tahun 2023 dan dari target P-RKPK, namun masih lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Aceh.

Penurunan tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe di pengaruhi beberapa faktor diantaranya terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat, upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan pembangunan manusia.

2.2.1.5. Rasio Gini

Rasio gini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah atau populasi. Rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Rasio gini Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2023 masih dibawah 0,4 yang berarti ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

Ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang merata; kebijakan pemerintah melalui program-program sosial seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat; adanya keterlibatan sektor UMKM di Kota Lhokseumawe; dan pendidikan dan keterampilan masyarakat yang baik dengan memiliki akses yang baik ke pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Untuk target Rasio Gini pada P-RKPK tahun 2024 sebesar 0,293 dan ditahun 2024 nilai rasio gini belum di publis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204
Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe
Tahun 2024

No	Indikator	Target			Capaian Tahun 2024	Ket
		RPK	RKPK 2024	P-RKPK 2024	semester 2	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6	4,11	4,35 - 4,40	4,46	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,08	9,05	8,48	8,47	
3.	IPM	77,7	78,9	80,85 – 81,65	80,89	
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,07	10,74	10,53	10,44	
5	Gini Ratio	-	-	0,293	-	

Sumber : P-RKPK 2024 dan BPS Lhokseumawe

2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe masih bertumpu pada Pendapatan Transfer dengan kisaran hampir 90 persen, sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 9 persen dan Lain-lain Pedapatan daerah yang sah menyumbang sebesar 1 persen lebih Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya.

2.2.2.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Kota Lhokseumawe dalam P-RKPK Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp799.852.837.763,00 dan telah tercapai sebesar Rp782.435.185.153,82 atau sebesar 97,82 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P- RKPK Tahun 2024. Capaian Realisasi terbesar yaitu pada objek pendapatan tranfer sebesar 99,60 persen dari target yang telah ditetapkan pada P-RKPK Tahun 2024 kemudian pada pendapatan asli daerah tercapai sebesar 84,94 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK dan kemudian pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 72,48 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205
Capaian Pendapatan Tahun 2024 Semester 2 terhadap
Target P-RKPK Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Target P -RKPK	Realisasi 2024 Semester 2	Capaian terhadap P-RKPK (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	799.852.837.763,00	782.435.185.153,82	97,82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.074.593.500,00	61.221.789.871,82	84,94
4.1.01	Pajak Daerah	39.336.322.154,00	40.635.414.867,00	103,30
4.1.02	Retribusi Daerah	3.138.000.000,00	2.644.585.387,00	84,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.200.000.000,00	9.296.221.048,00	57,38
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.400.271.346,00	8.645.568.569,82	64,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	714.431.626.420,00	711.540.274.596,00	99,60
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638.940.030.000,00	644.289.860.883,00	100,84
4.2.01.01	Dana Perimbangan	578.524.960.000,00	579.670.282.483,00	100,20
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.057.243.000,00	23.963.915.000,00	125,75
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	455.755.284.000,00	460.591.201.830,00	101,06
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.409.944.000,00	20.389.645.000,00	99,90

Kode Rekening	Uraian	Target P -RKPK	Realisasi 2024 Semester 2	Capaian terhadap P-RKPK (%)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.302.489.000,00	74.725.520.653,00	89,70
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0,00
4.2.01.02.01	DID			0,00
4.2.01.05	Dana Desa	60.415.070.000,00	59.133.769.400,00	97,88
4.2.01.05.01	Dana Desa	60.415.070.000,00	59.133.769.400,00	97,88
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	5.485.809.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal		5.485.809.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.491.596.420,00	67.250.413.713,00	89,08
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.560.043.420,00	34.714.266.891,00	85,59
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	34.931.553.000,00	32.536.146.822,00	93,14
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.346.617.843,00	9.673.120.686,00	72,48
4.3.01	Pendapatan Hibah	-		0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	13.346.617.843,00	9.673.120.686,00	72,48
	JUMLAH PENDAPATAN	799.852.837.763,00	782.435.185.153,82	97,82

Sumber : RKPK Tahun 2024 dan LRA Tahun 2024 semester 2

2.2.2.2. Realisasi Belanja

Belanja Daerah yang ditargetkan dalam P RKPK Tahun 2024 sebesar Rp834.882.659.177,00 dan telah tercapai sebesar Rp780.170.398.474,68 atau sebesar 93,45 persen, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program yang terbagi dalam pada 34 perangkat daerah di Kota Lhokseumawe. Realisasi terbesar berasal dari belanja daerah pada Belanja Modal yang terserap sebesar Rp.95.372.630.379,68 dari target dalam P-RKPK sebesar Rp98.895.635.802,00 atau 96,44 persen kemudian pada belanja transfer tercapai sebesar Rp113.003.810.458,00 atau sebesar 93,39 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2024. Dan pada belanja operasional ditargetkan dalam P-RKPK Tahun 2024

Rp613.250.721.355,00 dan tercapai sebesar Rp571.793.499.775,00 atau sebesar 93,24 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2024. Kemudian belanja tidak terduga tercapai sebesar Rp 457.862,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 121.005.545.220,00 atau tercapai sebesar 0,03 persen. dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.206
Capaian Belanja Tahun 2024 Semester 2 terhadap
Target P RKPK Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	Target P -RKPK	REALISASI 2024 Semester 2	Capaian terhadap P RKPK (%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	834.882.659.177,00	780.170.398.474,68	93,45
5.1	BELANJA OPERASI	613.250.721.355,00	571.793.499.775,00	15,18
5.1.01	Belanja Pegawai	346.747.754.931,00	340.136.808.921,00	9,73
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.799.938.875,00	169.972.178.381,00	85,55
5.1.04	Belanja Subsidi	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.267.464.317,00	31.461.402.816,00	78,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.292.563.232,00	29.080.109.657,00	99,05
5.2	BELANJA MODAL	98.895.635.802	95.372.630.379,68	91,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.045.936.209	16.507.986.083,00	86,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.655.268.211	27.920.996.674,83	99,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	47.233.465.650	50.092.283.746,85	98,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.869.889.600	681.363.875,00	12,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	91.076.132	170.000.000,00	65,12
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.730.756.800	457.862,00	0,04
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.730.756.800	457.862,00	0,04

Kode Rekening	URAIAN	Target P -RKPK	REALISASI 2024 Semester 2	Capaian terhadap P RKPK (%)
1	2	3	4	5
5.4	BELANJA TRANSFER	121.005.545.220	113.003.810.458,00	91,88
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.568.178.720	3.847.744.558,00	36,41
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	110.437.366.500	109.156.065.900,00	97,09
	JUMLAH BELANJA	834.882.659.177	780.170.398.474,68	93,45

Sumber : RKPK Tahun 2024 dan LRA Tahun 2024

2.2.2.3. Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah berasal dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang telah di targetkan dalam P RKPK Tahun 2024 sebesar Rp35.029.821.414,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp37.029.821.414,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp2.000.000,00. Pada tahun 2024 penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu belum ada capaian sedangkan untuk objek pembiayaan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari penyertaan modal daerah sudah terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau mencapai 50,00 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P RKPK Tahun 2024. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.207
 Capaian Pembiayaan Tahun 2024 terhadap
 Target P RKPK Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	Target P -RKPK	REALISASI 2024 Semeter 2	Capaian terhadap P RKPK (%)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	35.029.821.414	(1.000.000.000,00)	(0,03)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.029.821.414	0,00	0%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.029.821.414	0,00	0%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50%
	PEMBIAYAAN NETTO		(1.000.000.000,00)	0%

Sumber : RKPK Tahun 2024 dan LRA Tahun 2024

2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

2.2.3.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap semester berdasarkan realisasi DPA SKPK. Evaluasi Hasil RKPK

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
- b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat pada tabel 4.4 yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1		Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 2	
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
45,5% ≤ 50%	Sangat tinggi	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
38% ≤ 45%	Tinggi	76% ≤ 90%	Tinggi
33% ≤ 37,5%	Sedang	66% ≤ 75%	Sedang
25,5% ≤ 32,5%	Rendah	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 25%	Sangat Rendah	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus Untuk Evaluasi hingga semester 1, nilai capaian kinerja K dan Rp. Harus dikalikan 2 terlebih dahulu sebelum melihat skala penilaian kinerja.

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.

2.2.3.2. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, capaian realisasi anggaran terhadap target RKPK Tahun 2024 sampai dengan semester 2 dengan kategori sedang (S) sebesar 71,0 persen, hal ini disebabkan ada beberapa perangkat daerah yang tidak menyampaikan hasil evaluasi dan masih banyaknya kegiatan yang terdapat dalam Renstra dan RKPK namun tidak dilaksanakan sehingga untuk rata-ratanya masih sedang.

Bila dilihat dari capaian realisasi anggaran RPK Tahun 2023-2026 sampai dengan tahun 2024 semester 2 dengan kategori sedang (S) sebesar 67,6 persen, mengingat periode RPK telah masuk pada tahun kedua yaitu Tahun 2024 yang berarti sudah di pertengahan periode RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Untuk capaian realisasi terhadap kinerja belum dapat di narasikan karena satuan dan target masih banyak terjadi perbedaan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan beberapa perangkat daerah masih belum menyampaikan kondisi capaian kinerja. Berikut ini disajikan hasil evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2024 semester 2 terhadap target

RKPK dan Realisasi RPK Lhokseumawe sampai Tahun 2024 semsester 2 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.208
Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Target RKPK Tahun 2024 dan Realisasi Anggaran terhadap RPK Tahun 2023-2026

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPK S/D Tahun 2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp
1	1-1	2-22	0-0	02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK)	19,6 %	62,8 %	39,9 %	313 ,5%
						SR	R	SR	ST
2	1-1	0-0	0-0	01	DINAS KESEHATAN (DINKES)	100, 0%	100, 0%	48,0 %	29, 9%
						ST	ST	SR	SR
3	1-3	1-4	0-0	10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR)	33,9 %	31,0 %	100, 0%	12, 9%
						SR	SR	ST	SR
4	1-5	0-0	0-0	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	100, 0%	100, 0%	100, 0%	100 ,0%
						ST	ST	ST	ST
5	1-5	0-0	0-0	06	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (SATPOLPP)	9,8 %	30,2 %	66,3 %	33, 7%
						SR	SR	S	SR
6	1-6	0-0	0-0	1	DINAS SOSIAL (DINSOS)	96,6 %	73,6 %	34,2 %	100 ,0%
						ST	S	SR	ST
7	2-8	2-14	0-0	02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)	49,5 %	57,7 %	100, 0%	19, 6%
						SR	R	ST	SR
8	2-10	0-0	0-0	1	DINAS PERTANAHAN	10,4 %	47,3 %	11,3 %	21, 9%
						SR	SR	SR	SR

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPK S/D Tahun 2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp
9	2-11	0-0	0-0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)	68,3 %	100,0 %	100,0 %	43,5 %
						S	ST	SR	SR
10	2-12	0-0	0-0	03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	76,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
						T	ST	ST	ST
11	2-13	0-0	0-0	02	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG (DPMG)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
						ST	ST	ST	ST
12	2-15	0-0	0-0	1	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	14,8 %	36,1 %	12,1 %	32,8 %
						SR	SR	SR	SR
13	2-16	2-21	0-0	3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO)	65,3 %	100,0 %	46,3 %	100,0 %
						S	ST	SR	ST
14	2-18	2-7	0-0	23	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP NAKER)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	87,5 %
						ST	ST	ST	T
15	2-19	3-26	0-0	2	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR)	4,6 %	51,8 %	6,0 %	11,6 %
						SR	R	SR	SR
16	2-23	2-24	0-0	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PUSIP)	13,6 %	7,4 %	15,4 %	10,5 %
						SR	SR	SR	SR
17	3-25	3-27	2-9	2	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3)	50,2 %	100,0 %	27,0 %	78,9 %
						R	ST	SR	T

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPK S/D Tahun 2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp
18	3-31	3-30	2-17	12	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISPRINDAGKOP)	100,0%	74,5%	730,1%	40,2%
						ST	S	ST	SR
19	4-1	0-0	0-0	1	SETDAKO	100,0%	100,0%	66,0%	61,8%
						ST	ST	S	R
20	4-2	0-0	0-0	2	SEKWAN	43,6%	25,5%	60,1%	29,6%
						SR	SR	R	SR
21	5-1	5-5	0-0	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	96,6%	31,4%	85,6%	37,0%
						ST	SR	T	SR
22	5-2	0-0	0-0	5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)	85,9%	95,3%	41,2%	38,3%
						T	ST	SR	SR
23	5-3	5-4	0-0	02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	100,0%	91,6%	62,9%	100,0%
						ST	ST	R	ST
24	6-1	0-0	0-0	1	INSPEKTORAT	59,8%	28,5%	100,0%	36,1%
						R	SR	ST	SR
25	7-1	0-0	0-0	1	KECAMATAN BANDA SAKTI	100,0%	100,0%	61,9%	73,5%
						ST	ST	R	S
26	7-1	0-0	0-0	2	KECAMATAN BLANG MANGAT	63,9%	100,0%	36,4%	100,0%
						R	ST	SR	ST
27	7-1	0-0	0-0	3	KECAMATAN MUARA SATU	55,5%	100,0%	100,0%	64,0%
						R	ST	ST	R
28	7-1	0-0	0-0	4	KECAMATAN MUARA DUA	36,6%	100,0%	100,0%	100,0%
						SR	ST	ST	ST

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPK S/D Tahun 2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp
29	8-1	0-0	0-0	1	BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL)	45,8 %	16,8 %	1,9 %	1,3 %
						SR	SR	SR	SR
30	9-7	0-0	0-0	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD)	17,3 %	88,1 %	100,0 %	100,0 %
						SR	T	ST	ST
31	9-8	0-0	0-0	2	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)	87,0 %	100,0 %	71,8 %	100,0 %
						T	ST	S	ST
32	9-9	0-0	0-0	3	SEKRETARIAT BAITUL MAL (BM)	17,3 %	100,0 %	27,8 %	68,7 %
						SR	ST	SR	S
33	9-10	0-0	0-0	4	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	34,9 %	18,7 %	40,8 %	53,1 %
						SR	SR	SR	R
34	9-11	0-0	0-0	5	SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)	100,0 %	46,1 %	100,0 %	100,0 %
						ST	SR	ST	ST
					Total Sub Kegiatan	60,6 %	71,0 %	82,1 %	67,6 %
						R	S	T	S

Sumber : Data Diolah

2.2.3.3. Tantangan dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan keuangan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dan APBK Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh OPD, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja maupun anggaran, antara lain :

- Masih banyak OPD yang tidak konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMK, RKPK dan APBK sehingga muncul program atau kegiatan di luar dokumen perencanaan tersebut.
- Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan

tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali gagal dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat.

3. Saat penyusunan RKPK Tahun 2024 masih mengakomodir seluruh tanpa memikirkan kebutuhan dan program kegiatan yang lebih prioritas sehingga pada saat penyesuaian kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUAPPAS sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
4. Keterbatasan SDM personal dan sering berganti-ganti SDM yang mengampu perencanaan.
5. Masih didapati satuan indikator program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan pada data evaluasi RKPK yang belum konsisten,

2.2.3.4. Konsistensi Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024

Konsisten ini sangat penting dilakukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan penerapan perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran. Dokumen perencanaan yang baik adalah perencanaan yang telah mengakomodir sub kegiatan program yang nantinya akan dilanjutkan ke dalam proses penganggaran. Oleh sebab itu maka penelaahan pada tahap perencanaan dilakukan tidak hanya pada output dan outcome program kegiatan, namun melihat apakah isi rincian belanjanya telah selaras dengan upaya pencapaian output dan outcome dimaksud.

Untuk kesesuaian/konsistensi dokumen perencanaan RPK, RKPK dan dokumen penganggaran DPA Tahun 2024 masih terjadi inkonsistensi, Sebanyak 1588 sub kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan namun hanya 70,5 persen atau 1120 sub kegiatan yang dilaksanakan pada dokumen perencanaan dan terdapat 26,0 persen atau 413 sub kegiatan direncanakan dalam Dokumen Perencanaan tidak dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran serta terdapat 3,5 persen atau 55 sub kegiatan sub kegiatan tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan, baik dalam RPK dan RKPK namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran. Inkonsistensi ini menyebabkan capaian rata-rata setiap OPD menjadi rendah, karena terlalu banyaknya kegiatan yang tidak di laksanakan dalam dokumen perencanaan.

Selain inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, inkonsistensi terjadi juga pada satuan dalam indikator kinerja yang masih di temukan masih tidak seragam dalam satu sub kegiatan, sehingga capaian realisasi untuk kinerja masih sangat sulit untuk di hitung, berikut ini disajikan kesesuaian dokumen anggaran pada tabel berikut.

Tabel 2.209
Konsistensi/Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Tahun 2024

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan dilaksanakan dalam dokumen Anggaran	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan namun tidak dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran	tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran
1	1-1	2-22	0-0	02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK)	61	29	18
2	1-1	0-0	0-0	01	DINAS KESEHATAN (DINKES)	66	5	0
3	1-3	1-4	0-0	10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR)	33	2	3
4	1-5	0-0	0-0	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	30	1	0
5	1-5	0-0	0-0	06	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (SATPOLPP)	28	3	0
6	1-6	0-0	0-0	1	DINAS SOSIAL (DINSOS)	35	0	0
7	2-8	2-14	0-0	02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)	49	3	8
8	2-10	0-0	0-0	1	DINAS PERTANAHAN	21	3	0
9	2-11	0-0	0-0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)	19	2	3
10	2-12	0-0	0-0	03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	33	3	1
11	2-13	0-0	0-0	02	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG (DPMG)	34	1	0
12	2-15	0-0	0-0	1	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	26	1	4
13	2-16	2-21	0-0	3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO)	22	0	5
14	2-18	2-7	0-0	23	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA	30	0	1

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan dilaksanakan dalam dokumen Anggaran	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan namun tidak dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran	tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran
					KERJA (DPMTSP NAKER)			
15	2-19	3-26	0-0	2	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR)	22	115	2
16	2-23	2-24	0-0	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PUSIP)	25	46	0
17	3-25	3-27	2-9	2	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3)	41	2	4
18	3-31	3-30	2-17	12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISPRINDAGKOP)	45	44	0
19	4-1	0-0	0-0	1	SETDAKO	45	3	1
20	4-2	0-0	0-0	2	SEKWAN	57	29	0
21	5-1	5-5	0-0	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	51	33	0
22	5-2	0-0	0-0	5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)	60	33	0
23	5-3	5-4	0-0	02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	35	1	0
24	6-1	0-0	0-0	1	INSPEKTORAT	31	0	2
25	7-1	0-0	0-0	1	KECAMATAN BANDA SAKTI	22	0	0
26	7-1	0-0	0-0	2	KECAMATAN BLANG MANGAT	23	0	0
27	7-1	0-0	0-0	3	KECAMATAN MUARA SATU	22	1	0
28	7-1	0-0	0-0	4	KECAMATAN MUARA DUA	20	27	0
29	8-1	0-0	0-0	1	BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL)	26	10	1
30	9-7	0-0	0-0	1	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD)	37	8	1

No	Kode Organisasi				Organisasi Perangkat Daerah	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan dilaksanakan dalam dokumen Anggaran	direncanakan dalam Dokumen Perencanaan namun tidak dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran	tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran
31	9-8	0-0	0-0	2	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)	16	1	0
32	9-9	0-0	0-0	3	SEKRETARIAT BAITUL MAL (BM)	25	1	0
33	9-10	0-0	0-0	4	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	16	2	1
34	9-11	0-0	0-0	5	SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)	14	4	0
					Total Sub Kegiatan	1120	413	55
						1588		

Sumber : Data Diolah

Dari 55 sub kegiatan yang tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun di laksanakan dalam dokumen anggaran diantaranya terdapat pada 15 Perangkat daerah, rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Sub Kegiatan tidak direncanakan dalam dokumen perencanaan namun dilaksanakan dalam Dokumen Anggaran

No	Perangkat Daerah/ Kode Rekening					Sub Kegiatan	Keterangan	
							Tidak ada dalam RPK/ Renstra	Tidak ada dalam RKPK
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK)							
	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		√
	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		√
	1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		√
	1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan	√	
	1	01	02	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	√	√
	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		√
	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		√

No	Perangkat Daerah/ Kode Rekening					Sub Kegiatan	Keterangan	
							Tidak ada dalam RPK/ Renstra	Tidak ada dalam RKPK
	1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		√
	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		√
	1	01	02	2.02	38	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan	√	
	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		√
	1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan	√	
	1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan		√
	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		√
	1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan	√	
	1	01	02	2.04	36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	√	√
	1	01	03	2.01	07	Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	√	√
	2	22	05	2.01	01	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu (DAK)	√	√
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR)							
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		√
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	√	√
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		√
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)							
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	√	√
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	√	√

No	Perangkat Daerah/ Kode Rekening					Sub Kegiatan	Keterangan	
							Tidak ada dalam RPK/ Renstra	Tidak ada dalam RKPK
	2	14	03	2.0 1	000 8	Pengendalian Program KKBPK		√
	2	14	03	2.0 1	001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	√	√
	2	14	03	2.0 3	000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		√
	2	14	03	2.0 4	000 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	√	√
	2	14	04	2.0 1	001 6	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	√	√
	2	14	04	2.0 1	001 8	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	√	√
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)							
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√
	1	06	02	2,0 1	06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	√	
	2	11	11	2,0 1	017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	√	
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)							
	2	12	03	2.0 3	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		√
6	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)							
	2	15	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		√

No	Perangkat Daerah/ Kode Rekening					Sub Kegiatan	Keterangan	
							Tidak ada dalam RPK/ Renstra	Tidak ada dalam RKPK
	2	15	02	2,0 6	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	√	
	2	15	02	2,0 6	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Linta	√	
	2	15	02	2,0 8	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		√
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO)							
	2	16	01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√
	2	16	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√
	2	16	02	2.0 1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	√	√
	2	16	02	2.0 1	07	Layanan Hubungan Media		√
	2	21	02	2.0 1	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√
8	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP NAKER)							
	2	18	05	2,0 1	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	√	√
9	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR)							
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	√	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	√	
10	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3)							

No	Perangkat Daerah/ Kode Rekening					Sub Kegiatan	Keterangan	
							Tidak ada dalam RPK/ Renstra	Tidak ada dalam RKPK
	3	09	03	2.0 2	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	√	
	4	09	03	2.0 3	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pook Strategis	√	
	3	27	02	2.0 2	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	√	√
	3	27	04	2.0 2	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis		√
11	SETDAKO							
	4	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√
12	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		√
	6	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√
13	BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL)							
						Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	√	√
14	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD)							
	9	01	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		√
15	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH							
	2	22	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		√

Sumber : Data diolah

Dari Hasil evaluasi yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat lebih rinci pada tabel Hasil Evaluasi RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 untuk seluruh Perangkat Daerah.

Tabel 2.211
Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2024 Semseter 2
LHOKSEUMAWÉ

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15																
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			710.436.983.246	150.184.624.379	184.128.117.164	83.575.164.989	-	83.575.164.989		233.759.789.368	0%	33%	PK														
			URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			708.374.949.929	148.260.971.998	183.178.117.164	83.345.304.548	-																				
Meningkatnya kualitas pendidikan	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase layanan administrasi pemerintah daerah	Persen	100	531.936.352.911	-	120.995.312.328	100	125.331.239.629	80.142.665.448	100	-	100	80.142.665.448	100%	64%		100	201.137.977.776	100%	38%	PK				
			1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	28	200.000.000	-	96.383.350	7	126.000.000	4	131.147.050	0	-	4	131.147.050	57%	104%		4	227.530.400	14%	114%	PK	
			1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	200.000.000	10	96.383.350	10	126.000.000	5	131.147.050	0	-	5	131.147.050	50%	104%	>	15	227.530.400	38%	114%	PK
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	104,08%					37,50%	113,77%	PK				
Predikat Kinerja																		SR	ST					SR	ST	PK				
			1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	48	495.906.499.343		113.175.904.394	12 OB	118.578.377.703	6	79.342.022.304	0	-	6	79.342.022.304	50%	67%		6	192.517.926.698	13%	39%	PK	
			1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	5055	495.906.499.343	1.115	113.175.904.394	1072 OB	118.578.377.703	536	79.342.022.304	0	-	536	79.342.022.304	50%	67%	<	1.651	192.517.926.698	33%	39%	PK
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	66,91%					32,66%	38,82%	PK				
Predikat Kinerja																		SR	S					SR	SR	PK				
			1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Dokumen	28	140.000.000	-	7	5.000.000		-		-	0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	20.000.000		4	5.000.000		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
			1	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	16	20.000.000		0	-		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	PK				
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	PK				
			1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan adm umum perangkat daerah	Bulan	48	790.000.000		144.915.243	12	95.964.090	6	74.371.908	0	-	6	74.371.908	50%	77%		6	219.287.151	13%	28%	PK	
			1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	200.000.000	2	32.951.804	3	25.964.090	2	16.975.100		-	2	16.975.100	67%	65%	<	4	49.926.904	25%	25%	PK

No	Sasaran Daerah					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
								Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <		K	Rp	K	Rp													
																K	Rp	K	Rp																											
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15																		
		1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	110.000.000	3	13.966.000	7	20.000.000	3	8.020.000	-	3	8.020.000	43%	40%	<	6	21.986.000	38%	20%	PK																		
		1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	320	480.000.000	40	97.997.439	80	50.000.000	40	49.376.808	-	40	49.376.808	50%	99%	<	80	147.374.247	25%	31%	PK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				53,17%	68,08%																				29,17%	25,22%	PK			
Predikat Kinerja																				R	S																					SR	SR	PK		
		1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	36	705.000.000		149.393.593	9	386.332.000		68.400.000	-	0	68.400.000	0%	18%		-	217.793.593	0%	31%	PK																		
		1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	600.000.000	3	149.393.593	4	50.000.000		-	-	0	-	0%	0%	<	3	149.393.593	25%	25%	PK																		
		1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	40	105.000.000	0	-	13	336.332.000	6	68.400.000	0	6	68.400.000	46%	20%	<	6	68.400.000	15%	65%	PK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				23,08%	10,17%																					20,00%	45,02%	PK		
Predikat Kinerja																				SR	SR																						SR	SR	PK	
		1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	33.634.853.568	-	7.345.482.748	12	6.060.565.836	6	476.544.936	0	6	476.544.936	50%	8%		6	7.822.027.684	13%	23%	PK																		
		1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	14.000.000	4	2.000.000	5	11.035.910	2	3.500.000		2	3.500.000	40%	32%	<	6	5.500.000	38%	39%	PK																		
		1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.000.000.000	3	130.663.548	7	127.000.000	3	75.644.936		3	75.644.936	43%	60%	<	6	206.308.484	50%	21%	PK																		
		1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20	32.620.853.568	5	7.212.819.200	5	5.922.529.926	2	397.400.000		2	397.400.000	40%	7%	<	7	7.610.219.200	35%	23%	PK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				40,95%	32,66%																					40,83%	27,75%	PK		
Predikat Kinerja																				SR	SR																						SR	SR	PK	
		1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jenis	20	560.000.000	-	83.233.000	5	79.000.000		50.179.250	-	0	50.179.250	0%	64%		-	133.412.250	0%	24%	PK																		
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	8	100.000.000	2	33.300.000	3	33.300.000	3	17.709.250		3	17.709.250	100%	53%	<	5	51.009.250	63%	51%	PK																		
		1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	20	60.000.000	5	25.700.000	3	25.700.000	2	16.700.000		2	16.700.000	67%	65%	<	7	42.400.000	35%	71%	PK																		
		1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	200.000.000	3	5.000.000	1	5.000.000	1	5000000		1	5.000.000	100%	100%	=	4	10.000.000	33%	5%	PK																		
		1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	200	200.000.000	50	19.233.000	3	15.000.000	2	10.770.000		2	10.770.000	67%	72%	<	52	30.003.000	26%	15%	PK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				83,33%	72,49%																						39,21%	35,42%	PK	
Predikat Kinerja																				T	S																						SR	SR	PK	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				42,93%	50,63%																							28,48%	40,86%	PK
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	R																							SR	SR	PK
Meningkatnya kualitas pendidikan	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	Persen	99,00	173.754.986.400		27.217.159.670	98,4	57.596.684.335		3.106.955.300	99,61	-	99,61	3.106.955.300	101%	5%		100	30.324.114.970	0%	17%	PK																	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
		1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar yang dikelola	Unit	80	93.050.000.000		13.813.672.179	20	31.030.254.637		1.794.954.400		0 0	1.794.954.400	0%	6%	-	15.608.626.579	0%	17%	PK				
		1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	2.050.000.000	2	243.089.000	12	5.405.004.837		-		0 0	-	0%	0%	<	2	243.089.000	25%	12%	PK			
		1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	8	2.000.000.000	2	297.503.133	2	840.000.000		-		0 0	-	0%	0%	<	2	297.503.133	25%	15%	PK			
		1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	8	1.000.000.000	0	-	0	-		0		0 0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
		1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	8	2.000.000.000	2	209.502.425	3	263.918.000		-		0 0	-	0%	0%	<	2	209.502.425	25%	10%	PK			
		1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8	2.000.000.000	2	1.332.654.736	3	462.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	2	1.332.654.736	25%	67%	PK			
		1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	20	2.000.000.000	5	808.105.035	5	2.707.844.800		0		0	0	-	0%	0%	<	5	808.105.035	25%	40%	PK		
		1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	1.000.000.000	0	-	2	370.972.000		0		0 0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
		1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	1.000.000.000	0	-	0	-		0		0 0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
		1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	1.000.000.000	5	253.229.000	0	406.702.000		0		0 0	-	0%	0%	<	5	253.229.000	25%	25%	PK			
		1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	20	1.000.000.000	5	112.981.275	5	213.313.000		0		0 0	-	0%	0%	<	5	112.981.275	25%	11%	PK			
		1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	400	1.000.000.000	100	898.771.400	100	650.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	100	898.771.400	25%	90%	PK			
		1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	200	2.000.000.000	50	670.916.000	50	500.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	50	670.916.000	25%	34%	PK			
		1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	440	200.000.000	110	15.300.000	110	15.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	110	15.300.000	25%	8%	PK			
		1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400	2.000.000.000	100	116.036.800	100	250.000.000	50	54054400		50	54.054.400	50%	22%	<	150	170.091.200	38%	9%	PK			
		1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	4000	2.000.000.000	0	-	110	150.000.000	50	1.740.900.000		50	1.740.900.000	45%	1161%	>	50	1.740.900.000	1%	87%	PK			
		1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1600	4.000.000.000	400	516.109.562	635	600.000.000		-		0 0	-	0%	0%	<	400	516.109.562	25%	13%	PK			
		1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	440	600.000.000	110	528.159.416	110	500.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	110	528.159.416	25%	88%	PK			
		1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	440	60.000.000.000	110	6.941.255.092	110	17.640.500.000		0		0 0	-	0%	0%	<	110	6.941.255.092	25%	12%	PK			
		1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	600	600.000.000	150	5.300.000	150	5.000.000		0		0 0	-	0%	0%	<	150	5.300.000	25%	1%	PK			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RRPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		101020131	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	20	5.600.000.000	5	864.759.305	0	-	0	0	0	0	-	0%	0%	<	5	864.759.305	25%	15%	PK			
		101020138	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0			110	50.000.000		0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK					
		101020147	Pembangunan Ruang Kelas Baru								0						<										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														4,55%	56,30%				19,70%	25,54%	PK						
Predikat Kinerja														SR	R				SR	SR	PK						
		1010202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan smp yang dikelola	Unit	80	58.204.986.400		12.164.420.601	20	20.655.646.698	5	1.039.099.400	5	-	10	1.039.099.400	50%	5%		10	13.203.520.001	13%	23%	PK		
		101020202	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	2.440.000.000	0	-	2	735.000.000				0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
		101020203	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	8	2.000.000.000	2	553.234.920	3	601.090.000				0	-	0%	0%	<	2	553.234.920	25%	28%	PK			
		101020204	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	20	2.000.000.000	5	533.684.950	2	559.674.000				0	-	0%	0%	<	5	533.684.950	25%	27%	PK			
		101020206	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2.484.986.400	1	2.026.824.700	3	2.651.850.000				0	-	0%	0%	<	1	2.026.824.700	25%	82%	PK			
		101020209	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	1.000.000.000	0	-	2	549.884.000				0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
		101020212	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	4.000.000.000	5	345.272.779	5	1.105.036.000		0		0	0	-	0%	0%	<	5	345.272.779	25%	9%	PK		
		101020214	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	20	2.000.000.000	5	2.202.849.490	5	3.815.006.698		0		0	0	-	0%	0%	<	5	2.202.849.490	25%	110%	PK		
		101020216	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000.000	2	49.545.900	2	99.984.000		0		0	0	-	0%	0%	<	2	49.545.900	25%	12%	PK		
		101020217	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	800.000.000	2	668.910.700			0	0	0	-	0%	0%	<	2	668.910.700	25%	84%	PK				
		101020218	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	800.000.000	2	745.789.845	2	787.238.000		0		0	0	-	0%	0%	<	2	745.789.845	25%	93%	PK		
		101020224	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	8	800.000.000	2	112.870.650			0		0	0	-	0%	0%	<	2	112.870.650	25%	14%	PK			
		101020225	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	600	1.000.000.000	150	700.013.625	150	500.000.000		-		0	0	-	0%	0%	<	150	700.013.625	25%	70%	PK		
		101020226	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	400	400.000.000	0	-					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
		101020227	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	400	400.000.000	0	-					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
		101020228	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	600	400.000.000	150	133.649.000					0	-	0%	0%	<	150	133.649.000	25%	33%	PK				
		101020229	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	400.000.000	0	-					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
		101020230	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	400.000.000	0	-					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
		101020231	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4	400.000.000	0	-					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		101022.0232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	400.000.000	0	-			0	98.936.500		0	98.936.500	0%	0%	<	-	98.936.500	0%	0%	PK			
		101022.0233	Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	80.000	4.000.000.000	0	-			0	98.936.500		0	98.936.500	0%	0%	<	-	98.936.500	0%	2%	PK			
		101022.0234	Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2000	400.000.000	0	-			0			0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK			
		101022.0235	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1600	1.800.000.000	0	-			0			0	0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK		
		101022.0236	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	12000	200.000.000	3.000	20.300.000	3.000	10.000.000				0	0		0%	0%	<	3.000	20.300.000	25%	10%	PK		
		101022.0238	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400	2.000.000.000	100	513.141.142	100	500.000.000	50	233.462.900		50	233.462.900	50%	47%	<	150	746.604.042	38%	37%	PK			
		101022.0239	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	2400	200.000.000	0	-	40	50.000.000	20	697.200.000		20	697.200.000	50%	1394%	>	20	697.200.000	1%	349%	PK			
		101022.0240	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Keahlian	Orang	800	2.000.000.000	0	-	50	50.000.000				0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK			
		101022.0241	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	100	200.000.000	25	30.500.000	25	15.000.000	12	9.500.000		12	9.500.000	48%	63%	<	37	40.000.000	37%	20%	PK			
		101022.0242	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	100	24.000.000.000	25	3.473.120.000	25	8.480.900.000		-		0	0		0%	0%	<	25	3.473.120.000	25%	14%	PK		
		101022.0243	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	240	80.000.000	60	5.300.000	60	5.000.000		-		0	0		0%	0%	<	60	5.300.000	25%	7%	PK		
		101022.0245	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16	800.000.000	4	49.412.900	2	99.984.000				0		0%	0%	<	4	49.412.900	25%	6%	PK			
		101022.0238	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan		Doumen	15				15	40.000.000				0	0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK		
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				4,77%	48,53%				14,53%	32,49%	PK		
														Predikat Kinerja				SR	SR				SR	SR	PK		
		101022.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan PAUD yang dikelola	Unit	40	16.080.000.000		523.492.580	10	4.816.243.000		225.501.500			-	0	225.501.500	0%	5%		-	748.994.080	0%	5%	PK	
		101022.0302	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	8	2.200.000.000	2	450.036.300	6	1.413.293.000		0		0	0		0%	0%	<	2	450.036.300	25%	20%	PK		
		101022.0303	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	800.000.000	0	-	1	315.000.000				0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK			
		101022.0311	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	800.000.000	0	-	100	50.000.000				0		0%	0%	<	-		0%	0%	PK			
		101022.0312	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	1.000	2.000.000.000	0	-	-	-		1	98.401.500		1	98.401.500	0%	0%	<	1	98.401.500	100%	5%	PK		

No	Sasaran Daerah		Kode		Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp			
															K	Rp	K	Rp															
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15					
			1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	300	1.200.000.000	0	-	75	50.000.000	30	116.600.000		30	116.600.000	40%	233%	>	30	116.600.000	10%	10%	PK				
			1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	400	1.000.000.000	0	0	50	50.000.000	0	0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
			1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	304	80.000.000	76	73456280	76	50.000.000	35	10.500.000		35	10.500.000	46%	21%	<	111	83.956.280	37%	105%	PK				
			1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	608	8.000.000.000	0	0	132	2.862.950.000		0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
			1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	0				154	25.000.000		0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										9,56%	28,24%				19,06%	15,56%	PK
Predikat Kinerja																										SR	SR				SR	SR	PK
			1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal/kesetaraan yang dikelola	Unit	20	6.420.000.000		715.574.310	5	1.094.540.000		47.400.000		-	0	47.400.000	0%	4%		-	762.974.310	0%	12%	PK			
			1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	4	4.000.000.000	-	-	1	450.000.000		-		-	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
			1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	1.000.000.000	0	-	2	125.000.000			0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
			1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	900	1.000.000.000	225	199.996.810			0			-	0	-	0%	0%	<	225	199.996.810	25%	20%	PK			
			1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	8	80.000.000	0	-	15	10.000.000	7	47.400.000		-	7	47.400.000	47%	474%	>	7	47.400.000	88%	59%	PK			
			1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	80	120.000.000	0	-	15	25.000.000		0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
			1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	20	60.000.000	5	515.577.500			0			-	0	-	0%	0%	<	5	515.577.500	25%	859%	PK			
			1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	8	80.000.000	0	-	3	422.700.000		0		-	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
			1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang	80	80.000.000	0	-	20	51.840.000		0		0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			
			1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	0				76	10.000.000		0		0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK			

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
		1042.01	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Laporan	16	120.000.000	4	48.500.000	2	15.000.000	-	-	0	-	0%	0%	<	4	48.500.000	25%	40%	PK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					12,50%	20,21%	PK			
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	SR	PK			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																0,00%	0,00%					SR	SR	PK			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																SR	SR					SR	SR	PK			
Meningkatnya kualitas pendidikan	10105		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memperoleh izin	Persen	100	240.427.855	-	100	30.000.000	100	27.140.000	0	-	100	27.140.000	100%	90%		100	27.140.000	100%	11%	PK			
	101052.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan non formal	Dokumen	8	240.427.855	-	2	30.000.000		27.140.000	-	0	27.140.000	0%	90%		-	27.140.000	0%	11%	PK				
	101052.0201		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	16	120.427.855		48	15.000.000	24	13.700.000		24	13.700.000	50%	91%	<	24	13.700.000	150%	11%	PK				
	101052.0202		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Dokumen	16	120.000.000		48	15.000.000	24	13.440.000		24	13.440.000	50%	90%	<	24	13.440.000	150%	11%	PK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50,00%	90,47%					150,00%	11,29%	PK			
Predikat Kinerja																SR	ST					SR	SR	PK			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																50,00%	90,47%					SR	ST	PK			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																SR	ST					SR	SR	PK			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (URUSAN) (%)																20,45%	40,67%					SR	SR	PK			
PREDIKAT KINERJA (URUSAN)																SR	SR					SR	SR	PK			
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN				2.062.033.317		1.923.652.381		950.000.000		229.860.441	0	-	0	229.860.441	0%	24%	-	2.153.512.822	0%	104%	PK			
Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	22202		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	76.92	1.861.782.728	80	1.923.652.381	61,54	900.000.000	0	68.543.800	0	-	0	68.543.800	0%	8%	80	1.992.196.181	0%	107%	PK			
	222021.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek kebudayaan yang dikelola	Objek	16	61.782.728	3	948.752.381	4	700.000.000		0	0	0	-	0%	0%	3	948.752.381	19%	1536%	PK				
	222021.0101		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	12	61.782.728	3	948.752.381	1	700.000.000		0	-	0	-	0%	0%	<	3	948.752.381	25%	1536%	PK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					25,00%	1535,63%	PK			
Predikat Kinerja																SR	SR					SR	ST	PK			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																0,00%	0,00%					SR	SR	PK			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																SR	SR					SR	ST	PK			
	222021.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek kesenian tradisional yang dilestarikan	Objek	16	1.800.000.000		974.900.000	4	200.000.000	2	68.543.800	0	-	2	68.543.800	50%	34%	2	1.043.443.800	13%	58%	PK			
	222021.0201		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	52	1.800.000.000	13	974.900.000	200	200.000.000	100	68.543.800	0	-	100	68.543.800	50%	34%	<	113	1.043.443.800	217%	58%	PK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50,00%	34,27%					217,31%	57,97%	PK			
Predikat Kinerja																SR	SR					ST	R	PK			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																25,00%	17,14%					SR	SR	PK			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																SR	SR					ST	ST	PK			
Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	22203		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen	6.90	200.250.589	-	3,45	50.000.000	6,25	161.316.641	0	-	6,25	161.316.641	181%	323%	6	161.316.641	0%	81%	PK				
	222032.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek kesenian daerah yang memperoleh pembinaan	objek	8	200.250.589	-	2	50.000.000		161.316.641	1	-	1	161.316.641	50%	323%	1	161.316.641	13%	81%	PK				

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		22032.0101	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	400	200.250.589		50	50.000.000	25	161.316.641		25	161.316.641	50%	323%	>	25	161.316.641	6%	81%	PK				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	322,63%				6,25%	80,56%	PK			
															Predikat Kinerja		SR	ST				SR	T	PK			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		50,00%	322,63%				6,25%	80,56%	PK			
															PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	ST				SR	T	PK			
Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat	2	2205		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				-			0	-	0	-	0	0%	0%		-	-	0%	0%	PK				
	2	22052.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					-			0	-	0	-	0	0%	0%		-	-	0%	0%	PK				
	2	22052.0101	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu (DAK)			0						-		0	0	0%	0%	<	-	-	0%	0%	PK				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	PK			
															Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR	PK			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	PK			
															PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	SR				SR	SR	PK			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)		18,75%	84,94%				38,10%	603,25%	PK			
															PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)		SR	T				SR	ST	PK			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		19,60%	62,81%				39,91%	313,47%	PK			
															PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		SR	R				SR	ST	PK			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		DINAS KESEHATAN		368.815.548.408	29.833.065.997	117.408.748.502	42.968.491.842	55.934.607.437	98.903.099.279	128.736.165.276		Dinkes														
		1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	252.605.571.641	100 %	64.063.011.561	40.098.174.833	0	31.675.639.122	0	71.773.813.955	0%	112%	-	71.773.813.955	0,00%	28,41%	Dinkes						
		1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis	1	100.000.000	3 Dok	10.000.000	2.420.000	0	7.000.000	0	9.420.000	0%	94%	-	9.420.000	0,00%	9,42%	Dinkes						
		1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	100.000.000	10	17.405.600	1 Dok	10.000.000	-	2.420.000	1	7.000.000	1	9.420.000	100%	94%	<	11	26.825.600	27,50%	26,83%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	94,20%			27,50%	26,83%	Dinkes					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Dinkes					
		1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	4	220.335.757.641	12 bln	61.789.791.000	2	39.256.524.134	2	30.399.048.358	4	69.655.572.492	33%	113%	4	69.655.572.492	100,00%	31,61%	Dinkes					
		1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	44400	220.335.757.641	11.100	60.925.124.338	11100 OB	61.789.791.000	5.550	39.256.524.134	5.550	30.399.048.358	11100	69.655.572.492	100%	113%	>	22.200	130.580.696.830	50,00%	59,26%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	112,73%			50,00%	59,26%	Dinkes					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	R	Dinkes					
		1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis	3	305.000.000	12 bln	35.000.000	0	-	0	24.548.875	0	24.548.875	0%	70%	-	24.548.875	0,00%	8,05%	Dinkes					
		1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	40	100.000.000	10 Dok	5.000.000	-	-	10	4.549.450	10	4.549.450	100%	91%	<	10	4.549.450	25,00%	4,55%	Dinkes				
		1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	120	205.000.000	30 org	30.000.000	-	-	30	19.999.425	30	19.999.425	100%	67%	<	30	19.999.425	25,00%	9,76%	Dinkes				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	78,83%			25,00%	7,15%	Dinkes					
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR	Dinkes					
		1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	5	2.090.000.000	12 bln	307.280.000	2	46.947.626	3	302.538.856	5	349.486.482	42%	114%	5	349.486.482	100,00%	16,72%	Dinkes					
		1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.000.000.000	3	179880715	4 Pkt	180.000.000	-	-	4	144.666.500	4	144.666.500	100%	80%	<	7	324.547.215	58,33%	32,45%	Dinkes		
		1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	1	50000000	1 Pkt	25.000.000	-	-	1	24.840.000	1	24.840.000	100%	99%	<	2	74.840.000	50,00%	37,42%	Dinkes		
		1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	400.000.000	2	83886500	2 Pkt	50.000.000	-	-	2	49.864.800	2	49.864.800	100%	100%	<	4	133.751.300	50,00%	33,44%	Dinkes		
		1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	8	10.000.000	2	2280000	2 Dok	2.280.000	-	570.000	2	1.710.000	2	2.280.000	100%	100%	=	4	4.560.000	50,00%	45,60%	Dinkes		
		1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	480.000.000	40	97342508	40 Lap	50.000.000	12	46.377.626	22	81.457.556	34	127.835.182	85%	256%	>	74	225.177.690	46,25%	46,91%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																97,00%	127,03%			50,92%	39,16%	Dinkes					
Predikat Kinerja																ST	ST			R	SR	Dinkes					
		1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	26.367.504.000	12 bln	1.001.640.561	1	494.768.073	2	598.745.733	3	1.093.513.806	25%	109%		1.093.513.806	0,00%	4,15%	Dinkes					
		1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	120	6.000.000	30	1200000	30 Lap	1.500.000	10	-	20	1.443.500	30	1.443.500	100%	96%	<	60	2.643.500	50,00%	44,06%	Dinkes		
		1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1000	2.600.000.000	250	599150224	250 Lap	551.400.001	100	341.768.073	150	353.900.473	250	695.668.546	100%	126%	>	500	1.294.818.770	50,00%	49,80%	Dinkes		
		1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35000	23.761.504.000	5.000	448220370	10000 Lap	448.740.560	4.000	153.000.000	6000	243.401.760	10000	396.401.760	100%	88%	<	15.000	844.622.130	42,86%	3,55%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	103,58%			47,62%	32,47%	Dinkes					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Dinkes					
		1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	3.407.310.000	12 bln	919.300.000	2	297.515.000	2	343.757.300	4	641.272.300	33%	70%	4	641.272.300	100,00%	18,82%	Dinkes					

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp	K		Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	140.000.000	1	33.300.000	1 unit	33.300.000	-	7.200.000	1	24.100.000	1	31.300.000	100%	94%	<	2	64.600.000	50,00%	46,14%	Dinkes		
		1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	2.380.000.000	35	542.546.000	35 unit	736.000.000	-	290.315.000	35	212.135.300	35	502.450.300	100%	68%	<	70	1.044.996.300	50,00%	43,91%	Dinkes		
		1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	16	567.310.000	4	79.885.000	4 unit	120.000.000	-	-	4	69.875.000	4	69.875.000	100%	58%	<	8	149.760.000	50,00%	26,40%	Dinkes		
		1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	120	320.000.000	30	49.886.000	20 unit	30.000.000	-	-	20	37.647.000	20	37.647.000	100%	125%	>	50	87.533.000	41,67%	27,35%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	86,50%				47,92%	31,95%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	T				SR	SR	Dinkes		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		99,5%	100,5%				41,5%	33,5%	Dinkes		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST				SR	SR	Dinkes		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persen	100	113.187.982.606		29.833.065.997	100 %	53.141.736.941	42,6	2.865.771.409	49,81	23.644.061.790	49,8125	26.509.833.199	50%	50%		50	56.342.899.196	49,81%	49,78%	Dinkes		
		1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis	16	26.208.307.606			8 Faskes	29.881.301.098		6.330.600	4	5.278.414.046	4	5.284.744.646	50%	18%		4	5.284.744.646	25,00%	20,16%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	4	7.216.469.802	1	2.457.516.949	1 unit	20.000.191.680	-	-	-	-	0	-	0%	0%	<	100%	2.457.516.949	25,00%	34,05%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	7	3.000.000.000	7	654.069.630	7 unit	120.585.000	-	-	2	149.850.000	2	149.850.000	29%	124%	>	900%	803.919.630	128,57%	26,80%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	80	9.886.837.804	20	1.925.909.500	3 unit	1.800.000.000	-	-	9	2.164.369.100	9	2.164.369.100	300%	120%	>	2900%	4.090.278.600	36,25%	41,37%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	5.700.000.000	50	4.028.827.846	8 unit	4.680.490.418	-	-	32	678.966.250	32	678.966.250	400%	15%	<	82	4.707.794.096	41,00%	82,59%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	400	405.000.000	100	178.739.020	60 unit	50.000.000	-	-	100	130.959.250	100	130.959.250	167%	262%	>	200	309.698.270	50,00%	76,47%	Dinkes		
		1 02 02 2.01 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minum di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						7 Pkt	3.140.874.000	-	-	50	2.038.412.446	50	2.038.412.446	714%	65%	<			0,00%	0,00%			
		1 02 02 2.01 24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan						200 Keluarga	20.000.000					0		0%	0%	<			0,00%	0,00%			
		1 02 02 2.01 26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minum di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minum di Fasilitas Kesehatan						7 Pkt	69.160.000	-	6.330.600	7	115.857.000	7	122.187.600	100%	177%	>			0,00%	0,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		213,69%	95,31%				35,10%	32,66%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	ST				SR	SR	Dinkes		
		1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	35	86.385.250.000			7 Faskes	23.120.435.843	1	2.853.440.809	2	18.266.354.744	3	21.119.795.553	43%	91,35%		3	21.119.795.553	8,57%	24,45%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20785	1.012.500.000	5.043	330.261.894	5144 Orang	80.000.000	2.770	-	1.364	560.204.000	4134	560.204.000	80%	700,26%	>	9.177	890.465.894	44,15%	87,95%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19801	405.000.000	4.804	15.089.466	4900 Orang	20.000.000	2.255	-	1.316	62.253.800	3571	62.253.800	73%	311%	>	8.375	77.343.266	42,30%	19,10%	Dinkes		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K		Rp	K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18090	324.000.000	4.389	67.320.640	4477 Orang	20.000.000	2.255	-	1.321	90.650.000	3576	90.650.000	80%	453%	>	7.965	157.970.640	44,03%	48,76%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	66689	1.417.500.000	16.810	89.512.450	16504 Orang	710.000.000	7.038	8.491.400	8.738	1.164.537.770	15776	1.173.029.170	96%	165%	>	32.586	1.262.541.620	48,86%	89,07%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	112790	1.012.500.000	27.366	39.446.169	27913 Orang	40.000.000	18.281	-	17.160	199.404.000	35441	199.404.000	127%	499%	>	62.807	238.850.169	55,68%	23,59%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	536330	891.000.000	130.127	274.677.220	132729 Orang	40.000.000	43.686	-	100.458	58.372.000	144144	58.372.000	109%	146%	>	274.271	333.049.220	51,14%	37,38%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	96785	1.215.000.000	22.455	700.000	23578 Orang	40.000.000	8.076	-	8.371	120.593.600	16447	120.593.600	70%	301%	>	38.902	121.293.600	40,19%	9,98%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	180803	810.000.000	41.949	54.171.433	44046 Orang	40.000.000	8.375	-	4.821	11.845.200	13196	11.845.200	30%	30%	<	55.145	66.016.633	30,50%	8,15%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19727	1.417.500.000	4.577	573.575.303	4806 Orang	40.000.000	2.625	-	1.833	220.682.300	4458	220.682.300	93%	552%	>	9.035	794.257.603	45,80%	56,03%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1946	243.000.000	452	76.316.572	474 Orang	40.000.000	200	-	248	19.700.000	448	19.700.000	95%	49%	<	900	96.016.572	46,25%	39,51%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	14790	1.620.000.000	3.431	277.154.000	3603 Orang	60.000.000	1.298	4.961.800	2.067	798.546.250	3365	803.508.050	93%	1339%	>	6.796	1.080.662.050	45,95%	66,71%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	30467	810.000.000	7.069	122.777.200	7422 Orang	40.000.000	3.922	7.382.400	4.746	144.463.400	8668	151.845.800	117%	380%	>	15.737	274.623.000	51,65%	33,90%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	40	202.500.000	10	23.819.435	10 Dok	20.000.000	-	-	10	22.800.000	10	22.800.000	100%	114%	>	20	46.619.435	50,00%	23,02%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	400	900.000.000	100	70.858.250	100 Dok	40.000.000	45	31.649.358	55	49.363.400	100	81.012.758	100%	203%	>	200	151.871.008	50,00%	16,87%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	40	1.417.500.000	10	808.536.216	1 Dok	40.000.000	-	-	10	1.446.321.280	10	1.446.321.280	1000%	3616%	>	20	2.254.857.496	50,00%	159,07%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	40	243.000.000	10	12.100.000	2 Dok	30.000.000	-	-	-	300.000	-	300.000	0%	1%	<	10	12.400.000	25,00%	5,10%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	40	283.500.000	10	152.397.200	1 Dok	52.420.000	-	-	8	520.530.000	8	520.530.000	800%	993%	>	18	672.927.200	45,00%	237,36%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	40	769.500.000	10	414.192.000	3 Dok	40.000.000	-	200.000.000	10	230.717.700	10	430.717.700	333%	1077%	>	20	844.909.700	50,00%	109,80%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	40	324.000.000	10	12.992.000	26 Dok	13.000.000	-	-	10	12.996.800	10	12.996.800	38%	100%	<	20	25.988.800	50,00%	8,02%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	40	202.500.000	10	4.608.600	2 Dok	30.000.000	-	-	6	197.675.000	6	197.675.000	300%	659%	>	16	202.283.600	40,00%	99,89%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	400	202.500.000	100	19.441.568	100 Orang	30.000.000	-	-	100	29.836.000	100	29.836.000	100%	99%	<	200	49.277.568	50,00%	24,33%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	200	405.000.000	50	161.859.817	50 Orang	50.000.000	-	21.797.736	30	113.739.305	30	135.537.041	60%	271%	>	80	297.396.858	40,00%	73,43%	Dinkes		
		1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	40	2.225.000.000	10	192.580.000	10 Dok	86.800.000	-	22.057.500	10	884.933.280	10	906.990.780	100%	1045%	>	20	1.099.570.780	50,00%	49,42%	Dinkes		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		1 02 02 2,02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	28	51.150.000,000	7	9.944.311.859	7 Dok	13.346.617.843	-	1.478.435.965	7	9.921.339.198	7	11.399.775.163	100%	85%	<	14	21.344.087.022	50,00%	41,73%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	400	101.250.000	100	1.000.000	100 Pkt	20.000.000	-	1.744.500	50	3.580.000	50	5.324.500	50%	27%	<	150	6.324.500	37,50%	6,25%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	7	11.250.000,000	7	4.777.979.491	7 Dok	6.104.723.000	-	34.260.000	7	572.825.669	7	607.085.669	100%	10%	<	14	5.385.065.160	200,00%	47,87%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	8	4.640.000,000	2	1.655.323.825	200 Dok	1.960.290.000	-	1.034.250.000	2	735.865.000	1	1.770.115.000	1%	90%	<	3	3.425.438.825	37,50%	73,82%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	324.000,000	1	335.880,000	1 Unit	36.585.000	-	-	1	7.557.600	1	7.557.600	100%	21%	<	2	343.437.600	200,00%	106,00%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	8	202.500,000	0	-	10 Lap	10.000,000	-	-	4	23.179.600	4	23.179.600	40%	232%	>	4	23.179.600	50,00%	11,45%	Dinkes		
		1 02 02 2,02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	4	162.000,000	0	-	20 Dok	20.000,000	-	-	-	0	-	0%	0%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dinkes			
		1 02 02 2,02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	202.500,000	1	15.099.644	1 Unit	20.000,000	-	8.410.150	1	41.542.592	1	49.952.742	100%	250%	>	2	65.052.386	200,00%	32,12%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		144,64%	445,72%				58,76%	53,09%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	ST				R	R	Dinkes		
		1 02 02 2,03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jenis	3	303.750,000			7 Faskes	100.000,000	3	-	-	85.300,000	3	85.300,000	43%	85%		3	85.300,000	100,00%	28,08%	Dinkes		
		1 02 02 2,03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	4	303.750,000	1	45.520.800	3 Dok	100.000,000	-	-	1	85.300,000	1	85.300,000	33%	85%	>	2	130.820.800	50,00%	43,07%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33,33%	85,30%				50,00%	43,07%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		SR	T				SR	SR	Dinkes		
		1 02 02 2,04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	2	290.675,000			10 Faskes	40.000,000	-	6.000,000	2	13.993,000	2	19.993,000	20%	50%			19.993,000	0,00%	6,88%	Dinkes		
		1 02 02 2,04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	10	166.100,000	10	18.500,000	10 Unit	20.000,000	-	6.000,000	10	13.993,000	10	19.993,000	100%	99,97%	<	20	38.493,000	200,00%	23,17%	Dinkes		
		1 02 02 2,04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	10	124.575,000			10 Unit	20.000,000	-	-	0	-	0%	0%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dinkes				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	49,98%				100,00%	11,59%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR	Dinkes		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		110,4%	169,1%				61,0%	35,1%	Dinkes		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST				R	SR	Dinkes		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	22,03	1.240.045.255			4,14 %	60.000,000	5	3.645.600	2,11	346.413.250	2	350.058.850	51%	583,43%		2	350.058.850	9,57%	28,23%	Dinkes		
		1 02 03 2,01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jenis	2	163.000,000			2 Dok	10.000,000		3.645.600	-	16.110,000	0	19.755,600	0%	197,56%		-	19.755,600	0,00%	12,12%	Dinkes		
		1 02 03 2,01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	4	163.000,000	1	20.000,000	1 Dok	10.000,000	-	3.645.600	1	16.110,000	1	19.755,600	100%	197,56%	>	2	39.755,600	50,00%	24,39%	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	197,56%				50,00%	24,39%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	ST				SR	SR	Dinkes		

No	Sasaran Daerah				Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 5/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																									
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / < / =	K	Rp		K	Rp																							
															K	Rp	K	Rp																																			
1	2				3				4				5				6				7				8				9				10				11=9+10				12=11/8				13 = 7+11				14=13/6*100%				15
			1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jenis	2		286.000.000		2 Dok	30.000.000		-	-	87.482.600	-	87.482.600	0%	291,61%	<	-	87.482.600	0,00%	30,59%	Dinkes																								
			1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4		102.500.000	1	10.000.000	1 Dok	10.000.000	-	-	1	8.996.900	1	8.996.900	100%	89,97%	<	2	18.996.900	50,00%	18,53%	Dinkes																						
			1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4		183.500.000	1	8.875.000	1 Dok	20.000.000	-	-	1	78.485.700	1	78.485.700	100%	392,43%	>	2	87.360.700	50,00%	47,61%	Dinkes																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								100,00%	241,20%							50,00%	33,07%	Dinkes																			
Predikat Kinerja																								ST	ST							SR	SR	Dinkes																			
			1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	1		791.045.255		40 SDMK	20.000.000		-	1	242.820.650	1	242.820.650	3%	1214,10%		1	242.820.650	100,00%	30,70%	Dinkes																								
			1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	160		791.045.255	40	81.077.957	20 org	20.000.000	-	-	40	242.820.650	40	242.820.650	200%	1214,10%	>	80	323.898.607	50,00%	40,95%	Dinkes																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								200,00%	1214,10%							50,00%	40,95%	Dinkes																			
Predikat Kinerja																								ST	ST							SR	SR	Dinkes																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																								133,3%	551,0%							50,0%	32,8%	Dinkes																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																								ST	ST							SR	SR	Dinkes																			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	100		1.000.864.921		100 %	99.000.000	100	900.000	100	208.328.275	100	209.228.275	100%	211,34%			209.228.275	0,00%	20,90%	Dinkes																								
		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jenis	3		160.000.000		10Tempat	20.000.000		-	0	34.807.400	0	34.807.400	0%	174,04%		-	34.807.400	0,00%	21,75%	Dinkes																								
		1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4		160.000.000	1	20.000.000	2 Dok	20.000.000	-	1	34.807.400	1	34.807.400	50%	174,04%	>	2	54.807.400	50,00%	34,25%	Dinkes																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								50,00%	174,04%							50,00%	34,25%	Dinkes																			
Predikat Kinerja																								SR	ST							SR	SR	Dinkes																			
		1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jenis	2		120.864.921		2 Dok	11.000.000		-	-	0	-	0%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Dinkes																									
		1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	4		120.864.921		2 Dok	11.000.000		-	-	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dinkes																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00%	0,00%							0,00%	0,00%	Dinkes																			
Predikat Kinerja																								SR	SR							SR	SR	Dinkes																			
		1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jenis	1		100.000.000		1 Dok	50.000.000		-	-	137.418.000	0	137.418.000	0%	274,84%			137.418.000	0,00%	137,42%	Dinkes																								

No	Sasaran Daerah		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
																	K	Rp	K	Rp												
1	2		3				4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
			1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	4	100.000.000	1	10.345.300	1 Dok	50.000.000	-	1	137.418.000	1	137.418.000	100%	274,84%	>	2	147.763.300	50,00%	147,76%	Dinkes			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%		274,84%					50,00%		147,76%		Dinkes	
																		Predikat Kinerja		ST		ST					SR		ST		Dinkes	
			1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jenis	1	240.000.000			1 Dok	6.000.000	-	0	300.000	0	300.000	0%	5,00%			300.000	0,00%	0,13%	Dinkes			
			1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	240.000.000	1	9.999.130	1 Dok	6.000.000	-	-	300.000	-	300.000	0%	5,00%	<	1	10.299.130	25,00%	4,29%	Dinkes			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		5,00%					25,00%		4,29%		Dinkes	
																		Predikat Kinerja		SR		SR					SR		SR		Dinkes	
			1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jenis	1	200.000.000			1 Dok	6.000.000	-	1	9.945.875	1	9.945.875	100,00%	165,76%			9.945.875	0,00%	4,97%	Dinkes			
			1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4	200.000.000	1	2.800.000	1 Dok	6.000.000	-	3	9.945.875	3	9.945.875	300,00%	165,76%	>	4	12.745.875	100,00%	6,37%	Dinkes			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		300,00%		165,76%					100,00%		6,37%		Dinkes	
																		Predikat Kinerja		ST		ST					ST		SR		Dinkes	
			1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jenis	2	180.000.000			10 Produk	6.000.000			900.000	2	25.857.000	2	26.757.000	20,00%	445,95%		26.757.000	0,00%	14,87%	Dinkes		
			1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	4	180.000.000	1	33.925.753	10 Unit	6.000.000	-		900.000	1	25.857.000	1	26.757.000	10,00%	445,95%	>	2	60.682.753	50,00%	33,71%	Dinkes	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		10,00%		445,95%					50,00%		33,71%		Dinkes	
																		Predikat Kinerja		SR		ST					SR		SR		Dinkes	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		76,7%		177,6%					45,8%		37,7%		Dinkes	
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)		T		ST					SR		SR		Dinkes	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	781.083.985			83,44 %	45.000.000	59,9	-	84,00	60.165.000	84	60.165.000	101%	133,70%		84	60.165.000	84,00%	7,70%	Dinkes		
		1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	1	320.000.000			1 Dok	20.000.000	-	0	1.450.000	0	1.450.000	0%	7,25%	-		1.450.000	0,00%	0,45%	Dinkes			
		1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4	320.000.000	1	8.000.000	1 Dok	20.000.000	-	1	1.450.000	1	1.450.000	100%	7,25%	<	2	9.450.000	50,00%	2,95%	Dinkes			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%		7,25%					50,00%		2,95%		Dinkes	
																		Predikat Kinerja		ST		SR					SR		SR		Dinkes	

No	Sasaran Daerah	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = <		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15				
		1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	2	221.083.985			2 Klnga	20.000.000			-	0	500.000	0	500.000	0%	2,50%			500.000	0,00%	0,23%	Dinkes			
		1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	221.083.985	1	8048190	1 Dok	20.000.000			-	1	500.000	1	500.000	100%	2,50%	<	2	8.548.190	50,00%	3,87%	Dinkes			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	2,50%						50,00%	3,87%	Dinkes			
Predikat Kinerja																					ST	SR						SR	SR	Dinkes			
		1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	1	240.000.000			1 Dok	5.000.000			-		58.215.000	0	58.215.000	0%	1164,30%			58.215.000	0,00%	24,26%	Dinkes			
		1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	4	240.000.000			1 Dok	5.000.000			-	1	58.215.000	1	58.215.000	100%	1164%	>	1	58.215.000	25,00%	24,26%	Dinkes			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	1164,30%						25,00%	24,26%	Dinkes			
Predikat Kinerja																					ST	ST						SR	SR	Dinkes			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					100,0%	391,4%						41,7%	10,4%	Dinkes			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					ST	ST						SR	SR	Dinkes			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					103,98%	277,89%						47,99%	29,89%	Dinkes			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					ST	ST						SR	SR	Dinkes			

RKPK

Lhokseumawe

Tahun 2026

II - 226

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <		K	Rp
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%			15				
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	24,06	-	-	22,18	2.966.721.017	10,5	1.088.244.965	10,81	-	21,31	1.088.244.965	96,08%	36,68%		21,31	1.088.244.965	88,57%	#DIV/0!	PUPR	
		1 03 03 2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum melalui SPAM Jaringan Pipa dan Bukan Jaringan Pipa	Persen	16,39	-	-	15,75	2.966.721.017		1.088.244.965		-	0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	#DIV/0!	PUPR	
		1 03 03 2,01 0002	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit				105	1.090.464.000	10	107.987.200			10	107.987.200	9,52%	9,90%	<	10	107.987.200	0,00%	0,00%	PUPR	
		1 03 03 2,01 00025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen				1	376.257.017	1	99.971.040	0	0	1	99.971.040	100,00%	26,57%	<	1	99.971.040	0,00%	0,00%	PUPR	
		1 03 03 2,01 0003	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit						100	880.286.725			100	880.286.725	0,00%	0,00%	<	100	880.286.725	0,00%	0,00%	PUPR	
		1 03 03 2,01 00032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR				808	1.500.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	PUPR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		27,38%	9,12%				0,00%	0,00%	PUPR
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	PUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		27,38%	9,12%				0,00%	0,00%	PUPR
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	PUPR
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	Persen	76,69	-	-	71,86	10.456.583.000	0	1.400.750.000	66,81	-	66,81	1.400.750.000	92,97%	13,40%		66,81	1.400.750.000	8711,70%	0,00%	PUPR	
		1 03 05 2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	75,33	-	-	71,01	10.456.583.000		1.400.750.000		-	0	1.400.750.000	0,00%	13,40%		0	1.400.750.000	0,00%	0,00%	PUPR	
		1 03 05 2,01 00032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	M ³ /hari			-	554	10.236.083.000	215	1.400.750.000		-	215	1.400.750.000	38,81%	13,68%	<	215	1.400.750.000	0,00%	0,00%	PUPR	
		1 03 05 2,01 00041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen			-	1	220.500.000		-		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	PUPR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		19,40%	6,84%				0,00%	0,00%	PUPR
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	PUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		19,40%	6,84%				0,00%	0,00%	PUPR
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	PUPR
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	81,77	-	-	74,85	3.174.536.000	35,8	253.240.575	35,84	-	71,64	253.240.575	95,71%	7,98%		71,64	253.240.575	87,61%	0,00%	PUPR	
		1 03 06 2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	70,6	-	-	67,20	3.174.536.000		253.240.575		-	0	253.240.575	0,00%	7,98%		0	253.240.575	0,00%	0%	PUPR	
		1 03 06 2,01 00028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan			0	-	317	400.000.000		-		-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	PUPR		
		1 03 06 2,01 00029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan			0	-	1718	2.749.536.000	136	218.272.245			0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	PUPR		
		1 03 06 2,01 00030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen			0	-	1	25.000.000	1	34.968.330	0	0	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	PUPR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	PUPR
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	PUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	PUPR
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	PUPR
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan bangunan Gedung	Persen	11,54	-	-	7,69	2.500.000.000		198.955.000	0,61	-	0,61	198.955.000	7,93%	7,96%		0,61	198.955.000	5,29%	#DIV/0!	PUPR	
		1 03 08 2,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dokumen Persen	11,54	-	-	1	2.500.000.000	1	198.955.000	0	-	1	198.955.000	100,00%	7,96%		1	198.955.000	8,67%	#DIV/0!	PUPR	
		1 03 08 2,01 00017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung				3	2.500.000.000	1	198.955.000			1	198.955.000	33,33%	7,96%	<	1	198.955.000	0,00%	0,00%	PUPR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33,33%	7,96%				0,00%	0,00%	PUPR
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	PUPR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		33,33%	7,96%				0,00%	0,00%	PUPR
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	PUPR
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Berkualitas	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	78,91	112.475.644.220		14.655.370.500	71,64	17.032.041.994	1,46	4.585.000.100	69,53	-	70,99	4.585.000.100	99,09%	26,92%		70,99	195.527.000	89,96%	17,38%	PUPR
		1 03 10 2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78,91	112.475.644.220		14.655.370.500	71,64	17.032.041.994	1,46	4.585.000.100	69,53	-	70,99	4.585.000.100	99,09%	26,92%		70,99	195.527.000	89,96%	17,38%	PUPR

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokeumawe sampai dengan RKPK Lhokeumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																33,90%	31,04%				229,33%	12,86%	PUPR		
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																SR	SR				ST		PUPR		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9÷10	12=11/8	13 = 7÷11	14= 13/6*100%	15													
	Meningkatnya Pelayanan Publik			SATPOL PP dan WH		35.772.707.361		9.097.094.745	4.661.533.868	-		4.661.533.868					4.661.533.868				4.661.533.868						
		1 05 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		35.772.707.361	4.368.239.030	9.097.094.745	4.661.533.868	-		4.661.533.868					9.029.772.898										
		1 05 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persen	100	33.440.320.238	4.061.438.360	100	6.270.644.745	25	3.079.635.068	0	-	0	3.079.635.068		93,91%		7.141.073.428						
		1 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	8.426.590	11.358.545	6	15.700.000	3	-	0	-	3	-	50,00%	0,00%	3	11.358.545	12,50%	134,79%	Satpol PP & WH			
		1 05 01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	50	5.826.590	10	11.358.545	3	15.000.000	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	10	11.358.545	20,00%	194,94%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	2.600.000		1	700.000			-		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				10,00%	97,47%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	ST	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	14.182.372.000		-	12	4.301.261.000	3	2.115.332.639	0	-	3	2.115.332.639	25,00%	49,18%	3	2.115.332.639	6,25%	14,92%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	48	14.182.372.000		648	4.301.261.000	318	2.115.332.639	0	-	318	2.115.332.639	49,07%	49,18%	<	318	2.115.332.639	662,50%	14,92%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		49,07%	49,18%				662,50%	14,92%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	SR	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis	16	844.000.000	905.208.100	4	188.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	-	905.208.100	0,00%	107,25%	Satpol PP & WH				
		1 05 01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	670.000.000	0	839.991.950	1	163.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	-	839.991.950	0,00%	125,37%	Satpol PP & WH			
		1 05 01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	16	24.000.000	0	4.955.000	1	5.000.000	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	4.955.000	0,00%	20,65%	Satpol PP & WH			
		1 05 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	100.000.000	0	-	1	15.000.000	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH			
		1 05 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	50.000.000	0	60.261.150	35	5.000.000	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	60.261.150	0,00%	120,52%	Satpol PP & WH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	66,64%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	S	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	532.060.000	133.939.034	12	81.140.000	6	54.468.600	0	-	6	54.468.600	50,00%	67,13%	6	188.407.634	12,50%	35,41%	Satpol PP & WH			
		1 05 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	80	79.000.000	1	17.912.703	3	15.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	17.912.703	1,25%	22,67%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4200	42.500.000	2	6.985.000	500	10.000.000	0	4.950.000	-	4.950.000	0,00%	49,50%	<	2	11.935.000	0,05%	28,08%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	48.000.000	2	7.901.600	2	5.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	7.901.600	25,00%	16,46%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	4.560.000	12	1.140.000	12	1.140.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	12	1.140.000	25,00%	25,00%	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan/Tahun	120	358.000.000	30	99.999.731	30	50.000.000	15	49.518.600	-	49.518.600	50,00%	99,04%	<	45	149.518.331	37,50%	41,76%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		10,00%	29,71%				17,76%	26,80%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	12	350.000.000	106.272.000	3	30.000.000		36.945.900	-	0	36.945.900	0,00%	123,15%	-	143.217.900	0,00%	40,92%	Satpol PP & WH				
		1 05 01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	350.000.000	4	106272000	5	30.000.000	0	36.945.900	-	36.945.900	0,00%	123,15%	>	4	143.217.900	20,00%	40,92%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	123,15%				20,00%	40,92%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	ST				SR	SR	Satpol PP & WH		
		1 05 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jenis	12	16.515.061.648	2.403.072.724	3	1.433.443.745	6	822.686.379	0	-	6	822.686.379	200,00%	57,39%	6	3.225.759.103	50,00%	19,53%	Satpol PP & WH			

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K		Rp	K	Rp	Realisasi >/= / <	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15												
		1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	8.000.000	3	1495000	12	1.500.000	0	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	3	1.495.000	6,25%	18,69%	Satpol PP & WH		
		1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan/Rekening	48	490.600.000	12	125.520.964	12	110.833.333	4	61.506.603	-	4	61.506.603	33,33%	55,49%	<	16	187.027.567	33,33%	38,12%	Satpol PP & WH		
		1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	16.016.461.648	6	2.276.056.760	12	1.321.110.412	3	761.179.776	-	3	761.179.776	25,00%	57,62%	<	9	3.037.236.536	18,75%	18,96%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		19,44%	37,70%				19,44%	25,26%	Satpol PP & WH	
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH	
	1 05 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Bulan	48	1.008.400.000		501.587.957	12	221.100.000	6	50.201.550	0	-	6	50.201.550	50,00%	22,71%		6	551.789.507	12,50%	54,72%	Satpol PP & WH	
	1 05 01 2.09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	133.200.000	1	33.085.800	1	33.300.000	1	6.765.750	-	1	6.765.750	100,00%	20,32%	<	2	39.851.550	50,00%	29,92%	Satpol PP & WH		
	1 05 01 2.09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	671.200.000	5	249.424.157	6	167.800.000	1	43.435.800	-	1	43.435.800	16,67%	25,89%	<	6	292.859.957	30,00%	43,63%	Satpol PP & WH		
	1 05 01 2.09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	176.000.000	2	209.119.000	2	15.000.000	0	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	209.119.000	100,00%	118,82%	Satpol PP & WH		
	1 05 01 2.09 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	28.000.000	16	9.959.000	16	5.000.000	0	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	16	9.959.000	100,00%	35,57%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		29,17%	11,55%				70,00%	56,98%	Satpol PP & WH	
Predikat Kinerja																		SR	SR				S	R	Satpol PP & WH	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		15,4%	35,9%				114,2%	47,0%	Satpol PP & WH	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				ST	SR	Satpol PP & WH	
Meningkatnya Pelayanan Publik	1 05 02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketenteraman	Persen	100	2.332.387.123		306.800.670	100	2.826.450.000	25	1.581.898.800	0	-	25	1.581.898.800	25%	55,97%		25	1.888.699.470	25,00%	80,98%	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Periode Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	48	797.000.000		306.800.670	12	210.000.000	6	119.310.000	0	-	6	119.310.000	50,00%	56,81%		6	426.110.670	12,50%	53,46%	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.01 0001		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus/kali	120	680.000.000	30	236.669.100			0	-		0	-	0,00%	0,00%	<	30	236.669.100	25,00%	34,80%	Satpol PP & WH		
	1 05 02 2.01 0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	45.000.000			1	20.000.000	-	35.310.000	-		35.310.000	0,00%	176,55%	>	-	35.310.000	0,00%	78,47%	Satpol PP & WH		
	1 05 02 2.01 0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	72.000.000	35	70.131.570	35	15.000.000	0	-		0	-	0,00%	0,00%	<	35	70.131.570	70,00%	97,40%	Satpol PP & WH		
	1 05 02 2.01 0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan					12	175.000.000	2	84.000.000		2	84.000.000	16,67%	48,00%	<	2	84.000.000	0	0,00%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		4,17%	56,14%				23,75%	52,67%	Satpol PP & WH	
Predikat Kinerja																		SR	R				SR	R	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Periode Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Bulan	48	140.000.000		15.297.600	12	20.000.000		600.000		-		600.000	0,00%	3,00%		-	15.897.600	0,00%	11,36%	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.02 0003		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	240	140.000.000	60	15.297.600			0	600.000		0	0	600.000	0,00%	0,00%	<	60	15.897.600	25,00%	11,36%	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.02 0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan					1	20.000.000							0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH	
Predikat Kinerja																		0,00%	0,00%				12,50%	5,68%	Satpol PP & WH	
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH	
	1 05 02 2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Periode Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Bulan	48	99.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKKP Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
		10502.203.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan/Orang	1	99.000.000					-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH		
		10502.704	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Periode Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Bulan	48	1.296.387.123			12	2.596.450.000	6	1.461.988.800	0		-	6	1.461.988.800	50,00%	56,31%		6	1.461.988.800	12,50%	112,77%	Satpol PP & WH	
		10502.704.0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat	Laporan	48	533.842.623	12	219.893.000	1	85.000.000	0	94.488.800			0	0	94.488.800	0,00%	111,16%	>	12	314.381.800	25,00%	58,89%	Satpol PP & WH	
		10502.704.0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan	48	320.000.000	12	73.547.000	1	25.000.000	0	-			-	0	-	0,00%	0,00%	<	12	73.547.000	25,00%	22,98%	Satpol PP & WH	
		10502.704.0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan/Kali	6	442.544.500	6	45.970.000	1	40.000.000	0	-			-	0	-	0,00%	0,00%	<	6	45.970.000	100,00%	10,39%	Satpol PP & WH	
		10502.704.0011	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	Laporan		-	1	2.477.750.000	1	2.446.450.000	1	1.367.500.000			0	1	1.367.500.000	50,00%	55,90%	<	2	3.845.250.000	0,00%	0,00%	Satpol PP & WH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		12,50%	41,77%				37,50%	23,07%	Satpol PP & WH		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		4,2%	24,5%				18,4%	20,4%	Satpol PP & WH		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	Satpol PP & WH		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		9,78%	30,19%				66,34%	33,68%	Satpol PP & WH		
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		SR	SR				S	SR	Satpol PP & WH		

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			DINAS SOSIAL			19.163.746.807		4.485.334.640	1.494.153.773	2.458.385.504	3.952.539.277				3.952.539.277											
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.163.746.807		4.485.334.640	1.494.153.773	2.458.385.504	3.952.539.277				3.952.539.277											
		1 06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	11.861.876.706		100	2.975.334.640	25	1.300.118.093	25	1.452.006.119	50	2.752.124.212							2.752.124.212			
		1 06 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	80	16.418.912		20	3.000.000	0	-	10	2.999.900	10	2.999.900	50,00%	100,00%		10	2.999.900	12,50%	18,27%	Dinsos		
		1 06 01 2,01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	16.418.912	10	15.683.380	10	3.000.000	0	-	10	2.999.900	10	2.999.900	100,00%	100,00%	<	20	18.683.280	50,00%	113,79%	Dinsos	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	100,00%				50,00%	113,79%	Dinsos		
Predikat Kinerja																		5T	5T				5R	5T	Dinsos		
		1 06 01 2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	8.714.157.374		12	2.434.706.000	6	1.072.103.070	6	1.133.285.724	12	2.205.388.794	100,00%	90,58%		12	2.205.388.794	25,00%	25,31%	Dinsos		
		1 06 01 2,02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1200	8.714.157.374	300	2.493.381.524	300	2.434.706.000	140	1.072.103.070	160	1.133.285.724	300	2.205.388.794	100,00%	90,58%	<	600	4.698.770.318	50,00%	53,92%	Dinsos	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	90,58%				50,00%	53,92%	Dinsos		
Predikat Kinerja																		5T	5T				5R	5R	Dinsos		
		1 06 01 2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	898.929.071		12	101.140.000	6	60.514.900	6	57.438.000	12	117.952.900	100,00%	116,62%		12	226.823.255	25,00%	25,23%	Dinsos		
		1 06 01 2,06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	360	200.230.635	22	14.999.955	90	30.000.000	70	11.304.100	20	3.684.600	90	14.988.700	100,00%	49,96%	<	112	29.988.655	31,11%	14,98%	Dinsos	
		1 06 01 2,06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4400	60.069.191	1.075	7.985.000	1100	15.000.000	200	5.500.000	100	2.500.000	300	8.000.000	27,27%	53,33%	<	1.375	15.985.000	31,25%	26,61%	Dinsos	
		1 06 01 2,06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	140	98.113.011	35	6.999.200	35	5.000.000	15	1.800.000	20	3.198.000	35	4.998.000	100,00%	99,96%	<	70	11.997.200	50,00%	12,23%	Dinsos	
		1 06 01 2,06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1460	7.608.764	365	1.140.000	365	1.140.000	0	-	365	1.140.000	365	1.140.000	100,00%	100,00%	=	730	2.280.000	50,00%	29,97%	Dinsos	
		1 06 01 2,06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	532.907.470	30	77.746.200	30	50.000.000	13	41.910.800	17	46.915.400	30	88.826.200	100,00%	177,65%	>	60	166.572.400	50,00%	31,26%	Dinsos	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		85,45%	96,18%				42,47%	23,01%	Dinsos		
Predikat Kinerja																		7	5T				5R	5R	Dinsos		
		1 06 01 2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	68	300.345.953		7	88.000.000		-	4	39.997.700	4	39.997.700	57,14%	45,45%		4	99.697.700	5,88%	33,19%	Dinsos		
		1 06 01 2,07 0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	300.345.953	10	59.700.000	10	88.000.000		-	4	39.997.700	4	39.997.700	40,00%	45,45%	<	14	99.697.700	35,00%	33,19%	Dinsos	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		40,00%	45,45%				35,00%	33,19%	Dinsos		
Predikat Kinerja																		5R	5R				5R	5R	Dinsos		
		1 06 01 2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	1.511.541.064		12	242.888.640	6	121.070.123	6	109.085.195	12	290.155.318	100,00%	119,46%		12	597.516.214	25,00%	39,53%	Dinsos		
		1 06 01 2,08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	120	9.811.301	30	1.198.000	30	1.200.000	15	600.000	15	600.000	30	1.200.000	100,00%	100,00%	=	60	2.398.000	50,00%	24,44%	Dinsos	
		1 06 01 2,08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	120	300.345.953	30	78.332.516	30	75.000.000	12	21.720.123	18	24.352.315	30	46.072.438	100,00%	61,43%	<	60	124.404.954	50,00%	41,42%	Dinsos	
		1 06 01 2,08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	920	1.201.383.810	230	227.830.380	230	166.688.640	210	98.750.000	210	144.132.880	420	242.882.880	182,61%	145,71%	>	650	470.713.260	70,65%	39,18%	Dinsos	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		127,54%	102,38%				56,88%	35,01%	Dinsos		
Predikat Kinerja																		5T	5T				5R	5R	Dinsos		
		1 06 01 2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	240	420.484.334	60	196.276.000	60	105.600.000	56	46.430.000	83	49.199.600	139	95.629.600	231,67%	90,56%		199	291.905.600	82,92%	69,42%	Dinsos	
		1 06 01 2,09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Unit	48	100.115.318	24	68.844.000	12	34.600.000	6	19.630.000	6	13.500.000	12	33.130.000	100,00%	95,75%	<	36	101.974.000	75,00%	101,86%	Dinsos	
		1 06 01 2,09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	144	240.276.762	72	48.000.000	36	26.000.000	12	13.500.000	12	9.000.000	24	22.500.000	66,67%	86,54%	<	96	70.500.000	66,67%	29,34%	Dinsos	
		1 06 01 2,09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	40.046.127	10	19.842.000	5	25.000.000	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	20,00%	80,00%	<	11	39.842.000	55,00%	99,49%	Dinsos	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9+10	12=11/8	13 = 7+11	14= 13/6*100%	15															
		1	06	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	28	40.046.127	14	59.590.000	7	20.000.000	38	13.300.000	64	6.699.600	102	19.999.600	1457,14%	100,00%	<	116	79.589.600	414,29%	198,74%	Dinsos
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		410,95%	90,57%			152,74%	107,36%	Dinsos									
												Predikat Kinerja		ST	ST			ST	ST	Dinsos									
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		144,0%	87,5%			64,5%	61,0%	Dinsos									
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)		ST	T			R	R	Dinsos									
Meningkatnya Pelayanan Publik		1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen	78,72	2.116.292.096	93	1.965.457.085	74,92	275.000.000	11,32	19.477.800	54,68	276.869.985	66,00	296.347.785	88,09%	107,76%		159	2.261.804.870	2	106,88%	Dinsos
		1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persen	78,72	2.116.292.096	73	1.965.457.085	74,92	275.000.000	11,32	19.477.800	54,68	276.869.985	66,00	296.347.785	88,09%	107,76%		139	2.261.804.870	176,69%	106,88%	Dinsos
		1	06	02	2,03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Orang	200	316.364.403	50	28.757.000	50	20.000.000	12	8.794.000	12	11.159.900	24	19.953.900	48,00%	99,77%	<	74	48.710.900	37,00%	15,40%	Dinsos
		1	06	02	2,03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	200	299.721.233	50	20.795.000	50	20.000.000	4	2.400.000	8	10.791.900	12	13.191.900	24,00%	65,96%	<	62	33.986.900	31,00%	11,34%	Dinsos
		1	06	02	2,03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Keluarga	200	99.907.078	50	1.836.923.730	50	170.000.000	0	-	61	227.908.385	61	227.908.385	122,00%	134,06%	>	111	2.064.832.115	55,50%	2066,75%	Dinsos
		1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	20	1.267.089.945	5	63.236.155	5	50.000.000	2	8.283.800	2	16.380.600	4	24.664.400	80,00%	49,33%	<	9	87.900.555	45,00%	6,94%	Dinsos
		1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sertifikat	16	133.209.437	4	15.745.200	4	15.000.000	16	-	4	10.629.200	20	10.629.200	500,00%	70,86%	<	24	26.374.400	150,00%	19,80%	Dinsos
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		154,80%	84,00%			63,70%	424,05%	Dinsos									
												Predikat Kinerja		ST	T			R	ST	Dinsos									
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		154,8%	84,0%			63,7%	424,0%	Dinsos									
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)		ST	T			R	ST	Dinsos									
Meningkatnya Pelayanan Publik		1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	868.605.514	75	365.506.350	100	1.120.000.000	50	148.887.880	0	692.029.400	50	840.917.280	50%	75,08%		125	1.206.423.630	125,00%	138,89%	Dinsos
		1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	100	647.675.734	12	365.506.350	100	645.000.000	18,46	119.056.200	-	567.163.900	18,46	686.220.100	18,46%	106,39%		30	1.051.726.450	30,46%	162,38%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	301.267.882	100	264.670.645	100	500.000.000	3	16.440.000	97	483.559.700	100	499.999.700	100,00%	100,00%	<	200	764.670.345	50,00%	253,82%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	150.633.941	0	-	100	20.000.000	10	19.268.900	0	730.800	10	19.999.700	10,00%	100,00%	<	10	19.999.700	2,50%	13,28%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	18.076.073	100	25.628.400	100	25.000.000	32	30.161.600	38	19.278.600	70	49.440.200	70,00%	197,76%	>	170	75.068.600	42,50%	415,29%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta bimbingan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	800	40.169.051	200	25.920.405	200	25.000.000	0	46.705.700	70	2.494.400	70	49.200.100	35,00%	196,80%	>	270	75.120.505	33,75%	187,01%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0007	Memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	Jumlah orang yang memperoleh kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	Orang	320	77.275.212	80	49.286.900	80	40.000.000	0	-	68	29.350.600	68	29.350.600	85,00%	73,38%	<	148	78.637.500	46,25%	101,76%	Dinsos
		1	06	04	2,01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	30.126.788	0	-	50	15.000.000	-	15	14.563.500	15	14.563.500	30,00%	97,09%	<	15	14.563.500	7,50%	48,34%	Dinsos	
		1	06	04	2,01	0012	Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	320	30.126.788	0	-	80	20.000.000	-	6.480.000	110	17.186.300	110	23.666.300	137,50%	118,33%	>	110	23.666.300	34,38%	78,56%	Dinsos
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66,79%	126,19%			30,98%	156,87%	Dinsos									
												Predikat Kinerja		S	ST			SR	ST	Dinsos									

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14= 13/6*100%	15													
		1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	100	220.929.780	-	100	475.000.000	50	29.831.680	0	124.865.500	50	154.697.180	0,00%	32,57%		50	154.697.180	50,00%	70,02%	Dinsos			
		1 06 04 2.02 0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	600	150.633.941		150	150.000.000	0	-	27	104.975.000	27	104.975.000	18,00%	69,98%	<	27	104.975.000	4,50%	69,69%	Dinsos			
		1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	25.105.657		100	300.000.000	70	29.831.680	0	-	70	29.831.680	70,00%	9,94%	<	70	29.831.680	17,50%	118,82%	Dinsos			
		1 06 04 2.02 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	20.084.525		70	10.000.000	0	-	10	10.000.000	10	10.000.000	14,29%	100,00%	=	10	10.000.000	3,57%	49,79%	Dinsos			
		1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	400	25.105.657		100	15.000.000	0	-	10	9.890.500	10	9.890.500	10,00%	65,94%	<	10	9.890.500	2,50%	39,40%	Dinsos			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		28,07%	61,47%					7,02%	69,42%	Dinsos	
Predikat Kinerja																		SR	R					S	Dinsos		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		47,4%	93,8%					19,0%	113,1%	Dinsos	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	ST					SR	ST	Dinsos	
Meningkatnya Pelayanan Publik	1 06 05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	50,56	4.004.612.700	-	43,76	50.000.000	0	18.800.000	0	19.358.200	0	38.158.200	0%	76,32%		-	38.158.200	0	0,95%	Dinsos			
	1 06 05 2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	569736	4.004.612.700	-	142414	50.000.000	53547	18.800.000	0	19.358.200	53547	38.158.200	37,60%	76,32%		53.547	38.158.200	9,40%	0,95%	Dinsos			
	1 06 05 2.02 0001		Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	455020	2.002.306.350		113755	25.000.000	0	-	93996	19.358.200	93996	19.358.200	82,63%	77,43%	<	93.996	19.358.200	20,66%	0,97%	Dinsos			
	1 06 05 2.02 0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/ Kota	Orang	113756	2.002.306.350		28439	25.000.000	21386	18.800.000	30.817,0	-	52203	18.800.000	183,56%	75,20%	<	52.203	18.800.000	45,89%	0,94%	Dinsos			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		133,10%	76,32%					33,27%	0,95%	Dinsos	
Predikat Kinerja																		ST	T					SR	SR	Dinsos	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		133,1%	76,3%					33,3%	1,0%	Dinsos	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		ST	T					SR	SR	Dinsos	
Meningkatnya Pelayanan Publik	1 06 06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	112.129.156	-	100	25.000.000	50	6.870.000	0	18.121.800	50	24.991.800	50%	99,97%		50	24.991.800	50,00%	22,29%	Dinsos			
	1 06 06 2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap-siagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	112.129.156	-	100	25.000.000	50	6.870.000	0	18.121.800	50	24.991.800	50,00%	99,97%		50	24.991.800	50,00%	22,29%	Dinsos			
	1 06 06 2.02 0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	112.129.156		25	25.000.000	7	6.870.000	18	18.121.800	25	24.991.800	100,00%	99,97%	<	25	24.991.800	25,00%	22,29%	Dinsos			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	99,97%					25,00%	22,29%	Dinsos	
Predikat Kinerja																		ST	ST					SR	SR	Dinsos	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		100,0%	100,0%					25,0%	22,3%	Dinsos	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		ST	ST					SR	SR	Dinsos	
Meningkatnya Pelayanan Publik	1 06 07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen	100	200.230.635	-	100	40.000.000	0	-	0	-	-	-	0%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Dinsos			
	1 06 07 2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persen	100	200.230.635	-	100	40.000.000		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Dinsos			
	1 06 07 2.01 0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makan	4	200.230.635		1	40.000.000		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dinsos			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	Dinsos	
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	Dinsos	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	0,0%					0,0%	0,0%	Dinsos	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR					SR	SR	Dinsos	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		96,55%	73,61%					34,25%	103,58%	Dinsos	
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		ST	S					SR	ST	Dinsos	

			2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4		151.050.000	1	32.079.000	1		34.000.000	1		10.155.500	0		15.430.800	1		25.586.300	100,00%	75,25%	<	2		57.665.300	50,00%	38,18%	DP3P2KB

RKPK

Lhokseumawe

Tahun 2026

II - 236

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15				
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	233.000.000	4	56.738.450	4	84.800.000	4	14.896.300	0	36.416.650	4	51.312.950	100,00%	60,51%	<	8	108.051.400	100,00%	46,37%	DP3P2KB
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	255.500.000	1	29.940.000	1	25.000.000	1	9.545.000	0	9.545.000	1	19.090.000	100,00%	76,36%	<	2	49.030.000	50,00%	19,19%	DP3P2KB
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	45.100.000	8	9.755.000	10	10.000.000	3	3.550.000	7	6.450.000	10	10.000.000	100,00%	100,00%	=	18	19.755.000	47,37%	43,80%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	78,03%						61,84%	36,89%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																		ST	T						R	SR	DP3P2KB	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		117,59%	114,75%						51,76%	36,56%	DP3P2KB	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST						R	SR	DP3P2KB	
	2	08	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persen	60.68	320.369.016	51,52	30.562.650	62,02	44.998.755	20	3.668.000	40	39.816.400	60	43.484.400	96,74%	96,63%		111,52	74.047.050	0,00%	23,11%	DP3P2KB
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persen	4	52.000.000	0	-	75,30	9.999.490		1.388.200	10	8.310.100	10,453679	9.698.300	13,88%	96,99%		10,4536791	9.698.300	261,34%	18,65%	DP3P2KB
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	PD	18	52.000.000	0		20	9.999.490	0	1.388.200	10	8.310.100	10	9.698.300	50,00%	96,99%	<	10	9.698.300	55,56%	18,65%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	96,99%						55,56%	18,65%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																		SR	ST						R	SR	DP3P2KB	
	2	08	02	2.02		Pemberdaayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatn Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis	8	131.369.016	2	11.302.200	1	14.999.550	0	-	1	15.454.900	1	15.454.900	100,00%	103,04%		3	26.757.100	37,50%	20,37%	DP3P2KB
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	131.369.016	1	11.302.200	1	14.999.550	0	-	1	15.454.900	1	15.454.900	100,00%	103,04%	>	2	26.757.100	50,00%	20,37%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	103,04%						50,00%	20,37%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																		ST	ST						SR	SR	DP3P2KB	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Lembaga	4	137.000.000	0	19.260.450	1	19.999.715	0	2.279.800	0	16.051.400	0	18.331.200	0,00%	91,66%		0	37.591.650	0,00%	27,44%	DP3P2KB
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	1	137.000.000	10	19.260.450	30	19.999.715	0	2.279.800	30	16.051.400	30	18.331.200	100,00%	91,66%	<	40	37.591.650	4000,00%	27,44%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	91,66%						4000,00%	27,44%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																		83,33%	97,23%						1368,52%	22,15%	DP3P2KB	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		T	ST						ST	SR	DP3P2KB	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																											DP3P2KB	
	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	759.899.288		130.329.700	87,5	254.198.820		23.749.300	8	116.639.800	8	140.389.100	9,14%				270.718.800			DP3P2KB
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Perempuan	Persen	4	288.230.998	0	52.470.000	85	74.799.820		10.864.800	12	48.528.600	12	59.393.400	14,12%	79,40%		12	111.863.400	300,00%	38,81%	DP3P2KB
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	150.854.374	1	52.470.000	1	59.800.000	0	5.600.000	1	39.115.000	1	44.715.000	100,00%	74,77%	<	2	97.185.000	50,00%	64,42%	DP3P2KB

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15											
		208032.010002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD	34	137.376.623	0	-	10	14.999.820	0	5.264.800	10	9.413.600	10	14.678.400	100,00%	97,86%	<	10	14.678.400	29,41%	10,68%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	86,32%					39,71%	37,55%	DP3P2KB					
Predikat Kinerja												ST	T					SR	SR	DP3P2KB					
		208032.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan	Persen	4	369.430.790	1	46.927.000	85	138.735.000	30	11.304.000	30	46.830.000	60	58.134.000	70,59%	41,90%		61	105.061.000	1525,00%	28,44%	DP3P2KB
		208032.020002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengaduan yang Memerlukan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	120	369.430.790	30	46.927.000	65	138.735.000	30	11.304.000	30	46.830.000	60	58.134.000	92,31%	41,90%	<	90	105.061.000	75,00%	28,44%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												92,31%	41,90%					75,00%	28,44%	DP3P2KB					
Predikat Kinerja												ST	SR					\$	SR	DP3P2KB					
		208032.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	4	102.237.500	1	30.932.700	85	40.664.000		1.580.500	3	21.281.200	3	22.861.700	3,53%	56,22%		4	53.794.400	100,00%	52,62%	DP3P2KB
		208032.030002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	80	102.237.500	20	30.932.700	20	40.664.000	0	1.580.500	0	21.281.200	0	22.861.700	0,00%	56,22%	<	20	53.794.400	25,00%	52,62%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0,00%	56,22%					25,00%	52,62%	DP3P2KB					
Predikat Kinerja												SR	R					SR	R	DP3P2KB					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)												64,10%	61,48%					46,57%	39,54%	DP3P2KB					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)												R	R					SR	SR	DP3P2KB					
		20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan kelompok perempuan	Persen	94,12	1.802.075.715		-	92,41	30.001.795		-		14.471.900	0	14.471.900	0,00%	48,24%		0	14.471.900	0,00%	0,80%	DP3P2KB
		208042.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan kelompok perempuan	Persen	4	1.692.075.715		-	92,41	30.001.795		-		14.471.900	0	14.471.900	0,00%	48,24%		0	14.471.900	0,00%	0,86%	DP3P2KB
		208042.010003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1.692.075.715		1	30.001.795	0	-	1	14.471.900	1	14.471.900	100,00%	48,24%	<	1	14.471.900	25,00%	0,86%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	48,24%					25,00%	0,86%	DP3P2KB					
Predikat Kinerja												ST	SR					SR	SR	DP3P2KB					
		208042.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	4	110.000.000		-				-		0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	DP3P2KB	
		208042.020002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	110.000.000		-						0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	DP3P2KB					
Predikat Kinerja												SR	SR					SR	SR	DP3P2KB					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)												50,00%	24,12%					12,50%	0,43%	DP3P2KB					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)												SR	SR					SR	SR	DP3P2KB					
		20805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen	35,29	76.087.641		14.874.050	32,35	19.999.895		-	0	17.588.650	0	17.588.650	0,00%	87,94%		0	32.462.700	0,00%	42,66%	DP3P2KB
		208052.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	76.087.641	1	14.874.050	1	19.999.895		-	0	17.588.650	0	17.588.650	0,00%	87,94%		1	32.462.700	25,00%	42,66%	DP3P2KB

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15														
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	76.087.641	1	14874050	1	19.999.895		-	1	17.588.650	1	17.588.650	100,00%	87,94%	<	2	32.462.700	50,00%	42,66%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	87,94%				50,00%	42,66%	DP3P2KB									
Predikat Kinerja												ST	T				SR	SR	DP3P2KB									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)												100,00%	87,94%				50,00%	42,66%	DP3P2KB									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)												ST	T				SR	SR	DP3P2KB									
	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	43.38	505.530.689		103.602.750	37,18	134.999.680	0	41.913.800	12	77.065.300	12	118.979.100	32,28%	88,13%		12	222.581.850	0,00%	44,03%	DP3P2KB
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	8	129.303.750	2	46.403.800	37,18	49.999.835		29.116.600	22	20.565.300	22	49.681.900	59,17%	99,36%		24	96.085.700	300,00%	74,31%	DP3P2KB
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	28	129.303.750	7	46.403.800	26	49.999.835	0	29.116.600	7	20.565.300	7	49.681.900	26,92%	99,36%	<	14	96.085.700	50,00%	74,31%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												26,92%	99,36%				50,00%	74,31%	DP3P2KB									
Predikat Kinerja												SR	ST				SR	S	DP3P2KB									
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	12	376.226.939	3	57.198.950	60000	84.999.845		12.797.200	9033	56.500.000	9033	69.297.200	15,06%	81,53%		9036	126.496.150	75300,00%	33,62%	DP3P2KB
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	600.000	86.202.500	74000	19.942.500	60000	20.000.240	0	-	50000	18.422.300,00	50000	18.422.300	83,33%	92,11%	<	124000	38.364.800	20,67%	44,51%	DP3P2KB
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	32	51.721.500	0	-	1	9.999.890	0	-	1	5.988.600,00	1	5.988.600	100,00%	59,89%	<	1	5.988.600	3,13%	11,58%	DP3P2KB
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	173.651.064	7	37.256.450	1	39.999.820	0	12.797.200	1	22.759.800	1	35.557.000	100,00%	88,89%	<	2	72.813.450	50,00%	41,93%	DP3P2KB
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	64.651.875	0	-	1	14.999.895	0	-	1	9.329.300	1	9.329.300	100,00%	62,20%	<	1	9.329.300	25,00%	14,43%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												95,83%	75,77%				24,70%	28,11%	DP3P2KB									
Predikat Kinerja												ST	T				SR	SR	DP3P2KB									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)												61,38%	87,57%				37,35%	51,21%	DP3P2KB									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)												R	T				SR	R	DP3P2KB									
	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Persen	100	575.112.500		86.171.800	100	371.795.330	25	73.561.000	25	149.949.526	50	223.510.526	50,00%	60,12%		50	309.682.326	50,00%	53,85%	DP3P2KB
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Lembaga	8	-	2	-	100	102.699.330	0	31.050.000	30	52.489.300	30	83.539.300	30,00%	81,34%		32	83.539.300	400,00%	#DIV/0!	DP3P2KB
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DBPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	Kegiatan				1	12.999.330	0	-	1	11.496.700	1	11.496.700	100,00%	88,44%	<	1	11.496.700	0,00%	0,00%	DP3P2KB	
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang				300	89.700.000	0	31.050.000	0	40.992.600	0	72.042.600	0,00%	80,32%	<	0	72.042.600	0,00%	0,00%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0,00%	80,32%				0,00%	0,00%	DP3P2KB									
Predikat Kinerja												SR	T				SR	SR	DP3P2KB									

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%	15			
		208072.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan	40	575.112.500	10	86.171.800	60	208.100.000	0	14.517.000	4	71.260.526	4	85.777.526	6,67%	41,22%		14	171.949.326	35,00%	29,90%	DP3P2KB		
		208072.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	290	575.112.500	40	86.171.800			0	14.517.000	50	71.260.526	50	85.777.526	0,00%	0,00%	<	90	171.949.326	31,03%	29,90%	DP3P2KB		
		208072.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Oang					60	208.100.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
		208072.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	4	-	1	-	2	60.996.000		27.994.000	1	26.199.700	1	54.193.700	50,00%	88,85%		2	54.193.700	50,00%	0,00%	DP3P2KB		
		208072.03	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang					35	60.996.000	30	27.994.000	0	26.199.700	30	54.193.700	0,00%	88,85%	<	30	54.193.700	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	88,85%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																		SR	T				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		0,00%	56,39%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	R				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)																		68,06%	75,64%				223,73%	27,51%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)																		S	T				ST	SR	DP3P2KB		
		214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.941.193.329		586.511.000		3.113.177.610		254.716.242		1.524.695.597		1.779.411.839							DP3P2KB			
		21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	73,53	65.440.000	38,24	-	64,71	30.000.000		17.598.642	38	141.383.950	38	158.982.592	58,72%	529,94%		76,24	158.982.592	103,69%	242,94%	DP3P2KB		
		214022.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	8	65.440.000	0	-	2	30.000.000		-		18.244.700	0	18.244.700	0,00%	60,82%		0	18.244.700	0,00%	27,88%	DP3P2KB		
		214022.01	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	65.440.000	0		1	5.000.000	0	-	1	4.774.600	1	4.774.600	100,00%	95,49%	<	1	4.774.600	33,33%	7,30%	DP3P2KB		
		214022.01	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan					2	25.000.000	0	-	1	13.470.100	1	13.470.100	50,00%	53,88%	<	1	13.470.100	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		75,00%	74,69%				16,67%	3,65%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																		S	S				SR	SR	DP3P2KB		
		214022.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			8	-	0	-	2		-	17.598.642	2	123.139.250	2	140.737.892	100,00%	0,00%		2	140.737.892	25,00%	0	DP3P2KB		
		214022.02	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									1	-	0	51.900.000	1	51.900.000	0,00%	0,00%	<	1	51.900.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
		214022.02	Pengolahan dan Pelaporan dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									1	17.598.642	0	71.239.250	1	88.837.892	0,00%	0,00%	<	1	88.837.892	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		37,50%	37,34%				8,33%	1,82%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
		21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	50,66	9.022.661.213		586.511.000	51,61	1.452.878.000		204.987.600	7	741.836.197	7	946.823.797	13,56%	65,17%		7	1.533.334.797	13,82%	16,99%	DP3P2KB		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = <	K	Rp	K		Rp		
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15
		2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	40	344.810.000	10	-	51,26	445.800.000	0	125.623.000	14	426.723.197	14	552.346.197	27,31%	123,90%		24	552.346.197	60,00%	160,19%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.01	0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	17	344.810.000	0	-			0	-	1	60.067.500,00	1	60.067.500	0,00%	0,00%	<	1	60.067.500	5,88%	17,42%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.01	0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan			-	4	216.600.000		61.138.000,00	0	137.079.997	1	198.217.997	25,00%	91,51%	<	1	198.217.997	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
		2	14	03	2.01	0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Musi (Lokakarya Monev)									2	13.500.000,00	0	18.625.000	2	32.125.000	0,00%	0,00%	<	2	32.125.000	0,00%	0,00%		
		2	14	03	2.01	0012 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen			-	3	214.200.000	1	18.500.000,00	0	173.315.700	1	191.815.700	33,33%	89,55%	<	1	191.815.700	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
		2	14	03	2.01	0014 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi			-	3	15.000.000	10	32.485.000,00	0	37.635.000	10	70.120.000	333,33%	467,47%	>	10	70.120.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					78,33%	129,71%				1,18%	3,48%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																					T	8T				SR	SR	DP3P2KB	
		2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kader	1012	431.012.500	0	206.800.000	253	252.800.000		67.480.000,00	68	150.880.000	68	218.360.000	26,88%	86,38%		68	425.160.000	6,72%	98,64%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.02	0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1088	431.012.500	136	206.800.000	253	252.800.000	253	67.480.000,00	0	150.880.000	253	218.360.000	100,00%	86,38%	<	389	425.160.000	35,75%	98,64%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	86,38%				35,75%	98,64%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																					8T	T				SR	8T	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Paskes	17	8.246.838.713	3	379.711.000	21	545.278.000	0	7.984.600,00	0,31	111.871.100	0,31	119.855.700	1,48%	21,98%		3,31	499.566.700	19,47%	6,06%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	34	83.082.353	19	35.175.000	21	47.395.000	21	5.100.000,00		24.563.200	21	29.663.200	100,00%	62,59%	<	40	64.838.200	117,65%	78,04%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		431.012.500	1446	43.399.000	1519	165.384.000	0	-	4	40.770.000	4	40.770.000	0,26%	24,65%	<	1450	84.169.000	0,00%	19,53%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	5	7.610.701.702	1	301.137.000	29	322.499.000	0	-	4	14.976.000	4	14.976.000	13,79%	4,64%	<	5	316.113.000	100,00%	4,15%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		52.800.000	0	-			0	-	1	9.463.000	1	9.463.000	0,00%	0,00%	<	1	9.463.000	0,00%	17,92%	DP3P2KB	
		2	14	03	2.03	0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang		69.242.158	0	-	20	10.000.000	0	2.884.600,00	20	22.098.900	20	24.983.500	100,00%	249,84%	>	20	24.983.500	0,00%	36,08%	DP3P2KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					42,81%	68,34%				43,53%	31,15%	DP3P2KB	
Predikat Kinerja																					SR	S				SR	SR	DP3P2KB	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= / <	K	Rp		K	Rp					
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
			2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	4	-	1	-	52	209.000.000	3.900.000	1	52.361.900	1	56.261.900	1,92%	26,92%		2	56.261.900	50,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan						1	3.000.000	0	750.000	3.750.000	0,00%	0,00%	<	0	3.750.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan				4	10.000.000	1	-	0	6.011.900	6.011.900	0,00%	60,12%	<	0	6.011.900	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung				52	199.000.000	0	900.000	52	45.600.000	46.500.000	0,00%	23,37%	<	0	46.500.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	27,83%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					55,29%	78,06%				20,11%	33,32%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					R	T				SR	SR	DP3P2KB		
			2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	119,49	2.853.092.116	-	104,78	1.630.299.610	0	32.130.000	41,23	641.475.450	41,227881	673.605.450	39,35%	41,32%		41,2278806	673.605.450	34,50%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kali	204	-	55	-	58	1.201.899.610	0	-	0,00	250.555.450	0	250.555.450	0,00%	20,85%		55	250.555.450	26,96%	0,00%	DP3P2KB	
			2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							0	-	1	6.000.000		6.000.000	0,00%	0,00%	<	0	6.000.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan				68	10.000.000	-	-			0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DP3P2KB			
			2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							0	-	18	233.570.150		233.570.150	0,00%	0,00%	<	0	233.570.150	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan				3	29.999.610	0	-	204	10.985.300	10.985.300	0,00%	36,62%	<	0	10.985.300	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
			2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang				204	1.161.900.000					-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	7,32%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
			2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Kali	204	2.853.092.116	0	-	58	428.400.000	0	32.130.000	0	390.920.000	0	423.050.000	0,00%	98,75%		0	423.050.000	0,00%	14,83%	DP3P2KB	
			2	14	04	2.02	0005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			224	2.853.092.116			2	428.400.000	224	32.130.000	0	390.920.000	224	423.050.000	0,00%	0,00%	<	226	851.450.000	0,00%	0,00%	DP3P2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					0,00%	3,66%				0,00%	0,00%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)																					30,93%	39,69%				9,48%	11,71%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)																					SR	SR				SR	SR	DP3P2KB		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					49,49%	57,66%				116,61%	19,61%	DP3P2KB		
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					SR	R				ST	SR	DP3P2KB		

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K		Rp			
												K	Rp	K	Rp													K	Rp	K
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
		1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	852.092.000	3	126.707.200	3	126.000.000	2	47.462.550	6	209.670.938	8	257.133.488	266,67%	204,07%	>	11	383.840.688	91,67%	45,05%	BPBD	
		1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8.058.616.000	2	1.648.438.807	2	1.138.223.892	2	652.700.000	6	3.046.107.865	8	3.698.807.865	400,00%	324,96%	>	10	5.347.246.672	125,00%	66,35%	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																355,56%		296,35%								113,89%		54,56%		BPBD
Predikat Kinerja																ST		ST								ST		R		BPBD
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	16	1.257.200.000		385.577.193	4	403.300.000	2	137.915.000		1.564.079.000	2	1.701.994.000	50,00%	422,02%		2	2.087.571.193	1250,00%	166,05%	BPBD	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	4	133.200.000	1	31.545.000	1	33.300.000	1	8.000.000	3	62.240.000	4	70.240.000	400,00%	210,93%	>	5	101.785.000	125,00%	76,42%	BPBD		
		1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	224.000.000	15	334.044.450	15	340.000.000	6	128.415.000	54	610.868.500	60	739.283.500	400,00%	217,44%	>	75	1.073.327.950	125,00%	479,16%	BPBD		
		1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	680.000.000	4	9.990.000	4	20.000.000	0	-	8	874.795.500	8	874.795.500	200,00%	4373,98%	>	12	884.785.500	75,00%	130,12%	BPBD		
		1 05 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	120	220.000.000	30	9.997.743	30	10.000.000	5	1.500.000	19	16.175.000	24	17.675.000	80,00%	176,75%	>	54	27.672.743	45,00%	12,58%	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	270,00%	1244,77%							92,50%	174,57%	BPBD
Predikat Kinerja																	ST	ST							ST	ST	BPBD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																	244,84%	32,15%							32,15%	32,15%	BPBD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																	ST	SR							SR	SR	BPBD
		1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	12.468.626.413		129.364.895	100	605.000.000	25	91.148.600	25	1.125.494.500	50	1.216.643.100	50,00%	201,10%		50	1.346.007.995	5000,00%	10,80%	BPBD		
		1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jenis	8,00	344.810.000		14.999.640	2	15.000.000		-		113.391.500	0	113.391.500	0,00%	755,94%		0	128.391.140	0,00%	37,24%	BPBD		
		1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	20000	344.810.000	5000	14.999.640	50	15.000.000		-	571	113.391.500	571	113.391.500	1142,00%	755,94%	>	5571	128.391.140	27,86%	37,24%	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	1142,00%	755,94%							27,86%	37,24%	BPBD
Predikat Kinerja																	ST	ST							SR	SR	BPBD
		1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis	40	11.250.710.663		30.569.300	10	390.000.000	2	91.148.600		773.665.800	2	864.814.400	20,00%	221,75%		2	895.383.700	500,00%	7,96%	BPBD		
		1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	200	1.772.754.413	50	3.999.505	50	40.000.000	0	-		0	-	0,00%	0,00%	<	50	3.999.505	25,00%	0,23%	BPBD			
		1 05 03 2.02 0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	350.000.000	0	-	1	203.500.000	1	91.148.600	2	296.193.400	3	387.342.000	300,00%	190,34%	>	3	387.342.000	300,00%	110,67%	BPBD		
		1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	400	5.387.656.250	0	-	100	75.000.000	0	-	43	56.052.600	43	56.052.600	43,00%	74,74%	<	43	56.052.600	1075,00%	104,04%	BPBD		
		1 05 03 2.02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	400	292.200.000	0	-	100	21.500.000	0	-	80	80.000.000	80	80.000.000	80,00%	372,09%	>	80	80.000.000	2000,00%	2737,85%	BPBD		
		1 05 03 2.02 0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	3.448.100.000	1	26.569.795	1	50.000.000	0	-	3	341.419.800	3	341.419.800	300,00%	682,84%	>	4	367.989.595	100,00%	10,67%	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	180,75%	330,00%							868,75%	740,81%	BPBD
Predikat Kinerja																	ST	ST							ST	ST	BPBD
		1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis	12	715.480.750		50.000.000	3	120.000.000		-		157.064.200	0	157.064.200	0,00%	130,89%		0	207.064.200	0,00%	28,94%	BPBD		
		1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	1200	715.480.750	300	50.000.000	300	40.000.000		-	198	111.432.000	198	111.432.000	66,00%	278,58%	>	498	161.432.000	41,50%	22,56%	BPBD		
		1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang				300	80.000.000		-	41	45.632.200		45.632.200	0,00%	57,04%	<	0	45.632.200	0,00%	0,00%	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	33,00%	167,81%							20,75%	11,28%	BPBD
Predikat Kinerja																	SR	ST							SR	SR	BPBD

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
		1 05 03 2,04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jenis	12	157.625.000		33.795.955	3	80.000.000		-		81.373.000	0	81.373.000	0,00%	101,72%		0	115.168.955	0,00%	73,07%	BPBD		
		1 05 03 2,04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	157.625.000	0	-	1	30.000.000		-	2	49.816.800	2	49.816.800	200,00%	166,06%	>	2	49.816.800	5000,00%	31,60%	BPBD		
		1 05 03 2,04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan	Kegiatan			1	33.795.955	1	50.000.000		-	2	31.556.200	2	31.556.200	200,00%	63,11%	<	3	65.352.155	0,00%	0,00%	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		200,00%	114,58%					2500,00%	15,80%	BPBD	
Predikat Kinerja																		ST	ST						ST	SR	BPBD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		388,94%	342,09%						854,34%	201,28%	BPBD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST						ST	ST	BPBD
		1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100,00	521.060.921		506.074.000	100	225.000.000	0	-	0	34.999.800	0	34.999.800	0,00%	15,56%		0	541.073.800	0,00%	103,84%	BPBD		
		1 05 04 2,01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	16	521.060.921		506.074.000	4	225.000.000		-		34.999.800	0	34.999.800	0,00%	15,56%		0	541.073.800	0,00%	103,84%	BPBD		
		1 05 04 2,01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000.000	0	-	1	5.000.000		-	1	4.999.800	1	4.999.800	100,00%	100,00%	<	1	4.999.800	2500,00%	2,50%	BPBD		
		1 05 04 2,01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	440	201.060.921	0	-	110	160.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPBD		
		1 05 04 2,01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	68	120.000.000	1	506.074.000	2	60.000.000		-	1	30.000.000	1	30.000.000	50,00%	50,00%	<	2	536.074.000	294,12%	446,73%	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	50,00%						931,37%	149,74%	BPBD
Predikat Kinerja																		SR	SR						ST	ST	BPBD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		50,00%	50,00%						931,37%	149,74%	BPBD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR						ST	ST	BPBD
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)																		227,92%	141,41%						605,95%	127,73%	BPBD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)																		ST	ST						ST	ST	BPBD
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		227,92%	141,41%						605,95%	127,73%	BPBD
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		ST	ST						ST	ST	BPBD

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
	Meningkatnya Pelayanan Publik				DINAS PERTANAHAN		13.352.491.311			3.916.676.952		1.628.896.939		1.644.302.844		3.273.199.783				3.273.199.783							
		2 10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		13.352.491.311			3.916.676.952		1.628.896.939		1.644.302.844		3.273.199.783				3.273.199.783							
		2 10 01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan administrasi pemerintah daerah	Persen	100	11.152.491.311	100	3.221.099.040	25	1.617.307.939	25	1.500.358.944	50	3.117.666.883			3.117.666.883							
		2 10 01 2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	61.844.124	6	10.000.000		-	9.999.700		9.999.700	0,00%	100,00%		6	9.999.700	75,00%	16,17%	Distanah			
		2 10 01 2,01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	61.844.124	5	11.967.420	5	10.000.000	0	- 0	9.999.700	9.999.700	0,00%	100,00%	<	5	21.967.120	25,00%	35,52%	Distanah		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	100,00%			25,00%	35,52%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	ST			SR	SR	Distanah			
		2 10 01 2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	9.545.860.924	3	12	2.825.209.120		1.473.862.714		1.216.067.914	0	2.689.930.628	0,00%	95,21%	3	2.689.930.628	6,25%	28,18%	Distanah		
		2 10 01 2,02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1960	9.545.860.924	490	2.797.210.645	490	2.825.209.120	245	1.473.862.714	0	1.216.067.914	245	2.689.930.628	50,00%	95,21%	<	735	5.487.141.273	37,50%	57,48%	Distanah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	95,21%			37,50%	57,48%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	ST			SR	R	Distanah			
		2 10 01 2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	428.119.540	12	101.767.382	12	80.140.000		37.785.100		104.097.370	0	141.882.470	0,00%	177,04%	-	243.649.852	0,00%	56,91%	Distanah	
		2 10 01 2,06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket/Jenis	120	78.109.000	15	9.330.772	30	20.000.000	0	6.225.900	0	13.774.100	0	20.000.000	0,00%	100,00%	=	15	29.330.772	12,50%	37,55%	Distanah
		2 10 01 2,06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Porsi	5200	28.777.000	724	3.900.000	1300	4.000.000	0	- 0	8.979.200	0	8.979.200	0,00%	224,48%	>	724	12.879.200	13,92%	44,76%	Distanah	
		2 10 01 2,06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis/Lembar	16	28.777.000	4	7.517.010	4	5.000.000	0	- 0	15.000.000	0	15.000.000	0,00%	300,00%	>	4	22.517.010	25,00%	78,25%	Distanah	
		2 10 01 2,06 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksamplar	2920	4.686.540	730	1.140.000	730	1.140.000	0	285.000	0	855.000	0	1.140.000	0,00%	100,00%	=	730	2.280.000	25,00%	48,65%	Distanah
		2 10 01 2,06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	128	287.770.000	32	79.879.600	32	50.000.000	16	31.274.200	0	65.489.070	16	96.763.270	50,00%	193,53%	>	48	176.642.870	37,50%	61,38%	Distanah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		10,00%	183,60%			22,78%	54,12%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	ST			SR	R	Distanah			
		2 10 01 2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	103.450.536	33	95	25.000.000	0	-		11.158.900	0	11.158.900	0,00%	44,64%	33	11.158.900	34,74%	10,79%	Distanah		
		2 10 01 2,07 11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	68	103.450.536	15	18.000.000	17	25.000.000	0	- 0	11.158.900	0	11.158.900	0,00%	44,64%	<	15	29.158.900	22,06%	28,19%	Distanah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	44,64%			22,06%	28,19%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	Distanah			
		2 10 01 2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	12	743.199.637	6	160.492.977	12	178.449.920	3	70.230.000	3	97.570.060	6	167.800.060	50,00%	94,03%	12	328.293.037	100,00%	44,17%	Distanah	
		2 10 01 2,08 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	400	4.111.000	100	1.000.000	100	1.000.000	50	1.000.000	0	-	50	1.000.000	50,00%	100,00%	=	150	2.000.000	37,50%	48,65%	Distanah
		2 10 01 2,08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	420.966.400	48	56.427.917	48	75.400.000	24	25.730.000	0	34.763.500	24	60.493.500	50,00%	80,23%	<	72	116.921.417	37,50%	27,77%	Distanah

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15																
		2 10 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	288	318.122.237	78	103.065.060	72	102.049.920	39	43.500.000	0	62.806.560	39	106.306.560	54,17%	104,17%	>	117	209.371.620	40,63%	65,81%	Distanah																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		51,39%	94,80%																						
Predikat Kinerja																		R	ST																						
		2 10 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	16	270.016.550	4	110.969.950	4	102.300.000	1	35.430.125	1	61.465.000	2	96.895.125	50,00%	94,72%		6	207.865.075	37,50%	76,98%	Distanah																
		2 10 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	136.896.300	1	32.820.000	1	33.300.000	6	17.041.725	0	14.285.400	6	31.327.125	600,00%	94,08%	<	7	64.147.125	175,00%	46,86%	Distanah																
		2 10 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	8.222.000	1	35.957.850	1	39.000.000	6	16.692.400	0	20.250.450	6	36.942.850	600,00%	94,73%	<	7	72.900.700	175,00%	886,65%	Distanah																
		2 10 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	61.665.000	1	33.075.000	1	20.000.000	1	-	0	19.700.000	1	19.700.000	100,00%	98,50%	<	2	52.775.000	50,00%	85,58%	Distanah																
		2 10 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	63.233.250	9	9.117.100	15	10.000.000	0	1.696.000	0	7.229.150	0	8.925.150	0,00%	89,25%	<	9	18.042.250	15,00%	28,53%	Distanah																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		325,00%	94,14%																						
Predikat Kinerja																		ST	ST																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		72,7%	102,1%																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		S	ST																						
Meningkatnya Pelayanan Publik		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah	Persen	0.67	380.000.000	-	0.55	35.000.000	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%				-	-	0,00%	0,00%	Distanah																
		2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Koordinasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	12	380.000.000	-	3	35.000.000	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%				-	-	0,00%	0,00%	Distanah																
		2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	16	200.000.000	4	15.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<			-	-	0,00%	0,00%	Distanah																
		2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	16	180.000.000	4	20.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<			-	-	0,00%	0,00%	Distanah																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%																						
Predikat Kinerja																		SR	SR																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	0,0%																						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR																						
		2 10 12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen	34.27	300.000.000	9	29.024.205	45,64	40.000.000	-	0	35.000.000	0	35.000.000	0,00%	87,50%				9	64.024.205	0,00%	21,34%	Distanah															
		2 10 12 7.01	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Kegiatan	4	300.000.000	1	29.024.205	1	40.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0,00%	87,50%				1	64.024.205	25,00%	21,34%	Distanah																
		2 10 12 7.01 01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Dokumen	16	300.000.000	2	29.024.205	5	40.000.000	0 0	0	35.000.000	0	35.000.000	0,00%	87,50%	<			2	64.024.205	12,50%	21,34%	Distanah															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	87,50%																						
Predikat Kinerja																		SR	T																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	87,5%																						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	T																						
		2 10 13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen	48.55	320.000.000	576.650.700	67.80	40.000.000			8.797.600		8.797.600	0,00%	21,99%				-	585.448.300	0,00%	182,95%	Distanah																
		2 10 13 7.01	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Jenis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Jenis	12	320.000.000	3	40.000.000			8.797.600	0	8.797.600	0,00%	21,99%				-	8.797.600	0,00%	2,75%	Distanah																	
		2 10 13 2.02 01	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	20	320.000.000	5	40.000.000	0 0	0	8.797.600	0	8.797.600	0,00%	21,99%	<			-	8.797.600	0,00%	2,75%	Distanah																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	21,99%																						
Predikat Kinerja																		SR	SR																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	22,0%																						
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR																						
		2 10 14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanian	Persen	70.18	500.000.000	288.325.350	43.86	50.000.000		2.136.400		37.392.300		39.528.700	0,00%	79,06%				-	327.854.050	0,00%	65,57%	Distanah															

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15														
	2	10	14	7.01	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Dokumen	8	240.000.000		2	25.000.000		1	19.968.500	1	19.968.500	50,00%	79,87%		1	19.968.500	12,50%	8,32%	Distanah			
	2	10	14	7.01	02	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Dokumen	20	240.000.000		5	25.000.000	0	0	0	19.968.500	0	19.968.500	0,00%	79,87%	<	-	19.968.500	0,00%	8,32%	Distanah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	79,87%				0,00%	8,32%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	T				SR	SR	Distanah			
	2	10	14	7.02	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian	Kegiatan	4	260.000.000	1	1	25.000.000		2.136.400		17.423.800	0	19.560.200	0,00%	78,24%		19.560.200	0,00%	7,52%	Distanah			
	2	10	14	7.02	02	Pembinaan Pertanian bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian	Orang	272	260.000.000		68	25.000.000	0	2.136.400	0	17.423.800	0	19.560.200	0,00%	78,24%	<			0,00%	0,00%	Distanah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	78,24%				0,00%	0,00%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	T				SR	SR	Distanah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	78,2%				0,0%	0,0%	Distanah			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	T				SR	SR	Distanah			
	2	10	16		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian	Ada		300.000.000		29.425.000	Tidak Ada/Tidak	490.577.912		2.136.400	Tidak Ada/Tidak	44.372.200	Tidak Ada/Tidak	46.508.600	0,00%	9,48%		-	75.933.600	0,00%	25,31%	Distanah	
	2	10	16	7.01	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANAH)	Dokumen	8	300.000.000	2	29.425.000	2	490.577.912		2.136.400		44.372.200	0	46.508.600	0,00%	9,48%		2	75.933.600	25,00%	25,31%	Distanah	
	2	10	16	7.01	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANAH)	Dokumen	16	300.000.000	2	29.425.000	4	490.577.912	0	2.136.400	0	44.372.200	0	46.508.600	0,00%	9,48%	<	2	75.933.600	12,50%	25,31%	Distanah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	9,48%				12,50%	25,31%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Distanah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	9,5%				12,5%	25,3%	Distanah			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	Distanah			
	2	10	17		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Pertanian		80	400.000.000	67	66.683.450	66.67	40.000.000		7.316.200	0	18.381.800	0	25.698.000	0,00%	64,25%		67	92.381.450	83,34%	23,10%	Distanah	
	2	10	17	7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Jenis Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Jenis	8	400.000.000	2	66.683.450	2	40.000.000		7.316.200	1	18.381.800	1	25.698.000	50,00%	64,25%		3	92.381.450	37,50%	23,10%	Distanah	
	2	10	17	7.01	01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.000.000		1	40.000.000	0	7.316.200	0	18.381.800	0	25.698.000	0,00%	64,25%	<	-	25.698.000	0,00%	12,85%	Distanah	
	2	10	17	7.01	02	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanian	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanian	Layanan	28	200.000.000	7	66.683.450	0	-				0	-	0,00%	0,00%	<	7	66.683.450	25,00%	33,34%	Distanah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	32,12%				12,50%	23,10%	Distanah			
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Distanah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		0,0%	32,1%				12,5%	23,1%	Distanah			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	Distanah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		10,39%	47,34%				11,30%	21,90%	Distanah			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		SR	SR				SR	SR	Distanah			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15														
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		158.212.561.128		30.998.964.040		18.766.013.869	-	18.766.013.869																	
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
	2	11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		158.212.561.128	31.343.215.723	30.998.964.040	18.766.013.869	-	18.766.013.869		50.109.229.592																
	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	140.147.141.496	21.418.894.926	100	25.468.186.000	25	18.715.614.219	0	-	25	18.715.614.219		40.134.509.145									
	2	11	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	80	620.784.839	30	87.820.400	12	15.000.000		128.622.750	0	-	0	128.622.750	0,00%	857,49%	30	216.443.150	37,50%	34,87%	DLH		
	2	11	01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	620.784.839		87.820.400	10	15.000.000	1	128.622.750	0	-	1	128.622.750	10,00%	857,49%	>		216.443.150	0,00%	34,87%	DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		10,00%	857,49%				0,00%	34,87%	DLH			
Predikat Kinerja																		SR	ST				SR	SR	DLH			
	2	11	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48	13.327.207.393	12	-	12	3.122.312.000	6	1.656.971.646	0	-	6	1.656.971.646	50,00%	53,07%	18	1.656.971.646	37,50%	12,43%	DLH		
	2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	434	13.327.207.393		434	3.122.312.000	216	1.656.971.646	0	-	216	1.656.971.646	49,77%	53,07%	<		0,00%	0,00%	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		49,77%	53,07%				0,00%	0,00%	DLH			
Predikat Kinerja																		SR	R				SR	SR	DLH			
	2	11	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	7.818.616.728	12	1.394.422.284	12	1.300.590.000	3	470.924.800	0	-	3	470.924.800	25,00%	36,21%	15	1.865.347.084	31,25%	23,86%	DLH		
	2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	45.083.493	120	39.442.500	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	120	39.442.500	100,00%	87,49%	DLH		
	2	11	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	76.857.058	4	1.244.050.000	1	1.244.450.000	1	425.820.000		-	1	425.820.000	100,00%	34,22%	<	5	1.669.870.000	100,00%	2172,70%	DLH
	2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.139.891.016	1	16.791.800	2	5.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	16.791.800	100,00%	0,24%	DLH		
	2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	2	10.353.443	2	1.140.000	1	1.140.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	1.140.000	100,00%	11,01%	DLH		
	2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	546.431.717	35	92.997.984	35	50.000.000	16	45.104.800	0	-	16	45.104.800	45,71%	90,21%	<	51	138.102.784	145,71%	25,27%	DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		29,14%	24,89%				109,14%	459,34%	DLH			
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	ST	DLH			
	2	11	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	105.420.090.952	12	19.936.652.242	12	19.005.964.800	6	15.720.696.123	0	-	6	15.720.696.123	50,00%	82,71%	18	35.657.348.365	37,50%	33,82%	DLH		
	2	11	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	8.627.871	2	1.500.000	2	1.500.000	0	1.000.000		-	0	1.000.000	0,00%	66,67%	<	2	2.500.000	100,00%	28,98%	DLH
	2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	54.479.006.376	4	16.784.217.698	4	11.050.916.529	2	15.389.671.523	0	-	2	15.389.671.523	50,00%	139,26%	>	6	32.173.889.221	150,00%	59,06%	DLH
	2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	50.932.456.705	4	3.150.934.544	4	7.953.548.271	2	330.024.600	0	-	2	330.024.600	50,00%	4,15%	<	6	3.480.959.144	150,00%	6,83%	DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33,33%	70,03%				133,33%	31,62%	DLH			
Predikat Kinerja																		SR	S				ST	SR	DLH			
	2	11	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	12.960.441.585	12		12	2.024.319.200	6	738.398.900	0	-	6	738.398.900	50,00%	36,48%	18	738.398.900	37,50%	5,70%	DLH		
	2	11	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	191.538.698	1	26.309.750	1	33.300.000	1	12.155.800		-	1	12.155.800	100,00%	36,50%	<	2	38.465.550	200,00%	20,08%	DLH
	2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	12.343.902.887	44	2.297.480.360	3	1.981.019.200	1	722.743.100		-	1	722.743.100	33,33%	36,48%	<	45	3.020.223.460	1500,00%	24,47%	DLH
	2	11	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	425.000.000	3	29.976.000	1	10.000.000	1	3.500.000		-	1	3.500.000	100,00%	35,00%	<	4	33.476.000	133,33%	7,88%	DLH
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																<							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		77,78%	36,00%				611,11%	17,48%	DLH			
Predikat Kinerja																		T	SR				ST	SR	DLH			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		41,7%	242,9%				180,1%	127,9%	DLH			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	ST				ST	ST	DLH			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= <	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15														
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunya RPPLH Kab/Kota		Ada Ada/Tidak	555.191.281		98.686.150	Ada/Tidak	80.000.000		-	0	-	0	-	0,00%		-	98.686.150		17,78%	DLH		
	2	11	02	2,01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	555.191.281	2	98.686.150	1	80.000.000		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		2	98.686.150	200,00%	17,78%	DLH	
	1	06	02	2,01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	200	555.191.281	1	98.686.150	1	30.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	1	98.686.150	0,50%	17,78%	DLH		
	1	06	02	2,01	03	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	-	1	50.000.000				0		0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	0,00%				0,25%	8,89%	DLH		
Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR	DLH		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																			0,0%	0,0%				0,3%	8,9%	DLH		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																			SR	SR				SR	SR	DLH		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai		2.029.422.500		24.500.000	65,35	20.000.000	65,35	44.500.000		-	65,35	44.500.000	100,00%	222,50%		65	69.000.000	0,00%	3,40%	DLH	
	2	11	03	2,01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		2.029.422.500	1	24.500.000	70,27	20.000.000		44.500.000		-		44.500.000	0,00%	222,50%		1	69.000.000	0,00%	3,40%	DLH	
	2	11	03	2,01	01	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Dokumen	2	2.029.422.500	2	24.500.000	1	20.000.000	3	44.500.000		3		44.500.000	300,00%	222,50%	>	5	69.000.000	250,00%	3,40%	DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			300,00%	222,50%				250,00%	3,40%	DLH		
Predikat Kinerja																			ST	ST				ST	SR	DLH		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																			300,0%	222,5%				250,0%	3,4%	DLH		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																			ST	ST				ST	SR	DLH		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)	Persentase luasan taman	Persen	88,50	7.855.298.351	29	821.910.575	61,95	1.080.000.000		-	0	-	28,91	-	47%	0,00%		58	821.910.575	100,00%	10,46%	DLH	
	2	11	04	2,01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persen	5	7.855.298.351	5	821.910.575	20	1.080.000.000		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		5	821.910.575	100,00%	10,46%	DLH	
	2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	HA	5	276.281.563	5	80.546.100	5	30.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	5	80.546.100	100,00%	28,15%	DLH		
	2	11	04	2,01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	HA	5	897.582.625	5	140.160.275	0	50.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	5	140.160.275	100,00%	15,62%	DLH		
	2	11	04	2,01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	190	6.681.434.163	104	601.204.200	104	1.000.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	104	601.204.200	54,74%	9,00%	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	0,00%				84,91%	17,92%	DLH		
Predikat Kinerja																			SR	SR				T	SR	DLH		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																			0,0%	0,0%				84,9%	17,9%	DLH		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																			SR	SR				T	SR	DLH		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	93,74	7.625.507.500	86	8.979.224.072	89,73	4.350.778.040				5.899.650		0	5.899.650	0%	0,14%		86	8.985.123.722	#VALUE!	117,83%	DLH
	2	11	11	2,01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	85	7.625.507.500	80	8.979.224.072	89,73	4.350.778.040		5.899.650		-	0	5.899.650	0,00%	0,14%		80	8.985.123.722	94,12%	117,83%	DLH	
	2	11	11	2,01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	68	450.000.000			68	500.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DLH		
	2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dokumen	2	3.375.507.500	2	549.850.000	1	100.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	2	549.850.000	100,00%	16,29%	DLH		
	2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Dokumen	2	3.800.000.000	1	8.429.374.072	1	3.197.250.720				0	-	0,00%	0,00%	<	1	8.429.374.072	50,00%	221,83%	DLH		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15											
		211201011	Peranganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang terangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton			85	553.527.320	0	5.899.650	0	0	5.899.650	0,00%	1,07%	<	-	5.899.650	0,00%	0,00%	DLH			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,27%				37,50%	59,53%	DLH	
															Predikat Kinerja		SR	SR				SR	R	DLH	
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		0,0%	0,3%				37,5%	59,5%	DLH	
															PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	SR				SR	R	DLH	
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		68,33%	93,13%				110,55%	43,53%	DLH	
															PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		S	ST				ST	SR	DLH	

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K		Rp		
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
		2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	1.300.000.000	4	365.163.390	4	279.138.560	4	170.150.000		173.821.900	4	343.971.900	100,00%	123,23%	>	8	709.135.290	50,00%	54,55%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	93,94%							44,44%	35,44%	DISDUKCAPIL	
Predikat Kinerja																		ST	ST							SR	SR	DISDUKCAPIL	
		2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	28	1.049.680.000	7	172.202.400	4	152.700.000	2	34.261.670	0	102.300.000	2	136.561.670	50,00%	89,43%		9	308.764.070	32,14%	29,42%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	4	160.000.000	1	33.127.000	1	33.300.000	1	13.991.670		19.265.000	1	33.256.670	100,00%	99,87%	<	2	66.383.670	50,00%	41,49%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	8	309.680.000	2	39.335.400	3	39.400.000	1	10.000.000		43.845.200	1	53.845.200	33,33%	136,66%	>	3	93.180.600	37,50%	30,09%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	300.000.000	3	79.990.000	3	50.000.000	0	-	3	29.839.800	3	29.839.800	100,00%	59,68%	<	6	109.829.800	50,00%	36,61%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	280.000.000	45	19.750.000	45	30.000.000	4	10.270.000	4	9.350.000	8	19.620.000	17,78%	65,40%	<	53	39.370.000	441,67%	14,06%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		62,78%	90,40%							144,79%	30,56%	DISDUKCAPIL	
Predikat Kinerja																		R	ST							ST	SR	DISDUKCAPIL	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		80,40%	83,33%							58,34%	35,37%	DISDUKCAPIL	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		T	T							R	SR	DISDUKCAPIL	
		2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	Persen	71,07	576.062.811	77,23	106.530.880	71,18	180.000.000	66,16	17.827.230	0	200.634.220	0	218.461.450	0,00%	121,37%		77,23	140.871.885	108,67%	24,45%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jenis	30	280.000.000	8	53.119.705	4	80.000.000	4	12.067.230	0	75.684.950	4	87.752.180	100,00%	109,69%		12	140.871.885	40,00%	50,31%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	40.000.000	2	14.014.525	4	20.000.000	2	1.999.230		8.129.150	2	10.128.380	50,00%	50,64%	<	4	24.142.905	50,00%	60,36%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	69120	20.000.000	0	-	17280	5.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL	
		2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	51840	80.000.000	12960	19.849.705	12960	30.000.000	12960	8.999.500	0	53.650.400	12960	62.649.900	100,00%	208,83%	>	25920	82.499.605	50,00%	103,12%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	200	80.000.000	0	-	20	10.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL	
		2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	80640	60.000.000	20160	19.255.475	20160	15.000.000	20160	1.068.500	0	13.905.400	20160	14.973.900	100,00%	99,83%	<	40320	34.229.375	50,00%	57,05%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	71,86%							30,00%	44,11%	DISDUKCAPIL	
Predikat Kinerja																		SR	S							SR	SR	DISDUKCAPIL	
		2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	Jenis	8	40.000.000		-	2	10.000.000		-	2	84.999.600	2	84.999.600	100,00%	850,00%		2	283.241.290	25,00%	708,10%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen	28	40.000.000			3	10.000.000	0	-	1	84.999.600	1	84.999.600	33,33%	850,00%	>	1	84.999.600	357,14%	21249,90%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33,33%	850,00%							357,14%	21249,90%	DISDUKCAPIL	
Predikat Kinerja																		SR	ST							ST	ST	DISDUKCAPIL	
		2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jenis	32	256.062.811		53.411.175	8	90.000.000	8	5.760.000		39.949.670	8	45.709.670	100,00%	50,79%		8	99.120.845	25,00%	38,71%	DISDUKCAPIL
		2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	20	120.000.000	5	38.606.855	4	50.000.000	5	5.760.000		33.968.900	5	39.728.900	125,00%	79,46%	<	10	78.335.755	50,00%	65,28%	DISDUKCAPIL

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
		2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	120.062.811	0	-	1	25.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL		
		2	12	02	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	187200	16.000.000	46800	14.804.320	46800	15.000.000	0	-	46800	5.980.770	46800	5.980.770	100,00%	39,87%	<	93600	20.785.090	50,00%	129,91%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		75,00%	39,78%				33,33%	65,06%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																		S	SR				SR	R	DISDUKCAPIL				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		52,78%	320,54%				140,16%	7119,69%	DISDUKCAPIL				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		R	ST				ST	ST	DISDUKCAPIL				
		2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	89,6	266.844.416		63.683.585	87,77	100.000.000	90,08	55.043.420	90,08	124.260.270	90,08	179.303.690	102,63%	179,30%		208.176.125				
		2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Dokumen	20	79.844.416		44.841.940	8100	40.000.000		13.694.400		41.244.500	0	54.938.900	0,00%	137,35%	0	99.780.840	0,00%	124,97%	DISDUKCAPIL	
		2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	4	39.604.349	1	24.857.190	5	25.000.000	1	13.694.400		26.264.200	1	39.958.600	20,00%	159,83%	>	2	64.815.790	50,00%	163,66%	DISDUKCAPIL
		2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	23904	40.240.067	7200	19.984.750	8100	15.000.000	0	-	7200	14.980.300	7200	14.980.300	88,89%	99,87%	<	14400	34.965.050	60,24%	86,89%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		54,44%	129,85%				55,12%	125,27%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																		R	ST				R	ST	DISDUKCAPIL				
		2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jenis	44	147.000.000		18.841.645	11	60.000.000	11	34.310.950		44.603.700	11	78.914.650	100,00%	131,52%		11	62.945.145	25,00%	42,82%	DISDUKCAPIL
		2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	20	40.000.000		5	30.000.000	5	4.838.000	0	20.161.500	5	24.999.500	0,00%	83,33%	<	5	24.999.500	25,00%	62,50%	DISDUKCAPIL	
		2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	48	20.000.000	12	18.841.645	1	15.000.000	1	7.410.800	1	11.693.200	2	19.104.000	200,00%	127,36%	>	14	37.945.645	29,17%	189,73%	DISDUKCAPIL
		2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	20	87.000.000		1	15.000.000	1	22.062.150	0	12.749.000	1	34.811.150	100,00%	232,07%	>	1	34.811.150	500,00%	4001,28%	DISDUKCAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	147,59%				184,72%	1417,84%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																		ST	ST				ST	ST	DISDUKCAPIL				
		2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jenis	16	40.000.000		0	-	4	7.038.070	0	38.412.070	4	45.450.140	0,00%	0,00%		4	45.450.140	25,00%	113,63%	DISDUKCAPIL	
		2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	20	40.000.000		0	-	5	7.038.070	5	38.412.070	10	45.450.140	0,00%	0,00%	<	10	45.450.140	5000,00%	11362,54%	DISDUKCAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				5000,00%	11362,54%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																		SR	SR				ST	ST	DISDUKCAPIL				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		51,48%	92,48%				1746,61%	4301,88%	DISDUKCAPIL				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		R	ST				ST	ST	DISDUKCAPIL				
		2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persen	100,00	707.383.810	100	545.203.655	100	551.199.067	100	220.911.140	0	360.518.760	0	581.429.900	0,00%	105,48%	100,00	20.000.000	100,00%	2,83%	DISDUKCAPIL	
		2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	16	86.084.000	4	160.084.000	4	10.000.000	4	10.000.000	0	-	4	10.000.000	100,00%	100,00%		8	20.000.000	50,00%	23,23%	DISDUKCAPIL
		2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Laporan	104	86.084.000	26	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	0		18	10.000.000	100,00%	100,00%	=	44	20.000.000	42,31%	23,23%	DISDUKCAPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	100,00%				42,31%	23,23%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																		ST	ST				SR	SR	DISDUKCAPIL				
		2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	32	581.299.810	8	385.119.655	8	511.199.067	8	210.911.140	0	335.527.460	8	546.438.600	100,00%	106,89%		16	756.075.235	50,00%	130,07%	DISDUKCAPIL

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																								
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp	K	Rp																										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15																					
		2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksana pengelola informasi administrasi kependudukan	Orang	96	349.299.810	23	229.630.915	12	220.000.000	12	208.950.560		317.493.760,00	12	526.444.320	100,00%	239,29%	>	35	756.075.235	36,46%	216,45%	DISDUKCAPIL																					
		2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Dokumen	8	152.000.000	5	4862740	2	10.000.000	2	1.960.580		8.038.100	2	9.998.680	100,00%	99,99%	<	7	14.861.420	87,50%	9,78%	DISDUKCAPIL																					
		2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Dokumen	48	80.000.000	12	150626000	12	281.199.067	0		12	9.995.600	12	9.995.600	100,00%	3,55%	<	24	160.621.600	50,00%	200,78%	DISDUKCAPIL																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	114,28%																					57,99%	142,34%	DISDUKCAPIL					
Predikat Kinerja																					ST	ST																							R	ST	DISDUKCAPIL			
		2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	12	40.000.000			3	30.000.000		0	3	24991300	3	24.991.300	100,00%	83,30%		3	63.227.300	25,00%	158,07%	DISDUKCAPIL																					
		2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen	8	40.000.000	2	38.236.000	2	30.000.000			2	24.991.300	2	24.991.300	100,00%	83,30%	<	4	63.227.300	50,00%	158,07%	DISDUKCAPIL																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	83,30%																						50,00%	158,07%	DISDUKCAPIL				
Predikat Kinerja																					ST	T																								SR	ST	DISDUKCAPIL		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					100,00%	99,19%																								50,10%	107,88%	DISDUKCAPIL		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					ST	ST																									SR	ST	DISDUKCAPIL	
		2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	KETERSEDIAAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	Ada/Tidak	Ada	100.216.635			Ada	10.000.000	Ada	0	Ada	9.993.100	100	9.993.100	0,00%	99,93%			9.993.100	0,00%	9,97%																						
		2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen	8	100.216.635	2	-	2	10.000.000			2	9.993.100	2	9.993.100	100,00%	99,93%		4	9.993.100	50,00%	9,97%	DISDUKCAPIL																					
		2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Data Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dokumen	160	100.216.635	0	0	1	10.000.000			1	9.993.100	1	9.993.100	100,00%	99,93%	<	1	9.993.100	62,50%	997,15%	DISDUKCAPIL																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	99,93%																							62,50%	997,15%	DISDUKCAPIL			
Predikat Kinerja																					ST	ST																									R	ST	DISDUKCAPIL	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					100,00%	99,93%																									62,50%	997,15%	DISDUKCAPIL	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					ST	ST																										R	ST	DISDUKCAPIL
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					76,93%	139,10%																										411,54%	2512,39%	DISDUKCAPIL
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					T	ST																										ST	ST	DISDUKCAPIL

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi ≥/=/<	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9*10		12=11/8		13 = 7*11		14=13/6*100%		15				
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)				95,38%	113,59%							94,57%	158,20%	DPMG
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)				ST	ST							ST	ST	DPMG
		2	13	5																					DPMG			
		2	13	05	2.01																				DPMG			
		2	13	05	2.01	02																			DPMG			
		2	13	05	2.01	03																			DPMG			
		2	13	05	2.01	05																			DPMG			
		2	13	05	2.01	06																			DPMG			
		2	13	05	2.01	07																			DPMG			
		2	13	05	2.01	08																			DPMG			
		2	13	05	2.01	09																			DPMG			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				102,73%	246,49%							162,39%	166,52%	DPMG
														Predikat Kinerja				ST	ST						ST	ST	DPMG	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)				102,73%	246,49%						162,39%	166,52%	DPMG	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)				ST	ST						ST	ST	DPMG	
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)				107,73%	168,57%						235,60%	126,29%	DPMG	
														PREDIKAT KINERJA (PER OPD)				ST	ST						ST	ST	DPMG	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK 5/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi s/=/<	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15															
	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas					DINAS PERHUBUNGAN				23.356.099.878		3.681.117.527		7.079.199.546		1.893.591.523		-		1.893.591.523					5.574.709.050				
		2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				23.356.099.878		3.681.117.527		7.079.199.546		1.893.591.523		-		1.893.591.523					5.574.709.050				
		2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	19.540.961.265		3.681.117.527	100	4.794.199.546	25	1.835.461.523	0	-	25	1.835.461.523					5.516.579.050				
		2	15	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	2	12.189.700	2	14.175.000	0	37.306.850	0	-	0	37.306.850	0,00%	263,19%		2	49.496.550	100,00%	247,48%	Dishub	
		2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	20.000.000	2	12.189.700	2	14.175.000	2	37.306.850		2	37.306.850	100,00%	263,19%	>	4	49.496.550	44,44%	247,48%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	263,19%				44,44%	247,48%	Dishub	
Predikat Kinerja																					ST	ST				SR	ST	Dishub	
		2	15	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	10.580.000.000	6	2.252.418.578	12	2.335.336.000	6	1.200.532.468	0	-	6	1.200.532.468	50,00%	51,41%		12	3.452.951.046	25,00%	32,64%	Dishub	
		2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1152	10.580.000.000	288	2.252.418.578	288	2.335.336.000	144	1.200.532.468	0	-	144	1.200.532.468	50,00%	51,41%	<	432	3.452.951.046	37,50%	32,64%	Dishub
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00%	51,41%				37,50%	32,64%	Dishub	
Predikat Kinerja																					SR	R				SR	SR	Dishub	
		2	15	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	125.000.000		0		-				0		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Dinsos	
		2	15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	125.000.000		0		-			0		-	0,00%	0,00%	<			0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Dishub	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	Dishub	
		2	15	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	776.450.875	6	192.322.078	12	275.154.466	0	24.464.000	0	-	0	24.464.000	0,00%	8,89%		6	216.786.078	12,50%	27,92%	Dishub	
		2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	2	29.400.028	2	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	29.400.028	50,00%	105,00%	Dishub
		2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	168.450.875	2	6.177.400	2	151.014.466	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	6.177.400	25,00%	3,67%	Dishub
		2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	45.000.000	2	27.841.300	2	28.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	27.841.300	25,00%	61,87%	Dishub
		2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	135.000.000	1	1.140.000	1	1.140.000	1	285.000	0	-	1	285.000	100,00%	25,00%	<	2	1.425.000	25,00%	1,06%	Dishub
		2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	400.000.000	50	127.763.350	50	70.000.000	10	24.179.000	0	-	10	24.179.000	20,00%	34,54%	<	60	151.942.350	30,00%	37,99%	Dishub
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,00%	11,91%				31,00%	41,92%	Dishub	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	Dishub	
		2	15	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Unit	26	34.870.390		-	7	30.000.000	1	0		-	1	-	14,29%	0,00%		1	-	3,85%	0,00%	Dishub	
		2	15	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.870.390	-	0	1	30.000.000	0	29187100		0	29.187.100	0,00%	0,00%	<	-	29.187.100	0,00%	83,70%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	83,70%	Dishub	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	T	Dishub	
		2	15	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Bulan	48	5.332.640.000	6	1.224.187.171	12	1.254.134.080	6	467.488.505	0	-	6	467.488.505	50,00%	37,28%		12	1.691.675.676	25,00%	31,72%	Dishub	
		2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	10.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	0	500.000		-	0	500.000	0,00%	33,33%	<	1	2.000.000	25,00%	20,00%	Dishub
		2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	510.000.000	12	116.095.891	12	87.300.000	0	35.338.505		-	0	35.338.505	0,00%	40,48%	<	12	151.434.396	25,00%	29,69%	Dishub
		2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	48	4.812.640.000	12	1.106.591.280	12	1.165.334.080	3	431.650.000	0	-	3	431.650.000	25,00%	37,04%	<	15	1.538.241.280	31,25%	31,96%	Dishub
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,33%	36,95%				27,08%	27,22%	Dishub	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	Dishub	
		2	15	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Unit	57	2.671.000.000		55	885.400.000	1	105.669.700	0	-	1	105.669.700	1,82%	11,93%		1	105.669.700	1,75%	3,96%	Dishub		
		2	15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	146.000.000		1	33.300.000	1	7.213.800	0		1	7.213.800	100,00%	21,66%	<	1	7.213.800	100,00%	4,94%	Dishub	
		2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	2.370.000.000		15	709.100.000	0	55.593.600		0	55.593.600	0,00%	7,84%	<	-	55.593.600	0,00%	2,35%	Dishub		
		2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	55.000.000		15	8.000.000	0	42.862.300		0	42.862.300	0,00%	535,78%	>	-	42.862.300	0,00%	77,93%	Dishub		

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = <	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15											
		2150120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000			1	135.000.000	0	-			0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		25,00%	141,32%				25,00%	21,30%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	ST				SR	SR	Dishub
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		29,6%	72,1%				23,6%	64,9%	Dishub
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	S				SR	R	Dishub
	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	21502	PROGRAM PENYELenggaraAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Persen	45.83	3.815.138.613	-	29.17	2.285.000.000	100	58.130.000	0	-	100	58.130.000	0%	2,54%		100	58.130.000	0	1,52%	Dishub	
		215022.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	Unit	510	1.630.000.000		117	360.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0201	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	5	440.000.000		1	75.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	425	695.000.000		100	180.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0203	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	4	175.000.000		1	30.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	76	320.000.000		19	75.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Dishub
		215022.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	Unit	2	565.138.613		2	1.360.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0304	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	565.138.613		1	1.360.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Dishub
		215022.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Periode penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Bulan	48	630.000.000		12	182.000.000		-	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	140.000.000		1	50.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0502	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	Orang	4	90.000.000		1	50.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0504	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	8800	240.000.000		1600	50.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0507	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	32	85.000.000		8	20.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0510	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	75.000.000		1	12.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Dishub
		215022.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Periode penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulan	48	-	-	12	180.000.000		-	-	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	Dishub	
		215022.0615	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3	-	-	1	50.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0616	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	3	-	-	45	130.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Dishub
		215022.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Periode pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Bulan	48	990.000.000		12	203.000.000	3	58.130.000	0	-	3	58.130.000	25,00%	28,64%		3	58.130.000	6,25%	5,87%	Dishub	
		215022.0803	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	9	70.000.000		2	8.000.000				0	-	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
		215022.0805	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	16	820.000.000		0	-	1	58.130.000	0	-	1	58.130.000	0,00%	0,00%	<	1	58.130.000	6,25%	6,32%	Dishub	
		215022.0807	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	0	-	-	4	195.000.000				0	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Dishub	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				3,13%	3,16%	Dishub
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Dishub
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		0,0%	0,0%				0,6%	0,6%	Dishub
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		SR	SR				SR	SR	Dishub
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		14,81%	36,06%				12,10%	32,76%	Dishub

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												SMSTR 1		SMSTR 2										
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																	SR	SR				SR	SR	Dishub

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

			2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120		52.000.000	0		14.950.000	30		5.000.000	4,00		2.950.000	4		2.050.000							5.000.000	0,00%	100,00%	=	-		19.950.000	0,00%	38,37%		DISKOMINFO																				
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		37,50%	74,83%																																	21,88%	25,61%		PK	
																						Predikat Kinerja		SR	S																																	SR	SR		DISKOMINFO	
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		78,04%	80,47%																																	38,07%	31,76%		PK	
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		T	T																																SR	SR		PK		
			2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK	Persen	30		507.401.750	93		35.574.815	23,68		30.000.000	11,68		477.819.400	11,68		1.365.941.080	23,36		1.843.760.480	98,65%	6145,87%							116	1.879.335.295	387,87%	370,38%		DISKOMINFO																				
			2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Periode Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	4		507.401.750	1		35.574.815	1		30.000.000	0,5		477.819.400	0,5		1.365.941.080	1		1.843.760.480	100,00%	6145,87%							2	1.879.335.295	50,00%	370,38%		DISKOMINFO																				
			2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	200		195.000.000	50		13.397.675	50		10.000.000	17		10.502.600	33		4.500.000	50		15.002.600	100,00%	150,03%		>	100		28.400.275	50,00%	14,56%		DISKOMINFO																							
			2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0		0		0		0		9		19.443.200	3		4.500.000	12		23.943.200	0,00%	0,00%		<	12		23.943.200	0,00%	0,00%		DISKOMINFO																								
			2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	40		45.000.000	10		10.328.510	10		10.000.000	8		7.434.000	11		13.480.000	19		20.914.000	190,00%	209,14%		>	29		31.242.510	72,50%	69,43%		DISKOMINFO																							
			2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	120		147.401.750	30		11.848.630	30		10.000.000	10		26.439.600	17		43.461.080	27		69.900.680	90,00%	699,01%		>	57		81.749.310	47,50%	55,46%		DISKOMINFO																							
			2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	48		120.000.000	0		0		0		38		414.000.000	72		1.300.000.000	110		1.714.000.000	0,00%	0,00%		<	110		1.714.000.000	229,17%	1428,13%		DISKOMINFO																							
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		76,00%	211,63%																																79,83%	313,56%		PK		
																						Predikat Kinerja		T	ST																																T	ST		PK		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		76,00%	211,63%																																		79,83%	313,56%		PK
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		T	ST																																T	ST		PK		
			2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	Persen	23,53		620.200.000	80		788.222.528	11,76		553.000.000	0		961.621.700	0		139.110.810	0		1.100.732.510	0,00%	199,05%							80	1.888.955.038	339,99%	304,57%		DISKOMINFO																				
			2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4		260.000.000	1		718.579.328	1		500.000.000	0,5		919.000.000	0,5		111.810.810	1		1.030.810.810	100,00%	206,16%							2	1.749.390.138	50,00%	672,84%		DISKOMINFO																				
			2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Jaringan Intra Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	4		260.000.000	1		718.579.328	1		500.000.000	0,5		919.000.000	0,5		111.810.810	1		1.030.810.810	100,00%	206,16%		>	2		1.749.390.138	50,00%	672,84%		DISKOMINFO																							
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	206,16%																																50,00%	672,84%		PK		
																						Predikat Kinerja		ST	ST																																SR	ST		PK		
			2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Periode Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	4		360.200.000	1		69.643.200	1		53.000.000	0,5		42.621.700	0,5		27.300.000	1		69.921.700	100,00%	131,93%							2	139.564.900	50,00%	38,75%		DISKOMINFO																				
			2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	28		190.000.000	14		29.963.800	7		30.000.000	3		11.200.000	4		18.800.000	7		30.000.000	100,00%	100,00%		=	21		59.963.800	75,00%	31,56%		DISKOMINFO																							
			2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2400		125.200.000	60		18.836.300	600		10.000.000	60		3.000.000	90		7.000.000	150		10.000.000	25,00%	100,00%		=	210		28.836.300	8,75%	23,03%		DISKOMINFO																							
			2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	8		45.000.000	2		20.843.100	2		13.000.000	1,75		28.421.700	0,25		1.500.000	2		29.921.700	100,00%	230,17%		>	4		50.764.800	50,00%	112,81%		DISKOMINFO																							
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		75,00%	143,39%																																	44,58%	55,80%		DISKOMINFO	
																						Predikat Kinerja		S	ST																																SR	R		DISKOMINFO		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		87,50%	174,78%																																	47,29%	364,32%		DISKOMINFO	
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		T	ST																																SR	ST		DISKOMINFO		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)		80,51%	155,63%																																	55,06%	236,55%		DISKOMINFO	
																						PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)		T	ST																																R	ST		DISKOMINFO		
			2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					140.000.000			14.988.000			20.000.000			7.000.000			41.799.310	0		48.799.310	244,00%												-		DISKOMINFO																			
			2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PENGAMANAN DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI	Persen	11,76		140.000.000	13		14.988.000	5,88		20.000.000	0,00		7.000.000	0,09		41.799.310	0,088		48.799.310	1,50%	244,00%							13	63.787.310	111,29%	45,56%		DISKOMINFO																				
			2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Periode Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	4		140.000.000	1		14.988.000	1		20.000.000	0,5		7.000.000	0,5		41.799.310	1		48.799.310	100,00%	244,00%							2	63.787.310	50,00%	45,56%		DISKOMINFO																				
			2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	136		70.000.000	0		0		0		4		3.000.000	30		21.987.500	34		24.987.500	0,00%	0,00%		<	34		24.987.500	25,00%	35,70%		DISKOMINFO																							
			2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	136		70.000.000	34		14.988.000	34		20.000.000	5		4.000.000	29		19.811.810	34		23.811.810	100,00%	119,06%		>	68		38.799.810	50,00%	55,43%		DISKOMINFO																							
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	59,53%																																	37,50%	45,56%		DISKOMINFO	
																						Predikat Kinerja		SR	R																																SR	SR		DISKOMINFO		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		50,00%	59,53%																																	37,50%	45,56%		DISKOMINFO	
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	R																																SR	SR		DISKOMINFO		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)		50,00%	59,53%																																	37,50%	45,56%		DISKOMINFO	
																						PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)		SR	R																																SR	SR		DISKOMINFO		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		65,26%	107,58%																																		46,28%	141,05%		DISKOMINFO
																						PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		S	ST																																	SR	ST		DISKOMINFO	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp.	K	Rp.	Realisasi >100%	K	Rp.	K	Rp.					
												K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13=7+11		14=13/6*100%		15					
						150.770.656.028		4.862.048.150		5.706.525.502		3.711.302.031		3.023.007.664		6.734.309.695							DISPORAPAR						
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.744.809.028		4.621.048.150		5.506.525.502		3.705.318.231		2.866.112.564		6.571.430.795				11.192.478.945		DISPORAPAR					
		2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			62.744.809.028		4.621.048.150		5.506.525.502		3.705.318.231		2.866.112.564		6.571.430.795				11.192.478.945		DISPORAPAR					
	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH	Persen	100	17.428.996.528	100	3.187.443.500	100	3.089.795.000	75,88	1.723.211.383	168,56	1.173.599.164	244,43842	2.896.810.547	244,44%	93,75%		344	6.084.254.047	344,44%	34,91%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	28	66.117.318	7	30.305.540	7	15.000.000	3	17.925.400	2	15.073.800	5	32.999.200	71,43%	219,99%		12	63.304.740	42,86%	95,75%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	20	15.344.045	5	30.305.540	5	15.000.000	3	17.925.400	2	15.073.800	5	32.999.200	100,00%	219,99%	>	10	63.304.740	50,00%	412,57%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	6.465.188	0	-							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	4	6.465.188	0	-							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	17.262.051	0	-							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4	9.482.275	0	-							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	5.549.286									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	5.549.286									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																14,29%	31,43%					7,14%	58,94%	DISPORAPAR					
Predikat Kinerja																SR	SR					R		DISPORAPAR					
		2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	24	8.752.443.193	6	2.498.605.904	6	2.589.555.000	210,00	1.159.521.073	210,00	923.971.801	420	2.083.492.874	7000,00%	80,46%		426	4.582.098.778	1775,00%	52,35%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	1680	8.717.962.193	420	2.498.605.904	420	2.589.555.000	210	1.159.521.073	210	923.971.801	420	2.083.492.874	100,00%	80,46%	<	840	4.582.098.778	50,00%	52,56%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	4.310.125		-							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	laporan	4	8.620.250									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	laporan	40	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	48	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																12,50%	10,06%					6,25%	6,57%	DISPORAPAR					
Predikat Kinerja																SR	SR					SR		DISPORAPAR					
		2	19	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.860.750		-		-					-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Realisasi Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4.310.125									-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	

				2	19	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	4.310.125								-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				
				2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun		366.360.625			-				-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
				2	19	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4	43.101.250							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	180	215.506.250							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	4.310.125							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	4	4.310.125							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	4	4.310.125							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4	86.202.500							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	8	4.310.125							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	8	4.310.125							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				
				2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	dokumen	44	844.784.500	11	113.601.575	11	71.140.000	15	60.359.200	14	51.416.000	29	111.775.200	263,64%	157,12%		40	225.376.775	90,91%	26,68%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	107.753.125						-			-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
				2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	129.303.750	10	21.996.495	10	20.000.000	3	13.083.600	3	21.852.000	6	34.935.600	60,00%	174,68%	>	16	56.932.095	40,00%	44,03%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	21.550.625	0	-				-			-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
				2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	43.101.250	10	6.000.000	10	5.000.000	1	2.000.000	4	10.000.000	5	12.000.000	50,00%	240,00%	>	15	18.000.000	37,50%	41,76%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	20	64.651.875	5	6.999.900	5	5.000.000	2,00	4.999.900	0,00	-	2	4.999.900	40,00%	100,00%	<	7	11.999.800	35,00%	18,56%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen/bulan	80	10.775.313	20	1.140.000	20	1.140.000	6,00	570.000	6,00	570.000	12	1.140.000	60,00%	100,00%	=	32	2.280.000	40,00%	21,16%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	4	8.620.250	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	2.155.063	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	431.012.500	15	77.465.180	15	40.000.000	3	39.705.700	1	18.994.000	4	58.699.700	26,67%	146,75%	>	19	136.164.880	31,67%	31,59%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4	4.310.125	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	21.550.625	0	-				-			-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				21,52%	69,22%				16,74%	14,28%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																				SR	S				SR	SR	DISPORAPAR				
				2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	5.301.453.750	8	109.550.000	8	80.000.000	8	325.815.000	1	-	9	325.815.000	112,50%	407,27%		17	435.365.000	53,13%	8,21%	DISPORAPAR
				2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	2.155.062.500							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	4	2.155.062.500							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	12	215.506.250							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	21.550.625							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	20	21.550.625							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	431.012.500							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
				2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	215.506.250			1,00	325.815.000	0,00	-		325.815.000	0,00%	0,00%	<	-	-	325.815.000	0,00%	151,19%	DISPORAPAR	
				2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	86.202.500	1	109.550.000	1	80.000.000			0		-	0,00%	0,00%	<	1	109.550.000	25,00%	127,08%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	0,00%				3,13%	34,78%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				

		2	19	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	16	1.562.778.225	4	242.468.908	4	199.000.000	6	106.959.110	6	148.232.563	12	255.191.673	300,00%	128,24%		16	497.660.581	100,00%	31,84%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	6.465.188	1	1.495.000	1	1.500.000	1	1.028.500	0	1.960.200	12	2.988.700	100,00%	199,25%	>	2	4.483.700	50,00%	69,35%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	48	441.356.800	12	43.407.668	12	77.000.000	3	18.930.610	4	22.222.763	7	41.153.373	58,33%	53,45%	<	19	84.561.041	39,58%	19,16%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	20	64.651.875	0	-						-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	40	1.050.304.363	10	197.566.240	10	120.500.000	2	87.000.000	2	124.049.600	4	211.049.600	40,00%	175,14%	>	14	408.615.840	35,00%	38,90%	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					49,58%	106,96%				31,15%	31,85%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																					SR	ST				SR	SR	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	32	509.198.168	8	192.911.573	8	135.100.000	3,00	52.631.600	0,00	34.905.000	3	87.536.600	37,50%	64,79%		11	280.448.173	34,38%	55,08%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	121.286.918	1	59.513.800	1	60.100.000	1,00	20.296.725	0,00	12.558.000	1	32.854.725	100,00%	54,67%	<	2	92.368.525	50,00%	76,16%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	86.202.500	0	-	-	1,00	13.479.875	0,00	11.352.000	1	24.831.875	0,00%	0,00%	<	1	24.831.875	25,00%	28,81%	DISPORAPAR	
		2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	8	43.101.250	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	21.550.625	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	4	21.550.625	0	-					-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	86.202.500	1	133.397.773	1	75.000.000	1,00	18.855.000	0,00	10.995.000	1	29.850.000	100,00%	39,80%	<	2	163.247.773	50,00%	189,38%	DISPORAPAR
		2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	86.202.500							-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	43.101.250							-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					25,00%	11,81%				15,63%	36,79%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					15,36%	28,68%				10,00%	22,90%	DISPORAPAR	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	100	13.300.000.000	75	213.620.000	100	225.000.000	120	200.000.000	5	220.900.000	125	420.900.000	125,00%	187,07%		200	634.520.000	200,00%	4,77%	DISPORAPAR	
		2	19	02	2.01	Penyusunan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	5	12.280.000.000	5	163.620.000	5	150.000.000	120	200.000.000	5	50.000.000	125	250.000.000	2500,00%	166,67%		130	413.620.000	2600,00%	3,37%	DISPORAPAR	
		2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	orang	120	300.000.000		30	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	orang	2200	3.300.000.000		550	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	orang	200	320.000.000		50	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	orang	3200	4.800.000.000	800	107.720.000	800	100.000.000	120	200.000.000	0,00	-	120	200.000.000	15,00%	200,00%	>	920	307.720.000	28,75%	6,41%	DISPORAPAR
		2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	12	1.040.000.000		3	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	unit	8	1.000.000.000		2	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	orang	40	200.000.000	10	55.900.000	10	50.000.000	0	-	5,00	50.000.000	5	50.000.000	50,00%	100,00%	=	15	105.900.000	37,50%	52,95%	DISPORAPAR

		2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh	orang	200	400.000.000		50	22.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
		2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	orang	560	920.000.000		140	235.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		7,22%	33,33%				7,36%	6,60%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				
		2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	1	1.020.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	0,00	-	1,00	170.900.000	1	170.900.000	100,00%	227,87%		2	220.900.000	2,00	0	DISPORAPAR
		2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	orang	520	420.000.000		130	19.000.000		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00	-	0,00	-	DISPORAPAR			
		2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen	8	600.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	0,00	-	1,00	170.900.000	1	170.900.000	50,00%	227,87%	>	3	220.900.000	0,38	0	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		25,00%	113,93%				18,75%	18,41%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																		SR	ST				SR	SR	DISPORAPAR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		16,11%	73,63%				13,06%	12,50%	DISPORAPAR				
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	S				SR	SR	DISPORAPAR				
		2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	8	29.214.231.250	3	1.094.984.650	6	2.141.730.502	0	1.211.633.100	1	1.308.846.500	1	2.520.479.600	0,00%	117,68%		4	3.615.464.250	50,00%	12,38%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8	7.758.225.000	2	315.000.000	2	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		2	315.000.000	25,00%	4,06%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	cabor	48	862.025.000		6	30.000.000		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR			
		2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	8	431.012.500		2	30.000.000		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR			
		2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	sarana&prasarana	4	6.465.187.500	1	315.000.000	1	200.000.000		-		-	0,00%	0,00%	<	1	315.000.000	25,00%	4,87%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				8,33%	1,62%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				
		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8	7.879.112.500	2	159.984.650	2	1.441.730.502	1	10.633.100	1	1.109.846.500	2	1.120.479.600	100,00%	77,72%		4	1.280.464.250	50,00%	16,25%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	8	3.448.100.000	2	159.984.650	2	100.000.000	0	-	1	328.253.900	1	328.253.900	50,00%	328,25%	>	3	488.238.550	37,50%	14,16%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (POPDA)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	4	4.000.000.000	0	-	1.341.730.502	0	10.633.100	1	781.592.600	1	792.225.700	0,00%	0,00%	<	1	792.225.700	25,00%	19,81%	DISPORAPAR	
		2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	orang	8	431.012.500	0	-				-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		16,67%	109,42%				20,83%	11,32%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																		SR	ST				SR	SR	DISPORAPAR				
		2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen laporan	dokumen	12	2.586.075.000		-	3	74.200.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	400	431.012.500						-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	kali	4	862.025.000						-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR		
		2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang	20	431.012.500		5	14.200.000		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR			
		2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	80	431.012.500		20	30.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Data	40	431.012.500		10	30.000.000				-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR				
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR				
		2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8	4.525.631.250	2	620.000.000	2	500.000.000	1,00	1.201.000.000	1,00	199.000.000	2	1.400.000.000	100,00%	280,00%		4	2.020.000.000	50,00%	44,63%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	dokumen	20	862.025.000						-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	DISPORAPAR		

		2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (15 cabor/ organisasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	dokumen	20	3.232.593.750	5	620.000.000	5	500.000.000	1,00	1.201.000.000	1,00	199.000.000	2	1.400.000.000	40,00%	280,00%	>	7	2.020.000.000	35,00%	62,49%	DISPORAPAR	
		2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	20	215.506.250											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	organisasi	20	215.506.250			5	50.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						10,00%	70,00%				8,75%	15,62%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																						SR	S				SR	SR	DISPORAPAR	
		2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen laporan	dokumen	12	6.465.187.500		-	3	138.280.000			-		-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	20	3.017.087.500											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	20	431.012.500			5	60.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	sarana	4	862.025.000			1	30.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	dokumen	20	862.025.000			1	48.280.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	dokumen	20	1.293.037.500											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																						SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																						5,33%	35,88%				7,58%	5,71%	DISPORAPAR	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																						SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Persen	42,86	2.801.581.250	43	125.000.000	42,86	50.000.000	0,00	570.473.748	0,00	162.766.900	0	733.240.648	0,00%	1466,48%			43	858.240.648	100,33%	30,63%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah dokumen laporan	dokumen	20	2.801.581.250	5	125.000.000	5	50.000.000	0	570.473.748	0	162.766.900	0	733.240.648	0,00%	1466,48%			5	858.240.648	25,00%	30,63%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termantfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termantfaatkan	dokumen	4	215.506.250			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi	4	431.012.500			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	100	215.506.250	25	125.000.000	25	50.000.000	0	570.473.748	0	162.766.900	0	733.240.648	0,00%	1466,48%	>	25	858.240.648	25,00%	398,24%	DISPORAPAR	
		2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	unit	4	646.518.750			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	4	215.506.250			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantfaatkan	unit	4	646.518.750			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termantfaatkan	unit	4	215.506.250			1	16.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
		2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	4	215.506.250			1	22.000.000							-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	183,31%				3,13%	49,78%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																						SR	ST				SR	SR	DISPORAPAR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																						0,00%	183,31%				3,13%	49,78%	DISPORAPAR	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																						SR	ST				SR	SR	DISPORAPAR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																						9,20%	80,38%				8,44%	22,72%	DISPORAPAR	
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																						SR	T				SR	SR	DISPORAPAR	
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				88.025.847.000		241.000.000		200.000.000		5.983.800		156.895.100	0	162.878.900				-	403.878.900	0,46%		DISPORAPAR	
		3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				88.025.847.000		241.000.000		200.000.000		5.983.800		156.895.100	0	162.878.900		81,44%		-	403.878.900	0,46%		DISPORAPAR	
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen	90	72.432.087.000	10	30.000.000	40	30.000.000	1,00	-	0,00	-	1	-	2,50%	0,00%		11	30.000.000	12,22%	0,04%	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8	23.529.870.000	1	30.000.000	2	30.000.000	1,00	-	0	-	1	-	50,00%	0,00%		2	30.000.000	25,00%	0,13%	DISPORAPAR	
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								30.000.000	1,00	20.000.000	0,00	-	1	20.000.000	0,00%	0,00%	<	1	20.000.000	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	10	92.820.000										-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4	92.820.000										-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Objek	4	23.205.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	0		0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	30.000.000	25,00%	0,13%	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	139.230.000			1	30.000.000						-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	0,00%				6,25%	0,03%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																						SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	5	18.990.972.000		-	5	87.000.000			-		-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR

			3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4	23.205.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	8	232.050.000			2	50.000.000												-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
			3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Objek	4	13.923.000.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Objek	10	4.641.000.000			1	0											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	92.820.000			1	37.000.000											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	9	32.487.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	46.410.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																												SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	20	29.516.760.000			-	5	30.000.000			-							-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	10	92.820.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	7	1.392.300.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisn, Berkembang, Pemantapan, dan Pemertahanan)	Objek	8	23.205.000.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Objek	11	4.641.000.000														-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
			3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	92.820.000			1	30.000.000											-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	7	46.410.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	10	46.410.000															-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																												SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				394.485.000			-		-			-							-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	4	46.410.000																0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Usaha di bidang Pariwisata	80	69.615.000																0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	4	46.410.000																0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	4	92.820.000																0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	02	2.04	05	Facilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	unit	87	139.230.000																0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
Predikat Kinerja																												SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																												0,00%	0,00%				1,56%	0,01%	DISPORAPAR	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																												SR	SR				SR	SR	DISPORAPAR	
			3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	97,06	10.767.120.000	48	111.000.000	95	70.000.000	0	5.983.800	0	156.895.100	0	162.878.900	0,00%	232,68%		48	273.878.900	49,45%	2,54%						DISPORAPAR	
			3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan	dokumen	12	10.767.120.000	3	111.000.000	3	70.000.000	0	5.983.800	0	156.895.100	0	162.878.900	0,00%	232,68%		3	273.878.900	25,00%	2,54%						DISPORAPAR	
			3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	20	2.320.500.000		5	75.000.000		-										-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	03	2.01	02	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	20	3.480.750.000	5	81.000.000	5	132.691.459	0	0		0	0	-	0,00%	0,00%	<	5	81.000.000	25,00%	2,33%						DISPORAPAR	
			3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	20	3.480.750.000	5	30.000.000	5	30.000.000	0	-	0	12.879.500	0	12.879.500	0,00%	42,93%	<	5	42.879.500	25,00%	1,23%						DISPORAPAR	

						Facilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									40.000.000	0,00		5.983.800	0,00			144.015.600			149.999.400	0,00%	375,00%	>	-		149.999.400	0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
			3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8		1.392.300.000		2	50.000.000		-				-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
			3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kegiatan	4		92.820.000		1	25.000.000		-				-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00%	69,66%					8,33%	0,59%	DISPORAPAR					
Predikat Kinerja																								SR	S					SR	SR	DISPORAPAR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																								0,00%	69,66%					8,33%	0,59%	DISPORAPAR					
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																								SR	S					SR	SR	DISPORAPAR					
			3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen	10		4.826.640.000	50		100.000.000	100		100.000.000	0,00		-	0,00		-	0		-	0,00%	0,00%		50	100.000.000	500,00%	2,07%	DISPORAPAR	
			3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen laporan	dokumen	20		3.573.570.000	5		100.000.000	5		100.000.000	0,00		-	0,00		-	0		-	0,00%	0,00%		5	100.000.000	25,00%	2,80%	DISPORAPAR	
			3	26	05	2.01	01	Facilitas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	orang	800		696.150.000	100		100.000.000	200		50.000.000	0			0		-	0		-	0,00%	0,00%	<	100	100.000.000	12,50%	14,36%	DISPORAPAR	
			3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	800		696.150.000				200		50.000.000					-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
			3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	600		464.100.000				150		100.000.000					-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
			3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	600		464.100.000				150		50.000.000					-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
			3	26	05	2.01	05	Facilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Orang	600		464.100.000				1		50.000.000					-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
			3	26	05	2.01	06	Facilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	800		696.150.000				200		100.000.000	0,00		-	0,00		-		-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan	4		92.820.000				1		30.000.000					-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00%	0,00%							1,79%	2,05%	DISPORAPAR			
Predikat Kinerja																								SR	SR							SR	SR	DISPORAPAR			
			3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8		1.253.070.000		-	2	270.000.000		-			-			-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
			3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	800		696.150.000			200	270.000.000						-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR	
			3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	8		92.820.000									-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
			3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	600		464.100.000									-	0,00%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	DISPORAPAR		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00%	0,00%							0,00%	0,00%	DISPORAPAR			
Predikat Kinerja																								SR	SR							SR	SR	DISPORAPAR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																								0,00%	0,00%							0,89%	1,03%	DISPORAPAR			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																								SR	SR							SR	SR	DISPORAPAR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																								0,00%	23,22%							3,60%	0,54%	DISPORAPAR			
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																								SR	SR							SR	SR	DISPORAPAR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																								4,60%	51,80%							6,02%	11,63%	DISPORAPAR			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																								SR	R							SR	SR	DISPORAPAR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SMSTR 1		SMSTR 2		Rp.		K	Rp.	Realisasi >/=/<	K	Rp.	K	Rp.		
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13=7+11		14=13/6*100%	15			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			16.798.015.556	2.910.441.276		2.892.617.459		1.230.325.915		0		1.230.325.915								ARPUS		
		2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			15.440.326.181	2.881.282.776		2.862.617.459		1.227.405.915		-		1.227.405.915								ARPUS		
	Meningkatnya Pelayanan Publik	2 23 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	13.255.117.242	50	2.585.717.081	100	2.577.617.459	25	1.223.655.915	25	0 50	1.223.655.915	50,00%	47,47%		100	3.809.372.996	100,00%	28,74%	ARPUS	
		2 23 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/ Laporan	48	62.496.813	3	15.803.345	3	15.000.000	1	5.165.800	0	0 1	5.165.800	33,33%	34,44%		4	20.969.145	8,33%	33,55%	ARPUS	
		2 23 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.031.625	2	15.803.345	2	15.000.000	1	5.165.800		1	5.165.800	50,00%	34,44%	<	3	20.969.145	37,50%	37,42%	ARPUS	
		2 23 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.465.188	0	-	1	1.500.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50%	34%					38%	37%	ARPUS
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2 23 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	8.440.970.225	12	1.908.625.797	12	2.170.495.792	6	936.885.993	0	0 6	936.885.993	50,00%	43,16%		18	2.845.511.790	900,00%	33,71%	ARPUS	
		2 23 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.344	8.431.701.875	247	1.908.625.797	336	2.170.495.792	336	936.885.993		336	936.885.993	100,00%	43,16%	<	583,2	2.845.511.790	43,39%	33,75%	ARPUS	
		2 23 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	3.310.125	0	-					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2 23 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	48	5.958.225	0	-					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33%	14%					14%	11%	ARPUS
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2 23 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	21.981.638	0	0	2	5.100.000		0	0 0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2 23 01	2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	6.465.188		2	1.500.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
		2 23 01	2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48	15.516.450		12	3.600.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2 23 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	287.465.188	0	0	5	99.500.000		0	0 0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2 23 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	121.000.000		1	58.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
		2 23 01	2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	6.465.188		1	1.500.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
		2 23 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	120.000.000		2	30.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
		2 23 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	40.000.000		1	10.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2 23 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	36	929.831.890	6	99.934.721	9	98.140.000	6	41.208.231	0	0 6	41.208.231	66,67%	41,99%		12	141.142.952	33,33%	15,18%	ARPUS	
		2 23 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	412.737.570	0	-	1	95.760.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	49.781.944	1	11.356.800	1	25.000.000	1	6.998.600	1	6.998.600	100,00%	27,99%	<	2	18.355.400	50,00%	36,87%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	21.550.625	0	-	1	5.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	29.416.604	1	4.000.000	1	15.000.000	1	1.985.000	1	1.985.000	100,00%	13,23%	<	2	5.985.000	50,00%	20,35%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	36.205.050	1	6.731.500	1	7.000.000	1	1.997.000	1	1.997.000	100,00%	28,53%	<	2	8.728.500	50,00%	24,11%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	5.159.221	1	1.140.000	1	1.140.000	1	285.000	1	285.000	100,00%	25,00%	<	2	1.425.000	50,00%	27,62%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	33	362.050.500	30	76.706.421	30	50.000.000	15	29.942.631	15	29.942.631	50,00%	59,89%	<	45	106.649.052	136,36%	29,46%	ARPUS		
		2 23 01	2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	6.465.188	0	-	1	1.500.000			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		

		2	23	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	6.465.188	0	-	1	1.500.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00%	17,18%				37,37%	15,38%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	ARPUS		
		2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	39	539.605.222	1	19.567.600	20	154.605.222			0	0	0	0	-	0,00%	0,00%		1	19.567.600	2,56%	3,63%	ARPUS
		2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	0	-	1	25.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	0	-	2	50.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	25.000.000	0	-	5	10.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	40.000.000	0	-	10	20.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	-							0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	349.605.222	1	19.567.600	1	49.605.222					0	-	0,00%	0,00%	<	1	19.567.600	50,00%	5,60%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%				8,33%	0,93%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	ARPUS		
		2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah	Dokumen	16	2.356.144.484	4	419.431.613	4	209.281.667	3	201.966.341	0	0	3	201.966.341	75,00%	96,50%		7	621.397.954	43,75%	26,37%	ARPUS	
		2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.525.631	0	989.000	1	1.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	989.000	0,00%	21,85%	ARPUS		
		2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	1.274.737.570	12	131.781.773	12	75.516.667	12	59.216.341		12	59.216.341	100,00%	78,41%	<	24	190.998.114	50,00%	14,98%	ARPUS		
		2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49.781.944	0	-	1	11.550.000	0	-		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	1.027.099.339	12	286.660.840	12	132.765.000	12	142.750.000		12	142.750.000	100,00%	107,52%	>	24	429.410.840	50,00%	41,81%	ARPUS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50%	46%				25%	20%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	ARPUS		
		2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	76	616.621.782	25	122.354.005	29	84.700.000	2	38.429.550	0	0	2	38.429.550	6,90%	45,37%		27	160.783.555	35,53%	26,07%	ARPUS	
		2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	138.484.316	1	32.446.550	1	33.300.000	2	17.035.200		2	17.035.200	200,00%	51,16%	<	3	49.481.750	75,00%	35,73%	ARPUS		
		2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	133.958.685	1	50.864.150	1	51.400.000	2	21.394.350		2	21.394.350	200,00%	41,62%	<	3	72.258.500	75,00%	53,94%	ARPUS		
		2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	21.550.625	0	-	10	5.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	22.628.156	10	4.716.000	10	5.250.000				0	-	0,00%	0,00%	<	10	4.716.000	76,92%	20,84%	ARPUS		
		2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	200.000.000	5	34.327.305	5	250.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	5	34.327.305	50,00%	17,16%	ARPUS		
		2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	0	-	2	50.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,67%	15,46%				46,15%	21,28%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					S	SR				SR	SR	ARPUS		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					31,25%	15,99%				21,10%	13,24%	ARPUS		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	ARPUS		
	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	13,09	2.185.208.939		295.565.695	6,85	285.000.000	3.750.000	-	0	3.750.000	0,00%	1,32%		0	299.315.695	0,00%	13,70%	ARPUS			
		2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	40	1.442.638.534		57.266.515	10	160.000.000		0	0	0	-	0,00%	0,00%		0	57.266.515	0,00%	3,97%	ARPUS		
		2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	4	215.506.250	0	-	1	50.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	8	63.811.402	5	14.750.030	5	15.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	5	14.750.030	62,50%	23,12%	ARPUS			
		2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	40	129.303.750	0	-	10	30.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		

		2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	100	129.303.750	13	8.537.000	25	20.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	12,5	8.537.000	12,50%	6,60%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	60	64.651.975	7	4.987.000	15	15.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	7	4.987.000	11,67%	7,71%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	16	172.405.000	4	4.996.485	4	20.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	4	4.996.485	25,00%	2,90%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	12	107.753.125	3	4.561.000	3	5.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	3	4.561.000	25,00%	4,23%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar	4.000	431.012.500	0	-	1000	60.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1.003	67.884.469	500	19.435.000	1000	25.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	500	19.435.000	49,85%	28,63%	ARPUS	
		2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	61.006.313	0	-	1	26.250.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%			19%	7%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		
		2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18	742.570.405		238.299.180	5	125.000.000	3	3.750.000	0		0	3	3.750.000	60,00%	3,00%	3	242.049.180	16,67%	32,60%	ARPUS
		2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	320	47.205.502	20	10.916.000	80	10.000.000	40	3.750.000	0	-	40	3.750.000	50,00%	37,50%	<	60	14.666.000	18,75%	31,07%	ARPUS
		2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	2	350.554.903	1	197.817.940	1	60.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	197.817.940	50,00%	56,43%	ARPUS	
		2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	24	107.753.125	6	8.790.000	6	10.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	6	8.790.000	25,00%	8,16%	ARPUS	
		2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	8	129.303.750	1	20.775.240	2	25.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	20.775.240	12,50%	16,07%	ARPUS	
		2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	24	107.753.125	0	-	6	20.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,00%	7,50%			21,25%	22,34%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					5,00%	3,75%			19,95%	14,83%	ARPUS		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																					18,13%	9,87%			20,53%	14,04%	ARPUS		
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																											ARPUS		
		2	24								1.357.689.375		29.158.500		30.000.000		2.920.000		-	0	2.920.000	0,00%	9,73%	0	32.078.500	0,00%	2,36%	ARPUS	
	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen	17,54	517.215.000		29.158.500	7,41	30.000.000		2.920.000		-	0	2.920.000	0,00%	9,73%	0	32.078.500	0,00%	6,20%	ARPUS	
		2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	193.955.625		0	3	45.000.000		0		0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	8	64.651.875			5	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	8	64.651.875			5	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	64.651.875			1	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%			0%	0%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		
		2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	129.303.750		0	6	30.000.000		0		0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Dokumen	4	64.651.875			1	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dokumen	8	64.651.875			5	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%			0%	0%	ARPUS		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR	ARPUS		

		2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8	193.955.625	2	29.158.500	2	30.000.000	1	2.920.000	0	0	1	2.920.000	50,00%	9,73%		3	32.078.500	37,50%	16,54%	ARPUS	
		2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Pengguna	5	64.651.875	0	-	2	15.000.000				0	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS	
		2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	129.303.750	2	29.158.500	1	30.000.000	1	2.920.000		-	1	2.920.000	100,00%	9,73%	<	3	32.078.500	75,00%	24,81%	ARPUS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50%	5%					37,50%	12,40%	ARPUS
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	ARPUS
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					17%	2%					12,50%	4,13%	ARPUS
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR					SR	SR	ARPUS
	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen	35,71	840.474.375	-	18,18	195.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS				
		2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dokumen	8	129.303.750	0	2	30.000.000	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dokumen	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Berkas	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Arsip	16	129.303.750	0	10	30.000.000	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Arsip	8	64.651.875		5	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Arsip	8	64.651.875		5	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dokumen	16	258.607.500	0	4	60.000.000	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkas	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Berkas	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Berkas	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	ARPUS
		2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Arsip	8	129.303.750	0	2	30.000.000	0	0	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Buku	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
		2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	4	64.651.875		1	15.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%					0%	0%	ARPUS
Predikat Kinerja																					SR	SR					SR	SR	ARPUS

		2	24	03	2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip/DokumenPencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Arsip/Dokumen	20	193.955.625			0	11	45.000.000			0	0		0	0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	ARPUS
		2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	8	64.651.875		5	15.000.000				0		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	8	64.651.875		5	15.000.000				0		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
		2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Daftar	4	64.651.875		1	15.000.000				0		0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	ARPUS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%				0%	0%	ARPUS			
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	ARPUS			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0%	0%				0%	0%	ARPUS			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	ARPUS			
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																			9,06%	4,94%				10,26%	7,02%	ARPUS			
		PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																			SR	SR				SR	SR	ARPUS			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					13,59%	7,40%				15,40%	10,53%	ARPUS			
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					SR	SR				SR	SR	ARPUS			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = /<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			20.073.155.083				5.921.050.141		2.720.909.301		3.831.332.514		6.552.241.815					6.552.241.815			DPMTSP			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.073.155.083				5.921.050.141		2.720.909.301		3.831.332.514		6.552.241.815								DPMTSP			
		2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			19.935.575.576				5.262.850.140		2.684.871.642		3.149.020.586		5.833.892.228						5.833.892.228			DPMTSP		
		2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	19.227.809.339			100	5.131.825.140	50	2.507.121.642	50	2.948.540.817	100	5.455.662.459	100,00%				5.455.662.459			DPMTSP		
		2 07 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	80	63.620.000	5	15.339.645	5	15.000.000	4	2.448.900	4	10.527.300	8	12.976.200	160,00%	86,51%		13	28.315.845	16,25%	44,51%	DPMTSP		
		2 07 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	63.620.000		15.339.645	4	15.000.000	4	2.448.900	4	10.527.300	8	12.976.200	200,00%	86,51%	<	8	28.315.845	200,00%	44,51%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		200,00%	86,51%				200,00%	44,51%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	T				ST	SR	DPMTSP		
		2 07 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	16.262.832.539	12	-	12	4.616.218.000	6	2.244.744.223	6	1.871.346.151	12	4.116.090.374	100,00%	89,17%		24	4.116.090.374	50,00%	25,31%	DPMTSP		
		2 07 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	560	16.262.832.539			559	4.616.218.000	6	2.244.744.223	6	1.871.346.151	12	4.116.090.374	2,15%	89,17%	<	12	4.116.090.374	2,14%	25,31%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		2,15%	89,17%				2,14%	25,31%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		SR	T				SR	SR	DPMTSP		
		2 07 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	56.000.000	12	11.215.070	12	12.000.000	0	-	3	9.519.600	3	9.519.600	25,00%	79,33%		15	20.734.670	31,25%	37,03%	DPMTSP		
		2 07 01 2,05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	56.000.000	3	11215070	3	12.000.000	0	-	3	9.519.600	3	9.519.600	100,00%	79,33%	<	6	20.734.670	150,00%	37,03%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	79,33%				150,00%	37,03%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	T				ST	SR	DPMTSP		
		2 07 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	814.560.000	12	182.118.284	12	116.140.000	50	65.432.646	50	143.607.998	100	209.040.644	833,33%	179,99%		112	391.158.928	233,33%	48,02%	DPMTSP		
		2 07 01 2,06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	44	132.000.000	44	24.990.868	3	30.000.000	6	12.388.000	6	27.524.690	12	39.912.690	400,00%	133,04%	>	56	64.903.558	127,27%	49,17%	DPMTSP		
		2 07 01 2,06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2136	68.000.000	534	11.000.000	534	15.000.000	5	-	6	20.994.000	11	20.994.000	2,06%	139,96%	>	545	31.994.000	25,51%	47,05%	DPMTSP		
		2 07 01 2,06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	220.000.000	8	54.992.200	3	20.000.000	6	3.425.000	6	26.574.900	12	29.999.900	400,00%	150,00%	>	20	84.992.100	250,00%	38,63%	DPMTSP		
		2 07 01 2,06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.560.000	12	1.140.000	12	1.140.000	6	285.000	6	855.000	12	1.140.000	100,00%	100,00%	=	24	2.280.000	200,00%	50,00%	DPMTSP		
		2 07 01 2,06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	152	390.000.000	120	89.995.216	120	50.000.000	6	49.334.646	6	67.659.408	12	116.994.054	10,00%	233,99%	>	132	206.989.270	86,84%	53,07%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		182,41%	151,40%				137,93%	47,59%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	ST				ST	SR	DPMTSP		
		2 07 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan	48	-	12	-	12	10.000.000	0		100	529.374.608	100	529.374.608	833,33%	5293,75%		112	529.374.608	233,33%	#DIV/0!	DPMTSP		
		2 07 01 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan						5	10.000.000	0	-	12	529.374.608	12	529.374.608	240,00%	5293,75%	>	12	529.374.608	0,00%	0,00%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		240,00%	5293,75%				0,00%	0,00%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	ST				SR	SR	DPMTSP		
		2 07 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	1.666.396.800	12	358.110.885	12	282.867.140	-	168.619.873	100	282.372.560	100	450.992.433	833,33%	159,44%		112	809.103.318	233,33%	48,55%	DPMTSP		
		2 07 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	1.490.000	1	1.500.000	6	-	6	1.480.000	12	1.480.000	1200,00%	98,67%	<	13	2.970.000	1300,00%	49,50%	DPMTSP		
		2 07 01 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Laporan	3	660.000.000	3	85.889.601	3	118.701.220	6	42.119.873	6	95.629.600	12	137.749.473	400,00%	116,05%	>	15	223.639.074	500,00%	33,88%	DPMTSP		
		2 07 01 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1.000.396.800	2	270.731.284	2	162.665.920	0	126.500.000	2	185.262.960	2	311.762.960	100,00%	191,66%	>	4	582.494.244	50,00%	58,23%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		566,67%	135,46%				616,67%	47,20%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	ST				ST	SR	DPMTSP		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi > = / <	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15															
		2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	364.400.000	12	78.500.500	12	79.600.000	-	25.876.000	100	101.792.600	100	127.668.600	833,33%	160,39%		112	206.169.100	233,33%	56,58%	DPMTSP
		2	07	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	137.200.000	2	33.401.000	1	34.100.000	0	17.735.000	1,00	35.484.000	1	53.219.000	100,00%	156,07%	>	3	86.620.000	300,00%	63,13%	DPMTSP
		2	07	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	125.200.000	2	25.099.500	1	25.500.000	0	8.141.000	1,00	26.508.600	1	34.649.600	100,00%	135,88%	>	3	59.749.100	100,00%	47,72%	DPMTSP
		2	07	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	102.000.000	1	20.000.000	14	10.000.000	0	-	14	9.800.000	14	9.800.000	100,00%	98,00%	<	15	29.800.000	1500,00%	29,22%	DPMTSP
		2	07	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	10.000.000	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	300,00%	>	1	30.000.000	0,00%	0,00%	DPMTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	172,49%					475,00%	35,02%	DPMTSP			
Predikat Kinerja																		ST	ST					ST	SR	DPMTSP			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		198,7%	858,3%					226,0%	33,8%	DPMTSP			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST					ST	SR	DPMTSP			
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi		2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	15,56	232.574.956	26	770.583.886	14,29	75.000.000	100,00	177.750.000	-	-	0	177.750.000	0,00%	237,00%		26	948.333.886	167,10%	407,75%	DPMTSP
		2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	Kegiatan	5	232.574.956	3	770.583.886	1	75.000.000	80	177.750.000	-	-	80	177.750.000	8000,00%	237,00%		83	948.333.886	1660,00%	407,75%	DPMTSP
		2	07	03	2,01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Orang	68	232.574.956	53	770.583.886	20	75.000.000	80	177.750.000	0	-	80	177.750.000	400,00%	237,00%	>	133	948.333.886	195,59%	407,75%	DPMTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		400,00%	237,00%					195,59%	407,75%	DPMTSP			
Predikat Kinerja																		ST	ST					ST	ST	DPMTSP			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		400,0%	237,0%					195,6%	407,8%	DPMTSP			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST					ST	ST	DPMTSP			
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi		2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdftar yang ditempatkan	Persen	57,22	113.140.782	7	34.994.900	53,57	16.025.000	-	-	6	115.661.969	6	115.661.969	11%	721,76%		13	150.656.869	22,7%	133,16%	DPMTSP
		2	07	04	2,02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin LPTKS	Lembaga	12	67.884.469	9	14.998.555	10	5.000.000	-	-	6	104.997.069	6	104.997.069	60,00%	2099,94%		15	119.995.624	125,00%	176,76%	DPMTSP
		2	07	04	2,02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	12	67.884.469	9	14.998.555	10	5.000.000	0	-	12	104.997.069	12	104.997.069	120,00%	2099,94%	>	21	119.995.624	175,00%	176,76%	DPMTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		120,00%	2099,94%					175,00%	176,76%	DPMTSP			
Predikat Kinerja																		ST	ST					ST	ST	DPMTSP			
		2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	Orang	1210	45.256.313	1.050	19.996.345	1060	11.025.000	-	-	1.060	10.664.900	1060	10.664.900	100,00%	96,73%		2.110	30.661.245	174,38%	67,75%	DPMTSP
		2	07	04	2,03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Orang	1210	45.256.313	1.050	19.996.345	1060	11.025.000	0	-	1060	10.664.900	1060	10.664.900	100,00%	96,73%	<	2.110	30.661.245	174,38%	67,75%	DPMTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	96,73%					174,38%	67,75%	DPMTSP			
Predikat Kinerja																		ST	ST					ST	S	DPMTSP			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		110,0%	1098,3%					174,7%	122,3%	DPMTSP			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		ST	ST					ST	ST	DPMTSP			
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi		2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	362.050.500	88	69.995.290	100	40.000.000	-	-	100	84.817.800	100	84.817.800	100%	212,04%		188	154.813.090	188,00%	42,76%	DPMTSP
		2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan	Kasus	50	362.050.500	39	69.995.290	41	40.000.000	9	-	18	84.817.800	27	84.817.800	65,85%	212,04%		66	154.813.090	132,00%	42,76%	DPMTSP
		2	07	05	2,02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	50	362.050.500	39	69.995.290	41	40.000.000	9	-	18	84.817.800	27	84.817.800	65,85%	212,04%	>	66	154.813.090	132,00%	42,76%	DPMTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		65,85%	212,04%					132,00%	42,76%	DPMTSP			
Predikat Kinerja																		S	ST					ST	SR	DPMTSP			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		65,9%	212,0%					132,0%	42,8%	DPMTSP			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		S	ST					ST	SR	DPMTSP			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																		193,65%	601,42%					182,06%	151,64%	DPMTSP			
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																		ST	ST					ST	ST	DPMTSP			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >= / <	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			137.579.507		19.983.005		658.200.001		36.037.659		682.311.928		718.349.587					738.332.592			DPMTSP		
	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	4667,00%	45.256.313	14	9.986.115	40	27.000.000	-	-	1	22.999.828	1	22.999.828	3%	85,18%		15	32.985.943	32,1%	72,89%	DPMTSP	
	2	18	02	2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Dokume n	6	45.256.313	4	9.986.115	6	27.000.000	-		1	22.999.828	1	22.999.828	16,67%	85,18%		5	32.985.943	83,33%	72,89%	DPMTSP	
	2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	5	45.256.313	5	9.986.115	5	27.000.000	0	-	1	22.999.828	1	22.999.828	20,00%	85,18%	<	6	32.985.943	120,00%	72,89%	DPMTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		20,00%	85,18%					120,00%	72,89%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		SR	T					ST	S	DPMTSP		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		20,0%	85,2%					120,0%	72,9%	DPMTSP		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	T					ST	S	DPMTSP		
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perentase sektor pada promosi penanaman modal	Persen	20	45.256.313	20	9.996.890	20	30.000.000	-	-	100	29.402.700	100	29.402.700	500%	98,01%		120	39.399.590	600,00%	87,06%	DPMTSP	
	2	18	03	2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	7	45.256.313	2	9.996.890	5	30.000.000	-	-	1	29.402.700	1	29.402.700	20,00%	98,01%		3	39.399.590	42,86%	87,06%	DPMTSP	
	2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6	45.256.313	1	9.996.890	4	15.000.000	0	-	1	14.654.100	1	14.654.100	25,00%	97,69%	<	2	24.650.990	33,33%	54,47%	DPMTSP
	2	18	03	2,01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen				1	15.000.000	0	-	1	14.748.600	1	14.748.600	100,00%	98,32%	<	1	14.748.600	0,00%	0,00%	DPMTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		62,50%	98,01%					16,67%	27,23%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		R	ST					SR	SR	DPMTSP		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		62,5%	98,0%					16,7%	27,2%	DPMTSP		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		R	ST					SR	SR	DPMTSP		
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persen	87,99	-	150	-	87,66	115.000.001	50	16.117.659	6	75.694.800	56	91.812.459	64%	79,84%		206	91.812.459	234,12%	#DIV/0!	DPMTSP	
	2	18	04	2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Bulan	12	-	12	-	12	115.000.001	6	16.117.659	6	75.694.800	12	91.812.459	100,00%	79,84%		24	91.812.459	200,00%	#DIV/0!	DPMTSP	
	2	18	04	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		340		10.000.000	0	-	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00%	100,00%	=	-	10.000.000	0,00%	0,00%	DPMTSP		
	2	18	04	2,01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		340		25.000.000	896	-	898	22.854.800	1794	22.854.800	527,65%	91,42%	<	1.794	22.854.800	0,00%	0,00%	DPMTSP		
	2	18	04	2,01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		110		20.000.000	56	4.480.000	56	15.520.000	112	20.000.000	101,82%	100,00%	=	112	20.000.000	0,00%	0,00%	DPMTSP		
	2	18	04	2,01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha		340		60.000.001	800	11.637.659	1534	27.320.000	2334	38.957.659	686,47%	64,93%	<	2.334	38.957.659	0,00%	0,00%	DPMTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		328,98%	89,09%					0,00%	0,00%	DPMTSP		
Predikat Kinerja																		ST	T					SR	SR	DPMTSP		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		329,0%	89,1%					0,0%	0,0%	DPMTSP		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		ST	T					SR	SR	DPMTSP		
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indek Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Persen	75,18	-	42	-	76,83	478.200.000	50	19.920.000	50	546.214.600	50	566.134.600	65%	118,39%		92	566.134.600	122,37%	#DIV/0!	DPMTSP	
	2	18	05	2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bulan	12	-	12	-	12	478.200.000	6	19.920.000	6	546.214.600	12	566.134.600	100,00%	118,39%		24	566.134.600	200,00%	#DIV/0!	DPMTSP	
	2	18	05	2,01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Utuhnya							0	-	0	86.717.800					<							

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15							
		218052,010005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha					225	338.421.600	0	-	0	316.918.000	0	316.918.000	0,00%	93,65%	<	-	316.918.000	0,00%	0,00%	DPMTSP						
		218052,010006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Berisiko	Kegiatan Usaha					60	139.778.400	23	19.920.000	47	140.578.800	70	160.498.800	116,67%	114,82%	>	70	160.498.800	0,00%	0,00%	DPMTSP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			58,33%	104,23%									0,00%	0,00%	DPMTSP
Predikat Kinerja																			R	ST									SR	SR	DPMTSP
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																			58,3%	104,2%									0,0%	0,0%	DPMTSP
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																			R	ST									SR	SR	DPMTSP
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi		21806		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Data Base Perzinan	Ada/Tidak	Ada	47.066.882	100	-	Ada/ Tidak	8.000.000	50	50	8.000.000	100	8.000.000	0,00%	100,00%		200	8.000.000	0,00%	17,00%	DPMTSP						
		218062,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Data Base Perzinan	Dokumen	1	47.066.882		-	1	8.000.000	-	1		1	-	100,00%	0,00%		1	-	100,00%	0,00%	DPMTSP						
		218062,010002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		1	47.066.882		1	8.000.000	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	100,00%	100,00%	=	1	8.000.000	100,00%	17,00%	DPMTSP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	100,00%									100,00%	17,00%	DPMTSP
Predikat Kinerja																			ST	ST									ST	SR	DPMTSP
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																			100,0%	100,0%									100,0%	17,0%	DPMTSP
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																			ST	ST									SR	SR	DPMTSP
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																			113,96%	95,30%									47,33%	23,42%	DPMTSP
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																			ST	ST									SR	SR	DPMTSP
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																			153,81%	348,36%									114,70%	87,53%	DPMTSP
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																			ST	ST									ST	T	DPMTSP

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi >/=/<	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3				4				5				6				7				8				9				10				11=9+10				12=11/8				13=7+11				14=13/6*100%				15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	336	1.298.799.327	84	179503362	84	200.636.680	42	53.058.303	42	227.631.295	84	280.689.598	100,00%	139,90%	>	168	460.192.960	50,00%	35,43%	DKP3
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2.832	2.921.327.835	708	579678080	708	508.841.123	354	240.750.000	354	994.062.840	708	1.234.812.840	100,00%	242,67%	>	1416	1.814.490.920	50,00%	62,11%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	210,86%			50,00%	69,87%	DKP3	
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	S	DKP3	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	180	917.613.881	45	401.247.699	45	295.300.000	22,5	62.690.700	22,5	462.497.433	45	525.188.133	100,00%	177,85%		90	926.435.832	50,00%	100,96%	DKP3
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	173.321.283	12	41.600.000	12	43.300.000	6	11.500.000	6	51.175.000	12	62.675.000	100,00%	144,75%	>	24	104.275.000	50,00%	60,16%	DKP3
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	96	666.219.948	24	154.622.800	24	157.000.000	12	48.865.700	12	238.608.563	24	287.474.263	100,00%	183,10%	>	48	442.097.063	50,00%	66,36%	DKP3
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	52.048.433	1	185.024.899	1	75.000.000	0,5	-	1	129.813.870	1	129.813.870	100,00%	173,09%	>	2	314.838.769	50,00%	604,90%	DKP3
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	26.024.217	1	20.000.000	1	20.000.000	4	2.325.000	4	42.900.000	8	45.225.000	800,00%	226,13%	>	9	65.225.000	28,13%	250,63%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				275,00%	181,77%			44,53%	245,51%	DKP3	
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	ST	DKP3	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				108,33%	169,99%			43,16%	78,42%	DKP3	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				ST	ST			SR	T	DKP3	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	45,00	280.524.250	37,68	138.907.055	39,65	159.995.980	5,625	5.212.900	5,625	137.427.300	5,625	142.640.200	14,19%	89,15%		43,305	281.547.255	96,23%	100,36%	DKP3
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Frekuensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kali	20	100.199.080	5	109.982.350	5	114.998.790	0	5.212.900	1	92.628.300	1	97.841.200	20,00%	85,08%		6	207.823.550	30,00%	207,41%	DKP3
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kali	8	20.199.080	2	109.982.350	2	14.999.440	1	5212900	1	22.491.000	2	27.703.900	100,00%	184,70%	>	4	137.686.250	50,00%	681,65%	DKP3
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Paket	4	80.000.000	-	-	1	39.999.745	0	0	0	31.108.600	0	31.108.600	0,00%	77,77%	<	0	-	0,00%	0,00%	DKP3
3	09	03	2.02	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan KonsumenWilayah Kab/Kota								29.999.670	0	0	0	19.483.700		19.483.700	0,00%	64,95%	<	0		0,00%	0,00%	DKP4
4	09	03	2.03	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pook Strategis								29.999.935	0	0	0	19.545.000		19.545.000	0,00%	65,15%	<	0		0,00%	0,00%	DKP5
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				25,00%	98,14%			12,50%	170,41%	DKP3	
Predikat Kinerja																				SR	ST			SR	ST	DKP3	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun yang Terlaksana	Dokumen	8	180.325.170	1	28.924.705	2	44.997.190		-	0	44.799.000	0	44.799.000	0,00%	99,56%		1	73.723.705	12,50%	40,88%	DKP3

2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kali	4	20.325.170	0	0	1	14.997.215	0	0	0	16.248.600	0	16.248.600	0,00%	108,34%	>	0	16.248.600	0,00%	79,94%	DKP3
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kali	4	160.000.000	1	28924705	1	29.999.975	-	-	0	28.550.400	0	28.550.400	0,00%	95,17%	<	1	57.475.105	25,00%	35,92%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	101,76%				12,50%	57,93%	DKP3
Predikat Kinerja																				SR	ST				SR	R	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				12,50%	99,95%				12,50%	114,17%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	ST				SR	ST	DKP3
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	77,777778	80.034.301		-	44,44	9.999.810	0	-	0	9.999.400	0	9.999.400	0,00%	100,00%		0	9.999.400	0,00%	12,49%	DKP3
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang di susun	Kali	4	80.034.301		-	1	9.999.810	0	-	0	9.999.400	0	9.999.400	0,00%	100,00%		0	9.999.400	0,00%	12,49%	DKP3
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kali	4	80.034.301			1	9.999.810	0	0	0	9.999.400	0	9.999.400	0,00%	100,00%	<	0	9.999.400	0,00%	12,49%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	100,00%				0,00%	12,49%	DKP3
Predikat Kinerja																				SR	ST				SR	SR	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				0,00%	100,00%				0,00%	12,49%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	ST				SR	SR	DKP3
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen	90,91	48.000.000		-	45,45	29.999.875	0	-	0	30.214.000	0	30.214.000	0,00%	100,71%		0	30.214.000	0,00%	62,95%	DKP3
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana	Kali	16	48.000.000		-	4	29.999.875		-		30.214.000	0	30.214.000	0,00%	100,71%		0	30.214.000	0,00%	62,95%	DKP3
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	48.000.000			5	29.999.875	0	0	0	30.214.000	0	30.214.000	0,00%	100,71%	>	0	30.214.000	0,00%	62,95%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	100,71%				0,00%	62,95%	DKP3
Predikat Kinerja																				SR	ST				SR	R	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				0,00%	100,71%				0,00%	62,95%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	ST				SR	R	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																				30,21%	123,31%				18,55%	68,36%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																				SR	ST				SR	S	DKP3
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			31.796.084.514		4.122.736.882		2.080.354.989		114.099.996		4.946.219.260		5.060.319.256					9.183.056.138			DKP3	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			20.855.928.263		2.944.609.537		614.791.620		60.195.796		1.284.566.200		1.344.761.996					4.289.371.533			DKP3	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	51,6060055	4.980.114.185	42,63	1.736.978.620	45,41	129.935.445	0	7.066.400	0	673.722.278	0	680.788.678	0,00%	523,94%		42,63	2.417.767.298	82,61%	48,55%	DKP3
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dikelola	Dokumen	8	61.237.785	2	-	2	4.966.900	3	4.666.400	6	9.632.800	9	14.299.200	450,00%	287,89%		11	14.299.200	137,50%	23,35%	DKP3
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		61.237.785			10	4.966.900	5	4.666.400	5	9.632.800	10	14.299.200	100,00%	287,89%	>	10	14.299.200	0,00%	23,35%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	287,89%				0,00%	23,35%	DKP3
Predikat Kinerja																				ST	ST				SR	SR	DKP3

3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Nelayan yang Terfasilitasi	Klp	42	4.918.876.400	10	1.736.978.620	10	124.968.545	1	2.400.000	0	664.089.478	1	666.489.478	10,00%	533,33%		11	2.403.468.098	26,19%	48,86%	DKP3
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Lembaga Nelayan	Klp	42	1.724.200.000	100	1704098750	100	99.980.695	5	2.400.000	10	634.981.278	15	637.381.278	15,00%	637,50%	>	115	2.341.480.028	273,81%	135,80%	DKP3
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Sarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	26	3.194.676.400	6	32879870	6	24.987.850	0	-	12	29.108.200	12	29.108.200	200,00%	116,49%	>	18	61.988.070	69,23%	1,94%	DKP3
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	107,50%	377,00%				171,52%	68,87%	DKP3
																			Predikat Kinerja	ST	ST				ST	S	DKP3
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan yang di Terbitkan	Dokumen	400	63.340.200	50	19.783.160	100	20.000.000		9.279.500	50	29.158.900	50	38.438.400	50,00%	192,19%		100	58.221.560	25,00%	91,92%	DKP3
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal	Dokumen	1200	63.340.200	300	19783160	300	20.000.000	200	9.279.500	400	29.158.900	600	38.438.400	200,00%	192,19%	>	900	58.221.560	75,00%	91,92%	DKP3
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	200,00%	192,19%				75,00%	91,92%	DKP3
																			Predikat Kinerja	ST	ST				S	ST	DKP3
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)	135,83%	285,69%				82,17%	61,38%	DKP3
																			PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)	ST	ST				T	R	DKP3
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	Persen	56,45	15.582.400.000		1.155.801.547		304.986.305	25	35.294.496	50	494.274.022	75	529.568.518	0,00%	173,64%		75	1.685.370.065	132,86%	10,82%	DKP3
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang di Berdayakan	Klp	40	2.688.000.000		-	46,52	79.998.040	1	9.450.000	-	49.500.000	1	58.950.000	2,15%	73,69%		1	58.950.000	2,50%	2,19%	DKP3
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Ton	400	2.688.000.000			10	79.998.040	15	9.450.000	0	49.500.000	15	58.950.000	150,00%	73,69%	<	15	58.950.000	3,75%	2,19%	DKP3
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	150,00%	73,69%				3,75%	2,19%	DKP3
																			Predikat Kinerja	ST	S				SR	SR	DKP3
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	8	12.894.400.000	2	1.155.801.547	2	224.988.265	1	25.844.496	0	444.774.022	1	470.618.518	50,00%	209,17%		3	1.626.420.065	37,50%	12,61%	DKP3
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		180.000.000	0	0	3	4.998.745	1	4.698.745	2	9.697.490	3	14.396.235	100,00%	288,00%	>	3	14.396.235	0,00%	8,00%	DKP3
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	122	1.894.200.000	10	3527000	30	79.992.325	25	11.448.506	50	38.897.012	75	50.345.518	250,00%	62,94%	<	85	53.872.518	69,67%	2,84%	DKP3
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	7094	928.200.000	250	8939525	1773	9.997.245	443	9.697.245	886	19.694.490	1329	29.391.735	74,96%	294,00%	>	1579	38.331.260	22,26%	4,13%	DKP3
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Unit	16	9.892.000.000	2	1.143.335.022	4	129.999.950	0	0	2	376.485.030	2	376.485.030	50,00%	289,60%	>	4	1.519.820.052	25,00%	15,36%	DKP3
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	118,74%	233,63%				29,23%	7,58%	DKP3
																			Predikat Kinerja	ST	ST				SR	SR	DKP3
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)	134,37%	153,66%				16,49%	4,89%	DKP3
																			PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)	ST	ST				SR	SR	DKP3
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	51,666667	133.135.380		51.829.370		49.932.820	0	-	0	37.199.900	0	37.199.900	0,00%	74,50%		0	89.029.270	0,00%	66,87%	DKP3

3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kali	32	133.135.380		51.829.370	44,17	49.932.820	0		-	0	37.199.900	0	37.199.900	0,00%	74,50%		0	89.029.270	0,00%	66,87%	DKP3	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kali	32	133.135.380	8	51829370	8	49.932.820	0		-	0	37.199.900	0	37.199.900	0,00%	74,50%	<	8	89.029.270	25,00%	66,87%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	74,50%				25,00%	66,87%	DKP3	
Predikat Kinerja																				SR	S				SR	S	DKP3	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				0,00%	74,50%				25,00%	66,87%	DKP3	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	S				SR	S	DKP3	
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	100	160.278.698		-	100	129.937.050	8	17.834.900	12	79.370.000	20	97.204.900	20,00%	74,81%		20	97.204.900	20,00%	60,65%	DKP3		
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Tanda Daftar kapal	Dokumen	300	80.072.240		-	75	59.937.050	3	17.834.900	6	49.299.400	9	67.134.300	12,00%	112,01%		9	67.134.300	3,00%	83,84%	DKP3		
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen		80.072.240		10	59.937.050	3	17.834.900	6	49.299.400	9	67.134.300	90,00%	112,01%	>	9	67.134.300	0,00%	83,84%	DKP3		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				90,00%	112,01%				0,00%	83,84%	DKP3	
Predikat Kinerja																				T	ST				SR	T	DKP3	
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Frekuensi Binaan Kelompok Usaha Hasil Perikanan	KALI	16	80.206.458		-	4	70.000.000	0		-	0	30.070.600	0	30.070.600	0,00%	42,96%		0	30.070.600	0,00%	37,49%	DKP3	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit		80.206.458		20	70.000.000	0		0	0	30.070.600	0	30.070.600	0,00%	42,96%	<	0	30.070.600	0,00%	37,49%	DKP3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	42,96%				0,00%	37,49%	DKP3	
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	SR	DKP3	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				45,00%	77,48%				0,00%	60,67%	DKP3	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	T				SR	R	DKP3	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																				78,80%	147,83%				30,92%	48,45%	DKP3	
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																				T	ST				SR	SR	DKP3	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.940.156.251		1.178.127.345		1.465.563.369		53.904.200		3.661.653.060		3.715.557.260					4.893.684.605			DKP3		
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Sarana Kelompok Tani	Persen	49,2424242	504.399.840	25,57	141.631.600	25,57	60.000.000	15	45.000.000	30	1.883.365.700	45	1.928.365.700	175,99%	3213,94%		70,57	2.069.997.300	143,31%	410,39%	DKP3		
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Frekuensi Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kali	16	504.399.840	4	141.631.600	4	60.000.000	1	45.000.000	2	1.883.365.700	3	1.928.365.700	75,00%	3213,94%		7	2.069.997.300	43,75%	410,39%	DKP3		
3	27	02	2.02	01	Pengwasan Penggunaan Sarana PendukungPertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							0		-	4	899.996.500		899.996.500	0,00%	0,00%	<							
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Paket	6	504.399.840	2	141631600	2	60.000.000	0,5	45.000.000	0	983.369.200	0,5	1.028.369.200	25,00%	1713,95%	>	2,5	1.170.000.800	41,67%	231,96%	DKP3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				25,00%	1713,95%				41,67%	231,96%	DKP3	
Predikat Kinerja																				SR	ST				SR	ST	DKP3	

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	25,00%	1713,95%				41,67%	231,96%	DKP3			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	SR	ST				SR	ST	DKP3			
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	Persen	51,3403263	6.559.308.936	26,1	661.502.165	26,1	1.050.499.845	0	-	0	1.592.878.060	0	1.592.878.060	0,00%	151,63%		26,1	2.254.380.225	50,84%	34,37%	DKP3	
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Frekuensi Pengembangan Bibit Pertanian/Perkebunan	Kali	32	2.103.044.217	8	13.001.300	8	30.000.000	10	-	20	24.860.460	30	24.860.460	375,00%	82,87%		38	37.861.760	118,75%	1,80%	DKP3	
3	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Kali	48	2.103.044.217	3	13001300	12	30.000.000	0	0	8	24.860.460	8	24.860.460	66,67%	82,87%	<	11	37.861.760	22,92%	1,80%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	66,67%	82,87%				22,92%	1,80%	DKP3			
Predikat Kinerja																	S	T				SR	SR	DKP3			
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasaran Pertanian yang dibangun	Unit	20	2.000.000.000		315.372.000	5	920.500.000	0	-	0	895.769.900	0	895.769.900	0,00%	97,31%		0	1.211.141.900	0,00%	60,56%	DKP3	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	400.000.000		3	740.500.000	0	0	3	895.769.900	3	895.769.900	100,00%	120,97%	>	3	895.769.900	25,00%	223,94%	DKP3	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	40	400.000.000		10	100.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	DKP3		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1.200.000.000	4	315372000	4	80.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	4	315.372.000	400,00%	26,28%	DKP3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	33,33%	40,32%				141,67%	83,41%	DKP3			
Predikat Kinerja																	SR	SR				ST	T	DKP3			
3	27	03	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dikelola	Dokumen	12	2.456.264.719	3	333.128.865	3	99.999.845	0	-	0	672.247.700	0	672.247.700	0,00%	672,25%		3	1.005.376.565	25,00%	40,93%	DKP3	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Ekor	20	2.456.264.719	2	333128865	5	99.999.845	0	0	5	672.247.700	5	672.247.700	100,00%	672,25%	>	7	1.005.376.565	35,00%	40,93%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	672,25%				35,00%	40,93%	DKP3			
Predikat Kinerja																	ST	ST				SR	SR	DKP3			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	66,67%	265,15%				66,53%	42,05%	DKP3			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	S	ST				S	SR	DKP3			
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen	44,1202265	40.000.000	39,87	148.298.840	39,87	205.074.695	10	8.904.200	20	59.337.800	30	68.242.000	75,24%	33,28%		69,87	216.540.840	158,36%	541,35%	DKP3	
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular yang terjamin Kesehatan Hewan	Kecamatan	4	-	1	-	1	19.999.775	0	-	0	21.697.600	0	21.697.600	0,00%	108,49%		1	21.697.600	25,00%	0,00%	DKP3	
3	27	04	2.02	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendallan Zoonosis							19.999.775	0	0	0	21.697.600		21.697.600	0,00%	108,49%	>		21.697.600	0,00%	0,00%	DKP3	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	108,49%				0,00%	0,00%	DKP3			
Predikat Kinerja																	SR	ST				SR	SR	DKP3			
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laboratorium dan Medik Veteriner yang dikelola	Unit	4	40.000.000		148.298.840		185.074.920	10	8.904.200	20	37.640.200	30	46.544.400	0,00%	0,00%		30	194.843.240	750,00%	487,11%	DKP3	

3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kali		40.000.000	0	148298840		185.074.920	10	8.904.200	20	37.640.200	30	46.544.400	0,00%	25,15%	<	30	194.843.240	0,00%	487,11%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	25,15%				0,00%	487,11%	DKP3
Predikat Kinerja																				SR	SR				SR	ST	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				0,00%	66,82%				0,00%	243,55%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	S				SR	ST	DKP3
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	58,988764	40.078.120	46,07	2.088.400	46,07	19.988.949	0	-	0	17.952.900	0	17.952.900	0,00%	89,81%		46,07	20.041.300	78,10%	50,01%	DKP3
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Pertanian yang ditanggulangi	Kali	4	40.078.120	1	2.088.400	1	19.988.949	0	-	0	17.952.900	0	17.952.900	0,00%	89,81%		1	20.041.300	25,00%	50,01%	DKP3
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		40.078.120	10	2088400	30	19.988.949	0	0	5	17.952.900	5	17.952.900	16,67%	89,81%	<	15	20.041.300	0,00%	50,01%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				16,67%	89,81%				0,00%	50,01%	DKP3
Predikat Kinerja																				SR	T				SR	SR	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				16,67%	89,81%				0,00%	50,01%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				SR	T				SR	SR	DKP3
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	Persen	44,8725212	3.796.369.355	38,88	224.606.340	38,88	129.999.880	0	-	0	108.118.600	0	108.118.600	0,00%	83,17%		38,88	332.724.940	86,65%	8,76%	DKP3
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di fasilitasi	Unit	3	3.796.369.355	1	224.606.340	1	129.999.880	0	-	0	108.118.600	0	108.118.600	0,00%	83,17%		1	332.724.940	33,33%	8,76%	DKP3
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh	Unit	12	213.118.666	3	64146340	3	50.000.000	0	-	3	59.183.400	3	59.183.400	100,00%	118,37%	>	6	123.329.740	50,00%	57,87%	DKP3
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Kali	8	3.583.250.689	2	160460000	2	79.999.880	0	-	2	48.935.200	2	48.935.200	100,00%	61,17%	<	4	209.395.200	50,00%	5,84%	DKP3
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00%	89,77%				50,00%	31,86%	DKP3
Predikat Kinerja																				ST	T				SR	SR	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																				100,00%	89,77%				50,00%	31,86%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																				ST	T				SR	SR	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																				41,67%	445,10%				31,64%	119,88%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																				SR	ST				SR	ST	DKP3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																				50,23%	238,75%				27,04%	78,90%	DKP3
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																				R	ST				SR	T	DKP3

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya			Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > = <	K	Rp	K		Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
						DISPRINDAGKOP DAN UKM			49.686.628.945					7.561.680.213			3.359.530.731			12.105.393.963						15.464.924.694			DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			23.498.630.203					4.811.980.213			2.073.104.621			6.760.277.620									DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		20.528.440.314	100,00		100	4.355.909.325	100	2.073.104.621	25	6.392.135.620	125	8.465.240.241	125%	194%		225	8.465.240.241	0%	41%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	762.798.718	2		8 Dok	15.000.000	1	47.960.000	-	47.960.000	1	95.920.000	13%	639%		3	95.920.000	3%	13%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	720.012.718			3	15.000.000	10	47.960.000	10	47.960.000	20	95.920.000	667%	639%	>	20	95.920.000	182%	13%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang di susun	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Perubahan yang di susun	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000	0		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang di susun	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000	0		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000	0		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Laporan yang Dibuat	Dokumen	4	8.557.200			1 Laporan	2.000.000	0		0		0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					111,11%	106,58%				30,30%	2,22%		DISPRINDAGKOP UKM	
Predikat Kinerja																					ST	ST				SR	SR		DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	12.706.906.290	12		12	3.226.171.000	486	1.630.433.488	952	5.345.517.104	1438	6.975.950.592	11983%	216%		1.450	6.975.950.592	3021%	55%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1680	12.698.349.090	420	3.116.902.351	420 OB	3.226.171.000	776	1.630.433.488	952	5.345.517.104	1728	6.975.950.592	411%	216%	>	2.148	10.092.852.943	128%	79%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Akhir Keuangan	laporan	4	8.557.200	0	-	1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					205,71%	108,12%				63,94%	39,74%		DISPRINDAGKOP UKM	
Predikat Kinerja																					ST	ST				R	SR		DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	24	51.343.200	1		6	26.101.000	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	1667%	57%		101	15.000.000	421%	29%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	4	8.557.200	1	49.983.000	1	26.101.000	-	-	80	15.000.000	80	15.000.000	8000%	57%	<	81	64.983.000	2025%	759%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		

No	Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	laporan	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					1333,33%	9,58%				337,50%	126,57%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					ST	SR				ST	ST	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah	bulan	48	25.671.600	12	19.750.000	12	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	40.000.000	0%	200%		12	59.750.000	25%	233%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pendataan Objek Retribusi Daerah	laporan	4	8.557.200	1	10.000.000	1 Dok	10.000.000	-	0	738	10.000.000	738	10.000.000	73800%	100%	=	739	20.000.000	18475%	234%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	laporan	4	8.557.200	1	9.750.000	1	10.000.000	-	-	80	8.868.000	80	8.868.000	8000%	89%	<	81	18.618.000	2025%	218%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penelolan Retribusi	laporan	4	8.557.200			1 Dok	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					27266,67%	62,89%				6833,33%	150,43%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					ST	R				ST	ST	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	218.584.059	12	9.988.415	12 Bulan	32.000.000	-	-	24	17.522.813	24	17.522.813	0%	55%		36	27.511.228	75%	13%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	140	85.572.000	0	-	35	20.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	140	124.454.859	35	9.988.415	35	10.000.000	-	-	68	17.522.813	68	17.522.813	194%	175%	>	103	27.511.228	74%	22%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang Disosialisasi	Dokumen	4	8.557.200	0	0	1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					64,76%	58,41%				24,52%	7,37%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					R	R				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	1.085.899.212	12	126.986.775	12	82.140.000	1	119.855.587	2	179.850.339	3	299.705.926	25%	365%		15	426.692.701	31%	39%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	Dokumen	4	31.769.700			1 Paket	7.500.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	196.144.410	8	14.980.686	8	20.000.000	130	14.995.200	130	14.995.200	260	29.990.400	3250%	150%	>	268	44.971.086	812%	23%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.620.250			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	59.738.333	1	5.000.000	1	5.000.000	450	4.000.000	450	5.000.000	900	9.000.000	90000%	180%	>	901	14.000.000	22525%	23%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	124.454.859	1	6.000.000	1	6.000.000	50	6.000.000	-	-	50	6.000.000	5000%	100%	=	51	12.000.000	1275%	10%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	7.241.010	1	1.140.000	1	1.140.000	50	-	50	1.140.000	100	1.140.000	10000%	100%	=	101	2.280.000	2525%	31%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
																	K	Rp	K	Rp												
1	3						4		5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	632.196.000	1	99.866.089	1	50.000.000	50	94.860.387	100	158.715.139	150	253.575.526	15000%	507%	>	151	353.441.615	3775%	56%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Yang Tertata Pada SKPD	Dokumen	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan 'Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Web) Pada SKPD	laporan	4	8.620.250			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					12325,00%	103,71%				3091,21%	14,34%	DISPRINDAGKOP UKM				
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Unit	41	1.231.018.963	3	10.050.000	9	180.049.112	0	-	1	39.394.000	1	39.394.000	11%	22%		4	49.444.000	10%	4%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	106.965.000			1	25.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	8.557.200			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	213.930.000			1	50.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	519.644.985			2	76.049.112		-			0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	373.364.578	3	10.050.000	3	25.000.000	-	-	113	39.394.000	113	39.394.000	3767%	158%	>	116	49.444.000	829%	13%	DISPRINDAGKOP UKM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					627,78%	26,26%				138,10%	2,21%	DISPRINDAGKOP DISPRINDAGKOP UKM				
Predikat Kinerja																					ST	SR				ST	SR					
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	3.514.039.428	6	536.142.497	12	453.248.213	1	203.077.746	2	509.672.364	3	712.750.110	25%	157%		9	1.248.892.607	19%	36%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	60	15.839.709	6	1.500.000	15	1.500.000	900	1.500.000	-	-	900	1.500.000	6000%	100%	=	906	3.000.000	1510%	19%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	336	1.580.490.000	84	204.827.377	84	189.583.333	60	57.127.746	50	277.322.364	110	334.450.110	131%	176%	>	194	539.277.487	58%	34%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung/Gudang Kantor yang di sewa Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	4	248.909.719	0	-	1 Laporan	57.750.000	1				1	-	100%	0%	<	1	-	25%	0%	DISPRINDAGKOP UKM				
	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2832	1.668.800.000	708	329.815.120	708	204.414.880	1.560	144.450.000	1.720	232.350.000	3280	376.800.000	463%	184%	>	3.988	706.615.120	141%	42%	DISPRINDAGKOP UKM				
41																					1673,56%	115,19%				433,39%	23,85%	DISPRINDAGKOP DISPRINDAGKOP UKM				
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	SR					
2	17	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	366	932.178.843	84	216.331.100	91	321.200.000	1	51.777.800	2	217.219.000	3,00	268.996.800	3%	84%		87	485.327.900	24%	52%	DISPRINDAGKOP UKM				

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	56	298.691.663	14	36.423.750	14	36.600.000	25	14.962.800	28	56.861.600	53	71.824.400	379%	196%	>	67	108.248.150	120%	36%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	96	109.723.749	24	65.937.350	24	79.100.000	75	26.815.000	66	120.357.400	141	147.172.400	588%	186%	>	165	213.109.750	172%	194%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	200	140.390.972	0	-	50	115.500.000						-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Unit	6	250.940.159	1	98.570.000	1	50.000.000	-	-	6	30.000.000	6	30.000.000	600%	60%	<	7	128.570.000	117%	51%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	4	102.334.050	1	15.400.000	1	15.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	120	20.000.000	12000%	133%	>	121	35.400.000	3025%	35%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	30.098.250			1	25.000.000	-	0	0	0		-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					2261,01%	95,94%				572,20%	52,72%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	R	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					5096,55%	76,30%				1280,50%	46,60%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	T				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen	1,34%	149.345.828		-	0,94	34.650.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	02	2,01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan' Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	74.672.913			1	17.325.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Kegiatan	4	74.672.913			1 Unit Usaha	17.325.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	02	2,02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	74.672.916			1	17.325.000	0	0	0	0	0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	02	2,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usahaPembukaan Kantor Cabang, untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Kegiatan	4	74.672.916			1 Unit Usaha	17.325.000	0	-	0	0	0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Persen	85,38%	99.563.888		-	79,72	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Periode Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	bulan	48	99.563.888		0	12	10.000.000	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai	Koperasi	40	49.781.944			10 Unit Usaha	11.550.000		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Diawasi	Koperasi	40	49.781.944			10 Unit Usaha	11.550.000				0	-	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat	Persen	8,04%	99.563.888		0	5,66	26.550.000	0	0	0	14.997.000	0	14.997.000	0,00%	56,49%		-	14.997.000	0,00%	15,06%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Berprestasi yang Dapat penilaian	Koperasi	80	99.563.888		0	20	26.550.000	0	0	0	14.997.000	0	14.997.000	0,00%	56,49%		-	14.997.000	0,00%	15,06%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang Dinilai	Koperasi	40	49.781.944			10 Unit Usaha	15.000.000	-	-	1	14.997.000	1	14.997.000	10,00%	99,98%	<	1	14.997.000	2,50%	30,13%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Berprestasi Vano Diberi Penghargaan	Koperasi	40	49.781.944			10 Unit Usaha	11.550.000	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					5,00%	49,99%				1,25%	15,06%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					5,00%	49,99%				1,25%	15,06%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				0		56.457.180		83.948.140		0	0		0	0	-	0,00%	0,00%		-	56.457.180	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17	05	2,01		Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	0	56.457.180		83.948.140		0	0		0	0	-	0,00%	0,00%		-	56.457.180	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
	2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang			0	56.457.180		25	83.948.140		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	56.457.180	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2,00	17,00	5,00			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	PERSEN		-		-	76,89	10.000.000,00		-	-		-	-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
	2,00	17,00	5,00	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan yang keanggotaannya dalam derah kabupaten/kota	Periode Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	BULAN		-	-	-	12,00	10.000.000,00		-	-		-	-	-	0,00%	0,00%		-	56.457.180	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
	2,00	17,00	5,00	2,01	1,00	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaanya Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	USAHA			-		10,00	10.000.000,00		-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	<	-	56.457.180	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen	29,48%	331.746.873	23	1.217.948.489		1.334.493.720	-	-	10	353.145.000												

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Penambahan Jumlah UMKM yang terdata dalam satu tahun	UMKM	368	331.746.873	92	1.217.948.489	92	1.334.493.720	0,00	0	2,00	353.145.000	2,00	353.145.000	2,17%	26,46%		94	1.571.093.489	25,54%	473,58%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Didata	UMKM	48	49.781.944	0	-	12	11.550.000					0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha yang melakukan kerjasama	Unit	80	49.781.944	0	-	20	100.000.000	-	-	2	58.000.000	2	58.000.000	10,00%	58,00%	<	2	58.000.000	2,50%	116,51%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Memiliki NIB	Unit	80	49.781.944	0	-	20	11.550.000					0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang nai Grade menjadi usaha kecil	Unit	80	49.781.944	20	90.051.000	20	11.550.000					0	-	0,00%	0,00%	<	20	90.051.000	25,00%	180,89%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Terverifikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Unit	80	132.619.098	20	466.553.000	20	125.000.000	4	-	8	295.145.000	12	295.145.000	60,00%	236,12%	>	32	761.698.000	40,00%	574,35%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	06	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkopersian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Usaha Mikro Dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang			102	661.344.489	102	687.421.860					0	-	0,00%	0,00%	<	102	661.344.489	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
	2	17	07	2,01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang					100	387.421.860			-	-		-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,00%	42,02%				9,64%	124,54%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	ST	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					10,00%	42,02%				9,64%	124,54%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	ST	DISPRINDAGKOP UKM		
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	8,40%	2.289.969.413	7	1.392.831.000	6,72	531.300.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		7	1.392.831.000	8333,33%	60,82%	DISPRINDAGKOP UKM		
2	17	08	2,01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMKM	400	2.289.969.413	100	1.392.831.000	100	531.300.000	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%		100	1.392.831.000	25,00%	60,82%	DISPRINDAGKOP UKM		
2	17	08	2,01	0002		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	Umit					100	100.000.000		-		4.050.000		4.050.000	0,00%	4,05%	<	-	4.050.000	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM		
2	17	08	2,01	01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM dan pelaku usaha yang melakukan Kerjasama Dalam Rangka Penguatan Akses Pasar Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Unit	400	2.289.969.413	100	1.392.831.000	100	531.300.000				0	-	0%	0%	<	100	1.392.831.000	25%	61%	DISPRINDAGKOP UKM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				25,00%	60,82%	DISPRINDAGKOP UKM		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	R	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					0,00%	0,00%				25,00%	60,82%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				SR	R	DISPRINDAGKOP UKM		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (URUSAN) (%)																					730,22%	24,04%				188,06%	35,29%	DISPRINDAGKOP UKM		
PREDIKAT KINERJA (URUSAN)																					ST	SR				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				26.187.998.742		4.980.359.542		3.182.570.292	0	1.286.426.110	0	5.345.116.343	0	6.631.542.453	0,00%	208,37%	-	11.611.901.995	0,00%	44,34%	DISPRINDAGKOP UKM			
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.958.539.600		4.049.379.113		2.637.500.000	0	977.133.700	0	4.192.872.500	0	5.170.006.200	0,00%	196,02%	-	9.219.385.313	0,00%	43,99%	DISPRINDAGKOP UKM			
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0,44%	6.156.437.631		2.076.969.750	0,44	885.000.000	0	100.500.000	0	1.910.164.300	0	2.010.664.300	0,00%	227,19%	-	4.087.634.050	0,00%	66,40%	DISPRINDAGKOP UKM			

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp	
															K	Rp	K	Rp										
1	3					4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15
	3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	Unit	3	6.082.950.000	3	2.046.489.750	3	855.000.000	0	100.500.000	3	1.887.989.300	3	1.988.489.300	100,00%	232,57%		6	4.034.979.050	200,00%	66,33%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	1	5.845.893.125	1	2.046.489.750	1	800.000.000	1	100.500.000	2	1.887.989.300	3	1.988.489.300	300,00%	248,56%	>	4	4.034.979.050	400,00%	69,02%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah data pasar	Pasar	2	237.056.875	0	-	2 Unit	55.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					150,00%	124,28%				200,00%	34,51%	DISPRINDAGKOP UKM
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	03	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap Penagih Retribusi Pasar	Kali	8	73.487.631	2	30.480.000	2	30.000.000	-	0	1	22.175.000	1	22.175.000	50,00%	73,92%		3	52.655.000	37,50%	71,65%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terkendalikan	Pasar	4	73.487.631	1	30.480.000	1	30.000.000	-	-	4	22.175.000	4	22.175.000	400,00%	73,92%	<	5	52.655.000	125,00%	71,65%	DISPRINDAGKOP UKM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					400,00%	73,92%				125,00%	71,65%	DISPRINDAGKOP UKM
Predikat Kinerja																					ST	S				ST	S	DISPRINDAGKOP UKM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					275,00%	99,10%				162,50%	53,08%	DISPRINDAGKOP UKM
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	ST				ST	R	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	59,98%	2.038.689.125	60	579.712.150	59,97	1.197.500.000	4,00	769.659.400	8,00	1.799.785.000	12	2.569.444.400	20,01%	214,57%		72	3.149.156.550	12004,00%	154,47%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Periode Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	bulan	48	1.683.103.813	12	579.712.150	12	1.115.000.000	1	769.659.400	2	1.799.785.000	3	2.569.444.400	25,00%	230,44%		15	3.149.156.550	31,25%	187,10%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	224	165.939.813	24	4.418.140	56	15.000.000	-	-	128	23.195.600	128	23.195.600	228,57%	154,64%	>	152	27.613.740	67,86%	16,64%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	1.517.164.000	2	575.294.010	2	1.100.000.000	4	769.659.400	8	1.776.589.400	12	2.546.248.800	600,00%	231,48%	>	14	3.121.542.810	140,00%	205,75%	DISPRINDAGKOP UKM
0																					414,29%	193,06%				103,93%	111,19%	DISPRINDAGKOP UKM
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	ST	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah periode pengawasan terhadap Pupuk bersubsidi di Tingkat Kota Lhokseumawe	Bulan	48	355.585.313	-		82.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM	
	3	30	04	2,03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Laporan Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Legalitas dokumen perizinan	Kali	10	118.528.438		2 Dok	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan hasil pengawasan terhadap pengusaha pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	4	118.528.438		1	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan hasil pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	4	118.528.438		1	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					207,14%	96,53%				51,96%	55,60%	DISPRINDAGKOP UKM
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	ST				R	R	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi dagang	Persen	83,33%	5.056.387.500	50	392.444.819	50	485.000.000	22	106.974.300	44	432.940.000	66	539.914.300	132,00%	111,32%		116	932.359.119	13920,56%	18,44%	DISPRINDAGKOP UKM
	3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran dagang dan promosi dagang yang diikuti	Kegiatan/Kali	23	5.056.387.500	6	392.444.819	6	485.000.000	1	106.974.300	2	432.940.000	3	539.914.300	50,00%	111,32%		9	932.359.119	39,13%	18,44%	DISPRINDAGKOP UKM

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp												
1	3						4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	3	30	05	2.01	01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring/pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor kota lhokseumawe	Kali	4	129.303.750	1	6.022.840	1	30.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	1	6.022.840	25,00%	4,66%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	05	2.01	02		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang diikuti	Kali	11	3.266.083.750	3	186.749.979	3	200.000.000	2	56.623.500	2	97.431.200	4	154.054.700	133,33%	77,03%	<	7	340.804.679	63,64%	10,43%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	05	2.01	03		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	Kali	8	1.661.000.000	2	199.672.000	2	240.000.000	2	50.350.800	4	335.508.800	6	385.859.600	300,00%	160,77%	>	8	585.531.600	100,00%	35,25%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	05	2.01	0004		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor	Pelaku usaha				1	15.000.000		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					108,33%	59,45%				47,16%	12,59%	DISPRINDAGKOP UKM			
Predikat Kinerja																					ST	R				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					108,33%	59,45%				47,16%	12,59%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	R				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
	3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Persen	77,71%	7.707.025.344	69	1.000.252.394	71,25	70.000.000	-	-	0	49.983.200	3,44	49.983.200	4,83%	71,40%		72	1.050.235.594	9321,74%	13,63%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	Kali	49	7.707.025.344	8	1.000.252.394	8	70.000.000	-	-	0	49.983.200	0	49.983.200	0,00%	71,40%		8	1.050.235.594	16,33%	13,63%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera Tera Ulang	Kali	14	1.681.688.367	2	966.319.794	2 Unit	35.000.000	-	-	2	39.983.700	2	39.983.700	100,00%	114,24%	>	4	1.006.303.494	28,57%	59,84%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	06	2.01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Penyuluhan dan Diawasi Metrologi Legal	Kali	31	5.906.808.539	5	30.458.850	5 Orang	25.000.000	-	-	4	9.999.500	4	9.999.500	80,00%	40,00%	<	9	40.458.350	29,03%	0,68%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	30	06	2.01	03		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan UTTP Mertologi Legal	Kali	4	118.528.438	1	3.473.750	1 Unit	10.000.000	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	3.473.750	25,00%	2,93%	DISPRINDAGKOP UKM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					60,00%	51,41%				27,53%	21,15%	DISPRINDAGKOP UKM			
Predikat Kinerja																					R	R				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					60,00%	35,06%				1702,42%	69,92%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					R	SR				ST	S	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (URUSAN) (%)																					162,62%	72,54%				491,01%	47,80%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (URUSAN)																					ST	S				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
	3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.229.459.142		930.980.429		545.070.292		309.292.410		1.152.243.843		1.461.536.253	0,00%	268,14%		-	2.392.516.682	0,00%	45,75%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah'	Persen	6,27%	4.352.597.421	4	930.980.429	4,95	364.700.000	20,00	309.292.410	40	959.714.036	2	1.269.006.446	40,40%	347,96%		6	2.199.986.875	9569,38%	50,54%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	Dokumen	12	4.352.597.421	3	930.980.429	3	364.700.000	-	309.292.410	2	959.714.036	2	1.269.006.446	66,67%	347,96%		5	2.199.986.875	41,67%	50,54%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01	01		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	433.113.750	1	9.470.400	1	110.000.000					0	-	0,00%	0,00%	<	1	9.470.400	25,00%	2,19%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	4	142.234.125	1	9.854.400	1	10.000.000	-	-	20	12.309.300	20	12.309.300	2000,00%	123,09%	>	21	22.163.700	525,00%	15,58%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	937.369.015	1	110.905.966	1	50.000.000	0	0	308	31.653.600	308	31.653.600	30800,00%	63,31%	<	309	142.559.566	7725,00%	15,21%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	2.153.122.092	1	9.793.963	1	20.000.000		0	320	26.522.200	320	26.522.200	32000,00%	132,61%	>	321	36.316.163	8025,00%	1,69%	DISPRINDAGKOP UKM		
	3	31	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	449.701.564	1	781.110.350	1	164.700.000	0	309292410	400	879.228.936	400	1.188.521.346	40000,00%	721,63%	>	401	1.969.631.696	10025,00%	437,99%	DISPRINDAGKOP UKM		

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp												
1	3						4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
	3	31	02	2,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	237.056.875	1	9.845.350	1	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00%	100,00%	=	1	19.845.350	25,00%	8,37%	DISPRINDAGKOP UKM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					17466,67%	190,11%				4391,67%	80,17%	DISPRINDAGKOP UKM			
Predikat Kinerja																					ST	ST				ST	T	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					17466,67%	190,11%				4391,67%	80,17%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	ST				ST	T	DISPRINDAGKOP UKM			
	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen	5,65%	237.056.875		0	4,74	55.000.000	0	0	0	9.997.000	0	9.997.000	0,00%	18,18%		-	9.997.000	0,00%	4,22%	DISPRINDAGKOP UKM			
	3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penerbitan izin usaha*	Dokumen	8	237.056.875	0	2 Dok	55.000.000	0	0	0	9.997.000	0	9.997.000	0,00%	18,18%		-	9.997.000	0,00%	4,22%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	laporan	4	118.528.438		1 Dok	27.500.000	-	-	10	9.997.000	10	9.997.000	1000,00%	36,35%	<	10	9.997.000	250,00%	8,43%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perzinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perzinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	laporan	4	118.528.438		1 Dok	27.500.000	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	DISPRINDAGKOP UKM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					500,00%	18,18%				125,00%	4,22%	DISPRINDAGKOP UKM			
Predikat Kinerja																					ST	SR				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					500,00%	18,18%				125,00%	4,22%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					ST	SR				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Persen	Ada	639.804.846	0	Ada/Tidak ada	125.370.292	-	0	-	182.532.807		182.532.807	0,00%	145,59%		-	182.532.807	0,00%	28,53%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8	639.804.846	0	2 Dok	125.370.292	-	0	-	182.532.807	0	182.532.807	0,00%	145,59%		-	182.532.807	0,00%	28,53%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Industri menyampaikan data dan informasi ke Sistem informasi industri	Dokumen	4	237.056.875		1 Dok	25.000.000	-	-	2	77.144.000	2	77.144.000	200,00%	308,58%	>	2	77.144.000	50,00%	32,54%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Dokumen	4	207.196.341		1 Dok	55.000.000	-	-	-	57.750.000	0	57.750.000	0,00%	105,00%	>	-	57.750.000	0,00%	27,87%	DISPRINDAGKOP UKM				
	3	31	04	2,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Industri Yang Dipantau dan Dievaluasi Penyampaian data dan informasi ke Sistem informasi industri	Dokumen	4	195.551.630		1 Dok	45.370.292	-	-	-	47.638.807	0	47.638.807	0,00%	105,00%	>	-	47.638.807	0,00%	24,36%	DISPRINDAGKOP UKM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,67%	172,86%				16,67%	28,26%	DISPRINDAGKOP UKM			
Predikat Kinerja																					S	ST				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					66,67%	172,86%				16,67%	28,26%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					S	ST				SR	SR	DISPRINDAGKOP UKM			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																					6011,11%	127,05%				1511,11%	37,55%	DISPRINDAGKOP UKM			
PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																					ST	ST				ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp										
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																2301,32%	74,54%					730,06%	40,21%	DISPRINDAGKOP UKM
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																ST	S					ST	SR	DISPRINDAGKOP UKM

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp.	Realisasi >/=/<	K	Rp.						
												K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13=7+11	14=13/6*100%	15												
				SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKEUMAWA																SETDAKO						
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																SETDAKO						
		4 01		SEKRETARIAT DAERAH			149.609.412.399		29.447.309.298		31.377.930.212		13.904.728.548		18.479.662.178		32.384.390.726		103,21%		SETDAKO					
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	99.882.862.339	100	26.651.170.366	100	29.278.018.212	50	13.252.497.882	50	17.168.753.975	100	30.421.251.857	100,00%	103,90%	200	57.072.422.223	200,00%	57,14%	SETDAKO	
		4 01 01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	32	68.800.000	2	18.659.700	8	20.200.000	0	10.236.900	8	5.245.800	8	15.482.700	100,00%	76,65%	10	34.142.400	31,25%	49,63%	SETDAKO	
		4 01 01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	68.800.000	3	18.659.700	8	20.200.000	0	10.236.900	8	5.245.800	8	15.482.700	100,00%	76,65%	<	11	34.142.400	34,38%	49,63%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	76,65%				34,38%	49,63%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	ST	T				SR	SR	SETDAKO				
		4 01 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	52.364.882.095	6	11.329.918.550	12	12.553.051.000	12	6.434.777.181	0	4.227.862.062	12	10.662.639.243	100,00%	84,94%	18	21.992.557.793	37,50%	42,00%	SETDAKO	
		4 01 01	2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	9632	52.364.882.095	1204	11329918550	2408	12.553.051.000	1.204	6.434.777.181	1204	4.227.862.062	2408	10.662.639.243	100,00%	84,94%	<	3612	21.992.557.793	37,50%	42,00%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	84,94%				37,50%	42,00%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	ST	T				SR	SR	SETDAKO				
		4 01 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	30.075.000	12	33.500.000	12	140.000.000	6	58.000.000	6	108.650.000	12	166.650.000	100,00%	119,04%	24	200.150.000	50,00%	665,50%	SETDAKO	
		4 01 01	2,05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	30.075.000	1	33.500.000	1	140.000.000	1	58.000.000	1	108.650.000	1	166.650.000	100,00%	119,04%	>	2	200.150.000	50,00%	665,50%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	119,04%				50,00%	665,50%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	ST	ST				SR	ST	SETDAKO				
		4 01 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	12.160.000.000	12	5.428.219.631	12	5.860.000.000	6	3.115.577.719	6	3.372.316.193	12	6.487.893.912	100,00%	110,71%	24	11.916.113.543	50,00%	97,99%	SETDAKO	
		4 01 01	2,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	680.000.000	1	169.657.500	1	280.000.000	0	97.480.700	1	104.031.100	1	201.511.800	100,00%	71,97%	<	2	371.169.300	50,00%	54,58%	SETDAKO
		4 01 01	2,06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	640.000.000	1	105.690.650	1	350.000.000	0	91.077.300	1	178.141.600	1	269.218.900	100,00%	76,92%	<	2	374.909.550	50,00%	58,58%	SETDAKO
		4 01 01	2,06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.800.000.000	1	1.054.927.000	1	1.500.000.000	0	820.866.000	1	986.081.000	1	1.806.947.000	100,00%	120,46%	>	2	2.861.874.000	50,00%	59,62%	SETDAKO
		4 01 01	2,06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	400.000.000	1	79.378.000	1	130.000.000	0	36.690.500	1	68.200.300	1	104.890.800	100,00%	80,69%	<	2	184.268.800	50,00%	46,07%	SETDAKO
		4 01 01	2,06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	840.000.000	1	319.326.500	1	350.000.000	0	250.020.000	1	269.475.000	1	519.495.000	100,00%	148,43%	>	2	838.821.500	50,00%	99,86%	SETDAKO
		4 01 01	2,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	4.800.000.000	500	3.699.239.981	500	3.250.000.000	250	1.819.443.219	250	1.766.387.193	500	3.585.830.412	100,00%	110,33%	>	1000	7.285.070.393	200,00%	151,77%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	101,47%				75,00%	78,41%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	ST	ST				S	T	SETDAKO				
		4 01 01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	40	600.000.000	10	2.263.960.400	10	2.262.088.000	6	433.800.000	6	4.344.054.500	12	4.777.854.500	120,00%	211,21%	22	7.041.814.900	55,00%	1173,64%	SETDAKO	
		4 01 01	2,07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	9	1.800.000.000	0	-	9	1.412.088.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	SETDAKO
		4 01 01	2,07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								1	433.800.000	4	3.247.155.600		3.680.955.600		<						
		4 01 01	2,07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	600.000.000	1	2.263.960.400	1	850.000.000	0	-	1	1.096.898.900	1	1.096.898.900	100,00%	129,05%	>	2	3.360.859.300	200,00%	560,14%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50,00%	64,52%				100,00%	280,07%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	SR	R				ST	ST	SETDAKO				
		4 01 01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	17.328.339.080	6	2.544.060.328	12	2.633.983.720	6	1.296.202.361	6	1.520.252.293	12	2.816.454.654	100,00%	106,93%	18	5.360.514.982	37,50%	30,93%	SETDAKO	
		4 01 01	2,08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	40.500.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	200,00%	40,00%	<	3	20.000.000	75,00%	49,38%	SETDAKO
		4 01 01	2,08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	3.804.000.000	12	727.632.488	12	756.400.200	6	374.929.961	6	382.990.133	12	757.920.094	100,00%	100,20%	>	24	1.485.552.582	50,00%	39,05%	SETDAKO
		4 01 01	2,08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	50.625.000	1	124.700.000	1	12.500.000	0	12.500.000	1	58.100.000	1	70.600.000	100,00%	564,80%	>	2	195.300.000	50,00%	385,78%	SETDAKO
		4 01 01	2,08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	13.433.214.080	12	1.681.727.840	12	1.840.083.520	6	903.772.400	6	1.074.162.160	12	1.977.934.560	100,00%	107,49%	>	24	3.659.662.400	50,00%	27,24%	SETDAKO
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	125,00%	203,12%				56,25%	125,36%	SETDAKO				
														Predikat Kinerja	ST	ST				R	ST	SETDAKO				

			4	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	20	7.000.000.000	5	1.881.353.200	5	2.904.590.492	10	976.701.000	25	2.198.548.000	35	3.175.249.000	700,00%	109,32%		40	5.056.602.200	200,00%	72,24%	SETDAKO	
			4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	3.000.000.000	18	768.932.600	18	769.590.492	9	465.818.000	9	516.312.000	18	982.130.000	100,00%	127,62%	>	36	1.751.062.600	50,00%	58,37%	SETDAKO
			4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	76	2.000.000.000	7	200.679.000	19	285.000.000	9	109.716.000	10	184.990.000	19	294.706.000	100,00%	103,41%	>	26	495.385.000	34,21%	24,77%	SETDAKO
			4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	400.000.000	5	587.398.100	5	800.000.000	3	27.966.000	2	910.243.000	5	938.209.000	100,00%	117,28%	>	10	1.525.607.100	50,00%	381,40%	SETDAKO
			4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	1.200.000.000	6	235.823.500	6	600.000.000	3	189.084.000	3	401.714.000	6	590.798.000	100,00%	98,47%	<	12	826.621.500	50,00%	68,89%	SETDAKO
			4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	400.000.000	4	88.520.000	4	450.000.000	2	184.117.000	2	185.289.000	4	369.406.000	100,00%	82,09%	<	8	457.926.000	50,00%	114,48%	SETDAKO
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	105,77%			46,84%	129,58%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	ST	ST			SR	ST	SETDAKO	
			4	01	01	2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Periode Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	48	2.320.420.000	12	399.931.200	12	579.105.000	12	198.000.000	6	248.000.000	18	446.000.000	150,00%	77,02%		30	845.931.200	62,50%	36,46%	SETDAKO	
			4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	112	716.420.000	7	3.931.200	28	179.105.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	7	3.931.200	6,25%	0,55%	SETDAKO
			4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	96	1.604.000.000	24	396.000.000	24	400.000.000	12	198.000.000	12	248.000.000	24	446.000.000	100,00%	111,50%	>	48	842.000.000	50,00%	52,49%	SETDAKO
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50,00%	55,75%			28,13%	26,52%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	SR	R			SR	SR	SETDAKO	
			4	01	01	2,12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Periode Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bulan	48	1.288.000.000	0	-	12	330.000.000	12	70.000.000		-	12	70.000.000	100,00%	21,21%		12	70.000.000	25,00%	5,43%	SETDAKO	
			4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	538.000.000		1	140.000.000	0			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	SETDAKO		
			4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	508.000.000		1	120.000.000	0			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	SETDAKO		
			4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4	242.000.000		1	70.000.000	1	70.000.000		-	1	70.000.000	100,00%	100,00%	=	1	70.000.000	25,00%	28,93%	SETDAKO	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	33,33%	33,33%			8,33%	9,64%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	SETDAKO	
			4	01	01	2,13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	48	1.998.352.000	12	534.244.197	12	410.000.000	6	257.377.071	6	252.529.380	12	509.906.451	100,00%	124,37%		24	1.044.150.648	50,00%	52,25%	SETDAKO	
			4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	24	304.000.000	6	119.924.505	6	95.000.000	2	40.977.000	4	84.023.000	6	125.000.000	100,00%	131,58%	>	12	244.924.505	50,00%	80,57%	SETDAKO
			4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	28	1.349.352.000	5	191.902.465	7	145.000.000	4	129.813.411	3	90.128.581	7	191.902.465	100,00%	132,35%	>	12	383.804.930	42,86%	28,44%	SETDAKO
			4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	180	345.000.000	1	222.417.227	1	170.000.000	3	86.586.660	2	78.377.799	5	222.417.227	500,00%	130,83%	>	6	444.834.454	3,33%	128,94%	SETDAKO
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	233,33%	131,59%			32,06%	79,32%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	ST	ST			SR	T	SETDAKO	
			4	01	01	2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Periode Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bulan	48	4.723.994.164	12	2.217.323.160	12	1.585.000.000	6	401.825.650	6	891.295.747	12	1.293.121.397	100,00%	81,58%		24	3.510.444.557	50,00%	74,31%	SETDAKO	
			4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	383.994.164	1	138.898.375	1	100.000.000	0	90.791.950	1	81.647.200	1	90.791.950	100,00%	90,79%	<	2	229.690.325	50,00%	59,82%	SETDAKO
			4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	3.800.000.000	1	1.914.435.385	1	1.400.000.000	0	268.722.900	1	693.705.313	1	268.722.900	100,00%	19,19%	<	2	2.183.158.285	50,00%	57,45%	SETDAKO
			4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	540.000.000	1	163.989.400	1	85.000.000	0	42.310.800	1	115.943.234	1	42.310.800	100,00%	49,78%	<	2	206.300.200	50,00%	38,20%	SETDAKO
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	53,25%			50,00%	51,82%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	ST	R			SR	R	SETDAKO	
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)	99,24%	93,58%			47,14%	139,81%	SETDAKO	
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)	ST	ST			SR	ST	SETDAKO	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98,7	47.322.697.218	84,61	2.278.398.581	98,7	1.542.912.000	36,00	534.346.383	62,70	736.571.030	98,70	1.270.917.413	100,00%	82,37%		183,31	3.549.315.994	185,72%	7,50%	SETDAKO	
			4	01	02	2,01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	12	42.020.047.538	12	876.186.587	12	592.912.000	6	160.714.520	6	455.367.130	12	616.081.650	100,00%	103,91%		24	1.492.268.237	200,00%	3,55%	SETDAKO	
			4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	207.500.000	1	142.381.749	1	152.912.000	0	71.259.084	1	336.096.934	1	407.356.018	100,00%	266,40%	>	2	549.737.767	50,00%	264,93%	SETDAKO
			4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	36	1.300.000.000	4	176.129.826	9	245.000.000	2	20.478.600	7	62.661.300	9	83.139.900	100,00%	33,93%	<	13	259.269.726	36,11%	19,94%	SETDAKO
			4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	16	40.512.547.538	4	557.675.012	4	195.000.000	2	68.976.836	2	56.608.896	4	125.585.732	100,00%	64,40%	<	8	683.260.744	50,00%	1,69%	SETDAKO
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	121,58%			45,37%	95,52%	SETDAKO	
																						Predikat Kinerja	ST	ST			SR	ST	SETDAKO	
			4	01	02	2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Periode Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	48	3.180.000.000	12	847.451.570	12	490.000.000	6	120.970.800	6	281.203.900	12	402.174.700	100,00%	82,08%		24	1.249.626.270	50,00%	39,30%	SETDAKO	
			4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	1.260.000.000	1	511.129.700	1	240.000.000	0	105.430.800	1	197.439.300	1	302.870.100	100,00%	126,20%	>	2	813.999.800	50,00%	64,60%	SETDAKO

						4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	200.000.000	1	60.869.250	1	50.000.000	0	3.380.000	1	32.460.700	1	35.840.700	100,00%	71,68%	<	2	96.709.950	50,00%	48,35%	SETDAKO		
						4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4	1.720.000.000	1	275.452.620	1	200.000.000	0	12.160.000	1	51.303.900	1	63.463.900	100,00%	31,73%	<	2	338.916.520	50,00%	19,70%	SETDAKO		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	76,54%					50,00%	44,22%	SETDAKO
																									Predikat Kinerja		ST	T					SR	SR	SETDAKO
						4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen	12	2.122.649.680	3	554.760.424	3	460.000.000	6	252.661.063	0	-	6	252.661.063	200,00%	54,93%		9	807.421.487	75,00%	38,04%	SETDAKO		
						4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	24	680.000.000	6	166.307.060	6	138.588.200	6	96.887.653	0	-	6	96.887.653	100,00%	69,91%	>	12	263.194.713	50,00%	38,71%	SETDAKO		
						4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	64	1.300.000.000	16	352.828.164	16	287.531.600	16	133.408.750	0	-	16	133.408.750	100,00%	46,40%	<	32	486.236.914	50,00%	37,40%	SETDAKO		
						4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	280	142.649.680	70	35.625.200	70	33.880.200	34	22.364.660	0	-	34	22.364.660	48,57%	66,01%	>	104	57.989.860	37,14%	40,65%	SETDAKO		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		82,86%	60,77%					45,71%	38,92%	SETDAKO
																									Predikat Kinerja		T	R					SR	SR	SETDAKO
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		94,29%	86,30%					47,03%	59,55%	SETDAKO
																									PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	T					SR	R	SETDAKO
	Meningkatnya Pelayanan Publik					4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	92	2.403.852.842	77,27	517.740.351	97	557.000.000	17,00	117.884.283	80,00	574.337.173	97,00	692.221.456	100,00%	124,28%		174,27	1.209.961.807	189,42%	50,33%	SETDAKO		
						4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	12	1.060.640.000	3	170.714.850	3	160.000.000	1	98.390.578	2	217.514.637	3	315.905.215	100,00%	197,44%		6	486.620.065	50,00%	45,88%	SETDAKO		
						4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	210.640.000	1	47.982.185	1	35.000.000	0	21.709.100	1	137.148.144	1	158.857.244	100,00%	453,88%	>	2	206.839.429	50,00%	98,20%	SETDAKO		
						4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	16	640.000.000	1	93.997.775	4	85.000.000	2	61.876.878	2	58.078.993	4	119.955.871	100,00%	141,12%	>	5	213.953.646	31,25%	33,43%	SETDAKO		
						4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	8	210.000.000	1	28.734.890	2	40.000.000	1	14.804.600	1	22.287.500	2	37.092.100	100,00%	92,73%	<	3	65.826.990	37,50%	31,35%	SETDAKO		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	229,24%					39,58%	54,32%	SETDAKO
																									Predikat Kinerja		ST	ST					SR	R	SETDAKO
						4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumnen	12	318.012.842	1	109.530.282	3	150.000.000	0	19.493.705	2	102.621.071	2	122.114.776	66,67%	81,41%		3	231.645.058	25,00%	72,84%	SETDAKO		
						4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	158.823.588	4	51.464.953	4	75.000.000	2	8.360.800	2	65.124.971	4	73.485.771	100,00%	97,98%	<	8	124.950.724	200,00%	78,67%	SETDAKO		
						4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	159.189.254	12	58.065.329	12	75.000.000	6	11.132.905	6	37.496.100	12	48.629.005	100,00%	64,84%	<	24	106.694.334	200,00%	67,02%	SETDAKO		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	81,41%					200,00%	72,85%	SETDAKO
																									Predikat Kinerja		ST	T					ST	S	SETDAKO
						4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	1.025.200.000	3	237.495.219	3	247.000.000	0	-	12	254.201.465	12	254.201.465	400,00%	102,92%		15	491.696.684	125,00%	47,96%	SETDAKO		
						4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	554.000.000	8	124.555.064	8	125.000.000	0	-	8	167.336.305	8	167.336.305	100,00%	133,87%	>	16	291.891.369	133,33%	52,69%	SETDAKO		
						4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	303.200.000	6	48.968.882	6	47.000.000	0	-	6	38.341.424	6	38.341.424	100,00%	81,58%	<	12	87.310.306	100,00%	28,80%	SETDAKO		
						4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	168.000.000	5	63.971.273	5	75.000.000	0	-	5	48.523.736	5	48.523.736	100,00%	64,70%	<	10	112.495.009	83,33%	66,96%	SETDAKO		
																									Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	93,38%					105,56%	49,48%	SETDAKO
																									Predikat Kinerja		ST	ST					ST	SR	SETDAKO
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		100,00%	134,68%					115,05%	58,88%	SETDAKO
																									PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST					ST	R	SETDAKO
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		100,00%	121,06%					65,97%	61,78%	SETDAKO
																									PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		ST	ST					S	R	SETDAKO

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9+10	12-11/8	13 = 7+11	14-13/6*100%	15														
Meningkatnya Pelayanan Publik	4				SEKRETARIAT DPRD		105.321.681.424			26.106.741.901		13.583.099.944		-		13.583.099.944					13.583.099.944							
	4	02			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		105.321.681.424			26.106.741.901		13.583.099.944		-		13.583.099.944					13.583.099.944							
	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	81.481.339.215	83	100	19.099.216.908	33	10.491.752.270	50,33	-	83,33	10.491.752.270	83,33%	54,93%		166	10.491.752.270	166,33%	12,88%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	64.096.064	6	6	28.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%		6	-	25,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	80	12.018.012	20	15.619.000	20	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	20	15.619.000	25,00%	129,96%	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	10.015.010	1	2.500.000	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	10.015.010	1	2.500.000	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	12.018.012	1	3.000.000	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	12.018.012	1	3.000.000	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	4	8.012.008	1	2.000.000	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%			4,17%	21,66%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	Sekretariat DPRK				
	4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode	48	18.088.994.892	12	12	5.373.054.667	12	2.924.084.891	0	-	12	2.924.084.891	100,00%	54,42%		24	2.924.084.891	50,00%	16,16%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3472	18.088.994.892	868	5.295.334.522	868	5.373.054.667	868	2.924.084.891	0	-	868	2.924.084.891	100,00%	54,42%	<	1.736	8.219.419.413	50,00%	45,44%	Sekretariat DPRK
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	54,42%			50,00%	45,44%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																		ST	R			SR	SR	Sekretariat DPRK				
	4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis	12	140.210.140		3	35.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	24	96.144.096	1	24.000.000		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	248	24.036.024	62	6.000.000		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	20.030.020	75	5.000.000		0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR	Sekretariat DPRK				
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	44	3.448.768.844	11	11	705.780.000	11	279.678.060	0	0	11	279.678.060	100,00%	39,63%		22	279.678.060	50,00%	8,11%	Sekretariat DPRK		
	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	72.108.072	25	14.992.050	25	15.000.000	25	6.252.100	0	-	25	6.252.100	100,00%	41,68%	<	50	21.244.150	50,00%	29,46%	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	300	600.900.600	75	89.817.790	75	90.000.000	75	32.105.360		-	75	32.105.360	100,00%	35,67%	<	150	121.923.150	50,00%	20,29%	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	44.066.044	2	7.958.800	2	8.000.000	0	-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	2	7.958.800	25,00%	18,06%	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18000	1.081.621.080	4.500	229.960.800	4500	230.000.000	2250	98.713.300		-	2250	98.713.300	50,00%	42,92%	<	6.750	328.674.100	37,50%	30,39%	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	360.540.360	2	69.671.000	2	65.000.000	1	26.919.000		1	26.919.000	50,00%	41,41%	<	3	96.590.000	37,50%	26,79%	Sekretariat DPRK	

No	Sasaran Daerah		Kode				Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp												
1	2		3				4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15		
			4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4176	388.181.788	1.044	87.400.000	1044	87.780.000	1044	32.300.000		1044	32.300.000	100,00%	36,80%	<	2.088	119.700.000	50,00%	30,84%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	16	80.120.080	0	0	1	20.000.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		800	200.300.200	0	0	1	50.000.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	460.690.460	40	102.946.750	40	100.000.000	40	83.388.300		40	83.388.300	100,00%	83,39%	<	80	186.335.050	50,00%	40,45%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2080	100.150.100		520	25.000.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
			4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	60.090.060		2	15.000.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						45,45%	25,62%				27,27%	17,84%	Sekretariat DPRK		
Predikat Kinerja																						SR	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jenis	12	500.750.500	3		3	125.000.001	3	37.090.000	0	-	3	37.090.000	100,00%	29,67%		6	37.090.000	50,00%	7,41%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	200.300.200		1	50.000.001				0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	100.150.100		1	25.000.000				0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	200.300.200	12	45.700.000	12	50.000.000	0	37.090.000	0	-	0	37.090.000	0,00%	74,18%	<	12	82.790.000	25,00%	41,33%	Sekretariat DPRK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00%	24,73%				8,33%	13,78%	Sekretariat DPRK		
Predikat Kinerja																						SR	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jenis	16	10.771.362.466	4		4	1.455.492.000	4	803.187.676	0	-	4	803.187.676	100,00%	55,18%		8	803.187.676	50,00%	7,46%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4800	20.030.020	1	4.850.000	1	5.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	4.850.000	0,02%	24,21%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.431.193.001	1	372.473.144	1	330.000.000	2	147.587.676		2	147.587.676	200,00%	44,72%	<	3	520.060.820	25,00%	36,34%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	112.168.112	1	23.000.000	1	16.600.000	1	9.100.000		1	9.100.000	100,00%	54,82%	<	2	32.100.000	7,14%	28,62%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14544	9.207.971.333	2	1.498.228.960	1	1.103.892.000	2	646.500.000		2	646.500.000	200,00%	58,57%	<	4	2.144.728.960	0,03%	23,29%	Sekretariat DPRK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						125,00%	39,53%				8,05%	28,12%	Sekretariat DPRK		
Predikat Kinerja																						ST	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jenis	20	3.142.309.538	5		5	391.067.240	10	65.822.400	0	-	10	65.822.400	200,00%	16,83%		15	65.822.400	75,00%	2,09%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	192	280.420.280	48	160.061.350	48	209.567.240	72	65.822.400	0	-	72	65.822.400	150,00%	31,41%	<	120	225.883.750	62,50%	80,55%	Sekretariat DPRK	
			4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	240	959.037.358	60	46.184.500	60	76.500.000	0	19.700.100		0	19.700.100	0,00%	25,75%	<	60	65.884.600	25,00%	6,87%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.702.551.700	1	9.830.000	1	75.000.000		-		0	-	0,00%	0,00%	<	1	9.830.000	25,00%	0,58%	Sekretariat DPRK		
			4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	80.120.080	1	10.000.000	1	10.000.000		-		0	-	0,00%	0,00%	<	1	10.000.000	25,00%	12,48%	Sekretariat DPRK		

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= / <	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	120.180.120	20	19.648.374	20	20.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	20	19.648.374	125,00%	16,35%	Sekretariat DPRK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																30,00%	11,43%				52,50%	23,37%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																SR	SR				R	SR	Sekretariat DPRK				
		4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jenis	12	1.041.561.040	3		3	110.000.000	3	73.729.400	0	-	3	73.729.400	100,00%	67,03%	6	73.729.400	50,00%	7,08%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.14 01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	Laporan	120	80.120.080	30	37.949.000	30	35.000.000	30	20.942.400	-	30	20.942.400	100,00%	59,84%	<	60	58.891.400	50,00%	73,50%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	881.320.880	3	19.995.500	3	25.000.000	3	20.275.400	-	3	20.275.400	100,00%	81,10%	<	6	40.270.900	50,00%	4,57%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	80.120.080	3	59.293.965	3	50.000.000	2	32.511.600	-	2	32.511.600	66,67%	65,02%	<	5	91.805.565	41,67%	114,58%	Sekretariat DPRK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																88,89%	68,65%				47,22%	64,22%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																T	S				SR	R	Sekretariat DPRK				
		4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jenis	12	39.235.091.017	3		3	10.430.823.000	3	5.813.952.743	0	-	3	5.813.952.743	100,00%	55,74%	6	5.813.952.743	50,00%	14,82%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	OB	1400	37.442.008.233	350	9.433.238.631	350	10.006.473.000	350	5.507.705.688	-	350	5.507.705.688	100,00%	55,04%	<	700	14.940.944.319	50,00%	39,90%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	500	1.292.332.284	125	297.316.287	125	299.350.000	50	306.247.055	-	50	306.247.055	40,00%	102,30%	>	175	603.563.342	35,00%	46,70%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	100	500.750.500	25	124.725.000	25	125.000.000	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	25	124.725.000	25,00%	24,91%	Sekretariat DPRK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																46,67%	52,45%				36,67%	37,17%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																SR	R				SR	SR	Sekretariat DPRK				
		4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Jenis	16	5.048.194.712	2		4	445.000.000	2	494.207.100	-	-	2	494.207.100	50,00%	111,06%	4	494.207.100	25,00%	9,79%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	100	40.060.040	0	-	25	10.000.000	0	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.16 02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	192	80.120.080	4	19.674.650	4	20.000.000	2	6.163.200	-	2	6.163.200	50,00%	30,82%	<	6	25.837.850	3,13%	32,25%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.16 03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	192	4.867.924.532	48	941.064.290	48	400.000.000	48	488.043.900	-	48	488.043.900	100,00%	122,01%	>	96	1.429.108.190	50,00%	29,36%	Sekretariat DPRK			
		4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	16	60.090.060			4	15.000.000	0	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37,50%	38,21%				13,28%	15,40%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																SR	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																47,4%	31,5%				24,7%	26,7%	Sekretariat DPRK				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																SR	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK				
Meningkatnya Pelayanan Publik	4 02 02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Persen	70	23.840.342.209	63	3.223.419.479	70	7.007.524.993	97,5	3.091.347.674	0	-	97,5	3.091.347.674	100%	44,11%	161	6.314.767.153	229,29%	26,49%	Sekretariat DPRK			
	4 02 02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah	Jenis	20	3.219.824.186	5		5	806.191.633	5	385.180.587	-	-	5	385.180.587	100,00%	47,78%	10	385.180.587	50,00%	11,96%	Sekretariat DPRK			
	4 02 02	2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	78.756.356	7	17.637.590	7	19.659.580	7	4.691.500	-	7	4.691.500	100%	23,86%	<	14	22.329.090	350,00%	28,35%	Sekretariat DPRK			
	4 02 02	2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	58	2.451.784.989	7	828.948.420	7	615.020.270	7	360.489.087	-	7	360.489.087	100%	58,61%	<	14	1.189.437.507	24,14%	48,51%	Sekretariat DPRK			
	4 02 02	2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Berita Acara	8	388.832.541	2	95.592.200	2	96.511.783	2	20.000.000	-	2	20.000.000	100%	20,72%	<	4	115.592.200	50,00%	29,73%	Sekretariat DPRK			
	4 02 02	2.01 04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Berita Acara	12	140.210.140			3	35.000.000			0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK				
	4 02 02	2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Berita Acara	4	160.240.160			1	40.000.000			0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																60,00%	20,64%				84,83%	21,32%	Sekretariat DPRK				
Predikat Kinerja																R	SR				T	SR	Sekretariat DPRK				
	4 02 02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jenis	24	3.736.767.483	3		6	577.000.000	3	378.679.500		0	3	378.679.500	50%	65,63%	6	378.679.500	25,00%	10,13%	Sekretariat DPRK			

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	40	118.812.070	10	29.612.500	10	24.000.000	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	10	29.612.500	25,00%	24,92%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	40	119.000.552	10	29.704.280	10	24.000.000	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	10	29.704.280	25,00%	24,96%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	4	2.856.106.592	1	700.623.147	1	400.000.000	2	297.411.700	-	2	297.411.700	200%	74,35%	<	3	998.034.847	75,00%	34,94%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	4	119.003.557	1	29.702.550	1	24.000.000	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	1	29.702.550	25,00%	24,96%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	8	20.030.020			2	5.000.000				0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	4	503.814.693	1	124.033.100	1	100.000.000	1	81.267.800	-	-	1	81.267.800	100%	81,27%	<	2	205.300.900	50,00%	40,75%	Sekretariat DPRK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	50,00%	25,94%				33,33%	25,09%	Sekretariat DPRK			
Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jenis	32	3.965.541.638	4	8	872.000.000	4	706.941.100			0	4	706.941.100	50%	81,07%		8	706.941.100	25,00%	17,83%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	40	1.730.684.264	10	816.756.888	10	350.000.000	10	391.647.700			10	391.647.700	100%	111,90%	>	20	1.208.404.588	50,00%	69,82%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	40	640.499.950	10	157.810.450	10	150.000.000	10	86.842.400			10	86.842.400	100%	57,89%	<	20	244.652.850	50,00%	38,20%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	40	640.483.926	10	157.544.600	10	155.000.000	10	79.014.200			10	79.014.200	100%	50,98%	<	20	236.558.800	50,00%	36,93%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	40	640.501.552	10	157.865.184	10	150.000.000	10	127.216.800			10	127.216.800	100%	84,81%	<	20	285.081.984	50,00%	44,51%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	40	40.060.040	10	9.993.000	10	10.000.000	7	2.300.000			7	2.300.000	70%	23,00%	<	17	12.293.000	42,50%	30,69%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	40	48.758.276	10	12.147.300	10	9.000.000		0		0	0	-	0%	0,00%	<	10	12.147.300	25,00%	24,91%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	40	96.144.096	10	23.994.000	10	20.000.000		-		-	0	-	0%	0,00%	<	10	23.994.000	25,00%	24,96%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rekomendasi	40	128.409.534	8	31.454.270	10	28.000.000	-	19.920.000	-	-	0	19.920.000	0%	71,14%	<	8	51.374.270	20,00%	40,01%	Sekretariat DPRK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	58,75%	49,97%				39,06%	38,75%	Sekretariat DPRK			
Predikat Kinerja																	R	SR				SR	SR	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Jenis	28	7.152.138.432	6	6	3.081.333.360	6	1.001.659.287	-	-	-	6	1.001.659.287	100,00%	32,51%		12	1.001.659.287	42,86%	14,01%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen			25	300.000.000		25	194.127.787			-	25	194.127.787	100%	64,71%	<	25	194.127.787	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan ...	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen			4	834.400.000		4	569.531.500			-	4	569.531.500	100%	68,26%	<	4	569.531.500	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang			36	167.272.830		36	75.000.000			-	36	75.000.000	100%	44,84%	<	36	75.000.000	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang			48	184.305.740		48	100.000.000			-	48	100.000.000	100%	54,26%	<	48	100.000.000	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen			12	100.000.000		12	63.000.000			-	12	63.000.000	100%	63,00%	<	12	63.000.000	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen			2	5.000.000		-			-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen				5.000.000		-	-		-	-	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	100	2.003.002.001		25	500.000.000		-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	16	3.680.621.213		4	918.776.220		-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	144	670.095.626		36	167.272.830	-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	192	738.329.532		48	184.305.740	-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	48	40.060.040		12	10.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	8	20.030.020		2	5.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja												Sekretariat DPRK	
		4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jenis	12	5.135.897.429	3	3	1.155.000.000	3	465.500.000	-	-	3	465.500.000	100,00%	40,30%		6	465.500.000	50,00%	9,06%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	200.300.200	3	3	50.000.000	3	15.000.000	-	-	3	15.000.000	100%	30,00%	<	6	64.330.000	50,00%	32,12%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	12	20.030.020	0	3	5.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	12	4.915.567.209	75	75	1.100.000.000	75	450.500.000	-	-	75	450.500.000	100%	40,95%	<	150	1.677.366.500	1250,00%	34,12%	Sekretariat DPRK			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja												Sekretariat DPRK	
		4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jenis	8	21.530.020		1	6.000.000		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kode Etik	1	1.500.000			1.000.000		-	-	-	0	-	0%	0%	<	-	-	-	0,00%	0,0%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	24	20.030.020	5	6	5.000.000		-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	5	4.340.000	20,83%	21,67%	Sekretariat DPRK			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja												Sekretariat DPRK	
		4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jenis	8	288.162.700	1	2	455.000.000	2	153.387.200	-	-	2	153.387.200	100,00%	33,71%		3	153.387.200	37,50%	53,23%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.07 01	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	48	20.030.020	12	12	5.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	<	12	4.860.600	25,00%	24,27%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	8	268.132.680	12	12	450.000.000	12	153.387.200	-	-	12	153.387.200	100%	34,09%	<	24	692.155.200	300,00%	258,14%	Sekretariat DPRK			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja												Sekretariat DPRK	
		4 02 02 2.08	Facilitasi Tugas DPRD	Jumlah Facilitasi Tugas DPRD	Jenis	16	320.480.320		4	55.000.000		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK			
		4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	48	40.060.040		12	10.000.000		-	-	-	0	-	0%	0%	<	-	-	-	0,00%	0,0%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	24	40.060.040		6	10.000.000		-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.08 03	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	48	200.300.200		12	25.000.000		-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
		4 02 02 2.08 04	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	72	40.060.040		18	10.000.000		-	-	-	0	-	0%	0,00%	<	-	-	-	0,00%	0,00%	Sekretariat DPRK		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja												Sekretariat DPRK	
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		39,8%		19,6%								95,4%		32,4%	Sekretariat DPRK
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)		SR		SR								ST		SR	Sekretariat DPRK
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		43,60%		25,53%								60,09%		29,55%	Sekretariat DPRK
												PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		SR		SR								R		SR	Sekretariat DPRK

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		BAPPEDA		32.662.110.295		9.345.015.188	2.429.937.389	3.581.911.892	6.011.849.281		6.011.849.281															
		5 01	PERENCANAAN		30.750.579.670		8.593.015.188	2.413.831.289	3.258.001.533	5.904.772.332																	
		5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	25.830.825.136	100	100	6.330.618.717	66,67	2.413.831.289	33,33	2.597.451.130	100	5.011.282.419	100,00%	79,16%		200,00	5.011.282.419	200,00%	19,40%	Bappeda			
		5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Dokumen	60	100.000.000	15	15	15.689.380	-	0	15.440.715	0	15.440.715	0,00%	98,42%		15	15.440.715	25,00%	15,44%	Bappeda				
		5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	100.000.000	15	11.897.600	15	15.689.380	-	15	15.440.715	15	15.440.715	100,00%	98,42%	<	30	27.338.315	50,00%	27,34%	Bappeda			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	98,42%				37,50%	27,34%	Bappeda				
														Predikat Kinerja		ST	ST				SR	SR	Bappeda				
		5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode	48	18.126.527.836	12	12	4.506.024.000	12	2.112.746.921	0	1.821.535.244	12	3.934.282.165	100,00%	87,31%		24	3.934.282.165	50,00%	21,70%	Bappeda			
		5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3360	18.086.527.836	840	4.250.306.890	840	4.496.024.000	560	2.112.746.921	1120	1.821.535.244	1680	3.934.282.165	200,00%	87,51%	<	2.520	8.184.589.055	75,00%	45,25%	Bappeda		
		5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	28	40.000.000	0	-	7	10.000.000	0	-	-	0	-	-	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	43,75%				37,50%	22,63%	Bappeda				
														Predikat Kinerja		ST	SR				SR	SR	Bappeda				
		5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	72.000.000,00		2	18.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%		Bappeda				
		5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	32.000.000,00		1	8.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%		Bappeda				
		5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	40.000.000,00		1	10.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%		Bappeda				
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Bappeda				
														Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR	Bappeda				
		5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	519.020.000	12	12	193.755.000	12	13.250.000	0	14.825.000	12	28.075.000	100,00%	0,00%		24	28.075.000	50,00%	5,41%	Bappeda			
		5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	800	291.260.000	-	-	200	156.815.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda			
		5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	160.000.000	30	14.000.000	42	20.000.000	30	13.250.000	30	14.825.000	60	28.075.000	142,86%	140,38%	>	90	42.075.000	125,00%	26,30%	Bappeda		
		5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	67.760.000	-	-	5	16.940.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		47,62%	46,79%				41,67%	8,77%	Bappeda				
														Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR	Bappeda				
		5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	1.513.486.604	12	12	236.131.272	12	84.595.330	12	136.402.909	24	220.998.239	200,00%	93,59%		36	220.998.239	75,00%	14,60%	Bappeda			
		5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	320	210.840.800	80	21.621.000	80	43.066.272	80	6.028.500	0	29.977.300	80	36.005.800	100,00%	83,61%	<	160	57.626.800	50,00%	27,33%	Bappeda		
		5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	-	-	1	5.000.000	0	0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda			
		5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4600	178.325.804	1.150	15.700.000	1150	29.925.000	0	-	1150	17.985.000	1150	17.985.000	100,00%	60,10%	<	2.300	33.685.000	50,00%	18,89%	Bappeda		
		5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	120	120.000.000	30	17.203.000	30	25.000.000	0	-	20	17.781.100	20	17.781.100	66,67%	71,12%	<	50	34.984.100	41,67%	29,15%	Bappeda		

				5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2920		11.520.000	730		1.140.000	730		1.140.000	365		285.000	365		855.000	730		1.140.000	100,00%	100,00%	=		1.460		2.280.000	50,00%	19,79%	Bappeda	
				5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4		48.000.000	-		-	1		12.000.000	0		0				0		-	0,00%	0,00%	<		-		-	0,00%	0,00%	Bappeda	
				5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240		939.800.000	60		115.924.059	60		120.000.000	10		78.281.830	50		69.804.509	60		148.086.339	100,00%	123,41%	>		120		264.010.398	50,00%	28,09%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											66,67%	62,61%					34,52%	17,61%	Bappeda					
Predikat Kinerja																											S	R					SR	SR	Bappeda					
				5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	53		2.040.214.000	3			17		561.891.560			-		6		239.740.000	6		239.740.000	35,29%	42,67%			9		239.740.000	16,98%	11,75%	Bappeda
				5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4		800.000.000				1		236.500.000			0			0		-	0,00%	0,00%	<		-		-	0,00%	0,00%	Bappeda		
				5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12		200.000.000				3		50.000.000			0			0		-	0,00%	0,00%	<		-		-	0,00%	0,00%	Bappeda		
				5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20		200.000.000				8		50.000.000			0			0		-	0,00%	0,00%	<		-		-	0,00%	0,00%	Bappeda		
				5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8		540.214.000				2		135.053.500			0		0	0		-	0,00%	0,00%	<		-		-	0,00%	0,00%	Bappeda		
				5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12		300.000.000	3		62.687.000	3		90.338.060			0		6		239.740.000	6		239.740.000	200,00%	265,38%	>		9		302.427.000	75,00%	100,81%	Bappeda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											40,00%	53,08%					15,00%	20,16%	Bappeda					
Predikat Kinerja																											SR	R					SR	SR	Bappeda					
				5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48		2.338.636.416	12			12		488.584.505	6		150.729.538	6		219.167.389	12		369.896.927	100,00%	75,71%			24		369.896.927	50,00%	15,82%	Bappeda	
				5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	120		20.000.000	30		3.000.000	30		2.990.000	15		30.000	15		2.950.000	30		2.980.000	100,00%	99,67%	<		60		5.980.000	50,00%	29,90%	Bappeda	
				5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	336		1.064.800.000	84		183.696.020	84		225.000.000	42		47.199.538	42		67.015.529	84		114.215.067	100,00%	50,76%	<		168		297.911.087	50,00%	27,98%	Bappeda	
				5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2832		1.253.836.416	690		264.823.160	708		260.594.505	345		103.500.000	1053		149.201.860	1398		252.701.860	197,46%	96,97%	<		2.088		517.525.020	73,73%	41,28%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											132,49%	82,47%					57,91%	33,05%	Bappeda					
Predikat Kinerja																											ST	T					R	SR	Bappeda					
				5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	180		1.120.940.280	40			45		310.543.000	20		52.509.500	20		150.339.873	40		202.849.373	88,89%	65,32%			80		202.849.373	44,44%	18,10%	Bappeda	
				5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikelola	Unit	48		191.664.000	12		32.589.550	12		34.100.000	12		12.846.800	12		21.419.500	24		34.266.300	200,00%	100,49%	>		36		66.855.850	75,00%	34,88%	Bappeda	
				5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dikelola	Unit	96		291.276.280	24		50.795.200	24		90.000.000	12		35.169.700	12		53.669.050	24		88.838.750	100,00%	98,71%	<		48		139.633.950	50,00%	47,94%	Bappeda	
				5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		400.000.000	1		30.000.000	1		136.444.000	0		0	1		49.792.323	1		49.792.323	100,00%	36,49%	<		2		79.792.323	50,00%	19,95%	Bappeda	
				5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32		238.000.000	8		23.775.500	8		49.999.000	0		4.493.000	4		25.459.000	4		29.952.000	50,00%	59,91%	<		12		53.727.500	37,50%	22,57%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											112,50%	73,90%					34,89%	18,11%	Bappeda					
Predikat Kinerja																											ST	S					SR	SR	Bappeda					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																											74,9%	57,6%					32,4%	18,5%	Bappeda					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																											S	R					SR	SR	Bappeda					
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	5	01	02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada		2.482.886.377			431.080.974	Ada		1.421.732.601	Ada		120.923.430	Ada		291.683.150	Ada		412.606.580	100%	29,02%		-		843.687.554	0,00%	33,98%	Bappeda		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																				89,9%	22,0%					409,9%	21,5%	Bappeda
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																				T	SR					ST	SR	Bappeda
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen	100	2.436.868.157	98,4		100	840.663.870	98,39	112.016.080	-	368.867.253	98,39	480.883.333	98,39%	57,20%		196,78	480.883.333	196,78%	19,73%	Bappeda
		5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bulan	48	710.968.157	12,0		12	170.000.000	6	58.480.480	6	129.213.754	12	187.694.234	100%	110,41%		24	187.694.234	50,00%	26,40%	Bappeda
		5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	130.968.157	-	-	1	10.000.000	-	1.917.800	1	4.578.100	1	6.495.900	100%	64,96%	<	1	6.495.900	25,00%	4,96%	Bappeda
		5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	44	60.000.000	1,0	11.729.700	1	6.500.000	-	11	4.474.800	11	4.474.800	1100%	68,84%	<	12	16.204.500	27,27%	27,01%	Bappeda	
		5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	60.000.000	-	-	1	10.000.000	-	1	6.819.800	1	6.819.800	100%	68,20%	<	1	6.819.800	25,00%	11,37%	Bappeda	
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	60.000.000	-	-	1	35.000.000	-	9.359.200	1	15.823.300	1	25.182.500	100%	71,95%	<	1	25.182.500	25,00%	41,97%	Bappeda
		5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	60.000.000	1,0	8.116.500	1	20.000.000	1	11.894.300	2	4.174.600	3	16.068.900	300%	80,34%	<	4	24.185.400	40,00%	40,31%	Bappeda
		5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	52	60.000.000	1,0	4.946.750	1	6.500.000	-	23	5.819.500	23	5.819.500	2300%	89,53%	<	24	10.766.250	46,15%	17,94%	Bappeda	
		5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	52	120.000.000	-	-	1	10.000.000	-	23	18.800.000	23	18.800.000	2300%	188,00%	>	23	18.800.000	44,23%	15,67%	Bappeda	
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	160.000.000	1,0	195.979.138	1	72.000.000	1	35.309.180	2	68.723.654	3	104.032.834	300%	144,49%	>	4	300.011.972	50,00%	187,51%	Bappeda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				825,00%	97,04%					35,33%	43,34%	Bappeda
Predikat Kinerja																				ST	ST					SR	SR	Bappeda
		5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bulan	48	822.900.000	12,0		12	255.723.170	6	36.565.800	6	164.467.399	12	201.033.199	100%	78,61%		24	201.033.199	50,00%	24,43%	Bappeda
		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	120.000.000	1	39.163.546	1	59.999.565	-	26.540.200	1	32.935.300	1	59.475.500	100%	99,13%	<	2	98.639.046	50,00%	82,20%	Bappeda
		5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	80.000.000			0	19.999.590		1	19.999.499	1	19.999.499	0%	0,00%	<	1	19.999.499	25,00%	25,00%	Bappeda	
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	8	120.000.000	2	64.854.600	2	99.999.500	1	4.101.800	1	39.442.800	2	43.544.600	100%	43,54%	<	4	108.399.200	50,00%	90,33%	Bappeda
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	12	240.000.000			3	19.999.795	1	4.101.800	2	38.577.700	3	42.679.500	100%	213,40%	>	3	42.679.500	25,00%	17,78%	Bappeda

						5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5		100.000.000			1	14.999.935			1	12.049.600	1	12.049.600	100%	80,33%	<		1	12.049.600	20,00%	12,05%	Bappeda
						5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	12		82.900.000	1	22.727.100	1	20.725.000	-	-			0	-	0%	0,00%	<		1	22.727.100	8,33%	27,42%	Bappeda
						5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	Laporan	4		80.000.000			1	19.999.785	1	1.822.000	1	21.462.500	2	23.284.500	200%	116,42%	>		2	23.284.500	50,00%	29,11%	Bappeda
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		85,71%	78,98%					32,62%	40,55%	Bappeda	
																								Predikat Kinerja		T	T						SR	SR	Bappeda
						5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bulan	48		903.000.000	12		12	414.940.700	12	16.969.800	-	75.186.100	12	92.155.900	100%	22,21%		24	92.155.900	50,00%	10,21%	Bappeda	
						5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	24		100.000.000			6	24.947.035	2	5.466.000	-	3.713.000	2	9.179.000	33%	36,79%	<		2	9.179.000	8,33%	9,18%	Bappeda
						5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	24		400.000.000	1	31.372.850	1	100.000.000	-	-	8	33.856.600	8	33.856.600	800%	33,86%	<		9	65.229.450	37,50%	16,31%	Bappeda
						5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4		120.000.000	1	32.659.000	1	230.000.000	1	9.681.800	1	16.869.000	2	26.550.800	200%	11,54%	<		3	59.209.800	75,00%	49,34%	Bappeda
						5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8		100.000.000			2	14.997.530	1	1.822.000	1	7.604.800	2	9.426.800	100%	62,86%	<		2	9.426.800	25,00%	9,43%	Bappeda
						5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	8		60.000.000			2	15.000.000	-	-		0	-	0%	0,00%	<		-	-	0,00%	0,00%	Bappeda	
						5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	8		60.000.000			1	15.000.000				0	-	0%	0,00%	<		-	-	0,00%	0,00%	Bappeda	
						5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4		63.000.000	1	29.215.000	1	14.996.135	-	-	1	13.142.700	1	13.142.700	100%	87,64%	<		2	42.357.700	50,00%	67,23%	Bappeda
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		176,19%	33,24%					27,98%	21,64%	Bappeda	
																								Predikat Kinerja		ST	SR					SR	SR	Bappeda	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)		362,3%	69,8%					32,0%	35,2%	Bappeda	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)		ST	S					SR	SR	Bappeda	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)		175,7%	49,8%					158,1%	25,0%	Bappeda	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)		ST	SR					ST	SR	Bappeda	
						5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.911.530.625				752.000.000		16.106.100		323.910.359		340.016.459									
						5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100		1.911.530.625	86		100	752.000.000	85,71	16.106.100	0	323.910.359	85,71	340.016.459	85,71%	45,21%		171,42	340.016.459	171,42%	17,79%	Bappeda	
						5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	34		878.103.125	10		10	290.000.000	1	7.444.700	4	80.671.700	5	88.116.400	50%	30,38%		15	88.116.400	44,12%	10,03%	Bappeda	
						5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	4		97.438.750			1	15.000.000		0		-	0	-	0%	0,00%	<		-	-	0,00%	0,00%	Bappeda

			5	05	02	2.01	02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	4		66.701.875				1		15.000.000					0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	4		64.856.875				1		15.000.000					0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	4		129.303.750				1		30.000.000			-		0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2		80.000.000	1	80.353.892		1		30.000.000					0		-	0%	0,00%	<	1		80.353.892	50,00%	100,44%	Bappeda
			5	05	02	2.01	07	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	2		51.000.000				1		25.000.000					0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	09	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	2		85.000.000				1		30.000.000					0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	4		98.812.500	1	31.800.469		1		50.000.000	-	7.444.700	1	10.077.900	1	17.522.600	100%	35,05%	<	2		49.323.069	50,00%	49,92%	Bappeda	
			5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	20		140.337.500				5		30.000.000					0		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.01	14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	4		64.651.875	1	13.816.609		1		50.000.000		-	1	70.593.800	1	70.593.800	100%	141,19%	>	2		84.410.409	50,00%	130,56%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								20,00%	17,62%							15,00%	28,09%	Bappeda	
Predikat Kinerja																								SR	SR							SR	SR	Bappeda	
			5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	2		149.651.875				4		62.000.000		-	-	0		-	0%	0,00%				-	0,00%	0,00%	Bappeda	
			5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1		17.000.000						100.000.000					-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1		17.000.000				1		17.000.000					-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	4		64.651.875				1		15.000.000					-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
			5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	4		85.000.000				2		30.000.000					-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								0,00%	0,00%							0,00%	0,00%	Bappeda	
Predikat Kinerja																								SR	SR							SR	SR	Bappeda	
			5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	33		251.526.875				1		150.000.000		-	-	0		-	0%	0,00%				-	0,00%	0,00%	Bappeda	
			5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	4		140.337.500				1		45.000.000		-	-	-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda	
			5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1		15.000.000				1		45.000.000					-		-	0%	0,00%	<	-		-	0,00%	0,00%	Bappeda

		5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	2	31.537.500				1	30.000.000				-	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda	
		5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4	64.651.875				1	30.000.000				-	-	0%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Bappeda		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	SR	Bappeda		
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	Dokumen	10	160.828.750				1	250.000.000	1	8.661.400	1	243.238.659	2	251.900.059	200%	100,76%			251.900.059	0,00%	156,63%	Bappeda
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	4	96.176.875				1	200.000.000	0	4.559.600	1	212.757.559	1	217.317.159	0%	0,00%	<	1	217.317.159	25,00%	225,96%	Bappeda
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	4	64.651.875	1	36.792.600	1	50.000.000	0	4.101.800	1	30.481.100	1	34.582.900	100%	69,17%	<	2	71.375.500	50,00%	110,40%	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00%	34,58%				37,50%	168,18%	Bappeda		
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	ST	Bappeda		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																					17,5%	13,1%				13,1%	49,1%	Bappeda		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																					SR	SR				SR	SR	Bappeda		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)																					17,5%	13,1%				13,1%	49,1%	Bappeda		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)																					SR	SR				SR	SR	Bappeda		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																					96,60%	31,42%				85,61%	37,05%	Bappeda		
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																					ST	SR				T	SR	Bappeda		

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Smstr 1		Smstr 2		Rp.		Rp.		Realisasi s/d t	Rp.		K	Rp.	
												9	10	11=9+10	12=11/8	13=7+11	14=13/6*100%								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13=7+11		14=13/6*100%	15		

		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	60.000.000	0		2	15.000.000	-	-	2	27.936.400	2	27.936.400	100,00%	186,24%	>	2		25,00%	0,00%	BPKD
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	9.576.000	1		2	2.280.000	1	600.000	1	1.600.000	2	2.200.000	100,00%	96,49%	<	3		37,50%	0,00%	BPKD
		5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	0		1	10.000.000						0,00%	0,00%	<	0		0,00%	0,00%	BPKD	
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	16	680.000.000	3		4	120.000.000	2	105.402.523	2	98.023.569	4	203.426.092	100,00%	169,52%	>	7		43,75%	0,00%	BPKD
		5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	40.000.000	0		1	10.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0		-	0,00%	0,00%	BPKD
		5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	1.400.000.000	3	134.231.690	4	90.000.000	2	42.000.000	2	113.899.550	4	155.899.550	100,00%	173,22%	>	7	290.131.240	43,75%	20,72%	BPKD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						60,00%	78,88%				22,08%	8,79%	BPKD
Predikat Kinerja																						R	T				SR	SR	BPKD
		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Unit	101	1.669.000.000	15	241.094.000	26	939.119.715	-	-	240,00%	239.960.000	240,00%	239.960.000	9,23%	25,55%		17,4	481.054.000	17,23%	28,82%	BPKD
		5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	485.000.000	0	-	1	693.119.715				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	400.000.000	1	38.780.000	1	50.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	38.780.000	50,00%	9,70%	BPKD
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	13	64.000.000	0	-	4	16.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40.000.000	0	-	2	10.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
		5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	16	80.000.000	0	-	4	20.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
		5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	600.000.000	14	202.314.000	15	150.000.000	0	-	36	239.960.000	36	239.960.000	240,00%	159,97%	>	50	442.274.000	83,33%	73,71%	BPKD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						40,00%	26,66%				22,22%	13,90%	BPKD
Predikat Kinerja																						SR	SR				SR	SR	BPKD

				5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penersentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	5.783.618.452	100	1.227.047.975	100	1.248.943.840	50,00%	571.974.941	25	854.907.127	25,5	1.426.882.068	25,50%	114,25%		125,5	2.653.930.043	125,50%	45,89%	BPKD	
				5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	21.000.000	1	6.444.600	1	5.000.000	1	1.500.000	-	7.900.000	1	9.400.000	100,00%	188,00%	>	2	15.844.600	50,00%	75,45%	BPKD
				5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.762.000.000	4	313.168.095	4	400.500.000	2	133.724.941	1	182.542.487	3	316.267.428	75,00%	78,97%	<	7	629.435.523	58,33%	35,72%	BPKD
				5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	60.000.000	0	-	1	15.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	3.940.618.452	2	907.435.280	2	828.443.840	1	436.750.000	1	664.464.640	2	1.101.214.640	100,00%	132,93%	>	4	2.008.649.920	50,00%	50,97%	BPKD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						68,75%	99,97%				39,58%	40,54%	BPKD		
Predikat Kinerja																						S	ST				SR	SR	BPKD		
				5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	168	748.000.000	40	341.095.194	42	720.000.000	27	98.399.000	119	895.437.212	146	993.836.212	347,62%	138,03%		186	1.334.931.406	110,71%	178,47%	BPKD	
				5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	180.000.000	8	263.241.150	8	250.000.000	4	90.349.000	4	148.784.600	8	239.133.600	100,00%	95,65%	<	16	502.374.750	50,00%	279,10%	BPKD
				5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	400.000.000	2	38.584.044	2	440.000.000	-	-	2	619.803.920	2	619.803.920	100,00%	140,86%	>	4	658.387.964	50,00%	164,60%	BPKD
				5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120	84.000.000	30	39.270.000	30	20.000.000	23	8.050.000	111	43.380.000	134	51.430.000	446,67%	257,15%	>	164	90.700.000	136,67%	107,98%	BPKD
				5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	84.000.000	0	-	2	10.000.000	-	-	2	83.468.692	2	83.468.692	100,00%	834,69%	>	2	83.468.692	25,00%	99,37%	BPKD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						186,67%	332,09%				65,42%	162,76%	BPKD		
Predikat Kinerja																						ST	ST				S	ST	BPKD		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM)																						64,22%	72,03%				24,76%	30,68%	BPKD		
Predikat Kinerja (PROGRAM)																						R	S				SR	SR	BPKD		
				5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP Opini		443.191.674.942		0	113.097.035.900	Dlm Proses	60.928.491.161	Dlm Proses	51.637.254.960	Tepat Waktu	112.565.746.121	100,00%	99,53%				112.565.746.121	0,00%	25,40%	BPKD	
				5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	240	11.131.468.806	60	1.328.971.500	60	866.240.000	0	596.043.271	9	1.066.005.054	9	1.662.048.325	15,00%	191,87%		69	2.991.019.825	28,75%	26,87%	BPKD	
				5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	313.119.188	2	87.647.100	2	45.000.000	-	38.986.400	2	35.479.600	2	74.466.000	100,00%	165,48%	>	4	162.113.100	50,00%	51,77%	BPKD
				5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	307.049.292	2	18.615.000	2	45.000.000	-	39.531.800	2	34.132.800	2	73.664.600	100,00%	163,70%	>	4	92.279.600	50,00%	30,05%	BPKD
				5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	0	-	1	10.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.371.868	0	-	1	10.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	0	-	1	48.120.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	195.240.000	0	-	1	48.120.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	968.000.000	2	226.995.200	2	145.000.000	-	142.126.322	2	152.741.300	2	294.867.622	100,00%	203,36%	>	4	521.862.822	50,00%	53,91%	BPKD
				5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	990.388.389	2	35.661.800	2	145.000.000	-	-	2	149.137.120	2	149.137.120	100,00%	102,85%	>	4	184.798.920	50,00%	0,00%	BPKD
				5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	16	856.510.069	4	348.442.200	4	75.000.000	-	98.701.224	6	237.006.730	6	335.707.954	150,00%	447,61%	>	10	684.150.154	62,50%	79,88%	BPKD
				5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	176	6.915.310.000	44	611.610.200	44	295.000.000	-	276.697.525	39	457.507.504	39	734.205.029	88,64%	248,88%	>	83	1.345.815.229	47,16%	19,46%	BPKD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						63,86%	133,19%				30,97%	23,51%	BPKD		
Predikat Kinerja																						R	ST				SR	SR	BPKD		
				5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen	1856	2.337.400.401		415.802.929	464	315.000.000	232	74.897.330	232	333.148.910	464	408.046.240	100,00%	129,54%				823.849.169	0,00%	35,25%	BPKD
				5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	420	103.500.000	0	-	105	25.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	BPKD	
				5	02	02	2.02	03	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	420	511.914.579	105	57.179.800	105	50.000.000	68	19.647.000	92	34.207.100	160	53.854.100	152,38%	107,71%	>	265	111.033.900	63,10%	21,69%	BPKD
				5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	116	511.914.579	29	105.599.379	29	50.000.000	14	16.900.853	49	64.340.930	63	81.241.783	217,24%	162,48%	>	92	186.841.162	79,31%	36,50%	BPKD
				5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	140	75.786.742	35	16.465.800	35	10.000.000	4	4.790.600	2	15.832.000	6	20.622.600	17,14%	206,23%	>	41	37.088.400	29,29%	48,94%	BPKD

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp	K		Rp		
												K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15				
Meningkatnya Pelayanan Publik								52.416.215.815			41.828.420.040	8.331.842.577		7.068.490.267		15.400.332.844						15.400.332.844							
		5																											
		5	03					49.603.492.028			39.686.395.640	8.029.561.977		6.627.768.607		14.657.330.584						14.657.330.584							
		5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi pemerintah daerah	Persen	100	40.568.555.728		100	38.010.081.110	0	7.734.403.731	0	5.787.489.803	0	13.521.893.534			13.521.893.534						
		5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	10.000.000	6		3.499.950	0	5.027.050	0	8.527.000	0,00%	56,85%		6	8.527.000	25,00%	85,27%	BKPSDM			
		5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	10.000.000	10	14.891.100	10	15.000.000	0	3.499.950	10	5.027.050	10	8.527.000	100,00%	56,85%	<	20	23.418.100	50,00%	234,18%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	56,85%					50,00%	234,18%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		ST	R					SR	ST	BKPSDM			
		5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	34.132.372.018	12		12	37.364.401.750	0	7.229.511.375	0	5.089.158.358	0	12.318.669.733	0,00%	32,97%		12	12.318.669.733	25,00%	36,09%	BKPSDM
		5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12320	34.132.372.018			3080	37.364.401.750	0	7.229.511.375	3080	5.089.158.358	3080	12.318.669.733	100,00%	32,97%	<	3.080	12.318.669.733	25,00%	36,09%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	32,97%					25,00%	36,09%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		ST	SR					SR	SR	BKPSDM			
		5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	48	870.645.250			12	12.000.000				0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	BKPSDM	
		5	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	870.645.250			6	12.000.000	0		0		0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	BKPSDM			
		5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	1.846.201.783	12		12	136.140.000	12	56.380.976	0	145.561.232	12	201.942.208	100,00%	148,33%		24	201.942.208	50,00%	10,94%	BKPSDM
		5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	360	339.149.336	80	26.069.200	80	30.000.000	25	6.997.900	53	14.554.150	78	21.552.050	97,50%	71,84%	<	158	47.621.250	43,89%	14,04%	BKPSDM
		5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6600	113.787.300	1.650	9.000.000	1650	15.000.000	0	-	1650	7.487.200	1650	7.487.200	100,00%	49,91%	<	3.300	16.487.200	50,00%	14,49%	BKPSDM
		5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	160	94.822.750	40	9.423.450	40	10.000.000	21	5.499.450	19	3.637.800	40	9.137.250	100,00%	91,37%	<	80	18.560.700	50,00%	19,57%	BKPSDM
		5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1460	5.404.897	365	1.140.000	365	1.140.000	91	285.000	274	855.000	365	1.140.000	100,00%	100,00%	=	730	2.280.000	50,00%	42,18%	BKPSDM
		5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	1.293.037.500	40	121.999.240	40	80.000.000	40	43.598.626	0	119.027.082	40	162.625.708	100,00%	203,28%	>	80	284.624.948	50,00%	22,01%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		99,50%	103,28%					48,78%	22,46%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		ST	ST					SR	SR	BKPSDM			
		5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	8	1.008.084.361	2		2	52.900.000	2	145.765.700	0	166.412.400	2	312.178.100	100,00%	590,13%		4	312.178.100	50,00%	30,97%	BKPSDM
		5	03	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	1.008.084.361	12	5827300	20	52.900.000	8	145.765.700	12	166.412.400	20	312.178.100	100,00%	590,13%	>	32	318.005.400	40,00%	31,55%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	590,13%					40,00%	31,55%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		ST	ST					SR	SR	BKPSDM			
		5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Bulan	48	2.021.459.400	12		12	314.039.360	0	263.076.030	0	152.400.366	12	415.476.396	100,00%	132,30%		24	415.476.396	50,00%	20,55%	BKPSDM
		5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	160	13.242.859	40	3.980.000	40	3.000.000	20	1.550.000	20	1.400.000	40	2.950.000	100,00%	98,33%	<	80	6.930.000	50,00%	52,33%	BKPSDM
		5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	668.069.375	35	113.862.165	36	133.000.000	18	62.026.030	18	29.140.656	36	91.166.686	100,00%	68,55%	<	71	205.028.851	49,31%	30,69%	BKPSDM
		5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	8	1.340.147.166	2	276.688.110	2	178.039.360	2	199.500.000	2	121.859.710	4	321.359.710	200,00%	180,50%	>	6	598.047.820	75,00%	44,63%	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		133,33%	115,79%					58,10%	42,55%	BKPSDM			
Predikat Kinerja																		ST	ST					R	SR	BKPSDM			
		5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Unit	16	679.792.916	4		4	115.600.000	2	36.169.700	2	228.930.397	4	265.100.097	100,00%	229,33%		8	265.100.097	50,00%	39,00%	BKPSDM
		5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	143.527.163	1	37.259.650	1	34.100.000	2	16.756.400	0	39.827.330	2	56.583.730	200,00%	165,93%	>	3	93.843.380	300,00%	65,38%	BKPSDM

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= / <	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
		5 03 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	143.527.163	1	25.871.300	1	26.500.000	2	14.013.300	0	11.396.450	2	25.409.750	200,00%	95,89%	<	3	51.281.050	300,00%	35,73%	BKPSDM		
		5 03 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	258.607.500	5	4.981.000	5	30.000.000	0	0	5	168.126.617	5	168.126.617	100,00%	560,42%	>	10	173.107.617	50,00%	66,94%	BKPSDM		
		5 03 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	134.131.090	5	9.993.000	5	25.000.000	5	5.400.000	0	9.580.000	5	14.980.000	100,00%	59,92%	<	10	24.973.000	50,00%	18,62%	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		150,00%	220,54%					175,00%	46,67%		BKPSDM
Predikat Kinerja																		ST	ST					ST	SR		BKPSDM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		97,55%	159,94%					56,70%	59,07%		BKPSDM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	ST					R	R		BKPSDM
Meningkatnya Pelayanan Publik	5 03 02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen	54,94	9.034.936.300	52	592.311.613	52,19	1.676.314.530	0	295.158.246	0	840.278.804	0	1.135.437.050	0,00%	67,73%		52	1.727.748.663	94,65%	19,12%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jenis	48	2.683.777.463	12		12	640.000.000	0	137.527.746	0	231.987.073	0	369.514.819	0,00%	57,74%		12	369.514.819	25,00%	13,77%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	168.353.483	1	11.254.733	1	15.000.000	1	5.419.920	0	8.902.800	1	14.322.720	100,00%	95,48%	<	2	25.577.453	50,00%	15,19%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	2.386.120.230	1	571.585.730	1	600.000.000	1	128.564.826	0	76.876.273	1	205.441.099	100,00%	34,24%	<	2	777.026.829	50,00%	32,56%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	4	43.101.250	0	-	1	10.000.000			1	140.120.000		140.120.000	0,00%	1401,20%	>	-	140.120.000	0,00%	325,09%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	43.101.250	1	9.471.150	1	10.000.000	1	3.543.000	1	6.088.000	2	9.631.000	200,00%	96,31%	<	3	19.102.150	75,00%	44,32%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4	43.101.250	0	-	1	5.000.000	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		80,00%	325,45%					35,00%	83,43%		BKPSDM
Predikat Kinerja																		T	ST					SR	T		BKPSDM
	5 03 02	2,02	Mutasi dan Promosi ASN	Periode Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	Bulan	48	1.109.247.413	12		12	75.000.000	0	28.643.300	0	97.564.607	0	126.207.907	0,00%	168,28%		12	126.207.907	25,00%	11,38%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	400	43.101.250	-	-	100	10.000.000	33	6.030.000	67	12.677.800	100	18.707.800	100,00%	187,08%	>	100	18.707.800	25,00%	43,40%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	4000	542.459.402	100	51.768.767	100	35.000.000	342	22.613.300	658	36.454.007	1000	59.067.307	1000,00%	168,76%	>	1.100	110.836.074	27,50%	20,43%	BKPSDM		
	5 03 02	2,01 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	40	523.686.760	10	16.959.850	10	30.000.000	0	-	10	48.432.800	10	48.432.800	100,00%	161,44%	>	20	65.392.650	50,00%	12,49%	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		400,00%	172,43%					34,17%	25,44%		BKPSDM
Predikat Kinerja																		ST	ST					SR	SR		BKPSDM
	5 03 02	2,03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	2.655.207.146	15		15	625.863.930	3	49.617.250	6	326.360.799	9	375.978.049	60,00%	60,07%		24	375.978.049	24,00%	14,16%	BKPSDM		
	5 03 02	2,03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	800	875.765.247	-	-	200	316.308.200	0	0	0	6.304.800		6.304.800	0,00%	1,99%	<	-	6.304.800	0,00%	0,72%	BKPSDM		
	5 03 02	2,03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	1.208.717.921	1	126.118.450	1	134.555.730	1	39.171.450	1	135.022.400	2	174.193.850	200,00%	129,46%	>	3	300.312.300	75,00%	24,85%	BKPSDM		
	5 03 02	2,03 03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	203.419.435	1	28.418.500	1	30.000.000	0	0	0	14.576.800	0	14.576.800	0,00%	48,59%	<	1	42.995.300	25,00%	21,14%	BKPSDM		
	5 03 02	2,03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	400	324.203.292	200	59.207.925	200	85.000.000	100	10.445.800	100	133.750.900	200	144.196.700	100,00%	169,64%	>	400	203.404.625	100,00%	62,74%	BKPSDM		
	5 03 02	2,03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	200 Orang	200	43.101.250	50	55.158.756	50	60.000.000	0	0	50	36.705.899	50	36.705.899	100,00%	61,18%	<	100	91.864.655	50,00%	213,14%	BKPSDM		

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15												
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,00%	82,17%											50,00%	64,52%	BKPSDM					
																Predikat Kinerja		T	T												SR	R	BKPSDM				
		5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Periode Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Bulan	48	2.586.704.278	12		12	335.450.600	12	79.369.950	0	184.366.325	12	263.736.275	100,00%	78,62%		24	263.736.275	50,00%	10,20%	BKPSDM								
		5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	2.155.062.500	1	291.934.056	1	277.950.600	2	65.296.000	1	131.468.064	3	196.764.064	300,00%	70,79%	<	4	488.698.120	100,00%	22,68%	BKPSDM								
		5	03	02	2,04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	4	86.202.500	1	13.135.450	1	7.500.000	0	-		0	-	0,00%	0,00%	<	1	13.135.450	25,00%	15,24%	BKPSDM									
		5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	1000	173.034.278	250	16.421.400	250	10.000.000	250	2.653.000	0	7.044.000	250	9.697.000	100,00%	96,97%	<	500	26.118.400	50,00%	15,09%	BKPSDM								
		5	03	02	2,04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	600	129.303.750	150	32.856.575	150	30.000.000	0	-	150	31.249.461	150	31.249.461	100,00%	104,16%	>	300	64.106.036	50,00%	49,58%	BKPSDM								
		5	03	02	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	4	43.101.250	-	-	1	10.000.000	2	11.420.950	1	14.604.800	3	26.025.750	300,00%	260,26%	>	3	26.025.750	75,00%	60,38%	BKPSDM								
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		160,00%	106,44%													60,00%	32,59%	BKPSDM			
																Predikat Kinerja		ST	ST													R	SR	BKPSDM			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		180,0%	171,6%														44,8%	51,5%	BKPSDM		
																PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST														SR	R	BKPSDM		
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)		138,77%	165,78%															50,74%	55,28%	BKPSDM	
																PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)		ST	ST														R	R	BKPSDM		
Meningkatnya Pelayanan Publik	5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.812.723.787				2.142.024.400		302.280.600		440.721.660		743.002.260				2.117.431.267												
	5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	10.33	2.812.723.787	12	1.374.429.007	9,36	2.142.024.400	0	302.280.600	0	440.721.660	0	743.002.260	0%	34,69%		12	2.117.431.267	#VALUE!	75,28%	BKPSDM								
	5	04	02	2,01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis	Jenis	16	43.101.250	4		4	236.265.000	0	0	0	78.778.400	0	78.778.400	0,00%	0,00%		4	78.778.400	25,00%	182,78%	BKPSDM								
	5	04	02	2,01	02		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	400	43.101.250	100	121.454.370	100	236.265.000	0		78.778.400	0	78.778.400	0,00%	0,00%	<	100	200.232.770	25,00%	464,56%	BKPSDM									
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%														25,00%	464,56%	BKPSDM		
																Predikat Kinerja		SR	SR													SR	ST	BKPSDM			
	5	04	02	2,02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jenis	32	2.769.622.537	8		8	1.905.759.400	0	302.280.600	0	361.943.260	0	664.223.860	0,00%	34,85%		8	664.223.860	25,00%	23,98%	BKPSDM								
	5	04	02	2,02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4	2.769.622.537	1	1.252.974.637	1	1.905.759.400	2	302.280.600	2	361.943.260	4	664.223.860	400,00%	34,85%	<	5	1.917.198.497	125,00%	69,22%	BKPSDM								
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		400,00%	34,85%														125,00%	69,22%	BKPSDM		
																Predikat Kinerja		ST	SR														ST	S	BKPSDM		
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		200,0%	17,4%																75,0%	266,9%	BKPSDM
																PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	SR															S	ST	BKPSDM	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)		200,00%	17,43%																75,00%	266,89%	BKPSDM
																PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)		ST	SR															S	ST	BKPSDM	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		169,39%	91,60%																62,87%	161,09%	BKPSDM
																PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		ST	ST															R	ST	BKPSDM	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp.	K	Rp.	Realisasi >/=/<	K	Rp.	K	Rp.			
												K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13=7+11	14=13/6*100%	15													
			INSPEKTORAT KOTA LHOKEUMAW																								
		6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				33.546.938.788		8.429.472.216		10.175.494.827		5.070.711.055		-		5.070.711.055		49,83%			13.500.183.271		40,24%	INSPEKTORAT		
		6 01	INSPEKTORAT DAERAH				33.546.938.788		8.429.472.216		10.175.494.827		5.070.711.055		-		5.070.711.055		49,83%			13.500.183.271		40,24%	INSPEKTORAT		
	Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG N DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	25.130.330.502	100	6.773.059.003	100	7.265.505.900	50	4.443.823.733	50	-	100	4.443.823.733	100,00%	61,16%	200	11.216.882.736	200,00%	44,63%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	62.872.419	7	15.694.850	7	15.000.000		3.822.000	-	-	0	3.822.000	0,00%	25,48%	7	19.516.850	100,00%	31,04%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	62.872.419	6	15.694.850	6	15.000.000	-	3.822.000			0	3.822.000	0,00%	25,48%	<	6	19.516.850	100,00%	31,04%	INSPEKTORAT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	21.140.194.264	12	5.749.599.258	12	5.916.366.000	12	3.893.502.533	-	-	12	3.893.502.533	100,00%	65,81%	24	9.643.101.791	200,00%	45,62%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	57	21.140.194.264	57	5.749.599.258	57	5.916.366.000	56	3.893.502.533	-	-	56	3.893.502.533	98,25%	65,81%	<	113	9.643.101.791	198,25%	45,62%	INSPEKTORAT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	160.184.509	100	174.993.405	100	310.000.000	-	24.441.024	100	-	100	24.441.024	100,00%	7,88%	200	199.434.429	200,00%	124,50%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	60.069.191	1	4.999.835	1	10.000.000	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	4.999.835	100,00%	8,32%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	100.115.318	4	169.993.570	4	300.000.000	4	24.441.024			4	24.441.024	100,00%	8,15%	<	8	194.434.594	200,00%	194,21%	INSPEKTORAT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan	12	850.099.184	12	211.518.240	12	272.280.000	6	164.438.530	-	-	6	164.438.530	50,00%	60,39%	18	375.956.770	150,00%	44,23%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	132.152.219	12	32.999.940	12	50.000.000	3	21.937.700			3	21.937.700	25,00%	43,88%	<	15	54.937.640	125,00%	41,57%	INSPEKTORAT		
		6 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	540	52.059.965	540	13.000.000	540	10.000.000	270	8.260.000			270	8.260.000	50,00%	82,60%	<	810	21.260.000	150,00%	40,84%	INSPEKTORAT		
		6 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	36.041.514	4	8.732.500	4	10.000.000	2	4.080.000			2	4.080.000	50,00%	40,80%	<	6	12.812.500	150,00%	35,55%	INSPEKTORAT		
		6 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	9.130.517	2	1.995.000	2	2.280.000	1	570.000			1	570.000	50,00%	25,00%	<	3	2.565.000	150,00%	28,09%	INSPEKTORAT		
		6 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	620.714.969	8	154.790.800	8	200.000.000	4	129.590.830			4	129.590.830	50,00%	64,80%	<	12	284.381.630	150,00%	45,82%	INSPEKTORAT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	413.805.653	12	59.957.025	12	178.846.600	3	43.950.000	-	-	3	43.950.000	25,00%	24,57%	15	103.907.025	125,00%	25,11%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	413.805.653	6	59.957.025	6	178.846.600	3	43.950.000			3	43.950.000	50,00%	24,57%	<	9	103.907.025	150,00%	25,11%	INSPEKTORAT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.825.193.542	12	388.649.450	12	386.342.300	6	-	-	-	6	-	50,00%	0,00%	18	388.649.450	150,00%	21,29%	INSPEKTORAT			
		6 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.009.225	12	1.980.000	12	1.989.500		0	-	0,00%	0,00%	<	12	1.980.000	100,00%	24,72%	INSPEKTORAT					
		6 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	427.692.636	12	68.206.790	12	76.000.000		0	-	0,00%	0,00%	<	12	68.206.790	100,00%	15,95%	INSPEKTORAT					
		6 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	1	120.138.381	-	-	1	-		0	-	0,00%	0	-	0,00%	0	<	0	-	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT		
		6 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.269.353.300	1	318.462.660	1	308.352.800		0	-	0,00%	0,00%	<	1	318.462.660	100,00%	25,09%	INSPEKTORAT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
		6 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	677.980.931	12	172.646.775	12	186.671.000	6	313.669.646	-	-	6	313.669.646	50,00%	168,03%	18	486.316.421	150,00%	71,73%	INSPEKTORAT			

						6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	133.353.603	1	33.107.375	1	33.300.000	2	31.975.200			2	31.975.200	200,00%	96,02%	<	3	65.082.575	300,00%	48,80%	INSPEKTORAT
						6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	484.558.137	5	124.547.400	5	128.500.000	4	88.649.226			4	88.649.226	80,00%	68,99%	<	9	213.196.626	180,00%	44,00%	INSPEKTORAT
						6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	3.927.000			0	3.927.000	0,00%	0,00%	<	0	3.927.000	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT
						6	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	60.069.191	12	14.992.000	12	24.871.000	12	189.118.220			12	189.118.220	100,00%	760,40%	>	24	204.110.220	200,00%	339,79%	INSPEKTORAT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,00%	231,35%			170,00%	108,15%	INSPEKTORAT	
																								Predikat Kinerja		ST	ST			ST	ST	INSPEKTORAT	
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		48,32%	56,40%			141,18%	52,02%	INSPEKTORAT	
																								PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	R			ST	R	INSPEKTORAT	
						6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	56	80,02	6.801.119.692	100	1.383.810.055	80,02	2.410.748.722	40,1	538.323.940	40,1	-	0	538.323.940	0,00%	22,33%		0	1.922.133.995	0,00%	28,26%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	Laporan	226	5.694.908.666	226	1.153.661.445	226	1.915.000.000	198	438.408.940	-	-	198	438.408.940	87,61%	22,89%		424	1.592.070.385	187,61%	27,96%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	7	521.472.899	7	130.840.950	7	225.000.000	7	23.982.740			7	23.982.740	100,00%	10,66%	<	14	154.823.690	200,00%	29,69%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	15	958.869.110	15	149.752.860	15	270.000.000	12	153.752.600			12	153.752.600	80,00%	56,95%	<	27	303.505.460	180,00%	31,65%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	10	611.242.097	10	168.498.785	10	220.000.000	9	60.109.300			9	60.109.300	90,00%	27,32%	<	19	228.608.085	190,00%	37,40%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	25	1.357.807.827	25	209.932.225	25	410.000.000	10	57.486.200			10	57.486.200	40,00%	14,02%	<	35	267.418.425	140,00%	19,69%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	68	1.046.631.339	68	259.793.950	68	540.000.000	68	130.116.300			68	130.116.300	100,00%	24,10%	<	136	389.910.250	200,00%	37,25%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	427.979.929	1	99.941.750	1	100.000.000	1	4.192.900			1	4.192.900	100,00%	4,19%	<	2	104.134.650	200,00%	24,33%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100	770.905.465	100	134.900.925	100	150.000.000	100	8.768.900			100	8.768.900	100,00%	5,85%	<	200	143.669.825	200,00%	18,64%	INSPEKTORAT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,14%	20,44%			187,14%	28,38%	INSPEKTORAT	
																								Predikat Kinerja		T	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
						6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	16	1.106.211.026	16	230.148.610	16	495.748.722	-	99.915.000	-	-	0	99.915.000	0,00%	20,15%		16	330.063.610	100,00%	29,84%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	84.096.867	1	14.646.455	1	24.800.000	-	-			0	-	0,00%	0,00%	<	1	14.646.455	100,00%	17,42%	INSPEKTORAT
						6	01	02	2,02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	15	1.022.114.159	15	215.502.155	15	470.948.722	15	99.915.000			15	99.915.000	100,00%	21,22%	<	30	315.417.155	200,00%	30,86%	INSPEKTORAT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	10,61%			150,00%	24,14%	INSPEKTORAT	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		68,57%	15,52%			168,57%	26,26%	INSPEKTORAT	
																								PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		S	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
						6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	CC	CC	1.615.488.594	100	272.603.158	CC/50,00 Kategori /Point	499.240.205	CC 54,7	88.563.382	-	-	CC 54,79	88.563.382	CC 54,79	17,74%		100	361.166.540	100,00%	22,36%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi yang Dihadiskan	Rekomendasi	36	1.046.332.384	36	153.184.101	36	155.000.000	-	-	-		0	10.227.400	0,00%	6,60%		36	163.411.501	100,00%	15,62%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Pengawasan di Bidang yang Disusun	Rekomendasi	35	941.756.140	35	128.759.416	35	130.000.000	35	10.227.400			35	10.227.400	100,00%	7,87%	<	70	138.986.816	200,00%	14,76%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	104.576.244	1	24.424.685	1	25.000.000	-	-			0	-	0,00%	0,00%	<	1	24.424.685	100,00%	23,36%	INSPEKTORAT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	3,93%			150,00%	19,06%	INSPEKTORAT	
																								Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
						6	01	03	2,02		Asistensi dan Pendampingan	Persentase Asistensi dan Pendampingan	Persen	100	569.156.210	100	119.419.057	100	344.240.205	50	88.563.382	-	-	50	88.563.382	50,00%	25,73%		150	207.982.439	150,00%	36,54%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	34	229.283.416	34	36.436.115	34	145.000.000	34	32.400.000			34	32.400.000	100,00%	22,34%	<	68	68.836.115	200,00%	30,02%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	34	104.576.244	34	13.875.440	34	60.000.000	34	27.396.730			34	27.396.730	100,00%	45,66%	<	68	41.272.170	200,00%	39,47%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	104.576.244	1	69.107.502	1	120.000.000	1	28.766.652			1	28.766.652	100,00%	23,97%	<	2	97.874.154	200,00%	93,59%	INSPEKTORAT
						6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat	34	130.720.306	-	-	34	19.240.205	-	-			0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT
																								Rata-rata Capaian Kinerja (%)		75,00%	22,99%			150,00%	40,77%	INSPEKTORAT	
																								Predikat Kinerja		S	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		62,50%	13,46%			150,00%	29,91%	INSPEKTORAT	
																								PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		R	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		59,80%	28,46%			153,25%	36,06%	INSPEKTORAT	
																								PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		R	SR			ST	SR	INSPEKTORAT	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15														
	Meningkatnya Pelayanan Publik				KECAMATAN BANDA SAKTI		11.754.938.272			2.835.017.638		1.915.944.576		1.659.555.829		3.575.500.405					3.575.500.405			Kec. Banda Sakti				
		7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	10.521.990.786	100	2.504.619.954	100	2.600.017.638	25	1.458.920.476	25	1.383.446.429	50	2.842.366.905	50,00%	109,32%		150	5.346.986.859	150,00%	50,82%	Kec. Banda Sakti	
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Dokumen	28	51.561.875	7		1	14.000.000	1	10.310.300	0	3.689.400	1	13.999.700	100,00%	100,00%		8	13.999.700	2857,14%	2715,13%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	51.561.875	1	14.237.050	1	14.000.000	0	10.310.300		3.689.400	0	13.999.700	0,00%	100,00%	<	1	28.236.750	25,00%	54,76%	Kec. Banda Sakti
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	100,00%				25,00%	54,76%	Kec. Banda Sakti
Predikat Kinerja																					SR	ST				SR	R	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode	48	7.468.010.000	6	2.056.709.728	12	2.160.548.838	6	1.191.733.817	0	946.789.762	6	2.138.523.579	50,00%	98,98%		12	4.195.233.307	25,00%	56,18%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	115	7.468.010.000	324	2.056.709.728	392	2.160.548.838	56	1.191.733.817	56	946.789.762	112	2.138.523.579	28,57%	98,98%	<	436	4.195.233.307	379,13%	56,18%	Kec. Banda Sakti
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					28,57%	98,98%				379,13%	56,18%	Kec. Banda Sakti
Predikat Kinerja																					SR	ST				ST	R	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	600.390.036	48	106.138.087	12	98.140.000	3	74.956.914		87.121.170	3	162.078.084	25,00%	165,15%		51	268.216.171	106,25%	44,67%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	138	120.773.036	30	19.998.787	35	20.000.000	8	5957900	27	19.042.100	35	25.000.000	100,00%	0,00%	<	65	44.998.787	47,10%	37,26%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	84.000.000	4	9.999.600	4	10.000.000	0	0	4	9.998.900	4	9.998.900	100,00%	0,00%	<	8	19.998.500	44,44%	23,81%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	51.000.000	2	6.999.700	2	7.000.000	0	2877500	3	9.122.000	3	11.999.500	150,00%	0,00%	<	5	18.999.200	62,50%	37,25%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4.617.000	1	1.140.000	1	1.140.000	0	285.000	3	855.000	3	1.140.000	300,00%	0,00%	<	4	2.280.000	100,00%	49,38%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	102	340.000.000	18	68.000.000	25	60.000.000	6	65.836.514	25	48.103.170	31	113.939.684	124,00%	189,90%	>	49	181.939.684	48,04%	53,51%	Kec. Banda Sakti
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					154,80%	37,98%				60,42%	40,24%	Kec. Banda Sakti
Predikat Kinerja																					ST	SR				R	SR	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	43.101.250			1	25.000.000		-	8	46.976.000	8	46.976.000	800,00%	187,90%				0,00%	0,00%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	43.101.250	1	29.999.200	1	25.000.000			1	46.976.000	1	46.976.000	100,00%	187,90%	>	2	76.975.200	50,00%	178,59%	Kec. Banda Sakti
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	187,90%				50,00%	178,59%	Kec. Banda Sakti
Predikat Kinerja																					ST	ST				SR	ST	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	1.816.950.000	48	341.772.139	12	189.528.800	24	157.758.245	6	212.096.697	30	369.854.942	250,00%	195,14%				0,00%	0,00%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1290	12.450.000	-	989.000	310	1.000.000	310	992.200	0	-	310	992.200	100,00%	99,22%	<	310	1.981.200	24,03%	15,91%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	269.750.000	96	43.801.319	48	46.200.000	24	20.216.045	24	22.915.777	48	43.131.822	100,00%	93,36%	<	144	86.933.141	75,00%	32,23%	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	1.534.750.000	12	296.981.820	12	142.328.800	6	136.550.000	6	189.180.920	12	325.730.920	100,00%	228,86%	>	24	622.712.740	50,00%	40,57%	Kec. Banda Sakti
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	140,48%				49,68%	29,57%	Kec. Banda Sakti
Predikat Kinerja																					ST	ST				SR	SR	Kec. Banda Sakti
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	8	541.977.625	2		3	112.800.000	6	24.161.200	6	86.773.400	12	110.934.600	400,00%	98,35%		14	110.934.600	175,00%	20,47%	Kec. Banda Sakti

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RRPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp	K		Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7 + 11	14=13/6*100%	15													
		701012.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	106.655.000	2	43.500.000	1	43.800.000	2	21.205.200	2	41.819.400	4	63.024.600	400,00%	143,89%	>	6	106.524.600	150,00%	99,88%	Kec. Banda Sakti		
		701012.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	323.259.375	1	29.976.216	1	50.000.000	0	0	1	38.000.000	1	38.000.000	0,00%	0,00%	<	2	67.976.216	50,00%	21,03%	Kec. Banda Sakti		
		701012.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	112.063.250	2	4.966.654	2	19.000.000	2	2.956.000	6	6.954.000	8	9.910.000	0,00%	0,00%	<	10	14.876.654	100,00%	13,28%	Kec. Banda Sakti		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		133,33%	47,96%				100,00%	44,73%	Kec. Banda Sakti		
Predikat Kinerja																		ST	SR				ST	SR	Kec. Banda Sakti		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		86,1%	102,2%				110,7%	67,3%	Kec. Banda Sakti		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		T	ST				ST	S	Kec. Banda Sakti		
	Meningkatnya Pelayanan Publik	70103		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	55,56	591.290.916	100	139.949.230	33,33	145.000.000	50	30.899.800	50	143.748.800	100	174.648.600	100%	120,45%		200	314.597.830	359,97%	53,21%	Kec. Banda Sakti	
		701032.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	8	555.290.916	18	119.949.580	12	125.000.000	2	24.699.800	1	129.949.000	3	154.648.800	0,25	123,72%		21	274.598.380	262,50%	49,45%	Kec. Banda Sakti		
		701032.0101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	72.257.402	2	24.949.890	1	25.000.000	2	24.699.800	-	-	2	24.699.800	200%	98,80%	<	4	49.649.690	100,00%	68,71%	Kec. Banda Sakti		
		701032.0103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	483.033.514	0	94.999.690	1	100.000.000	-	-	2	129.949.000	2	129.949.000	200%	129,95%	>	2	224.948.690	50,00%	46,57%	Kec. Banda Sakti		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		200,00%	114,37%				75,00%	57,64%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	ST				S	R	Dinkes		
		701032.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	20.000.000	9.999.895	1	10.000.000	1	6.200.000	2	3.800.000	3	10.000.000	300%	100,00%		3	19.999.895	75,00%	100,00%	Kec. Banda Sakti			
		701032.0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	20.000.000	0	9.999.895	1	10.000.000	1	6.200.000	2	3.800.000	3	10.000.000	300%	100,00%	=	3	19.999.895	75,00%	100,00%	Kec. Banda Sakti		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		300,00%	100,00%				75,00%	100,00%	Kec. Banda Sakti		
Predikat Kinerja																		ST	ST				S	ST	Kec. Banda Sakti		
		701032.04	Pemberdayaan Mukim	Periode Pemberdayaan Mukim	Bulan	48	16.000.000	9.999.755	12	10.000.000	-	0	12	9.999.800	12	9.999.800	100%	100,00%		12	19.999.555	25,00%	125,00%	Kec. Banda Sakti			
		701032.0402	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	48	16.000.000	12	9.999.755	12	10.000.000	-	-	12	9.999.800	12	9.999.800	100%	99,998%	<	24	19.999.555	50,00%	125,00%	Kec. Banda Sakti		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	100,00%				50,00%	125,00%	Dinkes		
Predikat Kinerja																		ST	ST				SR	ST	Dinkes		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		200,0%	104,8%				66,7%	94,2%	Kec. Banda Sakti		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		ST	ST				S	ST	Kec. Banda Sakti		
		70104		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penerbitan	Persen	100	441.508.550	109.997.911	100	50.000.000	75	412.624.300	25	55.903.500		468.527.800	100%	937,06%		-	578.525.711	0,00%	131,03%	Kec. Banda Sakti		
		701042.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	4	441.508.550	2	109.997.911	1	50.000.000	42	412.624.300	18	55.903.500	60	468.527.800	6000%	937,06%		62	578.525.711	1550,00%	131,03%	Kec. Banda Sakti		
		701042.0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	301	441.508.550	72	109.997.911	75	50.000.000	42	412.624.300	18	55.903.500	60	468.527.800	80%	937,06%	>	132	578.525.711	43,85%	131,03%	Kec. Banda Sakti		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		80,00%	937,06%				43,85%	131,03%	Kec. Banda Sakti		
Predikat Kinerja																		T	ST				SR	ST	Kec. Banda Sakti		

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp.	K	Rp.	Realisasi > / = / <	K	Rp.	K	Rp.		
												K	Rp.	K	Rp.										K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13=7+11	14=13/6*100%	15												
			KANTOR CAMAT BLANG MANGAT		9.363.629.177	2.484.776.958	2.266.189.681	1.495.673.130	2.317.154.074	3.812.827.204		6.297.604.162														
		7	UNSUR KEWILAYAHAN		9.363.629.177	2.484.776.958	2.266.189.681	1.495.673.130	2.317.154.074	3.812.827.204		6.297.604.162														
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	7 01	KECAMATAN		9.363.629.177	2.484.776.958	2.266.189.681	1.495.673.130	2.317.154.074	3.812.827.204		6.297.604.162														
		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	100	8.543.645.688	100	2.230.577.261	100	2.061.189.681	50	1.263.091.896	30	1.900.127.074	80	3.163.218.970	80,00%	153,47%		180	5.393.796.231	180,00%	63,13%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	8.505.000	6	14.181.400	6	14.000.000	3	2.813.800	7	11.186.200	10	14.000.000	166,67%	100,00%		16	28.181.400	66,67%	331,35%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	8.505.000	10	14.181.400	10	14.000.000	3	2.813.800	7	11.186.200	10	14.000.000	100,00%	100,00%	=	20	28.181.400	50,00%	331,35%	BLANG MANGAT	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%			50,00%	331,35%	BLANG MANGAT		
																Predikat Kinerja		ST	ST			SR	ST	BLANG MANGAT		
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Daerah	Bulan	48	6.284.963.777	12	1.561.257.192	12	1.551.999.712	6	912.997.361	6	763.419.218	12	1.676.416.579	100,00%	108,02%		24	3.237.673.771	50,00%	51,51%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1104	6.284.963.777	276	1.561.257.192	276	1.551.999.712	138	912.997.361	138	763.419.218	276	1.676.416.579	100,00%	108,02%	>	552	3.237.673.771	50,00%	51,51%	BLANG MANGAT	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	108,02%			50,00%	51,51%	BLANG MANGAT		
																Predikat Kinerja		ST	ST			SR	R	BLANG MANGAT		
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	319.179.411	12	105.138.796	12	98.140.000	6	61.458.120	6	242.707.528	12	304.165.648	100,00%	309,93%		24	409.304.444	50,00%	128,24%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	280	42.600.000	80	19.999.798	70	20.000.000	36	8.042.800	34	46.506.900	70	54.549.700	100,00%	272,75%	>	150	74.549.498	53,57%	175,00%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2500	17.530.500	187	9.986.600	620	10.000.000	310	3.158.000	310	41.341.828	620	44.499.828	100,00%	445,00%	>	807	54.486.428	32,28%	310,81%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	23.963.543	15	7.000.000	20	7.000.000	5	300.000	15	24.700.000	20	25.000.000	100,00%	357,14%	>	35	32.000.000	43,75%	133,54%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1460	5.085.368	365	1.140.000	365	1.140.000	121	570.000	244	570.000	365	1.140.000	100,00%	100,00%	=	730	2.280.000	50,00%	44,83%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	230.000.000	21	67.012.398	30	60.000.000	10	49.387.320	20	129.588.800	30	178.976.120	100,00%	298,29%	>	51	245.988.518	42,50%	106,95%	BLANG MANGAT	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	294,64%			44,42%	154,23%	BLANG MANGAT		
																Predikat Kinerja		ST	ST			SR	ST	BLANG MANGAT		
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	48	25.960.000	6	49.980.100	12	30.000.000	6	39.812.000	0	67.646.000	6	107.458.000	0,00%	358,19%		12	157.438.100	25,00%	606,46%	BLANG MANGAT	
		7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	25.960.000	0	49.980.100	10	30.000.000	2	39.812.000	8	67.646.000	10	107.458.000	0,00%	358,19%	>	10	157.438.100	25,00%	606,46%	BLANG MANGAT	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	358,19%			25,00%	606,46%	BLANG MANGAT		
																Predikat Kinerja		SR	ST			SR	ST	BLANG MANGAT		

				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	1.700.450.000	12	351.997.072	12	223.249.969	6	160.575.615	6	231.011.317	12	391.586.932	100,00%	175,40%		24	743.584.004	50,00%	43,73%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	450	4.450.000	51	748.000	110	1.000.000	27	484.000	83	508.200	110	992.200	100,00%	99,22%	<	161	1.740.200	35,78%	39,11%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	288	160.000.000	54	42.199.712	72	47.784.689	36	15.841.615	36	21.453.757	72	37.295.372	100,00%	78,05%	<	126	79.495.084	43,75%	49,68%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3552	1.536.000.000	527	309.049.360	888	174.465.280	444	144.250.000	444	209.049.360	888	353.299.360	100,00%	202,50%	>	1.415	662.348.720	39,84%	43,12%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	126,59%					39,79%	43,97%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	SR	BLANG MANGAT
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	204.587.500	6	148.022.701	12	143.800.000	6	85.435.000	6	584.156.811	12	669.591.811	100,00%	465,64%		18	817.614.512	37,50%	399,64%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	102.800.000	1	43.448.951	1	43.800.000	0,5	21.625.000	0,5	20.800.000	1	42.425.000	100,00%	96,86%	<	2	85.873.951	50,00%	83,53%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	80.000.000	2	99.573.750	2	75.000.000	1	60.000.000	1	537.216.811	2	597.216.811	100,00%	796,29%	>	4	696.790.561	50,00%	870,99%	BLANG MANGAT		
				7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	21.787.500	20	5.000.000	20	25.000.000	5	3.810.000	15	26.140.000	20	29.950.000	100,00%	119,80%	>	40	34.950.000	50,00%	160,41%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	337,65%					50,00%	371,65%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		83,33%	220,85%					43,20%	259,86%	BLANG MANGAT
																							PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		T	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
				7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen	100	20.000.000	40	10.000.000	60	10.000.000	20	4.935.000	20	5.062.400	40	9.997.400	66,67%	99,97%		80	19.997.400	80,00%	99,99%	BLANG MANGAT		
				7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0,25	4.935.000	0,75	5.062.400	1	9.997.400	100,00%	99,97%		2	19.997.400	50,00%	99,99%	BLANG MANGAT		
				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0,25	4.935.000	0,75	5.062.400	1	9.997.400	100,00%	99,97%	<	2	19.997.400	50,00%	99,99%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,97%					50,00%	99,99%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		100,00%	99,97%					50,00%	99,99%	BLANG MANGAT
																							PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	90,91	539.660.600	86,36	175.000.000	86,36	145.000.000	0	38.765.000	#VALUE!	286.103.000	#VALUE!	324.868.000	0,00%	224,05%	-	499.868.000	0,00%	92,63%	BLANG MANGAT			
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	8	475.600.000	1	155.000.000	2	125.000.000	1	25.000.000	1	273.588.000	2	298.588.000	100,00%	238,87%		3	453.588.000	37,50%	95,37%	BLANG MANGAT		
				7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemabaga Kemasyarakatan	4	75.600.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	100,00%	100,00%	=	2	50.000.000	50,00%	66,14%	BLANG MANGAT		
				7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	400.000.000	1	130.000.000	1	100.000.000	0	-	1	273.588.000	1	273.588.000	100,00%	273,59%	>	2	403.588.000	50,00%	100,90%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	186,79%					50,00%	83,52%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	T	BLANG MANGAT
				7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	43.699.544	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.100.000	-	7.180.000	1	16.280.000	100,00%	162,80%		2	26.280.000	50,00%	60,14%	BLANG MANGAT		
				7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lemabaga Kemasyarakatan	4	43.699.544	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.100.000	0	7.180.000	1	16.280.000	100,00%	162,80%	>	2	26.280.000	50,00%	60,14%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	162,80%					50,00%	60,14%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	R	BLANG MANGAT
				7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Periode Pemberdayaan Mukim	Bulan		20.361.056	12	10.000.000	12	10.000.000	6	4.665.000	6	5.335.000	12	10.000.000	100,00%	100,00%		24	20.000.000	0,00%	98,23%	BLANG MANGAT		
				7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	672	20.361.056	168	10.000.000	168	10.000.000	42	4.665.000	126	5.335.000	168	10.000.000	100,00%	100,00%	=	336	20.000.000	50,00%	98,23%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%					50,00%	98,23%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		ST	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		100,00%	149,86%					50,00%	80,63%	BLANG MANGAT
																							PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST					SR	T	BLANG MANGAT
				7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	40.069.190	80	10.000.000	80	10.000.000	40	143.314.500	40	19.253.600	80	162.568.100	100,00%	1625,68%		160	172.568.100	160,00%	430,68%	BLANG MANGAT		
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	8	40.069.190	2	10.000.000	2	10.000.000	0,5	143.314.500	0,5	19.253.600	1	162.568.100	50,00%	1625,68%		3	172.568.100	37,50%	430,68%	BLANG MANGAT		
				7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.069.190	0	10.000.000	1	10.000.000	0,5	143.314.500	0,5	19.253.600		162.568.100	0,00%	1625,68%	>	-	172.568.100	0,00%	430,68%	BLANG MANGAT		
																							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	1625,68%					0,00%	430,68%	BLANG MANGAT
																							Predikat Kinerja		SR	ST					SR	ST	BLANG MANGAT
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		0,00%	1625,68%					0,00%	430,68%	BLANG MANGAT
																							PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	ST					SR	ST	BLANG MANGAT

		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	22,73	80.092.254		34.200.000	22,73	20.000.000	11,37	13.500.000	23	21.500.000	34,1	35.000.000	1,50022	175,00%		34	69.200.000	0,00%	86,40%	BLANG MANGAT
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	4	80.092.254	1	34.200.000	1	20.000.000	0,5	13.500.000	0	21.500.000	0,75	35.000.000	75,00%	175,00%		2	69.200.000	43,75%	86,40%	BLANG MANGAT
		7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	80.092.254	1	34.200.000	1	20.000.000	0,5	13.500.000	0,5	21.500.000	1	35.000.000	100,00%	175,00%	>	2	69.200.000	50,00%	86,40%	BLANG MANGAT
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	175,00%			50,00%	86,40%	BLANG MANGAT
																					Predikat Kinerja		ST	ST			SR	T	BLANG MANGAT
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		100,00%	175,00%			50,00%	86,40%	BLANG MANGAT
																					PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		ST	ST			SR	T	BLANG MANGAT
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	140.161.445	100	24.999.697	100	20.000.000	50	32.066.734	100	85.108.000	150	117.174.734	150,00%	585,87%		250	142.174.431	250,00%	101,44%	BLANG MANGAT
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	8	140.161.445	1	24.999.697	2	20.000.000	0,5	32.066.734	1	85.108.000	1,5	117.174.734	75,00%	585,87%		3	142.174.431	31,25%	101,44%	BLANG MANGAT
		7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	60.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	0,25	4.140.000	0,75	5.860.000	1	10.000.000	0,00%	100,00%	=	1	20.000.000	25,00%	33,33%	BLANG MANGAT
		7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	80.161.445	0	14.999.697	1	10.000.000	0,5	27.926.734	0,5	79.248.000	1	107.174.734	0,00%	1071,75%	>	1	122.174.431	25,00%	152,41%	BLANG MANGAT
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	585,87%			25,00%	92,87%	BLANG MANGAT
																					Predikat Kinerja		SR	ST			SR	ST	BLANG MANGAT
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		0,00%	585,87%			25,00%	92,87%	BLANG MANGAT
																					PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	ST			SR	ST	BLANG MANGAT
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)		63,89%	476,21%			36,37%	175,07%	BLANG MANGAT
																					PREDIKAT KINERJA (PER OPD)		R	ST			SR	ST	BLANG MANGAT

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15			
																									Kec. MUARA SATU		
		7 01																							Kec. MUARA SATU		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		7 01 01																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 201																							Kec. MUARA SATU		
		7 1 01 2.01 01																							Kec. MUARA SATU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	11,40%				20,00%	19,77%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.02																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.02 01																							Kec. MUARA SATU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	51,02%				364,29%	65,93%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																		BT	R				BT	S	Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.05																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.05 02																							Kec. MUARA SATU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Kec. MUARA SATU		
		7 1 01 2.06																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.06 02																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.06 04																							Kec. MUARA SATU		
		7 01 01 2.06 05																							Kec. MUARA SATU		

No	Sasaran Daerah		Kode		Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= / <		K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp												
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7 + 11		14=13/6*100%		15		
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Dokumen	4	4.788.000	365	1.140.000	365 exapler	1.140.000	145	285.000			-	145	285.000	40%	25%	<	510	1.425.000	12750%	30%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	280.000.000	14	68.000.000	15 Kali	60.000.000	10	30.266.200			-	10	30.266.200	67%	50%	<	24	98.266.200	600%	35%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					48,70%	37,12%				3475,19%	34,37%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																					SR	SR				BT	SR	Kec. MUARA SATU		
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Unit	41	100.000.000	5	30.000.000	8	30.000.000	0	30.000.000	0		-	0	30.000.000	0%	100%		5	60.000.000	12%	60%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	100.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	0	30.000.000			0	0	30.000.000	0%	100%	=	6	60.000.000	100%	60%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	100,00%				100,00%	60,00%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																					SR	BT				BT	R	Kec. MUARA SATU		
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		1.594.027.400	70		100 persen	216.149.480	50	135.862.544	0		-	50	135.862.544	50%	63%		120	135.862.544	0%	9%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1290	8.000.000	12	989.000	12 Bln	1.000.000	6	496.100			-	6	496.100	50%	50%	<	18	1.485.100	1%	19%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	192	252.693.000	12	55.054.557	12 Bln	76.117.000	6	24.366.444			0	6	24.366.444	50%	32%	<	18	79.421.001	9%	31%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	1.333.334.400	12	234.116.160	12 Bln	139.032.480	6	111.000.000			0	6	111.000.000	50%	80%	<	18	345.116.160	38%	26%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00%	53,82%				16,09%	25,29%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																					SR	R				SR	SR	Kec. MUARA SATU		
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		728.940.000	100	118.411.290	100 persen	143.800.000	25	16.921.200	0		0	25	16.921.200	25%	12%		125	135.332.490	0%	19%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	4	107.940.000	1	43.745.950	1	43.800.000	1	14.579.200	0		0	1	14.579.200	100%	33%	<	2	58.325.150	50%	54%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Unit	4	600.000.000	1	69.665.340	1	75.000.000	-	-			0	0	-	0%	0%	<	1	69.665.340	25%	12%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	9	21.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	1	2.342.000	0		0	1	2.342.000	100%	9%	<	2	7.342.000	22%	35%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,67%	14,22%				32,41%	33,54%	Kec. MUARA SATU		
Predikat Kinerja																					S	SR				SR	SR	Kec. MUARA SATU		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					37,91%	38,23%				572,57%	34,13%	Kec. MUARA SATU		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					SR	SR				BT	SR	Kec. MUARA SATU		
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	17,65	380.000.000	100	39.494.310	100	145.000.000	25	25.000.000	0		-	25	25.000.000	25%	17%		125	64.494.310	708%	17%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan		340.000.000	12	24.495.600	12 Bln	125.000.000	3	25.000.000	0		0	3	25.000.000	25%	20%		15	49.495.600	0%	15%	Kec. MUARA SATU	
	7	01	03	2.01	4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Lembaga	4	48.000.000	1	24.495.600	1 Hari	25.000.000	1	25.000.000	0		0	1	25.000.000	100%	100%	=	2	49.495.600	50%	103%	Kec. MUARA SATU	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7 + 11		14=13/6*100%		15			
		7 01 03 2.01 06	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah capaian Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	4	292.000.000			5 Hari	100.000.000	0	0		0	0	0%	0%	<			0%	0%	Kec. MUARA SATU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	50,00%	50,00%			25,00%	51,56%	Kec. MUARA SATU				
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	R	Kec. MUARA SATU				
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan		20.000.000	1	9.999.740	1	10.000.000	0	0	0	0	-	0%	0%		1	9.999.740	0%	50%	Kec. MUARA SATU			
		7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyara katan	4	20.000.000	6	9.999.740	12 Bln	10.000.000				0	0	-	0%	0%	<	6	9.999.740	150%	50%	Kec. MUARA SATU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			150,00%	50,00%	Kec. MUARA SATU				
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	Kec. MUARA SATU				
		7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Periode Pemberdayaan Mukim	Bulan		20.000.000	2	4.998.970	2 Mukim	10.000.000	0		-	0		0%	0%		2	4.998.970	0%	25%	Kec. MUARA SATU			
		7 01 03 7.04 02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	24	20.000.000	6	4.998.970	12 Bln	10.000.000			0		0	0%	0%	<	6	4.998.970	25%	25%	Kec. MUARA SATU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			25,00%	24,99%	Kec. MUARA SATU				
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR	Kec. MUARA SATU				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	16,67%	16,67%			66,67%	42,18%	Kec. MUARA SATU				
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	SR	SR			S	SR	Kec. MUARA SATU				
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	23,53	200.000.000	42	14.999.095	42,86	15.000.000	0	226.640.000	0		-	0	226.640.000	0%	1511%		42	241.639.095	178%	121%	Kec. MUARA SATU	
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali		200.000.000	12	14.999.095	12 Bln	15.000.000	3	226.640.000	0		0	3	226.640.000	25%	1511%		15	241.639.095	0%	121%	Kec. MUARA SATU	
		7 01 03 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	52	200.000.000	6	14.999.095	6 Kali	15.000.000	6	226.640.000	0		0	6	226.640.000	100%	1511%	>	12	241.639.095	23%	121%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	1510,93%			23,08%	120,82%	Kec. MUARA SATU				
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	ST	Kec. MUARA SATU				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	100,00%	1510,93%			23,08%	120,82%	Kec. MUARA SATU				
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	ST	ST			SR	ST	Kec. MUARA SATU				
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	17,65	60.000.000	100	34.200.000	100	25.000.000	50	13.500.000	0		-	50	13.500.000	50%	54%		150	47.700.000	850%	80%	Kec. MUARA SATU	
		7 01 05 2.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMKM		60.000.000	12	34.200.000	12 Bln	25.000.000	6	13.500.000	0		0	6	13.500.000	50%	54%		18	47.700.000	0%	80%	Kec. MUARA SATU	
		7 01 05 2.10 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	60.000.000	12	34.200.000	12 Bln	25.000.000	12	13.500.000	0		0	12	13.500.000	100%	54%	<	24	47.700.000	600%	80%	Kec. MUARA SATU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	54,00%			600,00%	79,50%	Kec. MUARA SATU				
Predikat Kinerja																	ST	R			ST	Y	Kec. MUARA SATU				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	100,00%	54,00%			600,00%	79,50%	Kec. MUARA SATU				
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	ST	R			ST	Y	Kec. MUARA SATU				
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan	Persen	100%	72.000.000	100	24.999.340	100	27.910.520	50	5.000.000	0		-	50	5.000.000	50%	18%			29.999.340	0%	42%	Kec. MUARA SATU	
		7 01 03 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan		72.000.000	10	24.999.340	11 Gampong	27.910.520	0	5.000.000	0		0	0	5.000.000	0%	18%		10	29.999.340	0%	42%	Kec. MUARA SATU	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7 + 11		14=13/6*100%		15		
		7010320101	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	72	21.000.000	10	9.999.590	11 Kali	12.910.520	0	-			0	-	0%	0%	<	10	9.999.590	14%	48%	Kec. MUARA SATU		
		7010320117	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	72	51.000.000	8	14.999.750	11 Kali	15.000.000	5	5.000.000			5	5.000.000	45%	33%	<	13	19.999.750	18%	39%	Kec. MUARA SATU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		22,73%	16,67%					15,97%	43,42%	Kec. MUARA SATU	
Predikat Kinerja																		SR	SR					SR	SR	Kec. MUARA SATU	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																		22,73%	16,67%					15,97%	43,42%	Kec. MUARA SATU	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																		SR	SR					SR	SR	Kec. MUARA SATU	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																		55,46%	327,30%					255,66%	64,01%	Kec. MUARA SATU	
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																		R	ST					ST	R	Kec. MUARA SATU	

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15					
																									Kec. MUARA DUA					
		7 01						10.727.155.824		2.204.055.887		3.369.112.450		1.400.007.128		1.196.866.035		2.596.873.163								Kec. MUARA DUA				
		7 01						10.727.155.824		2.204.055.887		3.369.112.450		1.400.007.128		1.196.866.035		2.596.873.163								Kec. MUARA DUA				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		7 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	10.015.155.824	100	2.084.879.927	100	3.164.112.450	50	1.060.369.928	50	977.271.935	100	2.037.641.863	100%	64%		4.122.521.790	0%	41%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 201						Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	160.000.000	2 Dok	14.235.785	7 Dok	34.000.000	0	5.296.200	7	8.703.700	7	13.999.900	100%	41%		28.235.685	0%	18%	Kec. MUARA DUA	
		7 1 01 2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	80.000.000	2 Dok	14.235.785	2 Dok	14.000.000	3	5.296.200	4	8.703.700	7	13.999.900	350%	100%	<	9	28.235.685	180%	35%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	Dokumen	4	14.000.000			1 Dok	3.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan yang di susun	Dokumen	4	14.000.000			1 Dok	3.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun	Dokumen	4	14.000.000			1 Dok	3.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	Dokumen	4	14.000.000			1 Dok	3.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhirar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Laporan yang Dibuat	Dokumen	4	14.000.000			1 Laporan	3.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	10.000.000			1 Laporan	2.500.000						0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00%	14,29%				25,71%	5,04%	Kec. MUARA DUA					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Kec. MUARA DUA					
		7 01 01 2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	3.458.891.431	12	1.676.015.362	12	1.785.252.450	0	846.950.921	0	677.230.323	0	1.524.181.244	0%	85%		3.200.196.606	0%	93%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji ASN	Orang/Bulan	112	3.442.891.431	350	1.676.015.362	350 OB	1.781.252.450	160	846.950.921	120	677.230.323	280	1.524.181.244	80%	86%	<	630	3.200.196.606	563%	93%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kinerja	laporan	4	8.000.000			1	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	16	8.000.000			4	2.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		26,67%	28,52%				187,50%	30,98%	Kec. MUARA DUA					
Predikat Kinerja																		SR	SR				BT	SR	Kec. MUARA DUA					
		7 01 01 2.03						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan		6.300.000	-	1	1.575.000	-	-	-	0	-	0%	0%				0%	0%	Kec. MUARA DUA		
		7 01 01 2.03	01					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	52	6.300.000		13	1.575.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Kec. MUARA DUA					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Kec. MUARA DUA					
		7 01 01 2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		39.000.000	-	3	9.750.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%				0%	0%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 2.05	02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket	6	18.000.000		1 Laporan	4.500.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 2.05	03					Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	21.000.000		3 Dok	5.250.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	Kec. MUARA DUA					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	Kec. MUARA DUA					
		7 1 01 2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		555.796.993	12	108.093.866	12	125.640.000	6	57.023.116	6	62.913.148	12	119.936.264	100%	95%		228.030.130	0%	41%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	138	100.000.000	30	21.992.014	30 Paket	20.000.000	18	11.106.600	12	8.884.000	30	19.990.600	100%	100%	<	60	41.982.614	43%	42%	Kec. MUARA DUA
		7 01 01 2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	100.000.000		3	25.000.000					0	-	0%	0%	<	-	-	0%	0%	Kec. MUARA DUA	
		7 01 01 2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	26.003.854	2	10.000.000	2	10.000.000	2	4.495.000	-	5.495.000	2	9.990.000	100%	100%	<	4	19.990.000	44%	77%	Kec. MUARA DUA

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7 + 11		14=13/6*100%		15		
		701012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	8	35.005.139	1	6.988.700	2	7.000.000	2	5.999.800	-	999.800	2	6.999.600	100%	100%	<	3	13.988.300	38%	40%	Kec. MUARA DUA		

No	Sasaran Daerah		Kode			Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RRPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPK Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <		K	Rp	K	Rp
															K	Rp	K	Rp														
1	2		3			4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7 + 11		14=13/6*100%		15				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Dokumen	4	4.788.000	2	1.140.000	1	1.140.000	1	475.000	-	665.000	1	1.140.000	100%	100%	=	3	2.280.000	75%	48%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	10.000.000			2	2.500.000	2	2.500.000	-	0	2	2.500.000	100%	100%	=	2	2.500.000	25%	25%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	280.000.000	9	67.973.152	18	60.000.000	8	32.446.716	17	46.869.348	25	79.316.064	139%	132%	>	34	147.289.216	850%	53%	Kec. MUARA DUA				
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,27%	90,29%					153,63%	40,58%	Kec. MUARA DUA	
																					Predikat Kinerja		BT	BT					BT	BR	Kec. MUARA DUA	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional/Lapangan	Unit	41	3.216.000.000	5	49.938.100	8	809.000.000	0	-	0	59.689.053	0	59.689.053	0%	7%		5	109.627.153	12%	3%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	01	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	252.000.000			2	63.000.000							0%	0%	<			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	924.000.000			1	231.000.000			0	-	0%	0%	<	-	-			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	210.000.000			6	52.500.000			0	-	0%	0%	<	-	-			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	252.000.000			4	63.000.000			0	-	0%	0%	<	-	-			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	20	378.000.000			5	94.500.000			0	-	0%	0%	<	-	-			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000.000			1	250.000.000							0%	0%	<			0%	0%	Kec. MUARA DUA				
	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	100.000.000			1	25.000.000	0	-	1	59.689.053	1	59.689.053	100%	239%	>	1	59.689.053	25%	60%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	100.000.000	5	49.938.100	6	30.000.000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	<	5	49.938.100	83%	50%	Kec. MUARA DUA				
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		12,50%	29,84%					13,54%	13,70%	Kec. MUARA DUA	
																					Predikat Kinerja		BR	BR					BR	BR	Kec. MUARA DUA	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Bulan		1.594.027.400	3	38.980.714	12	207.860.000	6	138.649.691	6	197.324.764	12	335.974.455	100%	162%			374.955.169	0%	24%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1290	8.000.000	-	21.992.014	300	1.000.000	200	992.200	0	-	200	992.200	67%	99%	<	200	22.984.214	16%	287%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	192	252.693.000	24	10.000.000	48	49.098.333	20	20.657.491	20	31.909.084	40	52.566.575	83%	107%	>	64	62.566.575	33%	25%	Kec. MUARA DUA				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	1.333.334.400	6	6.988.700	12	157.761.667	6	117.000.000	6	165.415.680	12	282.415.680	100%	179%	>	18	289.404.380	38%	22%	Kec. MUARA DUA				
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		83,33%	128,43%					28,78%	111,26%	Kec. MUARA DUA	
																					Predikat Kinerja		I	BT				BR	BT	Kec. MUARA DUA		
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Unit		985.140.000	12	197.616.100	12 Bln	191.035.000	6	12.450.000	4	31.100.000	10	43.550.000	83%	23%		22	241.166.100	0%	24%	Kec. MUARA DUA				

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode

			8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		48	-	6	271.717.057	12	230.916.647	6	36.000.000	6	56.250.000	12	92.250.000	100,00%	39,95%		18	363.967.057	37,50%	0,00%	KESBANGPOL
			8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	1.200.000	12	1.200.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	12	1.200.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	52.265.177	12	76.004.167		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	12	52.265.177	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	218.251.880	12	153.712.480	6	36.000.000	6	56.250.000	12	56.250.000	100,00%	36,59%	<	24	274.501.880	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						ST	S			SR	SR	KESBANGPOL		
Predikat Kinerja																						ST	ST			ST	ST	KESBANGPOL		
			8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		48	-	12	149.154.900	12	145.100.000	6	6.573.600	6	7.893.450	12	14.467.050	100,00%	9,97%		24	163.621.950	50,00%	0,00%	KESBANGPOL
			8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		2	31.527.100	2	39.500.000		3.590.400	2	7.893.450	2	11.483.850	100,00%	29,07%	<	4	43.010.950	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		2	30.467.800	2	30.600.000	2	2.983.200	0	-	2	2.983.200	100,00%	9,75%	<	4	33.451.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	77.160.000	1	50.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	77.160.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL		
			8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	10.000.000	1	25.000.000		-	-	0	-	0,00%	0,00%	<	1	10.000.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						50,00%	9,71%			0,00%	0,00%	KESBANGPOL		
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	KESBANGPOL		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																						34,00%	37,97%			11,36%	8,06%	KESBANGPOL		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																						SR	SR			SR	SR	KESBANGPOL		
Meningkatnya Pelayanan Publik			8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	2,21	-	43,81	916.594.016	1,44	627.277.500	0	-	144	97.799.500	144	97.799.500	100,00%	15,59%		187,8	1.014.393.516	8498,19%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	02	2.01	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	221	0	72	916.594.016	144	627.277.500	0	0	144	97.799.500	144	97.799.500	100,00%	15,59%		216	1.014.393.516	97,74%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen			1	25.777.500				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	KESBANGPOL			
			8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen			0	31.500.000				0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	KESBANGPOL			
			8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		20	892.996.416	40	550.000.000		-	40	91.018.300	40	91.018.300	100,00%	16,55%	<	60	984.014.716	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		40	23.597.600	40	20.000.000		-	40	6.781.200	40	6.781.200	100,00%	33,91%	<	80	30.378.800	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						50,00%	12,61%			0,00%	0,00%	KESBANGPOL		
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR	KESBANGPOL		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																						50,00%	12,61%			0,00%	0,00%	KESBANGPOL		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																						SR	SR			SR	SR	KESBANGPOL		
Meningkatnya Pelayanan Publik			8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio	0,82	-	49,97	8.334.411.317	0,79	37.695.404.034	79	177.800.000	79	15.389.441.300	158	15.567.241.300	200,00	41,30%		208	23.901.652.617	25362,20%	0,00%	KESBANGPOL	
			8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen	32071	-	985,97	8.334.411.317	7876	37.695.404.034	1969	177.800.000	1969	15.389.441.300	3938	15.567.241.300	50,00%	41,30%		4924	23.901.652.617	15,35%	0,00%	KESBANGPOL	

RKPK Lhokseumawe
Tahun 2026

II - 339

			8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang				50	91.523.840	50	50.000.000				50	-	100,00%	0,00%	<	100	91.523.840	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							50,00%	0,00%				0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
Predikat Kinerja																							SR	SR				SR	SR	KESBANGPOL	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																							50,00%	0,00%				0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																							SR	SR				SR	SR	KESBANGPOL	
Meningkatnya Pelayanan Publik		8	01	06				PROGKAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen		100		-	0	30.000.000	100	547.183.943	50	18.000.000	50	100.601.000	50	118.601.000	50,00%	21,67%	50	148.601.000	50,00%	0,00%	KESBANGPOL
		8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tercipta kewaspadaan dini terhadap gangguan konflik	Persen				-	72	30.000.000	95	547.183.943	0	18.000.000	47	100.601.000	47	118.601.000	49,47%	21,67%	119	148.601.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL
		8	01	06	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen						20	50.000.000		-			-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
		8	01	06	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang						20	75.000.000	0	-	20	23.501.000	20	23.501.000	100,00%	31,33%	<			0,00%	0,00%	KESBANGPOL
		8	01	06	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang						40	347.183.943	20	18.000.000	20	58.800.000	40	76.800.000	100,00%	22,12%	<			0,00%	0,00%	KESBANGPOL
		8	01	06	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan				40	30.000.000	40	75.000.000		-	40	18.300.000	40	18.300.000	100,00%	24,40%	<	80	48.300.000	0,00%	0,00%	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							75,00%	19,46%				0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
Predikat Kinerja																							S	SR				SR	SR	KESBANGPOL	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																							75,00%	19,46%				0,00%	0,00%	KESBANGPOL	
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																							S	SR				SR	SR	KESBANGPOL	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																							45,83%	16,78%				1,89%	1,34%	KESBANGPOL	
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																							SR	SR				SR	SR	KESBANGPOL	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp	K		Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													

			9	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bln	12	9.458.906.370	12		12	2.820.940.000	3	1.490.114.546	3	1.266.429.562	6	2.756.544.108	50,00%	97,72%		18	2.756.544.108	150,00%	29,14%	DSIPD
			9	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	476	9.458.906.370	476	2.709.537.355	476	2.820.940.000	119	1.490.114.546	119	1.266.429.562	238	2.756.544.108	50,00%	97,72%	<	714	5.466.081.463	150,00%	57,79%	DSIPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							50,00%	97,72%				150,00%	57,79%	DSIPD
Predikat Kinerja																							SR	ST				ST	R	DSIPD
			9	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bln	1	428.798.409			12	135.399.508	3	44.785.600	3	134.567.046	6	179.352.646	50,00%	132,46%		6	179.352.646	600,00%	41,83%	DSIPD
			9	01	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	88.815.081	3		37			15		15		17.000.000	40,54%	73,09%	<	18	28.804.530	36,00%	32,43%	DSIPD
									Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Alat-Alat Kebersihan	Paket	15	12.630.587		11.804.530		23.259.508		7.404.400		9.595.600			0,00%							
			9	01	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	900	60.145.653	3	8.000.000	320	8.000.000	160	3.990.000	0	4.000.000	160	7.990.000	50,00%	99,88%	<	163	15.990.000	18,11%	26,59%	DSIPD
			9	01	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	42.101.957	4	8.899.800	15	8.000.000	7	999.600		6.000.000	7	6.999.600	46,67%	87,50%	<	11	15.899.400	73,33%	37,76%	DSIPD
			9	01	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	4.571.070	2	1.140.000	2	1.140.000		0		1.080.000	0	1.080.000	0,00%	94,74%	<	2	2.220.000	100,00%	48,57%	DSIPD
			9	01	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	220.534.061	12	96.919.100	80	95.000.000	40	32.391.600		113.891.446	40	146.283.046	50,00%	153,98%	>	52	243.202.146	65,00%	110,28%	DSIPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							31,20%	101,84%				58,49%	51,13%	DSIPD
Predikat Kinerja																							SR	ST				R	R	DSIPD
			9	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bln	1	34.082.537			12	42.750.000		0		47.424.900	0	47.424.900	0,00%	110,94%		0	47.424.900	0,00%	139,15%	DSIPD
			9	01	01	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	34.082.537	12	63.850.000	15	42.750.000		0		47.424.900	0	47.424.900	0,00%	110,94%	>	12	111.274.900	100,00%	326,49%	DSIPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,00%	110,94%				100,00%	326,49%	DSIPD
Predikat Kinerja																							SR	ST				ST	ST	DSIPD
			9	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.283.722.787			12	502.702.400		222.644.959		297.497.096	0	520.142.055	0,00%	103,47%		0	520.142.055	0,00%	40,52%	DSIPD
			9	01	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	99	8.841.411	12		100	2.000.000	50	1.998.920	0	-	50	1.998.920	50,00%	99,95%	<	62	3.988.420	62,63%	45,11%	DSIPD
									Jumlah Penyediaan Materai	Lembar	350	8.420.391		1.989.500							50									
			9	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	45.710.696	3	354.901.214	3	280.000.000	1	127.146.039	1	167.097.576	2	294.243.615	66,67%	105,09%	>	5	649.144.829	166,67%	1420,12%	DSIPD
			9	01	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	432.856.236	12		3										13					
									Jumlah Penyediaan Tenaga Administrasi	OB	456	726.545.487		215.520.605		220.702.400		93.500.000	1	130.399.520	1	223.899.520	8,33%	101,45%	<		439.420.125	433,33%	101,52%	DSIPD
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	OB	456	61.348.566																		

																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		41,67%	102,16%										220,88%	522,25%	DSIPD	
																				Predikat Kinerja		SR	ST									ST	ST	DSIPD		
		9	01	01	2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	bln	1	290.503.505		12	96.400.000	3	30.609.500	3	127.270.160	6	157.879.660	50,00%	163,78%			6		157.879.660	600,00%	54,35%	DSIPD							
		9	01	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	132.721.408	1	31.518.000	1	34.100.000		13.679.500	1	19.676.000	1	33.355.500	100,00%	97,82%	<	2	64.873.500	200,00%	48,88%	DSIPD							
		9	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	92.624.306	2	23.965.180	3	47.300.000		10.830.000	1	1.810.000	1	12.640.000	33,33%	26,72%	<	3	36.605.180	100,00%	39,52%	DSIPD							
		9	01	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.109.240		8 Unit	15.000.000		2.000.000		0		107.784.160	0,00%	718,56%	>	0		107.784.160	0,00%	238,94%	DSIPD							
		9	01	01	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	20.048.551			0		4.100.000		105.784.160	0	109.884.160	0,00%	0,00%	<	0		109.884.160	0,00%	548,09%	DSIPD							
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		33,33%	210,78%									75,00%	218,86%	DSIPD		
																				Predikat Kinerja		S	ST									ST	ST	DSIPD		
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		34,37%	34,37%									34,37%	34,37%	DSIPD		
																				PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	SR									SR	SR	DSIPD		
	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	9	01	02		PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	Persen	59,4	37.013.829.017		53,88	1.380.000.000				692.389.700	46,634615	1.775.263.145	0	2.467.652.845	0,00%	178,82%		0	2.467.652.845	0,00%	0,00%	DSIPD							
		9	01	02	7	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Terlaksananya kegiatan wawasan keislaman	Bulan	12	801.942.040		12	110.000.000	3	112.715.800	3	4.561.800	6	117.277.600	50,00%	106,62%			6		117.277.600	50,00%	14,62%	DSIPD							
		9	01	02	7	01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang	65	200.485.510		55	20.000.000	50	15.378.000	0	-	50	15.378.000	90,91%	76,89%	<	50	15.378.000	76,92%	7,67%	DSIPD								
		9	01	02	7	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang	100	200.485.510	100	44.968.000	80	35.000.000	20	31.647.000	20	1.642.000	40	33.289.000	50,00%	95,11%	<	140	78.257.000	140,00%	39,03%	DSIPD							
		9	01	02	7	05	Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang	60	200.485.510	60	35.824.430	40	25.000.000	40	21.669.800	-	2.199.800	40	23.869.600	100,00%	95,48%	<	100	59.694.030	166,67%	29,77%	DSIPD							
		9	01	02	7	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spritualnya	Orang	55	200.485.510	40	46.606.000	60	30.000.000	38	44.021.000	-	720.000	38	44.741.000	63,33%	149,14%	>	78	91.347.000	141,82%	45,56%	DSIPD							
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		76,06%	104,15%									131,35%	30,51%	DSIPD		
																				Predikat Kinerja		T	ST									ST	SR	DSIPD		
		9	01	02	7	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Terciptanya Generasi Muda Yang Islami	Bulan	12	6.412.681.223		12		12	250.000.000	0	-	-	737.380.560	0	737.380.560	0,00%	294,95%		12	737.380.560	100,00%	11,50%	DSIPD							
		9	01	02	7	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang	349	3.207.768.163	349	1.313.111.360	216					0		0,00%			349	2.050.491.920	100,00%	63,92%	DSIPD								
							Jumlah Taahapan dan Peserta TC MTQ Tahap Seleksi	Orang/Tahap	112/1	400.971.020																										
							Jumlah Taahapan dan Peserta TC MTQ Tahap Pembinaan	Orang/Tahap	56/2	400.971.020			250.000.000			-	737.380.560		737.380.560		294,95%	<														
							Jumlah Taahapan dan Peserta TC MTQ Tahap Pemantapan	Orang/Tahap	56/1	400.971.020																										
							Jumlah Kafilah MTQ Aceh	Orang	125	2.002.000.000																										
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	294,95%											100,00%	63,92%	DSIPD
																				Predikat Kinerja		SR	ST											ST	R	DSIPD
		9	01	02	7	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Terlaksananya Kegiatan dakwah dan Syariat Islam	Tahun	1	25.949.883.960		1		1	365.000.000	6	39.009.900	-	256.536.485	6	295.546.385	600,00%	80,97%		7	295.546.385	700,00%	1,14%	DSIPD							
		9	01	02	7	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Dokumen	1	601.456.531		1	50.000.000	1	16.310.000	-	160.524.185	1	176.834.185	100,00%	353,67%	>	1	-	100,00%	0,00%	DSIPD								

			9	01	02	7	03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkatkan Kualitasnya	Orang	25	280.679.714		52	25.000.000	-	-	-	22.499.500	0	22.499.500	0,00%	90,00%	<	0	22.499.500	0,00%	8,02%	DSIPD	
			9	01	02	7	04	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang	100	400.971.020	100	34.583.340	3	15.000.000		-		44.163.800	0	44.163.800	0,00%	294,43%	>	100	78.747.140	100,00%	19,64%	DSIPD
			9	01	02	7	05	Pelatihan Takmir Masjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang	100	400.971.020		52	25.000.000	62	22.699.900	-	-	62	22.699.900	119,23%	90,80%	<	62	22.699.900	62,00%	5,66%	DSIPD	
			9	01	02	7	06	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang	55	601.456.531	130	28.554.000	36	50.000.000	0		29.349.000	0	29.349.000	0,00%	58,70%	<	130	57.903.000	236,36%	9,63%	DSIPD	
							Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Pidato tentang	Orang	50	400.971.020																				
			9	01	02	7	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit	21	4.494.405.899	71	8.757.335	101	100.000.000	0		0	-	0,00%	0,00%	<	71	8.757.335	338,10%	0,19%	DSIPD		
							Jumlah Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah dan	Unit	100	240.580.612	0	0	0		0		0				0		0,00%	0		0,00%			0	0,00%
			9	01	02	7	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	unit	16	14.033.985.713	6	2.995.930.845	13	100.000.000	0	0	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	6	2.995.930.845	37,50%	21,35%	DSIPD
							Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit	7	4.494.405.900			0	0	0		0			-	0,00%	0	-		0,00%	0		0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,36%	126,80%			97,11%	9,21%	DSIPD			
Predikat Kinerja																					SR	ST			ST	SR	DSIPD			
			9	01	02	7,1		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam ditengah masyarakat dan Terciptanya Qari-Qariah dan Hafizh	Tahun	1	1.363.301.468	1		1	310.000.000	6	370.211.100	-	553.961.700	6	924.172.800	600,00%	298,12%		7	924.172.800	700,00%	67,79%	DSIPD
			9	01	02	7,1	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan	1	240.582.612	1	25.000.000	1	25.000.000		-		23.293.800	0	23.293.800	0,00%	93,18%	<	1	48.293.800	100,00%	20,07%	DSIPD
			9	01	02	7,1	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan	Orang	68	400.971.020	0	0	100	35.000.000		0		32.099.700	0	32.099.700	0,00%	91,71%	<	0	32.099.700	0,00%	8,01%	DSIPD
			9	01	02	7,1	07	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Orang	95	400.971.020	95	651.766.485	95	250.000.000	-	370.211.100	-	498.568.200	0	868.779.300	0,00%	347,51%	>	95	1.520.545.785	100,00%	379,22%	DSIPD
							Frekuensi Rakor Imam Gampong dan Dai	Kali	2	320.776.816																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	177,47%			66,67%	135,77%	DSIPD			
Predikat Kinerja																					SR	ST			ST	SR	DSIPD			
			9	01	02	7,1		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	Tahun	1	2.085.049.306	1		1	300.000.000	6	143.152.900	-	184.922.600	6	328.075.500	600,00%	109,36%		7	328.075.500	700,00%	15,73%	DSIPD
			9	01	02	7,1	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan	6	1.002.427.551	6	174.429.530	6	150.000.000	4	67.760.000	-	109.422.600	4	177.182.600	66,67%	118,12%	>	10	351.612.130	166,67%	35,08%	DSIPD
			9	01	02	7,1	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang	300	801.942.041	300	297.421.675	300	150.000.000	172	75.392.900	0	75.500.000	172	150.892.900	57,33%	100,60%	>	472	448.314.575	157,33%	55,90%	DSIPD
							Frekuensi Rakor Ikatan Persaudaraan Haji dan Musyawarah Kota Lhokseumawe	Kali	2	280.679.714																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					62,00%	109,36%			162,00%	45,49%	DSIPD			
Predikat Kinerja																					R	ST			ST	SR	DSIPD			
			9	01	02	7,1		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Terwujudnya Masyarakat yang faham ilmu agama	Bulan	12	400.971.020	12	12	45.000.000	6	27.300.000	-	37.900.000	6	65.200.000	50,00%	144,89%		18	65.200.000	150,00%	16,26%	DSIPD	

		9	01	02	7,1	01	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga	5	400.971.020	2	68.800.000	2	45.000.000		27.300.000		37.900.000	0	65.200.000	0,00%	144,89%	>	2	134.000.000	40,00%	33,42%	DSIPD	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	144,89%				40,00%	33,42%	DSIPD
																						Predikat Kinerja	SR	ST				SR	SR	DSIPD
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)	27,07%	159,60%				99,52%	53,05%	DSIPD
																						PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)	SR	ST				SR	R	DSIPD
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)	30,72%	96,99%				66,94%	43,71%	DSIPD
																						PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)	SR	ST				S	SR	DSIPD
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)	17,28%	88,15%				166,32%	6055,35%	DSIPD
																						PREDIKAT KINERJA (PER OPD)	SR	T				ST	ST	DSIPD

No	Sasaran Daerah	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > / = / <	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
				SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH		4.952.066.287		1.353.966.830		1.497.654.300		698.170.898		-		698.170.898						2.052.137.728			Sek. MAA	
	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	2 22 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	4.673.674.263	50	1.327.075.430	100	1.262.654.300	659.995.898	-	0	659.995.898	0,00%	52,27%		50	1.987.071.328	50,00%	42,52%	Sek. MAA		
		2 22 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	24	19.434.183	3	13.375.700	6	8.000.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%		3	13.375.700	12,50%	68,83%	Sek. MAA		
		2 22 01 2.01 02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	19.434.183	10	13.375.700	10	8.000.000			0	-	0,00%	0,00%	<	10	13.375.700	25,00%	68,83%	Sek. MAA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			25,00%	68,83%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																						8	Sek. MAA			
	2 22 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode	48	2.657.581.040	12	742.543.740	12	742.464.540	12	433.210.298	0	-	12	433.210.298	100,00%	58,35%		24	1.175.754.038	50,00%	44,24%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	448	2.657.581.040	12	742.543.740	12	742.464.540	6	433.210.298	0	-	6	433.210.298	50,00%	58,35%	<	18	1.175.754.038	4,02%	44,24%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	50,00%	58,35%			4,02%	44,24%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																						8	Sek. MAA			
	2 22 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	48	186.460.000	6	86.197.770	12	70.140.000	12	25.787.600	0	0	12	25.787.600	100,00%	36,77%		18	111.985.370	37,50%	60,06%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	16	22.000.000	4	8.679.720	4	9.000.000	2	2.860.000		-	2	2.860.000	50,00%	31,78%	<	6	11.539.720	37,50%	52,45%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	20	14.500.000	5	4.000.000	5	5.000.000	5	1.215.000		-	5	1.215.000	100,00%	24,30%	<	10	5.215.000	50,00%	35,97%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.06 05		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Paket	20	14.600.000	5	4.868.700	5	5.000.000	2	2.341.400		-	2	2.341.400	40,00%	46,83%	<	7	7.210.100	35,00%	49,38%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	48	4.560.000	12	1.140.000	12	1.140.000	12	570.000		-	12	570.000	100,00%	50,00%	<	24	1.710.000	50,00%	37,50%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	130.800.000	10	67.509.350	10	50.000.000	10	18.801.200		-	10	18.801.200	100,00%	37,60%	<	20	86.310.550	50,00%	65,99%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	78,00%	38,10%			44,50%	48,26%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																						8	Sek. MAA			
	2 22 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	1.604.999.040	6	428.688.620	12	378.249.760	12	177.700.000	0	0	12	177.700.000	100,00%	46,98%		18	606.388.620	37,50%	37,78%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	6.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	600.000		-	12	600.000	100,00%	60,00%	<	24	1.600.000	480,00%	26,67%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	528	1.598.999.040	2	427.688.620	2	377.249.760	2	177.100.000		-	2	177.100.000	100,00%	46,95%	<	4	604.788.620	0,76%	37,82%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	53,47%			240,38%	32,24%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																						8	Sek. MAA			
	2 22 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	205.200.000		56.269.600	12	63.800.000	72	23.298.000	0	0	72	23.298.000	600,00%	36,52%		72	79.567.600	150,00%	38,78%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	91.400.000	1	32.602.300	1	33.200.000	2	9.000.000		-	2	9.000.000	200,00%	27,11%	<	3	41.602.300	75,00%	45,52%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kenderaan Dinas Orasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	4	86.000.000	1	23.667.300	1	25.600.000	2	12.530.000		-	2	12.530.000	200,00%	48,95%	<	3	36.197.300	75,00%	42,09%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	4	13.900.000	-	-	0	-	4	1.768.000		-	4	1.768.000	0,00%	0,00%	<	4	1.768.000	100,00%	12,72%	Sek. MAA	
	2 22 01 2.09 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	22	13.900.000	-	-	1	5.000.000	0	0		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	19,01%			62,50%	25,08%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																						8	Sek. MAA			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																	65,6%	33,8%				75,3%	43,7%	Sek. MAA		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																						8	Sek. MAA			
	Meningkat nya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya	2 22 07		PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitas sengketa adat	Persen	100	278.392.024		26.891.400	0,99	235.000.000	38.175.000	-		38.175.000	100%	16,24%		-	65.066.400	0,00%	23,37%	Sek. MAA		
		2 22 07 7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah pembinaan Adat Istiadat yang diestartikan	Jenis	20	173.400.000		26.891.400	5	180.000.000	3	38.175.000	0	0	3	38.175.000	60,00%	21,21%		3	65.066.400	15,00%	37,52%	Sek. MAA
		2 22 07 7.01 01		Pembinaan Adat seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan	12	21.200.000	0	-	1	75.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA		
		2 22 07 7.01 02		Permayarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakat Adat Do Da Idi	Lembaga	8	4.200.000	0	-		55.000.000	3	29.415.000		-	3	29.415.000	0,00%	0,00%	<	3	29.415.000	37,50%	700,36%	Sek. MAA
		2 22 07 7.01 03		Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang	200	80.000.000	0	14.891.400	30	30.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	14.891.400	0,00%	18,61%	Sek. MAA		
		2 22 07 7.01 06		Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan adat Istiadat melalui media luar ruang yang dipublikasikan	Dokumen	8	68.000.000	2	12.000.000	2	20.000.000	1	8.760.000		-	1	8.760.000	50,00%	43,80%	<	3	20.760.000	37,50%	30,53%	Sek. MAA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	12,50%	10,95%			18,75%	187,38%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																								Sek. MAA		
	2 22 07 7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah pengembangan hukum adat yang dibina	Bulan	48	80.000.000		0	12	30.000.000		0		0	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA	
	2 22 07 7.02 01		Penguatan Peradilan Adat	Jumlah peserta pelatihan Peradilan Adat	Orang	200	80.000.000	0	-	50	30.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																								Sek. MAA		
	2 22 07 7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat dibina	Jumlah lembaga adat dan tokoh adat yang dibina	Jenis	20	24.992.024		0	5	25.000.000		0		0	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA	
	2 22 07 7.03 02		Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang	200	24.992.024	0	-	50	25.000.000		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	-	-	0,00%	0,00%	Sek. MAA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	Sek. MAA			
Predikat Kinerja																								Sek. MAA		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																	4,2%	3,7%				6,3%	62,5%	Sek. MAA		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satunya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											SMSTR 1			SMSTR 2										
				Tolok Ukur	Satuan		Target	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9÷10		12=11/8		13 = 7÷11		14=13/6*100%		15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)														34,88%	18,72%					40,76%	53,09%			Sek. MAA
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)														SR	SR					SR	R			Sek. MAA

No	Sasaran Daerah	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1			SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<		K	Rp	K	Rp
															K	Rp		K	Rp										
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
						SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)			0				3.565.727.830		2.268.193.961		6.063.224.131		8.331.418.092					8.331.418.092			MPU		
																											MPU		
		1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				9.312.318.804	0	2.881.880.948	0	3.565.727.830		2.268.193.961		6.063.224.131	0	8.331.418.092					11.213.299.040			MPU	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	7.064.534.840	100	2.844.693.448	100	2.950.727.830		1.936.613.961	100	4.909.935.071	100	6.846.549.032	100%	232%		200	9.691.242.480	200%	137%		
		9	01	03	2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.000.000	100	12.714.600	3 persen	14.000.000		4.000.000	1	19.398.500	1	23.398.500	33%	167%		101	36.113.100	3367%	361%	MPU	
		9	01	03	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.000.000	3	12.714.600	3 Paket	14.000.000	1	4.000.000	1	19.398.500	2	23.398.500	67%	167%	>	5	36.113.100	167%	361%	MPU	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		66,67% S	167,13% ST				166,67% ST	361,13% ST	MPU MPU	
		9	01	03	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	1.058.443.000	100	1.325.197.947	12 Bulan	1.366.471.510	6	1.067.483.241	6	2.326.684.081	12	3.394.167.322	0%	248%		112	4.719.365.269	933%	446%	MPU	
		9	01	03	2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	156	1.058.443.000	156	1.325.197.947	18	1.366.471.510	4	1.067.483.241	4	2.326.684.081	8	3.394.167.322	44%	248%	>	164	4.719.365.269	105%	446%	MPU	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		44,44% SR	248,39% ST				105,13% ST	445,88% ST	MPU MPU	
		9	01	03	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	316.560.000		85.807.421	12 persen	106.140.000	3	51.753.800	3	149.145.500	6	200.899.300	50%	189%		6	286.706.721	50%	91%	MPU	
		9	01	03	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	138	36.000.000	3	8.788.091	3 Paket	25.000.000		-	3	14.747.300	3	14.747.300	100%	59%	<	6	23.535.391	4%	65%	MPU
		9	01	03	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	16.000.000	3	4.000.000	3	5.000.000		-	3	4.000.000	3	4.000.000	100%	80%	<	6	8.000.000	50%	50%	MPU
		9	01	03	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	3	4.054.800	3	5.000.000		-	3	4.998.000	3	4.998.000	100%	100%	<	6	9.052.800	50%	45%	MPU
		9	01	03	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	4	4.560.000	1	1.140.000	1	1.140.000	0	285.000	1	1.425.000	1	1.710.000	100%	150%	>	2	2.850.000	50%	63%	MPU
		9	01	03	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	laporan	40	240.000.000	10	67.824.530	10	70.000.000	5	51.468.800	5	123.975.200	10	175.444.000	100%	251%	>	20	243.268.530	50%	101%	MPU
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		100,00% ST	127,92% ST				40,87% SR	64,90% R	MPU MPU	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah					10 Unit	20.000.000		14.877.000	5	29.754.000	5	44.631.000	0%	223%		5	44.631.000	0%	0%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6	20.000.000	3	14.877.000	3	29.754.000	6	44.631.000	100%	223%	>	6	44.631.000	0%	0%			
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja		100,00% ST	223,16% ST				0,00% SR	0,00% SR	MPU MPU	

			9	01	03	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	5.341.131.840	100	1.305.923.480	12 persen	1.327.316.320	3	758.300.000	3	2.195.549.440	6	2.953.849.440	50%	223%		106	4.259.772.920	883%	80%	MPU	
			10	01	03	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	120	1.000.000	120	1.000.000	120	1.000.000	120	1.000.000	0	2.000.000	120	3.000.000	100%	300%	>	240	4.000.000	200%	400%	MPU
			9	01	03	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	56.000.000	3	3.750.000	3 Laporan	28.000.000				0	-	0%	0%	<	3	3.750.000	25%	7%	MPU	
			9	01	03	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16	5.284.131.840	4	1.301.173.480	4	1.298.316.320	2	757.300.000	2	2.193.549.440	4	2.950.849.440	100%	227%	>	8	4.252.022.920	50%	80%	MPU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,67%	175,76%				91,67%	162,39%	MPU		
Predikat Kinerja																					S	ST				ST	ST	MPU		
			9	01	03	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bln	12	338.400.000	6	115.050.000	12 Bln	116.800.000	6	40.199.920	6	189.403.550	12	229.603.470	100%	197%		18	344.653.470	150%	102%	MPU	
			9	01	03	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	318.400.000	4	109.800.000	4	109.800.000	2	40.199.920	2	179.453.550	4	219.653.470	100%	200%	>	8	329.453.470	50%	103%	MPU
			9	01	03	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	48	20.000.000	12	5.250.000	12 Bln	7.000.000	0	0	12	9.950.000	12	9.950.000	100%	142%	>	24	15.200.000	50%	76%	MPU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	171,10%				50,00%	89,74%	MPU		
Predikat Kinerja																					ST	ST				SR	T	MPU		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																					79,63%	185,57%				90,87%	224,81%	MPU		
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																					T	ST				ST	ST	MPU		
			9	01	03		PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang Tersebarluarkan	Persen	58%	2.247.783.964	100	37.187.500	71.43	615.000.000		331.580.000	28,571	1.153.289.060	28,571	1.484.869.060	100%	241%		129	1.522.056.560	22042%	68%	MPU	
			9	01	03	7.01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Jumlah Laporan Peningkatan Sumber Daya	Laporan	4	2.221.783.964	4	18.639.550	4 Laporan	590.000.000		331.580.000		1.128.289.260	0	1.459.869.260	0%	247%		4	1.478.508.810	100%	67%	MPU	
			9	01	03	7.01	03	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader ulama yang mengikuti pendidikan	Orang/Bulan	12	2.000.000.000		50	515.000.000	50	322.080.000		1.039.517.060	50	1.361.597.060	100%	264%	>			0%	0%	MPU	
			9	01	03	7.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah laporan hasil muzakarah masalah	Laporan	3	110.000.000	3	18.639.550	3 Hari	50.000.000	0	-	2	29.772.200	2	29.772.200	67%	60%	<	5	48.411.750	167%	44%	MPU
			9	01	03	7.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah laporan hasil sosialisasi fatwa dan hukum islam	Laporan	2	111.783.964		2 Hari	25.000.000	2	9.500.000		59.000.000	2	68.500.000	100%	274%	>			0%	0%	MPU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					88,89%	199,31%				55,56%	14,67%	MPU		
Predikat Kinerja																					T	ST				R	SR	MPU		
			9	01	03	7.02	SILATURRAHMI ULAMA-ULAMA	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	12	26.000.000	3	18.547.950	3	25.000.000		0	3	24.999.800	3	24.999.800	100%	100%		6	43.547.750	50%	167%	MPU	

		9	01	03	7.02	02	Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyara katan	120	26.000.000	30	18547950	30	25.000.000		-	30	24.999.800	30	24.999.800	100%	100%	<	60	43.547.750	50%	167%	MPU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,00%	100,00%				50,00%	167,49%	MPU
Predikat Kinerja																						ST	ST				SR	ST	MPU
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																						94,44%	149,65%				52,78%	91,08%	MPU
PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																						ST	ST				R	ST	MPU
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																						87,04%	167,61%				71,82%	157,94%	MPU
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																						T	ST				S	ST	MPU

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RKP K Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP K Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP K yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP K Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPK K)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%	15				
	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat					SEKRETARIAT BAITUL MAL		42.191.335.612		8.498.350.418		8.589.792.446		6.755.338.324		15.748.256.517		22.503.594.841					31.001.945.259					
		9 01 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	9.766.494.987	100	1.769.250.763	100	1.680.392.446	50	822.542.624	50	2.770.337.317	100	3.592.879.941	100,00%	213,81%		200	5.362.130.704	20000,00%	54,90%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	6	12.930.375	6	11.390.150	-	13.400.000	0	-	13.094.000	0	13.094.000	0%	98%		6	24.484.150	189,35%	189,35%	Sek. Baitul Mal	
		9 01 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12.930.375	3	11.390.150	10	13.400.000		-	13.094.000	0	13.094.000	0%	98%	<	3	24.484.150	25%	189%	Sek. Baitul Mal	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0%	0%				25,00%	189,35%	Sek. Baitul Mal
Predikat Kinerja																					SR	SR				SR	ST	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode	48	4.647.445.727	12	934.950.487	12	901.388.390	3	491.535.524	3	1.372.475.557	6	1.864.011.081	50,00%	206,79%		18	2.798.961.568	37,50%	60,23%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	576	4.647.445.727	144	934.950.487	10	901.388.390	0	491.535.524	0	1.372.475.557	0	1.864.011.081	0%	206,79%	>	144	2.798.961.568	25,00%	60,23%	Sek. Baitul Mal
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	206,79%				25,00%	60,23%	Sek. Baitul Mal
Predikat Kinerja																					SR	ST				SR	R	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	48	543.937.775	12	126.822.384	12	131.140.000	0	21.407.100	6	257.688.800	6	279.095.900	50,00%	212,82%		18	405.918.284	37,50%	74,63%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.06 02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	164	43.101.250	1	13854084	41	15.000.000		0	65.101.400	0	65.101.400	0,00%	434,01%	>	1	78.955.484	0,61%	183,19%	Sek. Baitul Mal	
		9 01 01 2.06 04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	800	30.170.875	200	14000000	55	15.000.000		-	20	14.480.000	20	14.480.000	36,36%	96,53%	<	220	28.480.000	27,50%	94,40%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.06 05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	34.481.000	4	4828300	3	5.000.000		-	1	7.500.000	1	7.500.000	33,33%	150,00%	>	5	12.328.300	31,25%	35,75%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.06 06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1460	5.172.150	1	1.140.000	365	1.140.000		-		1.615.000	0	1.615.000	0,00%	141,67%	>	1	2.755.000	0,07%	53,27%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	431.012.500	12	93.000.000	40	95.000.000		21407100	20	168.992.400	20	190.399.500	50,00%	200,42%	>	32	283.399.500	800,00%	65,75%	Sek. Baitul Mal
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,94%	204,53%				171,89%	86,47%	Sek. Baitul Mal
Predikat Kinerja																					SR	ST				ST	T	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	43.101.250		60.312.440	0	30.000.000		-	29.640.000		29.640.000	0,00%	98,80%				0,00%	0,00%	Sek. Baitul Mal	
		9 01 01 2.07 11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	43.101.250	1	60.312.440	64	30.000.000		-	29.640.000	0	29.640.000	0,00%	98,80%	<	1	89.952.440	2,50%	208,70%	Sek. Baitul Mal	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00%	98,80%				2,50%	208,70%	Sek. Baitul Mal
Predikat Kinerja																					SR	ST				SR	ST	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	4.124.789.625	12	577.285.302	-	535.864.056		296.400.000		994.242.110	0	1.290.642.110	0,00%	240,85%		12	1.867.927.412	25,00%	45,29%	Sek. Baitul Mal
		9 01 01 2.08 01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	200	8.620.250	1	989.000	87	1.000.000		0	1.476.200	0	1.476.200	0,00%	147,62%	>	1	2.465.200	0,50%	28,60%	Sek. Baitul Mal	
		9 01 01 2.08 02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	86.202.500	3	4.628.592	1	1.750.000				0	-	0,00%	0,00%	<	3	4.628.592	100,00%	5,37%	Sek. Baitul Mal	
		9 01 01 2.08 04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	588	4.029.966.875	1	571.667.710	12	533.114.056	3	296.400.000	3	992.765.910	6	1.289.165.910	50,00%	241,82%	>	7	1.860.833.620	1,19%	46,17%	Sek. Baitul Mal
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					16,67%	129,81%				33,90%	26,71%	Sek. Baitul Mal
Predikat Kinerja																					SR	ST				SR	SR	Sek. Baitul Mal

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RRPK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RRPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RRPK yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
		9 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	5	394.290.235	58.490.000	-	68.600.000	13.200.000	103.196.850	0	116.396.850	0,00%	169,67%			174.886.850	0,00%	44,35%	Sek. Baitul Mal					
		9 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit/Bulan	48	177.404.745	32.990.000	1	33.100.000	7.200.000	1	51.538.500	1	58.738.500	100,00%	177,46%	>	2	91.728.500	4,17%	51,71%	Sek. Baitul Mal				
		9 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit/Bulan	48	173.784.240	25.500.000	1	25.500.000	6.000.000	1	40.558.350	1	46.558.350	100,00%	182,58%	>	2	72.058.350	4,17%	41,46%	Sek. Baitul Mal				
		9 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	4	43.101.250	-	-	10.000.000	0	11.100.000	0	11.100.000	0,00%	0,00%	<	-	11.100.000	0,00%	25,75%	Sek. Baitul Mal					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			66,67%	120,01%			2,78%	39,64%	Sek. Baitul Mal		
Predikat Kinerja																			S	ST			SR	SR	Sek. Baitul Mal		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																			17,9%	126,7%			43,5%	101,9%	Sek. Baitul Mal		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																			SR	ST			SR	ST	Sek. Baitul Mal		
Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat		9 01 04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0,99	32.424.840.625	1	6.729.099.655	0,99	6.909.400.000	5.932.795.700	0,99	12.977.919.200	0,99	18.910.714.900	100%	273,70%		2	25.639.814.555	200,00%	79,07%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Bulan	48	107.753.125	12	9.999.655	12	10.000.000	0	10.000.000	-	10.000.000	0%	100,00%		12	19.999.655	25,00%	18,56%	Sek. Baitul Mal				
		9 01 04 2.01 01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen	20	107.753.125	1	9.999.655	1	10.000.000	-	10.000.000	0	10.000.000	0%	100,00%	=	1	19.999.655	5,00%	18,56%	Sek. Baitul Mal				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	100,00%			5,00%	18,56%	Sek. Baitul Mal		
Predikat Kinerja																			SR	ST			SR	SR	Sek. Baitul Mal		
		9 01 04 2.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Periode Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Bulan	48	3.017.087.500	12	5.000.000	12	35.000.000	19.995.700	6	140.017.200	6	160.012.900	50%	457,18%		18	165.012.900	37,50%	5,47%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.02 01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang	2448	1.508.543.750	612	5.000.000	2	10.000.000	19.995.700	1	89.491.400	1	109.487.100	50%	1094,87%	>	613	114.487.100	25,04%	7,59%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.02 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen	544	646.518.750	0	-	2	5.000.000	-	19.899.800	0	19.899.800	0%	398,00%	>	-	19.899.800	0,00%	3,08%	Sek. Baitul Mal				
		9 01 04 2.02 04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen	120	862.025.000	0	-	1	20.000.000	-	1	30.626.000	1	30.626.000	100%	153,13%	>	1	30.626.000	0,83%	3,55%	Sek. Baitul Mal			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			50,00%	548,67%			8,62%	4,74%	Sek. Baitul Mal		
Predikat Kinerja																			SR	ST			SR	SR	Sek. Baitul Mal		
		9 01 04 2.03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Periode Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Bulan	48	29.300.000.000	4	6.714.100.000	-	6.864.400.000	5.912.800.000		12.827.902.000	0	18.740.702.000	0%	273,01%		4	25.454.802.000	8,33%	86,88%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang	2894	6.943.000.000	500	2.020.000.000	1985	2.040.000.000	1.145.000.000	-	1.290.000.000	0	2.435.000.000	0%	119,36%	>	500	4.455.000.000	17,28%	64,17%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang	1524	10.000.000.000	300	2.171.000.000	1349	2.249.000.000	1.938.000.000	-	5.040.000.000	0	6.978.000.000	0%	310,27%	>	300	9.149.000.000	19,69%	91,49%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang	468	2.985.000.000	117	670.400.000	118	670.400.000	-	547.800.000	-	1.378.200.000	0	1.926.000.000	0%	287,29%	>	117	2.596.400.000	25,00%	86,98%	Sek. Baitul Mal		
		9 01 04 2.03 04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang	60	180.000.000	15	21.000.000	15	45.000.000	27.000.000	-	54.000.000	0	81.000.000	0%	180,00%	>	15	102.000.000	25,00%	56,67%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang	40	192.000.000	10	10.000.000	6	15.000.000	12.500.000	-	25.000.000	0	37.500.000	0%	250,00%	>	10	47.500.000	25,00%	24,74%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang	200	2.000.000.000	50	58.000.000	50	60.000.000	60.000.000	-	120.000.000	0	180.000.000	0%	300,00%	>	50	238.000.000	25,00%	11,90%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil	Orang	280	1.400.000.000	50	284.000.000	235	285.000.000	992.000.000	-	1.984.000.000	0	2.976.000.000	0%	1044,21%	>	50	3.260.000.000	17,86%	232,86%	Sek. Baitul Mal			
		9 01 04 2.03 08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Rumah Orang	1600	5.600.000.000	400	1.479.700.000	326	1.500.000.000	1.190.500.000	-	2.936.702.000	0	4.127.202.000	0%	275,15%	>	400	5.606.902.000	25,00%	100,12%	Sek. Baitul Mal			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	345,79%			22,48%	83,62%	Sek. Baitul Mal		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKK Lhokseumawe Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	
Predikat Kinerja																	SR	ST				SR	T	Sek. Baitul Mal	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																	16,7%	331,5%				12,0%	35,6%	Sek. Baitul Mal	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																	SR	ST				SR	SR	Sek. Baitul Mal	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER URUSAN)																	17,3%	229,1%				27,8%	68,7%	Sek. Baitul Mal	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER URUSAN)																	SR	ST				SR	S	Sek. Baitul Mal	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKP Lhokseumawe Tahun 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKP Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	SMSTR 1		SMSTR 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15													
	Meningkatnya Pendidikan Dasar yang Berkualitas		SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH		6.323.813.387	1.379.796.281	1.813.741.547	113.484.400	988.273.886	1.101.758.286	60,75%			MPD													
		1 01	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		6.323.813.387	1.379.796.281	1.813.741.547	113.484.400	988.273.886	1.101.758.286				MPD													
		1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	5.513.020.537	100	1.315.095.181	100	1.641.932.662	50,00	113.484.400	50,00	952.434.786	100,00	1.065.919.186	100,00%	64,92%	200	2.381.014.367	200,00%	43,19%		MPD		
		1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	40	42.282.326	10	13.157.300	10	10.000.000	5	3.297.500	5	4.432.650	10	7.730.150	100,00%	77,30%	20	20.887.450	50,00%	49,40%		MPD		
		1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	42.282.326	10	13157300	10	10.000.000	5	3.297.500	5	4.432.650	10	7.730.150	100,00%	77,30%	<	20	20.887.450	50,00%	49,40%		MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	77,30%			50,00%	49,40%	MPD			
Predikat Kinerja																		ST	T			SR	SR	MPD			
		1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	48	3.782.910.510	12	851.503.611	12	982.749.542	6	25.235.800	6	717.615.346	12	742.851.146	100,00%	75,59%	24	1.594.354.757	50,00%	42,15%		MPD		
		1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	672	3.782.910.510	168	851.503.611	168 OB	982.749.542	42	25.235.800	126	717.615.346	168	742.851.146	100,00%	75,59%	<	336	1.594.354.757	50,00%	42,15%		MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100,00%	75,59%			50,00%	42,15%	MPD			
Predikat Kinerja																		ST	T			SR	SR	MPD			
		1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	20	224.540.263	5	88.041.700	12	86.183.600	6	34.258.900	6	104.431.560	12	138.690.460	100,00%	160,92%	17	226.732.160	85,00%	100,98%		MPD		
		1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	196	25.584.945	49	8.997.200	40	17.778.600	0	5.674.900	35	9.448.700	35	15.123.600	87,50%	85,07%	<	84	24.120.800	42,86%	94,28%		MPD	
		1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	920	22.628.156	230	5.000.000	230	12.265.000	0	1.920.000	200	8.080.000	200	10.000.000	86,96%	81,53%	<	430	15.000.000	46,74%	66,29%		MPD	
		1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	22.628.156	3	5.000.000	3	5.000.000	0	1.528.000	9	3.388.960	9	4.916.960	300,00%	98,34%	<	12	9.916.960	100,00%	43,83%		MPD	
		1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1520	5.159.220	380	1.140.000	380	1.140.000	0	-	380	1.140.000	380	1.140.000	100,00%	100,00%	=	760	2.280.000	50,00%	44,19%		MPD	
		1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	148	148.539.786	37	67.904.500	37	50.000.000	17	25.136.000	20	82.373.900	37	107.509.900	100,00%	215,02%	>	74	175.414.400	50,00%	118,09%		MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		134,89%	115,99%			57,92%	73,34%	MPD			
Predikat Kinerja																		ST	ST			R	S	MPD			
		1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	12	1.252.091.313	12	272.920.070	9	448.399.520	2	29.792.200	10	89.626.930	12	119.419.130	133,33%	26,63%	24	392.339.200	200,00%	31,33%		MPD		
		1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	2.155.063	1	989.000	2	1.000.000	0	992.200	2	-	2	992.200	100,00%	99,22%	<	3	1.981.200	37,50%	91,93%		MPD	
		1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1920	1.249.936.250	372	271.931.070	372	447.399.520	1	28.800.000	0	89.626.930	1	118.426.930	0,27%	26,47%	<	373	390.358.000	19,43%	31,23%		MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,13%	62,85%			28,46%	61,58%	MPD			
Predikat Kinerja																		R	R			SR	R	MPD			
		1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	20	211.196.125	4	89.472.500	20	114.600.000	2	20.900.000	4	36.328.300	6	57.228.300	30,00%	49,94%	10	146.700.800	50,00%	69,46%		MPD		
		1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	51.721.500	1	32.177.300	48	33.100.000	1	10.400.000	47	21.894.300	48	32.294.300	100,00%	97,57%	<	49	64.471.600	102,08%	124,65%		MPD	
		1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	144	155.164.500	3	52.305.200	144	76.500.000	1	10.500.000	143	14.434.000	144	24.934.000	100,00%	32,59%	<	147	77.239.200	102,08%	49,78%		MPD	
		1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4.310.125	1	4.990.000	16	5.000.000				0	-	0,00%	0,00%	<	1	4.990.000	25,00%	115,77%		MPD		
			2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	64	10.000.000	64	4.990.000	16	2.500.000	16	700.000	48	12.871.000	64	13.571.000	400,00%	542,84%	>	128	18.561.000	200,00%	185,61%		MPD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		66,67%	43,39%			107,29%	118,95%	MPD			
Predikat Kinerja																		S	SR			ST	ST	MPD			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)																		90,34%	75,02%			58,73%	69,08%	MPD			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)																		ST	S			R	S	MPD			
	Meningkatnya Pendidikan Dasar yang Berkualitas	1 01 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Sekolah yang Menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	Persen	100	810.792.850	100	64.701.100	83,76	171.808.885	0	-	12	35.839.100	12	35.839.100	14,33%	20,86%	112,00	100.540.200	112,00%	12,40%		MPD		
		1 01 08 7.01	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Jumlah Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan aceh	Jenis	8	13.419.725	-	-	2	52.980.855		-		-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%		MPD		
		1 01 08 7.01 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan	260	13.419.725		-	3	52.980.855		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%		MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	MPD			

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RPK pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPK Lhokseumawe sampai dengan RPKPK Lhokseumawe Tahun 2023(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPK Tahun 2024 (n-1) yang Dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPK yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPK Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPK s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPK S/D Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15												
		1 01 08 7.03	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Jumlah Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Jenis	12	150.854.375		-	3	19.999.650		-		-	0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	MPD	
		1 01 08 7.03 02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	4	150.854.375			1	19.999.650		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	MPD				
		1 01 08 7.04	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Jumlah Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Jenis	8	344.810.000		-	2	46.828.380		-		-	0	-	0,00%	0,00%		0	-	0,00%	0,00%	MPD	
		1 01 08 7.04 01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dajyah Salafiah dan Dirinyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dajyah Salafiah dan Dirinyah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	130	344.810.000			75	46.828.380		-		-	0	-	0,00%	0,00%	<	0	-	0,00%	0,00%	MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	MPD				
		1 01 08 7.05	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jenis	16	301.708.750		64.701.100	4	52.000.000		-	12	35.839.100	12	35.839.100	300,00%	68,92%		12	100.540.200	75,00%	33,32%	MPD	
		1 01 08 7.05 02	Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan	162	150.854.375	0	30.950.650	1	26.000.000		-	2	23.099.500	2	23.099.500	200,00%	88,84%	<	2	54.050.150	123,46%	3582,94%	MPD	
		1 01 08 7.05 03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan	125	150.854.375	0	33.750.450	3	26.000.000		-	30	12.739.600	30	12.739.600	1000,00%	49,00%	<	30	46.490.050	2400,00%	3081,78%	MPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															600,00%	68,92%				1261,73%	3332,36%	MPD				
Predikat Kinerja															ST	S				ST	ST	MPD				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER PROGRAM)															150,00%	17,23%				315,43%	833,09%	MPD				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH (PER PROGRAM)															ST	SR				ST	ST	MPD				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)															120,17%	46,13%				187,08%	451,09%	MPD				
PREDIKAT KINERJA (PER OPD)															ST	SR				ST	ST	MPD				

2.2.3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 terdapat 33 Indikator kinerja utama, diantaranya 6 Indikator Tujuan dan 27 Indikator sasaran. Secara garis besar capaian kinerja Kota Lhokseumawe tahun 2024 sampai dengan semester 2 sudah tercapai 54,55 persen atau sebanyak 18 indikator diantaranya 3 indikator tujuan dan 15 indikator sasaran. Indikator tujuan yang mencapai target indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan syariat islam dan persentase pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator yang belum mencapai target diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM), Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan indeks lingkungan hidup (IKLH) yang belum menyampaikan.

Tabel 2.212
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe
Tahun 2024 Semester 2

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
1.	Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Poin	Proses	CC 50.00	CC 50.50	CC 56.00	CC/ 56.00	B / 67,70	CC 62.00	SETDAKO
1.1	Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LPPD Kota	Kategori/ Poin	Tinggi 3,4290	Tinggi 3,430	Sangat Tinggi 4,20	Sangat Tinggi 4,20	Sangat Tinggi 4,20	Rendah 2,5623	Sangat Tinggi 4,25	SETDAKO
		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 60.00	B 60.50	B 60.50	B 60.50	B 61,12	B 61.50	SETDAKO, BAPPEDA
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Proses	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD, INSPEKTORAT
		Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	BPKD, INSPEKTORAT

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
		Tingkat Manajemen Risiko	Level	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	BPKD, INSPEKTORAT
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Kategori/ Poin	B 82.52	A 88.31	A 88.81	A 88.81	A 88.81	B 86,4	A 89.81	SETDAKO, BAPPEDA (LITBANG), DISDUKCAPIL, SETWAN, KOMINFO, BKPSDM, PERPUS, KESBANGPOL,4 KEC, DPMG, PERTANAHAN, DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD
2.	Tujuan 2 Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	80,65	80,75	80,85	80,85	80,85	83,91	81,00	DSI, MPU, BAITUL MAL

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
2.1	Sasaran : Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persen	100	100		100	100	69,23	100	DSI, MPU
		Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	Persen	100				100	100	100	DSI, MPU
		Persentase Penerima ZIS	%		12,47		12,50	12,50	12,50	11,75	BAITUL MAL
2.2	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	50,00	50,00		59,09	59,09	59,09	68,18	PK, MAA
3.	Tujuan 3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,57	77,62		77,70	80,85	79,55	77,75	BPS, PK, PP, DINKES

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	15,21	15,22		15,23	15.70	15,55	15,25	PK, MPD
		Rata-Rata lama sekolah	Tahun	11,10	11,13		11,14	11,14	11,31	11,16	PK, MPD
3.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlit Berprestasi	%	80,2%	171,4%		64,52	64,53	23,9	76,4%	<i>DISPORAPAR</i>
3.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,64	71,66		71,68	74,82	74,82	75.00	BPS, DINKES
4.	Tujuan 4 Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	63,7	64,9		65,35	65.35	69,40	66,25	DLH
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kuaitas Air	Nilai	55	56		57	59	70,00	59	DLH
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	91	92		93	93	92,89	95	DLH

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	22	23		24	24	24,95	26	DLH
5.	Tujuan 5 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,98	3,50	3,60	3,60	4.11	4,46	3,70	BPS
5.1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Miliar	3.403	3.471	3.541	3.541	500	526	525	DPMPTSP NAKER
		Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	432	452	472	472	472	478	512	DPMPTSP NAKER
5,2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	11,16	11,10	11,07	11,07	10,53	10,44	10,13	BPS, DINSOS
5,4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,16	11,12	11,08	11,08	8,48	8,47	7,48	BPS, DMPTSP
5,5	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33,20	33,35	33,38	33,38	57.20	59,12	59,80	BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA)

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					Target	RPD	Perubahan Target RPD	Target RKPK 2024	Capaian smstr 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)	(11)	(12)
5,6		Laju Inflasi	Persen	1,97	2,30	2,10	2,10	1,42	2,79	1,20	BPS, DISPERINDAGKOP &UKM
6.	Tujuan 6 Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Berkualitas	Persen	32,74	34,32	35,98	35,98	35,99	32,36	39,56	PUPR
6.1	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65,05	68,26	71,64	71,64	71,65	64,40	78,91	PUPR
6,2		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,43	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,21	PUPR
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47,80	54,47	61,13	61,13	61,13	8,40	74,47	PUPR
		Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks	-		-	1,00	-	belum menyampaikan		DISHUB

Sumber : Keputusan Walikota Nomor 241 Tahun 2024 dan Capaian OPD Tahun 2024

2.2.3.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah beberapakali terakhir pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024, terdapat 68 Indikator kinerja utama perangkat daerah. Secara garis besar indikator yang telah mencapai target sampai dengan semester 2 tahun 2024 sebesar 45,59 persen atau sebanyak 31 indikator dan sebanyak 47,06 persen atau sebanyak 32 indikator yang belum mencapai target dan 7,35 persen atau 5 indikator tidak menyampaikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU – PD)
Tahun 2024

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1		Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik							
1	Setdako	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	95,99	99,13	86,43	M	99,13
		Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	B 86,4	M	A 89.81
2	Bappeda	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	20,22	23	22,37	M	
			Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	100	H	100

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
		Meningkatnya Inovasi daerah	indeks inovasi daerah	satinov	10.60	38,76	43,66	H	40,33
3	Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persenatse Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	%	70	92	79	M	100
			Persentase Kapatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	%	72,72	87	81,11	M	94
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan APIP yang efektif	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	H	Level 3
4	BPKD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	%	84,25	100,00	95,80	M	100,00
5	DISDUKCAPIL	Meningkatnya pelayanan adminsitrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	A 93,49	H	A 89.81

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
6	SETWAN	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	Persentase penigkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	%	70,59	86,36	77,27	M	91,67
7	KOMINFO	Meningkatnya informasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	A 95,19	H	A 89.81
8	BKPSDM	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	%	52,19	53,10	56,02	H	54,94
9	DISPUSIP	Meningkatnya minat baca masyarakat	masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	%	1,78	1,90	1,46	M	2,14
10	KESBANGPOL	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial	%	0	59,38		P	60,14
11	DPMG	Meningkatnya pembinaan penyelelnggaraan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	57,61	74,49	74,43	M	98,75

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12	PERTANAHAN	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase Lahan bersertifikat milik pemerintah daerah	%	0,51	0,59	0,48	M	0,67
13	DP3AP2KB	Meningkatnya Produktivitas terhadap Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	77,57	94	95,73	H	95
		Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prevelensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,24	0,07	0,06	H	0,06
			Prevelensi kekerasan terhadap anak	%	0,12	0,06	0,05	H	0,05
		Terkendalnya peningkatan penduduk secara signifikan	Persentase angka kelahiran	%	2,058	2,18	2,18	H	2,16
14	SATPOL PP DAN WH	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	H	100
15	BPBD	Meningkatnya penanggulangan bencana	Persentase penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	H	100

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
16	4 KECAMATAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81			A 89.81
	KEC. MUARA SATU	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	A 91,00	H	A 89.81
	KEC. BLANG MANGAT	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	B 86,06	M	A 89.81
	KEC. MUARA DUA	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 88.81	B 86,06	M	A 89.81
	KEC. BANDA SAKTI	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.53	A 88.81	A 90.00	H	A 89.81
2		Tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat islam							
1	Dinas Syariat Islam	Meningkatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam Dalam Bermasyarakat		100	100	33,33	M	100

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
2	Baitul Mal	Meningkatnya pengelolaan ZIS	Persentase Penerima ZIS	%		12,50	12,50	H	11,75
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	50	57,67	54,13	M	68,47
4	MAA	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	%	100	100	100	H	100
3		Tujuan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia							
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Kelulusan	Tahun	99	100	100	H	100
			Angka Partisipasi Kasar	%	100	100	100,325	H	100
			Angka Partisipasi Murni	%	100	100	92,625	M	100
			Angka Partisipasi Sekolah	%			98,17	H	

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal berdasarkan Nilai-nilai syariat islam	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	50	50	52	H	55
			Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	%	75	75	13,76	M	76
2	Dinas Kesehatan	Sasaran Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase pelayanan capaian kesehatan yang memenuhi standar	%	86,41	100,00	94,72	M	100,00
				Persen	92,5	100	94,02		100
				Persen	91,5	100	85,06		100
				Persen	87,7	100	89,47		100
				Persen	74,7	100	79,09		100
				Persen	97	100	97,79		100
				Persen	80	100	100		100
				Persen	94,8	100	98,21		100
				Persen	86,6	100	96,80		100

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Persen	89,3	100	97,70		100
				Persen	90,3	100	100		100
				Persen	68,5	100	100		100
				Persen	84	100	98,44		100
			Persentase Balita Stunting	%	6,35	14,00	4,77	H	14
			Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	%	53,72	62,00	75,66	H	65,02
		Meningkatnya Keselamatan Ibu,Bayi, Anak dan Reproduksi	Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000	77,88	172,97	27,96	H	146,66
			Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	per 100.000	5,97	5,44	9,23	M	5,13
			Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	per 100.000	4,93	6,18	11,47	M	5,87
3	DISPORAPAR	Sasaran Meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlit Berprestasi	%	80,2%	4047		M	76,4%

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran aktif pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	100	100	100	H	100
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga pada even PORA	%	-	-	-	M	
4	MPD	Terwujudnya pelayanan lembaga Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Lhokseuamwe yang Optima	Jumlah rumusan/ rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Lhokseumawe yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe	rekome ndasi	2	2	0	M	2
4		Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup							
1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%		65		P	66

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
			Persentase RTH Publik	%		2.10		P	3.00
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%		85		P	95
5		Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing							
1	DMPTSP dan Naker	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rupiah (Milyar)	3,403	3,541	526	M	3,684
			Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	432	472	478	H	512
2	Dinsos	Menurunnya Angka Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	%	11,16	11,07	10,44	H	10,95
		Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	%	67,47	68,43	203,20%	H	68,60
3	DPMTSP Naker	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	%	11,16	11,08	8,47	H	11,04

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
4	DKP3	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Jumlah produksi perikanan	ton	136610 25,68	14.583	14.975	H	14212931,12
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama	%	-	13.612,857	2.701,307	M	136128
			Jumlah Produksi Padi	Ton		7441	9801	H	7741
5	DISPORAPAR	Meningkatnya pertumbuhan kunjungan destinasi wisata	Persentase peningkatan kunjungan destinasi wisata	%	50,23	5,00	-3,86	M	5
6	DISPRINDAGKO P	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Nilai PDRB Sektor perdagangan terhadap dasar harga berlaku	Rp/Trilyun	2013,28	2501,22		M	2863,64
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Omset bersih pelaku UMKM	Rp/Milyar	4615,28	5088,35		M	5609,9
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi aktif	Volume usaha koperasi aktif	Rp/Milyar	15,4	16,98		M	18,72
		Meningkatnya kinerja sektor perindustrian	Nilai PDRB Sektor perindustrian terhadap dasar harga berlaku	Rp/Trilyun	1787,4	2285,76		M	2616,96

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja OPD			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2024			
						Target	Capaian Semester 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
6		Tujuan Meningkatkan infrastruktur berkualitas							
1	DINAS PUPR	Kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	%	71,42	78,02	70,25	M	85,31
			Indeks pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	%	47,8%	61,13%	8,40%	M	74,47%
		Kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meningkat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	%	51,22%	52,25%	66,70%	H	55,29%
2	Dinas Perhubungan		Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	%	0,37	0,50		P	0,50
7	Semua OPD								
	Seluruh Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%		100	60,32	M	

Sumber : Keputusan Walikota Nomor 241 Tahun 2024 dan seluruh PD

2.2.3.7. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Indikator Kinerja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024, terdapat 195 Indikator kinerja daerah. Indikator Daerah merupakan indikator untuk mencapai target program yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Secara garis besar indikator yang telah mencapai target sampai dengan semester 2 tahun 2024 sebesar 55,90 persen atau sebanyak 109 indikator dan sebanyak 0,51 persen atau sebanyak 1 indikator yang masih dalam proses pencapaian yaitu indikator Opini BPK kemudian sebanyak 33,33 persen atau sebanyak 65 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan serta sebanyak 10,26 persen atau 20 indikator yang belum ada capaian, disebabkan dua perangkat daerah belum menyampaikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kesbangpol. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024				
						Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	100	H	100	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persen	64,96	83,76	92,79	H	100,00	MPD
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							PK
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	100,00	H	100	PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen	99,4	98,40	100,325	H	99,00	PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persen	98,36	100,00	100,00	H	100,00	PK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persen	88,00	90,00	22,37	M	92,31	PK
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persen	100	100	88,89	M	100	PK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2		Target	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								DSI-PD
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Dayah	5,56	7,89	7,35	M	12,50	DSI-PD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								DINKES
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DINKES
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persen	86,56	100,00	94,72	M	100,00	DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	2,43	4,14	8,35	H	22,03	DINKES
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	H	100,00	DINKES
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	64,98	83,44	90,26	H	100,00	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								PUPR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	92,29	70,42	34,70	H	48,50	PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	20,48	22,18	23,19	H	24,06	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67,47	71,86	95,24	H	76,69	PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68,58	74,85	41,52	M	81,77	PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	Persen	4,00	7,69	16,67	H	11,54	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65,05	71,64	64,40	M	78,91	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47,80	61,13	8,40	M	74,47	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								PUPR
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	Persen	69,19	69,63	21,97	M	70,15	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0,43	0,32	0,32	H	0,21	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam kondisi baik	Rasio	0,093	0,117	0,230	H	0,206	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								BPBD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	H	100	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	H	100	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								SATPOL PP WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman	Persen	100	100	100	H	100	SATPOL PP WH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								DINSOS
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	M	100	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen	71,31	74,92	52,93	M	78,72	DINSOS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	M	100	DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	38,61	43,76	65,81	M	50,56	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100,00	M	100	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen	100	100	0	M	100	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								DPMTSP NAKER
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DPMTSP NAKER
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	19,71	14,29	15,50	H	15,56	DPMTSP NAKER
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	39,21	53,57	9,30	M	57,22	DPMTSP NAKER

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	37,93	M	100	DPMTSP NAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								DP3AP2 KB
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DP3AP2 KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	Persen	59,58	62,02	66,12	H	60,68	DP3AP2 KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	62,50	87,50	62,50	M	100,00	DP3AP2 KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Persen	91,67	92,41	92,41	H	94,12	DP3AP2 KB
				Persentase Pembentukan Puspaga Gampong	Persen		5,88	7,35	H	22,06	DP3AP2 KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen	29,41	32,35	29,41	M	35,29	DP3AP2 KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	30,49	37,18	41,49	H	43,38	DP3AP2 KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	H	100	DP3AP2 KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								DKPPP
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DKPPP
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	39,45	41,38	27,01	M	45,00	DKPPP
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	33,33	55,56	66,67	H	77,78	DKPPP
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen	45,45	63,64	90,91	H	90,91	DKPPP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								PERTANAHAN
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	PERTANAHAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Santunan Persertifikatan	Persen	NA	80,00	0,00	M	86,67	PERTANAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen	NA	20,00	0,00	M	25,00	PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Persen	0,51	0,59	0,48	M	0,67	PERTANAHAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen	33,88	45,64	37,22	M	46,42	PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen	47,86	67,80	12,36	M	68,66	PERTANAHAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanian	Persen	35,09	52,63	10,42	M	70,18	PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Persen	NA	58,33	0,00	M	66,67	PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	-	M	Tidak	PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian	Persen	50	60	100	H	80	PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100		P	100	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunya RPPLH Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada		P	Ada	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	Persen				P		DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,7	65,35		P	66,25	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan taman	Persen	28,91	61,95		P	88,50	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	persen	75,00	85,00		P	95,00	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	persen	75,00	85,00		P	95,00	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase aparatur desa yang terlatih	Persen	1,47	7,35		P	29,41	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada		P	Ada	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100		P	100,00	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	86,25	89,73		P	93,74	DLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								DISDUK CAPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	58,24	71,18	79,88	H	71,07	DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	84,77	87,77	91,16	H	89,60	DISDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	58,3	100	100,00	H	100	DISDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	H	Ada	DISDUK CAPIL
				Persenatse peningkatan pengelolaan informasi Profil Kependudukan			100	100	H		DISDUK CAPIL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							DPMG	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DPMG
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Persen	94,12	95,59	83,82	M	100,00	DPMG
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Gampong	Persen	25,00	67,65	0,00	M	100,00	DPMG
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan Administiras Pemerintahan Gampong	Persen	57,61	74,49	74,43	M	98,75	DPMG
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	51,84	86,03	50,00	M	97,79	DPMG
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								DP3AP2 KB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	47,06	64,71	61,76	M	73,53	DP3AP2 KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan	Persen	29,94	51,61	54,97	H	50,66	DP3AP2 KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Pembinaan Keluarga Berencana							
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	90,07	104,78	106,62	H	119,49	DP3AP2 KB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								DISHUB
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100		P	100	DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Persen	41,67	52,08		P	45,83	DISHUB
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Ada / Tidak	Tidak	Tidak		P	Ada	DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								KOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	KOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Persen	26,67	23,68	90,00	H	30,00	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Persen	2,94	11,76	100,00	H	23,53	KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								DISKOP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	98,30	M	100	DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen	0,48	0,93	94,50	H	1,34	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Persen	79,33	76,89	5,50	M	85,38	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	4,33	6,48	16,35	H	8,04	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen	1,31	24,89	9,12	M	29,48	DISKOP
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	6,08	7,31	0,72	M	8,40	DISKOP
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								DPMTSP NAKER
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	NA	40,00	0,00	M	46,67	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Persen	10,00	20,00	20,00	H	20,00	DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks	87,02	87,66	100,00	H	88,30	DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks	80,56	76,83	47,33	M	75,19	DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	H	Ada	DPMTSP NAKER
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA								DISPORAPAR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	100	100	100	H	100	DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	6	15	H	8	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Persen	42,86	42,86	94,74	H	42,86	DISPORAPAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								KOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Persen	2,94	8,82	100,00	H	11,76	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								PK
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46,15	61,54	85,71	H	76,92	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen	3,45	3,45	6,25	H	6,90	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah	Persen	50,00	56,25	56,25	H	68,75	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50,00	59,09	52,00	M	68,18	PK
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								MAA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2		Target	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitas sengketa adat	Persen	100	100	100	H	100	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								ARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	Persen	4,34	9,02	4,37	M	13,09	ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen	3,77	10,91	12,50	H	17,54	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen	10,00	25,00	25,00	H	35,71	ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								DKPPP
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pembinaan Kelompok Nelayan	Persen	43,34	47,47	46,84	M	51,61	DKPPP
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton				M		DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Persen	43,22	49,83	16,49	M	56,45	DKPPP
				Produksi Perikanan Budidaya					M		DKPPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	41,67	46,67	45,00	M	51,67	DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	100	100	62,1	M	100	DKPPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen	25,00	60,00	100,00	H	90,00	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Persen	75,15	96,88	100,00	H	97,06	DISPORAPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen	100,00	100,00	0,00	M	100,00	DISPORAPAR
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								DKPPP
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Kelompok Tani	Persen	17,68	33,46	33,46	H	49,24	DKPPP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persen	17,68	34,51	34,51	H	51,34	DKPPP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen	37,75	42,00	20,30	M	46,24	DKPPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	41,76	50,37	20,51	M	58,99	DKPPP
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	Persen	38,74	40,93	40,93	H	44,87	DKPPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								DISKOP
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persen	0,37	0,22		M	0,92	DISKOP
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	61,11	60,01		M	59,98	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Persen	50,00	75,00		M	83,33	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Persen	63,47	71,35		M	77,71	DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Persen	4,34	5,27		M	6,27	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen	4,73	5,00		M	5,65	DISKOP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Tidak	Ada	Ada		M	Ada	DISKOP
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01		SEKRETARIAT DAERAH								SETDAKO
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98,53	98,70	87,14	M	98,70	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	91,11	97,00	97,50	H	92,00	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD								SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Persen	41,18	72,73	83,33	H	83,33	SETWAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01		PERENCANAAN								BAPPEDA
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	BAPPEDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	H	Ada	BAPPEDA
				Persentase capaian perencanaan pembangunan daerah			100%	100%	H	100%	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen	100	100	91,94	M	100	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN								BPKD
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	H	Tepat Waktu	BPKD
5	02	02		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Dalam proses pemeriksaan dan penilaian oleh BPK	K	WTP	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00		M	100,00	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PAD	Persen	68,50	100		M	100	BPKD
5	03		KEPEGAWAIAN								BKPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00	H	100	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen	50,60	53,10	56,02	H	54,94	BKPSDM
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	8,77	9,75	8,17	M	10,33	BKPSDM
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	50,00	75,00	28,57	M	100,00	BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01		INSPEKTORAT DAERAH								INSPEKTORAT
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	78,35	81,43	81,76	H	83,56	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Point / Kategori	Proses	CC 50.50	CC 54,79	H	CC 51.50	INSPEKTORAT
6	01	03		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	H	Level 4	INSPEKTORAT
6	01	03		Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Level	Level 2	Level 3 3.2	Level 3 3.031	M	Level 3 3.5	INSPEKTORAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program			Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2		Target	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01		KECAMATAN								B. SAKTI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	5,56	44,44	94,44	H	55,56	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	100	100	H	100	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	75	100	100	H	100	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	H	100	B. SAKTI
7	01		KECAMATAN								B. MANGAT
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	B. MANGAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen	40	60	60	H	100	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	86,36	86,36	86,36	H	90,91	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	80,00	80,00	80,00	H	100,00	B. MANGAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	13,64	22,73	22,73	H	22,73	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	H	100	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN								M. SATU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	100	100	100	H	100	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	50,00	50,00	H	42,86	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	100	100	100	H	100	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	H	100	M. SATU
7	01		KECAMATAN								M. DUA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	17,65	17,65	5,88	M	17,65	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	23,53	23,53	100,00	H	23,53	M. DUA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	17,65	17,65	100,00	H	17,65	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	H	100	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								KESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100		P	100	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,82	1,91		P	2,21	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio	75,94	79,95		P	81,98	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	Persen	12,96	18,75		P	20,27	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Persen	NA	2,65		P	4,37	KESBANGPOL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024				
							Target	Capaian Semester 2	Target		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	NA	100		P	100	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Persen	58,33	71,43	71,43	H	71,43	MPU
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								B. MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	B. MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0,72	0,99	0,98	H	0,99	B. MAL
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								DSI-PD
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	H	100	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Persentase Peningkatan Pembinaan Syariat Islam	Persen	43,70	53,88	46,63	M	59,43	DSI-PD

Sumber : Keputusan Walikota 241 Tahun 2024 dan seluruh PD

2.3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kota Lhokseumawe

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMK karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Pembangunan di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya :

2.3.2.1 Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh

1) Fokus Seni Budaya

Kota Lhokseumawe memiliki 22 situs cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) kecamatan) situs cagar budaya tersebut terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda, namun keseluruhan situs cagar budaya di Kota Lhokseumawe belum ada satupun yang terlegalisasi

2) Kebudayaan

Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe sebanyak 22 unit situs belum terlegalisasi secara hukum atau belum ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

2.3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional

1) Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe yang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe berada pada angka 4,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi aceh sebesar 4,66 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen.

2) Rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 1,18 persen. Pada Tahun 2023 Persentase ini sedikit mengalami penurunan menjadi 0,71 persen dan naik pada tahun 2024 sebesar 0,73. Meskipun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya namun Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

3) Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun

2024 sebesar 4,46 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,66 persen dan nasional sebesar 5,03 persen.

4) Laju Inflasi

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 2.79% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 2.17% inflasi nasional yaitu sebesar 1.57%. Penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 5.28% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yaitu sebesar -0.71

5) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Lhokseumawe masih berada di rata-rata nasional. Hal ini dapat ditandai pada tahun 2024 PDRB Per Kapita Lhokseumawe sebesar 59,12 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 43,78 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 78,62 juta rupiah.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.99% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.47% pada tahun 2024, Namun TPT Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi aceh sebesar 5,75 persen dan TPT Nasiona; 4,91 persen.

7) Indeks Gini

Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Lhokseumawe sebesar 0,296 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,348, lebih tinggi dari Indeks Gini Aceh 0,291. Pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Lhokseumawe kembali mengalami penurunan menjadi 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388.

8) Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih berfluktuasi. Hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,48 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023 dan kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 16,70 persen.

9) Angka Kemiskinan

Di Kota Lhokseumawe angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 10,73 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.100 jiwa. Angka kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2023 relatif lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Dari sisi kemiskinan ekstrem, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa. Kemudian Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2024 kembali turun menjadi 10,44 persen masih lebih baik dibandingkan angka kemiskinan aceh sebesar 14,23 persen

namun masih diatas angka kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen.

- 10) Pengangguran terbuka merupakan permasalahan nasional, Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe. Di Kota Lhokseumawe terbuka di Kota Lhokseumawe masih tinggi di bandingkan dengan pengangguran terbuka provinsi dan nasional. Pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 sebesar 8,78 persen, sedangkan pengangguran terbuka aceh sebesar 5,75 persen dan pengangguran terbuka nasional sebesar 4,91 persen.
- 11) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 7.08 persen berada dibawah Aceh sebesar 8.58 dan Nasional sebesar 8.34 dan pada tahun 2024 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 7.86 persen dan masih di bawah Aceh yang sebesar 9.10 persen dan Nasional sebesar 8.27 persen.
- 12) Ekspor Barang dan Jasa
Nilai Ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe periode 2020-2023 mengalami tren positif walaupun peningkatan tidak signifikan. Pada tahun 2020 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe sebesar (546,92) juta rupiah atau sebesar (-7,83)% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,85 juta rupiah atau 1,35% namun pada tahun 2024 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 34,51 juta rupiah atau 0,42%.
- 13) Kunjungan Wisata
Kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada Tahun 2024 jumlah kunjungan wisata sebesar 309.092 turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 321.499. Perlu upaya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan meningkatkan objek wisatawan.
- 14) Perdagangan
Ekspor bersih perdagangan Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2022 belum menunjukkan perbaikan, namun di tahun 2023 naik sebesar 1,35 persen namun di tahun 2024 turun kembali menjadi 0,42 persen.
- 15) Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12.16% dari tahun lalu dengan nilai penurunan sebesar Rp 165.762.023. Penurunan terbesar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan penurunan sebesar 23.13% dan retribusi pelayanan pasar sebesar 6.49%, dilanjutkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan penurunan mencapai 100%. Penurunan jumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 7.750.000 atau sebesar 13.41%.
- 16) Perindustrian
Cakupan Bina Kelompok pengrajin mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023 terakhir sebesar 40,18 persen namun pada tahun 2024 turun menjadi 33,94 persen.

- 17) Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan mulai tahun 2020-2022 terakhir sebesar 20.917 ton namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 15.114 ton dan kembali turun sebesar 14.974 ton.
- 18) Rasio PDRB Industri Pengolahan
Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 sebesar 19,48 persen namun terus menurun pada tahun 2023 sebesar 18,12 persen dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 16,70 persen.
- 19) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2024 sebesar 64,61, namun kenaikan TPAK Kota Lhokseumawe masih lebih rendah dari Aceh sebesar 65,11 dan Nasional 70,63. Rendahnya TPAK Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan Nasional disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.
- 20) Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang meningkat. Dari 106 unit koperasi aktif di tahun 2020, turun menjadi 181 unit koperasi aktif pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 130 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 21) Dalam pencapaian pengajuan perizinan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 92,11 persen dari 99,22 persen di tahun 2023. Untuk capaian aduan yang masuk dan terselesaikan sebesar 18 persen di tahun 2024 dari 22 persen di tahun 2023. Dan untuk capaian jumlah target iji survey juga menurun di tahun 2024 sebesar 60 persen dari tahun 2023 sebesar 105,79 persen.

2.3.2.3 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal

- 1) Angka Literasi/Numerasi
Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional. Untuk rerata literasi SMP di Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 63,13 masih dibawah rerata literasi nasional sebesar 68,27 dan rerata numerasi SMP di Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 58,86 juga masih dibawah rerata numerasi nasional sebesar 65,00.
- 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Pada tahun 2024 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 58,41 dalam kategori sedang. Selama 3 (tiga)

tahun terakhir IPLM Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan. Kota Lhokseumawe berada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM Kota Lhokseumawe untuk tahun 2024 tingkat SMP/MTsN mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 89,43 persen menjadi sebesar 86,46 persen di tahun 2024. Kemudian APM SMA juga mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 82,44 persen menjadi 74,08 persen.

4) Indeks Keluarga Sehat

Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan walaupun masih dalam kategori keluarga tidak sehat karena lebih kecil dari 0,500, namun pada Tahun 2023 IKS Kota Lhokseumawe sebesar 0,367 masih lebih baik dari IKS Provinsi Aceh sebesar 0,326 dan IKS Nasional sebesar 0,255. Walaupun demikian IKS Kota Lhokseumawe harus ditingkatkan sehingga bisa melebihi standar IKS yaitu 0,500 untuk membentuk keluarga Sehat di Kota Lhokseumawe.

5) Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 196.067 jiwa menjadi 198.705 jiwa di tahun 2024. Penambahan jumlah penduduk ini diiringi dengan kepadatan penduduk akan menjadikan permasalahan bila peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, akibat peningkatan jumlah penduduk akan terkait dengan permasalahan lingkungan seperti kurang lahan, polusi krisis air bersih, terkait dengan masalah sosial yaitu kemiskinan, pengangguran serta masalah ekonomi seperti meningkatnya kebutuhan pangan dan layanan publik.

6) Prevelensi Stunting

Prevalensi stunting yang baik atau ideal menurut WHO adalah kurang dari 20%. Jika prevalensi stunting di suatu wilayah kurang dari 20%, maka wilayah tersebut dianggap memiliki kondisi stunting yang rendah. Kota Lhokseumawe Tahun 2023 prevelensi balita stunting sebesar 20,78 persen, masuk dalam kategori sedang, namun dibandingkan dengan provinsi aceh sebesar 29,40 persen dan Nasional 21,50 persen, Kota Lhokseumawe masih lebih baik, namun nilai prevelensi stunting harun terus diturunkan mencapai kurang dari 20% untuk mencapai nilai prevelensi stunting yang baik dan ideal

7) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehtan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 96.67% atau 182.427 peserta dari jumlah penduduk 188.713 jiwa. Dan terus menurun dari tahun 2023 dan pada tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menurun menjadi 93.28% atau 185.364 peserta dari 198.705 jiwa penduduk.

- 8) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan kurun waktu 2020-2023, namun pada tahun 2024 angka kematian balita meningkat tajam menjadi 8,6 per 1000 kelahiran hidup atau sebanyak 31 kematian balita dari 3.576 jumlah kelahiran.
- 9) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2024, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 0.053 kemudian tahun 2024 sebesar 0,050 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit
- 10) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio dokter sebesar 0.38 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 0.35 di tahun 2021. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 0.43. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.40 dikarenakan ada dokter yang sedang tugas belajar dan beralih ke jabatan struktural. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.40 dokter tidak sampai 1 orang dokter.
- 11) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 3,12 persen dan kemudian di tahun 2024 turun kembali menjadi 3,10 persen.
- 12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk.
Jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang penderita. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus menjadi 4 orang. Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2020-2023, rate-nya berada pada rentang 0–9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga rate non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 menurun menjadi 3.42 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus

yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

13) Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pada kurun waktu 2020-2024, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 0.04% di tahun 2020 hingga 12.5% di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 22 anak dari 1 anak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2024 kembali terjadi peningkatan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 122 anak. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 51.03% dari tahun 2020 sebesar 95.2%, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 83.05%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2024 meningkat menjadi 83.05% dan 145.4%.

15) Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena tuberkulosis sebesar 0.52 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 1 orang. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi tahun 2024 sebesar 9.05 artinya terdapat 18 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk

16) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.001%. Sementara itu,

nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 0,013% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 27 orang.

17) Cakupan Kunjungan Bayi

Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 57.46%, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 dan naik kembali ditahun 2022-2023 menjadi 56,99 persen dan 66,17 persen dan kemudian turun kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 59,06 persen.

18) Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kembali. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe.

19) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas tahun 2020-2024 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu dari 90.1% menjadi 97.5%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahun 2022-2024 cakupan pelayanan nifas mengalami penurunan menjadi 80.30 di tahun 2024. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

20) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 58.5%. Pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2024 cakupan

neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 19.02%.

21) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 87.23%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2024 yaitu 72.57%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%, namun tahun 2024 menurun menjadi 72.57%.

22) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

23) Indeks Pembangunan Keluarga (iBAngga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 66,26 menjadi 65,85 di tahun 2024. Indeks iBangga Kota Lhokseumawe belum mencapai nilai ideal yaitu sebesar 70, masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai nilai ideal tersebut.

24) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 66,34 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,87, peningkatan nilai IPA Kota Lhokseumawe masih belum mencapai nilai IPA ideal sebesar 100, dibutuhkan kerja keras Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

25) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan setiap tahunnya terakhir tahu 2023 sebesar 68,86. IDG Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan IDG Provinsi Aceh sebesar 61,78 namun masih lebih rendah dibandingkan IDG Nasional sebesar 77,62

26) Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan Kota Lhokseumawe dari tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, yaitu 46,45 persen ini artinya ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

27) PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 85,99 persen dari 81,22 persen di tahun 2022.

28) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada tahun 2020-2024, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 47.10% hingga mencapai 51,50% pada tahun 2024, dan kemudian turun pada tahun 2024 menjadi 50,25 %.

29) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu.

Secara Umum penanganan korban kekerasan sudah mencapai 100 persen atau tertangani namun terjadi peningkatan pengaduan kasus kekerasan pada tahun 2024 sebesar 72 kasus dibandingkan tahun 2023 sebanyak 68 kasus.

30) Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Di Kota Lhokseumawe pelatih yang bersertifikat mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 58,3 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 68,9 persen.

2.3.2.4 Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi predikat CC dengan poin 54.79 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67.70 atau predikat B. Capaian yang meningkat ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit

utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi. Dan diharapkan kedepannya IRB Kota Lhokseumawe bisa meningkat predikat BB.

2. Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik. Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69,44 selanjutnya tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 64,37. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat rentan terpapar praktik korupsi.

3. Perencanaan Pembangunan

a) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2020-2024 fluktuatif. Kecenderungan OPD memasukkan banyak program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh karena itu ,dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

4. Keuangan

a) Rasio Pajak terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe masih sangat minim dan berfluktuasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0.71 persen menjadi 0.73 persen di tahun 2024. Namun peningkatan ini masih belum cukup untuk membiayai pembangunan di Kota Lhokseumawe. Pemerintah daerah perlu berupaya untuk mencari potensi pendapatan dari pajak dan retribusi.

b) Masih tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap dana pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Lhokseumawe.

- c) Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah yang diukur berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2022 sebesar 0,086.
 - d) Kemandirian pendanaan masih rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen.
5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- a) Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural untuk tahun 2024 menurun sebesar 7,2 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 17,78 persen. Ini disebabkan karena jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural berkurang ditahun 2024, Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.
 - b) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah berkurang di taun 2024 yaitu 912 orang dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1.749 orang, hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru
 - c) Indeks profesional ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 - 2024 mengalami peningkatan, dengan kategori sedang. Diharapkan dapat ditingkaan indeks profesional ASN dengan predikat sangat tinggi.
6. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, tahun 2024 sebesar 83,82 persen dan tahun 2023 sebesar 88,24. Hal ini disebabkan karena 5 gampong yang belum memiliki kantor dan kantor dalam kondisi rusak pun meningkat.
7. Perpustakaan
- Rasio Perpustakaan per satuan penduduk mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 1,04 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.06.

2.3.2.5 Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan

- 1) Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat penting untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2020-2023 menunjukkan kecenderungan menurun dari 143,20 (tinggi) di tahun 2020 menjadi 124.22 (sedang) di tahun 2023. Pada tahun 2024 IRB Kota Lhokseumawe sedikit meningkat menjadi 136,99 hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Daerah
- 2) Semakin tinggi skor Indek Ketahan Daerah (IKD) semakin baik ketahanan daerah tersebut terhadap bencana. Sebaliknya, semakin rendah skornya, semakin rentan daerah tersebut. Untuk

Kota Lhokseumawe IKD mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar 0,45 menjadi 0,40 ditahun 2024.

- 3) Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 disertai dengan peningkatan jumlah timbulan sampah. Sehingga persentase penanganan sampah yang ditangani menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,58 persen dan tahun 2024 sebesar 99,54 persen.

2.3.2.6 Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal

- 1) Indeks infrastruktur
Kota Lhokseumawe belum mencantumkan nilai indeks infrastruktur.
- 2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sejak tahun 2023 sebesar 62,18 menjadi 55,32 pada tahun 2024, penurunan ini disebabkan pada perubahan variabel data perhitungan yang digunakan. Sedangkan untuk jumlah rumah tidak layak huni untuk tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 20,694 dari 17.219 pada Tahun 2023.
- 3) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki nilai yang terus menurun. Bila dilihat dari data yang disajikan jumlah panjang jalan di Kota Lhokseumawe tidak mengalami penambahan, namun jumlah penduduk terus mengalami penambahan ini yang menyebabkan rasio panjang jalan di Kota Lhokseumawe terus menurun dari tahun 2020-2024. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.
- 4) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat
pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2023 seluruhnya sebesar 0%. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Daerah dan Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak tersedia.
- 5) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)
Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari tahun 2020 stagnan sampai dengan tahun 2021 tetap 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52% dan tahun 2024 menurun Kembali menjadi 64.40%.

6) Daerah Dengan Potensi Genangan Tinggi

Luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di tahun 2020 sebesar 8,00 Ha dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7.00 Ha. Luas potensi genangan terus menurun hingga 4.90 Ha seiring dengan upaya pemeliharaan seperti pelumpuran berkala untuk menghilangkan sedimentasi, pembersihan sampah, penambahan SPAH (saluran pembuangan air hujan), rehabilitasi saluran dengan penambahan volume dan kapasitas saluran drainase serta penanganan titik-titik genangan. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7 Ha. Dan kemudian pada tahun 2024 menjadi 88,5 Ha. Dikarenakan banjir kiriman dari Kabupaten Aceh Utara, kondisi ini harus menjadi perhatian.

7) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 16.70%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku. Persentase Penduduk Berakses Air Minum.

8) Area Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2020-2022 tidak berubah tetap sebesar 78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBD, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Dan pada tahun 2023 dan 2024 luas kawasan berkurang menjadi 42,67 Ha, dan masih perlu penanganan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Pada kurun waktu 2020-2024 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) persatuan luas wilayah HPL di Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan luas lahan RTH dan luas wilayah ber HPL. Namun rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan dari 0,30 persen menjadi 1,19 persen, kemudian dari tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan menjadi 0,15 persen, hal ini dikarenakan luar RTH tidak bertambah tetapi luas wilayah ber HGB terus mengalami penambahan.

- 10) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2024 Capaian indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.
- 11) Energi dan Sumber Daya Mineral
Rasio Ketersediaan daya listrik, mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 1,86 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,05
- 12) Perhubungan
Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 2.107 yang sebelumnya sebesar 3.252 pada tahun 2023.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe diidentifikasi berdasarkan pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 5 tahun mendatang.

2.3.2.1 Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Lhokseumawe dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 5 tahun mendatang (2025-2030), yaitu:

2.3.2.1.1 Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita

Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai berikut :

- a. pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu juga dapat dilakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Memberikan dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran dan pengembangan produk. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah Kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

2.3.2.1.2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial yang bersifat produktif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemberian pelatihan usaha dan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi
- c. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan tingkat pengangguran adalah pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan terhadap nelayan dengan menyediakan akses teknologi perikanan yang modern, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan tenaga kerja siap pakai.
- d. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.2.1.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :

- a. memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan.
- b. Memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.

- c. meningkatkan minat baca, dapat dilakukan dengan pengembangan program promosi literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan terutama di perpustakaan daerah.
- d. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam keterampilan literasi digital, pelatihan keterampilan literasi, membangun budaya baca yang kuat dan berkelanjutan dengan menyediakan pojok-pojok baca di setiap ruang publik.
- e. meningkatkan akses kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan makanan bergizi seimbang, membentuk Dapur Pangan Sehat di setiap gampong dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi balita terutama balita stunting.
- f. Pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan, meningkatkan akses ibu hamil dan anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi dan layanan reproduksi yang komprehensif.
- g. Meningkatkan akses masyarakat ke sanitasi yang layak dan air bersih, serta penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

2.3.2.1.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan upaya untuk mendorong pengelolaan hidup dan persampahan melalui, sebagai berikut :

- a. program kampanye promosi kebersihan lingkungan dan bebas sampah, penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kebersihan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- b. membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui penataan tempat pengolahan sampah, menyediakan armada pengangkut sampah.
- c. Melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.
- d. penguatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko kebencanaan melalui penyusunan dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana.
- e. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan

- persiapan menghadapi bencana. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti pesisir, dan lereng-lereng bukit rawan longsong.
- f. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti pos evakuasi, pos-pos kesehatan, dan jalur evaluasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana, meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir terutama di waktu musim penghujan.
 - g. meningkatkan institusi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, membangun kerjasama dan sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

2.3.2.1.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastuktur yang Berkualitas

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada seluruh masyarakat yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- b. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh.
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

2.3.2.1.6 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dengan cara sebagai berikut :

- a. memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat dan Bappeda untuk memastikan penggunaan sumberdaya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
- b. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.
- c. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan, mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efesiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
- e. mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi.
- f. Dalam meningkatkan ruang kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer, memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.

- g. Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.
- h. Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.
- i. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan perpajakan, dan pengelolaan sumber daya.
- j. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.
- k. optimalisasi riset dan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan regulasi pengembangan riset dan inovasi, kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya riset dan inovasi melalui program pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

2.3.2.1.7 Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- a. meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, diantaranya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).
- b. Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- c. Menggalakkan sosialisasi dan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan budaya Aceh.
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi nilai-nilai Dinul Islam.
- e. Melakukan promosi kekayaan budaya serta melakukan legalisasi situs/cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

Menjelang akhir tahun 2024, ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Inflasi umumnya menurun, meski beberapa negara mencatat kenaikan. Kebijakan moneter di negara maju mulai melonggar, sementara negara berkembang menunjukkan respons beragam sesuai tantangan domestik yang tengah dihadapi. Harga komoditas global mayoritas melemah, kecuali minyak sawit yang naik karena tingginya permintaan dan kekhawatiran terhadap kecukupan pasokan. Pertumbuhan ekonomi global stagnan pada 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025.

Ditengah perlambatan global, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan 5,03 persen hingga triwulan III, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang membaik. Sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi terus tumbuh, sementara pariwisata meningkat signifikan berkat tingginya kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan berbagai acara berskala besar.

Inflasi nasional terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% $\pm$ 1%, dengan tingkat inflasi pada November 2024 sebesar 1,6 persen (yoy), turun dari 2,12 persen pada Agustus 2024. Penurunan ini didorong oleh harga pangan yang melandai akibat melimpahnya pasokan hortikultura selama masa panen serta kebijakan stabilisasi harga.

Berdasarkan proyeksi IMF dalam WEO Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada pada level 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi diakibatkan oleh konflik geopolitik di kawasan regional yang meningkat, yang menyebabkan beberapa negara berkembang mengalami revisi proyeksi pertumbuhan. Selain itu, kebijakan proteksionesme yang meningkat, ketegangan geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, volatilitas pasar keuangan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi beberapa risiko negatif tambahan yang menjadi pertimbangan bagi IMF untuk melakukan revisi.

Revisi ke bawah ini mencerminkan adanya gangguan rantai produksi dan disrupsi distribusi komoditas (terutama minyak), konflik geopolitik, dan perang sipil di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika sub-Sahara. Pada periode yang sama, meningkatnya permintaan global terhadap produk semikonduktor dan elektronik yang didorong oleh investasi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang kuat di negara-negara kawasan Asia.

Secara umum, pertumbuhan di negara-negara maju melambat pada tahun 2023, namun diperkirakan masih stabil di kisaran 1,7% dan 1,8% hingga tahun 2029. Pertumbuhan AS diperkirakan akan melambat, sementara di Inggris dan kawasan Eropa, aktivitas perekonomian diperkirakan akan mulai meningkat. Meski secara

umum ekonomi global cukup stabil, dinamika yang berbeda di setiap negara dan wilayah memerlukan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat terkontaminasi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pencapaian *Gross National Income* per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan *Gross National Income* per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara *Lower Middle Income Countries*. Berbagai upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan *Gross National Income* per kapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Pencapaian pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan berbagai capaian positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan lapangan kerja per tahun, (4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tercatat sebesar 5,03 persen (ctc) menjelang akhir tahun 2024, dengan konsumsi tetap terjaga, serta kinerja investasi dan ekspor menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan ini dicapai di tengah berbagai dinamika yang terjadi di lingkup global, seperti melambatnya ekonomi global, perang dagang, proteksionisme, konflik geopolitik, dan volatilitas harga komoditas.

Dari sisi produksi, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) masih berada pada zona ekspansi, produksi semen tumbuh 6,22 persen, dan konsumsi listrik rumah tangga dan industri, masing-masing tumbuh 6,09 persen dan 4,54 persen. Kebijakan pemerintah dilakukan melalui pengendalian harga, terutama *volatile food*. Dari sisi moneter, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan ke level 6,0 persen pada September 2024, sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, perekonomian Indonesia masih konsisten tumbuh di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga mampu memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat bagi target pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya belanja untuk sektor restoran dan hotel, yang didukung oleh peningkatan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) dan aktivitas di sektor pariwisata. Selain itu, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh signifikan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Perbaikan mobilitas ini tercermin dari kenaikan jumlah penumpang angkutan rel, laut, udara, serta peningkatan penjualan sepeda motor. Selain itu, kinerja konsumsi juga terlihat pada Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), yang tumbuh sebesar 11,69 persen (yoy), naik signifikan dari 6,18 persen pada triwulan yang sama tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh kegiatan persiapan berbagai kegiatan besar seperti Pilkada dan PON XXI.

Konsumsi pemerintah menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 4,62 persen (yoy). Capaian tersebut membaik dibandingkan dengan kontraksi 3,93 persen (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan optimalisasi APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi di tengah guncangan global. Peningkatan realisasi Belanja Negara juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat, terutama sebagai *shock absorber* dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Aktivitas investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto, PMTB) terus menunjukkan peningkatan. PMTB tercatat tumbuh positif hingga 5,15 persen (yoy). Dorongan pertumbuhan ini utamanya berasal dari pembangunan proyek infrastruktur oleh Pemerintah dan Swasta, termasuk kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan aktivitas konstruksi lainnya. Investasi juga didukung oleh belanja modal dan impor barang modal seperti mesin dan peralatan.

Kinerja ekspor menunjukkan tren positif pada triwulan III 2024. Pertumbuhan ekspor tercatat sebesar 9,09 persen (yoy), membaik signifikan dibandingkan kontraksi 3,91 persen (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh ekspor Barang Nonmigas yang tumbuh 9,04 persen (yoy), serta didorong oleh peningkatan permintaan untuk komoditas seperti bahan mineral, mesin, dan kendaraan. Namun, ekspor barang Migas mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Sementara itu, ekspor barang jasa naik tinggi sebesar 17,55 persen (yoy), yang didukung oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Impor barang dan jasa ditopang utamanya oleh bahan baku dan penolong. Impor tercatat tumbuh sebesar 11,47 persen (yoy), meningkat dibandingkan kontraksi 6,75 persen (yoy) pada triwulan III tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh impor barang nonmigas yang tumbuh sebesar 14,85 persen (yoy), terutama untuk bahan baku yang mendukung aktivitas sektor manufaktur. Di sisi lain, impor barang migas mengalami kontraksi sebesar 0,75 persen. Sementara itu, impor jasa tumbuh 6,26 persen (yoy), yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri.

Dari sisi produksi, lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan menunjukkan kinerja yang positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi sektor transportasi dan pergudangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Selanjutnya sektor akomodasi makanan dan minuman tumbuh didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kegiatan MICF maupun even berskala nasional dan internasional, seperti moto GP Mandalika, PON XXI, dan *International Sustainability Forum*.

Industri pengolahan tumbuh 4,72 persen didukung oleh industri makanan minuman yang tumbuh 5,82 persen, seiring meningkatnya permintaan domestik atas produk makanan dan peningkatan ekspor produk minuman. Sub industri logam dasar tumbuh 12,36 persen, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. Begitu juga pada sub industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29 persen didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik. Sedangkan pada sub industri batu bara dan pengilangan migas tumbuh sebesar 3,41 persen didukung oleh peningkatan produksi kilang LNG Tangguh dan kenaikan permintaan domestik.

Sektor utama lainnya, yaitu sektor perdagangan tumbuh sebesar 4,82 persen tumbuh kuat dan stabil seperti triwulan sebelumnya sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih kuat dan peningkatan suplai barang domestik dan barang impor. Perkembangan ini tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan peningkatan nilai transaksi dengan kartu kredit sebesar 5,49 persen dan nilai transaksi belanja uang elektronik sebesar 37 persen. Pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,04 persen dan pertumbuhan subsektor perdagangan mobil sepeda motor tercatat sebesar 5,34 persen.

Kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh positif hingga triwulan III 2024 sebesar 1,69 persen (yoy). Subsektor tanaman pangan tumbuh sebesar 4,48 persen dan kinerja subsektor tanaman perkebunan masih berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 0,47 persen atau termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,17 persen. Disisi lain, sektor pertambangan tumbuh 3,46 persen sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,17 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan produksi tembaga PT Freeport Indonesia yang naik 0,69 persen. Fenomena lainnya adalah peningkatan ekspor beberapa komoditas tambang, seperti gas alam yang naik 185,52 persen, batubara dan lignit yang naik 11,46 persen dan pasir alam naik 21,0 persen.

Sektor terkait pariwisata tetap tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat terutama di periode libur yang lebih

panjang. Peningkatan kinerja sektor terkait pariwisata di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman secara kumulatif dari Januari hingga September 2024, yang mencapai 10,37 juta kunjungan, naik 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 8,64 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,33 persen. Fenomena yang terjadi berupa peningkatan jumlah penumpang terjadi pada semua moda angkutan, peningkatan jumlah penumpang angkutan darat, dan peningkatan volume pengiriman barang ekspor dan impor. Peningkatan kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional di berbagai daerah, seperti Moto GP Mandalika, PON XXI, Jember Fashion Carnaval, *International Sustainability Forum*, pertandingan olahraga, dan konser musik lainnya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua. Sumber pertumbuhan utama pulau Maluku-Papua didorong oleh industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Situasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan hilirasasi mineral yang diterapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat sebesar 5,20 persen (yoy). Hal ini terkait dengan peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan. Sementara itu, wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mengalami pertumbuhan yang relatif moderat sebesar 4,92 persen. Aktivitas sektor manufaktur dan sektor jasa merupakan penopang pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mampu tumbuh sebesar 5,28 persen ditopang oleh meningkatnya aktivitas pariwisata yang menopang sektor Akomodasi & makan minum. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra dalam beberapa tahun terakhir tercatat berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional dengan sumber pertumbuhan berasal dari provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap berdaya tahan. Optimisme ini didukung oleh langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial (Perlinsos), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta mewujudkan agenda pembangunan. Pemerintah akan terus memperkuat program Perlinsos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, subsidi, dan kompensasi. Selain itu, peningkatan kapasitas UMKM akan dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif pajak. Dalam hal stabilitas harga, pemerintah akan melanjutkan upaya stabilisasi pangan melalui program Stabilisasi Harga Pangan (SPHP).

Transformasi ekonomi akan terus diupayakan, termasuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat proses hilirisasi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perbaikan iklim investasi juga menjadi fokus utama. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah diamanatkan bahwa RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah dirumsukan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan RPJPN Tahun 2025-2045, dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak azasri manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah dirumuskan kerangka ekonomi makro dengan sasaran pertumbuhan tinggi berkelanjutan; penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut. GNP diharapkan meningkat menjadi USD.8.000 pada tahun 2029.

Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif. Disamping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pemerintah mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. RKP Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2026 pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan nasional yaitu: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) PDRB per Kapita (juta); 3) Kontribusi PDRB Provinsi; 4) Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6) Indeks Rasio Gini; 7) Indeks Modal Manusia; 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional. Adapun program hasil terbaik cepat tersebut adalah:

1. Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

3.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Perekonomian Aceh tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen (c-to-c). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Aceh (BRS edisi Februari 2025) dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan mengalami pertumbuhan sebesar 22,04 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,13 persen.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Aceh yang dirilis oleh KPw Bank Indonesia Provinsi Aceh (edisi Februari 2025) bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan Iv 2024 tumbuh sebesar 4,15 persen (yoy), tetap kuat kendati melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh sebesar 4,60 persen (yoy), maupun nasional sebesar 4,95 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, kuatnya perekonomian Aceh ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan eksternal. Lebih tingginya aktivitas domestik tercermin dari peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Lebih lanjut, kinerja ekspor luar negeri terakselerasi seiring meningkatnya permintaan komoditas ekspor (batu bara dan kopi).

Pertumbuhan ekonomi Aceh lebih tinggi tertahan oleh berlalunya penyelenggaraan PON, yang terindikasi oleh penurunan pada LU yang terkait penyelenggaraan PON antara lain Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman. Selain itu, LU

Konstruksi juga mengalami penurunan seiring dengan selesainya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi permintaan, faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan berasal dari menurunnya pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), lebih rendahnya pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan lebih tingginya impor. Menurunnya konsumsi LNPRT seiring berlalunya masa kampanye Pilkada. Sedangkan rendahnya pertumbuhan PMTB seiring dengan selesainya berbagai PSN di Aceh. Sementara itu, masih tingginya ketergantungan Aceh terhadap komoditas dari luar daerah menjadi pendorong meningkatnya impor pada triwulan IV 2024. Komponen permintaan lainnya masih menunjukkan kinerja positif terutama ekspor didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas batubara berkalori rendah dari negara mitra dagang.

Dari sisi Lapangan Usaha, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama bersumber dari menurunnya kinerja LU yang terkait penyelenggaraan PON seperti LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makmin. Selain itu, LU Konstruksi juga mengalami penurunan seiring sudah selesainya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun demikian, terdapat beberapa LU yang masih menunjukkan kinerja yang membaik didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 yaitu LU Transportasi dan Pergudangan dan LU Administrasi Pemerintah. Disamping itu, LU Pertambangan tumbuh meningkat seiring meningkatnya permintaan ekspor batubara terutama dari India.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, arah kebijakan pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2026 secara mendasar mengusung tema *“Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja”*.

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 arah kebijakan yang dapat diupayakan, yaitu:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja melalui sinergitas program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga, Badan Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan *good agriculture practies*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilai, pala dan karet;

3. Mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah dan ekonomi pesantren;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan dan optimalisasi potensi sektor hulu yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplayer effect* yang besar;
6. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang bersaing;
8. Perlunya kolaborasi peran pemerintah dan stakeholder dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2026, hasil evaluasi capaian indikator makro Aceh tahun 2024, target indikator makro Aceh dalam RPJPA Tahun 2025-2045, maka target ekonomi makro Aceh tahun 2026 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,1 persen; Tingkat Kemiskinan 10-12 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,12-5,47 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia 75,50-76,50; dan Gini Rasio 0,280-0,290.

3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe

Perekonomian Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mencapai 4,46 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,21 persen. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global serta tekanan inflasi yang masih terus berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang krusial.

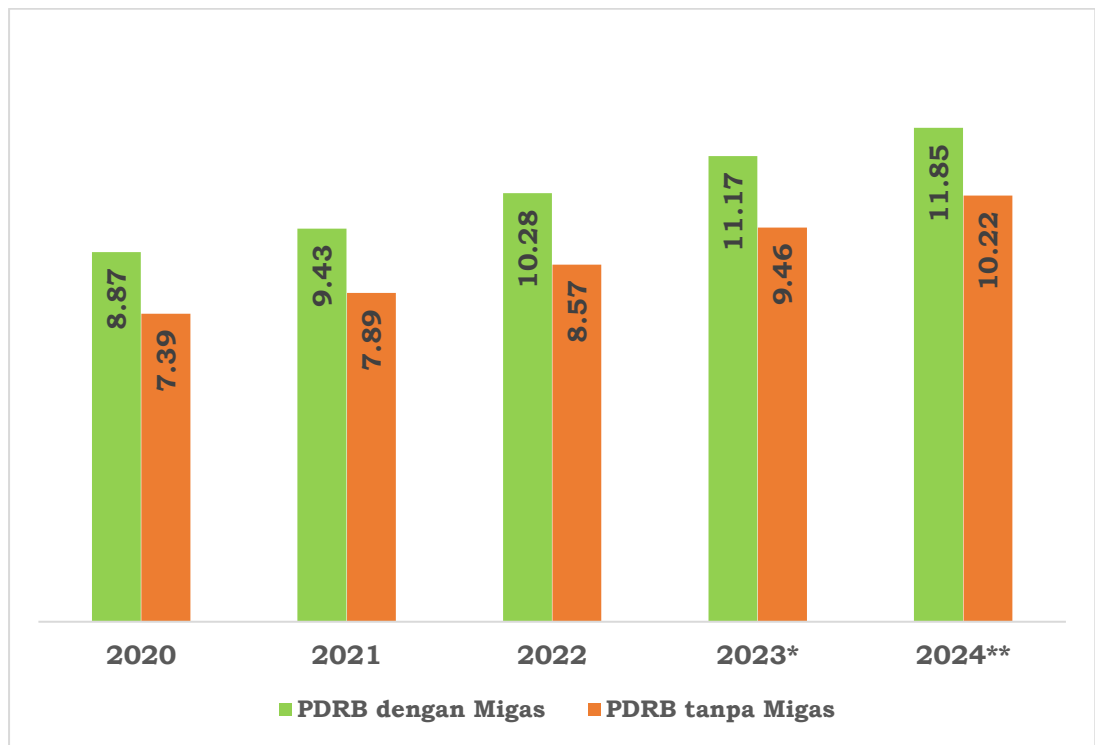
Berdasarkan Lapangan Usaha struktur perekonomian Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 23,24 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 16,70 persen, lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 12,96 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 12,41 persen.

Dari sisi aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas

Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2020, PDRB meningkat sebesar 2,98 triliun rupiah dari 8,87 triliun menjadi 11,85 triliun rupiah pada tahun 2024.

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,57 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2024 mencapai 10,22 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,76 triliun rupiah dari tahun 2023. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 2,84 triliun rupiah.

Gambar 3.1
PDRB ADHB Lhokseumawe Tahun 2020-2024
(triliun rupiah)



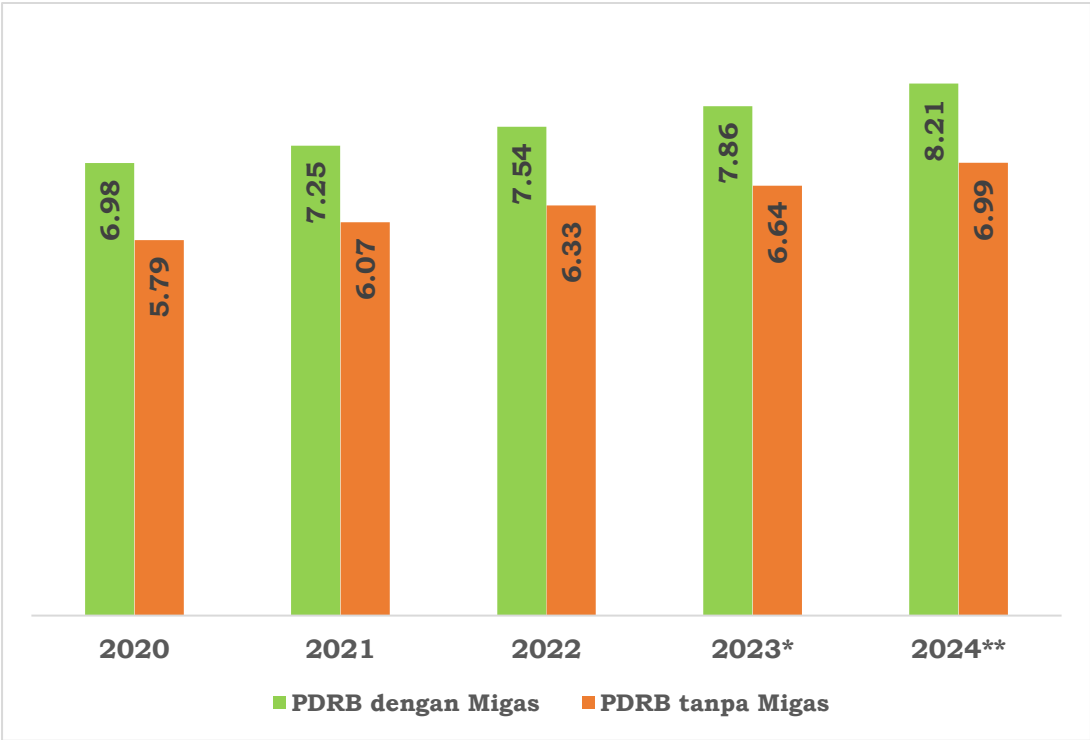
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe tahun 2024 mencapai 8,21 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1,23 triliun rupiah dari tahun 2020. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,19 triliun rupiah dari sebesar 5,79 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 6,99 triliun rupiah pada tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

Gambar 3.2
PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024
(triliun rupiah)



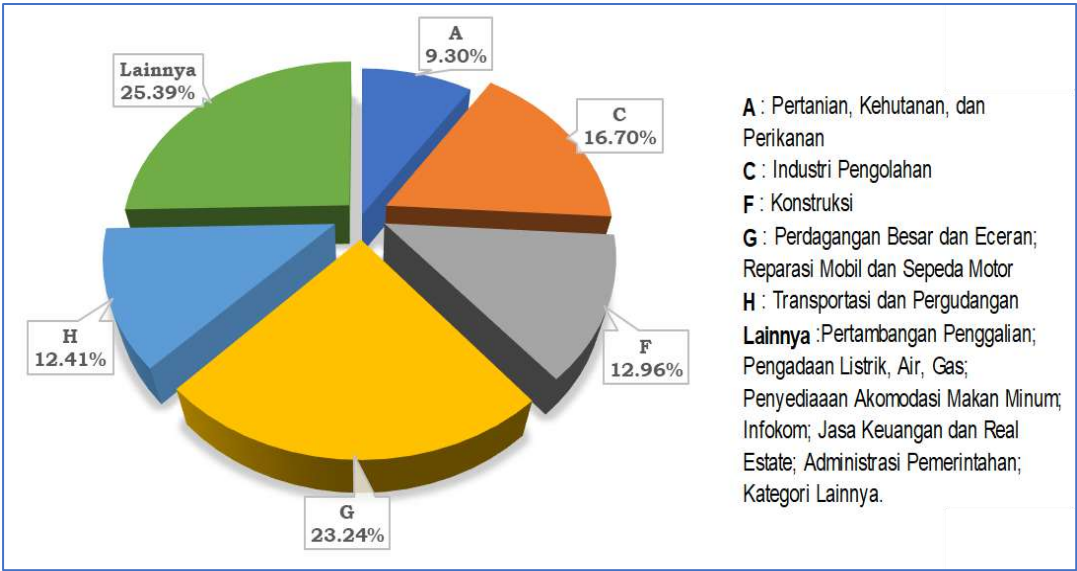
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2020, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini pada tahun 2020 sebesar 21,31 persen menjadi 23,24 persen pada Tahun 2024, mengalami peningkatan nilai peranan sebesar 1,93 persen.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2024 adalah industri pengolahan sebesar 16,70 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada Tahun 2024 dengan peranan sebesar 12,96 persen.

Kategori berikutnya yang cukup besar memberi kontribusi di tahun 2024 adalah kategori konstruksi; kategori transportasi dan pergudangan; serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi kategori konstruksi sebesar 12,96 persen; kategori transportasi dan pergudangan sebesar 12,41 persen dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 9,30 persen.

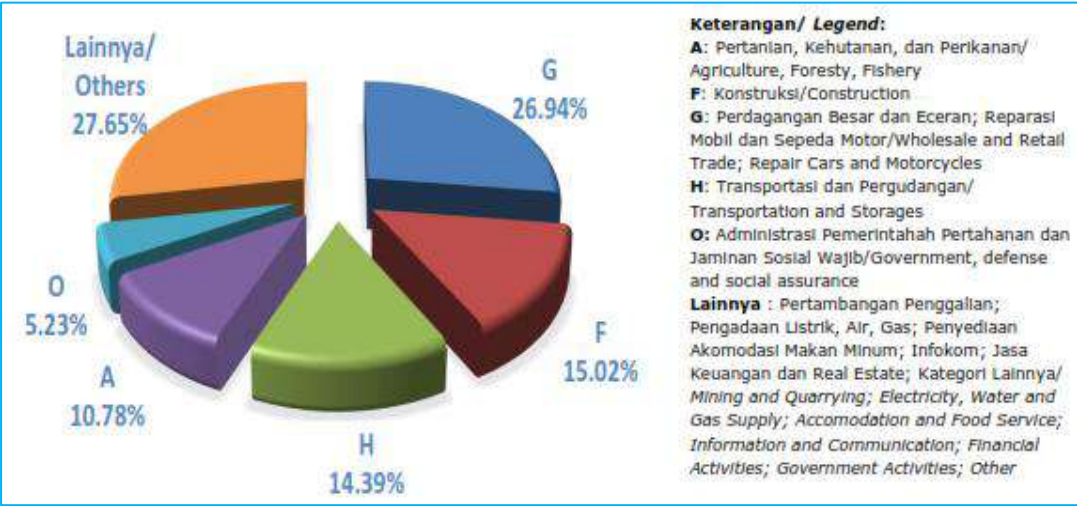
Gambar 3.3
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
dengan Migas Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihatlah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Gambar 3.4
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
Tanpa Migas Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

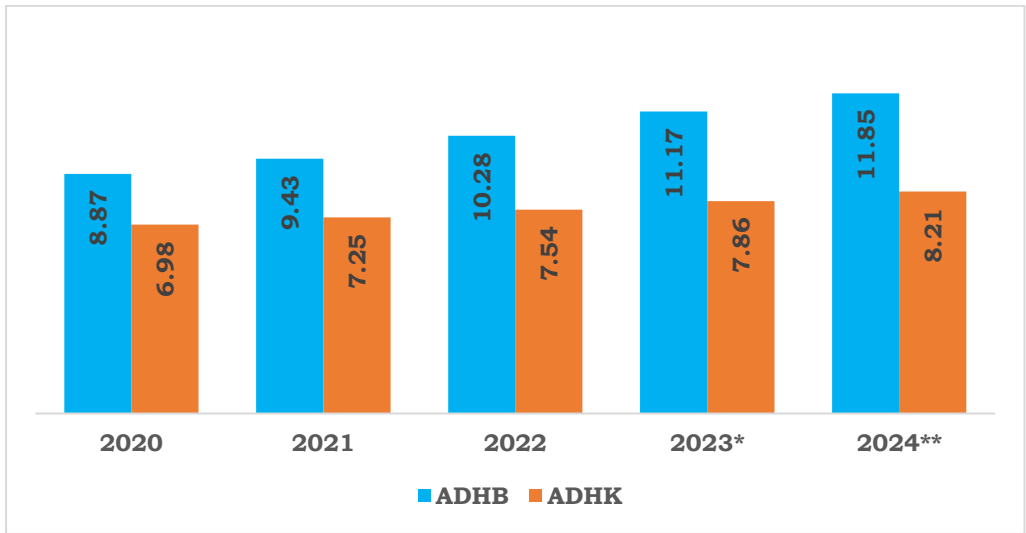
Pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi mencapai 26,94 persen, lalu kategori konstruksi mencapai 15,02 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 14,39 persen. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 10,78 persen, dan kategori pemerintahan mencapai 5,23 persen.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia Kpw Lhokseumawe, terdapat beberapa Komoditi/Produk/Jasa Unggulan

(KPJU) yang berpotensi didorong untuk berkembang di Kota Lhokseumawe seperti toko sembako, jasa fotokopi, warung makan hingga wisata pantai dan kafe. Namun demikian masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi agar pengembangan KPJU tersebut dapat semakin terakselerasi. Disamping itu juga Kota Lhokseumawe memiliki potensi kuat dalam pengembangan sektor unggulan utama. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu penguatan investasi dan modal kerja untuk hilirisasi komoditas; penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan kebijakan; penguatan klaster agroindustri yang didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur; penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan maupun sistem logistik; fasilitasi pendampingan usaha; mendorong digitalisasi bagi UMKM; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani; pelaksanaan dan peningkatan layanan sertifikasi produk hasil usaha; dan percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas UMKM dalam adopsi teknologi.

Dari sisi pengeluaran perkembangan nilai PDRB ADHB dengan migas selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai PDRB sebesar 11,8 triliun rupiah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan nilai PDRB sebesar 11,17 triliun rupiah. PDRB ADHB dari tahun 2020-2024 meningkat sebesar 2,98 triliun rupiah dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,52 triliun rupiah.

Gambar 3.5
PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas
Tahun 2020-2024 (triliun rupiah)



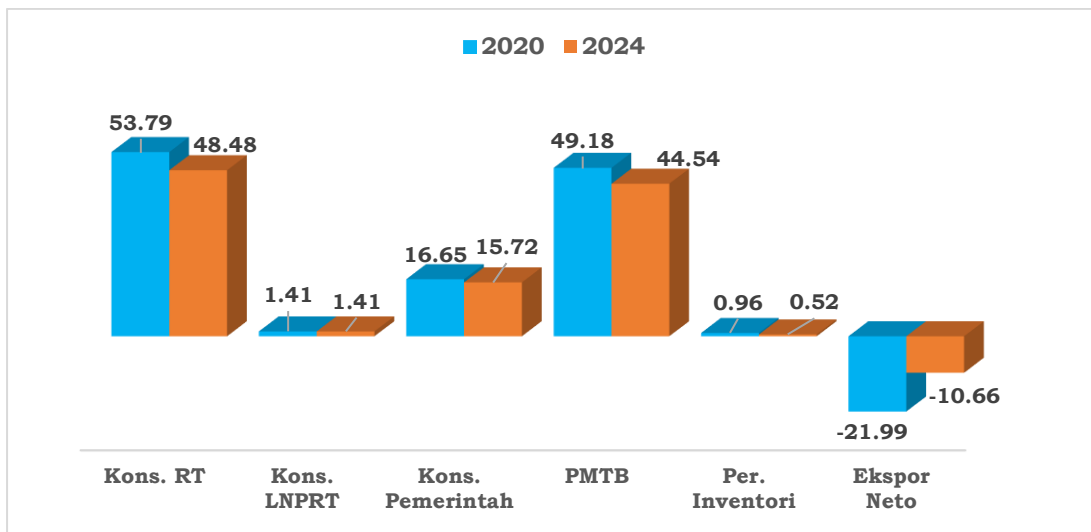
Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) dengan migas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024, nilai PDRB sebesar 8,21 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan nilai PDRB sebesar 7,86 triliun rupiah, dan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,38 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHK terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai PDRB sebesar 6,96 triliun rupiah. Kecilnya PDRB pada tahun 2020 merupakan salah satu

dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara.

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2020 dan 2024 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 53,78 persen dan 48,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan distribusi terbesar kedua yaitu sebesar 49,18 persen pada tahun 2020 dan 44,53 persen pada tahun 2024. Nilai PMTB menunjukkan penambahan barang modal di suatu wilayah dalam rangka peningkatan produktivitas.

Gambar 3.6
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Tahun 2020 dan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Lhokseumawe. Nilai PDRB ADHB komponen konsumsi rumah tangga tahun 2024 sebesar 5,74 triliun rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan nilai PDRB ADHB sebesar 5,44 triliun rupiah.

Selanjutnya nilai komponen PMTB ADHB tahun 2024 sebesar 5,27 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan nilainya sebesar 4,36 triliun rupiah. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

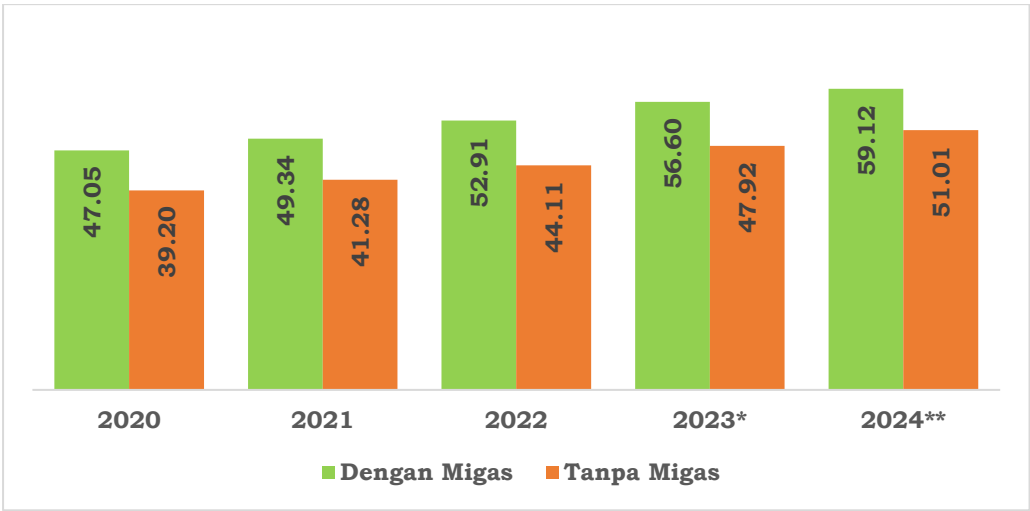
3.1.3.1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

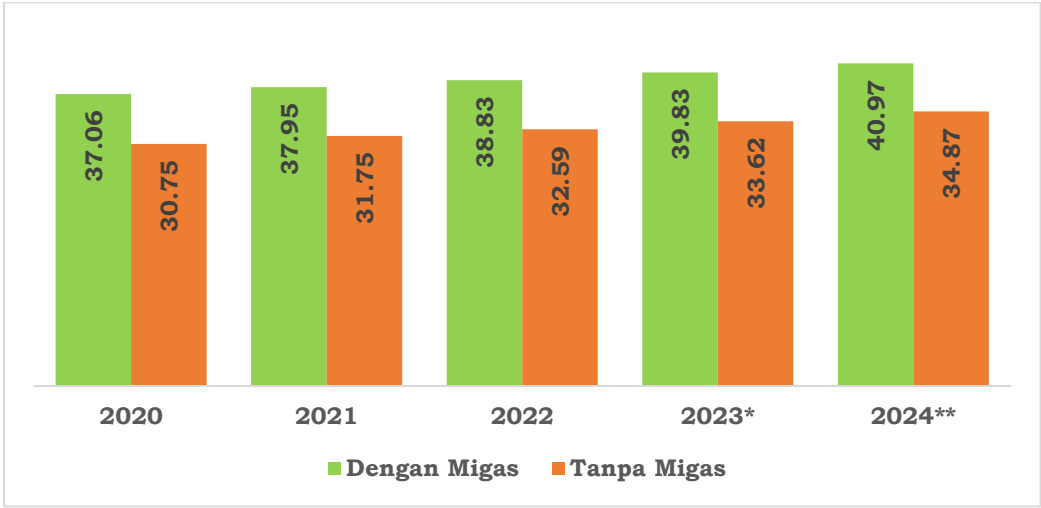
Selama lima tahun terakhir (2020-2024) PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Lhokseumawe sebesar 59,12 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 2,52 juta rupiah dari tahun 2023. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas tahun 2024 adalah sebesar 51,01 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,09 juta rupiah dari tahun 2023.

Gambar 3.7
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2020-2024
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Gambar 3.8
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2020-2024
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

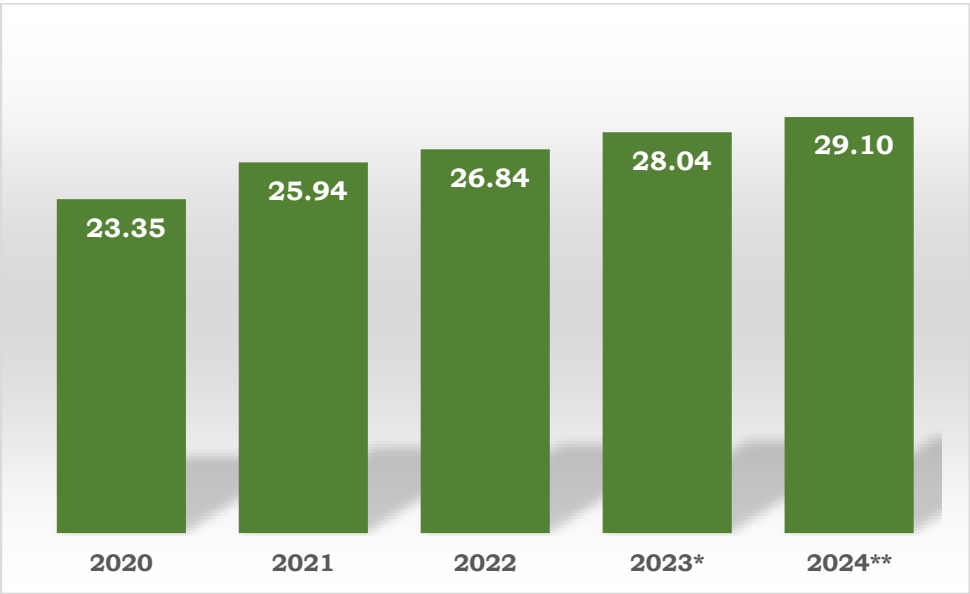
Di sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB per kapita Lhokseumawe juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK dengan migas adalah sebesar 40,97 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,14 juta rupiah dari tahun 2023. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK tanpa

migas pada tahun 2024 adalah sebesar 34,87 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,25 juta rupiah dari tahun 2023.

Di sisi pengeluaran, nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe selama kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2023.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita meningkat sebesar 5,75 juta rupiah selama kurun waktu 5 tahun, dari 23,35 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 29,10 juta rupiah di tahun 2024. Konsumsi rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 6,87 juta rupiah dalam lima tahun.

Gambar 3.9
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



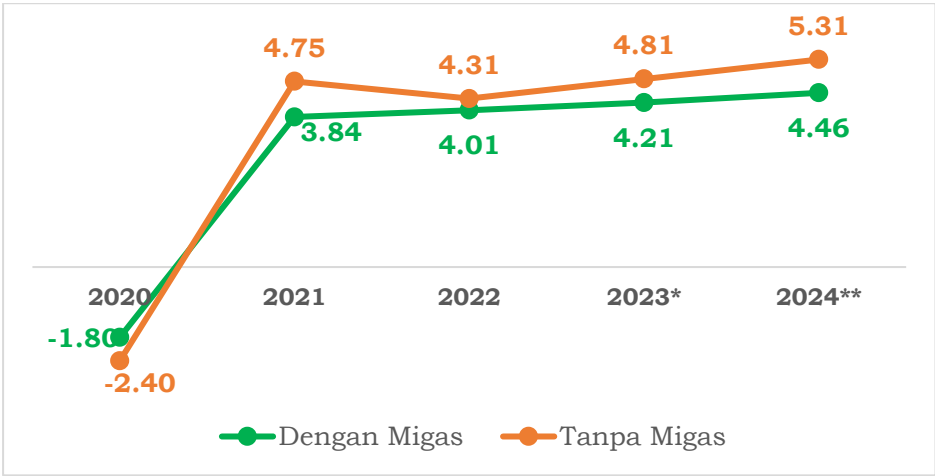
Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

3.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tumbuh minus sebesar 1,80 persen yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,46 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas tahun 2024 tumbuh sebesar 5,31 persen.

Gambar 3.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2020-2024 (persen)

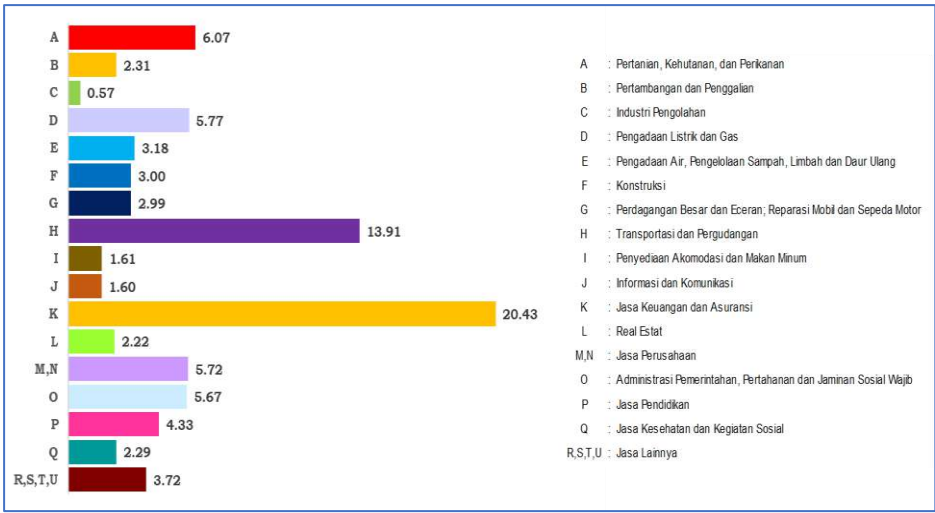


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,94 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan tanpa migas 3,36 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas sebesar 4,46 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,21 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,31 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,81 persen.

Pada tahun 2024 kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi (K) tumbuh sebesar 20,43 persen dan kategori yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah industri pengolahan (C) yang tumbuh sebesar 0,57 persen.

Gambar 3.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen)



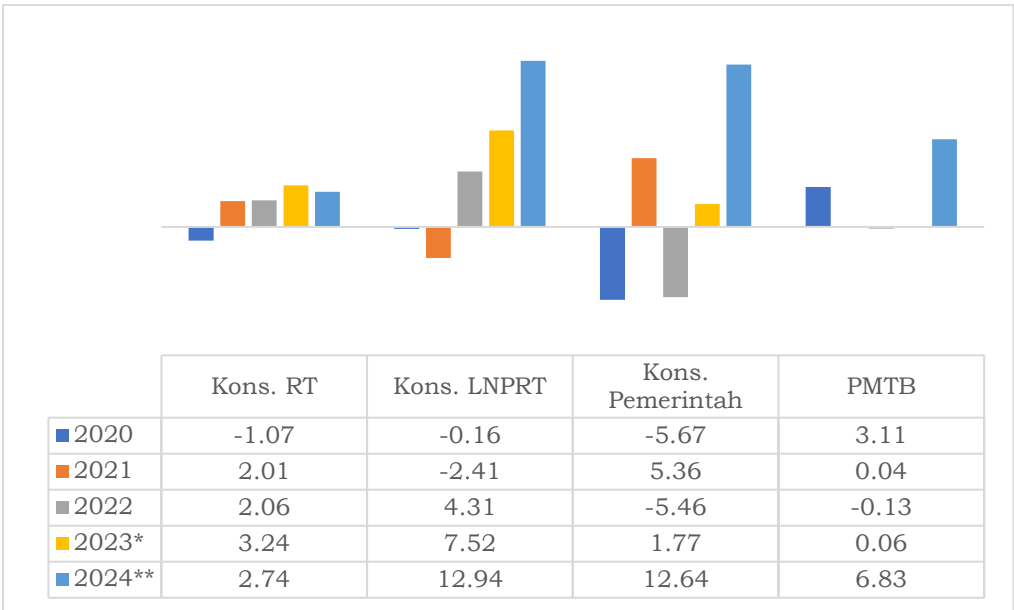
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Jika dilihat lebih rinci tahun 2024, pertumbuhan ekonomi per kategori mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan terbesar

adalah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (K) sebesar 20,43 persen, dan kategori Transportasi dan Pergudangan (H) sebesar 13,91 persen. Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) sebesar 6,07 persen; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,77 persen; serta kategori Jasa Perusahaan (M,N) dan kategori Administrasi Pemerintahan (O) masing-masing tumbuh sebesar 5,72 persen dan 5,67 persen.

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan masing-masing komponen PDRB ADHK tumbuh berfluktuasi selama tahun 2020-2024, komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2024 tumbuh sebesar 2,74 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,24 persen. Komponen Konsumsi LNPRT pada tahun 2024 tumbuh sebesar 12,94 persen mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 7,52 persen. Komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 tumbuh sebesar 12,64 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 1,77 persen. Komponen PMTB pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6,83 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 0,06 persen.

Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK
Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe masih berada dibawah Aceh dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2024 sebesar 4,66 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi pada berbagai sektor atau lapangan usaha untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan, serta terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

3.1.3.3. Laju Inflasi

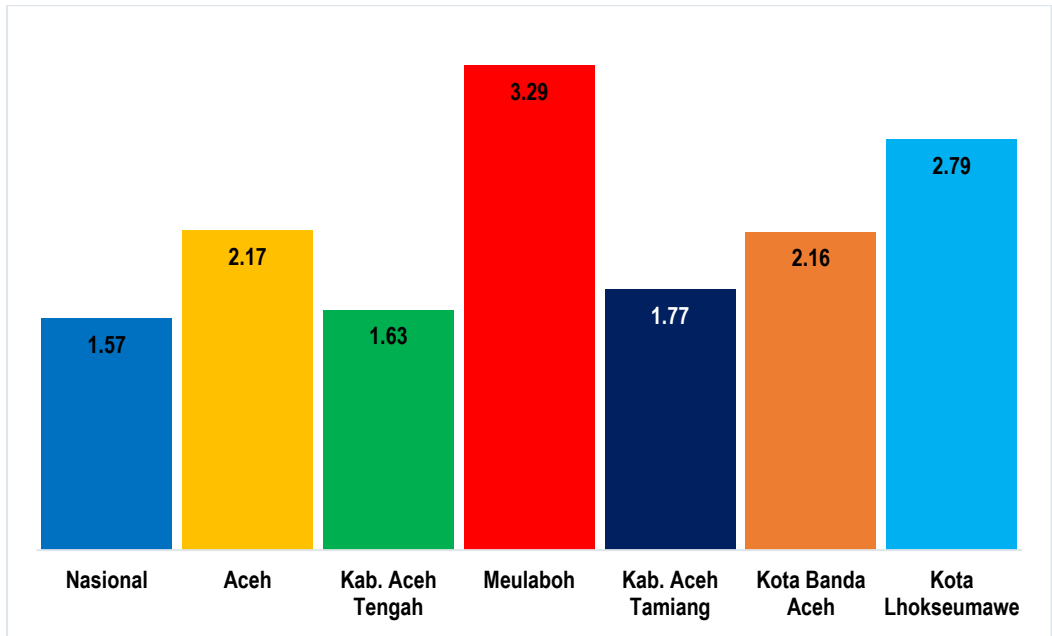
Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Pengendalian inflasi menjadi hal penting dalam upaya memberikan pondasi yang kuat pada perkembangan perekonomian. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Anggaran pemerintah terus berperan meredam sebagian dampak inflasi akibat gejolak harga global serta fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjadi dan mengawasi kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif untuk menekan ekspektasi inflasi.

Selama tahun 2024 di Kota Lhokseumawe terjadi inflasi *year-on-year* (yoy) sebesar 2,79 persen. Inflasi tahun 2024 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 103,40 pada bulan Desember 2023 menjadi 106,29 pada bulan Desember 2024. Dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2024, sebanyak 10 bulan Kota Lhokseumawe mengalami inflasi *m-to-m* dan 2 bulan mengalami deflasi bulan ke bulan (*m-to-m*). Inflasi *m-to-m* tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 0,97 persen dan terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,04 persen. Untuk inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 3,31 persen.

Jika ditinjau inflasi pada 5 kabupaten/kota di Aceh pada 2024, seluruhnya mengalami inflasi *year to year*. Inflasi tertinggi terjadi di Meulaboh sebesar 3,29 persen dengan IHK sebesar 108,63 dan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 1,63 persen dengan IHK sebesar 108,18.

Gambar 3.13
Inflasi Nasional, Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota
di Aceh Tahun 2024 (persen)



Sumber: <https://aceh.bps.go.id/id>

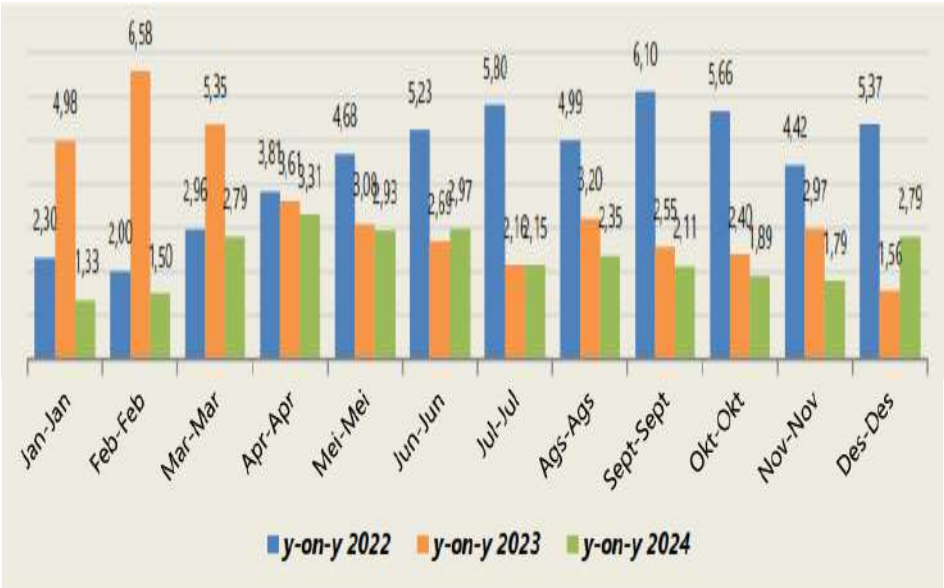
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran. Selama tahun 2024, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi tertinggi secara *y-o-y* yaitu sebesar 1,79 persen. Sementara itu andil kedua tertinggi berasal dari kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran yaitu sebesar 0,28 persen dengan inflasi *y-o-y* sebesar 2,06 persen. Terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi *y-o-y* pada bulan Desember 2024, yaitu kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 0,17 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,32 persen.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi pada tahun 2024 antara lain, udang basah dengan andil 0,34 persen, daging ayam ras dengan andail 0,30 persen, diikuti oleh komoditas rumah dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,29 persen. Komoditas yang menjadi penahan laju inflasi antara lain cabai merah dengan andil 0,25 persen, kemudian telepon seluler dan bensin masing-masing dengan andil 0,80 persen, kemudian beras dengan andil sebesar 0,07 persen.

Komoditas yang paling sering memberikan andil bulanan inflasi/deflasi (*m-t-m*) yaitu ikan tuna tercatat menjadi andil sebanyak 10 kali, udang basah sebanyak 9 bulan, cabai merah sebanyak 8 bulan, ikan dencis, daging ayam ras, dan bawang merah masing-masing tercatat sebanyak 7 kali sepanjang tahun 2024.

Pada Desember 2024, tingkat inflasi *y-o-y* Kota Lhokseumawe sebesar 2,79 persen. Tingkat inflasi *y-o-y* untuk Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 1,56 persen dan 5,37 persen. Tingkat inflasi *y-t-d* Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 1,56 persen dan 5,37 persen.

Gambar 3.14
Tingkat Inflasi Year on Year Lhokseumawe Bulan Desember 2022-2024 (persen)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Gambar 3.15
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kota Lhokseumawe, Desember 2024



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran. Namun demikian, beberapa risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai utamanya fluktuasi harga komoditas global maupun fenomena El Nino yang mendorong panen mundur. Beberapa strategi kebijakan dalam hal pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter *pro-stability* dan kebijakan lain yang *pro-growth*; serta optimalisasi anggaran baik APBN maupun APBD sebagai *shock absorber*. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali yaitu:

- Keterjangkauan harga: peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); dan Bantuan pangan dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
- Ketersediaan pasokan: penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); akses pembiayaan KUR dan kredit alsintan; serta penyediaan pupuk bersubsidi.
- Kelancaran distribusi: perluasan Kerjasama Antardaerah (KAD).
- Komunikasi efektif: pemantauan dan penyediaan data harga serta pasokan yang tepat waktu dan akuntabel; komunikasi upaya pengendalian inflasi termasuk pembinaan dari Kemendagri melalui Rakor Mingguan.

Selanjutnya langkah strategis untuk menjaga konsistensi inflasi dalam kisaran target nasional yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
3. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirasasi pangan;
5. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
6. Memperkuat sinergi TPID-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
7. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

3.1.3.4. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Perkembangan gini ratio Kota Lhokseumawe selama periode lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka gini ratio Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 0,326. Masih berada di atas angka gini ratio Aceh yang sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Lhokseumawe masih termasuk dalam “kategori rendah” karena berada pada $< 0,4$. Pada tahun 2022 gini ratio Kota Lhokseumawe sebesar 0,348, turun pada

tahun 2023 menjadi 0,296. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 gini ratio Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2023.

3.1.3.5. Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masih menjadi topik pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Aceh tak terkecuali di Lhokseumawe. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas yang disepakati dalam SGD.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Aceh (Perkotaan+Perdesaan) untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2024 sebesar Rp.661.227,-, meningkat dari tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp.627.534,-. Garis kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar Rp.522.671,-. Masih berada di bawah rata-rata garis kemiskinan Aceh.

Selanjutnya jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 (September) di Aceh berjumlah 718,96 ribu orang atau sebesar 12,64 persen. Angka ini turun dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 804,53 ribu orang atau sebesar 14,23 persen. Di Kota Lhokseumawe jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 berjumlah 22,77 ribu orang atau mencapai 10,44 persen. Angka ini menjadikan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga penduduk miskin terendah setelah Kota Langsa sebesar 10,33 persen dan Kota Banda Aceh sebesar 6,95. Walaupun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata kemiskinan Aceh (12,64 persen), namun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas kemiskinan nasional yang hanya sebesar 8,57 persen.

Dari sisi kemiskinan ekstrem, berdasarkan Data P3KE Tahun 2024 yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah penduduk yang masuk dalam Data P3KE sebanyak menurun menjadi 70.457 jiwa pada triwulan II-2024, dimana sebelumnya jumlah penduduk yang masuk dalam Data P3KE sebanyak 82.743 jiwa. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui belanja APBDK, intervensi langsung bersama pemangku kepentingan terkait dalam memverifikasi data miskin ekstrem tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya:

- a. Program Keluarga Harapan diprioritaskan di wilayah kantong kemiskinan;
- b. Mengupayakan pertumbuhan inklusif;
- c. Memfaatkan program kesehatan untuk memecahkan masalah lokal;

- d. Memanfaatkan program Pendidikan Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- f. Meningkatkan efektivitas dana desa;
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

3.1.3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda nasional transformasi ekonomi memberikan dampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka nasional mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dari 5,32 persen di tahun 2023 menjadi 4,91 persen. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen point dibanding Agustus 2023.

Di Aceh komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2.508 ribu orang penduduk bekerja dan 153 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 57 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 61 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 4 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 65,11 persen, naik 0,34 persen point dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara.

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenis kelamin di Aceh pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,71 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,43 persen. TPT laki-laki naik dan TPT perempuan turun dibanding Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,07 persen point dan 0,88 persen point.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2019 hingga tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar 11,01 persen; 11,99 persen; dan 11,16 persen. Pada tahun 2022 TPT di Kota Lhokseumawe turun menjadi 9,15 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 8,47 persen, akan tetapi penurunan tersebut masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan, pemerintah dapat berupaya untuk mendorong kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; memberikan bantuan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha; termasuk gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan guna memperkuat produk-produk

usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan sinkronisasi program kewirausahaan.

Berdasarkan uraian kondisi dan arah kebijakan ekonomi baik Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe secara umum dapat digambarkan capaian indikator makro selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024

No	Indikator Makro	2020	2021	2022	2023	2024
1 Indeks Pembangunan Manusia						
	Lhokseumawe	78.65	78.92	79.38	80.26	80.89
	Aceh	73.29	73.48	74.11	74.7	75.36
	Nasional	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02
2 Pertumbuhan Ekonomi						
	Lhokseumawe	-1.45%	3.84%	4.01%	4.21%	4.46%
	Aceh	-0.37%	2.79%	4.21%	4.23%	4.66%
	Nasional	-2.07%	3.70%	5.31%	5.04%	5.02%
3 Tingkat Kemiskinan						
	Lhokseumawe	10.80%	11.16%	10.84%	10.73%	10.44%
	Aceh	15.43%	15.53%	14.75%	14.45%	12.64%
	Nasional	10.19%	9.71%	9.57%	9.36%	8.57%
4 Tingkat Pengangguran						
	Lhokseumawe	11.99%	11.16%	9.15%	8.78%	8.47%
	Aceh	15.43%	15.53%	14.75%	14.45%	12.64%
	Nasional	10.19%	9.71%	9.57%	9.36%	8.57%

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.3.7. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi Aceh, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 yaitu Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut telah ditetapkan indikator makro ekonomi baik secara nasional, Aceh, dan Kota Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Makro Ekonomi Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2024	RKPK 2025	Target	
					P-RKPK 2025	RKPK 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80.89	81.65-83.65	81.65-82,00	81,95-82,30

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2024	RKPK 2025	Target	
					P-RKPK 2025	RKPK 2026
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.40-4.50	4.40-4.50	4.53-4.80
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta	59.12	59.08	62.38	65.48
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	4.87	-	4.92	4.94
5	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	10.33-10.13	10.33-10.13	9.00-9.81
6	Tingkat Pengangguran	%	8.47	7.98-7.48	7.98-7.48	7.75-7.85
7	Indeks Gini	Nilai	0.326	0.293	0.293	0.295-0.322
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69.40	65.80	70.00	73.35-73.85

Sumber : BPS, Ranc. RKP 2026, Kesepakatan Rakortekrenbangnas 2025.

Dalam rangka pencapaian target perekonomian tahun 2026, maka secara garis besar kerangka Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dengan mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan berstandarisasi, serta menyediakan lokasi bagi UMKM untuk memasarkan produk melalui *event Ahad Festival* setiap minggu;
2. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada warga miskin;
3. Menjaga keseimbangan inflasi melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Tani untuk penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat;
5. Menjaga ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.1.3.8. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2026

Perekonomian tahun 2026 diperkirakan akan menghadapi tantangan dan prospek yang beragam. Tantangan utama meliputi pelemahan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan global. Di sisi lain, prospek ekonomi nasional tetap menjanjikan dengan pertumbuhan yang diperkirakan akan mencapai 5,1 persen pada tahun 2025 dan berpotensi lebih tinggi pada tahun 2026.

Di tengah kondisi global yang masih diselimuti ketidakpastian, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian dalam negeri mampu tumbuh positif pada tahun 2026. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, sinergi di antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, Bank Indonesia juga memberikan bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti

kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, keuangan inklusif dan hijau. Kebangkitan ekonomi nasional memerlukan transformasi di sektor riil, seperti infrastruktur, konektivitas fisik dan digital, hilirisasi mineral batubara, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan digitalisasi. Selain itu, dibutuhkan pula perizinan yang ramah untuk iklim bisnis dan investasi.

Memperhatikan perkembangan perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa perlu mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian Kota Lhokseumawe. Di sektor domestik, perlu terus ditingkatkan industri kecil menengah yang kuat dan berdaya saing, sementara di sektor eksternal perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Tantangan berikutnya yang dihadapi antara lain tingkat kemiskinan, inflasi, dan tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe yang berada di atas rata-rata Aceh, dan juga Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Pemerintah perlu mendorong kinerja perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan:

- a. Menyediakan regulasi kemudahan investasi dan pemberian insentif;
- b. Pemanfaatan data P3KE dalam pengentasan kemiskinan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- d. Meningkatkan penyaluran ZIS untuk pemberdayaan;
- e. Pendampingan dan pelatihan untuk UMKM dan IKM;
- f. Pelatihan berbasis kompetensi untuk tenaga kerja;
- g. Meningkatkan operasi pasar murah dan pasar tani;
- h. Mengembangkan objek-objek wisata yang ada;
- i. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

Keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Salah satu indikator kinerja penilaian capaian kinerja keuangan daerah antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode 2020 sampai dengan 2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga memperoleh opini WTP. Adapun opini laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2020	WTP	5.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021	23 April 2021
2021	WTP	352/X/XVIII.BAC/04/2022	20 April 2022
2022	WTP	390/S/XVIII.BAC/05/2023	12 Mei 2023
2023	WTP-PSH	253/S/XVIII.BAC/05/2024	20 Mei 2024
2024	WTP-PSH	4.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025	21 Mei 2025

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode 2020-2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hanya saja opini terhadap laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Hal ini disebabkan karena BPK menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain: a). penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 untuk menyelesaikan kewajiban Tahun Anggaran 2023 dan memulihkan kas yang dibatasi penggunaannya belum memadai; b). kekurangan volume atas 28 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaraingan dan irigasi pada dua perangkat daerah; dan c). penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak sepenuhnya memadai.

Secara umum, indeks kapasitas fiskal Kota Lhokseumawe berada pada kategori sangat rendah. Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja APBK dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBK yang harus disepakati bersama dengan DPRK. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Informasi tentang penetapan APBK Lhokseumawe selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.4
Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024

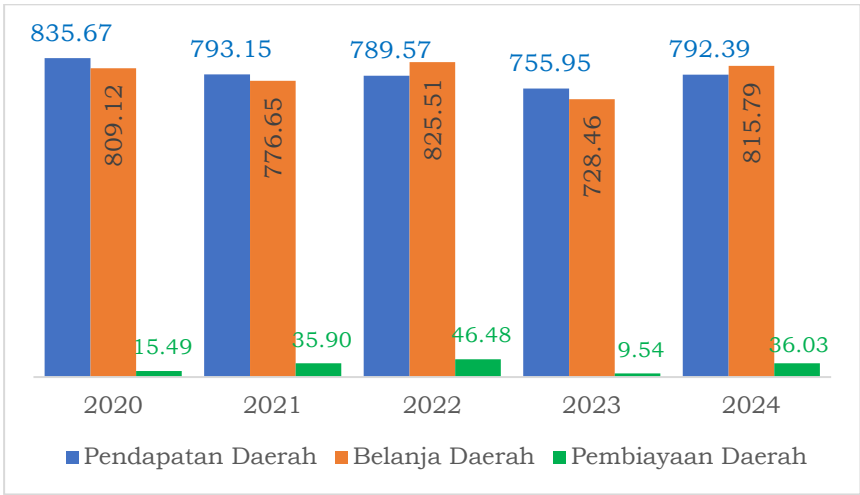
Tahun	Qanun Kota Lhokseumawe	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2020	Nomor 4 Tahun 2019	30 Desember 2019	932.428.473.462,-
2021	Nomor 10 Tahun 2020	29 Desember 2020	833.757.195.523,-
2022	Nomor 7 Tahun 2021	31 Desember 2021	820.651.428.592,-
2023	Nomor 5 Tahun 2022	30 Desember 2022	779.444.500.000,-
2024	Nomor 2 Tahun 2023	29 Desember 2023	800.078.811.672,-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 APBK Lhokseumawe telah ditetapkan secara tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kinerja pelaksanaan APBK Lhokseumawe dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama kurun tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.16
Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)



Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (*Audited*)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* selama kurun waktu tahun 2020-2024 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi

pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.835,67 milyar, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi Rp.792,44 milyar dengan pertumbuhan minus 1,06 persen pertahunnya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pendapatan daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020, sedangkan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.755,95 milyar.

Seiring dengan berfluktuasinya realisasi pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 0,16 persen pertahunnya. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.809,12 milyar, turun pada tahun 2021 menjadi Rp.776,65 milyar, selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi Rp.825,51 milyar, akan tetapi pada tahun 2023 turun kembali menjadi Rp.728,46 milyar, dan tahun 2024 realisasi belanja daerah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.815,798 milyar. Secara umum belanja daerah tertinggi selama lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp.825,50 milyar, dan realisasi belanja daerah terendah tercatat pada tahun 2023 yang sebesar Rp.728,46 milyar.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 *Audited*, selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi APBK Lhokseumawe sangat berfluktuatif, dimana realisasi APBK terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 88,41 persen atau sebesar Rp.782.796.321.455,- dari anggaran sebesar Rp.885.454.861.282,- dengan SILPA mencapai Rp.52.399.883.518,-. Realisasi APBK tertinggi tercatat pada tahun 2024 yang mencapai 96,20 persen atau sebesar Rp.816.786.503.747,- dari anggaran sebesar Rp.849.032.964.142,- dengan SILPA sebesar Rp.12.634.946.009,-. Lebih jelasnya untuk mengetahui target dan realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2020	899,710,311,849	810,615,344,069	90.10	42,045,667,333
2021	885,454,861,282	782,796,321,455	88.41	52,399,883,518
2022	876,851,664,000	827,509,672,418	94.37	10,541,034,674
2023	800,260,907,647	729,461,011,932	91.15	37,029,821,414
2024	849,032,964,142	816,786,503,747	96.20	12,634,946,009

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (*Audited*)

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. APBK merupakan suatu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD Lhokseumawe dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi belanja, dan capaian pembiayaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu: a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; c) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Prediksi kemampuan keuangan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yaitu tidak statis dan disesuaikan dengan kondisi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah.

Untuk mengetahui tentang gambaran realisasi pendapatan dan target/proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBK 2025	TARGET 2026	PROYEKSI 2027
1	PENDAPATAN DAERAH	789,566,096,080	755,949,798,672	792,391,628,342	822,149,476,344	817,489,376,141	821,569,507,421
1.1	Pendapatan Asli Daerah	68,212,506,871	67,901,946,334	64,522,601,604	80,895,025,543	80,802,475,448	84,182,348,797
1.1.1	Pajak Daerah	40,032,463,310	39,586,915,813	41,649,012,954	50,871,365,493	55,589,193,344	59,981,678,354
1.1.2	Retribusi Daerah	3,022,508,323	3,733,420,512	2,694,118,337	3,451,500,000	3,566,500,000	3,596,500,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,350,084,432	3,236,124,545	9,296,221,048	15,500,000,000	10,564,196,625	10,048,538,124
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20,807,450,806	21,345,485,464	10,883,249,265	11,072,160,050	11,082,585,479	10,555,632,319
1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622,773,568,549	630,906,590,568	649,664,202,559	697,608,856,000	690,777,280,000	690,777,280,000
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Infrastruktur	-	-	-	35,636,650,000	34,385,907,000	34,385,907,000
1.2.2	Insentif Fiskal Kinerja	-	-	5,485,809,000	7,385,226,000	7,385,226,000	7,385,226,000
1.2.3	Dana Bagi Hasil (DBH)	25,508,814,157	25,249,350,413	23,974,451,000	20,977,415,000	20,977,415,000	20,977,415,000
1.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	415,683,229,737	436,369,459,000	461,173,597,656	468,844,911,000	463,323,358,000	463,323,358,000
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33,292,658,226	22,632,985,556	20,389,645,000	6,934,508,000	6,934,508,000	6,934,508,000
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59,943,665,527	79,522,976,344	76,238,534,903	97,016,007,000	96,956,727,000	96,956,727,000
1.2.7	Dana Insentif Daerah (DID)	34,445,081,000	5,730,566,000	-	-	-	-
1.2.8	Dana Desa (DD)	53,900,119,902	61,401,253,255	62,402,165,000	60,814,139,000	60,814,139,000	60,814,139,000
1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98,580,020,659	56,919,261,770	68,446,173,561	30,298,976,958	31,895,671,958	30,298,976,958
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	29,261,429,715	34,250,277,597	35,910,026,739	30,298,976,958	30,298,976,958	30,298,976,958
1.3.2	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)	69,318,590,944	22,668,984,173	32,536,146,822	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	1,596,695,000	-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	222,000,000	9,758,650,618	13,346,617,843	14,013,948,735	16,310,901,666
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	222,000,000	-	-	-	-
1.4.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	9,758,650,618	13,346,617,843	14,013,948,735	16,310,901,666
	JUMLAH PENDAPATAN	789,566,096,080	755,949,798,672	792,391,628,342	822,149,476,344	817,489,376,141	821,569,507,421

Sumber : LRA 2022-2024 (*Audited*), APBK 2025, BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp.755.949.798.672,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.67.901.946.334,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.630.906.590.568,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.56.919.261.770,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.222.000.000,-. Realisasi Tahun 2023 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2022 yang mencapai Rp.789.566.096.080,-.

Selanjutnya realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 sebesar Rp.792.391.628.342,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.64.522.601.604,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.649.664.202.559,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.68.446.173.561,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.9.758.650.618,-. Besaran realisasi pendapatan tahun 2024 relatif lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan Tahun 2025 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.822.149.476.344,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.80.895.025.543,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.697.608.856.000,-; Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.30.298.976.958,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.13.346.617.843,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2025 mengalami kenaikan 5,08 persen atau sebesar Rp.39.714.291.190,-.

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 dan target pendapatan 2025, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.817.489.376.141,-. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.80.802.475.448,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.690.777.280.000,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.31.895.671.958,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.14.013.948.735,-.

Jumlah pendapatan yang direncanakan pada tahun 2026 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun berjalan (2025). Perbedaan target pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.92.550.095,- Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp.6.831.576.000,-. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sebesar 0,57 persen atau sebesar Rp.4.660.100.203,- pada tahun 2026 dibandingkan 2025.

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
 - e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah melalui:

- a. pemantauan pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak daerah berupa

pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya dengan tujuan antara lain:

- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah;
 - Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dan pemungutan pajak daerah;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak daerah.
- b. Pemberian *Reward*, antara lain:
- Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo melalui non tunai (Action Bank Aceh);
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
 - Pemberian *doorprize*/souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada event-event yang digelar Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- c. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah;
- d. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan Pajak Daerah yaitu:

- Peningkatan promosi pariwisata dan kerjasama dengan industri perhotelan;
- Mengidentifikasi lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah;
- Pemantauan pemasangan *tapping box*.
- Pendataan yang tepat dan akurat terhadap wajib pajak daerah;
- Melakukan audit rutin penggunaan *tapping box* oleh pihak independen;
- Meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal;
- Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan titik, jumlah dan jenis reklame;
- Melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pembaharuan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri;

- Menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah;
- Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain;
- Melakukan sosialisasi pajak, terutama pajak MBLB kepada objek pajak dan badan usaha untuk menyusun laporan keuangan yang memuat penjualan MBLB, sehingga pemerintah dapat memungut pajak MBLB berdasarkan penjualan riil;
- Memastikan kebenaran jumlah pembayaran pajak parkir yang dilaporkan oleh penyelenggara parkir;
- Melakukan pemasangan meteran air pada usaha-usaha menggunakan air tanah, sehingga dasar pajak pajak sesuai dengan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 tahun 2017;
- Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya strategi yang dapat ditempuh untuk pencapaian potensi Retribusi Daerah, yaitu:

- Melakukan diversifikasi layanan;
- Peningkatan kualitas layanan;
- Promosi pelayanan untuk objek retribusi baru;
- Melakukan Kemitraan dengan Pihak Lain;
- Penetapan tarif yang kompetitif dan transparan;
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan;
- Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan;
- Melakukan perluasan jangkauan layanan;
- Melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan titik parkir baru;
- Penataan tanda dan rambu parkir (*park signs*);
- Melakukan inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum;
- Meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- Mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi;
- Melakukan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; penurunan prevalensi stunting; pengendalian inflasi, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berdasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

- a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan fungsi kesehatan 10 persen;
- d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;

- e. belanja sesuai dengan sumber dana yang diperuntukkan penggunaan, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat;
- f. untuk belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mengikuti pedoman dan pagu indikatif sebagaimana tahun 2025, dan akan disesuaikan kembali pada tahapan selanjutnya berdasarkan pendapatan DAK Fisik Tahun 2026 yang diterima;
- g. mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- h. mendukung percepatan penurunan stunting antara lain: kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita; kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;
- i. mendukung pengendalian inflasi, antara lain melalui: peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; pengendalian laju alih fungsi lahan; pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; penguatan tata kelola logistik daerah; pengawasan harga dan operasi pasar;
- j. mendukung peningkatan investasi antara lain melalui: kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS); dan mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia;

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	APBK 2025	TARGET 2026	PROYEKSI 2027
2	BELANJA DAERAH	825,509,672,418	728,461,011,932	815,786,503,746	833,801,374,315	816,489,376,141	820,569,507,421
2.1	Belanja Operasi	576,374,939,708	548,509,273,989	597,233,963,149	630,482,353,960	619,238,614,223	612,280,885,694
2.1.1	Belanja Pegawai	304,916,122,038	316,584,344,048	340,436,176,707	404,519,983,386	413,636,835,788	426,996,850,483
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185,425,254,292	177,812,072,024	187,048,276,819	187,294,160,840	180,399,431,564	170,519,472,011
2.1.3	Belanja Subsidi	200,000,000	470,000,000	1,143,000,000	1,005,000,000	1,000,050,000	1,000,050,000
2.1.4	Belanja Hibah	36,702,542,385	22,501,686,262	39,556,499,966	16,282,039,744	11,498,765,637	10,264,513,201
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	49,131,020,993	31,141,171,655	29,050,009,657	21,381,169,990	12,703,531,234	3,500,000,000
2.2	Belanja Modal	142,251,751,256	60,336,467,761	102,279,876,677	76,604,262,935	78,636,668,918	91,110,013,976
2.2.1	Belanja Modal Tanah	13,713,809,182	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,363,441,916	15,627,696,279	18,620,998,870	24,253,740,216	7,687,560,918	26,632,651,746
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,945,930,770	21,923,145,455	27,920,996,675	21,805,390,829	24,839,584,283	24,390,217,352
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62,614,371,138	18,771,759,227	50,092,283,747	23,335,973,890	43,068,298,167	37,039,836,877
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,614,198,250	4,013,866,800	5,645,597,385	7,209,158,000	3,041,225,550	3,047,308,001
2.3	Belanja Tak Terduga	2,134,850,082	52,650,368	457,862	2,000,000,000	3,435,485,250	2,000,000,000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,134,850,082	52,650,368	457,862	2,000,000,000	3,435,485,250	2,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	104,748,131,372	119,562,619,814	116,272,206,058	124,714,757,420	115,178,607,750	115,178,607,750
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1,820,631,270	3,183,566,844	3,847,744,558	7,673,581,619	5,432,286,550	5,432,286,550
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	102,927,500,102	116,379,052,970	112,424,461,500	117,041,175,801	109,746,321,200	109,746,321,200
	JUMLAH BELANJA	825,509,672,418	728,461,011,932	815,786,503,746	833,801,374,315	816,489,376,141	820,569,507,421

Sumber : LRA 2022-2024 (Audited), APBK 2025, BPKD Kota Lhokseumawe, SIPD-RI Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 sebesar Rp.728.461.011.932,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.548.509.273.989,- Belanja Modal sebesar Rp.60.336.467.761,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.52.650.368,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.119.562.619.814,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 realisasi belanja sebesar Rp.815.786.503.746,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.597.233.963.149,- Belanja Modal sebesar Rp.102.279.876.677,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.457.862,- dan selanjutnya Belanja Transfer sebesar Rp.116.272.206.058,-. Realisasi belanja Tahun 2023 dan 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai Rp.825.509.672.418,-. Tinggi rendahnya realiasi belanja tentu saja tidak terlepas dari besaran pendapatan daerah yang dapat direalisasikan pada tahun berkenaan.

Untuk Tahun Anggaran 2025 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebesar Rp.833.801.374.315,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.630.482.353.960,-; Belanja Modal sebesar Rp.76.604.262.935,-; Belanja Tak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,-; dan Belanja Transfer sebesar Rp.124.714.757.420,-.

Selanjutnya sesuai dengan rencana pendapatan daerah tahun 2026, belanja Kota Lhokseumawe direncanakan sebesar Rp.816.489.376.141,- yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi sebesar Rp.625.839.057.323,-;

Pada belanja operasi, alokasi sebesar Rp.424.079.919.388,- untuk memenuhi belanja pegawai yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.179.494.181.064,-; Belanja Subsidi yang diperuntukan untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penanggulangan inflasi dan menjamin keterjangkauan daya beli masyarakat sebesar Rp.1.000.050.000,-; Belanja Hibah sebesar Rp.9.331.375.637,-; dan alokasi Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.11.933.531.234,-.

b. Belanja Modal sebesar Rp.78.636.668.918,- terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.7.687.560.918,-; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.24.839.584.283,-; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.43.068.298.167,-; serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.3.041.225.550,-.

c. Belanja Tak Terduga Rp.3.435.485.250,- serta

d. Belanja Transfer sebesar Rp.115.178.607.750,- yang terdiri atas belanja bagi hasil sebesar Rp.5.432.286.550,-; dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.109.746.321.200,-.

Disamping itu juga dalam belanja daerah tahun 2026 sudah dialokasikan untuk pemenuhan alokasi belanja yang bersumber dari

Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Realisasi penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang berasal dari sisa lebih belanja daerah sebesar Rp.10.541.034.674,-, dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-. Pada tahun 2024 realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.37.029.821.414, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.12.651.897.971,- sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2023 *)	REALISASI 2024 **)	APBK 2025	TARGET 2026	PROYEKSI 2027
3	PEMBIAYAAN DAERAH	9,541,034,674	36,029,821,414	11,651,897,971	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10,541,034,674	37,029,821,414	12,651,897,971	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	10,541,034,674	37,029,821,414	12,651,897,971	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	37,029,821,414	12,634,945,683	-	-	-

Sumber : LRA 2023-2024 (Audited), APBK 2025, BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2025.

Berdasarkan uraian Arah Kebijakan Pendapatan, Arah Kebijakan Belanja, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe, diperoleh gambaran struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

NO.	URAIAN	TARGET 2026	PROYEKSI 2027
1	PENDAPATAN DAERAH	817,489,376,141	821,569,507,421
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80,802,475,448	84,182,348,797
1.1.1	Pajak Daerah	55,589,193,344	59,981,678,354
1.1.2	Retribusi Daerah	3,566,500,000	3,596,500,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,564,196,625	10,048,538,124
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,082,585,479	10,555,632,319
1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690,777,280,000	690,777,280,000
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Infrastruktur	34,385,907,000	34,385,907,000
1.2.2	Insentif Fiskal Kinerja	7,385,226,000	7,385,226,000
1.2.3	Dana Bagi Hasil (DBH)	20,977,415,000	20,977,415,000
1.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	463,323,358,000	463,323,358,000
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,934,508,000	6,934,508,000
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96,956,727,000	96,956,727,000
1.2.7	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
1.2.8	Dana Desa (DD)	60,814,139,000	60,814,139,000
1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,895,671,958	30,298,976,958
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	30,298,976,958	30,298,976,958
1.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	1,596,695,000	-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,013,948,735	16,310,901,666
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	-
1.4.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,013,948,735	16,310,901,666
	JUMLAH PENDAPATAN	817,489,376,141	821,569,507,421
2	BELANJA DAERAH	816,489,376,141	820,569,507,421
2.1	Belanja Operasi	619,238,614,223	612,280,885,694
2.1.1	Belanja Pegawai	413,636,835,788	426,996,850,483
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180,399,431,564	170,519,472,011
2.1.3	Belanja Subsidi	1,000,050,000	1,000,050,000
2.1.4	Belanja Hibah	11,498,765,637	10,264,513,201
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12,703,531,234	3,500,000,000
2.2	Belanja Modal	78,636,668,918	91,110,013,976
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,687,560,918	26,632,651,746
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,839,584,283	24,390,217,352

NO.	URAIAN	TARGET 2026	PROYEKSI 2027
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43,068,298,167	37,039,836,877
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,041,225,550	3,047,308,001
2.3	Belanja Tak Terduga	3,435,485,250	2,000,000,000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	3,435,485,250	2,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	115,178,607,750	115,178,607,750
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	5,432,286,550	5,432,286,550
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	109,746,321,200	109,746,321,200
	JUMLAH BELANJA	816,489,376,141	820,569,507,421
	SURPLUS / (DEFISIT)	1,000,000,000	1,000,000,000
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,000,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-

Sumber: BPKD Lhokseumawe, dan SIPD-RI, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPK Tahun 2024 Triwulan IV sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPK Tahun 2026. Prioritas Daerah yang teruang dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Prioritas RKPA Tahun 2026;
3. Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
4. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan
5. Pokok-pokok pikiran DPRK.

Proses integrasi penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Komponen Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026



Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, hasil olahan, 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Target tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMK dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman juga pada program

kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Aceh Tahun 2026.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe maka penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 harus selaras dan sinergis dengan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPK Lhokseumawe dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Lhokseumawe, sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Tingkat Nasional. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yaitu ***‘Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni’***. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Lhokseumawe sebagai kota dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing dengan didukung infrastruktur kota yang terintegrasi dan lingkungan berkelanjutan. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter.

Misi 3 Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel.

Misi 5 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

Gambar 4.2
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil olah, 2025

Makna dari visi tersebut adalah Kota Lhokseumawe yang cerdas akan meningkatnya sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era digital dan ekonomi digital. Terbukti bahwa Kota Lhokseumawe ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran nyaman huni dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.

Untuk mencapai Kota cerdas dan nyaman huni, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama masyarakat akan bekerja sama membangun kota dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan syariat islam dan pelestarian budaya, sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing kota, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan syariat islam dan budaya.

Tema pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMK 2025-2029 yaitu **“Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya**

Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan” sebagai pencapaian target-target RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Di tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2026 juga merupakan tahun penguatan modal dasar transformasi menuju pelaksanaan trasformasi di tahun 2025-2045.

Gambar 4.3
Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030



Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. Target di tahun 2025 merupakan target di RPJMK Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2026

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2024	RKPK 2025	P- RKPK 2025	2026
Misi 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe								
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.40-4.50	4.40-4.50	4,53-4,80
			Indeks Gini	Angka	0,326	0.293	0.293	0,295-0,322
1.1		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.24	-	23.40	23.69
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	16.70	-	16.72	16.75
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.30	-	9.42	9.54
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	%	83.03	-	84.89	85.32
1.2		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)) PDRB)	%	39.65	-	40.53	40.95
			PDRB per kapita	(Rp. juta)	59.12	-	62.38	65.48
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.30	-	2.40	2.42
			Total Kredit/PDRB	%	46.67	-	47.60	48.12

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	2026
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	7.98-7.48	7.98-7.48	7.75-7.85
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. juta	135,96	-	140.50	142.60
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter								
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80.89	81.65-83.65	81.65-82.00	81.95-82.30
2.1		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.55	15.39	15.92	16.00
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.31	11.50	11.50	11.58
			Angka Literasi SD	%	56.72	-	59.22	61.72
			Angka Numerasi SD	%	49.44	-	52.34	55.24
			Angka Literasi SMP	%	68.34	-	69.44	70.54
			Angka Numerasi SMP	%	59.94	-	61.44	62.94
2.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.93	74.95	74.95	75.12
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20.80	-	19.00	18.00
2.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	10.33-10.13	10.33-10.13	9.00-9.81
			Pengeluaran Perkapita	Rp.	12.694	-	13.263	13.832
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	%	39.55	-	47.09	48.65

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
				2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	2026
		Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota					
2.4	Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Angka	65.86	-	67.00	68.00
		Indeks Desa Membangun	Angka	0.7762	-	0.7846	0.7910
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.331	-	0.310	0.300
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96.59	-	96.62	96.95
		Nilai Kota Layak Anak	Angka	616.47	-	720	730
		Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	51.53	100	44.52	45.19
Misi 3 : Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan							
3	Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87.28	-	88.15	89.03
3.1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	62.19	-	67.76	74.30
		Tingkat Pelayanan Jalan	Level	C 0.50	-	C 0.50	C 0.50
3.2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	81.79	69.88	81.88	81.96

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	2026
3.3		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69.40	65.80	70.00	73.35-73.85
3.4			Indeks Risiko Bencana	Angka	136.99	-	134.65	132.86
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel								
4	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Point	B 67.70	B 60.01	BB 71.30	BB 72.85
		Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kategori /Point	B 61.12	B 61.00	B 68.40	BB 71.20
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	Angka	64.37	-	70.00	72.50
			Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.031	Level 3	Level 3 3.200	Level 3 3.300
			Indeks Profesionalisme ASN	Angka	79.46 Sedang	-	80.46	81.67
		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Angka	B 3.94	-	A 4.20	A 4.28
			Indeks SPBE	Angka	2.80 Baik	-	3.00	3.10

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	2026
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	43.66	-	50.00	52.36
Misi 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya								
5	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		Indeks Pembangunan Syariat	Angka	83.91	80.95	84.24	84.91
		Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	Angka	83.91	80.95	84.24	84.91
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	26.90	-	26.90	40.70

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Aceh dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 4.2
Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPA Tahun 2026	Tema RPKK Lhokseumawe Tahun 2026
Peningkatan Produktivitas Untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Dalam Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :
 - a. melanjutkan pembangunan infrastruktur
 - b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
 - c. penguatan koperasi
 - d. mengembangkan industri kreatif
 - e. pendalaman sektor keuangan

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :
 - a. membangun desa dan membangun dari desa
 - b. pemerataan ekonomi
 - c. Memberantas kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :
 - a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis
 - b. Melestarikan budaya
 - c. Penanganan bencana

4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Pembangunan Aceh tahun 2026 diarahkan pada tema **“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Dalam Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
3. Melaksanakan kemandirian ekonomi Aceh dengan berbasis pada sektor unggulan Aceh.
4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Menjamin Konektivitas antar wilayah.
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
6. Mengoptimalkan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Aceh serta membina Stabilitas Politik dan Implementasi Hukum.
7. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Prioritas pembangunan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe periode Tahun 2025-2029 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja

sampai dengan tahun 2024, perkiraan capaian di tahun 2025 serta isu-isu strategis di tahun 2026.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPD) Lhokseumawe Tahun 2026 adalah **“Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro berdasarkan target pada RPJMK. Persandingan target capaian indikator makro dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator Makro	Nasional	Aceh	Kota Lhokseumawe
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.80-6.3	4.5-5.1	4.53-4.80
2	PDRB Perkapita	US\$ 5.870	53.00-55.12	65.48
3	Kontribusi PDRB Propinsis/Kabupaten/Kota	-	1.075	4.94
4	Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia	0.57	75.50-76.50	81.95-82.30
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5-7.5	10-12	9.00-9.81
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.44-4.96	5.12-5.47	7.75-7.85
7	Rasio Gini	0.377-0.380	0.280-0.290	0.295-0.322
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	73.35-73.85
9	Penurunan Intesitas Emisi GRK %)	27.35	32.91-37.47	-

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Perumusan prioritas RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Aceh serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Lhokseumawe. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2025
Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Aceh 2 Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Aceh 3 Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh Prioritas Aceh 5 Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	Prioritas Lhokseumawe 1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	Prioritas Aceh 4 Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	Prioritas Lhokseumawe 2 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHKSEUMAWE 2025
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Aceh 7 Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	
Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Prioritas Aceh 6 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	Prioritas Lhokseumawe 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing
Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Aceh 8 Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	Prioritas Lhokseumawe 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
Prioritas 8 Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi	Prioritas Aceh 9 Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh	Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2025
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Prioritas Lhokseumawe 2 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe tahun 2026 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 9 prioritas Aceh. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe dengan prioritas nasional RKP tahun 2026 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

Permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Lhokseumawe memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.1	Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PA.1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	PD.4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan
					PD.5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PA.2	Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas - Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengurangan risiko bencana	PN.3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PA.4	Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	PD.2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana
			PA.7	Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor		
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan	PN.4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,	PA.6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	PD.3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul,

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
pemerataan pendidikan, meningkatkan minat baca masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas		Berkualitas dan Berdaya Saing
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PA.3	Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	PA.5	Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PA.8	Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	PD.4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat Pelaksanaan nilai-nilai dinul islam dan pembangunan kebudayaan	PN.8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PA.9	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh	PD.5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
					PD.2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Berikut disajikan sandingan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 beserta indikator sasaran dan target dengan Prioritas RKPK Lhokseumawe, Prioritas Nasional dan Prioritas Aceh Tahun 2026.

Tabel 4.6
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target 2026		
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	23.24	23.69	Prioritas Lhokseumawe 1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui wasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Aceh 2 Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Prioritas Aceh 3 Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	16.70	16.75		
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.30	9.54		
2	Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	83.03	85.32		
3	Meningkatnya nilai investasi, daya saing dan Lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	39.65	40.95		
		PDRB per kapita	59.12	65.48		
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.30	2.42		
		Total Kredit/PDRB	46.67	48.12		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8.47	7.85-7.75		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	140.50	142.60		

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target 2026		
						Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh
4	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	15.55	16.00	Prioritas Lhokseumawe 2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	11.31	11.58		
		Angka Literasi SD	56.72	61.72		
		Angka Nemerasi SD	49.44	55.24		
		Angka Literasi SMP	68.34	70.54		
		Angka numerasi SMP	59.94	62.94		
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.93	75.12		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	20.80	18.00		
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	10.44	9.00-9.81		
		Pengeluaran Riil Perkapita	12.694	13.823		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	39.55	48.65		
7	Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	65.86	68.00		Prioritas Aceh 6 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target 2026		
		Indeks Desa Membangun	0.7762	0.7910		
		Indeks Ketimpangan Gendr	0.331	0.300		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.59	96.65		
		Nilai Kota Layak Anak	616.47	730		
		Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	23.85	45.19		
8	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	62.19	74.30	Prioritas Lhokseumawe 3 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
		Tingkat Pelayanan	C 0.50	C 0.50		
9	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	81.79	81.96		Prioritas 8 Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	69.40	73.35- 73.85		
11	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	136.99	132.86		Prioritas 4 Aceh Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong

	Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026				Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target 2026		
						kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga Prioritas Aceh 7 Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor Prioritas Aceh 9 Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh
12	Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B 61.12	BB 71.20	Prioritas Lhokseumawe 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Opni BPK	WTP	WTP		Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Indeks Profesionalisme ASN	79.46	81.67		Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
		Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	64.37	72.50		

	Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026				Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target 2026		
		Indeks Maturitas SPIP	Level 3 3.031	Level 3 3.300		Prioritas Aceh 8 Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba
13	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	B 3.94	A 4.28		
		Indeks SPBE	2.80 Baik	3.10		
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	43.66	52.36		
14	Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	83.91	84.91	Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
15	Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya Daerah	26.90	40.70		Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya berikut disajikan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.

Tabel 4.7
Sinkronisasi Priritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	1 Peningkatan kualitas produk, akses permodalan dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	- Pelatihan Peningkatan Mutu bagi UKM Sentra Kerajinan Anyaman Pandan - Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Kerajinan Tenun - Pelatihan Digital Marketing dan Branded Pasar bagi Pelaku UKM untuk meningkatkan nilai produk Unggulan Kota Lhokseumawe	
			2 Pengembangan kewirausahaan baru	- Penuntasan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe beserta Pagar	Ruang kreatif pemuda
			3 Peningkatan peran dan fungsi koperasi		
		2 Peningkatan nilai investasi	4 Pelaksanaan promosi investasi		
			5 Pemberian insentif dan kemudahan perizinan		
		3 Peningkatan sektor pariwisata	6 Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					wisata yang berdaya saing		
		4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi	7	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa	Rehabilitasi Pasar TPI Pusong	
				8	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi		
				9	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi	Penyelenggaraan Pasar Murah	
				10	Peningkatan nilai dan produk		
				11	Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	Diversifikasi Olahan Ikan Berbasis Potensi	Pemberdayaan Sektor Perikanan
							Pengelolaan hasil laut

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						- Pelatihan Smart Farming Bagi Petani Milenial - Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kota Lhokseumawe - Pengadaan Bibit Padi (450 sak) dan Bibit Jagung (150 Box) - Pengadaan Sperma Beku beserta Countainer Sperma Beku	Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern
		5	Penguatan ketahanan pangan	12	Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan		
			Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	13	Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja		
				14	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	- Pelatihan K3 Migas - Pelatihan Welding - Pelatihan Electrical Technician - Pelatihan Salon Kecantikan	
				15	Peningkatan upaya antisipasi dampak		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					disrupsi teknologi terhadap pasar kerja		
				16	Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja		
		6	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	17	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah		
				18	Pengembangan alternatif pembiayaan		
				19	Optimalisasi BUMD		
2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulan risiko bencana	7	Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	20	Pengembangan kawasan strategis dan cagar budaya	- Penuntasan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe beserta Pagar	Penyelesaian Pembangunan Islamic Center
				21	Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik		
		8	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	22	Peningkatan jalan, jembatan pedestrian, penataan kota	- Pedestrian Jalan Merdeka - Lanjutan Pengaspalan Jalan Blang Malo - Peningkatan Jalan Blang Pulo - Peningkatan Jalan Diponegoro	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						- Peningkatan Jalan Cot Trieng Gp. Paloh Punti - Peningkatan Jalan Pase - Pengaspalan Jalan Lhok Beuramoe Gp. Jeulikat - Peningkatan Jalan Meunasah Blang Muara Dua - Lanjutan Pembangunan Jalan Blang Crum - Peningkatan Jalan Cut Mamplam - Peningkatan Jalan Mns Manyang	
				23	Pengembangan kualitas layanan transportasi baik angkutan umum dan angkutan barang	- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	
		9	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	24	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	- Pembangunan rumah layak huni - Perbaikan rumah tidak layak huni	
				25	Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh		Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				26	Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak	- Pembangunan jaringan air minum perpipaan	Pemerataan Jaringan Air Bersih
		10	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	27	Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/ Taman Kota
				28	Pemanfaatan berkelanjutan pengendalian perencanaan lingkungan SDA dan	- Revitalisasi saluran jalan Perniagaan - Revitalisasi Waduk/Reservoir Pusong	Penanganan Banjir
						- Pengadaan Truk sampah - Pengadaan Bincontainer - Pengadaan Truk Armroll sampah - Edukasi pengolahan sampah berbasis ekonomi	Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)
				29	Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana		
		11	Penguatan ketahanan bencana	30	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat		
				31	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana	- Bantuan Masa Panik bagi Korban Bencana	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	12	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi dan informasi	32	Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan		
				33	Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	- Pelatihan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP - Pelatihan Guru Inklusi Tingkat SD	
				34	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	- Pembangunan Ruang Kelas SDN 3 Muara Satu Kontruksi 2 Lantai - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Banda Sakti Kontruksi 2 Lantai - Penuntasan Laboratorium Komputer SMPN 1 Lhokseumawe (Lantai 2)	
				35	Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah		Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi
				36	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga		Peningkatan Kualitas SDM Dayah

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					kependidikan dayah, pemberdayaan dan pendidikan santri, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dayah		
				36	Peningkatan pendidikan keagamaan secara optimal		
		13	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh yang berkualitas dan mudah diakses	37	Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi		
				38	Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan		
				39	Peningkatan layanan kesehatan rujukan		
				40	Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	- Pengadaan Mobil Box Farmasi	
				41	Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat		
		14	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	42	Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				43	Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	Pengadaan Penyediaan Permakanan untuk disabilitas dan Lansia	Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin
				44	Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		
		15	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	45	Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin		
				46	Peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
		16	Peningkatan upaya perlindungan sosial	47	Peningkatan bantuan untuk PPKS		
		17	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	48	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		
				49	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan		
				50	Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan,		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					ramah anak, disabilitas dan lansia		
		18	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	51	Peningkatan kualitas layanan KB		
				52	Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas		
		19	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	53	Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan		
				54	Peningkatan prestasi olahraga		
				55	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat		
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	20	Peningkatan kualitas perencanaan daerah	56	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah		
		21	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	57	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				58	Optimalisasi barang milik daerah		
		22	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan	59	Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik	- Pengembangan Aplikasi Lhokseumawe <i>Single Windows</i> - Layanan Pengaduan dan Call center 112	Digitalisasi Pelayanan Publik
				60	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	
				61	Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system		
				62	Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan		
		23	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	63	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
				64	Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		
				65	Penguatan Manajemen Risiko		
		25	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	66	Pengembangan budaya inovasi di OPD		
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	26	Peningkatan pelaksanaan syariat islam	67	Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah terutama dimensi aqidah, melek Al Quran, Akhlak dan hukum jinayat	- Pembangunan Mesjid Darul Atiq Gp. Jeulikat - Pembangunan Mesjid An-Nahdhah Gp. Paloh Punt - Pelatihan Takmir Mesjid - Pelatihan Dai dalam Pemanfaatan Media Digital	Peningkatan Kesadaran Spritual para Remaja
				68	pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius		
		27	Peningkatan pelestarian Budaya	69	Melakukan legalitas cagar budaya		
				70	Memajukan kebudayaan lokal		

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2026, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2024, Target Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026, Prioritas Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Aceh Tahun 2026. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	3.52	Disperindagkop
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	7.04	Disperindagkop
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	7.27	Disperindagkop
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	10.56	Disperindagkop
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	7.75	Disperindagkop
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	1.57	Disperindagkop

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Pertumbuhan Wirausaha	%	1.57	Disperindagkop
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	2.24	Disperindagkop
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	8.00	Disperindagkop
		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60.01	Disperindagkop
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	US\$ juta	0.1	Disperindagkop
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	71.35	Disperindagkop
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	50.00	Disperindagkop
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	%	5.27	Disperindagkop
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	5.00	Disperindagkop
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Ada/ Tidak	Ada	Disperindagkop
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	84.7	DKPPP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
			Ketahanan Pangan Masyarakat				
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	44.00	DKPPP
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	86.00	DKPPP
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.809,50	DKPPP
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kg	2026,77	DKPPP
		3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	72.35	DKPPP
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan	%	2.68	DKPPP
				Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.76	DKPPP
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	3.00	DKPPP
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	179,85	DKPPP
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	18.75	DKPPP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	43.75	DKPPP
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	20.00	DKPPP
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	90.00	DKPPP
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	25.00	DKPPP
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	%	23.50	DKPPP
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	86.49	DPMPTSP
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	10.03	DPMPTSP
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	200	DPMPTSP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Rp (milyar)	525	DPMPTSP
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	5.00	DPMPTSP
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	95.32	DPMPTSP
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	46.31	DPMPTSP
		2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	44.07	DPMPTSP
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	2.00	Disporapar
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	50.00	Disporapar
		3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	25.00	Disporapar

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
2	Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulan risiko bencana	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	11.53	PUPR
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	8.00	PUPR
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	%		PUPR
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%		PUPR
		1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	76.02	PUPR

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	35.38	
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	83.33	PUPR
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	68.90	PUPR
		1.03.11	Program Pengembangan jasa Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli	%	32.56	PUPR
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	%	62.08	PUPR
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	9.33	PUPR
		1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap perumahan layak, pengurangan luasan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas infrastruktur, sarana, dan utilitas umum (PSU) di organisasi.	%	0.28	PUPR
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi	%	47.55	PUPR

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	%	2.28	Dishub
				Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	%	62.50	Dishub
		2.10.12	Program Pengurusan Hak -Hak Atas Tanah	Ditetapkannya Hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	0.50	Dinas Pertanahan
		2.10.13	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	%	39.08	Dinas Pertanahan
		2.10.14	Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM bidang Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	%	59.65	Dinas Pertanahan
		2.10.15	Program Pengaturan Pertanahan di wilayah pesisir, Laut dan Pulau	Persentase pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau yang tertata	%	61.25	Dinas Pertanahan
		2.10.16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	%	0.0	Dinas Pertanahan

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.10.17	Program Penanganan Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan	%	60.0	Dinas Pertanahan
		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%		DLH
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	26.82	DLH
				Indeks Kualitas Udara	Nilai	38.12	DLH
		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	1.16	DLH
		2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	2	DLH
		2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	3.00	DLH

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	23.50	DLH
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	%	100	DLH
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengolahan Sampah	Nilai	51	DLH
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	BPBD
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	BPBD
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	BPBD
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	BPBD

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran	%	100	BPBD
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	1.01.02	Program Pegelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6	%	95.73	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	%	99.05	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	57.57	Dinas PK
		1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	Dinas PK
		1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Nilai	0.60	Dinas PK
				Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	30.16	Dinas PK
		1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui	%	100	Dinas PK
		1.01.07	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah dengan type A	%	10.94	DSI-PD
		1.01.08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Rekomendasi yang dihasilkan terkait penyelenggaraan pendidikan Aceh	%	97.44	Sekretariat MPD

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68.80	Dispursip
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	22.00	Dinkes
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	%	19.00	Dinkes
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	77.05	Dinkes
		1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	100	Dinkes
		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	78.1	Dinkes
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	79.66	Dinsos
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang	%	79.66	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPK) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA			
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kab/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	80.00	Dinsos
				Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	59.32	Dinsos
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	70.00	Dinsos
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang	%	80.00	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				terpenuhi kebutuhan dasarnya			
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	Dinsos
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	Dinsos
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	60.00	Dinsos
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	Dinsos
		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	50.00	Dinsos
				Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	50.00	Dinsos
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	79.41	Dinsos
				Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima	%	3.18	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Perlindungan sosial yang tergradusi dari kemiskinan			
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	Dinsos
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	60.00	Dinsos
				Persentase korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100.00	Dinsos
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100.00	Dinsos
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	200	DPMPTSP
		2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	7.35	DPMG
		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama	%	7.35	DPMG
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	%	51.47	DPMG

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				ditingkatkan kapasitasnyaa Desa			
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	95.00	DPMG
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	76.74	DPMG
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum adat	%	54.1	DPMG
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2.00	DP3AP2KB
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	50.30	DP3AP2KB
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	46.67	DP3AP2KB
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang	%	26.50	DP3AP2KB

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				berperspektif gender dan hak anak sesuai standar			
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	44.12	DP3AP2KB
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65.95	DP3AP2KB
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	71.43	DP3AP2KB
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	68.75	DP3AP2KB
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Nilai	2.27	DP3AP2KB
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Nilai	7.0	DP3AP2KB
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern	Nilai	86.00	DP3AP2KB
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi	%	8.41	DP3AP2KB
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	86.08	DP3AP2KB

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	rasio	10.00	DISPORAPAR
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk pelatnas	%	1.00	DISPORAPAR
		2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	95.00	DISPORAPAR
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B 64.50	Setdako
				Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	29.50	Setdako
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Kerja Sama Daerah	Nilai	100.00	Setdako
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	100.00	Setdako
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	100.00	Setdako

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Persentase Produk Hukum yang Dhasilkan	%	100.00	Setdako
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Nilai		Setdako
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Nilai	100.00	Setdako
				Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	Level 3	Setdako
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	100	Bappeda
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA-PD	%	100	Bappeda
		5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Bappeda
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja-PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Bappeda
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	Bappeda

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		5.05.03	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	66.67	Bappeda
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	%	33.33	Bappeda
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	66.67	Bappeda
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	100.00	Bappeda
		5.05.04	Program riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	76.00	Bappeda
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	100	Bappeda

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di daerah	%	100	Bappeda
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82.40	Inspektorat
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 3.300	Inspektorat
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 3,2	Inspektorat
		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	41.51	BPKD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	20.07	BPKD
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95.78	BPKD
				Persentase Penurunan SILPA	%	37.50	BPKD
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	20.07	BPKD

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan nilai Aset Tetap	%	2.74	BPKD
		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8.37	BPKD
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	75.00	BPKD
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	90.14	BPKD
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	15.00	BKPSDM
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	15.00	BKPSDM
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	15.00	BKPSDM
				Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	62.44	BKPSDM
		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	1.28	BKPSDM
				Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	100.00	BKPSDM

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	13.49	BKPSDM
				Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	3.60	BKPSDM
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRK	Ketetapan Penetapan Perda Tahun N	%	100	Sekretariat DPRK
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	Sekretariat DPRK
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	Sekretariat DPRK
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	8.00	Dispursip
		2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	9.00	Dispursip
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	0.11	Diskominfo
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	3.10	Diskominfo

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	1.01	Diskominfo
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaann	%	25.00	Kesbangpol
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	36.00	Kesbangpol
		8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	39.00	Kesbangpol
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	78.00	Kesbangpol
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100	Kesbangpol

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
			dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial				
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	20.00	Disdukcapil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	43.00	Disdukcapil
		2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	Disdukcapil
				Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melapor	%	99.18	Disdukcapil
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	Disdukcapil
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	Disdukcapil
		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administarasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	100.00	Disdukcapil
		2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100.00	Disdukcapil

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	65.00	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100.00	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100.00	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100.00	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	65.00	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100.00	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100.00	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan	%	100.00	Kecamatan Blang Mangat

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
				pengawasan pemerintahan desa			
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90.00	Kecamatan Muara Satu
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	%	100	Kecamatan Muara Satu
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	Kecamatan Muara Satu
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	Kecamatan Muara Satu
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	Kecamatan Muara Dua
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100.00	Kecamatan Muara Dua
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100.00	Kecamatan Muara Dua

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	Kecamatan Muara Dua
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95.77	Satpol PP dan WH
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	95.00	Satpol PP dan WH
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%		Satpol PP dan WH
				Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	%	50.00	Satpol PP dan WH
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	9.01.02	Program Syariat Islam	Angka Melek Al Quran	%	85.41	DSI-PD
		9.01.03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Fatwa yang	%	86.00	Sekretariat MPU
		9.01.04	Program Baitul Mal	Persentase Peningkatan ZISWAF	%		Sekretariat Baitul Mal
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	%		Dinas PK

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perangkat Daerah
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%		Dinas PK
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%		Dinas PK
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%		Dinas PK
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan			
		2.22.06	Program Pengelolaan Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%		Dinas PK
		2.22.08	Program Majelis Adat Aceh		Angka		Sekretariat MAA

4.3 Arah Kebijakan dan *Highlight* Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan dan *highlight* Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun -Lhokseumawe dengan *highlight* intervensi yaitu :
 - Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara
 - Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe
 - Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu
 - Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi
 - Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (olefin dan turunannya)
2. Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh
 - Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan prioritas yaitu:
 - Kota Lhokseumawe : Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat.

4.4 Penerapan Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, intervensi Proyek Strategis Nasional di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 4.9
Intervensi Kota Lhokseumawe terhadap Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Lhokseumawe	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Program Makan Bergizi Gratis	Pembekalan higienis dan sanitasi kepada pengelola MBG	- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Program Direktif Presiden
2	Sekolah Rakyat	Penyiapan Lokasi	-	Dinas Sosial dan Dinas PUPR	Program Direktif Presiden
3	Koperasi Desa Merah/Putih	Pelatihan Pengurus Koperasi	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Program Direktif Presiden
4	Pembangunan 3 Juta Rumah	- Pembangunan Rumah Layak Huni - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan	Dinas PUPR	

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Lhokseumawe	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
			terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
5	Pengentasan Kemiskinan	- Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah - Penerapan Data Tunggal Kemiskinan - Pengadaan Penyediaan Permakanan untuk disabilitas dan Lansia	- koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian - koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Permakanan	Bappeda Dinas Sosial Dinas Sosial	
6	Digitalisasi Pendidikan	- Peningkatan Kompetensi Guru - Penguatan pendidikan literasi dan numerasi	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pelatihan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP) - Pelatihan Guru Inklusi Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Direktif Presiden

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Lhokseumawe	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
7	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas	- Pembangunan dan Perbaikan Sekolah dan madrasah	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Program Penuntasan TBC	- Tracing dan pengobatan tuntas TB dan AIDS	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis - Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculosis	Dinas Kesehatan	
9	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	- Pengembangan Aplikasi Lhokseumawe <i>Single Windows</i> - Layanan Pengaduan dan Call center 112 - Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
10	Pengelolaan Sampah Terpadu	- Sosialisasi/Edukasi Pengolahan Sampah Berbasis Ekonomi	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia	- Penyusunan Dokumen RDTR	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

4.5 Pengembangan Inovasi Daerah

Pengembangan Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 adalah proses pemantapan inovasi daerah yang telah dilaporkan ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 sejumlah 11 (sebelas) inovasi daerah hasil dari pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Lhokseumawe. Dari hasil monitoring terdapat penambahan 5 (lima) inovasi daerah pada tahun 2025.

Daftar inovasi daerah yang dilakukan pemantapan dengan monitoring dan evaluasi langsung ke masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pengembangan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2024-2025

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00
Tahun 2025			
1	Lapak Literasi (Lalat	Dispursip	Pengajuan Penilaian
2	Konsumen Perpustakaan	Dispursip	Pengajuan Penilaian
3	Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah (PastaGakPaRah)	DKPPP	Pengajuan Penilaian
4	Belajar dengan video animasi (Beravsi)	SMP Negeri 3	Pengajuan Penilaian
5	Cerdas dengan Matematika dengan Excello SD Negeri 1 (Cemara exstansa)	SD Negeri 1	Pengajuan Penilaian

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Selain itu, yang menjadi fokus pelaksanaan Bidang Riset dan Inovasi daerah pada tahun 2025 adalah menyusun rencana induk dan peta jalan produk unggulan daerah (RIPJ-PUD). Hal ini diperlukan untuk keselarasan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang sedang berjalan.

Namun demikian pada tahun 2026 untuk program pengembangan inovasi daerah sesuai dengan isu strategis nasional dan daerah serta program prioritas Kepala Daerah terpilih yaitu digitalisasi pelayanan publik dan pendidikan inklusi. Oleh sebab itu pengembangan inovasi daerah yang direncanakan pada tahun 2026 mengintervensi inovasi-inovasi daerah pada cluster pelayanan publik dan cluster pendidikan.

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RKPK Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe 2025-2029. Adapun untuk tahun 2026 berdasarkan Surat Ketua DPRK Lhokseumawe Nomor : 050/93/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan terdapat 491 usulan permasalahan yang disampaikan dari 25 anggota DPRK (legislatif) kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe (eksekutif). Selanjutnya melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) terdapat 614 usulan permasalahan yang dilakukan penginputan oleh Operator Dewan masing-masing.

Usulan permasalahan dalam aplikasi SIPD-RI tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan : 37 usulan permasalahan.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : 7 usulan permasalahan.
3. Dinas Kesehatan : 11 usulan permasalahan.
4. Dinas Lingkungan Hidup : 12 usulan permasalahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 311 usulan permasalahan.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja : 14 usulan permasalahan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 21 usulan permasalahan.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : 130 usulan permasalahan.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : 4 usulan permasalahan.
10. Dinas Sosial : 11 usulan permasalahan.
11. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah : 56 usulan permasalahan.

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup .
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan, tidak memiliki usulan permasalahan di OPD.
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

4.6.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRK dimaksudkan sebagai upaya DPRK Lhokseumawe dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kota Lhokseumawe, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe Tahun 2026 yaitu:

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam menyusun dokumen awal Rancangan RKPK Tahun Anggaran 2026.
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPK, KUA, PPAS, RKA SKPK, dan RAPBK Tahun Anggaran 2026.
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kota Lhokseumawe melalui perencanaan dan penganggaran APBK Tahun Anggaran 2026.
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPK dan RPJMK.
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Lhokseumawe.
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Lhokseumawe yang lebih baik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam RKPK ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBK. Usulan dengan sumber dana Otonomi Khusus Aceh dan TDBH Migas, dilakukan secara terpusat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan dan aplikasi perencanaan KRISNA-DAK untuk usulan program/kegiatan prasarana fisik dengan sumber pembiayaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non fisik.

Program Kegiatan pada RKPK Lhokseumawe tahun 2026 ini, merupakan hasil dari rekapitulasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2026. Secara lebih rinci, usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Pagu Indikatif
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2	1,484,329,412
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	222,404,776,805
3	Dinas Kesehatan	5	125,971,019,886
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	63.113.269.854,69
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	8,337,943,218
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	2	10,344,885,794
7	Dinas Sosial	6	4.559.626.268

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Pagu Indikatif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	10	7,110,882,752
9	Dinas Pertanahan	7	3,542,567,907
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	40,887,730,122.10
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4,257,344,053
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	4,201,542,182
13	Dinas Perhubungan	2	6,918,615,760
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4	6.832.996.749
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	7,509,508,050
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7	6,861,431,789
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2	1,980,376,406
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	3,537,957,649
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	10	11.158.891.361
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	14	9,262,915,708
21	Sekretariat Daerah	3	30,126,287,931
22	Sekretariat DPRK	2	26,931,623,309
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	10.601.967.556,32
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	141,334,698,847
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	8,042,769,906
26	Inspektorat	3	7,931,647,243
27	Kecamatan Banda Sakti	6	3,591,794,902
28	Kecamatan Blang Mangat	6	2,879,941,803
29	Kecamatan Muara Satu	6	2,702,511,841
30	Kecamatan Muara Dua	6	2,831,337,256
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	5,116,004,336
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2	3,260,805,336
33	Sekretariat Baitul Mal	2	7,575,535,858
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	3	13.283.838.291
	Jumlah Total	187	816,489,376,141.11

Sumber: SIPD-RI, diolah 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2026 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun menggunakan matrik program,

kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD, memuat informasi mengenai:

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
3. Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
6. Lokasi Kegiatan;
7. Besaran dana yang dibutuhkan;
8. Sumber dana;
9. Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
10. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027;
11. Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaaan Kota Lhokseumawe dituangkan dalam bentuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang disajikan dalam tabel 5.2 berikut ini:

TABEL 5.2
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						1,484,329,412.00							1,621,800,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,484,329,412.00							1,621,800,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,484,329,412.00							1,621,800,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
1	1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat MPD	-			B/62,8 Kategori/Nilai	1,383,612,816.00						-	1,426,800,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	8,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe	-	10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan pada Sekretariat MPD	-			12 Laporan	921,696,336.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe	-	879,603,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
		1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			168 Orang/bulan	921,696,336.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		879,603,824.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrtasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	60,140,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe	-	61,197,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
		1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			40 Paket	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		9,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			230 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		6,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
		1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			360 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		1,197,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Dokumen	330,176,480.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe	-	351,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		1,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				372 Laporan	329,176,480.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		350,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			19 Unit	63,600,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe	-	125,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	MPD Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
2	1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Rekomendasi yang Dihasilkan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh	-			100 Persen	100,716,596.00						-	195,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Jumlah rekomendasi di bidang pendidikan yang dihasilkan	-			2 Rekomendasi	40,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pendidikan di Kota Lhokseumawe	-	45,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh				3 Satuan Pendidikan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pendidikan di Kota Lhokseumawe		45,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Persentase Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh yang Diselenggarakan	-			30 Persen	5,716,596.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	-	35,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah				1 Dokumen	5,716,596.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh yang Diselenggarakan	-			100 Persen	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Lhokseumawe	-	45,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1	01	08	7.04	0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Meningkatkan Kompetensinya				30 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Lhokseumawe		45,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Persentase Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh yang diselenggarakan	-			60 Persen	55,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	-	70,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
	1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh				2 Satuan Pendidikan	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
	1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya				3 Satuan Pendidikan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						222,524,776,805.00							192,172,944,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						221,891,776,805.00							190,937,700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						221,891,776,805.00							190,937,700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	-			61.65 Persen	177,620,129,260.00							134,071,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	215,204,780.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	-	82,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	185,704,780.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15 Dokumen	5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15 Dokumen	2,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1500 Orang/bulan	175,939,797,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-	123,987,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1300 Orang/bulan	175,902,797,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		123,950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		4,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		3,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	-			5 Paket	35,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	55,313,100.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-	360,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	12,504,600.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1300 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20 Dokumen	2,808,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	172,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-	172,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		2,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			3 Unit	152,105,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-	808,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		370,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				3 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		3,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	87,105,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menurut	-			4 Laporan	895,709,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-		8,472,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			2,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	127,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			260,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	26,398,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	734,810,880.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			8,160,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			2 Unit	155,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	-		155,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				200 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe			50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	-			99,05 Persen	43,844,747,545.00						-		56,031,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-			2 Unit	27,316,994,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	-		25,490,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	159,180,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	1,149,900,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	99,790,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				5 Ruang	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	61,550,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/ Berat				5 Unit	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				100 Paket	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				100 Paket	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				200 Paket	70,175,200.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				200 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				110 Satuan Pendidikan	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				110 Satuan Pendidikan	15,000,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		15,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				110 Orang	57,525,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	206,050,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		840,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	270,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		270,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				200 Unit	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Ditik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				50 Paket	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				250 Buku	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	750,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2,600,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	450,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				110 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	2,822,823,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan smp yang dikelola	-			36 Satuan Pendidikan	12,607,115,645.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	-	21,992,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah			15		16
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	109,350,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	48,800,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	361,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	200,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				150 Paket	363,715,550.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				100 Paket	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				100 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				215 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,377,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	250,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				25 Satuan Pendidikan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				25 Satuan Pendidikan	6,700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		7,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				60 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				200 Unit	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				115 Satuan Pendidikan	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	209,950,095.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		610,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				25000 Buku	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	58,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				400 Paket	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				20 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan PAUD yang dikelola	-			129 Satuan Pendidikan	3,195,637,900.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	-	6,417,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	145,649,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				250 Paket	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				250 Paket	20,852,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				100 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	50,177,400.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				33 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		217,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				76 Satuan Pendidikan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				150 Satuan Pendidikan	2,000,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		2,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				300 Orang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				20 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				5 Unit	32,363,200.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				250 Paket	25,995,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				115 Satuan Pendidikan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dirhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	95,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal yang dikelola	-			2 Satuan Pendidikan	725,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	2,131,400,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				60 Peserta Didik	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				22 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		86,400,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				2 Satuan Pendidikan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				220 Unit	250,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dirhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				200 Peserta Didik	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				200 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-			100 Persen	156,900,000.00						-	555,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-			2 Dokumen	126,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	-	315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				4 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				100 Buku	11,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				110 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-			2 Paket	30,900,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumaue	-	240,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				4 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				300 Buku	30,900,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-			0,60 Persen 30,16 Persen	150,000,000.00						-	160,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			4 Dokumen	150,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pengandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumaue	-	160,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
7	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	-			100 Persen	120,000,000.00						-	120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-			4 Dokumen	60,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-			2 Dokumen	60,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						633,000,000.00							1,235,244,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						633,000,000.00							1,235,244,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
8	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	-			16 Persen	210,000,000.00						-	595,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-			1 Laporan	15,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	115,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-			1 Laporan	195,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	-	-	480,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				15 Objek	165,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	-		450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	-		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	-		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
9	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-			60 Persen	80,000,000.00						-	80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-			1 Laporan	80,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
10	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-			50 Persen	65,000,000.00						-	115,244,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tempat bersjarah yang dilestarikan	-			10 Objek	65,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	115,244,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah			15		16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	22	04	2.01	0001		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01	0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				20 Unit	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,244,255.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01	0003		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
11	2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	-			24,52 Persen	233,000,000.00						-		300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang tersedia	-			3 Objek	55,000,000.00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-		120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola	-			3 Objek	100,000,000.00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02	0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.03			Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek cagar budaya yang diterbitkan izinnya	-			2 Objek	78,000,000.00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-		80,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0001		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				5 Objek	48,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.03	0002		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
12	2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	-			13,76 Persen	45,000,000.00						-		145,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-			20 Unit	45,000,000.00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-		145,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0001		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				300 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	06	2.01	0002		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	06	2.01	0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				2 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2		22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			20 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2		22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi			20 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Dinas Kesehatan					125,971,019,886.00							95,856,497,887.00	DINAS KESEHATAN
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					125,971,019,886.00							95,856,497,887.00	DINAS KESEHATAN
	1		02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					125,971,019,886.00							95,856,497,887.00	DINAS KESEHATAN
13	1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-		100 Persen	88,731,680,205.00						-	63,358,745,188.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		3 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	85,795,020,845.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	55,174,369,188.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			11100 Orang/bulan	85,795,020,845.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		55,174,369,188.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	85,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			30 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		60,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	187,280,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	522,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		250,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1		02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		100,000,000.00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,280,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		2,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		120,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	100,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		100,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,891,079,360.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	6,591,876,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		1,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				250 Laporan	749,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		650,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10000 Laporan	1,140,179,360.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		5,940,376,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	778,300,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	860,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	63,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		35,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	660,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		595,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				4 Unit	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		150,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				30 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		80,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	-			100 Persen	36,167,900,259.00						-		31,565,100,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			7 Faskes	13,771,393,190.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat	-	9,065,000,000.00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	164,628,061.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				7 Unit	681,070,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		1,250,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				20 Unit	4,450,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		1,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	2,602,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH KESEHATAN, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		1,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	350,872,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		105,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				250 Paket	5,404,822,629.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		2,500,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				250 Paket	118,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		210,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	22,190,847,069.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat	-	22,219,750,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4476 Orang	618,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		262,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4272 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		105,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4069 Orang	121,220,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		84,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19613 Orang	340,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		367,500,000.00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51512 Orang	232,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		262,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				152964 Orang	40,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		231,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15281 Orang	185,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		315,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41837 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		210,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4566 Orang	178,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		367,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				448 Orang	204,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		63,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5205 Orang	196,233,700.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		420,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8805 Orang	72,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		210,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100 Dokumen	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	367,091,305.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		367,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	125,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		63,000,000.00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	630,359,489.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		73,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				90 Dokumen	216,921,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		199,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		84,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	202,310,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	80,850,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	720,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		105,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	688,160,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		525,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				7 Dokumen	13,376,617,843.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		12,950,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		26,250,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		73,500,000.00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				7 Dokumen	1,040,531,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		2,850,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	1,487,169,732.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		840,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		42,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		52,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	90,152,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	401,731,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		410,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	62,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		65,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	182,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		185,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			7 Faskes	180,660,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Puskesmas dan Jaringannya	-	236,250,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	180,660,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Puskesmas dan Jaringannya		236,250,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang memperoleh Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			10 Faskes	25,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan	-	44,100,000.00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-			10 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan		44,100,000.00	DINAS KESEHATAN	
15	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	-			6.96 Persen	446,962,422.00						-	335,955,542.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	-	67,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan		26,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan		41,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	67,371,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Puskesmas dan Jaringannya	-	72,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Puskesmas dan Jaringannya		26,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	57,371,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Puskesmas dan Jaringannya		46,500,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			40 SDMK	349,591,422.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan	-	196,455,542.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	349,591,422.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tenaga Kesehatan		196,455,542.00	DINAS KESEHATAN	
16	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	-			100 Persen	456,633,000.00						-	361,026,851.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			10 Tempat	108,543,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat	-	90,100,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	108,543,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		90,100,000.00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-			2 Dokumen	5,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Sarana Produksi Alkes Kelas I dan Industri Rumah tangga	-	65,926,851.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Sarana Produksi Alkes Kelas I dan Industri Rumah tangga		65,926,851.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			1 Dokumen	98,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Industri Rumah tangga	-	25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	98,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Industri Rumah tangga		25,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			1 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	-	60,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Tempat Pengolahan Makanan (TPM)		60,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-			1 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pengusaha Makanan Jajanan	-	50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pengusaha Makanan Jajanan		50,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-			10 Produk	225,090,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat	-	70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				10 Unit	225,090,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat		70,000,000.00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-			100.00 Persen	167,844,000.00							-	235,670,306.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat	-	80,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat		80,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang berprilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			20 Keluarga	40,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat	-	95,670,306.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat		55,670,306.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				20 Keluarga	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat		40,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	97,844,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat	-	60,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	97,844,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat		60,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						65,264,662,954.69								43,182,555,324.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						65,264,662,954.69								43,182,555,324.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						53,268,023,957.84								39,821,305,324.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
18	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8,239,532,017.77							-	8,122,995,233.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	131,031,767.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kemandirian energi	-	-	137,583,355.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	128,931,767.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kemandirian energi	-		135,378,355.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	-		2,205,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	5,936,627,038.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur	-	6,181,038,847.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/bulan	5,936,627,038.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		6,181,038,847.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	211,197,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur	-	221,756,850.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	36,750,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		38,587,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				833 Paket	21,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		22,050,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15,750,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana	Aparatur		16,537,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1,197,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		1,256,850.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	136,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		143,325,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			6 Unit	897,449,860.77			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur	-	489,286,511.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	763,487,153.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		434,161,511.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	133,962,707.77	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Aparatur		55,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	793,361,352.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur	-	833,029,420.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	2,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		2,205,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	378,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		396,900,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				852 Laporan	413,261,352.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur		433,924,420.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			9 Unit	269,865,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Aparatur	-	260,300,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34,965,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Aparatur		36,713,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	129,900,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Aparatur		113,337,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				2 Unit	84,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Aparatur		88,200,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				4 Unit	21,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Aparatur		22,050,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
19	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	-			11.53 Persen	3,648,845,785.00					-		11,890,210,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Abrasi Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	-			74.2 Persen	2,129,011,111.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	1,890,210,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1,300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		315,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				2 Titik	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		210,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	629,011,111.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		1,575,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,519,834,674.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	10,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,5 KM	819,834,674.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	02	2.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun				0,5 KM	700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
20	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	-			24.06 Persen 67.33 Persen	3,400,868,323.16					-		4,036,876,413.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum melalui SPAM Jaringan Pipa dan Bukan Jaringan Pipa	-			16.39 Persen	3,400,868,323.16			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	4,036,876,413.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				26 Unit	475,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		420,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		210,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				350 Liter/Detik	2,725,868,323.16	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		3,406,876,413.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
21	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (AirLimbah Domestik Layak dan Aman)	-			93.89 Persen	700,000,000.00					-		1,316,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	-			69.28 Persen	700,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-		1,316,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				133 M³/Hari	700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat			816,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				6 Desa	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
22	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	-			76.02 Persen	4,455,400,000.00					-		3,000,548,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dikelola dan Dikembangkan Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	-			104.501 Km 70.60 Persen	4,455,400,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-		3,000,548,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				4 Sistem Drainase Perkotaan	861,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat			583,664,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				10 Sistem Drainase Perkotaan	3,294,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat			2,116,884,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat			300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
23	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	-			35.38 Persen	250,000,000.00					-		175,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	07	2.01		Pengelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur pada Permukiman yang baik	-			35.38 Persen	250,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-		175,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				18 Rumah Tangga	250,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat			175,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
24	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	-			83.33 Persen	2,700,000,000.00							-	1,183,362,778.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			11.54 Persen	2,700,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	1,183,362,778.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				3 Bangunan Gedung	2,700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH- PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		1,183,362,778.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
25	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	-			66.40 Persen	29,512,627,831.91							-	9,806,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	-			284.19 Km 78.91 Persen	29,512,627,831.91			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	9,806,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		507,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				412.47 KM	450,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		53,025,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				3,696 KM	7,130,857,151.91	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		2,100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	1,000,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		1,015,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				33,33 Meter	311,498,179.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		2,030,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2,3 KM	20,119,772,501.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH- PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		4,100,600,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
26	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	-			32.56 Persen	82,000,000.00							-	50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi	-			2 Person	82,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-	50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	82,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
27	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	-			62.08 Person	278,750,000.00						-	240,187,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	176,250,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	-	-	185,062,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	-		157,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	26,250,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	-		27,562,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen 1 Dokumen	102,500,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Pemko Lhokseumawe	-	55,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	102,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Pemko Lhokseumawe		55,125,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						11,996,638,996.85							3,361,250,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
28	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	-			9.33 Person	678,942,824.82						-	956,250,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Sarana Prasarana yang Terbangun di Kawasan Kumuh Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	-			18.27 Person 29.58 Person	678,942,824.82			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	956,250,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				4 Unit Rumah	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		157,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				15.43 Ha	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5 Unit	388,942,824.82	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		498,750,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
29	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	-			81.96 Persen	2,626,106,295.34						-	1,155,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	-			29.58 Persen	2,626,106,295.34			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat	-	1,155,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		157,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				20 Unit	2,476,106,295.34	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		997,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
30	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-			47.55 Persen	8,691,589,876.69						-	1,250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Unit Rumah Terfasilitasi PSU	-			73.28 Persen	8,691,589,876.69			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-	1,250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				5 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				1 Lokasi	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				4 Lokasi	8,481,589,876.69	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi	Masyarakat		1,050,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						8,337,943,218.00							9,003,826,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8,337,943,218.00							9,003,826,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8,337,943,218.00							9,003,826,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
31	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPBD Kota Lhokseumawe	-			B/61,00 Predikat/Nilai	7,313,338,818.00						-	7,993,826,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			15 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	BPBD Kota Lhokseumawe	-	15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	BPBD Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	5,940,580,418.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	5,757,968,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/bulan	5,940,580,418.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		5,757,968,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			1 Laporan	-			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	BPBD Kota Lhokseumawe	-	5,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	BPBD Kota Lhokseumawe		5,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Laporan	87,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	100,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	77,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		85,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administرات Umum Perangkat Daerah	-			5 Laporan	406,682,300.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	529,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		17,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,142,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	302,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		380,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		1,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			2 Jenis	56,420,100.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16,852,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	39,567,600.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	329,356,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	888,178,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		2,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	125,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		130,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	202,856,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	756,178,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Perangkat Daerah	-			4 Jenis	483,300,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe	-	548,680,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		36,630,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	380,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		402,050,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
32	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	-			100 Persen	872,316,000.00						-	780,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Daerah	-			100 Persen	365,000,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	95,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	65,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		95,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			100 Persen	236,036,300.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	375,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Penyelindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelindungan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	41,628,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	40,303,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	31,229,200.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	32,875,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-			100 Persen	164,997,900.00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	150,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	31,997,900.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	133,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	-			100 Persen	106,281,800.00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	160,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	39,136,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonia dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	36,955,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-			1 Dokumen	30,190,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
33	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-			100 Persen	152,288,400.00						-	230,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	-			3 Kegiatan	143,988,400.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	215,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	13,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				7 Orang	75,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	55,588,400.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		95,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			1 Laporan	8,300,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Kota Lhokseumawe	-	15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	8,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah						10,344,885,794.00							9,651,145,794.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10,344,885,794.00							9,651,145,794.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10,344,885,794.00							9,651,145,794.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
34	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-		10,098,535,352.00						-	7,569,234,711.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-		10,700,000.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	122,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		12,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		32,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	700,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		1,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		17,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Berita Acara	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9,230,764,052.00			-		-	-		4,422,594,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	9,230,764,052.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		4,330,594,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		17,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1		05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD			6 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			12 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	5,981,000.00			-		-	-	-	915,875,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		1,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			350 Paket	2,981,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		848,375,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		6,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			17 Orang	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		27,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			55 Orang	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		23,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	11,015,000.00			-		-	-	-	200,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	2,875,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		33,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			500 Paket	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan		28,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1		05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan		2,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		120,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9,308,600.00			-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	532,185,933.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		1,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4,430,760.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		216,685,933.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		120,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		23,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		1,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4,877,840.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		170,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	817,106,500.00			-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,124,579,778.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,088,900.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		3,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	122,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		135,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah			15		16
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	692,517,600.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		979,579,778.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,660,200.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	252,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4,775,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		40,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5,313,200.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		170,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1,152,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2,420,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
35	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketenteraman	-			100 Persen	207,049,850.00						-	1,466,893,162.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Periode Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	176,549,850.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe	-	1,062,893,162.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7,207,850.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				30 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				8 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		12,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPhngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				50 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		18,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				7 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				534 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		160,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				54 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		32,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	169,342,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		350,893,162.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				30 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				30 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas				1173 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	2,900,000.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	186,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				3 unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				5 laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				50 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				60 Laporan	1,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	27,600,000.00			-	-	-	-	218,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				6 Dokumen	200,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				5 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				5 Laporan	2,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		23,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
36	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	39,300,592.00						-		615,017,921.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	-	-			-	39,300,592.00						-	-	615,017,921.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan				6 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam				1 Laporan	21,545,292.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		252,017,921.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam				1 Laporan	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		28,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam				30 Laporan	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota				30 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		50,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				1 Laporan	2,755,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		35,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim				30 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		65,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi				30 Doumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1					Dinas Sosial						4,559,626,268.00								4,507,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,559,626,268.00								4,507,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4,559,626,268.00								4,507,500,000.00	DINAS SOSIAL
37	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B (65.50) Kategori (Nilai)	3,519,626,268.00						-		3,837,500,000.00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			20 Dokumen	17,170,274.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4,170,274.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	3,009,015,994.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	3,000,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	3,009,015,994.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBELAJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		3,000,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	106,140,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	180,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		130,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	-			17 Unit	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	120,000,000.00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	257,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	302,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		2,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		230,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			60 Unit	99,800,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	-	205,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				3 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				7 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Persentase Pekerja Sosial/tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	-			59.32 Persen 70.00 Persen 79.66 Persen 80.00 Persen	145,000,000.00						-	170,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-			78.72 Persen	145,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	170,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				15 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				20 orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
39	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	-			100 Persen	720,000,000.00						-	360,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	-			100 Persen	670,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	250,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	-			100 Persen	50,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	110,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS SOSIAL	
40	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			50.56 Persen	30,000,000.00						-	50,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			14214 Orang	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	50,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				93996 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				1000 Usulan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS SOSIAL	
41	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	-			100 Persen 60 Persen	120,000,000.00						-	30,000,000.00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	90,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-			100 Persen	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	30,000,000.00	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
42	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	-			100 Persen	25,000,000.00						-	60,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-			100 Persen	25,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	60,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS SOSIAL
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						7,110,882,752.00							7,611,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,110,882,752.00							7,611,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5,084,849,752.00							5,439,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DP3AP2KB	-			B- 68.60 Nilai - Prediket	4,316,689,152.00						-	4,528,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	15,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	-			12 Laporan	3,811,028,472.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	3,890,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3,811,028,472.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		3,890,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	8,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	8,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrait Umum	-			1 Dokumen	102,140,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	126,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		1,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	65,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	08	01	2.07		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			7 Unit	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	202,420,680.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	261,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		1,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	46,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	155,220,680.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		210,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			5 Unit	148,100,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe	-	175,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	84,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		90,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-			2 Persen 96.04 Persen	45,000,000.00						-	70,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi PUG dan PPRG	-			34 OPD	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD Kota Lhokseumawe	-	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				15 Lembaga	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Terlibat di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas	-			30 Orang	15,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Organisasi Perempuan	-	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				15 orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Organisasi Perempuan		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-			1 Dokumen	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Organisasi Perempuan	-	30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Organisasi Perempuan		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
45	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	-			74.29 Persen	215,300,000.00							-	231,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			90 Orang	65,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,	-	75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.01	0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				20 Lembaga	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		55,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	-			50 Layanan	120,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	121,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 orang	120,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		121,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	-			50 Layanan	29,800,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,	-	35,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				35 orang	29,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		35,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
46	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga Puspaga yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	-			26.5 Persen	20,000,000.00							-	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	08	04	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	PUSPAGA Gampong	-	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				7 Lembaga	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	PUSPAGA Gampong		25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
47	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, evaluasi dan atau penyusunan kebijakan	-			44.12 Persen	20,000,000.00						-	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Pengajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Instansi terkait	-	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Instansi terkait		25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
48	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-			65.95 Persen	116,260,600.00						-	190,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-			26 Organisasi	96,260,600.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal	-	160,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	38,059,700.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal		70,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	08	06	2.01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	15,095,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	30,105,600.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal		40,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	13,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak	-			3 Layanan	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Anak Kota Lhokseumawe	-	30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				6 Lembaga	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Anak Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
49	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak	-			68.75 Persen 71.43 Persen	351,600,000.00						-	370,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak	-			1 Kegiatan	93,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pengandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,	-	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota				3 Kegiatan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		85,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota				1 Laporan	13,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	08	07	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapat layanan Komprehensif	-			50 Anak AMPK	200,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Anak Korban Kekerasan	-	210,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUNGAN DAN ANAK, INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Anak Korban Kekerasan		210,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus	-			50 Orang	58,600,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait, lembaga terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,	-	60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				30 Orang	58,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUNAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	OPD terkait, lembaga terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,		60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2,026,033,000.00							2,172,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
50	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-			12.90 Bayi 2.28 Bayi	179,400,000.00							-	195,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Daerah dalam melaksanakan kuantitas pengendalian penduduk	-			1 Kebijakan	15,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Guru Bimbingan Kesiswaan	-	20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jujur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jujur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Guru Bimbingan Kesiswaan		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk	-			1 Dokumen	164,400,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	175,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	116,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	48,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
51	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	-			57.12 Persen 8.41 Persen	1,309,233,000.00						-	1,365,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-			1 Laporan	661,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	685,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	196,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		85,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	135,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		140,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				21 Organisasi	250,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		260,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penguluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	-			238 Orang	294,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	PKKBD dan Sub PKKBD	-	300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	14	03	2.02	0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				238 Orang	294,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	PKKBD dan Sub PKKBD		300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			29 Laporan	151,133,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pasangan Usia Subur	-	165,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	26,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pasangan Usia Subur		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				700 Orang	43,483,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pasangan Usia Subur		45,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	56,550,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pasangan Usia Subur		60,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				20 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pasangan Usia Subur		30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-			68 Kampung	203,100,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Kampung KB Kota Lhokseumawe	-	215,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				52 Kampung	183,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Kampung KB Kota Lhokseumawe		190,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0007		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Kampung KB Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	-			28.89 Persen	537,400,000.00					-	612,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	-			19 Kelompok	88,600,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	124,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	9,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				4 Unit	39,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		49,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tenaga Penyuluh PKB/PLKB	-			15 Orang	448,800,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Keluarga Berisiko Stunting	-	488,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	204,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Keluarga Berisiko Stunting		224,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	244,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Keluarga Berisiko Stunting		264,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Pertanian						3,542,567,907.00						4,384,250,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,542,567,907.00						4,384,250,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						3,542,567,907.00						4,384,250,000.00	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
53	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pertanahan	-			61.86/B Nilai/Predikat	3,392,240,000.00							-	4,034,250,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			2 Dokumen	10,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Kepala Bidang Dinas Pertanahan	-	17,750,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dnerah				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Kepala Bidang Dinas Pertanahan		15,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Kepala Bidang Dinas Pertanahan		2,750,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada Dinas Pertanahan	-			Laporan 2	2,915,796,347.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	3,515,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/bulan	2,915,796,347.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		3,500,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		5,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD				3 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		10,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	-			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	45,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		25,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		10,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		5,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		5,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	151,140,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	161,500,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendsusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		20,000,000.00	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		20,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		20,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		1,500,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		100,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			6 Unit	43,203,653.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	20,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	43,203,653.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		20,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	160,500,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	168,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		2,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	65,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		66,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	93,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		100,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Unit	111,600,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan	-	107,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		35,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	44,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		45,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		17,000,000.00	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	10	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				10 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Pertanahan		10,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
54	2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	-			3.20 Persen	25,000,000.00					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	-			3.89 Persen	25,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Organisasi Perangkat Daerah	-	50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah				3 dokumen Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Organisasi Perangkat Daerah		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
55	2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	-			39.08 Persen	25,000,000.00					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Jumlah Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	-			75 Persil	25,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Organisasi Perangkat Daerah	-	50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Organisasi Perangkat Daerah		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
56	2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	-			59.65 Persen	25,000,000.00					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	Jumlah SDM Pertanahan yang mengikuti Pembinaan Pertanahan	-			3 Orang	25,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Sipil Negara	-	50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	10	14	7.01	0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Sipil Negara		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
57	2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	-			59.65 Persen	-					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	Jumlah SDM Pertanahan yang mengikuti Pembinaan Pertanahan	-			3 Orang	-			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Sipil Negara	-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	14	7.01	0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Aparatur Sipil Negara		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
58	2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	-			61.25 Persen	25,000,000.00					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Jumlah Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	-			62.30 Persen	25,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
59	2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	-			60 Persen	25,000,000.00					-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	-			4 Kali	25,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		10	17	7.01	0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan				1 Layanan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
60	2		10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	-			60 Persen	25,327,907.00					-	50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN	
	2		10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	-			4 Kali	25,327,907.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat	-	50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
	2		10	17	7.01	0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	25,327,907.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat		50,000,000.00	DINAS PERTANAHAN
							Dinas Lingkungan Hidup						40,887,730,122.10							42,694,938,444.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						40,887,730,122.10							42,694,938,444.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						40,887,730,122.10							42,694,938,444.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61	2		11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	22,783,980,122.10					-	26,468,184,967.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2		11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	61,100,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	-	-	35,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	61,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	-		35,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,668,368,305.00			-	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	4,000,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3,668,368,305.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		4,000,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	403,780,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	140,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				423 Paket	363,780,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan kramanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan	-			12 bulan	1,364,849,300.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	365,121,651.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	36,644,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		52,710,200.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1150 Paket	1,199,460,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		44,581,451.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	26,465,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	2,280,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		2,880,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		234,950,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terbagunnya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-				162,787,100.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	54,751,400.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	108,035,700.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13,761,397,177.10			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	19,342,441,716.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		5,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2878 Laporan	13,074,248,019.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			18,655,292,516.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				367 Laporan	682,149,158.10	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			682,149,200.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3,351,698,240.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			2,475,621,600.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43,460,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			47,916,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	3,028,312,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			2,147,705,600.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,026,240.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	179,900,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			180,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
62	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kab/ Kota	-			Ada Ada/Tidak	347,250,000.00						-			426,572,650.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01		Rencana Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Lingkungan Hdup	-			3 Dokumen	95,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-			95,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe				40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe				25,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe				30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	-	-			-	252,250,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-			331,572,650.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	41,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,322,650.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				2 Dokumen	85,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Lhokseumawe		85,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	26,250,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		26,250,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				2 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		180,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
63	2		11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-		-	9,183,600,000.00						-	869,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2		11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-		-	8,646,600,000.00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	332,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	8,354,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				2 Kegiatan	17,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		17,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				4 Lokasi	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				4 Paket	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.01	0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup				1 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah			15	16
1	2	11	03	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	285,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	285,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi			3 Lokasi	100,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan kreamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0			0 0	150,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.02	0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			7 Laporan	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-		-	252,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	252,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	0			0 0	40,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			2 Kegiatan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			1 Kegiatan	47,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		47,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			1 Kegiatan	45,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan kreamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		45,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	0			0 0	50,000,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	03	2.03	0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
64	2		11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-		-	1,910,900,000.00						-	1,269,999,998.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-		-	1,910,900,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	1,269,999,998.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		239,999,998.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				12 Orang	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		50,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	1,620,900,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		800,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
65	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	170,000,000.00						-		170,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	80,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	90,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-		90,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-		90,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	80,000,000.00						-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				3 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	170,000,000.00						-	170,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	70,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	100,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				3 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	189,000,000.00						-	189,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	189,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	189,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				204 Dokumen	61,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		61,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				68 Keluarga	68,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		68,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempo k masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempo k masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	6,053,000,000.00						-	13,052,180,829.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	11	11	2.01		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					Pengelolaan Sampah	-	-			-	5,933,000,000.00		-		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	12,932,180,829.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			68 Kelompok	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			2 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			5 Unit	4,692,350,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH- PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		11,822,180,829.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			1 Dokumen	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		90,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			8 Unit	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			20000 Ton	130,650,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah			8 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0027	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus			1 Dokumen	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.01	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan			10 Unit	500,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiaptiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	-	-	120,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	-	-	120,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2		11	11	2.03	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				3 Laporan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	-			80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			40,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						4,257,344,053.00							6,602,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,257,344,053.00							6,587,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2		12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,257,344,053.00							6,587,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
70	2		12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Disdukcapi Kota Lhokseumawe	-			68,85 Persen	3,357,344,053.00						-	4,390,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2		12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1260 Laporan 1 Tahun	2,566,054,853.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		2,800,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1120 Orang/bulan	2,566,054,853.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			2,800,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan 12 Bulan	26,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		140,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			100,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			40,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan 12 Bulan	104,140,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		250,400,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2		12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientansi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			45,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			8,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			10,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			2,400,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			100,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			10,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			7 Jenis	153,049,200.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		640,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			400,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	133,049,200.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong			180,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Periode Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan 12 Bulan	345,700,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-		346,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		1,800,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	144,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		144,200,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		200,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			23 unit 12 Bulan	142,400,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	189,100,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		40,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	59,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		59,100,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		5,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		5,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		55,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				9 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
71	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			20.00 Persen 47.00 Persen 71.07 Persen	215,000,000.00							-	570,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-			5 Dokumen 8 Dokumen	55,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	170,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				1200 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				3 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	-			3 Dokumen	105,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	115,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				2 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		90,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			5 Laporan 8 Dokumen	44,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	165,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				3 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				68 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				3 Dokumen	14,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Periode Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			1 Laporan 12 Bulan	10,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	120,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		80,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
72	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kelahiran Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	-			100 Persen 99,18 Persen	145,000,000.00						-	625,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	-			5 Dokumen	65,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	175,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5 Dokumen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		45,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				5 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				10 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5000 Paket	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			1 Laporan 11 Laporan	75,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	265,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	25,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil				5 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		40,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				37 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		45,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	12	03	2.02	0011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			1 Laporan 4 Laporan	5,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	185,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				5 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				20 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		80,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
73	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	-			1 Laporan	530,000,000.00						-	987,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-			4 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	62,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		20,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				2 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		12,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	12	04	2.02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Dokumen	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		30,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			8 Laporan 5 Laporan	480,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	770,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		60,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				4 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	455,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		540,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				7 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi				3 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		40,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			2 Laporan 3 Laporan	40,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	125,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		25,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			5 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2		12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			6 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		50,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
74	2		12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	-		1 Dokumen Ada Ada	10,000,000.00						-	15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2		12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan	-		2 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong	-	15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2		12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong		15,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong					4,349,042,182.00							5,601,691,785.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4,349,042,182.00							5,601,691,785.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2		13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4,349,042,182.00							5,601,691,785.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
76	2		13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-		B / 62.70 Persen	3,523,542,182.00						-	4,277,951,785.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2		13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		15 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2		13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2		13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Berita Acara	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	3,006,423,738.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		2,665,195,890.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				643 Orang/bulan	3,006,423,738.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			2,660,195,890.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		86,849,525.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			51,849,525.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			30,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2		13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	97,280,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		152,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				235 Dokumen	2,280,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			2,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Unit	59,612,364.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		788,834,913.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			605,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			87,034,913.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2		13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			60,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	59,612,364.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		36,300,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	274,546,080.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	389,223,457.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,980,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		2,420,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		108,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		18,150,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	176,566,080.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		260,653,457.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	75,680,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	155,848,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36,630,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		40,293,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	28,050,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		30,855,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		60,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				10 Unit	11,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
77	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	-			14,71 Persen	10,000,000.00					-		72,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	02	2.01		Pengelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	-			10 Desa	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Gampong	-		72,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya				68 Desa	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Gampong			12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				68 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Gampong			60,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
78	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	-			7,35 Persen	10,000,000.00					-		36,300,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Kerja Sama Antar Desa	-			5 Desa	10,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemerintah Gampong	-		36,300,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemerintah Gampong			12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemerintah Gampong			12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kendusivitas di seluruh wilayah Aceh Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Pemerintah Gampong			12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
79	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	-			51,47 Persen 68 Desa 95,00 Persen	386,500,000.00					-		484,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			</																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				68 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				68 Desa	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		60,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong		30,250,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
80	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-			54,10 Persen 76,47 Persen	419,000,000.00						-	730,840,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	-			68 Desa	419,000,000.00			Memperkuat pengelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	-	730,840,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		6,050,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	05	2.01	0002	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	33,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		95,590,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		36,300,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0004	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				68 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		60,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0005	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		181,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0008	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		12,100,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
	2	13	05	2.01	0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	286,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)		314,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	
						Dinas Perhubungan						6,918,615,760.00								3,177,700,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,918,615,760.00								3,177,700,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6,918,615,760.00								3,177,700,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
81	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	-			B (60,90) Kategori (Nilai)	4,633,219,780.00							-	1,988,700,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	65,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	65,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan		75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	2,650,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah ASN Penerima Gaji	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan Orang/bulan	2,650,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah ASN Penerima Gaji		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan pada Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	5,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Laporan	-	5,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Laporan		5,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	101,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-	83,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	51,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah		53,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah		30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	251,200,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan	-	244,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		38,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		1,200,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan		150,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Unit	86,408,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	130,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	26,408,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	806,311,280.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	713,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		130,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	683,311,280.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		580,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			56 Unit	668,300,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan Pengguna	-	738,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan Pengguna		33,300,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	595,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan Pengguna		590,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan Pengguna		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	ASN Dinas Perhubungan Pengguna		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
82	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Laut. Konektivitas Darat. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal.	-			0 Persen 2.28 Indeks 62.50 Persen	2,285,395,980.00					-	1,189,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kota	-			1 Dokumen	100,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan	-	180,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan		180,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	-			131 Unit	1,728,591,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan	-	85,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Unit	1,573,591,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH- PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan		-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekengkapan Jalan	Jumlah Perlekengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				15 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Jalan		85,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	-			2 Unit	100,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Terminal	-	600,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Terminal		500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat Pengguna Terminal		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-			1 Dokumen	50,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat sebagai Pengguna Parkir	-	5,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Masyarakat sebagai Pengguna Parkir		5,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Periode penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	-			12 Bulan	65,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Masyarakat yang memiliki Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Masyarakat yang memiliki Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2		15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Masyarakat yang memiliki Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2		15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah Masyarakat yang memiliki Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		15,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2		15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Periode pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan			12 Bulan	241,804,480.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	-	274,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2		15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			12 Laporan	241,804,480.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		274,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN	
							Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian					6,882,996,749.00							7,955,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6,882,996,749.00							7,955,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2		16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6,792,996,749.00							7,845,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
83	2		16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Diskominfo	-		B (61.02) Indeks	3,332,996,749.00						-	3,685,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2		16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-		7 Dokumen	57,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	64,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2		16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		14,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-			1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital yang Terintegrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 laporan	2,265,133,709.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	2,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			420 Orang/bulan	2,265,133,709.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		2,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	50,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			5 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	-			1 Laporan	219,480,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	280,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			2 Paket	39,480,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		40,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			1 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		15,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			20 Laporan	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-			1 Laporan	350,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital yang Terintegrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	350,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	16	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital yang Terintegrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			26 Laporan	272,783,040.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	301,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		6,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	157,783,040.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		175,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			7 Unit	118,600,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	140,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	33,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		35,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	16	01		2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	01		2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			30 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
84	2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informas Publik Pemerintah Daerah(survei)	-		84,72 Persen	1,485,000,000.00						-	2,250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	02		2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Laporan	1,485,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, OPD dan Masyarakat	-	2,250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	02		2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			30 Permohonan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, OPD dan Masyarakat		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	02		2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			5 Rekomendasi	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, OPD dan Masyarakat		100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	02		2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			10 Media	1,085,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, OPD dan Masyarakat		2,000,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
85	2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	-		3,10 Indeks	1,975,000,000.00						-	1,910,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03		2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Dokumen	20,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumaue dan OPD	-	20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03		2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			2 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03		2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Laporan	1,955,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD	-	1,890,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				34 Perangkat Daerah	1,300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		1,500,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				4 Layanan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	225,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital yang Terintegrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang ditetapkan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		20,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						90,000,000.00							110,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
86	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-			1,01 Nilai	90,000,000.00						-	110,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	90,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD	-	110,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				34 Perangkat Daerah	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				34 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD		60,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						7,509,508,050.00							7,209,280,221.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
																			12	13
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,509,508,050.00							7,209,280,221.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7,234,508,050.00							6,947,280,221.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
87	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DPMTSPTK	-			B / 68,22 Predikat/ nilai	6,135,636,050.00						-	6,616,780,221.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK	-	22,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK		22,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada DPMTSPTK	-			12 Laporan	5,202,580,926.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK	-	5,488,674,301.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				696 Orang/bulan	5,202,580,926.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK		5,488,674,301.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	16,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK	-	20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	16,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	193,262,984.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK	-	207,240,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	61,122,984.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK		44,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	11,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMTSPTK		12,100,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		40,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		1,140,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		110,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			10 Unit	100,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK	-	110,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		110,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	454,492,140.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK	-	618,065,920.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		2,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	211,426,220.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		231,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	241,065,920.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		385,065,920.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			25 Unit	149,300,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK	-	150,800,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		33,300,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	51,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		51,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		16,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
88	2		07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	-			86,49 Persen	903,872,000.00						-	135,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	-			2 Pelatihan	883,872,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	115,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	868,872,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				15 Lembaga	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			15 Lembaga	20,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
89	2		07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	-			10,03 Persen	130,000,000.00						-	130,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-			40 Orang	40,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	40,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			40 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			20 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin LPTKS yang Diterbitkan	-		1 Lembaga	25,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku			5 Lembaga	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi Pasar Kerja yang tersedia	-		1 Dokumen	65,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	65,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			425 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			50 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
90	2		07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	-		200 Orang	65,000,000.00						-	65,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan PP dan PKB	-		5 Perusahaan	35,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	35,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online			10 Perusahaan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Sikala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			1 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	07	05	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan Industrial	-			20 Kasus	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				15 Perkara	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						275,000,000.00							262,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
91	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-			525 Milyar	15,000,000.00						-	15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kerjasama Kemitraan Dibidang Penanaman Modal	-			15 Kegiatan Usaha	15,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Dengan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				5 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
92	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-			5,0 Persen	30,000,000.00						-	30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	-			2 Dokumen	30,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				4 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota				1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
93	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-			95,32 Persen	120,000,000.00						-	99,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			4 Laporan	120,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK	-	99,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		12,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				450 Pelaku Usaha	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		25,000,000.00	DINAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	45,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		22,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				320 Kegiatan Usaha	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		40,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
94	2		18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	-			46,31 Persen	90,000,000.00					-	98,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2		18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menyaji Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-			3 Laporan	90,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	98,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				55 Kegiatan Usaha.	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		32,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				225 Pelaku Usaha	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		33,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2		18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				220 Kegiatan Usaha	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		33,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
95	2		18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-			44,07 Persen	20,000,000.00					-	20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat	-			6 Dokumen	20,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan ekonomi berbasis potensi unggulan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK	-	20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				6 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPMPTSPTK		20,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
						Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						6,861,431,789.00							7,891,760,968.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,319,431,789.00							7,206,760,968.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6,319,431,789.00							7,206,760,968.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
96	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-			B/65.45 Predikat/Nilai	3,356,431,789.00						-	3,586,760,968.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			13 Dokumen	45,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	-	50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	45,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan		50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	-			14 Bulan	2,821,902,147.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar	-	3,005,393,104.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2,821,902,147.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		3,005,393,104.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	106,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar	-	117,040,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		38,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			20 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		5,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		5,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		1,540,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		66,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		5 Unit	45,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar	-	49,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	45,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		49,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.08			Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		3 Kegiatan	246,589,642.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar	-	264,147,864.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		1,650,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	79,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		87,340,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2		19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	165,689,642.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar		175,157,864.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		10 Unit	91,800,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disorapar	-	101,180,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	19	01		2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		36,630,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01		2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	25,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		28,050,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01		2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	18,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		20,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01		2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Disporapar		16,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
97	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	-			5 Persen	460,000,000.00						-	560,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terperdayakan dan berkembang	Rasio jumlah Pemuda, Pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terperdayakan dan berkembang	-			8 Persen	360,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe	-	450,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	85,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe		110,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe		110,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	85,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe		110,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan berkembang	-			2 Kegiatan	100,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam kota Lhokseumawe	-	110,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02		2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				16 Organisasi	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
98	2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	-			1 Persen	2,253,000,000.00						-	2,750,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang difasilitasi Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	-			8 Unit	50,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Atlit Olahraga Kota Lhokseumaue	-	200,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaa, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Atlit Olahraga Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Kegiatan	1,253,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	1,550,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	153,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	1,100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,300,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			90 Orang	200,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				50 Orang	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan tingkat kabupaten/kota	-			1 Organisasi	700,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	600,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota				1 Dokumen	700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		600,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan tingkat kabupaten/kota	-			1 Lembaga	50,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
99	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	-			100 Persen	250,000,000.00					-	310,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			5 Kegiatan	250,000,000.00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumaue	-	310,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				0 Organisasi	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe		60,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						542,000,000.00							685,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						542,000,000.00							685,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
100	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-			2 Persen	240,000,000.00						-	305,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			3 Kegiatan	240,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	305,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		130,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
101	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-			50 Persen	267,000,000.00						-	340,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			3 Kegiatan	267,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	340,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	82,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		130,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	160,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		180,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
102	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-			25 Persen	35,000,000.00						-	40,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekraf yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	-			25 Orang	35,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe	-	40,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
						Sekretariat Majelis Adat Aceh						1,980,376,406.00							1,867,143,046.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,980,376,406.00							1,867,143,046.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,980,376,406.00							1,867,143,046.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
103	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1,754,771,286.00						-	1,677,143,046.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	7,000,000.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	-	7,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		7,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Bulan	1,184,023,286.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	-	1,185,753,286.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1,184,023,286.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		1,185,753,286.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			6 Paket	62,390,000.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	-	22,640,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,250,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		4,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		2,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		1,240,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			10 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		5,400,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-			5 Unit	26,858,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh kota Lhokseumaue	-	100,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			6 Unit	26,858,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Sekreariat Majelis Adat Aceh kota Lhokseumawe	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh kota Lhokseumawe		100,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			134 Laporan	395,300,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	-	400,849,760.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		1,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			134 Laporan	394,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		399,849,760.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipethara dan dbayarkan Pajaknya	-			1 Unit	79,200,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	-	60,800,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	29,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		33,200,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			1 Unit	25,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		25,600,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			10 Unit	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Aparatur Sekreariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe		2,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
104	2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	-			100 persen	225,605,120.00						-	190,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	-			5 Jenis	120,000,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat dan Tokoh Adat	-	140,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	-			1 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat dan Tokoh Adat		70,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	-			50 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat dan Tokoh Adat		50,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	0	-			10 0	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat dan Tokoh Adat		20,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Meningkatnya Jumlah Kearifan Lokal	-			3 Jenis	45,000,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman Islam wilayah Kota Lhokseumaue	-	50,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	22	07	7.02	0001	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat				30 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman dalam wilayah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat				50 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman dalam wilayah Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Meningkatnya Jumlah pemahaman Adat Istiadat	-			5 Jenis	60,605,120.00			Memperkuat pengelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman dalam wilayah Kota Lhokseumawe	-	-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.03	0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan				150 Eksemplar	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman dalam wilayah kota Lhokseumawe		-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
	2	22	07	7.03	0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat				25 Unit	25,605,120.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kekhususan, Keistimewaan dan Perdamaian Aceh Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Kemukiman dalam wilayah kota Lhokseumawe		-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						3,537,957,649.00							7,243,950,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,537,957,649.00							7,243,950,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3,462,957,644.00							7,138,450,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
105	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	3,317,957,644.00						-	6,906,950,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen/Laporan	20,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	25,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	2,747,233,877.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	2,367,750,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/bulan	2,747,233,877.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		2,367,750,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	01	2.06		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	77,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	180,200,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		7,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		12,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		10,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		1,200,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Unit	83,348,923.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	250,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	83,348,923.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengediaan Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	254,574,849.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	3,836,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2		23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		3,500,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150,407,649.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		160,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86,167,200.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		160,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			13 Unit	135,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	-	148,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,700,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		40,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	76,900,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		78,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
106	2		23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	-			13.09 Persen	140,000,000.00						-	226,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			10 Dokumen	80,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	-	146,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2		23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				25 Perpustakaan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		18,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				3 Layanan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		16,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Eksemplar	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	60,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	-	80,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				6 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				2 Perpustakaan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		25,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				10 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		15,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				80 Lokus	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		20,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
107	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	5,000,000.00			-		-	-	5,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-	-	5,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				3 Eksemplar	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	-		5,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						100,000,000.00				105,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
109	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	-			17.54 Persen	75,000,000.00				89,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	30,000,000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe	-		41,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	45,000,000.00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe	-		48,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		16,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		32,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
110	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	-			35.71 Persen	-				16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-			2 Dokumen	-		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe	-		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		16,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
						Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan						11,158,891,361.00								10,228,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9,422,868,789.00								8,462,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,422,868,789.00								8,462,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
111	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B/64.50 Katagori/ Poin	9,372,868,789.00							-	8,347,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			15 Dokumen	50,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		65,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		65,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	8,179,868,789.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		7,000,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/bulan	8,179,868,789.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		7,000,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	226,500,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		282,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		30,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1150 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		2,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	160,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		200,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			13 Unit	71,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	71,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	605,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	723,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	2,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		3,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	205,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		220,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				708 Laporan	397,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		500,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			45 Unit	240,500,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	242,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	33,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	157,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		160,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				8 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		12,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
112	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	-			84.7 Persen	40,000,000.00						-	100,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	20,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	55,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		20,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	20,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	45,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		30,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
113	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-			44.00 Persen	10,000,000.00						-	15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	209042.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Didata	-			1 Kali	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	209042.010001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1,736,022,572.00							1,766,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					679,862,278.00							729,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
114	3	2503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-		14809.50 Ton	529,862,278.00						-	525,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	25032.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	25032.010001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia			12 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		5,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	25032.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Nelayan yang Terfasilitasi	-		11 Kelompok	509,862,278.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	495,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	25032.020001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			200 Orang	499,862,278.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH- PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		470,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	-	-	8 Kelompok	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	-	-	-	300 Rekomendasi	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
115	3		25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	-	-	2026.77 Kg	150,000,000.00					-	-	203,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	-	10,000,000.00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	30,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	-	-	12 Kelompok	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	30,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	-	140,000,000.00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	173,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	5,500,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				177 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		13,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	110,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		130,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,056,160,294.00							1,037,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
116	3		27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-			172415.25 Ha/Ton 20834.42 Ha/Ton 3.00 Persen	308,729,000.00					-		255,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-				5,000,000.00			-	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	10,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				10 Laporan	5,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		10,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunangan Kabupaten/Kota	-	-				194,300,000.00			-	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	100,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	194,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	-	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		100,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				10,000,000.00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				6 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			25,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-				99,429,000.00				-	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		120,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				5130 Dosis	99,429,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	-		Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			120,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
117	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-				280,000,000.00						-	-		300,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-				95,000,000.00				-	Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		100,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	95,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan Infrastruktur Berkualitas Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-			100,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-				185,000,000.00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-		200,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	-			7 Laporan	185,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		200,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
118	3		27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	-			10000 Ekor 43.75 Persen	10,000,000.00				-		20,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	20,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-			5 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		20,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
119	3		27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-			20 Persen 90 Persen	10,000,000.00					-		15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	10,000,000.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3		27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-			2 Ha	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		15,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
120	3		27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	-			23.5 Persen 25.00 Persen	447,431,294.00					-		447,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-		-	447,431,294.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-	-	447,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3 Unit	360,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		400,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3 Unit	82,431,294.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		35,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
	3		27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			4 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		12,000,000.00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	
							Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					9,262,915,708.00							7,812,935,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5,614,512,553.00							6,482,935,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2		17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5,614,512,553.00							6,482,935,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
121	2		17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM	-		B (65.9) Predikat	5,036,362,553.00						-		5,961,435,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2		17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-		7 Dokumen	55,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak mulia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	60,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2		17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	55,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak mulia Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		60,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			63 orang	3,562,022,553.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	4,389,815,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			59 Orang/bulan	3,562,022,553.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	4,389,815,250.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			1 Dokumen	20,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapaan Daerah	-			1 Dokumen	10,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	12,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-			1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	12,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Daerah	-			1 Laporan	15,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			2 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah SPJ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	167,140,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	195,200,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			8 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	27,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			13,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			1,200,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			120,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Jumlah Pengadaan Alat Modal Kantor	-			1 Unit 5 Unit	590,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berbubawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		595,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			300,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			200,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Alat Barang Jasa kegiatan kantor Jumlah Tenaga Pelayanan Pengelola Keuangan Yang Diberikan Honorarium	-			115 Unit 15 orang	421,500,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berbubawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		451,650,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-			1,650,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	220,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		230,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		220,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			30 Unit	195,700,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	215,270,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		40,260,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	79,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		87,010,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		33,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
122	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-			7.04 Persen	30,000,000.00						-	34,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-			15 Koperasi	30,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Koperasi	-	34,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				20 Unit Usaha	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Koperasi		22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Koperasi		12,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
123	2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	-			7.27 Persen	10,000,000.00				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat Penilaian Sehat	-			15 Koperasi	10,000,000.00			12,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	04	2.01	0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Koperasi	-		12,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
124	2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	-			10.56 Persen	50,000,000.00				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mendapat Bekal Pelatihan SDM Perkoperasian	-			25 orang	50,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pengurus Koperasi	-		60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01	0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				10 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pengurus Koperasi	-		60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
125	2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-			7,75 Persen	20,000,000.00				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat Fasilitas/Pendampingan Usaha	-			20 Koperasi	20,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pengurus Koperasi	-		25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0009		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota				20 Unit Usaha	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pengurus Koperasi	-		25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
126	2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (NIB)	-			1.57 Persen	398,150,000.00				DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang Melakukan tranformasi usaha formal (NIB)	-			100 UMKM	398,150,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM	-		275,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				100 Unit Usaha	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM	-		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	178,150,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM		5,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	07	2.01	0009	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				20 Unit Usaha	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM		25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				500 Unit Usaha	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				25 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	UMKM		80,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
127	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	-			2,24 Persen	70,000,000.00						-	115,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi	-			100 UMKM	70,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku UMKM	-	115,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				25 Unit Usaha	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku UMKM		60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku UMKM		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,648,403,155.00							1,330,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,375,000,000.00							1,029,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
128	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-			8 Persen	1,820,000,000.00						-	272,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direhab/Pemeliharaan	-			2 unit	1,800,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pasar Tradisional yang Terdata dalam KIB	-	250,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1,800,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pasar Tradisional yang Terdata dalam KIB		250,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang Pasar yang disosialisasikan terhadap ketertiban, kebersihan, serta kepatuhan terhadap pembayaran retribusi pasar	-			30 orang	20,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar	-	22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar		22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
129	3		30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	-			60.01 Persen	1,070,000,000.00						-	145,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Pasar Murah Yang Dilaksanakan				52 Laporan 20 Laporan	1,070,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9 Bahan Pokok dan Barang Penting	-	145,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9 Bahan Pokok dan Barang Penting		25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	1,050,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9 Bahan Pokok dan Barang Penting		120,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
130	3		30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	-			0.1 Juta USD	415,000,000.00						-	520,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran dagang dan promosi dagang yang diikuti Laporan Promosi Produk Ekspor Kota Lhokseumaue	-			8 Kegiatan/kali 1 Laporan	415,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar, Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	520,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20 Pelaku Usaha	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar, Masyarakat Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3		30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar, Masyarakat Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar, Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
131	3		30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	-			71.35 Persen	70,000,000.00					-	92,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3		30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	-			1 Laporan 9 Kali	70,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar	-	92,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar		22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				2 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pedagang Pasar		15,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					273,403,155.00							301,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
132	3		31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	-			5.27 Persen	233,403,155.00					-	262,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3		31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe Jumlah Laporan Kegiatan Peranan Masyarakat Terhadap IKM	-			1 Dokumen 1 Laporan	233,403,155.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe	-	262,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3		31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe		30,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe		55,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	108,403,155.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe		120,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				2 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe		27,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
133	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-			5 Persen	20,000,000.00						-	22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi untuk penerbitan izin	-			20 IKM	20,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	pelaku IKM	-	22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	pelaku IKM		22,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
134	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-			ada tersedia	20,000,000.00						-	17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedia Data informasi terkait perizinan industri	-			1 Dokumen	20,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	pelaku IKM	-	17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	pelaku IKM		17,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
						SEKRETARIAT DAERAH						30,226,287,931.00							38,540,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30,226,287,931.00							38,540,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						30,226,287,931.00							38,540,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
135	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi (KOD) Nilai Sakip Sekretariat Daerah	-			29,50 Nilai B/64,50 Predikat/Nilai	27,968,751,400.00						-	35,767,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	21,500,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah	-	25,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	21,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah		25,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	14,529,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai ASN dan PPPK di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	15,000,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4494 Orang/bulan	14,529,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai ASN dan PPPK di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		15,000,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	125,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	235,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	5,370,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	5,519,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	170,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		350,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,600,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		1,350,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		153,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	320,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		416,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	3,000,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		3,000,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			7 Unit	600,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	5,950,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		2,250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		2,500,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		450,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	400,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		750,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	2,817,146,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	2,512,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		12,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		850,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		350,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,057,146,400.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		1,300,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 Unit	2,052,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	3,550,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	756,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		950,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	376,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				5 Unit	400,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		850,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				4 Unit	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		500,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				4 Unit	320,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		750,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasonal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			12 Laporan	649,105,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	719,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	179,105,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		189,105,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4		01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			24 Orang/Bulan	400,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		450,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-		3 Laporan	300,000,000.00			Memperkuat reformasi polittik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	-	347,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	130,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		135,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		127,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe		85,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organtsasi	-		9 Dokumen	570,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	660,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			6 Dokumen	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		160,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			7 Laporan	285,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		300,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			5 Dokumen	165,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		3 Laporan	935,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	1,250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4		01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	215,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		300,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.14	0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	550,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		750,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	170,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
136	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-			100 Persen	1,507,536,531.00						-	1,735,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	-			8 Dokumen	530,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	630,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	210,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		230,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	110,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	210,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			3 Dokumen	472,536,531.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	475,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	195,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		200,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	152,536,531.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	125,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		125,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-			25 Dokumen	505,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	630,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	180,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		230,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				16 Kasus	260,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		300,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				70 Dokumen	65,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
137	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Tingkat Kematangan UKPBJ	-			100 Persen 2,5% (± 1) Deviasi Inflasi 3 Level	750,000,000.00						-	1,038,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-			11 Dokumen	300,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	373,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	140,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		170,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	110,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		150,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		53,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-			42 Dokumen	220,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	255,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		45,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	85,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-			8 Dokumen	230,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	410,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				5 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		240,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		42,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				5 Orang	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		127,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRK						26,931,623,309.00							27,091,932,563.00	SEKRETARIAT DPRK
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26,931,623,309.00							27,091,932,563.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						26,931,623,309.00							27,091,932,563.00	SEKRETARIAT DPRK
138	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat DPRK	-			65,50 Poin	23,603,623,309.00					-	-	23,662,932,563.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	11,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		11,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7,913,800,746.00			Memperkuat reformasi polittik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	7,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				756 Orang/bulan	7,913,800,746.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		7,000,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	592,640,000.00			Memperkuat reformasi polittik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	599,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		16,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	88,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		89,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		9,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	230,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		231,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	65,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		66,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	86,640,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		87,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		101,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,470,159,563.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,674,159,563.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		6,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	221,847,243.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		422,847,243.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		16,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,228,312,320.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		1,229,312,320.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,184,100,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,187,600,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	872,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		873,600,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	76,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		77,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	215,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		216,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1,005,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,658,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				20 Laporan	330,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		481,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				30 Laporan	375,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		626,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				10 Laporan	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		551,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	11,162,923,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	11,165,173,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				300 Orang/Bulan	10,771,673,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		10,771,673,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	266,250,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		267,500,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				1 Orang	125,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		126,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	240,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	342,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				3 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	02	01	2.16	0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	220,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		321,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
139	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	-			100 Persen	3,328,000,000.00					-		3,429,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-		-	-	275,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	278,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		16,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				30 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		201,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				22 Dokumen	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		61,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-		-	-	245,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	250,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				12 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				12 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				12 Dokumen	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		71,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				12 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		101,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	815,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	923,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10 Laporan	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		251,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20 Laporan	270,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		271,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				10 Laporan	210,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		211,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		121,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		11,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		11,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		26,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	1,436,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,442,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		201,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		151,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				12 Orang	181,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		182,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	700,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		701,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		6,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		201,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	255,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	258,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		51,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		6,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				12 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		201,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	105,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	6,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4		02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			1 Laporan	105,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		6,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-		-	-	150,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	152,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		51,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK		
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun			1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		101,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK		
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-		-	-	47,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	120,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK	
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		11,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK		
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK		
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			20 Dokumen	17,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		88,000,000.00	SEKRETARIAT DPRK		
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						7,623,074,456.32							7,364,033,787.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7,623,074,456.32							7,364,033,787.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01				PERENCANAAN						7,219,074,456.32							7,277,033,787.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
140	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-		B (69,10) Predikat (Nilai)	6,097,190,651.32						-		5,906,787,348.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-		9 Dokumen	13,700,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-		15,070,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	13,700,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	15,070,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada Bappeda	-			12 Laporan	5,203,438,491.32			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	4,968,227,188.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/bulan	5,203,438,491.32	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		4,968,227,188.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	10,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		5,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		5,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	40,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				42 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	185,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumaue	-	198,154,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		33,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1150 Paket	24,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		26,400,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		27,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		1,254,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			9 Unit	95,196,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	86,100,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		30,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		28,600,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	95,196,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		27,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Dokumen	377,116,160.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	393,876,160.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		3,300,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	164,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		181,060,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				708 Laporan	209,516,160.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Bappeda Kota Lhokseumawe		209,516,160.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			13 Unit	182,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda	-	195,360,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		38,060,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	78,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		85,800,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		38,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Bappeda		33,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
141	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.	-			100 100 Persen	628,331,095.00						-	765,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-			7 Dokumen 2 Dokumen	406,197,905.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	517,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		16,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		27,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	55,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		60,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				12 Berita Acara	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		16,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	56,780,105.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		165,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				204 Usulan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	229,417,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		220,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			3 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	84,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		44,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				0 Orang	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				0 Buku	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			2 Dokumen	180,639,290.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	104,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	145,639,290.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		66,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		38,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-			3 Dokumen	41,493,900.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	60,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				0 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	41,493,900.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
142	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	-			100 100 Persen	493,552,710.00						-	604,746,439.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			10 Dokumen	159,283,220.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	-	223,300,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	6,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		7,150,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	19,283,220.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		33,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	6,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		7,150,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	67,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			9 Dokumen	178,500,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	-	210,100,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		72,600,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	53,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		44,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		16,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			21 Dokumen	155,769,490.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumaue	-	171,346,439.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	32,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		36,080,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	62,969,490.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		69,266,439.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		11,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		5,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		16,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						404,000,000.00							87,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
143	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan.	-			100 Persen 33.33 Persen 66.67 66.67 Persen	200,000,000.00						-	62,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			4 Dokumen	50,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemko Lhokseumawe	-	22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitban dan Peraturan	Jumlah Data Kelitban dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				3 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemko Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			1 Dokumen	75,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			3 Dokumen	75,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
144	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.	-			100 Persen 76 Persen	204,000,000.00						-	25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	-			1 Dokumen	60,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Pelatihan	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Invensi dan Inovasi	-			1 Dokumen	144,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				1 Laporan	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	84,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah						141,334,698,847.00							149,306,302,225.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						141,334,698,847.00							149,306,302,225.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02				KEUANGAN						141,334,698,847.00							149,306,302,225.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
145	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKD Kota Lhokseumawe	-			B (65,00) Point	15,803,548,613.00						-	14,159,348,613.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	25,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumaue	-	25,300,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	25,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		25,300,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	12,754,300,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	11,800,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	12,754,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		11,800,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	140,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumaue	-	20,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	567,394,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	572,394,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		15,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		75,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		80,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		15,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,394,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		2,394,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	170,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		170,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	210,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		215,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			12 Unit	695,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	120,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	450,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	125,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		120,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	1,434,654,613.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	1,434,654,613.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		9,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	440,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		440,500,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5		02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	985,154,613.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		985,154,613.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mitik Daerah	-		42 Unit	187,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	187,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	45,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		45,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		100,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			30 Unit	21,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	21,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		21,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
146	5		02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Penurunan SILPA Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di Alokasikan melalui IKD Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-		100,00 Persen 20,07 Persen 37,50 Persen 41,51 Persen 95,78 Persen	122,863,061,434.00					-		132,405,138,612.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-		17 Dokumen	2,756,698,434.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe	-	2,771,834,223.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	73,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		81,033,750.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	73,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		74,963,854.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5		02		2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	48,120,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		49,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	48,185,934.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		49,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	48,120,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		49,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	48,120,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		49,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	241,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		242,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	241,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		242,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			4 Dokumen	205,747,500.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		206,836,619.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			44 Orang	1,728,405,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1,729,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		283 Dokumen	870,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	975,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			5 Dokumen	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		40,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5		02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				170 Dokumen	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		210,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				29 Dokumen	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		170,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4 Dokumen	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		40,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		55,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				68 Dokumen	180,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		200,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		70,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				272 Orang	170,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		190,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			21 Dokumen	598,270,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	-	658,304,389.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				72 Laporan	31,080,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		34,265,700.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	31,920,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		35,191,800.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	52,920,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		58,344,300.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				40 Laporan	103,530,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		114,141,825.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	184,590,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		203,510,475.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	59,850,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		65,984,625.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	25,095,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		27,667,238.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	28,035,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		30,908,588.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	28,750,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		30,408,588.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	52,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		57,881,250.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengaturan Bantuan Keuangan	-			272 Laporan	118,638,093,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Desa/Gampong Dalam Lingkup Kota Lhokseumawe	-	128,000,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5		02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			272 Laporan	118,638,093,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Desa/Gampong Dalam Lingkup Kota Lhokseumawe		128,000,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
147	5		02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-		2,74 Persen	1,288,000,000.00						-	1,311,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		10 Dokumen	1,288,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumaue	-	1,311,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	52,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	62,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		65,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	52,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			5 Laporan	230,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		235,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	153,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		156,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			10 Laporan	550,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		550,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	52,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5		02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			34 Laporan	62,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		65,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	72,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemerintah Kota Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
148	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	-			78,25 Persen 8,37 Persen 90,14 Persen	1,380,088,800.00						-	1,430,815,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran Penerimaan PAD	-			70.39 Milyar	1,380,088,800.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha	-	1,430,815,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		55,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		20,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	332,438,800.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		335,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		200,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				10 Laporan	82,350,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		85,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5000 Obyek Pajak	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		65,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5		02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				100 Dokumen	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		100,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		35,000,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				500 Dokumen	189,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		198,450,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				6 Dokumen	66,150,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		69,457,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Dokumen	189,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		198,450,000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5		02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Laporan	66,150,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masyarakat dan Para Pelaku Usaha		69,457,500.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						8,042,769,906.00							10,732,467,144.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8,042,769,906.00							10,732,467,144.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5		03				KEPEGAWAIAN						6,786,566,706.00							7,677,007,144.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
149	5		03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		B-63.5 Nilai/Kategori		5,113,082,183.00						-		5,532,007,144.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5		03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	20,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-		27,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		27,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	4,494,542,823.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	4,410,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			97 Orang/bulan	4,494,542,823.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBELAJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		4,410,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 Bulan	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	16,537,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			15 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		16,537,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	110,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	276,908,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			80 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		88,200,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1650 Paket	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		34,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			40 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		24,255,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			365 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		1,653,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			40 Laporan	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		128,800,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	-			2 Jenis 7 Unit	60,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	88,200,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			20 Unit	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		88,200,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	313,799,360.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	531,448,394.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			40 Laporan	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		3,858,750.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			36 Laporan	116,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		170,887,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			2 Laporan	194,799,360.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		356,702,144.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	-			4 Jenis 12 Unit	104,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-	-	181,912,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			1 Unit	34,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		38,587,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-			1 Unit	25,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		38,587,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			5 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		66,150,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	-		38,587,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
150	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	-			15 Poin/Nilai 26.24 Persen 62.44 Persen	1,673,484,523.00						-	2,145,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			7 Jenis	320,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	594,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		30,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	180,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		300,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		230,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		22,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		12,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Periode Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	-			12 Bulan	200,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	186,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Dokumen	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		28,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		83,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				10 Dokumen	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		75,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	-			6 Jenis	923,484,523.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	970,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	715,956,335.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		745,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	47,528,188.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		25,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				100 Orang	120,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		130,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				50 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		70,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Periode Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			12 Bulan	230,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	395,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		270,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		35,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		45,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe		45,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,256,203,200.00								3,055,460,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
151	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	-			100 Persen 1.28 Persen	1,256,203,200.00							-	3,055,460,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis	-			1 Jenis	165,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	175,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			477 Orang	165,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	175,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			1 Jenis	1,091,203,200.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	2,880,460,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-			5 Laporan	1,091,203,200.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Pemko Lhokseumawe	-	2,880,460,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Inspektorat						7,931,647,243.00								14,355,716,065.00	INSPEKTORAT
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						7,931,647,243.00								14,355,716,065.00	INSPEKTORAT
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						7,931,647,243.00								14,355,716,065.00	INSPEKTORAT
152	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	6,452,480,032.00							-	8,656,816,782.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Eevalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	5,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe	-	15,018,000.00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe	-	15,018,000.00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Pelayanan Administrrasi Keuangan	-			12 Bulan	5,905,307,072.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe	-	6,079,669,512.00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			57 Orang/bulan	5,905,307,072.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe	-	6,079,669,512.00	INSPEKTORAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-			100 Persen	35,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumaue	-	355,427,402.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		5,007,402.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		350,420,000.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Pelaksanaan Administrtasi Umum	-			12 Bulan	61,280,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumaue	-	414,795,156.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		33,048,851.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		20,029,607.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		9,013,323.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,280,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		2,283,375.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		350,420,000.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	30,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumaue	-	750,900,000.00	INSPEKTORAT
	6		01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		750,900,000.00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	219,092,960.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumaue	-	358,823,194.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		2,002,961.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95,960,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		96,102,053.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		30,044,410.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111,132,960.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		230,673,770.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	196,800,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumaue	-	682,183,518.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		33,349,295.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	128,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		128,690,223.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		400,000,000.00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				12 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Inspektorat Kota Lhokseumawe		120,144,000.00	INSPEKTORAT
153	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakanlajut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	-			82,4 Persen	1,300,546,764.00						-	4,561,643,812.00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	-			88 Laporan	1,030,483,764.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan	-	3,710,587,769.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				7 Laporan	116,619,400.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		469,481,503.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				15 Laporan	106,102,300.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		420,909,086.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	141,885,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		466,729,404.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				25 Laporan	268,335,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		841,278,324.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				25 Laporan	289,043,564.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		888,444,856.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		200,240,000.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				10 Dokumen	88,498,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		423,504,596.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			16 Laporan	270,063,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan	-	851,056,043.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	26,120,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		133,750,308.00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	243,943,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		717,305,735.00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
154	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-			Level 3/3,2 Level/Point Level 3/3,3 Level/Point	178,620,447.00						-	1,137,255,471.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan	-			11 Rekomendasi	69,190,447.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan	-	607,770,851.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				10 Rekomendasi	31,035,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		343,387,571.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	38,155,447.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan		264,383,280.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	-			100 Persen	109,430,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD Kota Lhokseumawe	-	529,484,620.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	41,760,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD Kota Lhokseumawe		200,240,000.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	21,245,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD Kota Lhokseumawe		102,612,988.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	21,425,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD Kota Lhokseumawe		102,973,420.00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				34 perangkat daerah	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	OPD Kota Lhokseumawe		123,658,212.00	INSPEKTORAT	
						Kecamatan Banda Sakti						3,611,794,902.00							3,702,611,368.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3,611,794,902.00							3,702,611,368.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01				KECAMATAN						3,611,794,902.00							3,702,611,368.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
155	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Banda Sakti	-			B Predikat	3,426,591,970.00						-	3,364,886,368.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	12,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti	-	35,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		20,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		15,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	-			392 OB	2,938,368,070.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	-	2,202,484,675.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	2,938,368,070.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		2,202,484,675.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			3 Jenis	27,082,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	-	83,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	20,082,500.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		63,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		10,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		10,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-			5 Jenis	98,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti	-	159,165,473.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan beribawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		32,025,473.00	KECAMATAN BANDA SAKTI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		1,140,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	42,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		94,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Unit	52,941,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	-	370,350,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		300,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	24,246,300.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		28,350,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	28,695,100.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kantor Camat Banda Sakti		42,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	227,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti	-	398,833,720.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		5,250,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	46,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		60,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	178,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		333,583,720.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			35 Unit	70,860,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti	-	115,552,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		40,740,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		31,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		11,025,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	10,060,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Banda Sakti		16,537,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
156	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pembangunan	-			100 Persen	85,000,000.00						-	194,250,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Pembangunan	-			100 Orang	75,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti	-	178,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		31,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		147,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah PKK Gampong yang aktif	-			18 Gampong	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Tim Penggerak PKK Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti	-	15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Tim Penggerak PKK Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
157	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Mukim	-			100 Persen	10,000,000.00						-	21,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Jumlah Mukim yang ditingkatkan Kapasitasnya	-			2 Mukim	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti	-	21,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Orang	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti		10,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Ineum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Ineum Mukim				2 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti		10,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
158	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat	-			100 Persen	13,002,932.00						-	32,387,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	-			5 Kali	13,002,932.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti	-	32,387,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	3,002,932.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		16,637,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
159	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	-			100 Persen	33,200,000.00						-	38,587,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	-			18 Kasus	33,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti	-	38,587,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	33,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		38,587,500.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
160	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	44,000,000.00						-	51,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	-			18 Dokumen	44,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti	-	51,500,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				18 Dokumen	22,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		10,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				18 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		10,000,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		15,750,000.00	KECAMATAN BANDA SAKTI	
						Kecamatan Blang Mangat						2,899,941,803.00							4,109,138,024.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,899,941,803.00							4,109,138,024.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01				KECAMATAN						2,899,941,803.00							4,109,138,024.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
161	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Blang Mangat	-			CC Predikat	2,728,381,343.00						-	3,617,852,024.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	9,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat	-	30,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		20,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia	-			264 Orang	2,324,192,799.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan	-	1,977,598,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang/bulan	2,324,192,799.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan		1,977,598,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			3 Jenis	8,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan	-	79,440,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan		52,500,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	3,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan		16,940,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			5 Jenis	71,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat	-	227,350,200.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		51,710,200.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		44,500,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		30,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		1,140,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		100,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		14 Unit	22,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat	-	660,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		300,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		280,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		80,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		3 Laporan	238,298,544.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat	-	408,863,824.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		5,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			72 Laporan	45,298,544.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		45,298,544.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			312 Laporan	191,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		358,565,280.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		28 Unit	55,750,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat	-	234,600,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	33,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		63,800,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		25,800,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		100,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	6,950,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Blang Mangat		35,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
162	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Forum Pembangunan	-			100 Persen	79,360,460.00						-	241,286,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum pembangunan	-			100 Orang	70,360,460.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat	-	225,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0				0 0	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		25,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50,360,460.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		200,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah PKK Gampong yang aktif	-			22 Gampong	9,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat	-	16,286,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		16,286,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
163	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Mukim	-			100 Persen	6,000,000.00						-	100,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya	-			3 Mukim	6,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim	-	100,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Orang	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim		90,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				3 Laporan	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Mukim		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
164	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	-			100 Persen	11,000,000.00					-		40,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	-			5 Kali	11,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat	-	40,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		30,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
165	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	-			100 Persen	33,200,000.00					-		35,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	-			22 Kasus	33,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pimpinan Kecamatan Blang Mangat	-	35,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	33,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pimpinan Kecamatan Blang Mangat		35,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
166	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	42,000,000.00					-		75,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	-			22 Dokumen	42,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat	-	75,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		20,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7		01	06	2.01	0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			22 Dokumen	21,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			22 Dokumen	1,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7		01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat		35,000,000.00	KECAMATAN BLANG MANGAT
							Kecamatan Muara Satu					2,722,511,841.00							2,549,752,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					2,722,511,841.00							2,549,752,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01				KECAMATAN					2,722,511,841.00							2,549,752,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
167	7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Muara Satu	-		B Predikat	2,523,311,841.00						-	2,257,752,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		6 Dokumen	12,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	40,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		20,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		20,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	-		238 OB	2,064,110,329.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kecamatan Muara Satu	-	1,387,618,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			204 Orang/bulan	2,064,110,329.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kecamatan Muara Satu		1,387,618,291.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7		01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-		3 Jenis	31,500,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	50,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7		01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket	29,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		40,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-		4 Jenis	82,880,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	182,880,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			80 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		40,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1100 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2,880,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		2,880,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		110,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		10 Unit	23,962,700.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	180,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			12 Unit	23,962,700.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		180,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		3 Laporan	239,843,215.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	307,254,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30 Laporan	8,400,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		8,820,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			84 Laporan	86,700,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		88,434,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			708 Laporan	144,743,215.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		210,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		40 Unit	69,015,597.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	110,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		40,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			1 Unit	24,015,597.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		55,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			1 Unit	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
168	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase gampong unggulan aktif	-		9 Laporan	85,000,000.00						-	100,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Gampong dalam kecamatan	-		11 Laporan	75,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong	-	90,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		45,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	
	7		01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		45,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Gampong yang aktif	-			11 Laporan	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong	-	10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
169	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase gampong unggulan aktif	-			9 Laporan	27,000,000.00						-	35,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Jumlah Gampong dalam kecamatan	-			11 Laporan	27,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Desa, Masyarakat	-	35,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Desa, Masyarakat		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	03	7.04	0003	Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim				2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Desa, Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				2 Laporan	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Aparatur Desa, Masyarakat		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
170	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	-			100 Persen	10,000,000.00						-	25,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	-			5 Dokumen	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong	-	25,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	04	7.03	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		25,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
171	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	-			100 Persen	33,200,000.00						-	42,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penanganan di Kec	-			11 Laporan	33,200,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu	-	42,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	33,200,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Satu		42,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
172	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	44,000,000.00						-	90,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	-			11 Dokumen	44,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong	-	90,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	22,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	2,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur Gampong		50,000,000.00	KECAMATAN MUARA SATU
						Kecamatan Muara Dua						2,851,337,256.00							2,971,250,620.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,851,337,256.00							2,971,250,620.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01				KECAMATAN						2,851,337,256.00							2,971,250,620.00	KECAMATAN MUARA DUA
173	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Muara Dua	-			B Predikat	2,650,877,404.00						-	2,678,250,620.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	30,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	35,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		20,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia	-			350 OB	2,007,825,356.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kecamatan Muara Dua	-	1,713,555,028.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/bulan	2,007,825,356.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kecamatan Muara Dua		1,713,555,028.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-			6 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	10,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	-	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	-			3 Jenis	28,335,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	30,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	28,335,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		30,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	-			5 Jenis	131,140,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	167,880,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		35,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.150 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendukung stabilitas dan kemandirian di seluruh wilayah Aceh Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berakhlak Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		2,880,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	70,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		100,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			11 Unit	120,750,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	124,372,500.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	120,750,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		124,372,500.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	221,315,048.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	423,820,612.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				45 Laporan	5,250,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		5,512,500.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	48,365,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		88,434,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				708 Laporan	167,700,048.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		329,874,112.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			43 Unit	111,512,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua	-	173,622,480.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46,512,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		48,372,480.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		110,250,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7		01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kantor Camat Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
174	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Pembangunan	-			100 persen	90,000,000.00							-	156,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Pembangunan	-			100 Orang	80,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua	-	145,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua		35,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua		110,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah PKK Gampong yang aktif	-			17 Laporan	10,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Melakukan Pembinaan PKK	-	11,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Melakukan Pembinaan PKK		11,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
175	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Mukim	-			100 persen	14,279,759.00							-	26,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Jumlah Mukim yang ditingkatkan kapasitasnya	-			2 Mukim	14,279,759.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua	-	26,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Orang	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua		11,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				2 Laporan	4,279,759.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
176	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	-			100 Persen	14,000,000.00							-	26,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	-			5 Dokumen	14,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua	-	26,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		11,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
177	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	-			100 Persen	25,000,000.00						-	30,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penanganan di Kec	-			17 Laporan	25,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua	-	30,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		30,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
178	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			100 Persen	57,180,093.00						-	55,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	-			17 Dokumen	57,180,093.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua	-	55,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		10,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	13,180,093.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua		15,000,000.00	KECAMATAN MUARA DUA	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						5,216,004,336.00							5,516,840,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5,216,004,336.00							5,516,840,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5,216,004,336.00							5,516,840,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
179	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	2,940,527,208.00						-	2,999,840,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			15 Dokumen	20,000,000.00		-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		21,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	2,478,704,728.00		-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Gaji ASN	-		2,463,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				306 Orang/bulan	2,478,704,728.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Gaji ASN		2,463,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	98,590,000.00		-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum	-		115,240,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum		16,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum		11,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum		26,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum		1,240,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	47,450,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Bagian Umum		61,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	8		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	28,000,000.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	61,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	28,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pengadaan Barang Milik Daerah		61,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.08		Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	226,632,480.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pengediaan Jasa	-	228,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Penyediaan Jasa		76,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	151,632,480.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Penyediaan Jasa		152,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	88,600,000.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	111,600,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	33,300,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		34,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	26,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		26,600,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	28,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
180	8		01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	-		2.21 Persen	97,180,800.00						-	113,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	-		221 Persen	97,180,800.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan Paskibra	-	113,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				40 Orang	77,180,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan Paskibra		92,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan Paskibra		21,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
181	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	-			0.82 Rasio	1,431,296,328.00						-	1,741,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			8198 Persen	1,431,296,328.00			-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan bidang politik, bantuan parpol	-	1,741,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				21 Orang	550,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan bidang politik, bantuan parpol		610,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan bidang politik, bantuan parpol		31,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibra	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibra				2 Kegiatan	861,296,328.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan bidang politik, bantuan parpol		1,100,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
182	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	-			20.27 Persen	97,000,000.00						-	98,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			2 Laporan	97,000,000.00			-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pemantapan bantuan hibah ormas	-	98,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Orang	97,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pemantapan bantuan hibah ormas		98,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
183	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	-			4.37 Persen	50,000,000.00							-	51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	-			2 Laporan	50,000,000.00			-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Narkoba	-	51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kegiatan Narkoba		51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
184	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	-			100 Persen	600,000,000.00							-	514,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			5 Laporan	600,000,000.00			-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional	-	514,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional		41,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	150,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional		51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional		51,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	60,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional		61,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional		310,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama						3,260,805,336.00							3,260,350,336.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						3,260,805,336.00							3,260,350,336.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01				KEKHUSUSAN ACEH						3,260,805,336.00							3,260,350,336.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
185	9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,245,350,336.00						-	3,245,350,336.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			-	-	-	-	10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,782,493,856.00			-	-	-	-	1,782,493,856.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				228 Orang/bulan	1,782,493,856.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-	-	1,782,493,856.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	37,140,000.00			-	-	-	-	37,140,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	9,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	9		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,140,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,140,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	18,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1,299,166,480.00			-	-	-	-	-	1,299,166,480.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1,298,166,480.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1,298,166,480.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	116,550,000.00			-	-	-	-	-	116,550,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	109,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109,800,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,750,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6,750,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
186	9	01	03				PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	-	-		-	15,455,000.00					-	-	-	15,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9	01	03	7.01			Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	-	-		-	10,455,000.00				-	-	-	-	10,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	03	7.01	0003	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan				10 Orang	5,455,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	03	7.01	0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan				1 Laporan	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9	01	03	7.02			Silaturahmi Ulama-Ulama	-	-		-	5,000,000.00				-	-	-	-	5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9		01	03	7.02	0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah				20 Orang	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5,000,000.00	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
							Sekretariat Baitul Mal					7,575,535,858.00								8,349,704,136.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						7,575,535,858.00							8,349,704,136.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01				KEKHUSUSAN ACEH						7,575,535,858.00							8,349,704,136.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
187	9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	1,867,535,858.00					-		2,105,863,511.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Prosen	10,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	13,400,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	13,400,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 Prosen 28 Orang/bulan	1,110,131,802.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	1,248,223,511.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			27 Orang/bulan	1,110,131,802.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	1,248,223,511.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen 100 Prosen	100,140,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	156,140,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			50 Paket	24,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	30,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1000 Paket	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	20,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			3 Paket	5,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	5,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			12 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	1,140,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			40 Laporan	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	100,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional dan Sarana Prasaran Pendukung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			100 Prosen 15 Unit	30,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	50,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			10 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	50,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Periode Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	-			100 Persen 100 Prosen	538,664,056.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	553,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	2,600,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal		3,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	536,064,056.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal		550,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilttasi	-			14 Unit	78,600,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal	-	85,100,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal		35,100,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	27,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal		30,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				50 Unit	18,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Sekretariat Baitul Mal		20,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
188	9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF	-			100 Persen 100 Persen	5,708,000,000.00						-	6,243,840,625.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF	-			1 Dokumen 1 Dokumen	53,000,000.00			-	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	55,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun				10 Dokumen	53,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		55,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf Periode Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	-			50 Orang 100 Prosen	55,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	69,500,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf				50 Orang	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM				6 Dokumen	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal				5 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		24,500,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusan dan Pendayagunaan Ziswaf	Jumlah Peningkatan Pendistribusan dan Pendayagunaan ZISWAF Periode Peningkatan Pendistribusan dan Pendayagunaan ZISWAF	-			100 Persen 100 Prosen	5,600,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumaue	-	6,119,340,625.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	
	9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				705 Orang	1,305,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,500,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin				88 Orang	2,200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		2,400,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil				110 Orang	550,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		600,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf				10 Orang	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		35,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin				6 Orang	15,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		28,940,625.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah				84 Orang	108,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		110,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				135 Orang	192,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		195,400,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq				78 Orang	1,200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,250,000,000.00	SEKRETARIAT BAITUL MAL
						Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah						13,513,838,291.00							12,910,427,465.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,113,286,894.00							4,259,441,600.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5,113,286,894.00							4,259,441,600.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
189	1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah yang Mandiri	-			10.94 Persen	5,113,286,894.00						-	4,259,441,600.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dayah	-			12 Bulan	5,113,286,894.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik	-	4,259,441,600.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun				15 Unit	1,168,190,500.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		550,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya				2297 Orang	3,543,241,600.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		3,500,241,600.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan				25 Peserta Didik	243,606,300.00	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		120,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan				30 Satuan Pendidikan	19,205,800.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		26,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan				65 Satuan Pendidikan	37,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		17,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya				66 Satuan Pendidikan	50,042,694.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		17,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia				10 Buku	10,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		5,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/ Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/ Pesantren yang Terakreditasi				7 Satuan Pendidikan	22,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		12,700,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	1	01	07	7.01	0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing	Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik		11,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						8,400,551,397.00							8,650,985,865.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01				KEKHUSUSAN ACEH						8,400,551,397.00							8,650,985,865.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
190	9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	-			61.15 Persen	4,832,043,071.00						-	4,928,985,865.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	21,500,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	23,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		13,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				5 Dokumen	8,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		10,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			651 Orang/bin	3,920,503,551.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	3,745,796,345.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/bulan	3,920,503,551.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		3,745,796,345.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	25,000,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	55,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		55,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	124,140,000.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	136,640,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
																			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	18,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		19,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				420 Paket	8,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		11,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		10,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1,140,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		1,140,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	90,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		95,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			18 Unit	100,000,000.00			Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	240,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		110,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		20,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		110,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			256 Laporan	521,999,520.00			Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	524,149,520.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2,700,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		2,850,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	370,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		370,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	148,799,520.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		150,799,520.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			57 Unit	118,900,000.00			Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD	-	204,400,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	37,100,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		47,100,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	39,800,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		40,800,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyiaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		98,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	17,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	SKPD		18,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
191	9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Angka Melek Al-Qur'an	-			85.41 Persen	3,568,508,326.00						-	3,722,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelatihan Wawasan Keislaman	-			350 Orang	175,000,000.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik	-	198,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.01	0001	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris				25 Orang	25,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik		35,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.01	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam				30 Orang	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik		40,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam				25 Orang	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik		78,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siwi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siwi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya				100 Orang	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik		45,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Masyarakat yang mendapat Pemahaman Al-Qur'an	-			95 Persen	980,000,000.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah	-	1,000,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.02	0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan				2 Lembaga	100,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		100,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				100 Orang	880,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		900,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Jumlah laporan Peningkatan Toleransi Umat Beragama Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	-			2 Laporan 12 Bulan	658,570,326.00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib	-	609,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam				1 Dokumen	130,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		138,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.04	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkatkan Kualitasnya				25 Orang	105,409,387.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		38,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.04	0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Mengikuti Pembinaan				100 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		65,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan				66 Orang	108,160,939.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		45,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah			15		16
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	9	01	02	7.04	0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina				6 Gampong	200,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		250,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.04	0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi				5 Unit	35,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		38,500,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya				3 Unit	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib		35,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Pengkajian Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	-			5 Laporan	1,083,000,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah	-	1,149,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman				1 Laporan	30,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		30,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam				1 Laporan	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		50,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan				20 Keluarga	40,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		46,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah/Tajhiz Mayat				45 Orang	75,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		80,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla				30 Orang	888,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		888,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.05	0008	Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah				25 Orang	50,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		55,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Persenatse Penguatan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	-			12 Bulan	591,938,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat	-	670,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam				1 Laporan	57,500,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat		100,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam				6 Laporan	240,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat		250,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah				350 Orang	294,438,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat		320,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Persentase Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	-			95 Persen	80,000,000.00			Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah	-	95,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
	9	01	02	7.07	0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman				2 Lembaga	80,000,000.00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Pelaksanaan Syariat Islam Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah		95,000,000.00	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	
						J U M L A H						816,489,376,141.11							767,037,850,822.00		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/ pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran daerah, indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah dan indikator kinerja kunci yang tertuang pada RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dan RKPK 2026, serta indikator yang disepakati dalam Rakotekbang tahun 2025 ditampilkan pada tabel-tabel berikut ini.

6.1 Indikator Makro Tahun 2026

Indikator makro merupakan kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian	Target		
			2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	RKPK 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80.89	81.65-83.65	81.65-82,00	81,95-82,30
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.40-4.50	4.40-4.50	4.53-4.80
3	PDRB Perkapita	Rp.juta	59.12	59.08	62.38	65.48
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	4.87	-	4.92	4.94
5	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	10.33-10.13	10.33-10.13	9.00-9.81
6	Tingkat Pengangguran	%	8.47	7.98-7.48	7.98-7.48	7.75-7.85
7	Indeks Gini	Nilai	0.326	0.293	0.293	0.295-0.322
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69.40	65.80	70.00	73.35-73.85

Sumber : BPS 2025, DLH 2025 dan Hasil Proyeksi 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJMK Lhokseumawe 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi tertinggi dan merupakan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome.

Pencapaian IKU didukung oleh kinerja outcome atau intermediate outcome, yang pada umumnya merupakan hasil dari crosscutting beberapa urusan dalam bentuk program sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	Target		
			2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	RKPK 2026
	Indikator Tujuan					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.40-4.50	4.40-4.50	4.53-4.80
2	Indeks Gini	Nilai	0.326	0.293	0.293	0.295-0.322
	Indikator Sasaran					
3	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.24	-	23.40	23.69
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	16.70	-	16.72	16.75
5	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.30	-	9.42	9.54
6	Indeks Ketahanan Pangan	%	83.03		84.89	85.32
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) (PDRB)	%	39.65	-	40.53	40.95
8	PDRB per kapita	(Rp. juta)	59.12	-	62.38	65.48
9	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.30	-	2.40	2.42
10	Total Kredit/PDRB	%	46.67	-	47.60	48.12
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	7.98-7.48	7.98-7.48	7.75-7.85
12	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Rp. Juta)	135,96	-	140.50	142.60
	Indikator Tujuan					
13	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80.89	81.65-83.65	81.65-82.00	81,95-82,30
	Indikator Sasaran					
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.55	15.39	15.92	16.00
15	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.31	11.50	11.50	11.58
16	Angka Literasi SD	%	56.72	-	59.22	61.72
17	Angka Numerasi SD	%	49.44	-	52.34	55.24
18	Angka Literasi SMP	%	68.34	-	69.44	70.54
19	Angka Numerasi SMP	%	59.94	-	61.44	62.94
20	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.93	74.95	74.95	75.12

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P-RKPK 2025	RKPK 2026
21	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20.80	-	19.00	18.00
22	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	10.33-10.13	10.33-10.13	9.00-9.81
23	Pengeluaran Perkapita	Rp.	12.694	-	13.263	13.832
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	39.55	-	47.09	48.65
25	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Angka	65.86	-	67.00	68.00
26	Indeks Desa Membangun	Angka	0.7762	-	0.7846	0.7910
27	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.331	-	0.310	0.300
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96.59	-	96.62	96.95
29	Nilai Kota Layak	Angka	616.47	-	720	730
30	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	51.53	-	44.52	45.19
	Indikator Tujuan					
31	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87.28	-	88.15	89.03
	Indikator Sasaran					
32	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	62.19	-	67.76	74.30
33	Tingkat Pelayanan Jalan	Level	C 0.50	-	C 0.50	C 0.50
34	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	81.79	69.88	81.88	81.96
35	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69.40	65.80	70.00	73.35-73.85
36	Indeks Risiko Bencana	Angka	136.99	-	134.65	132.86
	Indikator Tujuan					
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Point	B 67.70	B 60.01	BB 71.30	BB 72.85
	Indikator Sasaran					
38	Nilai SAKIP	Kategori/ Point	B 61.12	B 61.00	B 68.40	BB 71.20
39	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
40	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	79.46 Sedang	-	80.46	81.67

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P-RKPK 2025	RKPK 2026
41	Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	Angka	64.37	-	70.00	72.50
42	Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.031	Level 3	Level 3 3.200	Level 3 3.300
43	Indeks Pelayanan Publik	Angka	B 3.94	-	A 4.20	A 4.28
44	Indeks SPBE	Angka	2.80 Baik	-	3.00	3.10
45	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	43.66	-	50.00	52.36
	Indikator Tujuan					
46	Indeks Pembangunan Syariah	Angka	83.91	80.95	84.24	84.91
	Indikator Sasaran					
47	Indeks Pembangunan Syariat	Angka	83.91	80.95	84.24	84.91
48	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	26.9	-	26.9	40.70

Sumber : BPS 2025, OPD terkait 2025 dan Hasil Proyeksi 2025

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan dicapai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Indikator Kinerja Daerah disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum. Adapun target masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P-RKPK 2025	RKPK 2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83.03	-	84.89	85.32
2	Prevalensi Ketidakukupan Konsumsi Pangan	%	7.08	-	5.65	5.50
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	17.07	-	41.38	67.33
4	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	-	-	10.00	35.00
5	Indeka Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69.40	65.80	70.00	73.35-73.85

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9.43	-	9.43	9.45
7	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%		-	0.1	15.2
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0.92	-	1.18	1.52
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	136.99	-	134.65	132.86
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.40	-	0.45	0.50
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.3	-	1.36	1.40
12	Rasio Penduduk	%	98.72	-	98.80	98.80
13	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	1.097	-	1.123	1.15
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.40- 4.50	4.40- 4.50	4.53- 4.80
2	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	10.33- 10.13	10.33- 10.13	9.00- 9.81
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59.12	-	62.38	65.48
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	-	7.98- 7.48	7.75- 7.85
5	Indeks Gini	Angka	0.326	0.283	0.283	0.295- 0.322
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80.89	81.65- 83.65	81.65- 82.00	81.95- 82.30
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.93	74.95	74.95	75.12
8	Prevalensi Stunting	%	20.80	-	19.00	18.00
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	27.96	-	25.00	22.00
10	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment success rate)	%	145.4	-	100	100
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88.85	-	90.00	92.00
12	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	93.28	-	93.50	93.65
13	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.31	15.39	11.50	11.58
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.55	11.50	15.92	16.00
15	Angka Literasi/ Numerasi	Angka				
	- Literasi SD	Angka	56.72	-	59.22	61.72
	- Numerasi SD	Angka	49.44	-	52.34	55.24
	- Literasi SMP	Angka	68.34	-	69.44	70.54
	- Numerasi SMP	Angka	59.94	-	61.44	62.94
16	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	90.63	-	93.18	95.73
17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 (SD/SMP)	Angka	98.95	-	99.00	99.05
18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Angka	41.35	-	51.08	57.57
19	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	60.34	-	60.76	61.17

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
20	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	69.71	-	74.77	75.52
21	Iklim Inklusivitas SD	Angka	58.07	-	60.57	63.07
22	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	56.55	-	58.95	61.35
23	Iklim Keamanan SD	Angka	74.60	-	75.50	76.40
24	Iklim Keamanan SMP	Angka	71.06	-	72.56	74.06
25	Iklim Kebinekaan SD	Angka	71.47	-	72.47	73.47
26	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	69.77	-	70.77	71.77
27	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	58.41	-	60.25	62.68
28	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	39.55	-	47.09	48.65
29	Nilai Kota Layak Anak	Angka	616.47	-	720	730
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	65.86	-	66.65	67.12
31	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	67.6	-	68.6	69.6
32	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.28	-	2.28	2.27
33	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (ASFR 15-19)	Angka	8.5	-	7.7	7.0
34	Demand Satisfied	%	8.47	-	76.10	77.30
35	Persentase Kehamilan tidak direncanakan (KTD)	%	14.3	-	12.0	10.4
36	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.331	-	0.310	0.300
37	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96.59	-	96.62	96.65
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan	%	46.45	-	45.8	46.2
2	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.24	-	23.40	23.69
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16.70	-	16.72	16.75
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2.30	-	2.40	2.42
5	Rasio Kewirausahaan	%	7.36	-	7.76	8.16
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64.61	-	64.90	65.20
7	Indeks Inovasi Daerah	%	43.66	-	50.00	52.36
8	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.30	-	9.42	9.54
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kab/Kota	%	5.92	-	5.93	5.90
10	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	%	45.76	-	46.31	47.60
11	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten/kota	%	6.10	-	6.15	6.25
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	39.65	-	40.53	40.95
13	Ekspor Barang dan Jasa	%	0.42	-	1.00	1.20
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	62.19	-	67.76	74.30

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81.79	69.88	81.88	81.96
16	Indeks Desa Membangun	Angka	0.7762	-	0.7846	0.7910
17	Persentase Desa Mandiri	%	36.76	-	39.70	42.65
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.73	-	0.75	0.76
19	Tingkat Inflasi	%	2.73	-	2.5 ± 1	2.5 ± 1
20	Total Kredit/PDRB	%	46.67	-	47.60	48.12
21	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	40.90	-	41.35	41.97
22	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3.88	-	3.91	3.93
23	Indeks Zakat Nasional	Angka	0.65	-	0.68	0.71
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka/	B 67.70	B 60.01	BB 71.30	BB 72.85
2	Nilai SAKIP	Angka/	B 61.12	B 61.00	B 68.40	BB 71.20
3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77.72	-	78.12	79.32
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2.80	-	3.00	3.10
5	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1.69 Kurang	-	1.70 Kurang	1.80 Cukup
6	Indeks Pelayanan Publik	Angka	B 3.94	-	A 4.20	A 4.28
7	Indeks kualitas Kebijakan	Angka	n.a	-	50 Kurang	50 Kurang
8	Indeks Integritas Nasional	Angka	64.37	-	70.52	71.35
9	Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.031	-	Level 3 3.200	Level 3 3.300
10	Persentase Penegakan Perda	%	95.00	-	96.00	97.00
11	Persentase Capaian Aksi HAM	%	67.50	-	67.60	67.70
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.75	-	3.90	4.10
13	Indeks Pembangunan Syariah	Angka	83.91	80.95	84.24	84.91
14	Persentase Dayah Mandiri	%	7.81	-	7.81	10.9
15	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	26.90	-	26.9	40.7
16	Jumlah Konflik SARA	Angka	0	-	0	0
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	90.63	-	93.18	95.73
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99.97	-	99.98	99.99
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	%	96.37	-	96.38	96.39

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	98.44	-	100	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Rasio	0.02	-	0.07	0.12
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	0.61	-	0.62	0.63
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.20	-	0.25	0.30
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	18.8	-	41.38	67.33
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93.71	-	93.71	93.89
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	0.73	-	0.75	0.77
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	64.40	-	66.40	68.9
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0.323	-	0.325	0.326
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	-	100	100
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	%	0	-	0	0.25
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi	%	0	-	0	25.00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	-	0.64	0.7
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	18.2	-	18.16	18.11
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	64.40	-	65.06	65.73
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	-	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	-	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101.12	-	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	0.11	-	0.1	0.1
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	-	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	60.52	-	60	61
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	16.68	-	16	16
F	Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	-	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	-	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
G	Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	-	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5.95	-	7.02	7.65
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		5486358	-	140.50	142.60
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3.42	-	46.31	46.71
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	9.30	-	10.2	11.65
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3.06	-	3.2	3.5
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	100	-	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	35.0	-	32.1	30.5
I	Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0	-	13.2	13.5
J	Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	n.a	-	9.25	9.34
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	n.a	-	-	-
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	n.a	-	-	-
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan	%	n.a	-	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
	Maksimum dan Tanah Absentee					
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	n.a	-	-	-
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	n.a	-	100	100
K	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	69.40	-	70.00	73.35-73.85
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	0.31	-	100	100
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	-	100	100
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Perekaman KTP elektronik	%	98.41	-	99.10	99.65
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	41.47	-	43.00	47.00
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98.69	-	98.90	99.10
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	-	2	3
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	-	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	17.64	-	20.4	25.32
N	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2.32	-	2.28	2.27
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	58.47	-	97.96	98.00
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3.39	-	3.20	3.00
O	Perhubungan					
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0.50	-	0.50	0.50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
P	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	-	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	%	100	-	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	97.65	-	97.66	97.67
Q	Koperasi, usaha kecil dan menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	9.61	-	10.3	13.2
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5.06	-	5.10	5.12
R	Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	%	111.7	-	0.10	0.11
S	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	18	-	19	19.5
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	52	-	55	55.5
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	47.7	-	23	48
T	Statistik					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	-	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	-	100	100
U	Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi	%	0	-	0.31	0.31
V	Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	44	-	45	45

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
W	Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	68.15	-	69.31	70.11
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	58.41	-	65.32	67.42
X	Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Angka	5.77	-	8.2	10.6
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Angka	0	-	2	3
Y	Kelautan dan Perikanan					
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	102.6	-	100	100
Z	Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	-	0.50	1.00
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-3.86	-	1.00	2.00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	127.6	-	100	100
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.30	-	2.40	2.42
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	11.90	-	12.00	12.50
AA	Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	%	5.5	-	5.5	5.6
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	%	125.9	-	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
BB	Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	-	30.21	32.1
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	13.59	-	15.3	17.1
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76.22	-	78.2	79.4
CC	Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota & nbsp;	%	7.15	-	7.2	7.3
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	107.68	-	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	-	5	6
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	-	1	1.5
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	%	0	-	1	1.1
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Angka	0	-	100	100
DD	Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	35.64	-	44.35	43.38
2	Rasio PAD	%	8.14	-	8.25	8.37

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian		Target	
			2024	RKPK 2025	P-RKPK 2025	RKPK 2026
EE	Pengawasan					
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3
FF	Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	65.29	-	73.55	63.83
2	Opini Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	-	WTP	WTP
GG	Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	n.a	-	5.09	5.59
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	n.a	-	85.34	85.84
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Angka	n.a	-	89.65	90.15
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	n.a	-	14.54	15.04
HH	Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82.92	-	47.77	51.18
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21.5	-	21.67	22.06
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0	-		
II	Manajemen Keuangan					
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1.22	-	1.22	1.2
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD	%	9.27	-	8.32	7.12

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian	RKPK 2025	Target	
			2024		P- RKPK 2025	RKPK 2026
	terhadap anggaran PAD dalam APBD					
3	Manajemen Aset		3	-		
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	2.6	-	2.5	2.4
JJ	Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	96.31	-	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	83.3	-	100	100

Sumber : BPS 2025, OPD terkait 2025 dan Hasil Proyeksi 2025

BAB VII

PENUTUP

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan Aceh serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026. Selain itu, RKPK Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 menjadi pedoman untuk Menyusun (KUA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan tahun kedua untuk pelaksanaan Perencanaan Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Aceh dan Pusat untuk periode 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan serta mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SAYUTI ABUBAKAR



*Kerija Bagah
Rakyat Ceudah
Lhokseumawe Meugah*